



PEMERINTAH
KABUPATEN SIDOARJO

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2025

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025 - 2029**





**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 2 TAHUN 2025**

**TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2025-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

- Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 90);
 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2023- 2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 123);
 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 124);
 22. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 5 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
dan
BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah Rencana Tata Ruang yang bersifat umum dari Wilayah Kabupaten, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah nasional, Rencana Tata Ruang pulau/kepulauan, Rencana Tata Ruang kawasan strategis nasional, dan RTRW Provinsi.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
15. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
16. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
17. Strategi pembangunan adalah langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
18. Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
19. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun yang menjabarkan :
 - a. Visi dan Misi, Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih; dan

- b. Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan Pembangunan dan Program Pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (2) Penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada RPJPD dan RPJMN serta memperhatikan :
 - a. RPJMD Provinsi Jawa Timur; dan
 - b. RTRW;
- (3) Penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- (4) Penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pendekatan :
 - a. Teknokratik;
 - b. Partisipatif;
 - c. Politis;
 - d. atas-bawah dan bawah-atas;
 - e. holistik-tematik;
 - f. integratif; dan
 - g. spasial.

Pasal 3

- (1) Penetapan RPJMD dimaksudkan sebagai pedoman dalam Penyusunan Renstra-PD, RKPD, Renja-PD, dan perencanaan penganggaran.
- (2) Penetapan RPJMD mempunyai tujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten serta dengan kabupaten/kota yang berbatasan.

Pasal 4

- (1) Sistematika RPJMD meliputi:
 - a. Bab I : Pendahuluan;
 - b. Bab II : Gambaran Umum Daerah;
 - c. Bab III : Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
 - d. Bab IV : Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - e. Bab V : Penutup
- (2) Isi beserta uraian sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan perencanaan RPJMD;
 - b. pelaksanaan RPJMD; dan
 - c. hasil RPJMD.

- (3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. terjadinya bencana alam;
 - b. terjadinya goncangan politik;
 - c. terjadinya krisis ekonomi;
 - d. terjadinya konflik sosial;
 - e. terjadinya gangguan keamanan;
 - f. terjadinya pemekaran daerah; atau
 - g. terjadinya perubahan kebijakan nasional.
- (3) Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, perubahan target kinerja tahunan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Penyusunan perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) RPJMD sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dapat diberlakukan sebagai RPJMD transisi yang menjadi pedoman penyusunan RKPD Tahun 2030 sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2030-2034 yang memuat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APBD tahun pertama periode pemerintahan Kepala Daerah terpilih berikutnya.
- (3) Apabila terjadi perubahan Nomenklatur Perangkat Daerah, maka penanggungjawab penyelenggaraan urusan pemerintahan menyesuaikan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah beserta peraturan pelaksanaan.

Pasal 8

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2025 dinyatakan tetap berlaku dan diakui sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam RPJMD ini.
- (2) Penyesuaian terhadap dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan daerah dilakukan paling lambat pada penyusunan RKPD Tahun 2026.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 20 Agustus 2025

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SUBANDI

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 20 Agustus 2025



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2025 NOMOR 2 SERI D

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 153-2/2025

Daftar Isi

Sampul Depan

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	xiii

BAB I	PENDAHULUAN	I-1
1.1.	Latar Belakang	I-1
1.2.	Dasar Hukum Penyusunan	I-4
1.3.	Hubungan Antar Dokumen	I-10
1.3.1.	Hubungan Antara RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029 dengan Visi Indonesia Emas 2045.....	I-11
1.3.2.	Hubungan Antara RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029 dengan Asta Cita Presiden dan RPJMN Tahun 2025-2029	I-14
1.3.3.	Hubungan Antara RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2045	I-16
1.3.4.	Hubungan Antara RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Jawa Timur Tahun 2025-2029	I-19
1.3.5.	Hubungan Antara RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029 dengan RTRWN Tahun 2008-2028.....	I-31
1.3.6.	Hubungan Antara RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029 dengan RTRW Jawa Timur Tahun 2011-2031	I-32
1.3.7.	Hubungan Antara RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029 dengan RTRW Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024-2044	I-37



1.3.8.	Keselarasan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 - 2029 dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).....	I-43
1.3.9.	Keselarasan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025- 2029 dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).....	I-47
1.3.10.	Keselarasan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025- 2029 dengan RIPJPID 2025-2030	I-48
1.3.11.	Keselarasan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025- 2029 dengan Rencana Sektorial	I-51
1.4.	Maksud dan Tujuan	I-55
1.4.1.	Maksud.....	I-55
1.4.2.	Tujuan.....	I-55
1.5.	Sistematika Penulisan	I-56
BAB II	GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH	II-1
2.1.	Gambaran Umum Kondisi Daerah.....	II-1
2.1.1.	Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1.1.	Posisi dan Peran Strategis Daerah	II-1
2.1.1.2.	Potensi Pengembangan Wilayah.....	II-14
2.1.1.3.	Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	II-18
2.1.1.4.	Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan	II-29
2.1.1.5.	Lingkungan Hidup Berkualitas	II-35
2.1.1.6.	Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	II-45
2.1.1.7.	Aspek Demografi.....	II-55
2.1.2.	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-68
2.1.2.1.	Kesejahteraan Ekonomi	II-68
2.1.2.2.	Kesehatan Untuk Semua.....	II-76
2.1.2.3.	Pendidikan Berkualitas Yang Merata	II-83



2.1.2.4.	Perlindungan Sosial Yang Adaptif	II-87
2.1.2.5.	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	II-88
2.1.2.6.	Ekonomi Syariah	II-91
2.1.2.7.	Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender dan Masyarakat Inklusif	II-92
2.1.3.	Aspek Daya Saing Daerah	II-94
2.1.3.1.	Daya Saing Sumber Daya Manusia	II-94
2.1.3.2.	Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi	II-95
2.1.3.3.	Penerapan Ekonomi Hijau.....	II-101
2.1.3.4.	Transformasi Digital	II-102
2.1.3.5.	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global.....	II-103
2.1.3.6.	Perkotaan dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan	II-105
2.1.3.7.	Stabilitas Ekonomi Makro.....	II-108
2.1.4.	Aspek Pelayanan Umum	II-111
2.1.4.1.	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas Dan Adaptif	II-111
2.1.4.2.	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansional	II-117
2.1.4.3.	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Budaya Gentar Kawasan	II-121
2.1.4.4.	Kinerja Urusan Pemerintah Daerah.....	II-122
2.1.4.5.	Standar Pelayanan Minimum	II-208
2.2.	Gambaran Keuangan Daerah	II-215
2.2.1.	Evaluasi Kinerja Keuangan	II-216
2.2.1.1.	Kinerja Pelaksanaan APBD	II-217
2.2.1.2.	Kinerja Neraca Daerah	II-242
2.2.2.	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	II-248
2.2.2.1.	Proporsi Penggunaan Anggaran	II-248
2.2.2.2.	Analisis Pembiayaan	II-250
2.2.3.	Kerangka Pendanaan	II-255



	2.2.3.1	Proyeksi Pendapatan dan Belanja	II-255
2.3.		Permasalahan Pembangunan Daerah	II-266
	2.3.1	Permasalahan Pembangunan Makro Daerah.....	II-267
	2.3.2	Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah.....	II-272
2.4.		Isu- Isu Strategis	II-295
	2.4.1.	Isu Strategis Global/Internasional	II-296
		2.4.1.1 Isu <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) ..	II-296
		2.4.1.2 Megatrend Dunia	II-297
	2.4.2.	Isu Strategis Nasional	II-301
		2.4.2.1 Telaah Terhadap Arahan RPJPN Tahun 2025-2045 pada Tahap Pertama (2025-2029)	II-302
		2.4.2.2 Telaah Terhadap Arahan RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 pada Tahap Pertama (Tahun 2025-2029)	II-305
		2.4.2.3. Telaah Terhadap Arahan RPJPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2045	II-307
	2.4.3	Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029	II-308

BAB III	VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....	III-1
3.1.	Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran.....	III-1
	3.1.1 Visi	III-2
	3.1.2 Misi	III-4
	3.1.3 Tujuan dan Sasaran	III-7
3.2.	Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	III-15
	3.2.1. Strategi Pembangunan	III-16
	3.2.2. Arah Kebijakan	III-18
	3.2.2.1. Arah Kebijakan Pembangunan Berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPJMD	III-18



3.2.2.2 Pentahapan Pembangunan Kabupaten

Sidoarjo III-23

3.2.2.3. Arah Kebijakan Tematik RPJMD III-27

3.2.3. Program Pembangunan Daerah III-34

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN

KINERJA PENYELENGGARAAN DAERAH..... IV-1

4.1 Program Perangkat Daerah IV-1

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah IV-27

BAB V PENUTUP..... V-1

5.1. Pedoman Transisi..... V-1

5.2. Kaidah Pelaksanaan..... V-1

Daftar Tabel

Tabel 1.1	Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029.....	I-20
Tabel 1.2	Kebijakan RTRW Jawa Timur yang Terkait dengan Pengembangan Kabupaten Sidoarjo	I-34
Tabel 1.3	Keselarasan Dokumen RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025- 2029 dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).....	I-43
Tabel 1.4	Rekapitulasi Capaian Indikator TPB kabupaten Sidoarjo	I-46
Tabel 1.5	Keselarasan Dokumen RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025- 2029 Dengan KLHS RPJMD Tahun 2025-2029	I-47
Tabel 1.6	Keselarasan Dokumen RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025- 2029 dengan RIPJPID Tahun 2025 – 2030	I-49
Tabel 1.7	Keselarasan Dokumen RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2025-2029 Dengan Rencana Sektoral	I-52
Tabel 2.1	Jumlah Desa/Kelurahan Kabupaten Sidoarjo 2024.....	II-2
Tabel 2.2	Persentase Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024	II-7
Tabel 2.3	Kondisi Kemiringan Lereng Kabupaten Sidoarjo	II-8
Tabel 2.4	Statistik Geografi dan Iklim di Sidoarjo Tahun 2024.....	II-12
Tabel 2.5	Luas Panen, Produktivitas, Produksi Padi dan Produksi Beras Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013-2024	II-19
Tabel 2.6	Daya Dukung Pangan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023-2029 .	II-21
Tabel 2.7	Daya Dukung Pangan Per Kecamatan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023-2029.....	II-23
Tabel 2.8	Daya Dukung Air Per Kecamatan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023-2029.....	II-27
Tabel 2.9	Akses Rumah Tangga terhadap Air Bersih Perpipaan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020-2024.....	II-31
Tabel 2.10	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Kabupaten Sidoarjo	



Tahun 2020-2024.....	II-34
Tabel 2.11 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo	
Tahun 2020-2024.....	II-40
Tabel 2.12 Perkembangan Komponen Persentase Sampah Terkelola	
Tahun 2020-2024.....	II-42
Tabel 2.13 Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023-2024	II-44
Tabel 2.14 Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan	
Sampah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023-2024	II-44
Tabel 2.15 Capaian Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kabupaten	
Sidoarjo Tahun 2020-2024.....	II-53
Tabel 2.16 Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Sidoarjo	
Tahun 2024	II-54
Tabel 2.17 Jumlah Penduduk Per Kecamatan Menurut Jenis Kelamin	
Tahun 2020-2024.....	II-57
Tabel 2.18 Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin (%)	
Tahun 2024	II-59
Tabel 2.19 Rasio Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Per Kecamatan ...	II-60
Tabel 2.20 Penduduk Per Kecamatan Menurut Pendidikan Tahun 2024 ...	II-62
Tabel 2.21 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Sidoarjo Tahun	
2024.....	II-63
Tabel 2.22 Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten Sidoarjo Tahun	
2024.....	II-65
Tabel 2.23 Proyeksi Penduduk Menurut Kategori Usia Kabupaten Sidoarjo	
Tahun 2025-2030 (dalam ribu).....	II-67
Tabel 2.24 PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Sidoarjo	
Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)	II-69
Tabel 2.25 PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Sidoarjo	
Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)	II-70
Tabel 2.26 Prevalensi Stunting Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020-2024.....	II-79
Tabel 2.27 Lokasi Prioritas Penanganan Stunting Kabupaten Sidoarjo	
Tahun 2024	II-80

Tabel 2.28	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020-2024.....	II-82
Tabel 2.29	Indeks Kompetensi Minimum Literasi dan Numerasi Siswa SD dan SMP di Kabupaten Sidoarjo 2022-2024.....	II-84
Tabel 2.30	Capaian Kinerja Indeks Pelestarian Budaya Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023-2024.....	II-91
Tabel 2.31	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2024.....	II-93
Tabel 2.32	Penilaian Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020-2024	II-95
Tabel 2.33	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020-2024.....	II-95
Tabel 2.34	Pertumbuhan Kunjungan Wisata Domestik dan Mancanegara	II-100
Tabel 2.35	Persentase Ekspor Barang dan Jasa Terhadap PDRB	II-101
Tabel 2.36	Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020-2024	II-103
Tabel 2.37	Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020-2024	II-104
Tabel 2.38	ICOR Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020-2024	II-108
Tabel 2.39	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020-2024.....	II-110
Tabel 2.40	Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020-2024	II-112
Tabel 2.41	Penilaian Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020-2024	II-113
Tabel 2.42	Penilaian Evaluasi SAKIP Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020-2024	II-114
Tabel 2.43	Opini BPK Tahun 2020-2024	II-115
Tabel 2.44	Indeks Integritas Nasional Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2024	II-116
Tabel 2.45	Persentase Capaian Aksi HAM Kabupaten Sidoarjo Tahun	



2021-2024	II-120
Tabel 2.46 Angka Partisipasi Sekolah	II-122
Tabel 2.47 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesehatan	II-130
Tabel 2.48 Jumlah Sarana Prasarana Kesehatan Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020-2024	II-131
Tabel 2.49 Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020-2024	II-133
Tabel 2.50 Indeks Infrastruktur Keciptakarya Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020-2024	II-136
Tabel 2.51 Persentase Kasus Pelanggaran Yang Ditangani Tahun 2020 -2024	II-142
Tabel 2.52 Data 26 Jenis PMKS Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019-2023....	II-144
Tabel 2.53 Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024	II-147
Tabel 2.54 IPA, IPHA, dan IPKA Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022-2023...	II-152
Tabel 2.55 Persentase Kasus Kekerasan dan <i>Trafficking</i> Perempuan dan Anak yang Diselesaikan Tahun 2020-2024	II-154
Tabel 2.56 Perkembangan Komponen Persentase Sampah Terkelola Tahun 2020-2024	II-162
Tabel 2.57 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	II-163
Tabel 2.58 Persentase Penduduk Ber-KTP Elektronik dan Ber-KK Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020-2024.....	II-165
Tabel 2.59 Persentase Desa Mandiri Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020-2024	II-168
Tabel 2.60 Persentase Desa Maju Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020-2024	II-169
Tabel 2.61 Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2024.....	II-169
Tabel 2.62 Indeks Infrastruktur Perhubungan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020-2024	II-173
Tabel 2.63 Jumlah Alat Kelengkapan Jalan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 (Per Kecamatan)	II-175
Tabel 2.64 Daftar Pembangunan Perlintasan Kereta Api Tahun 2024.....	II-177



Tabel 2.65	Daftar Rambu Perlintasan Kereta Api Tahun 2024	II-178
Tabel 2.66	Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 -2024	II-180
Tabel 2.67	Pertumbuhan Koperasi Berkualitas dan Pertumbuhan Usaha Mikro Mandiri Tahun 2020-2024.....	II-181
Tabel 2.68	Perkembangan Koperasi Sehat Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020-2024	II-181
Tabel 2.69	Daftar Sarana dan Prasarana Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024	II-186
Tabel 2.70	Peningkatan Prestasi di Bidang Kepemudaan	II-186
Tabel 2.71	Tingkat Kegemaran Membaca Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2024.....	II-193
Tabel 2.72	Jumlah Wisatawan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020-2024.....	II-194
Tabel 2.73	Volume Produksi Perikanan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 -2024	II-194
Tabel 2.74	Produksi Pertanian Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020-2024.....	II-197
Tabel 2.75	Persentase Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020-2024.....	II-200
Tabel 2.76	Capaian Kinerja Urusan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2024.....	II-201
Tabel 2.77	Nilai Dimensi Kompetensi	II-204
Tabel 2.78	Nilai Sistem Merit	II-205
Tabel 2.79	Persentase Penelitian yang Ditindaklanjuti sebagai Kebijakan Tahun 2019-2021.....	II-205
Tabel 2.80	Capaian Kinerja Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 - 2024.....	II-206
Tabel 2.81	Kinerja Pengawasan Tahun 2020-2024	II-207
Tabel 2.82	Capaian Standar Pelayanan Minimum Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024	II-209
Tabel 2.83	Analisis Kesenjangan Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	II-212
Tabel 2.84	Realisasi APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020-2024 (dalam Juta)	II-218

Tabel 2.85	Perbandingan Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020-2024 (dalam Juta)	II-220
Tabel 2.86	Perkembangan APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020-2024 ..	II-222
Tabel 2.87	Komposisi Pendapatan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020-2024	II-227
Tabel 2.88	Rincian Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020-2024.....	II-231
Tabel 2.89	Kinerja Realisasi Belanja Terhadap Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Periode Tahun 2020-2024	II-233
Tabel 2.90	Kontribusi Komponen Belanja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Periode Tahun 2020-2024 (dalam %).....	II-235
Tabel 2.91	Pembiayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020-2024.....	II-239
Tabel 2.92	Neraca Keuangan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020-2024	II-244
Tabel 2.93	Analisis Rasio Keuangan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020-2024.....	II-246
Tabel 2.94	Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Terhadap Total Pengeluaran Daerah Kabupaten Sidoarjo selama Tahun 2020-2024.....	II-249
Tabel 2.95	Analisis Realisasi Surplus/Defisit Riil Anggaran Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020-2024	II-251
Tabel 2.96	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020-2024	II-252
Tabel 2.97	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020-2024	II-254
Tabel 2.98	Proyeksi Kerangka Pendanaan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2026-2030.....	II-256
Tabel 3.1	Pokok – Pokok Visi Kabupaten Sidoarjo.....	III-3
Tabel 3.2	Keterkaitan Visi dengan Misi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029	III-4
Tabel 3.3	Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 - 2029	III-11



Tabel 3.4	Strategi Berdasarkan Tujuan dan Sasaran	III-16
Tabel 3.5	Arah Kebijakan Berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPJMD	III-19
Tabel 3.6	Penyelarasan Program Unggulan dan Program Prioritas Perangkat Daerah	III-40
Tabel 3.7	Program Pembangunan Daerah Diselaraskan dengan Program Prioritas RPJMD	III-47
Tabel 3.8	Dukungan Program Daerah Kabupaten Sidoarjo Terhadap Program Prioritas Nasional	III-58
Tabel 4.1	Program Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2026 – 2030	IV-2
Tabel 4.2	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sidoarjo	IV-27
Tabel 4.3	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo	IV-29

Daftar Gambar

Gambar 1.1	Hubungan Antar Dokumen	I-11
Gambar 1.2	Visi Indonesia Emas Tahun 2045	I-12
Gambar 1.3	Visi, Misi, 17 Program Prioritas Presiden dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)	I-15
Gambar 1.4	Kebijakan Pola Ruang Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 – 2044	I-42
Gambar 1.5	Capaian TPB Kabupaten Sidoarjo	I-45
Gambar 2.1	Peta Kabupaten Sidoarjo	II-2
Gambar 2.2	Sistem Perwilayahan Kabupaten Sidoarjo	II-4
Gambar 2.3	Grafik Produksi Padi dan Luas Panen	II-19
Gambar 2.4	Grafik Daya Dukung Pangan Kabupaten Sidoarjo	II-21
Gambar 2.5	Peta Daya Dukung Pangan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 dan Tahun 2029	II-24
Gambar 2.6	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak 2020-2023.....	II-30
Gambar 2.7	Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020-2024	II-32
Gambar 2.8	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020-2024	II-34
Gambar 2.9	Perubahan Fungsi Ruang Akibat Kerusakan Lingkungan Geologi Kabupaten Sidoarjo	II-36
Gambar 2.10	Rumah Tangga Bersanitasi Layak Tahun 2020-2024	II-41
Gambar 2.11	Jumlah Bencana Alam Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 - 2024	II-46
Gambar 2.12	Peta Risiko Multibencana Kabupaten Sidoarjo.....	II-46
Gambar 2.13	Peta Kawasan Rawan Bencana Banjir Kabupaten Sidoarjo	II-47
Gambar 2.14	Peta Lokasi Bencana Lumpur Sidoarjo.....	II-48
Gambar 2.15	Peta Area Terdampak Lumpur Sidoarjo	II-49

Gambar 2.16	Sebaran Titik Penurunan Tanah.....	II-50
Gambar 2.17	Peta Kumulatif Penurunan Tanah (<i>Cumulative Land Subsidence</i>) Wilayah Desa Kedungbanteng dan Banjarsari	II-51
Gambar 2.18	Indeks Risiko Bencana Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 - 2024.....	II-52
Gambar 2.19	Jumlah Penduduk Kabupaten Sidoarjo (Ribuan) Tahun 2020 - 2024	II-56
Gambar 2.20	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 – 2024	II-68
Gambar 2.21	Persentase Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020 - 2024	II-71
Gambar 2.22	Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 – 2024 (dalam ribuan jiwa)	II-72
Gambar 2.23	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020 - 2024	II-73
Gambar 2.24	Perbandingan Rasio Gini Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020 - 2024	II-74
Gambar 2.25	Pendapatan PerKapita Penduduk Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020-2024 (juta/Tahun)	II-75
Gambar 2.26	Perkembangan IPM Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020 - 2024	II-76
Gambar 2.27	UHH Kabupaten Sidoarjo dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 - 2024	II-77
Gambar 2.28	Angka Kematian Ibu (AKI) kabupaten Sidoarjo Tahun 2020-2024	II-78
Gambar 2.29	Temuan Kasus Tuberkulosis Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 – 2024 (per 100.000 Penduduk).....	II-81
Gambar 2.30	Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata – Rata Lama Sekolah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 - 2024.....	II-83
Gambar 2.31	Indeks Infrastruktur Pendidikan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 - 2024.....	II-86



Gambar 2.32	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024.....	II-87
Gambar 2.33	Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2024	II-88
Gambar 2.34	Indeks Pelestarian Budaya Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2024	II-90
Gambar 2.35	Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2024	II-92
Gambar 2.36	Peranan Sektor Industri Pengolahan Terhadap Laju PDRB Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020-2024	II-96
Gambar 2.37	Persentase Pertumbuhan Usaha Industri Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020-2024	II-97
Gambar 2.38	Peranan Sektor Akomodasi Makan dan Minum terhadap Laju PDRB Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020-2024	II-98
Gambar 2.39	Pertumbuhan PDRB SubSektor Perikanan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020-2024	II-99
Gambar 2.40	Indeks Masyarakat Digital Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020-2024	II-102
Gambar 2.41	Perkembangan Indeks Infrastruktur Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 - 2024	II-105
Gambar 2.42	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020-2024	II-106
Gambar 2.43	Nilai Realisasi Investasi Daerah Tahun 2020-2024 (Juta)	II-109
Gambar 2.44	Perkembangan Indeks Rasa Aman Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 – 2024	II-118
Gambar 2.45	Perkembangan Indeks Toleransi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020-2024	II-119
Gambar 2.46	Perkembangan Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022-2024	II-121

Gambar 2.47	APM Kabupaten Sidoarjo Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2020 - 2024.....	II-124
Gambar 2.48	APK Kabupaten Sidoarjo Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2020 - 2024.....	II-125
Gambar 2.49	Jumlah Murid, Guru, dan Sekolah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024	II-126
Gambar 2.50	Kualitas Guru Pendidik Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024.....	II-127
Gambar 2.51	Kondisi Sarana dan Prasarana Pendidikan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024.....	II-128
Gambar 2.52	Angka Kematian Balita (AKBa) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020-2024	II-129
Gambar 2.53	Indeks Infrastruktur Kesehatan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 - 2024.....	II-132
Gambar 2.54	Perkembangan Jalan Mantap (Kondisi Baik dan Sedang) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 - 2024	II-134
Gambar 2.55	Perbandingan Kondisi Jalan Tiap Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo tahun 2024.....	II-135
Gambar 2.56	Perkembangan Kecukupan Kebutuhan Air Bersih Tahun 2020 - 2024	II-137
Gambar 2.57	Luasan Kawasan Kumuh Tahun 2020 - 2024.....	II-138
Gambar 2.58	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sumber Air Minum Layak 2020 – 2023.....	II-139
Gambar 2.59	Kebakaran Yang Ditangani Dalam Waktu Tanggap (<i>Response Time</i>) Tahun 2020 - 2024	II-141
Gambar 2.60	Persentase PPKS Yang Terlayani Tahun 2022 – 2024....	II-143
Gambar 2.61	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industri yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama Tahun 2020 - 2024.....	II-148
Gambar 2.62	Persentase Pencari Kerja yang Telah Ditempatkan Tahun 2020-2024	II-149



Gambar 2.63	Persentase Tenaga Kerja Terserap di 9 Sektor Tahun 2020 – 2024	II-150
Gambar 2.64	Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020-2024	II-151
Gambar 2.65	Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020-2024	II-155
Gambar 2.66	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020-2024	II-156
Gambar 2.67	Indeks Kualitas Air Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 - 2024.....	II-157
Gambar 2.68	Indeks Kualitas Udara Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 - 2024.....	II-158
Gambar 2.69	Indeks Kualitas Lahan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 - 2024.....	II-159
Gambar 2.70	Persentase Peserta KB Pada Pasangan Usia Subur Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020-2024	II-171
Gambar 2.71	Persentase <i>Crude Birth Rate (CBR)</i> Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020-2024	II-171
Gambar 2.72	Perkembangan Usaha Mikro Mandiri Tahun 2020-2024 .	II-183
Gambar 2.73	Realisasi Investasi PMDN dan PMA Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020-2024 (Rupiah)	II-184
Gambar 2.74	Jumlah Prestasi Olahraga Tahun 2020-2024.....	II-185
Gambar 2.75	Indeks Keamanan Informasi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020-2024	II-188
Gambar 2.76	Jumlah Kelompok Seni yang Melestarikan Seni dan Budaya Daerah Tahun 2020-2024.....	II-189
Gambar 2.77	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 - 2024.....	II-191
Gambar 2.78	Indeks Minat Baca Masyarakat Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019-2023	II-192



Gambar 2.79	Peranan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Terhadap Laju PDRB Kabupaten Sidoarjo 2020 - 2024.....	II-195
Gambar 2.80	Pertumbuhan Persentase PDRB Sektor Perdagangan Tahun 2020-2024	II-198
Gambar 2.81	Perkembangan Nilai Ekspor Non Migas Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020-2024	II-199
Gambar 2.82	Persentase Penempatan ASN Sesuai Dengan Kompetensinya Tahun 2020-2024.....	II-202
Gambar 2.83	Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020-2024	II-203
Gambar 2.84	Perkembangan Komposisi Sumbangan PAD, Pendapatan Transfer, Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2020-2024	II-228
Gambar 2.85	Kinerja Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2020-2023	II-234
Gambar 2.86	Kontribusi Komponen Belanja Terhadap Belanja Daerah Tahun 2020-2024	II-236
Gambar 2.87	Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2020-2024	II-242
Gambar 2.88	Proporsi Penggunaan Anggaran Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020-2024	II-250
Gambar 3.1	Pentahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2026-2030	III-23
Gambar 3.2	Arah Kebijakan Tematik RPJMD Kabupaten Sidoarjo	III-28
Gambar 3.3	Program Unggulan Daerah Kabupaten Sidoarjo	III-34

Bab I

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan daerah dengan periode 5 (lima) tahun. RPJMD disusun sejak dilantiknya secara resmi **H. SUBANDI, S.H., M.Kn.**, sebagai Bupati dan **Hj. MIMIK IDAYANA** sebagai Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo, oleh Presiden Republik Indonesia **H. PRABOWO SUBIANTO** pada tanggal 20 Februari 2025 di Istana Kepresidenan Jakarta sesuai Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030 tanggal 28 Januari 2025. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur pada pasal 47 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025–2029 menggunakan pendekatan yang komprehensif sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratik dilakukan melalui pemanfaatan data dan kajian ilmiah yang diolah oleh perangkat daerah dan tim penyusun. Pendekatan partisipatif dilaksanakan melalui pelibatan pemangku kepentingan dalam Forum Konsultasi Publik dan Musrenbang. Pendekatan politis mencerminkan visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih

yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD ini. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dilakukan melalui penjaringan aspirasi masyarakat mulai dari tingkat desa hingga kabupaten, yang disinergikan dengan kebijakan pusat dan provinsi.

Selain itu, digunakan pula pendekatan substantif berupa pendekatan **holistik-tematik, integratif, dan spasial (THIS)**. Pendekatan holistik-tematik mempertimbangkan keterkaitan lintas sektor dalam merumuskan kebijakan. Pendekatan integratif menyatukan lintas urusan pemerintahan dalam satu kesatuan sistem. Sementara itu, pendekatan spasial mempertimbangkan dimensi keruangan dan keterpaduan wilayah dalam pembangunan. Seluruh tahapan penyusunan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025–2029 dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah, yaitu: transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Prinsip transparan menjamin keterbukaan informasi kepada publik, sedangkan prinsip responsif menyesuaikan dengan dinamika lokal. Efisiensi dan efektivitas menjamin pemanfaatan sumber daya yang optimal. Partisipasi masyarakat dan akuntabilitas publik menjadi unsur penting dalam legitimasi perencanaan, dan prinsip keberlanjutan memastikan pembangunan tidak merusak daya dukung lingkungan maupun generasi mendatang.

Proses penyusunan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029 dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yaitu sesuai tahapan : a. persiapan penyusunan; b. penyusunan rancangan awal; c. penyusunan rancangan; d. pelaksanaan Musrenbang; e. perumusan rancangan akhir; dan f. penetapan. Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD yang telah disusun sebelumnya, dilanjutkan dengan penjabaran Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah Terpilih ke dalam Tujuan dan Sasaran Pembangunan. Tahap selanjutnya dirumuskan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan sebagai acuan pelaksanaan program Perangkat Daerah berdasarkan urusan, tugas pokok dan fungsinya. Melalui tahapan ini diharapkan pemetaan program yang dilakukan di setiap Perangkat Daerah memiliki

sumbangan yang kuat dan logis dalam mendukung Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Sidoarjo di Tahun 2025-2029.

RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari Sasaran Pokok Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2045, khususnya pada tahapan lima tahun pertama yaitu Tahun 2025-2029. Tahapan ini menunjukkan langkah-langkah sistematis dan skematis dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang hendak dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo. Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah ***Sidoarjo Menjadi Metropolitan Inklusif Berdaya Saing, Sejahtera dan Berkelanjutan***. Dengan demikian tujuan dan target pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029 diselaraskan dengan target RPJPD Kabupaten Sidoarjo di tahun berkenaan yang merupakan tahap pertama lima tahunan RPJPD sebagai penguatan pondasi pembangunan. Penyusunan RPJMD juga memperhatikan berbagai hal penting antara lain : (1) Keselarasan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*); (2) Penyelarasan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029; (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan implementasi tahap pertama RPJPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2045 yaitu Sidoarjo Penguatan Pondasi, Penguatan pondasi Pembangunan diarahkan pada Transformasi Sosial yang difokuskan pada SDM, Transformasi Ekonomi pada pengentasan kemiskinan dan Transformasi Tata Kelola pada pembentukan pemerintah yang bersih. Selaras dengan prioritas nasional maka arah kebijakan pembangunan ke depan akan difokuskan pada transformasi sosial; ekonomi; tata kelola; supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia; ketahanan sosial budaya dan ekologi; pembangunan wilayah dan sarana prasarana; serta kesinambungan pembangunan.

RPJMD memiliki keterkaitan sistemik dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. RPJMD merupakan acuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, sehingga target RPJMD diturunkan menjadi target dalam Renstra Perangkat Daerah, demikian pula target RKPD diturunkan dalam target tahunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan dilakukan untuk menjamin ketercapaian target pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang dipergunakan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
19. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);



20. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
21. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
22. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
23. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 106);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
25. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);



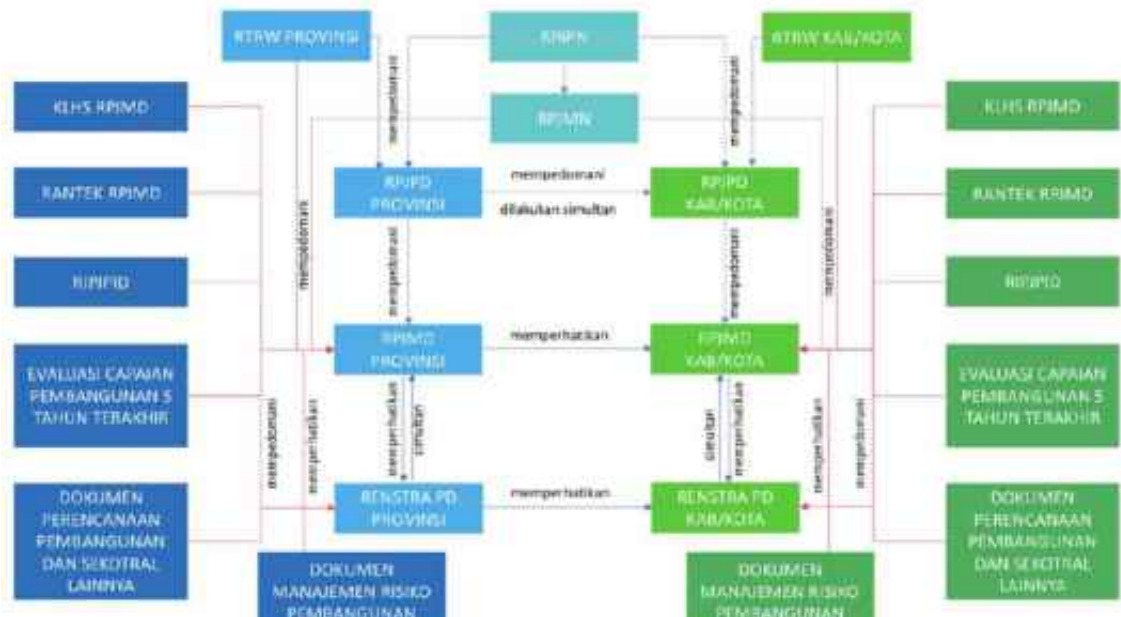
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 1 Seri D);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2023- 2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 123);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur 127);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo

- Tahun 2015 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 61);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 3 Seri D);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 5 Seri D);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Pengendalian Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 7 Seri D).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Hubungan antar dokumen perencanaan daerah secara relevan dan kontekstual sangat mendukung dalam upaya membangun keselarasan perencanaan antar dokumen perencanaan dalam lingkup daerah maupun dengan lingkup nasional dan provinsi. Pendekatan ini dapat dilakukan dengan mengimplementasikan pendekatan perencanaan secara Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, RPJMD Kabupaten Sidoarjo harus diselaraskan dengan Asta Cita Presiden, Visi Indonesia Emas 2045, RPJPN, RPJMN, RTRW Nasional, RPJMD Provinsi Jawa Timur, RTRW Provinsi Jawa Timur, RPJPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2045, KLHS RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029, Rencana Teknokratik RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029, Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah (RIPJPID) Tahun 2025 - 2030, Evaluasi Capaian Pembangunan 5 Tahun terakhir, dan rencana sektoral.

Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, diolah

1.3.1. Hubungan Antara RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029 dengan Visi Indonesia Emas 2045

Dalam rangka menuju seratus tahun Indonesia Merdeka di Tahun 2045, sejumlah persiapan sedang dilakukan dalam menyambut momen tersebut agar pembangunan semakin tepat sasaran dan adaptif untuk mendukung Indonesia menjadi negara maju. Pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia akan mengalami bonus demografi, dimana jumlah penduduk usia produktif mendominasi struktur demografi negara kita. Pengelolaan sumber daya manusia, alam, dan infrastruktur yang tepat dapat menjadi pondasi negara ini melesat lebih jauh. Visi yang diusung adalah menjadi negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Dalam pelaksanaannya, terdapat empat pilar utama yang akan diperkuat, antara lain (1) Pembangunan Manusia & Penguasaan Iptek; (2) Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan; (3) Pemerataan Pembangunan; dan (4) Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Pemerintahan.

Gambar 1.2 Visi Indonesia Emas Tahun 2045



Pilar pertama bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia dengan pendidikan yang semakin tinggi dan merata, kebudayaan yang kuat, derajat kesehatan, usia harapan hidup dan kualitas hidup yang semakin baik, produktifitas yang tinggi serta kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang luas. Fokus utamanya adalah Percepatan pendidikan rakyat Indonesia secara merata, Peningkatan peran kebudayaan dalam pembangunan, Peningkatan sumbangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan,

Peningkatan derajat kesehatan dan kualitas hidup rakyat, Reformasi ketenagakerjaan.

Pilar kedua bertujuan menjadikan Indonesia negara maju dan salah satu negara dengan ekonomi terbesar di dunia yang digerakkan oleh investasi dan perdagangan, industri, pariwisata, maritim, dan jasa dengan didukung oleh infrastruktur yang andal dan ketahanan pangan, energi, dan air yang kuat serta Komitmen terhadap lingkungan hidup yang terus dijaga bagi keberlanjutan pembangunan.

Pilar ketiga bertujuan untuk menciptakan Pemerataan pembangunan dengan pendapatan yang semakin merata bagi seluruh lapisan masyarakat, kesenjangan antarwilayah yang semakin kecil, infrastruktur yang terintegrasi dan merata, serta kemiskinan akut berhasil diatasi. Fokus utamanya adalah pada Percepatan pengentasan kemiskinan, Pemerataan kesempatan usaha dan pendapatan, Pemerataan pembangunan wilayah dan Pembangunan infrastruktur yang merata dan terintegrasi.

Terakhir, pilar keempat bertujuan untuk Memperkokoh Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Pemerintahan dengan kualitas demokrasi yang semakin baik, reformasi kelembagaan dan birokrasi, pembangunan sistem hukum nasional dan anti korupsi, pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif, serta kemampuan pertahanan dan keamanan yang tinggi.

Idealnya, RPJMD Sidoarjo Tahun 2025-2029 berhubungan erat dengan Visi Indonesia Emas 2045 karena program dan indikator yang disusun harus berkontribusi langsung atau tidak langsung terhadap pencapaian Indonesia Emas 2045. RPJMD harus mampu menjadi model pembangunan lokal yang adaptif dan kontributif. Dalam hal ini, RPJMD Sidoarjo Tahun 2025-2029 telah mengambil turunan indikator seperti pertumbuhan ekonomi kabupaten; penurunan angka kemiskinan dan pengangguran; peningkatan nilai IPM daerah; rasio gini, kualitas lingkungan hidup dan Indeks Reformasi Birokrasi sesuai dengan empat pilar Visi Indonesia Emas 2045.

1.3.2. Hubungan Antara RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029 dengan Asta Cita Presiden dan RPJMN Tahun 2025-2029

Hubungan antara RPJMD Kabupaten Sidoarjo dengan RPJMN Tahun 2025-2029 diidentifikasi melalui penyajian Visi, Misi, Prioritas Nasional Tahun 2025-2029; dan 17 Program Prioritas dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PTHC) yang memiliki keterkaitan kuat dengan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029. Sejatinya, **Asta Cita Presiden** yang terdiri dari 8 agenda prioritas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024–2029 adalah penjabaran dari visi dan misi dalam **RPJMN 2025–2029**. Oleh karena itu, seluruh pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Sidoarjo, **wajib menyelaraskan RPJMD-nya** dengan arah dan semangat Asta Cita sebagai bentuk integrasi pembangunan nasional-daerah. Terdapat lampiran Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN yang menjadi rujukan dalam mengidentifikasi Isu Strategis yang terkait dengan Kabupaten Sidoarjo, sebagai berikut;

1. Narasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang memuat evaluasi dan tantangan pembangunan, kebijakan Pembangunan, prioritas nasional, arah pembangunan wilayah, pendanaan Pembangunan, pengendalian, evaluasi, dan tata kelola data pembangunan;
2. Matriks Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029; dan
3. Arah Pembangunan Kewilayahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.

**Gambar 1.3 Visi, Misi, 17 Program Prioritas Presiden dan
8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)**





Program Prioritas	Program Hasil Terbaik Cepat
1. Mendapat Swasembada Pangan, Energi, dan Air 2. Penyempurnaan Sistem Pemerintahan Negara 3. Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi 4. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 5. Pemberantasan Kamiskinan 6. Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba 7. Menjamin Tersedianya Pelayanan Kesehatan bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan Penyediaan Obat untuk Rakyat 8. Penguatan Pendidikan, Sains, dan Teknologi, serta Digitalisasi 9. Penguatan Pertahanan dan Keamanan Negara dan Pemeliharaan Hubungan Internasional yang Kondusif 10. Penguatan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan, Anak, serta Penyandang Disabilitas 11. Menjamin Pelestarian Lingkungan Hidup 12. Menjamin Ketersediaan Pangan, Benih, dan Pestisida Langsung ke Petani 13. Menjamin Pembangunan Hutan Berkualitas Terjangkau Bersantitas Baik untuk Masyarakat Perdesaan/ Perkotaan dan Rakyat yang Membutuhkan 14. Melanjutkan Pemerataan Ekonomi dan Penguatan UMKM melalui Program Kredit Usaha dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta Kota-Kota Inovatif- Apraktis dan Mandiri Lainnya 15. Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis Sumber Daya Alam (SDA), termasuk Sumber Daya Maritim untuk Membuka Lapangan Kerja yang Seksus- Luasnya dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi 16. Memastikan Kerukunan Antarumat Beragama, Kebebasan Beribadah, Pendidikan, dan Perawatan Rumah Badah 17. Pelestarian Seni Budaya, Peningkatan Ekonomi Kreatif, dan Peningkatan Prestasi Olahraga	1. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan guru untuk anak balita dan ibu hamil 2. Menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis, meruntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di Kabupaten 3. Menstabilkan dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumpur pangan desa, daerah, dan nasional 4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dari memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi 5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut 6. Menaklukkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/Polri, dan pejabat negara 7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kecamatan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersantitas baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) 8. Mendirikan Badan Pemerintahan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 22%

Mengacu pada gambar di atas, maka dapat ditarik benang merah Arah Pembangunan Nasional yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi perumusan arah Pembangunan Kabupaten Sidoarjo yang sesuai dengan kewenangan daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

1.3.3. Hubungan Antara RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2045

Sebagai upaya untuk menjamin keselarasan dan konsistensi antara dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD) dengan jangka panjang (RPJPD), maka pembangunan lima tahun pertama 2025-2029 perlu difokuskan pada Sasaran Pokok RPJPD periode lima tahunan pertama Tahun 2025-2029 yaitu Penguatan pondasi pembangunan diarahkan pada Transformasi Sosial yang difokuskan pada SDM, Transformasi Ekonomi pada pengentasan kemiskinan dan

Transformasi Tatakelola pada pembentukan pemerintahan yang bersih. Periode pertama merupakan periode awal Visi Pembangunan Jangka Panjang yaitu **"Sidoarjo Menjadi Metropolitan Inklusif, Berdayasaing, Sejahtera Dan Berkelanjutan"**. Arah kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029 mengacu pada Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2045 periode lima tahun pertama, yaitu:

Misi I dengan arah kebijakan:

1. Penguatan pondasi sistem pembangunan SDM melalui Pendidikan dan Kesehatan yang maju guna menjamin akses dan level pelayanan Pendidikan dan kesehatan yang berdayasaing regional dan nasional
2. Integrasi pendidikan karakter religious berakhlak pada SDM Masyarakat dalam Pendidikan formal maupun non forma yang dimulai dari pendidikan keluarga
3. Penataan sistim jaminan sosial yang mantap sebagai upaya pemenuhan pelayanan dasar perlindungan sosial (PPKS) melalui sinergi lintas sektoral secara efektif menurunkan ketimpangan dan mengatasi kemiskinan (menghapus kemiskinan ekstrem) serta menjamin kesetaraan bagi disabilitas.

Misi II dengan arah kebijakan:

4. Penguatan kebijakan dan daya dukung perekonomian inklusif yang fokus pada penguatan kelembagaan (Capacity Building) didukung inovasi, transformasi digital yang mendukung perindustrian, perdagangan, pariwisata perkotaan (Urban Tourism) dan berpihak kepada Industri Kecil, Koperasi, Usaha Mikro serta Ekonomi Kreatif
5. Penataan regulasi dan kebijakan pendukung implementasi ekonomi hijau (Green Economy) untuk mendukung komitmen Sustainable Development Goals (SDGs) menuju net / zero Industry serta implementasi riset dan pengembangan Energi baru Terbarukan (EBT) sesuai kewenangan daerah
6. Penguatan kebijakan ekonomi yang berorientasi pada perluasan akses ekonomi spasial melalui pembentukan titik pertumbuhan ekonomi baru

(Growth Pole) yang mendorong pemerataan pengembangan kewilayahan ditandai kemandirian perdesaan.

Misi III dengan arah kebijakan

7. Penguatan berbagai daya sukung meningkatkan kualitas tatakelola pemerintahan yang bersih dan adaptif yang didukung pengembangan Electronic Government terintegrasi
8. Penguatan kapasitas ASN melalui budaya birokrasi yang gesit (Agile) dalam menghadapi Volatility (Tidak Stabil), Uncertainty (Ketidakpastian), Complexity (Kompleksitas), dan Ambiguity (ambiguitas) VUCA.
9. Penguatan Inovasi pelayanan publik yang modern dan inovatif berbasis digital pada seluruh aspek pembangunan mendukung atmosfir industri perdagangan yang kondusif dalam mewujudkan "Sidoarjo Metropolitan Inklusif.

Misi IV dengan arah kebijakan:

10. Penguatan infrastruktur inklusif sebagai daya dukung penting dalam mengungkit stabilitas makro ekonomi, peningkatan daya saing daerah, pelestarian lingkungan hidup, pembangunan ketahanan energi dan meningkatkan ketahanan terhadap bencana.
11. Penguatan strategi pelestarian Lingkungan Hidup sebagai komitmen pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan Penciptaan kawasan perkotaan yang modern (smart and green city) yang terintegrasi dengan konsep ketahanan energi dan pembangunan resiliensi masyarakat terhadap bencana.

Misi V dengan arah kebijakan:

12. Penguatan konsolidasi kelembagaan seluruh elemen masyarakat untuk mendorong Internalisasi nilai-nilai agama, budaya, hukum dan demokrasi sebagai dasar pembentukan karakter religious, toleran, dan inklusif yang menjamin kestaraan bagi seluruh kelompok masyarakat.
13. Penguatan regulasi dan komitmen yang menjamin implementasi nilai-nilai Gender Mainstreaming, penguatan kualitas keluarga untuk mendorong perlindungan perempuan dan anak.

1.3.4. Hubungan Antara RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Jawa Timur Tahun 2025-2029

Hubungan antara RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2025-2029, dilakukan dengan mengidentifikasi Visi, Misi dan Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Jawa Timur sebagai panduan untuk merumuskan arah pembangunan Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah Kabupaten Sidoarjo telah terpilih. Adapun Visi, Misi dan Arah Kebijakan Gubernur Jawa Timur Tahun 2025-2029 sebagai berikut.

Visi RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029

"Bersama Jawa Timur Maju yang Adil, Makmur, Unggul, dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045"

Misi RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029

Sedangkan Misi Pembangunan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 ke dalam 9 (Sembilan) Misi yang disebut Nawa Bhakti Satya yaitu:

1. Jatim Sejahtera, Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan.
2. Jatim Kerja, Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas.
3. Jatim Akses, Memperkuat Infrastruktur Konektivitas Antar Wilayah dan Intra Aglomerasi yang Berkualitas, Modern, Terpadu, dan Berkeadilan.
4. Jatim Agro, Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan.
5. Jatim Cerdas, Memperkuat Akses dan Mutu Pendidikan yang Berkualitas, Merata, dan Berkeadilan.
6. Jatim Sehat, Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas, Merata, Mudah Diakses dan Berkeadilan.
7. Jatim Berkah Amanah, Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif.
8. Jatim Harmoni, Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif.

9. Jatim Lestari, Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan.

Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029

Guna mendukung pencapaian kedelapan misi di atas, maka dilakukan melalui serangkaian Strategi dan Arah Kebijakan sebagai berikut.

Tabel 1.1 Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029

MISI	STRATEGI	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN
Jatim Sejahtera	Pemenuhan Perlindungan Sosial dengan Fokus Pembangunan melalui Pemenuhan sistem perlindungan sosial, pemenuhan rumah layak huni yang terintegrasi dan berbasis satu data serta peningkatan daya saing dan produktivitas ekonomi perdesaan	Terwujudnya Perlindungan Sosial yang Adaptif	1. Percepatan pembangunan pada Daerah Afirmasi 3TP diantaranya Pegunungan Sewu dan Madura, serta Daerah Afirmasi lainnya 2. Peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi di Daerah Afirmasi 3TP diantaranya Pegunungan Sewu dan Madura, serta Daerah Afirmasi lainnya, guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat 3. Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP diantaranya Pegunungan Sewu dan Madura, serta Daerah Afirmasi lainnya, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien 4. Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP diantaranya Pegunungan Sewu dan Madura, serta Daerah Afirmasi lainnya 5. Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, terutama bagi masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP diantaranya Pegunungan Sewu dan Madura, serta Daerah Afirmasi lainnya 6. Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah 7. Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion & interregion pada



MISI	STRATEGI	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN
			Daerah Afiriasi 3TP diantaranya Pegunungan Sewu dan Madura, serta Daerah Afiriasi lainnya 8. Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya 9. Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau urban renewal pada area yang telah mengalami <i>urban decay</i> dalam suatu kawasan perkotaan
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Perdesaan	1. Pengembangan ekonomi lokal melalui pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan intensifikasi produk unggulan 2. Peningkatan keterkaitan Koperasi dan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha 3. Peningkatan kualitas kelembagaan dan produktivitas lembaga ekonomi desa, serta memanfaatkan digitalisasi dalam meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa 4. Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (<i>unique & high-value economy</i>) 5. Penyediaan akses teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan <i>broadband</i> hingga menjangkau ke seluruh pelosok
Jatim Kerja	Penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja dengan Fokus Pembangunan melalui peningkatan kualitas tenaga kerja, penguatan sektor ekonomi, pemberdayaan koperasi dan UKM serta pengembangan pariwisata berkelanjutan	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Kewirausahaan Daerah	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui <i>upskilling</i> maupun <i>reskilling</i> 2. Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, <i>ancillary services</i>, aktivitas, <i>available packages</i>) pada Kawasan megapolitan/metropolitan (<i>urban tourism</i>) dan kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif Malang-Lumajang 3. Pengembangan ekonomi syariah antara lain pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis pesantren, penguatan industri halal dan UMKM halal, penguatan ekspor halal, penguatan keuangan syariah, penguatan pariwisata halal dan lain-lain



MISI	STRATEGI	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN
			4. Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional maupun kerja sama internasional lainnya 5. Peningkatan keterkaitan Koperasi dan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha 6. Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi 7. Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis 8. Peningkatan produktivitas BUMD 9. Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja 10. Penguatan riset dan inovasi daerah beserta ekosistemnya dalam mendukung pembangunan daerah 11. Pengembangan industri pengolahan dan manufaktur terpadu ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah yang dikembangkan pada kawasan strategis industri Madiun-Surabaya-Gresik-Pasuruan dan kawasan strategis industri lainnya (klaster industri petrokimia, industri logam dasar, industri pengolahan tembakau, industri bahan konstruksi, industri makanan dan minuman, industri consumer goods & general manufactures, industri kayu dan barang dari kayu, industri alat angkutan laut (galangan kapal), industri alat angkutan dan kendaraan (kereta api) serta pengembangan kawasan industri, Kawasan Ekonomi Khusus dan Sentra Industri 12. Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama <i>green/ low-carbon electricity</i>; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri 13. Peningkatan produktivitas dan daya saing sektor ekonomi yang inklusif dan



MISI	STRATEGI	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN
			berkelanjutan, penguatan stabilitas ekonomi serta pengendalian inflasi daerah 14. Percepatan pengadaan & pencadangan tanah sesuai LARAP-3C (<i>Land Acquisition and Resettlement Action Plan-Clean, Clear, Consolidated</i>) yang disusun secara kolaboratif & partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, trust, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas 15. Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke <i>green/low-cost financing</i>, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan 16. Peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi di Daerah Afirmasi 3TP diantaranya Pegunungan Sewu dan Madura, serta Daerah Afirmasi lainnya, guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat 17. Membangun ekosistem yang kondusif bagi tumbuhnya pekerjaan hijau dan pengembangan tenaga kerja hijau
Jatim Akses	Peningkatan konektivitas antar wilayah melalui pemenuhan sarana prasarana dan layanan transportasi	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Konektivitas Wilayah	1. Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan Kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, bertaraf global (<i>global city</i>), dan berketahanan, terutama pada metropolitan Surabaya dan metropolitan Malang (Megapolitan Surabaya-Malang), serta Kawasan perkotaan Madiun, Kediri, dan Jember 2. Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah fokus pada layanan transportasi publik 3. Peningkatan dan perluasan <i>coverage</i> sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan,



MISI	STRATEGI	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN
			terutama pada metropolitan Surabaya dan metropolitan Malang 4. Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan, dengan memanfaatkan teknologi informasi 5. Penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa 6. Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa pada wilayah Jawa Timur untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik 7. Pembangunan jalan tol intraregional atau jalan arteri lingkaran kawasan perkotaan, terutama pada jalan tol intraregional metropolitan Surabaya dan metropolitan Malang 8. Percepatan pembangunan jalan Lintas Pantai Selatan (PANSELA) dan pemenuhan daya dukung pengembangan ekonomi disekitarnya 9. Peningkatan prasarana perkeretaapian termasuk penanganan pada perlintasan sebidang, pembangunan jalur ganda dan reaktivasi jalur kereta api, serta penyiapan pembangunan kereta api cepat (HST) Jakarta-Surabaya 10. Elektrifikasi jalur KA dan peningkatan sarana/prasarana perkeretaapian, terutama untuk layanan perkeretaapian KA komuter di kawasan metropolitan Surabaya dan metropolitan Malang 11. Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan termasuk pelabuhan di daerah 3TP dan kepulauan 12. Peningkatan sarana & prasarana dan kualitas pelayanan bandar udara Abdurrachman Saleh
Jatim Agro	Hilirisasi sektor Agro mendukung ketahanan pangan dengan fokus pembangunan melalui pengembangan komoditas unggulan dan dukungan infrastruktur esensial	Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Kedaulatan Pangan	1. Hilirisasi SDA agro melalui pengembangan pengolahan agro komoditas unggulan, penerapan <i>close loop model</i>, korporasi petani, dan ekonomi biru 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan sektor agro dan pengembangan pemasaran agro 3. Pemantapan hulu agro melalui peningkatan produktivitas melalui pengembangan pertanian dan perikanan modern serta infrastruktur esensial untuk meningkatkan ekonomi sektor agro 4. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat melalui penguatan cadangan pangan;



MISI	STRATEGI	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN
			pengembangan pangan lokal; penganekaragaman konsumsi pangan; pengendalian penyakit asal hewan, ikan, tumbuhan; penjaminan mutu dan keamanan pangan; penanganan kerawanan pangan, dukungan terhadap fortifikasi dan biofortifikasi pangan, serta pengelolaan susut dan sisa pangan
Jatim Cerdas	Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan dengan fokus pembangunan melalui pemerataan pelayanan dan sarana prasarana pendidikan sesuai kondisi wilayah, peningkatan kualitas pengajaran, daya saing, dan keahlian	Meningkatnya Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan	1. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) 2. Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah yang berkualitas dan berkeadilan 3. Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi 4. Pemerataan, peningkatan kualitas dan kompetensi guru dan tenaga kependidikan 5. Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas, terutama di Daerah Afirmasi 3TP diantaranya Pegunungan Sewu dan Madura, serta Daerah Afirmasi lainnya 6. Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK, terutama pada Daerah Afirmasi 3TP diantaranya Pegunungan Sewu dan Madura, serta Daerah Afirmasi lainnya 7. Penguatan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama, terutama pada Daerah Afirmasi 3TP diantaranya Pegunungan Sewu dan Madura, serta Daerah Afirmasi lainnya. 8. Beasiswa Pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (<i>Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics</i>) dan keagamaan serta vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global 9. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan 10. Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, literasi digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah) 11. Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan



MISI	STRATEGI	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN
			keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) 12. Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik 13. Peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi Masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan Sumber Daya Manusia digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi)
Jatim Sehat	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dengan fokus pembangunan melalui pemerataan pelayanan dan sarana prasarana kesehatan sesuai kondisi wilayah	Meningkatnya Akses Layanan Kesehatan yang Berkualitas	1. Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan 2. Pemerataan dan peningkatan akses layanan Kesehatan seiring dengan perwujudan <i>Universal Health Coverage (UHC)</i> 3. Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan 4. Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), antara lain melalui : Eliminasi penyakit Kusta & Schistosomiasis, Pengendalian penyakit menular lainnya, penyehatan lingkungan, perluasan cakupan imunisasi, serta pengendalian faktor risiko 5. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan 6. Peningkatan kesejahteraan tenaga medis dan tenaga kesehatan 7. Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan 8. Pemenuhan kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan, terutama untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan yang bertugas di Daerah Afirmasi 3TP diantaranya Pegunungan Sewu dan Madura, serta Daerah Afirmasi lainnya 9. Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas, terutama di Daerah Afirmasi 3TP diantaranya Pegunungan Sewu dan Madura, serta Daerah Afirmasi lainnya 10. Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, pencegahan dan percepatan penurunan



MISI	STRATEGI	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN
			stunting, dan penurunan angka kematian ibu dan anak 11. Peningkatan upaya kesehatan jiwa 12. Percepatan capaian sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) 13. Dukungan pada pemberian makan bergizi untuk siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita termasuk penguatan ekosistem pendukungnya seperti pengembangan sistem dan tata kelola, sarana prasarana, dan intervensi strategis lainnya 14. Dukungan pada penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis 15. Dukungan pada penuntasan kasus TBC 16. Dukungan pada pembangunan rumah sakit lengkap dan berkualitas di kabupaten
Jatim Berkah Amanah	Tata kelola pemerintahan yang tepat fungsi dan penyederhaaan regulasi dengan fokus penataan kelembagaan yang tepat fungsi, manajemen ASN sesuai kompetensinya dan penyederhanaan regulasi yang berpotensi menghambat investasi dan pelayanan publik	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang melayani dan berintegritas	1. Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan Pembangunan 2. Peningkatan kualitas regulasi dan harmonisasi kebijakan serta pembentukan Produk Hukum yang berkualitas, adaptif dan taat asas 3. Penyederhanaan regulasi yang berpotensi menghambat investasi dan pelayanan publik 4. Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital 5. Optimalisasi Penataan kelembagaan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan strategis daerah 6. Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat 7. Penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang tertib dan berintegritas menuju penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif dan bebas korupsi 8. Pengembangan kompetensi, penataan dan manajemen karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, <i>reward</i>, dan <i>punishment</i> 9. Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBUD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb.),

MISI	STRATEGI	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN
			peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional 10. Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU, <i>blended finance</i>, dan <i>creative finance</i> 11. Sinkronisasi dan integrasi substansi perencanaan pembangunan pusat dan daerah 12. Peningkatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan akuntabilitas kinerja pemerintah berdasarkan sasaran prioritas nasional dan daerah. 13. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah, serta pengaturan kembali kewenangan pusat-daerah 14. Penguatan pengendalian pembangunan daerah melalui penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian intern pemerintah 15. Optimalisasi fasilitasi kerja sama daerah dalam rangka menuju kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik 16. Percepatan pelaksanaan reforma agrarian 17. Peningkatan pelayanan publik yang cepat, efektif, mudah dan transparan serta pemerataan pelayanan publik bagi kelompok rentan 18. Percepatan penyusunan dan pengimplementasian rencana tata ruang (RTRW dan RDTR) yang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologi
Jatim Harmoni	Memperkuat ketahanan sosial budaya sebagai landasan dan modal dasar pembangunan dengan fokus pembangunan melalui Optimalisasi nilai agama, budaya dan ketahanan keluarga dalam pembangunan	Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Toleran	1. Penguatan kerukunan antar suku, ras, agama, dan golongan 2. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data terkait penanganan gangguan Trantibumlinmas 3. Penguatan keamanan, ketentraman dan ketertiban serta peningkatan keterlibatan masyarakat dalam Trantibumlinmas untuk mengurangi tingkat kriminalitas dan penegakan perda 4. Penguatan peran pemerintah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat 5. Penguatan integritas Suprastruktur dan Infrastruktur politik 6. Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap

MISI	STRATEGI	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN
	karakter manusia serta menggerakkan modal sosial dalam masyarakat, peningkatan ketangguhan manusia dan masyarakat	Meningkatnya Pemajuan Seni, Budaya dan Prestasi Olah Raga	Narkotika serta Prekursor Narkotika (P4GN-PN) 1. Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila 2. Pelestarian dan pemajuan kebudayaan di Jawa Timur, antara lain melalui : a. Perlindungan dan pelestarian warisan budaya b. Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan c. Jaminan hak kebudayaan, ekspresi budaya, dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat 3. Peningkatan Prestasi dan Pembudayaan Olahraga
		Terwujudnya Masyarakat yang Inklusif	1. Peningkatan kualitas keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal 2. Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam Pembangunan 3. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang 4. Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan
Jatim Lestari	Memperkuat ketahanan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan dengan fokus pembangunan melalui peningkatan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim, peningkatan kapasitas	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1. Penguatan ekosistem dan lanskap ekonomi hijau 2. Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iii) pengembangan dekarbonisasi 3. Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami 4. Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi 5. Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju <i>zero solid waste city</i> dan mendukung <i>circular economy</i> pada kawasan perkotaan



MISI	STRATEGI	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN
	kelembagaan dan instrumen pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup		6. Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan <i>circular economy</i> 7. Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan 8. Pembangunan infrastruktur jaringan transmisi migas di Jawa, terutama yang menghubungkan Cepu Madiun-Kediri-Surabaya 9. Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air 10. Percepatan transisi energi menuju emisi karbon yang lebih rendah, antara lain melalui: a. Pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan b. Penerapan jaringan cerdas (<i>smart grid</i>) untuk memaksimalkan efisiensi dan pemantauan konsumsi energi c. Adopsi teknologi penyimpanan energi untuk menjaga stabilitas pasokan listrik d. Penerapan <i>Internet of Things (IoT)</i> di sektor energi guna meningkatkan keterhubungan dan analitik data secara real-time e. Perluasan penggunaan kendaraan listrik
		Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana	1. Pengelolaan risiko bencana dilakukan melalui peningkatan kesiapsiagaan, penguatan pengetahuan kebencanaan di setiap satuan pendidikan, pengembangan sistem peringatan dini yang efektif, serta peningkatan kesadaran dan literasi masyarakat terhadap potensi bencana, yang dilaksanakan dengan penguatan sinergitas multipihak (pemerintah pusat dan daerah, akademisi, swasta/badan usaha, lembaga/masyarakat, media dan komunitas lainnya) secara terintegrasi dan responsive guna memperkuat mitigasi dan meminimalkan dampak 2. Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan <i>hybrid (green & grey infrastructure)</i> pada kawasan perkotaan



1.3.5. Hubungan Antara RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029 dengan RTRWN Tahun 2008-2028

Hasil telaah terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), mengatur secara umum tentang pengembangan wilayah nasional dan daerah, namun tidak secara khusus menyampaikan tentang arah pengembangan Kawasan Jawa Timur pada umumnya maupun Kabupaten Sidoarjo khususnya. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang penting untuk dijadikan dasar kebijakan bagi pengembangan Kawasan Sidoarjo, yaitu;

1. Pada Pasal 7 ayat 2 huruf b2, menyatakan bahwa kebijakan yang berlaku untuk daerah-daerah di Pulau Jawa dan Bali diharapkan dapat mengembangkan Kawasan lindung dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah tersebut sesuai dengan kondisi, karakter, dan fungsi ekosistemnya serta tersebar secara proporsional;
2. Pasal 14 ayat 2, pengembangan Kawasan Wilayah (PKW) sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan kriteria:
 - a. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN;
 - b. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten;
 - c. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten; dan/atau
 - d. kawasan perkotaan yang berada di pesisir yang berfungsi atau berpotensi mendukung ekonomi kelautan nasional.
3. Pasal 66 ayat 2 huruf b, menyatakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan bagian integral dari Peraturan Pemerintah ini yang ditetapkan dalam Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B). KP2B terdiri atas



lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan. Lahan pertanian pangan berkelanjutan berupa lahan irigasi, lahan reklamasi rawa pasang surut dan nonpasang surut (lebak), dan/ atau lahan tidak beririgasi. KP2B yang ditetapkan pada tingkat nasional menjadi dasar dalam penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

4. Pasal 66 ayat 2 huruf c, menyatakan upaya perwujudan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional dilakukan dengan pengendalian luasan pertanian tanaman pangan lahan basah dan/atau lahan kering paling sedikit 77.410 (tujuh puluh tujuh ribu empat ratus sepuluh) kilo meter persegi yang tersebar di seluruh provinsi/kabupaten/kota.

Kebijakan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) di atas diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan pengembangan Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut:

1. Kota perdagangan dan industri yang tetap harus mempertahankan aspek lingkungan, antara lain proporsi tersedianya ruang terbuka hijau minimal 30% dari luas seluruh wilayah, hal ini dapat memanfaatkan RTH Publik dan Privat;
2. Kota titik pertumbuhan perekonomian Jawa Timur dan Nasional yang berfungsi sebagai motor penggerak aktivitas perekonomian regional, nasional dan internasional harus terus dipastikan arah pengembangan kotanya selaras dengan kebijakan nasional dan provinsi;
3. Kota dengan ketahanan pangan berbasis berkelanjutan yang berperan dalam kebijakan perlindungan lahan produktif dan optimalisasi sumber daya pangan untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

1.3.6. Hubungan Antara RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029 dengan RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043

Telaah terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur sepenuhnya mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2023-2043.

Tercantum dalam dokumen Peraturan Daerah bahwa untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi ditetapkan kebijakan Penataan Ruang Wilayah Provinsi, antara lain:

- a. penguatan peran Kawasan Metropolitan terintegrasi dengan hierarki sistem pusat Permukiman yang nyaman hingga Wilayah pembangunan terkecil agropolitan dan/atau gugusan Kawasan pegunungan (*Smart Valley Development*);
- b. pengintegrasian antar koridor pertumbuhan Wilayah daratan yang hierarkis dengan sentra pertumbuhan kelautan di WP-3-K bagi terselenggaranya nilai tambah sinergi antar Wilayah dan mengurangi disparitas Wilayah;
- c. peningkatan keterpaduan dan interkoneksi jaringan infrastruktur dengan sistem Permukiman (*Transit Oriented Development*) sebagai upaya mengurangi dampak aglomerasi (*backwash effect*) dan meningkatkan pemerataan pengembangan Wilayah (*spread effect*);
- d. pemantapan penyediaan infrastruktur Wilayah dasar dan pengelolaan ekoregion dalam optimalnya variasi pengembangan satuan Wilayah Sungai, danau dan laut;
- e. peningkatan upaya preservasi dan konservasi pada Kawasan Lindung dengan prinsip penguatan biodiversitas dan pembangunan berkelanjutan;
- f. optimalisasi Kawasan Budi Daya guna menjadikannya Ruang yang produktif dan kompetitif dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi sesuai potensi, daya dukung dan daya tampung lingkungannya;
- g. perlindungan terhadap alih fungsi lahan produktif pertanian dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional;
- h. pemaduserasian Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya dengan Kawasan Pertahanan dan Keamanan melalui pengaturan pengembangan dan pengendalian terhadap pemanfaatan Ruang dengan memperhatikan terhadap kerawanan bencana dan rencana kontinjensi;

- i. perwujudan KSP yang terpadu dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi, perlindungan terhadap kepentingan sosial budaya, serta perlindungan terhadap kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan.

Tabel 1.2
Kebijakan RTRW Provinsi Jawa Timur yang Terkait dengan
Pengembangan Kabupaten Sidoarjo

No	Kebijakan Tata Ruang Jawa Timur	Arah Kebijakan
1	Rencana Sistem Pusat Permukiman (Pasal 15 ayat 1)	Sistem pusat permukiman meliputi: a. PKN (Pusat Kegiatan Nasional) yang berada di Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila yang meliputi Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Lamongan; b. PKL (Pusat Kegiatan Lokal) yang berada di Kabupaten Sidoarjo meliputi Perkotaan Sidoarjo, Perkotaan Krian dan Perkotaan Porong
2	Rencana tata ruang yang terkait dengan sistem pusat pertumbuhan kelautan terintegrasi dengan sistem pusat permukiman (Pasal 15 ayat 2)	Rencana pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan pada sentra usaha perikanan, sentra perikanan tangkap dan/atau perikanan budi daya di Kabupaten Sidoarjo;
3	Rencana tata ruang sistem jaringan jalan (Pasal 17)	a. Jalan umum, terdiri atas Jalan arteri umum : ruas jalan Waru – BTS Surabaya; jalan RM. Mangun Diprojo; jalan Jenggolo; jalan A. Yani; jalan Gajah Mada; jalan Majapahit; jalan akses Bandara Juanda; jalan akses Bandara Juanda Baru; jalan akses Bandara Juanda 2; jalan Layang Sidoarjo; ruas jalan BTS Kota Sidoarjo – Gempol; jalan Gatot Subroto; jalan Sunandar P. Sudarmo; jalan Diponegoro; jalan Thamrin; jalan Candi; ruas jalan Legundi – BTS Kabupaten Sidoarjo; ruas jalan BTS Kota Sidoarjo – Krian By Pass; ruas jalan Kota Sidoarjo – Krian; ruas jalan BTS Kabupaten Sidoarjo – BTS Kota Mojokerto; ruas jalan BTS Kota Sidoarjo – Mojokerto; ruas jalan Lingkar Timur Sidoarjo;
4	Rencana Pengembangan Jalan Tol (Pasal 20)	- Jalan tol pada ruas: - Krian – Legundi – Bunder; - Krian – Pucukan; - Juanda – Gempol (Pasuruan); - Bandara Juanda – Tanjung Perak; - Surabaya – Gempol; - Waru – Wonokromo – Tanjung Perak; - SS Waru – Bandara Juanda.
5	Rencana Pengembangan Terminal (Pasal 21 ayat 1 – 2; Pasal 22 ayat 1; Pasal 23)	a. Terminal penumpang Tipe A yaitu Terminal Purabaya Kabupaten Sidoarjo; b. Terminal penumpang Tipe B yaitu Terminal Larangan Kabupaten Sidoarjo; c. Terminal barang di Krian dan Berbek/Waru Kabupaten Sidoarjo; d. Jembatan timbang Trosobo di Kabupaten Sidoarjo;

No	Kebijakan Tata Ruang Jawa Timur	Arah Kebijakan
6	Rencana tata ruang yang terkait dengan sistem jaringan kereta api (Pasal 25 – 27)	Meliputi Jaringan jalur kereta api jalur Surabaya – Jember – Banyuwangi; Sidoarjo – Tulangan – Gununggangsir; Sidoarjo – Tulangan – Tarik. Begitu pula untuk rencana pengembangan jalur Perlintasan Kereta Api Jalan Akses Bandara Juanda I dan II serta Perlintasan Kereta Api Jalan Candi
7	Rencana tata ruang yang terkait dengan Bandar Udara pengumpul (Pasal 34 ayat 1, 2 dan 4)	Bandar Udara Juanda di Kabupaten Sidoarjo dan Bandar Udara khusus militer yaitu Lapangan Udara Juanda di Kabupaten Sidoarjo;
8	Rencana tata ruang yang terkait dengan sistem jaringan energi (Pasal 38 ayat 1 – 2)	Meliputi pengembangan jaringan minyak dan gas bumi di Kabupaten Sidoarjo, jaringan minyak dan gas bumi dari Kabupaten Sidoarjo ke perairan kepulauan Kabupaten Sumenep serta jaringan infrastruktur ketenagalistrikan meliputi Gardu Induk Kawasan Industri Sidoarjo, Sidoarjo, Porong, Waru, Babadan, Balongbendo, Maspion, PT. Jatim Taman Steel, PT. Tjiwi Kimia, PT. Ispatindo, PT. Hani Jaya Steel, Tarik, Wonoayu dan Gardu Induk Sidoarjo II / Sukodono / Tulangan serta Buduran.
9	Rencana tata ruang terkait dengan sistem jaringan telekomunikasi (Pasal 43)	Meliputi sistem jaringan tetap di Kabupaten Sidoarjo;
10	Rencana tata ruang terkait dengan sistem jaringan prasarana lainnya (Pasal 47 ayat 1)	- SPAM Regional Umbulan yang melayani Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya, Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Gresik; - SPAM Regional Kalimati yang melayani Kabupaten Sidoarjo, Mojokerto dan Kota Surabaya
11	Sistem jaringan persampahan berupa Tempat Pembuangan Akhir (TPA) (Pasal 50 ayat 1)	TPA di wilayah Gerbangkertasusila yang melayani Kabupaten Gresik, Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Lamongan;
12	Rencana tata ruang terkait dengan Kawasan Lindung Geologi (Pasal 57 ayat 3)	Kawasan keunikan proses geologi Semburan Lumpur Lapindo di Kabupaten Sidoarjo;
13	Rencana tata ruang terkait dengan Kawasan Ekosistem Mangrove (Pasal 58 ayat 2 – 3)	Wilayah Kabupaten Sidoarjo terdapat Zona Tunda (Holding Zone) yaitu Zona yang berdasarkan RTR KSN Gerbangkertasusila ditetapkan sebagai zona pertahanan dan keamanan (U18)/zona R-d dan diusulkan pemanfaatannya sebagai Kawasan Perikanan (B4) digambarkan sebagai Zona Tunda (Holding Zone) Kawasan Ekosistem Mangrove/Kawasan Perikanan seluas kurang lebih 61 (enam puluh satu) hektare berada di Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, Kecamatan Sedati dan Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo;
14	Rencana tata ruang terkait dengan Kawasan pertanian (Pasal 62 ayat 1 - 2)	Kawasan pertanian seluas 1.667.981 hektare serta lahan pertanian pangan seluas 1.094.173 hektare yang salah satunya berada di Kabupaten Sidoarjo;
15	Rencana tata ruang terkait dengan Kawasan perikanan (Pasal 63)	Berupa Kawasan Minapolitan seluas 4.935.653 hektare yang salah satunya berada di Kabupaten Sidoarjo;

No	Kebijakan Tata Ruang Jawa Timur	Arah Kebijakan
16	Rencana tata ruang terkait dengan Kawasan Peruntukan Industri (Pasal 66)	Kawasan peruntukan industry seluas 76.050 hektare yang salah satunya berada di Kabupaten Sidoarjo;
17	Rencana tata ruang terkait dengan Kawasan Transportasi (Pasal 70 ayat 1, 3 dan 4)	Kawasan seluas 52.713 hektare yang salah satunya berada di Kabupaten Sidoarjo berupa Kawasan Bandar Udara yang terletak pada Wilayah administrasi Kabupaten Sidoarjo serta Kawasan Zona Tunda (Holding Zone) yang berdasarkan RTR KSN Gerbangkertasusila ditetapkan sebagai zona yang dapat dikembangkan sebagai area pengembangan Bandar Udara (U12)/zona R-d, diusulkan pemanfaatannya sebagai Kawasan Perikanan (B2) digambarkan sebagai Zona Tunda (Holding Zone) Kawasan Transportasi/Kawasan Perikanan seluas kurang lebih 105 (seratus lima) hektare berada di Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo;.
18	Rencana tata ruang terkait dengan Kawasan Pertahanan dan Keamanan (Pasal 71)	Kawasan yang tergambar dalam peta Pola Ruang seluas 16.329 hektare di Lanudal Juanda Kabupaten Sidoarjo, pangkalan militer di Lanudal Juanda dan Lanudal Mulyono Sidoarjo, Daerah Latihan Puspenerbal Sidoarjo, dan Daerah Latihan Militer Yonhamudse-8 Sidoarjo.
19	Kawasan Strategis (Pasal 73 & 74)	Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo juga termasuk dalam KSN (Kawasan Strategis Nasional) yang meliputi Kawasan Perkotaan Gresik – Bangkalan – Mookerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan (Gerbangkertasusila) dan KSP (Kawasan Strategis Provinsi) pada pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi – Super Koridor di Koridor Ekonomi Mojokerto – Sidoarjo – Pasuruan (Ngoro – Jabon – Gempol – Rembang)
20	Kawasan Ketentuan Khusus KKOP (Pasal 116 ayat 1 – 2)	Ketentuan khusus KKOP dengan memperhatikan ketentuan pembatasan tinggi bangunan dan jenis kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Kawasan tersebut tersebar di Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Jember, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Malang, Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya, Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Pacitan.
21	Kawasan Ketentuan Khusus Rawan Bencana (Pasal 118 ayat 4 – 5)	Kawasan rawan bencana banjir dan kawasan rawan bencana likuefaksi. Pada Kawasan rawan bencana banjir diwujudkan dengan system pengendalian banjir di Kali Kedunglarangan, pembangunan DAM (muara laut) di Sungai Sidokare dan Pucang serta Sungai Buntung.
22	Kawasan Ketentuan Khusus Cagar Budaya (Pasal 119 ayat 3)	Ketentuan khusus cagar budaya yang memiliki nilai strategis yaitu pelestarian bangunan pabrik gula watu tulis, tulangan, krembung, ketegan dan buduran.
23	Ketentuan khusus kawasan sempadan (Pasal	Mencakup sempadan Sungai, sempadan pantai, sempadan Danau/Waduk, dan sempadan pipa/kabel di wilayah perairan.

1.3.7 Hubungan antara RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029 dengan RTRW Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024-2044

Berbagai kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024–2044.

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo yaitu mewujudkan Sidoarjo sebagai pendukung pusat kegiatan nasional berbasis perdagangan jasa, industri, manajemen logistik, perikanan, dan pertanian melalui pemerataan yang harmoni dan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan penataan ruang wilayah ditetapkan kebijakan dan strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten, meliputi:

- a. kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten; dan
- b. strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten.

Adapun kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten meliputi:

- a. kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten terdiri atas:
 - pengembangan sistem pusat permukiman yang terpadu sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), PKL, dan Pusat Pelayanan Kawasan secara berhierarki dalam menunjang pengembangan Wilayah Jawa Timur dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat;
 - pembangunan dan pemerataan sistem jaringan prasarana Wilayah guna mendukung iklim investasi, pertumbuhan ekonomi regional, interkoneksi sistem antar Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan, serta perbaikan kualitas lingkungan hidup.
- b. kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten terdiri atas:
 - perlindungan dan pelestarian Kawasan Lindung yang berasaskan pada pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan Masyarakat;
 - pemanfaatan Kawasan Budi Daya yang mendukung pemantapan fungsi daerah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis perdagangan dan jasa, industri dan manajemen logistik, perikanan dan pertanian sesuai dengan daya dukung daya tampung;



- peningkatan ketahanan Ruang untuk mengurangi risiko bencana;
 - meningkatkan sinergi Pemanfaatan Ruang dan fungsi kawasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan.
- c. kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten yang berupa pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan optimalisasi pemanfaatan potensi Kawasan.

Selanjutnya untuk strategi penataan ruang wilayah kabupaten, meliputi:

- a. Pelaksanaan kebijakan pengembangan sistem pusat permukiman yang terpadu sebagai PKN, PKL, dan Pusat Pelayanan Kawasan secara berhierarki dalam menunjang pengembangan Wilayah Jawa Timur dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat yang terdiri atas:
- Pengembangan sistem pusat permukiman pendukung di Kabupaten sebagai bagian yang terintegrasi dengan pengembangan PKN dan Kawasan Strategis Nasional (KSN) Gerbangkertosusila;
 - Pengembangan PKL sebagai pusat pertumbuhan Wilayah bagian barat dan selatan Kabupaten Sidoarjo;
 - Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan yang mampu melayani kecamatan masing-masing sekaligus mendorong fungsi kawasan yang terpadu dalam mendorong pertumbuhan Wilayah Kabupaten Sidoarjo;
 - Pengembangan pusat kegiatan secara fungsional yang terintegrasi dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang mendorong pengembangan Wilayah Kabupaten Sidoarjo secara keseluruhan.
- b. Pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pemerataan sistem jaringan prasarana wilayah guna mendukung iklim investasi, pertumbuhan ekonomi regional, interkoneksi sistem antar Kawasan perkotaan dan Kawasan Perdesaan, serta perbaikan kualitas lingkungan hidup yang terdiri atas:
- Peningkatan aksesibilitas di Wilayah Kabupaten dan Wilayah sekitarnya dengan pengoptimalan fungsi jaringan jalan eksisting serta pengembangan jaringan jalan baru;



- Peningkatan pelayanan jaringan energi dan mengembangkan sumber energi baru dan terbarukan;
 - Peningkatan jaringan prasarana dan sarana telekomunikasi di seluruh Wilayah Kabupaten;
 - Optimalisasi sistem jaringan sumber daya air untuk penyediaan sumber air baku bagi pertanian, tambak, serta pengembangan sistem pengendalian banjir;
 - Peningkatan pemenuhan kebutuhan air bersih, pengoptimalan layanan penyediaan air bersih, dan identifikasi sumber air baku alternatif;
 - Pengembangan sarana prasarana pengelolaan limbah dan limbah B3;
 - Optimalisasi pengelolaan, pelayanan dan pemanfaatan persampahan;
 - Pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana;
 - Pengembangan jaringan drainase pada Kawasan Perkotaan.
- c. Pelaksanaan kebijakan perlindungan dan pelestarian Kawasan Lindung yang berasaskan pada pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan Masyarakat yang terdiri atas:
- perlindungan dan pelestarian terhadap Badan Air;
 - deliniasi dan perlindungan kawasan keunikan proses geologi, serta pencegahan terhadap pertambahan luas areal Lumpur Sidoarjo;
 - pelestarian serta pemantapan fungsi dan nilai manfaat pada Kawasan Cagar Budaya;
 - pelestarian terhadap kawasan konservasi mangrove; dan
 - pengembangan, pemanfaatan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau yang proporsional di Kawasan Perkotaan, meliputi:
 1. mengembangkan Ruang Terbuka Hijau dengan luas paling sedikit 20% (dua puluh persen) Ruang Terbuka Hijau Publik dan 10% (sepuluh persen) Ruang Terbuka Hijau Privat di Kawasan Perkotaan;
 2. intensifikasi Ruang Terbuka Hijau yang telah ada; dan
 3. mengoptimalkan lahan-lahan potensial sebagai Ruang Terbuka Hijau



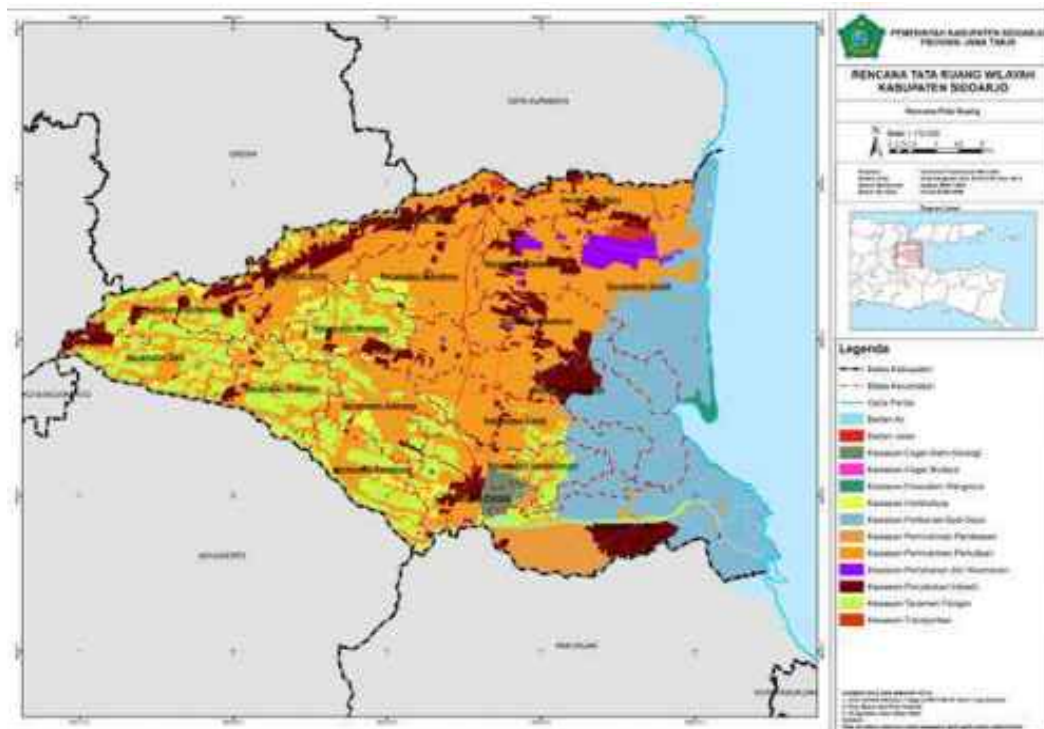
- d. Pelaksanaan kebijakan pemanfaatan Kawasan Budi Daya yang mendukung pemantapan fungsi daerah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis perdagangan dan jasa, industri dan manajemen logistik, perikanan dan pertanian sesuai dengan daya dukung daya tampung yang terdiri atas:
- penetapan dan perlindungan pada lahan pertanian pangan berkelanjutan, serta merevitalisasi jaringan irigasi teknis guna mendukung ketahanan pangan;
 - pengembangan potensi kawasan perikanan melalui peningkatan produktivitas komoditas perikanan budi daya;
 - optimalisasi Kawasan Peruntukan Industri eksisting, serta lokalisasi kegiatan industri dan pergudangan yang didukung pengembangan infrastruktur terpadu yang memadai;
 - pengembangan potensi wisata alam dan buatan guna mendorong terbentuknya kawasan destinasi atau daerah tujuan wisata;
 - pengembangan kawasan permukiman yang terpadu dan menunjang pengembangan metropolitan Gerbangkertosusila;
 - pengembangan kawasan permukiman berwawasan lingkungan dan pengentasan permukiman kumuh;
 - pengembangan Kawasan Transportasi sebagai simpul regional dan internasional, serta mendukung fungsinya sebagai kawasan berorientasi transit/ *transit oriented development* (TOD);
 - mendukung penetapan kawasan dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan.
- e. Pelaksanaan kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan optimalisasi pemanfaatan potensi Kawasan yang terdiri atas:
- mengembangkan infrastruktur pendukung dalam upaya perbaikan lingkungan;
 - menciptakan iklim mikro kawasan yang berkelanjutan;



- menetapkan Kawasan Rawan Bencana melalui sistem zonasi Kawasan Rawan Bencana;
 - mengembangkan jalur dan ruang evakuasi bencana pada Kawasan Rawan Bencana;
 - peningkatan upaya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana;
 - pemberdayaan Masyarakat tanggap bencana;
 - penanggulangan bencana melalui kearifan lokal dan berbasis Masyarakat.
- f. Pelaksanaan kebijakan peningkatan ketahanan ruang untuk mengurangi risiko bencana yang terdiri atas:
- mengembangkan Kawasan Budi Daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
 - mengembangkan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan Budi Daya tidak terbangun di sekitar kawasan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan pertahanan keamanan dengan Kawasan Budi Daya terbangun;
 - turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan.
- g. Pelaksanaan kebijakan meningkatkan sinergi Pemanfaatan Ruang dan fungsi kawasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan yang terdiri atas:
- pengembangan potensi perikanan melalui peningkatan dan pemberdayaan SDM, kemudahan dan fasilitasi modal usaha kelautan dan perikanan, serta hilirisasi produk hasil perikanan budi daya dan perikanan tangkap;
 - pengembangan pusat kegiatan dan kutub pertumbuhan baru melalui sektor industri dan pergudangan, serta manajemen logistik yang didukung infrastruktur wilayah dan/atau regional yang terpadu dan memadai.

Rencana pengembangan kewilayahan Kabupaten Sidoarjo berIPJak pada kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidoarjo sebagaimana disampaikan dalam **Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 – 2044**. Gambaran secara detil mengenai Pola Ruang Kabupaten Sidoarjo secara keseluruhan maupun yang terkait dengan wilayah perkotaan sebagaimana disajikan dalam gambar di bawah ini.

**Gambar 1.4 Kebijakan Pola Ruang Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2024-2044**



Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo, 2024

Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten meliputi :

1. Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah kawasan yang secara ekologis merupakan suatu ekosistem yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kabupaten, dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten. rencana pengembangan kawasan lindung di Kabupaten Sidoarjo terdiri dari Badan Air; Kawasan Perlindungan Setempat; Kawasan Lindung Geologi; Kawasan Cagar Budaya; dan Kawasan Mangrove.

2. Kawasan Budi Daya

Kawasan Budi Daya terdiri atas:

- a. Badan Jalan;
- b. Kawasan pertanian;
- c. Kawasan perikanan;
- d. Kawasan Peruntukan Industri;
- e. Kawasan pariwisata;
- f. Kawasan permukiman;
- g. Kawasan Transportasi; dan
- h. Kawasan Pertahanan dan Keamanan

1.3.8 Keselarasan antara RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2025-2029 dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga berkewajiban mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan terdapat 319 indikator sasaran dan sesuai dengan kewenangan Provinsi Jawa Timur terdapat 212 indikator sasaran yang terbagi dalam Tujuan 1 sampai dengan Tujuan 17 dari TPB/SDGs.

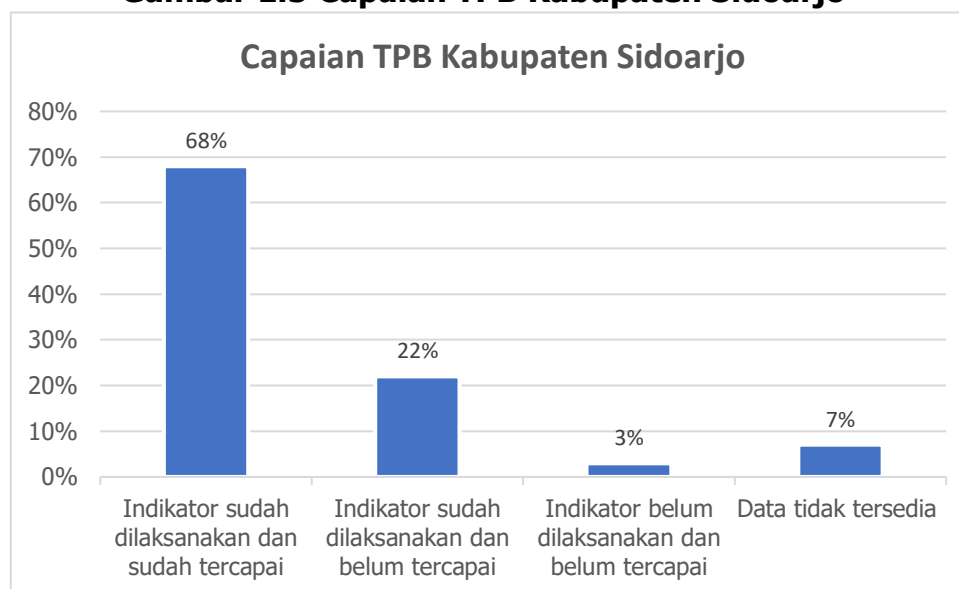
Tabel 1.3 Keselarasan Dokumen RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029 dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

NO	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029
1	Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimanapun	Misi 1: Menciptakan SDM Berintegritas, Berakhlak, dan Mewujudkan Jaminan Kesejahteraan Sosial yang Merata bagi Masyarakat Sidoarjo
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan Dan Gizi Yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	Misi 4: Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas Merata dan Mendukung Pembangunan Sektor Potensial Strategis Berkelanjutan
3	Menjamin Kehidupan Yang Sehat Dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Misi 1: Menciptakan SDM Berintegritas, Berakhlak, dan Mewujudkan Jaminan Kesejahteraan Sosial yang Merata bagi Masyarakat Sidoarjo

NO	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat Untuk Semua	Misi 1: Menciptakan SDM Berintegritas, Berakhlak, dan Mewujudkan Jaminan Kesejahteraan Sosial yang Merata bagi Masyarakat Sidoarjo
5	Mencapai Kesenjangan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	Misi 1: Menciptakan SDM Berintegritas, Berakhlak, dan Mewujudkan Jaminan Kesejahteraan Sosial yang Merata bagi Masyarakat Sidoarjo
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua	Misi 4: Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas Merata dan Mendukung Pembangunan Sektor Potensial Strategis Berkelanjutan
7	Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern Untuk Semua	Misi 4: Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas Merata dan Mendukung Pembangunan Sektor Potensial Strategis Berkelanjutan
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Misi 2: Memantapkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Merata bagi Pelaku Ekonomi
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	Misi 4: Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas Merata dan Mendukung Pembangunan Sektor Potensial Strategis Berkelanjutan
10	Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antarneagra	Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Pelayanan Prima dengan Mengandalkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan	Misi 5: Mewujudkan Masyarakat yang Religius, Setara, Tentram, dan Nyaman
12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	Misi 2: Memantapkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Merata bagi Pelaku Ekonomi
13	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	Misi 4: Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas Merata dan Mendukung Pembangunan Sektor Potensial Strategis Berkelanjutan
14	Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudra untuk Pembangunan Berkelanjutan	Misi 4: Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas Merata dan Mendukung Pembangunan Sektor Potensial Strategis Berkelanjutan
15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari,	Misi 1: Menciptakan SDM Berintegritas, Berakhlak, dan Mewujudkan Jaminan Kesejahteraan Sosial yang Merata bagi Masyarakat Sidoarjo

NO	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029
	Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Misi 5: Mewujudkan Masyarakat yang Religius, Setara, Tentram, dan Nyaman

Gambar 1.5 Capaian TPB Kabupaten Sidoarjo



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Sidoarjo, 2024

Capaian indikator TPB Kabupaten Sidoarjo dapat dirinci antara lain 67% indikator dengan status sudah dilaksanakan dan sudah tercapai, 21% indikator sudah dilaksanakan dan belum tercapai, 2% indikator belum dilaksanakan dan belum tercapai, 12% indikator tidak tersedia data serta 10% indikator belum dilaksanakan.

Tabel 1.4
Rekapitulasi Capaian Indikator TPB Kabupaten Sidoarjo

Nomor Tujuan	Indikator sudah dilaksanakan dan sudah tercapai	Indikator sudah dilaksanakan dan belum tercapai	Indikator belum dilaksanakan dan belum tercapai	Data tidak tersedia	Total
TPB 1	12	10	1	1	24
TPB 2	6	3		2	11
TPB 3	21	7	1	2	31
TPB 4	7	6			13
TPB 5	7	6		1	14
TPB 6	9	4		3	16
TPB 8	8	6	1	4	19
TPB 9	8	3		2	13
TPB 10	6	3	1	1	11
TPB 11	2	1	2	3	8
TPB 12	2	1		2	5
TPB 13	2				2
TPB 15	3		1		4
TPB 16	12	6		3	21
TPB 17	5	7	1	2	15
Total	112	61	8	26	207

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Sidoarjo, 2024

Analisis Capaian TPB :

1. TPB 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera

- 21 indikator tercapai: Peningkatan layanan kesehatan, penurunan angka kematian ibu dan anak, serta peningkatan akses terhadap fasilitas kesehatan mencerminkan komitmen Sidoarjo dalam memastikan kesehatan dan kesejahteraan warganya.

2. TPB 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh

- 12 indikator tercapai: Kemajuan dalam menciptakan lingkungan yang damai, adil, dan inklusif. Upaya untuk memperkuat lembaga pemerintahan, akses terhadap keadilan, serta pengurangan kekerasan dan korupsi menunjukkan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kelembagaan.

Namun, masih terdapat tantangan yang signifikan, terutama dalam TPB 1 (Penghapusan Kemiskinan), di mana 10 indikator belum tercapai. Ketimpangan ekonomi dan terbatasnya akses terhadap pekerjaan layak menjadi hambatan utama. Untuk mengatasinya, diperlukan langkah nyata seperti penguatan program pengentasan kemiskinan, peningkatan akses pendidikan dan keterampilan, serta kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam menciptakan lapangan kerja yang lebih inklusif. Komitmen yang telah dibangun harus terus diperkuat agar seluruh indikator TPB dapat dicapai secara merata, memastikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Sidoarjo.

1.3.9 Keselarasan antara RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029 dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2025-2029 dengan KLHS RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029 dapat dilihat dari persandingan isu strategis sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 1.5 Keselarasan Dokumen RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029 Dengan KLHS RPJMD Tahun 2025-2029

No	Konsentrasi Isu Strategis KLHS RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029	RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029
1	Keterbatasan penyediaan air minum	Misi 4: Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas Merata dan Mendukung Pembangunan Sektor Potensial Strategis Berkelanjutan Misi 5: Mewujudkan Masyarakat yang Religius, Setara, Tentram, dan Nyaman
2	Rendahnya Upaya Pengelolaan Sampah	Misi 4: Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas Merata dan Mendukung Pembangunan Sektor Potensial Strategis Berkelanjutan Misi 5: Mewujudkan Masyarakat yang Religius, Setara, Tentram, dan Nyaman
3	Percepatan pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan UMKM	Misi 2: Memantapkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Merata bagi Pelaku Ekonomi Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Pelayanan Prima dengan Mengandalkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

No	Konsentrasi Isu Strategis KLHS RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029	RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029
4	Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Sidoarjo yang Masih Tinggi	Misi 1: Menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) Berintegritas, Berakhlak dan Mewujudkan Jaminan Kesejahteraan Sosial yang Merata bagi Masyarakat Sidoarjo Misi 2: Memantapkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Merata bagi Pelaku Ekonomi
5	Perlunya peningkatan nilai APM di Tingkat Sekolah Dasar hingga Menengah	Misi 1: Menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) Berintegritas, Berakhlak dan Mewujudkan Jaminan Kesejahteraan Sosial yang Merata bagi Masyarakat Sidoarjo
6	Perlunya percepatan penanganan kemiskinan	Misi 1: Menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) Berintegritas, Berakhlak dan Mewujudkan Jaminan Kesejahteraan Sosial yang Merata bagi Masyarakat Sidoarjo Misi 2: Memantapkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Merata bagi Pelaku Ekonomi
7	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Misi 1: Menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) Berintegritas, Berakhlak dan Mewujudkan Jaminan Kesejahteraan Sosial yang Merata bagi Masyarakat Sidoarjo Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Pelayanan Prima dengan Mengandalkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

1.3.10 Hubungan antara RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029 dengan RIPJPID 2025-2030

RIPJPID merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif yang memuat peran riset dan inovasi dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan daerah. Dokumen RIPJPID Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan program prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029 guna mengakselerasi pencapaian target program. Dengan demikian RIPJPID Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029 menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029. Dalam hal ini RIPJPID Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029 menjadi landasan kebijakan berbasis bukti, harapannya implementasi kebijakan dapat lebih efektif dan akseleratif dalam menangani masalah prioritas di Kabupaten Sidoarjo. Dokumen RIPJPID Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2030 juga menjelaskan tantangan

pengembangan inovasi dan riset di Kabupaten Sidoarjo terdiri dari rendahnya keterampilan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran riset, dan infrastruktur *research and development* yang masih minim. Akan tetapi, Kabupaten Sidoarjo tetap berpeluang karena lokasinya yang strategis di Kawasan Gerbangkartasusila, SDM melek huruf tinggi, dan budaya inovasi yang sudah terbentuk lewat kompetisi daerah. *Roadmap* hubungan antara RIPJPID dengan RPJMD Sidoarjo Tahun 2025 – 2029 dapat ditampilkan pada Tabel berikut ini.

Tabel 1.6
Keselarsan Dokumen RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2025-2029
Dengan RIPJPID Tahun 2025-2030

MISI	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR	SASARAN AKHIR
MISI I Menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) Berintegritas, Berakhlak, dan Mewujudkan Jaminan Kesejahteraan Sosial yang Merata bagi Masyarakat Sidoarjo	Akselerasi Peningkatan IPM	Indeks Pembangunan Manusia	Peningkatan IPM
	Akselerasi penurunan stunting	Prevalensi Stunting	Penurunan Prevalensi stunting
	Kajian Percepatan Capaian Indeks Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	Peningkatan Indeks RLS dan HLS
		Harapan Lama Sekolah	
	Kajian Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	Usia Harapan Hidup	Peningkatan AHH
	Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Tingkat Kemiskinan	Penurunan Tingkat Kemiskinan
	Analisis Kemiskinan Ekstrem dan Lokus	Indeks Keparahan dan kedalaman kemiskinan	Penurunan Tingkat Kemiskinan
	Analisis determinan kemiskinan daerah	Angka Kemiskinan	Penurunan Tingkat Kemiskinan
	Optimalisasi BUMDes dan Usaha Ekonomi Desa	Peta ekonomi BUMDes	Penurunan Tingkat Kemiskinan
	Evaluasi dampak intervensi terhadap penurunan angka kemiskinan	Optimalisasi dan Efisiensi Bansos	Penurunan Tingkat Kemiskinan
	Analisis minat usaha/minat bekerja masyarakat miskin	Pemetaan minat bekerja Masyarakat miskin	Penurunan TPT
	Rencana Tenaga Kerja Daerah	Tingkat Pengangguran Terbuka	Penurunan TPT
	Analisis penyelarasan kebutuhan tenaga kerja dengan kebutuhan dunia usaha	Tingkat Pengangguran Terbuka	Penurunan TPT
MISI II Memantapkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Merata bagi Pelaku Ekonomi	Rencana Induk Produk Unggulan Daerah	Peta Klaster Produk Unggulan	Pengembangan Klaster PUD
	Inovasi Produk Unggulan	Hasil Inovasi PUD	
	Roadmap Ekonomi Kreatif	Peta Jalan Ekonomi Kreatif	Pertumbuhan ekonomi sub sektor ekonomi kreatif
	Inovasi Produk Ekonomi Kreatif	Hasil Inovasi Ekraf	
	Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah	- Pertumbuhan Ekonomi sektor pariwisata	Pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata
		- Rasio PDRB Akomodasi mamin	



MISI	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR	SASARAN AKHIR
	Kajian Peningkatan Karakteristik Wisata Event dan MICE	Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisata	Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi Peningkatan realisasi investasi
	Kajian Penerapan Ekonomi Hijau	Pertumbuhan Ekonomi	
	Kajian Penerapan Ekonomi Biru	Pertumbuhan Ekonomi	
	Kajian Perbaikan Iklim Penanaman Modal Daerah	Realisasi Investasi	
	Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Investasi Daerah	Peta Potensi dan Peluang Investasi	
	Kajian Proyek Investasi yang siap Ditawarkan (IPRO Investment Project Ready to Offer)	Proyek Investasi yang layak secara finansial dan Non Finansial	
	Memo Info Investasi	Proyek Investasi yang ditawarkan kepada investor	
MISI III Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Pelayanan Prima dengan Mengandalkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Analisis Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya tata kelola pemerintahan
	Analisis Indeks Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	
	Pengembangan Sistem Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	
	Kajian Penilaian Indeks SPBE	Indeks SPBE	
	Penyusunan Masterplan SPBE	Indeks SPBE	
	Penyusunan Manajemen Layanan SPBE	Indeks SPBE	
	Penyusunan SOP SPBE	Indeks SPBE	
	Evaluasi Pelaksanaan SPBE	Indeks SPBE	
MISI IV Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas Merata dan Mendukung Pembangunan Sektor Potensial dan Sektor Strategis Berkelanjutan	Masterplan Infrastruktur	Indeks Infrastruktur	Peningkatan Indeks Infrastruktur
	Rencana Kemitraan/Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Daerah	Rencana Kemitraan/KPBU	
	Rencana aksi penyediaan sanitasi dan air minum aman	Indeks Infrastruktur	
	Masterplan transportasi umum	V/C Ratio	Penurunan Kemacetan
	Kajian Integrasi transportasi umum	Peta Integrasi Transportasi umum	
	Kajian penyediaan kantong parkir/park & ride	Jumlah kebutuhan kantong parkir	
	Masterplan Persampahan	Persentase Timbulan sampah terolah	Peningkatan kualitas lingkungan hidup
	Kajian Lingkungan Hidup Strategis	IKLH	
	Kajian Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan	- IKLH - Persentase Penurunan Emisi GRK	
	Kajian Ketahanan Bencana	Indeks Risiko Bencana	
	Kajian Liveable City (Kota Layak Huni)	Persentase Penurunan Emisi GRK	
	Inventarisasi Gas Rumah Kaca	Persentase Penurunan Emisi GRK	
	Rencana Mitigasi perubahan iklim	Indeks Risiko Bencana iklim	

MISI	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR	SASARAN AKHIR
	Studi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Inklusif di Fasilitas Publik Sidoarjo	Pembangunan Inklusif	Peningkatan Indeks Rasa Aman
MISI V Mewujudkan Masyarakat yang Religius, Setara, Tentram dan Nyaman	Kajian Dampak Media Sosial terhadap Indeks Toleransi Sidoarjo	Indeks Toleransi	Peningkatan Indeks Toleransi
	Kajian Penguatan Ekonomi Berbasis Komunitas Tempat Ibadah untuk Kemandirian Sosial	Indeks Toleransi	Peningkatan Indeks Toleransi
	Kajian Risiko Sosial dan Model Mitigasi Konflik Komunal Berbasis Kearifan Lokal Sidoarjo	Indeks Rasa Aman	Peningkatan Indeks Rasa Aman
	Kajian Efektivitas Penerapan Perda Ketertiban Umum	Indeks Rasa Aman	Peningkatan Indeks Rasa Aman
	Kajian Peran Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dalam Pencegahan Perkawinan Anak dan Kekerasan Berbasis Gender	Indeks Kesenjangan Gender	Peningkatan IKG
	Kajian Indeks Kesenjangan Gender (IKG) Sidoarjo	Indeks Kesenjangan Gender	Peningkatan IKG
	Kajian Efektivitas Penerapan Perda Ketertiban Umum	Indeks Rasa Aman	Peningkatan Indeks Rasa Aman

1.3.11 Hubungan antara RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029 dengan Rencana Sektoral

Rencana sektoral adalah dokumen yang disusun oleh Perangkat Daerah (PD) atau dinas teknis yang sekurang-kurangnya berisi program dan kegiatan sektoral; target indikator sektoral; dan analisis tantangan dan strategi teknis di sektor tersebut. Hubungan dengan RPJMD bersifat hierarkis, fungsional, dan integratif karena RPJMD menjadi acuan bagi seluruh rencana sektoral dan PD. RPJMD dan Rencana Sektoral keduanya saling terkait erat dan harus selaras dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah memiliki beberapa Rencana Sektoral yang menjadi rujukan penyusunan RPJMD sesuai ketentuan RPJPD sebagaimana tertuang pada tabel di bawah.

Tabel 1.7
Keselarasan Dokumen RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2025-2029
Dengan Rencana Sektoral

DOKUMEN PERENCANAAN SEKTORAL	KETERANGAN
Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) Tahun 2022-2026	RAD PUG merupakan dokumen turunan dan pendukung RPJMD, khususnya dalam memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan dalam RPJMD telah mempertimbangkan kesetaraan dan keadilan gender. Peran RAD PUG : 1. Menjamin setiap kebijakan dan program pembangunan responsif terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki 2. Mengidentifikasi serta menanggulangi kesenjangan gender dalam berbagai sektor pembangunan 3. Memastikan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan dirasakan secara setara oleh semua gender
Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD KLA) Tahun 2022-2026	RAD KLA adalah instrumen operasional untuk memastikan bahwa program dan kegiatan dalam RPJMD mengintegrasikan kepentingan dan hak anak. Peran RAD KLA: 1. Menjamin tumbuh kembang anak secara optimal sebagai bagian dari pembangunan SDM daerah 2. Mendorong kebijakan dan program yang berpihak pada perlindungan anak dan keluarga 3. Memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah untuk pelaksanaan kebijakan ramah anak
Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD PG) Tahun 2025-2029	RAD PG merupakan dokumen tematik dan operasional yang memperkuat pelaksanaan RPJMD, khususnya pada urusan ketahanan pangan, kesehatan, dan peningkatan kualitas SDM. Peran RAD PG: 1. Menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan konsumsi pangan bergizi seimbang untuk semua kelompok masyarakat 2. Menyediakan strategi dan aksi lintas sektor dalam penguatan sistem pangan daerah dari produksi hingga konsumsi 3. Menyusun intervensi gizi spesifik dan sensitif untuk menurunkan angka stunting, gizi buruk, dan rawan pangan 4. Memastikan asupan gizi yang cukup untuk mendukung tumbuh kembang anak dan produktivitas penduduk
Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)	Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) menjadi acuan dan sumber arah kebijakan kependudukan dalam RPJMD agar pembangunan daerah selaras dengan kondisi, potensi, dan tantangan demografi. Program-program di RPJMD yang berkaitan dengan kependudukan (pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, KB, dan administrasi kependudukan) mengacu pada strategi dan arah kebijakan GDPK.
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata (RIPIK)	RIPIK merupakan dokumen sektoral turunan dari RPJPD, dan menjadi pedoman operasional sektor pariwisata dalam RPJMD. Dengan kata lain, RPJMD menyerap arah dan prioritas pembangunan pariwisata yang termuat dalam RIPIK. RPJMD menjabarkan rencana pembangunan pariwisata dalam bentuk program dan kegiatan prioritas (misalnya pengembangan destinasi unggulan, promosi wisata digital, peningkatan SDM pariwisata, dll) yang bersumber dari RIPIK.

DOKUMEN PERENCANAAN SEKTORAL	KETERANGAN
Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Tahun 2018-2037	RISPAM merupakan rencana sektoral bidang air minum yang harus diintegrasikan ke dalam RPJMD, terutama pada arah kebijakan dan program prioritas bidang infrastruktur dasar dan pelayanan publik, yakni memiliki arah kebijakan pembangunan air minum yang jelas dan terukur, menjamin keterpaduan antara rencana teknis dan kebijakan pembangunan daerah, meningkatkan efisiensi investasi infrastruktur air minum, serta mewujudkan target akses air minum 100% sesuai tujuan SDGs
Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD) Tahun 2018-2037	RISPALD menjadi dokumen sektoral yang mengarahkan pembangunan sistem sanitasi di daerah, dan hasilnya harus diintegrasikan ke dalam RPJMD agar pembangunan bidang sanitasi selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah secara keseluruhan. Hal tersebut diharapkan dapat menjamin keterpaduan antara kebijakan teknis sanitasi dan kebijakan pembangunan daerah, menyusun program prioritas yang tepat sasaran, meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat, serta mendukung pencapaian SDGs Tujuan 6 (Akses air bersih dan sanitasi layak untuk semua).
MASTERPLAN BANJIR UTARA (direview dengan RENCANA INDUK DRAINASE KAB SIDOARO TAHUN 2022)	Masterplan Banjir Utara menjadi rencana sektoral dan teknis yang mendukung pelaksanaan RPJMD, khususnya dalam bidang infrastruktur, tata ruang, lingkungan hidup, dan penanggulangan bencana. Keterkaitan Masterplan Pengendalian Banjir Wilayah Utara (Masterplan Banjir Utara) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sangat penting, karena keduanya saling mendukung dalam upaya mengurangi risiko bencana banjir, melindungi infrastruktur dan masyarakat, serta mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan tangguh terhadap bencana.
MASTERPLAN BANJIR SELATAN (direview dengan RENCANA INDUK DRAINASE KAB SIDOARO TAHUN 2022)	Masterplan Banjir Selatan merupakan rencana sektoral teknis yang menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD, terutama pada bidang infrastruktur, lingkungan hidup, tata ruang, dan penanggulangan bencana. Dengan kata lain, RPJMD menerjemahkan arah kebijakan dari Masterplan Banjir Selatan ke dalam program dan kegiatan konkret pembangunan daerah. Keterkaitan Masterplan Pengendalian Banjir Wilayah Selatan (Masterplan Banjir Selatan) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sangat erat, karena keduanya berfungsi saling mendukung dalam upaya mengurangi risiko banjir, meningkatkan keselamatan masyarakat, serta mewujudkan pembangunan daerah yang tangguh terhadap bencana dan berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan Masterplan Banjir Selatan ke dalam RPJMD, pemerintah daerah akan memiliki arah kebijakan pembangunan berbasis mitigasi bencana, menjamin efektivitas investasi infrastruktur pengendalian banjir, meningkatkan ketahanan wilayah terhadap dampak perubahan iklim, dan mewujudkan pembangunan yang aman, berkelanjutan, dan berpihak pada keselamatan masyarakat.

DOKUMEN PERENCANAAN SEKTORAL	KETERANGAN
MASTERPLAN BANJIR TENGAH (direview dengan RENCANA INDUK DRAINASE KAB SIDOARO TAHUN 2022)	Masterplan Banjir Tengah menjadi acuan teknis dan sumber data dalam penyusunan RPJMD, terutama di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, lingkungan hidup, dan penanggulangan bencana. RPJMD kemudian menerjemahkan arah kebijakan dari Masterplan ke dalam program, kegiatan, dan indikator pembangunan. Keterkaitan Masterplan Pengendalian Banjir Wilayah Tengah (Masterplan Banjir Tengah) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sangat erat, karena keduanya saling melengkapi dalam upaya mengurangi risiko banjir, meningkatkan kualitas infrastruktur, dan mewujudkan pembangunan daerah yang aman, tangguh, dan berkelanjutan. Dengan integrasi Masterplan ke dalam RPJMD, pemerintah daerah akan: ☑ Menjamin konsistensi arah pembangunan dengan rencana pengendalian banjir. ☑ Meningkatkan efektivitas investasi infrastruktur. ☑ Mengurangi risiko dan dampak banjir di kawasan padat penduduk. ☑ Mewujudkan kota yang aman, nyaman, dan berkelanjutan.
Rencana Induk Ruang Terbuka Hijau (RI RTH) Tahun 2024-2044	RI RTH menjadi acuan teknis bagi RPJMD untuk menetapkan program pembangunan, alokasi anggaran, dan strategi pengelolaan lingkungan hidup terkait ruang terbuka hijau. Keterkaitan Rencana Induk Ruang Terbuka Hijau (RI RTH) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sangat penting, karena RI RTH berfungsi sebagai pedoman teknis dan strategis untuk pengelolaan ruang terbuka hijau, sedangkan RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menetapkan arah kebijakan, program, dan prioritas pembangunan dalam jangka menengah (5 tahun). Integrasi RI RTH ke dalam RPJMD memastikan bahwa pembangunan kota ramah lingkungan dan berkelanjutan, ketersediaan ruang terbuka hijau yang memadai dan berkualitas, perlindungan ekosistem perkotaan, dan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
Rencana Induk Pengelolaan Persampahan Tahun 2024-2044	Rencana Induk Pengelolaan Persampahan merupakan dokumen 20 tahunan yang memuat tentang kebijakan operasional bagi RPJMD dalam merancang program dan kegiatan pengelolaan sampah, sehingga pengelolaan sampah terintegrasi dan berkelanjutan. Dokumen RIPP Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024-2044 mempunyai Keterkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yakni menjadi pedoman teknis dan strategis untuk pengelolaan sampah, sedangkan RPJMD menetapkan arah kebijakan, prioritas program, dan indikator pembangunan daerah dalam jangka menengah (5 tahun). Integrasi RIPP ke dalam RPJMD memastikan bahwa pengelolaan sampah daerah terencana dan berkelanjutan, peningkatan layanan publik di bidang kebersihan, perlindungan lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat, serta fektivitas investasi dan pembangunan fasilitas persampahan.
Rencana Induk Transportasi Tahun 2021	RIT menjadi acuan teknis dan kebijakan operasional RPJMD di bidang transportasi, mobilitas perkotaan, keselamatan lalu lintas, dan pembangunan infrastruktur transportasi. Keterkaitan Rencana Induk Transportasi (RIT) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sangat penting karena RIT menjadi pedoman teknis dan strategis untuk pengembangan sistem transportasi di daerah, sementara RPJMD menetapkan arah kebijakan, program, dan prioritas pembangunan selama 5 tahun.

DOKUMEN PERENCANAAN SEKTORAL	KETERANGAN
Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2025-2029	Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen yang memuat kebijakan dan sasaran pembangunan sosial yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan secara lebih rinci dan terpadu di daerah serta sebagai penjabaran tematik dari RPJMD di bidang penanggulangan kemiskinan.
Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberculosis Tahun 2025-2029	RAD TB merupakan dokumen turunan tematik dari RPJMD di bidang kesehatan. Semua strategi, sasaran, dan target penanggulangan TB harus selaras dengan arah kebijakan pembangunan kesehatan daerah yang tercantum dalam RPJMD.
Rencana Aksi Daerah Standard Pelayanan Minimal Tahun 2025-2029	Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberculosis (RAD TB) merupakan dokumen turunan dan penjabaran operasional dari RPJMD, khususnya di bidang kesehatan masyarakat. RPJMD memberikan arah dan sasaran strategis, sedangkan RAD TB memastikan pelaksanaannya berjalan secara teknis, terkoordinasi, dan berkelanjutan untuk mencapai target eliminasi TB di daerah.
Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2025-2029	RAD Stunting merupakan penjabaran tematik dari RPJMD, khususnya pada arah kebijakan dan sasaran pembangunan manusia. Hal tersebut berarti bahwa target dan strategi dalam RAD Stunting harus selaras dengan tujuan dan indikator RPJMD di bidang kesehatan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. RPJMD memberikan arah dan target strategis, sementara RAD Stunting memastikan pelaksanaan teknis yang terukur, terkoordinasi, dan berkelanjutan untuk mencapai target penurunan stunting di daerah.

I.4 Maksud dan Tujuan

I.4.1 Maksud

RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud untuk menjabarkan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah ke dalam perencanaan lima tahun, guna memberikan arah dalam melaksanakan pembangunan daerah bagi seluruh pemangku kepentingan.

I.4.2 Tujuan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029 bertujuan untuk:

- Mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah melalui kebijakan dan program pembangunan daerah yang dilandasi oleh prinsip pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*), dilaksanakan secara sinergis, terpadu, dengan memanfaatkan sumberdaya pembangunan daerah secara efisien, efektif serta berkeadilan;

- b. Menjadi tolok ukur kinerja Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, serta instrumen bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam melaksanakan fungsi pengawasan;
- c. Memberikan arah pembangunan daerah jangka menengah, sebagai pedoman penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan RKPD;
- d. Mewujudkan pembangunan daerah yang mengedepankan pendekatan *People Centered Development* dengan memperhatikan kearifan lokal;
- e. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

I.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini disajikan mengenai gambaran umum penyusunan RPJMD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1) Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RPJMD, proses penyusunan RPJMD, kedudukan RPJMD tahun rencana dalam RPJPD, keterkaitan antara dokumen RPJMD dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah.

2) Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RPJMD, baik yang berskala nasional, maupun lokal.

3) Hubungan Antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan dokumen RPJMD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain seperti: RPJMN, RPJPD, RPJMD Provinsi, RTRW, KLHS, RIPJPID, Rencana Sektoral

4) Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan RPJMD bagi daerah yang bersangkutan.

5) Sistematika Penulisan

Mengemukakan sistematika penyusunan dokumen RPJMD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

Bagian ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi empat aspek serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Dilanjutkan dengan pembahasan mengenai gambaran keuangan daerah yang menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis mengenai pengelolaan keuangan daerah. Terakhir penjelasan tentang permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis.

1) Gambaran Umum Kondisi Daerah

a. Aspek Geografi dan Demografi

Pada bagian ini dijelaskan kondisi umum geografis mengenai kondisi geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana.

b. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Pada bagian ini dijelaskan kondisi umum kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari capaian indikator kinerja pembangunan daerah aspek kesejahteraan masyarakat.

c. Aspek Daya Saing Daerah

Pada bagian ini dijelaskan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari upaya menunjukkan daya saing daerah

d. Aspek Pelayanan Umum

Pada bagian ini dijelaskan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan.

2) Gambaran Keuangan Daerah

a. Kinerja Pelaksanaan APBD

Bagian ini menguraikan perkembangan pendapatan dan belanja tidak langsung, proporsi sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan, dan gambaran realisasi belanja daerah.

b. Neraca Daerah

Bagian ini menguraikan sekurang-kurangnya mengenai perkembangan neraca daerah, analisis rasio likuiditas, analisis rasio solvabilitas dan analisis rasio aktivitas.

c. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Pada bagian ini dijelaskan gambaran kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu terkait proporsi penggunaan anggaran dan hasil analisis pembiayaan.

d. Proporsi Penggunaan Anggaran

Pada bagian ini diuraikan mengenai proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dan proporsi realisasi belanja.

e. Analisis Pembiayaan

Pada bagian ini diuraikan mengenai analisis defisit riil, komposisi penutup defisit riil anggaran, dan realisasi Silpa.

f. Kerangka Pendanaan

Pada bagian ini diuraikan mengenai proyeksi data masa lalu dan asumsi yang digunakan untuk memproyeksi serta kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi proyeksi data.

3) Permasalahan dan Isu Strategis

a. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan disajikan disajikan dalam dua bentuk, yang pertama berdasarkan urusan dan kedua adalah rumusan permasalahan pembangunan tingkat daerah. Permasalahan Pembangunan di tingkat Urusan sebagai pijakan untuk penetapan program prioritas, sedangkan permasalahan pembangunan tingkat daerah menjadi pijakan untuk perumusan isu strategis daerah.

b. Isu Strategis

Isu Strategis merupakan kristalisasi dari permasalahan pembangunan dan sekaligus mencerminkan eskalasi isu penting di tingkat internasional, nasional, maupun regional. Isu Strategis Daerah pada saat perumusan RPJMD akan mendukung rumusan Misi kepala daerah terpilih.

BAB III: VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

1) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Perumusan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang menunjukkan kerangka logis sistematis dan komprehensif, yang menjadi dasar pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka menyusun program dan kegiatan untuk mencapainya

2) Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Menjelaskan tentang bagaimana strategi dan arah kebijakan serta program-program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang didukung Perangkat Daerah untuk dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB IV: PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

1) Program Perangkat Daerah

Menjelaskan kebijakan alokasi pendanaan/anggaran program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui penentuan pagu indikatif kepada perangkat daerah, sehingga alokasi anggaran ke dalam program benar-benar dapat mendukung pencapaian kinerja tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan.

2) Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Dilanjutkan pembahasan tentang pengukuran kinerja Pemerintah Daerah dengan indikator dan target kinerja yang terukur dan tepat dalam mengukur pencapaian tujuan dan sasaran yang akhirnya akan mampu mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah. Indikator sebagaimana dimaksud berupa Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD).



BAB V: PENUTUP

Menyajikan ketentuan mengenai Aturan Peralihan dan Kaidah Pelaksanaan. Aturan Peralihan menyampaikan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk menjamin keberlanjutan perencanaan, sedangkan Kaidah Pelaksanaan menyampaikan berbagai petunjuk penggunaan dokumen RPJMD bagi aparatur pemerintah maupun *stakeholder* pembangunan lainnya.

Bab II

Gambaran Umum Daerah

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

a. Letak Geografis dan Batas Wilayah

Kabupaten Sidoarjo merupakan satu-satunya Kabupaten di Jawa Timur yang terletak diantara dua sungai besar pecahan sungai Brantas yaitu sungai Porong (47 Km) di sebelah Selatan dan sungai Surabaya (32,5 Km) di sebelah Utara, sehingga terkenal dengan sebutan Kota Delta. Secara geografis letak Kabupaten Sidoarjo adalah antara 7,3° - 7,5° Lintang Selatan dan 112,5°- 112,9° Bujur Timur, dengan batas wilayah:

1. Sebelah Utara : Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik
2. Sebelah Timur : Selat Madura
3. Sebelah Selatan : Kabupaten Pasuruan
4. Sebelah Barat : Kabupaten Mojokerto

Peraturan Daerah RTRW Nomor 4 Tahun 2024 mencantumkan bahwa Kabupaten Sidoarjo memiliki luas wilayah 72.464 Ha yang terbagi atas 18 Kecamatan, 346 Desa dan Kelurahan. Kabupaten Sidoarjo berada dalam Kawasan Strategis Gerbangkertasusila, sehingga kondisi ini berimplikasi pada tantangan dan peluang bagi pemerintah daerah dalam pengembangan kebijakan kewilayahan yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan, kawasan Gerbangkertasusila merupakan wilayah metropolitan terbesar di Jawa Timur. Terlebih lagi posisi Kabupaten Sidoarjo sebagai area penyangga Kota Surabaya berimplikasi pada peta pembangunan wilayah, baik dari segi industri, pertanian, maupun permukiman.

Sementara itu desa-desa di Kabupaten Sidoarjo terbagi menjadi desa pedesaan (*rural area*) dan desa perkotaan (*urban area*). Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu penyangga Ibu Kota Provinsi Jawa Timur

Gambar 2.1
Peta Kabupaten Sidoarjo



No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (Ha)
1	Sidoarjo	24	6.332,88
2	Buduran	15	4.076,81
3	Candi	24	4.079,04
4	Porong	15	3.013,39
5	Krembung	19	2.919,53
6	Tulangan	22	3.158,19

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (Ha)
7	Tanggulangun	18	3.202,44
8	Jabon	13	8.411,64
9	Krian	22	3.254,95
10	Balongbendo	20	3.130,22
11	Wonoayu	23	3.421,55
12	Tarik	20	3.657,99
13	Prambon	20	3.366,60
14	Taman	24	3.176,97
15	Waru	17	3.057,91
16	Gedangan	15	2.398,86
17	Sedati	16	8.537,06
18	Sukodono	19	3.268,34

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo, 2025

Pembagian potensi berdasarkan masing-masing wilayah telah tercantum dalam dokumen RTRW. Penentuan sistem pusat permukiman pada Kabupaten Sidoarjo didasarkan pada hasil analisis pemusatan fasilitas dan juga pemusatan jaringan jalan dan juga arahan dari RTRW Provinsi Jawa Timur untuk pusat kegiatan pada Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan RTRW Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024-2044, sistem perwilayahan Kabupaten Sidoarjo terbagi atas pusat kegiatan yang ditetapkan adalah Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

- 1) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) ditentukan dengan kriteria:
 - a. Kawasan perkotaan yang berfungsi dan berpotensi sebagai pusat kegiatan berskala kabupaten atau beberapa kecamatan
 - b. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan

- 2) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) ditentukan dengan kriteria:
 - a. Pusat permukiman yang berfungsi dan berpotensi untuk melayani kegiatan berskala kecamatan
 - b. Merupakan ibukota kecamatan
 - c. Proyeksi jumlah penduduk
 - d. Jenis dan skala fasilitas pelayanan
 - e. Jumlah dan kualitas sarana dan prasarana

Adapun penetapan rencana peran dan fungsi perkotaan di Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

- 1) Pusat Kegiatan Lokal dengan distribusi pada Kecamatan Sidoarjo, Porong dan Krian.
 - a. Kecamatan Sidoarjo ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagai bagian Gerbangkertosusila di Kota Surabaya yang berfungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa skala internasional hingga regional, pusat pelayanan pendidikan tinggi, pusat pelayanan olahraga skala internasional hingga regional, pusat pelayanan kesehatan skala regional, pusat kegiatan industri, pusat kegiatan pariwisata, pusat perkantoran dan pusat pemerintahan terpadu.
 - b. Kecamatan Porong ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang berfungsi sebagai perdagangan skala kabupaten, jasa skala lokal, balai penelitian, pendidikan skala lokal, kesehatan skala lokal, olahraga skala lokal, wisata minat khusus dan wisata budaya, peribadatan skala lokal dan industri besar dan menengah.
 - c. Kecamatan Krian ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal sebagai bagian Gerbangkertosusila di Kota Surabaya yang berfungsi sebagai perdagangan dan jasa skala internasional hingga regional, pusat kegiatan industri, pendidikan skala lokal, kesehatan skala lokal, olahraga skala lokal, peribadatan skala lokal.

Adapun rencana pengembangan PKL di Kabupaten Sidoarjo yaitu:

- a. Pemantapan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PKL)
- b. Penyusunan dokumen RDTR pada setiap Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
- c. Usulan penetapan Kecamatan Waru menjadi Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
- d. Penguatan Sarana, Prasarana dan Pelayanan pada Setiap Pusat Pelayanan Lokal (PKL).

2) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)

Pusat permukiman yang berfungsi dan berpotensi untuk melayani kegiatan berskala kecamatan. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) pada Kabupaten Sidoarjo:

- a. Kecamatan Waru
- b. Kecamatan Taman
- c. Kecamatan Balongbendo
- d. Kecamatan Buduran
- e. Kecamatan Candi
- f. Kecamatan Gedangan
- g. Kecamatan Jabon
- h. Kecamatan Krembung
- i. Kecamatan Prambon
- j. Kecamatan Sedati
- k. Kecamatan Sukodono
- l. Kecamatan Tanggulangin
- m. Kecamatan Tarik
- n. Kecamatan Tulangan
- o. Kecamatan Wonoayu

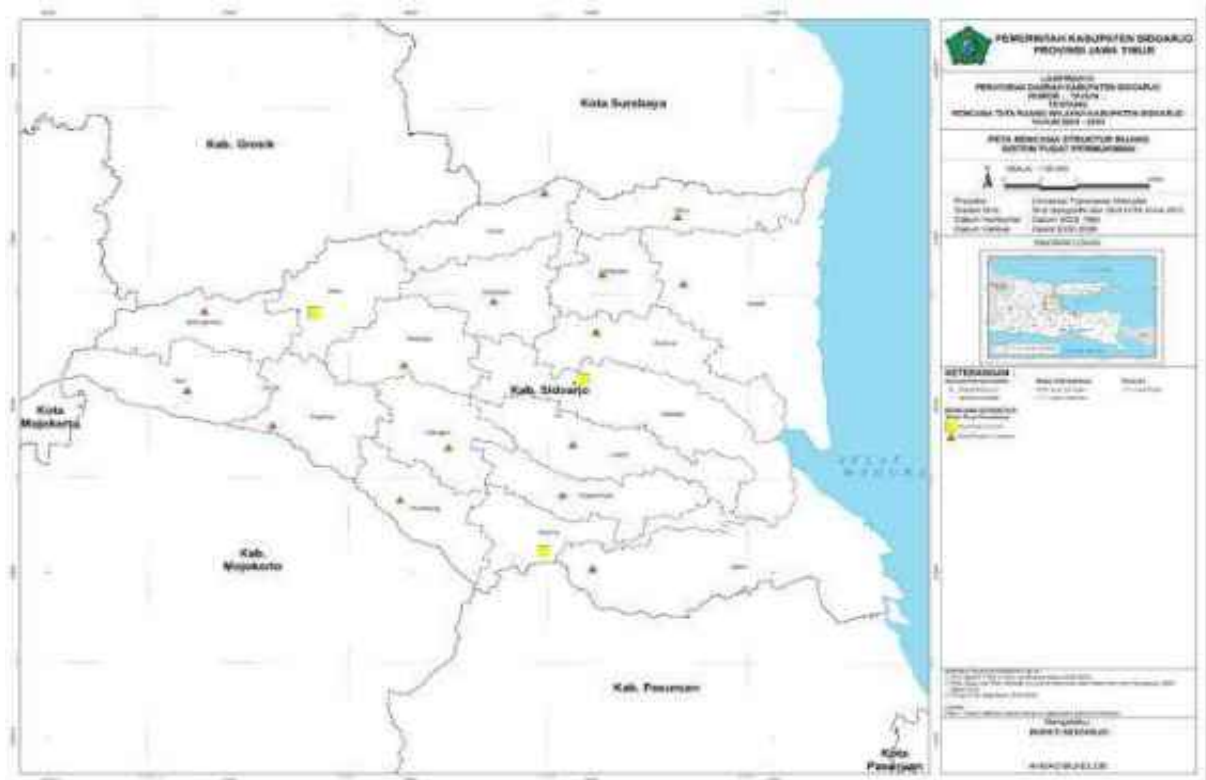
Adapun rencana pengembangan PPK di Kabupaten Sidoarjo yaitu:

- Pemantapan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)
- Penyusunan dokumen RDTR pada setiap Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)

- Penguatan Sarana, Prasarana dan Pelayanan pada Setiap Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)

Secara grafik dapat ditampilkan rencana sistem perwilayahan di Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut.

Gambar 2.2 Sistem Perwilayahan Kabupaten Sidoarjo



Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo, 2024

b. Kondisi Topografi dan Kelerengan Tanah

Topografi Kabupaten Sidoarjo terdiri dari lapisan batuan Alluvium seluas 686,89 km² yang tersebar di semua kecamatan, dan lapisan batuan Plistosen Fasien Sedimen hanya terdapat di 6 kecamatan, yaitu Kecamatan Sidoarjo, Buduran, Taman, Waru, Gedangan dan Sedati. Sedangkan lapisan tanah untuk tanah Alluvial Kelabu merata di 18 kecamatan seluas 470,18 km². Lapisan tanah jenis As.Alluvial Klb dan Coklat Kekuningan hanya ada di 4 kecamatan, yaitu Krembung, Balongbendo, Tarik dan Prambon yaitu masing – masing 4,54

km²; 27,95 km²; 9,87 km² dan 7,33 km². Lapisan tanah Alluvial Hidromort seluas 213,61 km² menyebar di 8 kecamatan, yaitu Kecamatan Sidoarjo, Buduran, Candi, Porong, Tanggulangin, Jabon, Waru dan Sedati. Adapun lapisan tanah kelabu tua seluas 8,71 km² ada di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Buduran dan Gedangan. Topografi Kabupaten Sidoarjo berada pada Dataran Delta dengan ketinggian 0-20 meter, sebagaimana dijabarkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2
Persentase Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Persentase Luas (%)	Jumlah Pulau	Tinggi Wilayah (mdpl)
Tarik	Tarik	5,05	-	16
Prambon	Prambon	4,65	-	10
Krembung	Mojoruntut	4,03	-	5
Porong	Juwetkenongo	4,16	-	4
Jabon	Dukuhsari	11,61	2	2
Tanggulangin	Kalitengah	4,42	-	4
Candi	Gelam	5,63	-	4
Tulangan	Kenongo	4,36	-	7
Wonoayu	Wonoayu	4,72	-	4
Sukodono	Anggaswangi	4,51	-	7
Sidoarjo	Sidokumpul	8,74	-	4
Buduran	Banjarkemantren	5,63	-	4
Sedati	Pulungan	11,78	-	4
Waru	Janti	4,22	-	5
Gedangan	Keboansikep	3,31	-	4
Taman	Bebekan	4,38	-	9
Krian	Kraton	4,49	-	12
Balong Bendo	Wonokupang	4,32	-	20

Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo, 2024

Kecamatan Sedati (11,78%) dan Jabon (11,61%) merupakan dua kecamatan dengan cakupan wilayah terluas, sementara Gedangan memiliki cakupan terkecil (3,31%). Jabon juga menjadi satu-satunya kecamatan yang memiliki dua pulau, yang menunjukkan potensi kawasan pesisir dan maritim. Dari sisi ketinggian, wilayah Kabupaten Sidoarjo umumnya tergolong dataran

rendah dengan ketinggian rata-rata di bawah 20 mdpl. Kecamatan Balongbendo merupakan wilayah tertinggi (20 mdpl) dan berpotensi lebih aman dari risiko banjir rob atau pasang laut, berbeda dengan kecamatan seperti Jabon, Porong, Sedati, dan Candi yang memiliki ketinggian hanya 2–4 mdpl dan sangat rawan genangan. Di sisi lain, kondisi kelereng tanah Kabupaten Sidoarjo didominasi oleh kelas kelereng berkisar antara 0 – 2% yang tersebar di semua kecamatan dengan rincian sebagaimana tercantum pada tabel di bawah sebagai berikut.

Tabel 2.3
Kondisi Kemiringan Lereng Kabupaten Sidoarjo

Kecamatan	Kelereng		
	0 – 2%	2 - 5%	5 – 15%
Tarik	3.349,73	338,28	-
Prambon	3.171,04	152,33	-
Krembung	2.686,14	219,61	1,33
Porong	2.975,20	125,41	-
Jabon	7.929,36	144,49	-
Tanggulangin	2.887,00	98,25	-
Candi	4.198,99	77,74	-
Tulangan	3.045,50	125,47	-
Wonoayu	3.290,23	155,47	-
Sukodono	3.060,08	218,23	-
Sidoarjo	6.050,25	136,66	-
Buduran	4.239,67	119,04	-
Sedati	7.735,73	198,92	0,55
Waru	2.974,04	64,64	-
Gedangan	2.279,02	132,55	-
Taman	3.036,82	123,76	-
Krian	3.092,34	149,04	-
Balong Bendo	2.967,94	173,36	-

Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo, 2024

Data kelereng lahan di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah kecamatan memiliki kemiringan lereng pada kategori 0–2%, yang berarti lahan relatif datar dan sangat sesuai untuk aktivitas pertanian, permukiman, dan infrastruktur. Kecamatan seperti Jabon (7.929

ha) dan Sedati (7.735 ha) memiliki cakupan lahan datar terbesar, menjadikannya sangat potensial untuk pengembangan tambak, perikanan, dan pertanian intensif. Sebaliknya, lahan dengan kelerengan 5–15% sangat minim dan hanya tercatat di Kecamatan Krembung (1,33 ha) dan Sedati (0,55 ha), yang berarti risiko erosi tanah akibat lereng curam nyaris tidak signifikan di seluruh kabupaten ini. Implikasinya, Kabupaten Sidoarjo memiliki keunggulan topografi untuk pengembangan kawasan pertanian modern, perluasan kawasan budidaya perairan, dan pembangunan infrastruktur yang efisien tanpa perlu biaya besar untuk modifikasi lahan. Namun, datarnya kontur ini juga menuntut perhatian lebih terhadap pengelolaan air dan risiko banjir, terutama di wilayah pesisir dan dataran rendah.

c. Kondisi Geologi dan Hidrologi

Data geologi Kabupaten Sidoarjo berdasarkan luasan dari masing-masing jenis batuan adalah sebagai berikut:

1. Jenis lapisan batuan Plistosen Fasien Sedimen seluas 2.736 Ha, tersebar di Kecamatan Sidoarjo, Buduran, Taman, Waru, Gedangan, dan Sedati.
2. Jenis lapisan batuan Alluvium seluas 69.728 Ha, tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Sidoarjo.

Sedangkan wilayah Sidoarjo secara hidrogeologi dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok lapisan penyimpan air tanah (akuifer) yaitu: akuifer dengan produktivitas tinggi, akuifer dengan produktivitas sedang, akuifer dengan produktivitas kecil dan daerah air tanah langka. Berdasarkan pengamatan di lapangan, hasil interpretasi data geolistrik, dan log pemboran, akuifer daerah Sidoarjo dapat dibagi dalam 2 sistem akuifer, yaitu: akuifer bebas (menghasilkan air melalui sumur-sumur gali yang dangkal), dan akuifer tertekan (sumur artesis).

1. Akuifer Bebas (Sumur Gali)

Jenis akuifer ini dapat dijumpai pada sumur gali-sumur gali penduduk pada morfologi dataran dan pedataran bergelombang. Kedalaman muka air tanah (statis) ini berkisar dari 1 hingga 14 meter di bawah

muka tanah setempat (bmt), air tanah bebas di daerah dataran tersimpan dalam endapan alluvial (pada material yang belum terpadatkan). Kondisi muka air tanah dipengaruhi oleh perubahan dua musim (kemarau/hujan). Buaian (fluktuasi) air tanah berkisar 2 – 4 meter/tahun. Sumur gali yang terdalam terletak di Barat Kabupaten Sidoarjo yaitu di Desa Mliriprowo (S 7°28' dan E 112°30'), yaitu sekitar 14 meter (bmt), dan terdangkal di sekitar pantai antara lain Desa Wadungasih dan Siwalanpanji yaitu sekitar 2 meter (mbt). Pasokan air pada akuifer bebas di daerah pedataran berasal dari hujan dan aliran permukaan (air sungai, air laut).

2. Akuifer Tertekan (Sumur Dalam)

Akuifer tertekan (sumur dalam) umumnya dijumpai pada endapan aluvial yang bersifat tidak padu (lepas) merupakan kelanjutan dari akuifer bebas ke bagian bawahnya. Hal ini dapat dilihat dari penampang pemboran daerah Candi, Krian, dan Porong. Kedalaman akuifer yang disadap umumnya 30 sampai 120 meter dalam sistem banyak lapisan (multilayer) dengan ketebalan sekitar 4 hingga > 40 meter. Alas (*bedrock*) endapan alluvial ini berupa batu lempung dan danau yang miring ke arah Barat. Zona ini tersebar cukup luas terutama di bagian Selatan dan Timur. Kedalaman (*bottom*) dari lapisan akuifer dangkal ini mengalami kontak dengan lapisan kedap (lempung) di sebelah Barat Sidoarjo sekitar 48 meter (bmt), sedangkan ke arah Timur (mendekati pantai) sekitar 27 hingga 38 meter (bmt). Dari hasil analisis kualitas air terhadap 10 contoh air yang diambil dari beberapa sumur gali (air tanah dangkal) penduduk menunjukkan kualitas air yang cukup normal. Adapun beberapa parameter yang melebihi baku mutu di antaranya kadar kandungan daya hantar listrik, natrium, klorida, sulfat dan zat padat terlarut. Adanya kandungan kimia yang melebihi baku mutu tersebut, diduga karena adanya pencemaran dari semburan lumpur yang berasal dari sekitar Sumur Banjar Panji 1. Pencemaran air tanah

dangkal hanya terjadi sampai jarak kurang lebih 1 Km sebelah Barat dari pusat semburan.

3. Air Permukaan

Air permukaan atau limpasan permukaan adalah air yang berada di atas permukaan, seperti aliran sungai, dan kanal. Kabupaten Sidoarjo dilalui oleh beberapa sungai besar dengan bentuk yang berkelok-kelok yang dapat dilihat pada Kali Brantas - Kali Surabaya. Kali ini merupakan perbatasan dengan Kabupaten Mojokerto di bagian Utara. Sedangkan Kali Mas merupakan batas dengan Kabupaten Gresik. Adapun Kali Porong merupakan batas dengan Kabupaten Pasuruan di bagian Selatan. Beberapa sungai kecil dari Utara ke Selatan di antaranya Kali Biwangan Gede, Kali Sumber, Kali Ketingan, Kali Kedunggulung, dan Kali Buwon. Sedangkan kanal (sebagai saluran induk) terdapat pada saluran induk Mangetan, Pelayaran, Lengkong, Kemlaten, dan Porong. Daerah aliran sungai-sungai dan kanal-kanal ini termasuk pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas. Pola aliran sungai umumnya berbentuk pola sejajar yang mengalir ke arah hilir (Timur) Kabupaten Sidoarjo yang lahannya berupa rawa dan akhirnya bermuara ke Selat Madura.

d. Kondisi Klimatologi

Sepanjang Tahun 2024, Berdasarkan data dari Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda Sidoarjo tercatat suhu tertinggi di Kabupaten Sidoarjo mencapai 36,6°C, terjadi di bulan April. Sementara suhu terendah terjadi di bulan Agustus sebesar 20,4°C dengan kelembaban rata-rata sebesar 77 persen. Bulan dengan hari paling basah di Kabupaten Sidoarjo terjadi di bulan Januari dan Februari dengan masing-masing 24 dan 23 hari hujan dalam sebulan sebagaimana ditampilkan pada tabel sebagai berikut:



Tabel 2.4
Statistik Geografi dan Iklim di Sidoarjo Tahun 2024

Bulan	Suhu/Temperature (°C)			Kelembaban/Humidity (%)			Kecepatan Angin (knot)		Tekanan Udara (mb)	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari)	Penyinaran Matahari (persen)
	Min	Rata-Rata	Maks	Min	Rata-Rata	Maks	Rata-Rata	Maks	Rata-Rata			
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	14	15	16
Januari	23,0	28,5	35,8	56,0	82,0	98,0	6,4	19,0	1010,2	396,8	24	78,0
Februari	23,2	28,3	35,0	59,0	84,0	97,0	6,0	21,0	1011,2	445,3	23	85,0
Maret	23,6	28,7	35,0	50,0	82,0	99,0	6,4	17,0	1010,4	125,6	19	22,0
April	23,2	29,2	36,6	52,0	83,0	98,0	5,3	11,0	1009,3	363,0	22	80,0
Mei	22,8	29,1	34,4	51,0	76,0	97,0	6,0	17,0	1010,0	0,5	4	1,0
Juni	23,0	28,4	34,4	49,0	78,0	100,0	5,9	15,0	1011,4	98,4	11	36,0
Juli	21,2	27,4	33,0	46,0	75,0	98,0	6,3	15,0	1011,7	24,5	2	20,0
Agustus	20,4	27,5	33,4	39,0	72,0	93,0	7,2	16,0	1012,2	1,0	1	1,0
September	23,2	29,0	35,0	32,0	69,0	92,0	7,1	18,0	1011,0	15,1	4	15,0
Oktober	23,8	30,0	36,4	38,0	66,0	86,0	7,3	17,0	1011,2	8,1	2	8,0
November	23,4	29,8	35,6	42,0	75,0	94,0	6,1	16,0	1009,5	209,6	17	50,0
Desember	23,2	27,9	34,4	46,0	82,0	100,0	6,8	19,0	1008,2	584,6	27	96,0

Sumber: Stasiun Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Kelas 1 Juanda, 2025



Berdasarkan data klimatologi Kabupaten Sidoarjo, dapat disimpulkan bahwa wilayah ini memiliki iklim tropis basah dengan curah hujan tinggi dan fluktuasi musiman yang jelas. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember (584,6 mm) dan Februari (445,3 mm), dengan rata-rata lebih dari 20 hari hujan per bulan, mencerminkan musim penghujan yang intens. Sebaliknya, periode Mei hingga Oktober ditandai dengan hujan sangat minim, bahkan hampir tidak ada pada bulan Agustus (1,0 mm), yang menandai musim kemarau. Dari sisi suhu, rata-rata suhu tahunan berkisar antara 27–29 °C, dengan suhu tertinggi terjadi pada Oktober (36,4 °C) dan April (36,6 °C), menandakan potensi paparan panas ekstrem di masa transisi musim. Tingkat kelembaban juga tinggi, terutama saat musim hujan, dengan puncaknya mencapai 100% di beberapa bulan seperti Desember dan Juni, yang berpotensi memengaruhi kenyamanan termal dan memperbesar risiko penyebaran penyakit berbasis kelembaban. Kecepatan angin tergolong sedang (5–7 knot), namun stabil sepanjang tahun, sementara tekanan udara berkisar stabil di angka 1008–1012 mb, tipikal wilayah dataran rendah pantai.

Data klimatologi Kabupaten Sidoarjo menunjukkan pola musim hujan dan kemarau yang cukup ekstrem, dengan curah hujan sangat tinggi pada bulan Desember dan Februari, sementara periode Mei hingga Oktober nyaris tanpa hujan. Pola ini berimplikasi penting terhadap perencanaan tata ruang, pertanian, dan infrastruktur daerah. Di satu sisi, musim hujan intens berisiko menimbulkan banjir dan genangan, sehingga membutuhkan sistem drainase yang memadai dan penguatan kapasitas daerah tangkapan air. Di sisi lain, musim kemarau panjang berpotensi menurunkan produktivitas pertanian akibat keterbatasan air, yang berarti sistem irigasi dan teknologi panen air hujan harus ditingkatkan. Suhu udara yang tinggi dan kelembaban ekstrem di beberapa bulan juga berpengaruh terhadap kenyamanan warga, serta memperbesar potensi penyebaran penyakit tropis berbasis lingkungan. Oleh karena itu, adaptasi iklim dalam desain bangunan, pengelolaan sumber daya air yang terpadu, serta mitigasi risiko bencana iklim perlu menjadi prioritas dalam agenda pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Sidoarjo.



2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Dalam konstelasi perwilayahan regional, Kabupaten Sidoarjo termasuk dalam Perkotaan PKN (Pusat Kegiatan Nasional) Gerbangkertosusila (Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan) yang juga berfungsi sebagai pendukung utama dari Kota Surabaya sebagai Ibukota Provinsi. Selain keuntungan dalam konstelasi regional tersebut, potensi wilayah Kabupaten Sidoarjo lainnya yakni:

- a. Kabupaten Sidoarjo termasuk dalam wilayah yang ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, sehingga pembangunan wilayahnya menjadi prioritas untuk kepentingan nasional;
- b. Dalam konteks ketahanan pangan, wilayah Kabupaten Sidoarjo memiliki potensi perikanan tangkap dan perikanan budi daya di sisi timur, serta potensi pertanian yang subur (karena terbentuk dari kawasan delta sungai) di sisi barat;
- c. Perkembangan wilayah di Kabupaten Sidoarjo juga banyak didukung oleh kawasan peruntukan industri (KPI) yang tersebar merata hampir diseluruh kecamatan yang ada di Sidoarjo;
- d. Kabupaten Sidoarjo memiliki aksesibilitas langsung jalan nasional yang berupa jalan arteri primer yang langsung terhubung dengan Kota Surabaya, sehingga dampak dari perkembangan wilayah cukup masif di wilayah Kabupaten Sidoarjo yang langsung berbatasan dengan Kota Surabaya;
- e. Terdapat jalan tol eksisting dan rencana pengembangan jalan tol yang akan menjadi faktor pengungkit perkembangan dan pembangunan kawasan di wilayah Kabupaten Sidoarjo;
- f. Kabupaten Sidoarjo memiliki simpul-simpul transportasi tidak hanya regional, namun juga internasional dengan adanya Terminal Penumpang Purabaya, Bandar Udara Juanda dan beberapa stasiun kereta api;
- g. Karakteristik kawasan permukiman di wilayah Kabupaten Sidoarjo hampir didominasi oleh kawasan permukiman perkotaan sebagai



- penyedia kawasan permukiman dan pendukung geliat ekonomi perkotaan inti Kawasan Strategis Nasional yang ada di Kota Surabaya;
- h. Wilayah Kabupaten Sidoarjo masih memiliki cukup banyak kawasan yang belum terbangun yang dapat menjadi bagian bagi pengembangan wilayah untuk kebutuhan Pembangunan sebagai akibat dari posisinya sebagai kawasan perkotaan Surabaya Metropolitan Area (SMA);
 - i. Selain potensi tambak/perikanan budi daya di wilayah sisi timur yang komoditasnya menjadi ciri khas dari Kabupaten Sidoarjo, yakni bandeng dan udang, di area tambak tersebut juga berpotensi menjadi tambak garam (khususnya pada kawasan perikanan budi daya yang ada di Kecamatan Sedati).

Berdasarkan pada potensi-potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Sidoarjo, maka pemerintah Kabupaten Sidoarjo menetapkan Kawasan Strategis sebagai wilayah yang diprioritaskan penataan ruangnya yaitu Kawasan strategis dari sudut pandang kepentingan pertumbuhan ekonomi dan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

A. Kawasan strategis dari sudut pandang kepentingan pertumbuhan ekonomi

Kawasan strategis dari sudut pandang kepentingan pertumbuhan ekonomi adalah kawasan yang memiliki potensi untuk mendorong ekonomi dengan cepat, dengan kriteria antara lain adalah:

- a. Memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi kabupaten;
- b. Memiliki potensi ekspor;
- c. Memiliki pusat kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap sektor dan pengembangan wilayah;
- d. Didukung oleh jaringan sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi yang memadai;
- e. Ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal;



- f. Ditetapkan untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi;
- g. Memiliki pusat kegiatan pengelolaan, pengolahan, dan distribusi bahan baku menjadi bahan jadi;
- h. Memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
- i. Memiliki fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
- j. Memiliki pusat pengembangan produk unggulan; dan
- k. Memiliki pusat kegiatan perdagangan dan jasa.

Dari kriteria-kriteria tersebut maka kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo, terdiri dari:

- a. KAPUK (Kawasan Pengembangan Utama Komoditi Perikanan) dengan tujuan pengembangan mengembangkan potensi, produktivitas, dan hilirisasi komoditas perikanan budi daya tersebar di Kecamatan Sedati, Kecamatan Buduran, Kecamatan Sidoarjo, Kecamatan Candi, Kecamatan Tanggulangin, Kecamatan Porong, dan Kecamatan Jabon;
- b. Pusat Pertumbuhan SIBONTARRIAN (Sidoarjo, Jabon, Tarik, dan Krian) dengan tujuan pengembangan pusat kegiatan dan kutub pertumbuhan baru untuk meningkatkan ekonomi dan penerimaan daerah.

Lokasi untuk pusat pertumbuhan SIBONTARRIAN meliputi Kecamatan Sidoarjo, Kecamatan Jabon, Kecamatan Tarik, Kecamatan Krian, Kecamatan Candi, Kecamatan Jabon, Kecamatan Tulangan, Kecamatan Krembung, Kecamatan Prambon, dan Kecamatan Balong Bendo.

Tujuan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo meliputi:

- 1. Tujuan pengembangan KAPUK (Kawasan Pengembangan Utama Komoditi Perikanan) adalah mengembangkan potensi, produktivitas, dan hilirisasi komoditas perikanan budi daya tersebar di Kecamatan Sedati, Kecamatan Buduran, Kecamatan Sidoarjo, Kecamatan Candi, Kecamatan Tanggulangin, Kecamatan Porong, dan Kecamatan Jabon.



2. Tujuan pengembangan Pusat Pertumbuhan SIBONTARRIAN (Sidoarjo, Jabon, Tarik, dan Krian) adalah mengembangkan pusat kegiatan dan kutub pertumbuhan baru untuk meningkatkan ekonomi dan PAD.

Adapun pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo meliputi:

1. Arahkan pengembangan KAPUK (Kawasan Pengembangan Utama Komoditi Perikanan) meliputi:
 - a. pengembangan potensi komoditas perikanan budi daya;
 - b. pembinaan dalam rangka peningkatan produktivitas;
 - c. peningkatan usaha hilirisasi komoditas perikanan; dan
 - d. peningkatan kemampuan pelaku usaha mikro dan kecil di bidang perikanan.
2. Arahkan pengembangan Pusat Pertumbuhan SIBONTARRIAN (Sidoarjo, Jabon, Tarik, dan Krian) meliputi:
 - a. penataan pusat pertumbuhan Sidoarjo dalam rangka mendukung fungsinya sebagai pusat pengembangan kawasan peruntukan industri, pergudangan dan logistik yang terhubung dengan moda transportasi udara;
 - b. peningkatan pusat pertumbuhan Jabon dalam rangka mendukung fungsinya sebagai pusat pengembangan kawasan peruntukan industri dan pergudangan;
 - c. pengembangan pusat pertumbuhan Tarik dalam rangka mengembangkan kawasan dry port, pergudangan dan kawasan peruntukan industri; dan
 - d. penataan pusat pertumbuhan Krian dalam rangka mendukung fungsinya sebagai pusat pengembangan kawasan peruntukan industri dan pergudangan.
- B. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dapat berupa tempat perlindungan keanekaragaman hayati



atau kawasan yang merupakan kawasan lindung yang diperuntukkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan. Kriteria yang ditetapkan dalam penentuan kawasan strategis ini, yaitu:

- a. Memberikan perlindungan keseimbangan neraca air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian;
- b. Memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
- c. Menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- d. Memiliki pusat kegiatan pada kawasan rawan bencana dan mempunyai risiko bencana alam; dan/atau

Menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

Berdasarkan identifikasi kriteria-kriteria tersebut maka kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di Kabupaten Sidoarjo yakni, berupa Kawasan Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup di Pantai Timur Sidoarjo. Tujuan pengembangan Kawasan Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup di Pantai Timur Sidoarjo melindungi keanekaragaman hayati, meningkatkan keseimbangan iklim dan meningkatkan ketahanan terhadap potensi bencana yang mungkin terjadi di kawasan pesisir. Adapun arahan pengembangan Kawasan Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup di Pantai Timur Sidoarjo meliputi:

- a. perlindungan terhadap kawasan ekosistem mangrove;
- b. peningkatan nilai ekonomi kawasan ekosistem mangrove melalui pengembangan kegiatan pariwisata alam.

2.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

A. Daya Dukung Penyediaan Pangan

Ketersediaan pangan di Kabupaten Sidoarjo dilakukan dengan menghitung potensi wilayah berdasarkan pada hasil produksi beras di Kabupaten Sidoarjo dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Berdasarkan data yang bersumber dari BPS Provinsi Jawa Timur, tercatat bahwa produksi padi

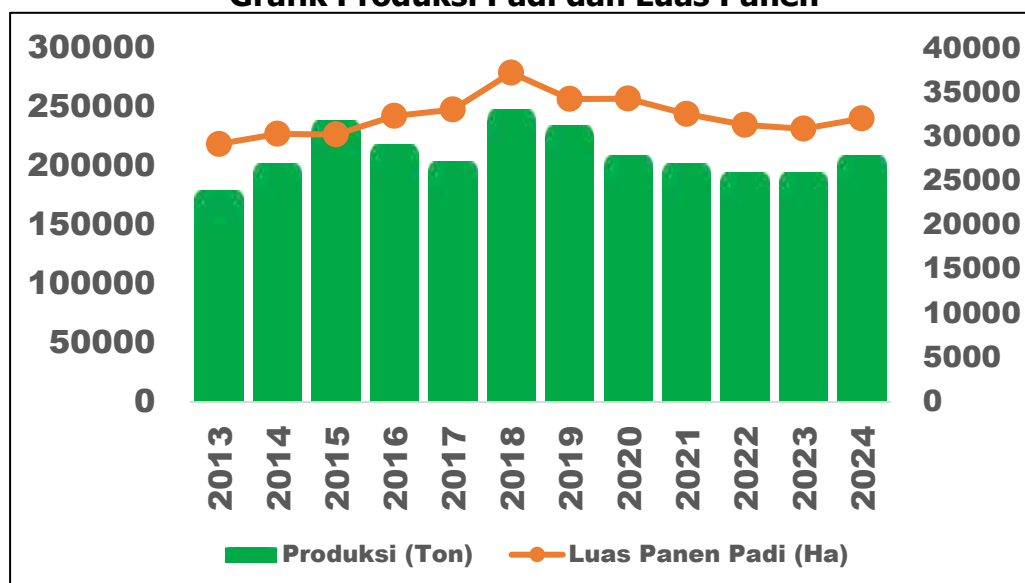
maupun produksi beras di Kabupaten Sidoarjo mengalami perkembangan yang fluktuatif. Namun demikian, tercatat bahwa kecenderungan luas panen padi dalam 10 tahun terakhir menunjukkan tren kenaikan. Berikut merupakan data luas panen padi (Ha), produksi padi (ton) dan produksi beras (ton) di Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 2.5
Luas Panen, Produktivitas, Produksi Padi dan Produksi Beras
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013-2024

Tahun	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Kw/Ha)	Produksi Padi (ton)	Produksi Beras (ton)
2013	29.212,00	61,58	179.873,00	115.154,69
2014	30.349,00	66,66	202.309,00	129.518,22
2015	30.266,00	79,10	239.400,00	153.263,88
2016	32.385,00	67,59	218.900,00	140.139,78
2017	33.107,00	61,75	204.425,00	130.872,89
2018	37.277,00	67,48	248.201,00	142.577,94
2019	34.287,00	68,00	234.788,00	134.873,02
2020	34.321,00	65,86	209.109,93	120.744,28
2021	32.586,00	62,14	202.501,40	116.928,00
2022	31.368,74	62,63	194.540,45	112.331,58
2023	30.915,73	62,98	194.704,13	112.426,08
2024	32.100,11	65,10	208.986,70	120.673,11

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2025

Gambar 2.3
Grafik Produksi Padi dan Luas Panen



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo, KLHS RPJMD, 2024



Ketersediaan pangan di Kabupaten Sidoarjo dilihat mulai dari produksi padi hingga menjadi beras. Produksi padi di Kabupaten Sidoarjo paling tinggi terjadi pada tahun 2015 dengan jumlah produksi 239.400 ton dan pada tahun 2018 dengan jumlah produksi 248.201 ton. Walaupun jumlah produksi pada tahun 2015 dan 2018 hampir sama, namun produktivitas padi pada tahun 2015 dan 2018 memiliki perbedaan, yakni 79,10 Kw/Ha pada tahun 2015 dan 67,48 Kw/Ha pada tahun 2018. Dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2023, produksi padi kecenderungannya mengalami penurunan, hal tersebut juga terlihat dari nilai produktivitas yang semakin menurun, demikian pula dengan luas panen yang cenderung berkurang dari tahun 2018 hingga tahun 2023. Kecenderungan penurunan produksi padi di Kabupaten Sidoarjo terjadi karena berbagai faktor, seperti lahan sawah yang semakin berkurang, iklim yang tidak menentu, dan beberapa faktor teknis lainnya.

Berdasarkan ketersediaan potensi pangan yang ada di Kabupaten Sidoarjo, kemudian dilakukan analisa untuk mengetahui status daya dukung pangan Kabupaten Sidoarjo hingga 20 tahun kedepan. Peningkatan jumlah penduduk selalu diikuti peningkatan laju penggunaan sumber daya alam termasuk lahan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Di sisi lain pertumbuhan jumlah penduduk membutuhkan lahan untuk permukiman dan infrastruktur lainnya. Selain itu perubahan iklim ikut menyebabkan penurunan produktivitas pangan, sehingga diperlukan usaha untuk memperkuat ketahanan pangan. Tantangan lainnya adalah menipisnya ketersediaan sumber daya yang mendukung produktivitas pangan seperti air, dan sarana produksi. Daya dukung pangan merupakan perbandingan antara kebutuhan pangan dan ketersediaan pangan. Penentuan status daya dukung pangan ditentukan dengan nilai sebagai berikut :

- Bila DD Pangan > 1 , memiliki status Daya Dukung Pangan Surplus
- Bila DD Pangan < 1 , memiliki status Daya Dukung Pangan Defisit

Hasil perhitungan daya dukung pangan Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut.

Tabel 2.6
Daya Dukung Pangan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023-2029

Tahun Proyeksi	Jumlah Penduduk	Kebutuhan per Kapita Beras (ton)	Proyeksi Beras (ton) Per Tahun	Ketersediaan – Kebutuhan	Keterangan
2023	1.982.623	188.150,96	110.759,60	77.391,36	Defisit
2024	2.010.635	190.809,26	109.629,40	81.179,86	Defisit
2025	2.039.042	193.505,12	108.499,20	85.005,92	Defisit
2026	2.067.851	196.239,07	107.369,00	88.870,07	Defisit
2027	2.097.067	199.011,65	106.238,80	92.772,85	Defisit
2028	2.126.695	201.823,40	105.108,60	96.714,80	Defisit
2029	2.156.743	204.674,87	103.978,40	100.696,47	Defisit

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo, KLHS RPJMD, 2024

Dengan melihat tren produksi beras (ton) dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, diperoleh rasio pertumbuhan sebesar -0,0078. Sehingga proyeksi yang dilakukan terhadap ketersediaan beras di Kabupaten Sidoarjo hingga 20 tahun mendatang akan mengalami penurunan sebesar 1% tiap tahunnya. Hal tersebut tidak sebanding dengan pertumbuhan penduduk yang selalu meningkat. Sehingga, pada tahun 2023 saja untuk status daya dukung pangan di Kabupaten Sidoarjo mengalami defisit, dimana kondisi ini terjadi apabila ketersediaan pangan yang ada kurang dari kebutuhan pangan penduduk.

Gambar 2.4
Grafik Daya Dukung Pangan Kabupaten Sidoarjo



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo, KLHS RPJMD, 2024



Sementara itu, apabila dilihat lebih detail pada lokus masing-masing Kecamatan yang ada di Kabupaten Sidoarjo, terdapat wilayah-wilayah yang mengalami kondisi surplus dan wilayah dengan kondisi defisit. Berdasarkan status daya dukung pangan di berbagai kecamatan di Kabupaten Sidoarjo antara tahun 2023 hingga 2029, terjadi tren yang menunjukkan adanya disparitas dalam kecukupan pangan di wilayah tersebut. Beberapa kecamatan seperti Tarik, Prambon, Jabon, dan Balongbendo memiliki kondisi surplus yang cukup konsisten, meskipun angka surplus ini cenderung menurun dari waktu ke waktu. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun produksi pangan masih mencukupi, ada potensi tantangan ke depan jika penurunan surplus ini terus berlanjut.

Sebaliknya, kecamatan-kecamatan seperti Porong, Sidoarjo, Candi, dan Waru terus menunjukkan defisit pangan yang konsisten. Ini mengindikasikan adanya ketergantungan terhadap pasokan pangan dari wilayah lain atau kurangnya kapasitas lokal untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk. Kecamatan Krembung, Sukodono, dan Tanggulangin yang pada awalnya memiliki status seimbang dalam ketersediaan pangan, diproyeksikan akan mengalami defisit pada tahun 2029. Perubahan ini mengindikasikan perlunya intervensi kebijakan yang lebih kuat untuk mempertahankan atau meningkatkan keseimbangan produksi dan distribusi pangan di wilayah-wilayah tersebut.

Secara keseluruhan, meskipun ada wilayah yang tetap berada dalam kategori surplus, namun jumlah kecamatan dengan defisit cukup signifikan. Ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sidoarjo perlu memperkuat ketahanan pangan lokal, baik melalui optimalisasi lahan pertanian, peningkatan produktivitas, ataupun perbaikan sistem distribusi pangan untuk mencegah peningkatan angka defisit di masa mendatang.

Adapun status daya dukung pangan pada masing-masing Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat pada tabel berikut:

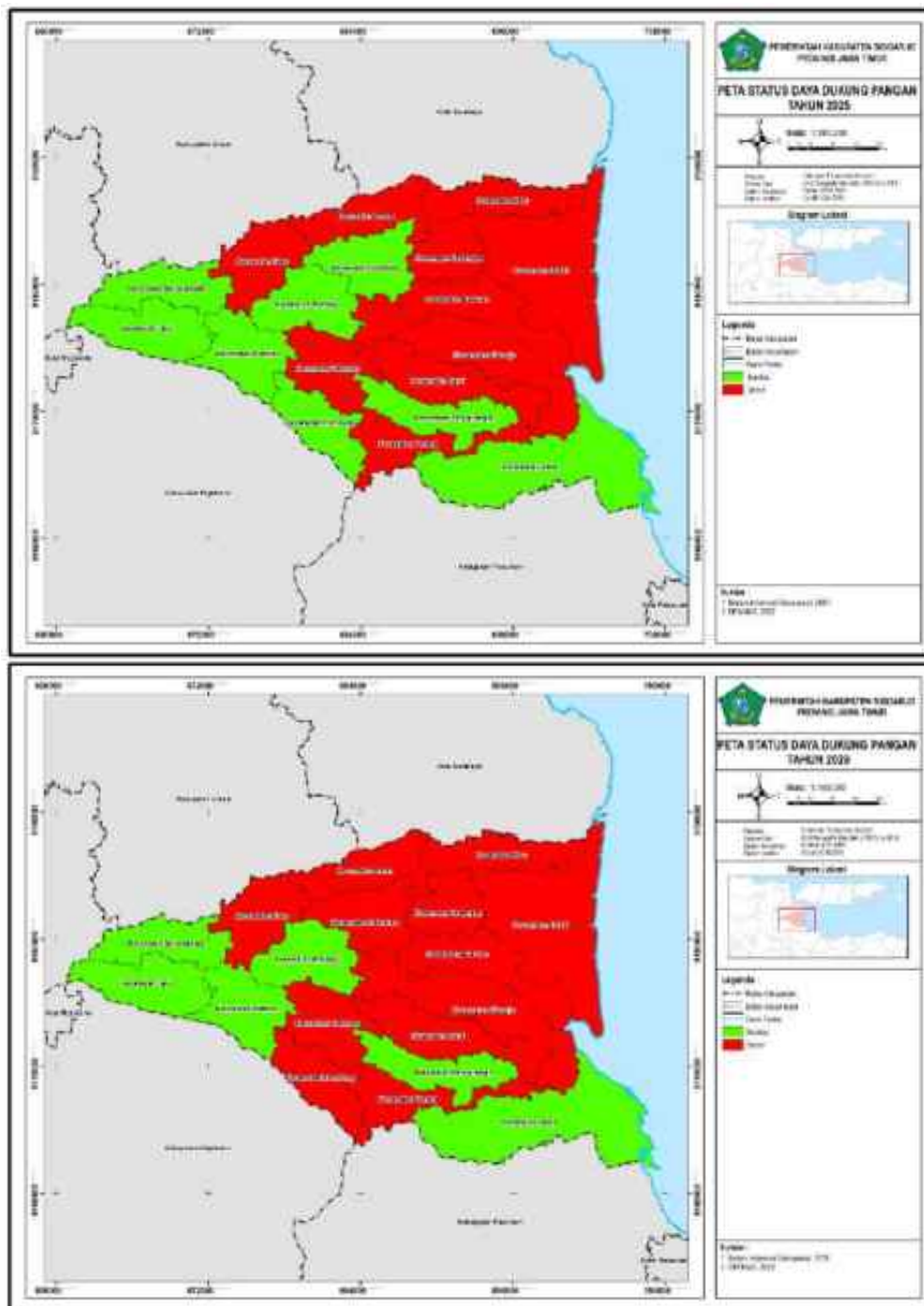
Tabel 2.7
Daya Dukung Pangan Per Kecamatan Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2023-2029

Kecamatan	Tahun 2023			Tahun 2025			Tahun 2029		
	Jumlah Penduduk	Status DD Pangan	Keterangan	Jumlah Penduduk	Status DD Pangan	Keterangan	Jumlah Penduduk	Status DD Pangan	Keterangan
Tarik	67.458	2.10	Surplus	68.987	2.06	Surplus	72.970	1.95	Surplus
Prambon	78.460	1.32	Surplus	79.732	1.30	Surplus	84.335	1.23	Surplus
Krembung	68.402	1.03	Surplus	69.732	1.01	Surplus	73.757	0.96	Defisit
Porong	70.170	0.61	Defisit	72.149	0.59	Defisit	76.419	0.56	Defisit
Jabon	55.153	1.55	Surplus	56.378	1.51	Surplus	59.632	1.43	Surplus
Tanggulangin	87.161	1.11	Surplus	89.150	1.09	Surplus	94.296	1.03	Surplus
Candi	153.922	0.48	Defisit	155.634	0.48	Defisit	164.617	0.45	Defisit
Tulangan	101.177	0.61	Defisit	102.171	0.60	Defisit	108.069	0.57	Defisit
Wonoayu	83.764	1.50	Surplus	84.894	1.48	Surplus	89.794	1.40	Surplus
Sukodono	121.954	1.03	Surplus	123.539	1.02	Surplus	130.670	0.97	Defisit
Sidoarjo	197.756	0.16	Defisit	202.597	0.16	Defisit	214.292	0.15	Defisit
Buduran	98.999	0.45	Defisit	100.732	0.44	Defisit	106.546	0.42	Defisit
Sedati	95.277	0.48	Defisit	97.061	0.47	Defisit	102.664	0.45	Defisit
Waru	194.084	0.03	Defisit	200.893	0.03	Defisit	212.489	0.03	Defisit
Gedangan	118.338	0.37	Defisit	121.022	0.36	Defisit	128.008	0.34	Defisit
Taman	200.405	0.26	Defisit	206.399	0.25	Defisit	218.313	0.24	Defisit
Krian	130.412	0.62	Defisit	132.165	0.62	Defisit	139.794	0.58	Defisit
Balombang	73.933	1.34	Surplus	75.707	1.31	Surplus	80.077	1.24	Surplus

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo, KLHS RPJMD, 2024

Selanjutnya, peta status daya dukung pangan di tahun 2025 dan 2029 ditampilkan sebagai berikut:

Gambar 2.5
Peta Daya Dukung Pangan Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2025 dan Tahun 2029



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo, KLHS RPJMD, 2024

B. Daya Dukung Air

Analisis daya dukung air dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan ketersediaan dan kebutuhan air. Metode ini menunjukkan cara perhitungan daya dukung air di suatu wilayah, dengan mempertimbangkan ketersediaan dan kebutuhan sumber daya air bagi penduduk yang hidup di suatu wilayah. Dengan metode ini dapat diketahui secara umum apakah sumber daya air di suatu wilayah dalam keadaan surplus atau defisit. Keadaan surplus menunjukkan bahwa ketersediaan air di suatu wilayah tercukupi, sedangkan keadaan defisit menunjukkan bahwa suatu wilayah tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan akan air. Untuk memenuhi kebutuhan air, fungsi lingkungan yang terkait dengan sistem tata air harus dilestarikan.

Ketersediaan air ditentukan dengan menggunakan metode koefisien limpasan berdasarkan informasi penggunaan lahan serta data curah hujan tahunan. Sementara itu, kebutuhan air dihitung dari hasil konversi terhadap kebutuhan hidup layak. Ketersediaan (*Supply*) air di suatu wilayah dapat dihitung menggunakan metode koefisien limpasan yang dimodifikasi dari metode rasional berikut.

$$C = \frac{\sum (C_i \times A_i)}{\sum A_i}$$
$$S_A = 10 \times C \times R \times A$$
$$R = \frac{\sum R_i}{m}$$

Keterangan :

- S_A = ketersediaan air (m^3 / tahun)
- C = koefisien limpasan tertimbang
- C_i = koefisien limpasan penggunaan lahan
- A_i = luas penggunaan lahan (ha)
- R = rata-rata aljabar curah hujan tahunan wilayah (mm/ tahunan)
- R_i = curah hujan tahunan pada stasiun (mm)
- m = jumlah stasiun pengamatan curah hujan
- A = luas wilayah (ha)

10 = faktor konversi dari mm. Ha menjadi m^3

Kebutuhan air minum dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut.

$$DA = N \times KHLA$$

Keterangan :

$D_{\text{Air minum}}$ = total kebutuhan air (m^3 / tahun)

N = jumlah penduduk (orang)

$KHLA$ = kebutuhan air untuk hidup layak

Kebutuhan air untuk irigasi menggunakan persamaan :

$$DA = ATH$$

Penentuan status daya dukung air diperoleh dari perbandingan antara ketersediaan air (S_A) dan kebutuhan air (D_A).

- Nilai $S_A > D_A$, daya dukung air dinyatakan surplus
- Nilai $S_A < D_A$, daya dukung air dinyatakan defisit atau terlampaui.

Berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat diperkirakan daya dukung air di wilayah Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2023, tahun rencana 2023 dan tahun rencana 2029 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.8
Daya Dukung Air Per Kecamatan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023-2029

No	Kecamatan	Ketersediaan Air (SA)	Kebutuhan Air (DA)						Status Daya Dukung Air
			2023	2025	2026	2027	2028	2029	
1	Tarik	65.927.358,50	107.325.631,50	110.379.769,39	111.939.276,95	113.520.818,10	115.124.704,16	116.751.250,83	Defisit
2	Prambon	62.572.485,99	124.041.715,43	127.571.538,63	129.373.941,18	131.201.809,09	133.055.502,15	134.935.385,23	Defisit
3	Krembung	57.051.115,42	108.484.171,97	111.571.278,15	113.147.620,01	114.746.233,32	116.367.432,74	118.011.537,37	Defisit
4	Porong	54.524.448,49	112.399.519,53	115.598.043,75	117.231.278,02	118.887.587,55	120.567.298,35	122.270.741,05	Defisit
5	Jabon	148.086.083,86	87.708.328,57	90.204.221,92	91.478.677,98	92.771.140,27	94.081.863,19	95.411.104,74	Defisit
6	Tanggulangin	59.034.786,64	138.693.844,92	142.640.619,99	144.655.927,01	146.699.707,43	148.772.363,52	150.874.303,27	Defisit
7	Candi	74.352.019,29	242.123.600,13	249.013.649,15	252.531.854,24	256.099.766,52	259.718.088,27	263.387.531,70	Defisit
8	Tulangan	54.025.331,22	158.950.454,49	163.473.666,69	165.783.314,73	168.125.594,78	170.500.967,88	172.909.901,59	Defisit
9	Wonoayu	62.014.864,13	132.071.991,05	135.830.329,73	137.749.417,14	139.695.618,49	141.669.316,87	143.670.900,78	Defisit
10	Sukodono	59.744.154,78	192.192.777,49	197.661.957,93	200.454.637,41	203.286.773,43	206.158.923,47	209.071.652,86	Defisit
11	Sidoarjo	114.376.471,10	315.186.289,64	324.155.464,82	328.735.315,81	333.379.873,52	338.090.052,15	342.866.778,84	Defisit
12	Buduran	75.004.711,11	156.711.258,62	161.170.750,60	163.447.861,75	165.757.145,20	168.099.055,51	170.474.053,65	Defisit
13	Sedati	145.219.359,01	151.001.309,16	155.298.314,58	157.492.456,64	159.717.598,78	161.974.178,97	164.262.641,41	Defisit
14	Waru	55.433.097,89	312.534.951,93	321.428.678,67	325.970.004,09	330.575.491,91	335.246.048,66	339.982.593,67	Defisit
15	Gedangan	43.984.481,17	188.277.429,93	193.635.192,33	196.370.979,40	199.145.419,20	201.959.057,85	204.812.449,18	Defisit
16	Taman	57.654.443,99	321.100.687,42	330.238.167,10	334.903.957,93	339.635.669,69	344.434.233,73	349.300.594,59	Defisit
17	Krian	59.418.723,00	205.613.349,25	211.464.435,44	214.452.124,10	217.482.024,50	220.554.733,04	223.670.854,53	Defisit
18	Balombang	57.407.627,76	117.780.080,03	121.131.717,48	122.843.134,61	124.578.731,61	126.338.850,10	128.123.836,53	Defisit
TOTAL		1.305.831.563,36	3.172.197.391,07	3.262.467.796,37	3.308.561.779,00	3.355.307.003,38	3.402.712.670,61	3.450.788.111,82	Defisit

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo, KLHS RPJMD, 2024



Berdasarkan hasil analisa ketersediaan air tanah Kabupaten Sidoarjo dan kebutuhan air, pada tahun 2023 status daya dukung air Kabupaten Sidoarjo mengalami defisit. Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan ketersediaan air yang ada di Kabupaten Sidoarjo.

Pembangunan proyek strategis nasional SPAM Umbulan, yang direncanakan mulai berjalan sejak tahun 2019, membawa harapan besar bagi peningkatan ketersediaan air minum di Kabupaten Sidoarjo. Proyek ini melibatkan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), dengan sumber dana dari APBN, APBD Provinsi Jawa Timur, dan pihak swasta. Salah satu manfaat utama SPAM Umbulan adalah distribusi air bersih sebesar 1.200 liter per detik untuk Sidoarjo, yang akan diberikan kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) setempat. Dengan kapasitas ini, SPAM Umbulan diharapkan dapat menjadi solusi atas defisit air bersih yang saat ini dialami oleh Kabupaten Sidoarjo.

Saat ini, berdasarkan analisis daya dukung air di tahun 2023, Sidoarjo menghadapi defisit ketersediaan air. Penyediaan air minum melalui sumber air tanah tidak lagi mencukupi untuk memenuhi kebutuhan penduduk dan perkembangan industri yang pesat. Dengan semakin menurunnya daya dukung air tanah, upaya untuk meningkatkan suplai air bersih menjadi mendesak. Kondisi ini memerlukan intervensi tambahan yang signifikan, seperti suplai dari SPAM Umbulan, untuk mengatasi defisit dan memastikan ketersediaan air yang berkelanjutan.

Perbandingan antara kondisi saat ini dengan potensi yang dibawa oleh SPAM Umbulan menunjukkan perbedaan yang substansial. Jika SPAM Umbulan sudah beroperasi penuh, ketersediaan air di Sidoarjo akan meningkat drastis, sehingga dapat mengurangi tekanan terhadap sumber air tanah dan memenuhi kebutuhan air masyarakat serta industri dengan lebih baik. Proyek ini juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat dengan meningkatkan akses air bersih yang lebih stabil dan berkualitas di Sidoarjo.

2.1.1.4 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

a. Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)

Konsumsi Listrik per Kapita (kWh) adalah ukuran yang menggambarkan rata-rata jumlah energi listrik yang dikonsumsi oleh setiap individu dalam satu tahun di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Nilai ini dihitung dengan membagi total konsumsi listrik di wilayah tersebut dengan jumlah penduduk pada periode yang sama. Indikator ini penting karena mencerminkan tingkat aktivitas ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan efisiensi penggunaan energi di suatu daerah.

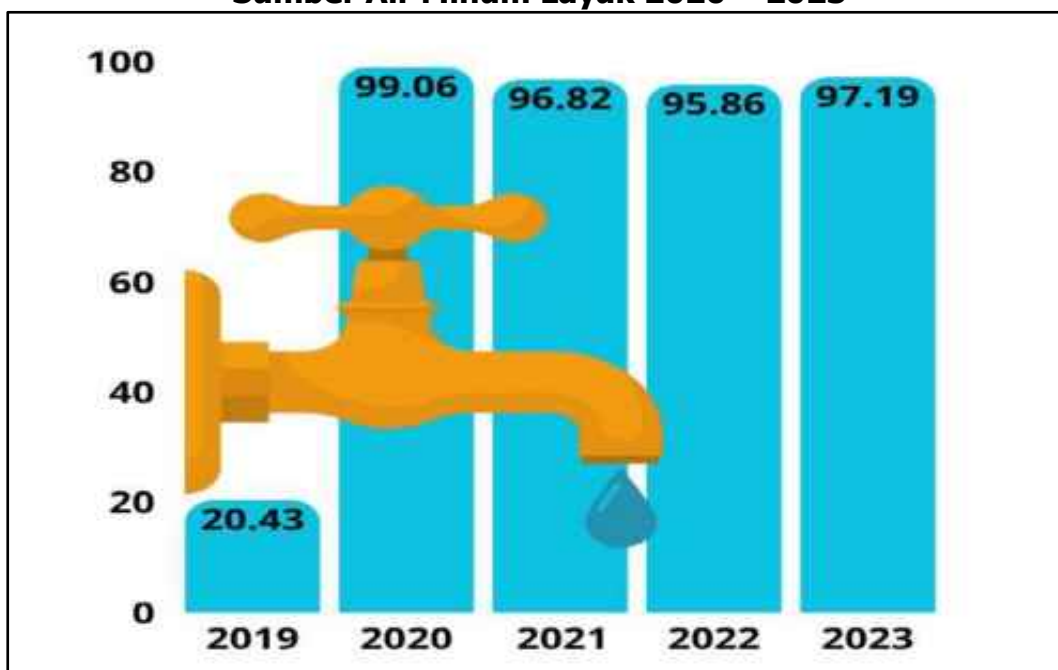
Peningkatan konsumsi listrik per kapita umumnya mengindikasikan adanya pertumbuhan industri, peningkatan jumlah rumah tangga yang teraliri listrik, serta bertambahnya penggunaan peralatan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Namun, jika pertumbuhan konsumsi listrik tidak diimbangi dengan efisiensi energi dan pemanfaatan sumber energi terbarukan, hal ini dapat meningkatkan beban terhadap pasokan listrik dan berdampak pada lingkungan. Oleh karena itu, analisis tren konsumsi listrik per kapita perlu dibarengi dengan evaluasi penggunaan teknologi hemat energi, optimalisasi pemakaian, dan pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Kabupaten Sidoarjo.

b. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sumber Air Minum Layak

Bagian penting dari akses fasilitas bagi rumah tangga selain hunian yang layak dan tidak kumuh adalah akses terhadap air minum. Berbeda dengan jenis air lainnya, air minum menjadi bagian penting karena termasuk dalam kebutuhan primer memenuhi gizi tiap individu. Setiap hari pasti manusia akan memerlukan air minum untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Untuk mendapatkan air minum, sumber yang digunakan tentu bermacam-macam, mulai dari mengolah sendiri dengan cara memasak, membeli air galon, dari mata air, dan sumber-sumber air lainnya. Namun pemenuhan air minum tersebut perlu diperhatikan karena untuk meninjau apakah air yang

dikonsumsi oleh masyarakat Kabupaten Sidoarjo dapat dikatakan layak atau tidak untuk dikonsumsi.

Gambar 2.6
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap
Sumber Air Minum Layak 2020 – 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2024

Tingkat akses rumah tangga terhadap sumber air minum layak di Kabupaten Sidoarjo selama periode 2020 hingga 2023 menunjukkan tren yang sangat positif. Pada tahun 2020, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak tercatat sebesar 99,06%. Meskipun terjadi sedikit penurunan pada tahun 2021 menjadi 96,82%, kondisi ini dapat dikaitkan dengan dampak pandemi COVID-19 yang mempengaruhi penyediaan infrastruktur dasar. Puncaknya terjadi pada tahun 2023, di mana persentase akses mencapai 97,19%, menunjukkan adanya upaya perbaikan dan pemulihan layanan dasar oleh pemerintah daerah yang mendekati cakupan universal. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan program pembangunan air minum layak, baik melalui pengembangan jaringan perpipaan, optimalisasi pelayanan PDAM, maupun kolaborasi lintas sektor. Meski demikian, keberlanjutan capaian tersebut perlu dijaga dengan memastikan kualitas layanan dan memperhatikan wilayah-wilayah kecil yang

masih belum terakses penuh. Strategi berbasis komunitas dan pendekatan pembangunan berkelanjutan menjadi kunci untuk mempertahankan serta meningkatkan akses air minum layak di masa mendatang.

c. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (Akses Rumah Tangga terhadap Air Bersih Perpipaan)

Rumah Tangga terhadap Air Bersih Perpipaan merupakan Ukuran yang menggambarkan persentase rumah tangga yang memiliki akses langsung terhadap sumber air minum melalui jaringan perpipaan yang dikelola oleh penyedia layanan resmi seperti PDAM.

Tabel 2.9
Akses Rumah Tangga terhadap Air Bersih Perpipaan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020-2024

Uraian	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Akses Rumah Tangga terhadap Air Bersih Perpipaan	%	35,54	37,77	39,84	43,23	31,12*

Sumber: PDAM Kabupaten Sidoarjo, 2025

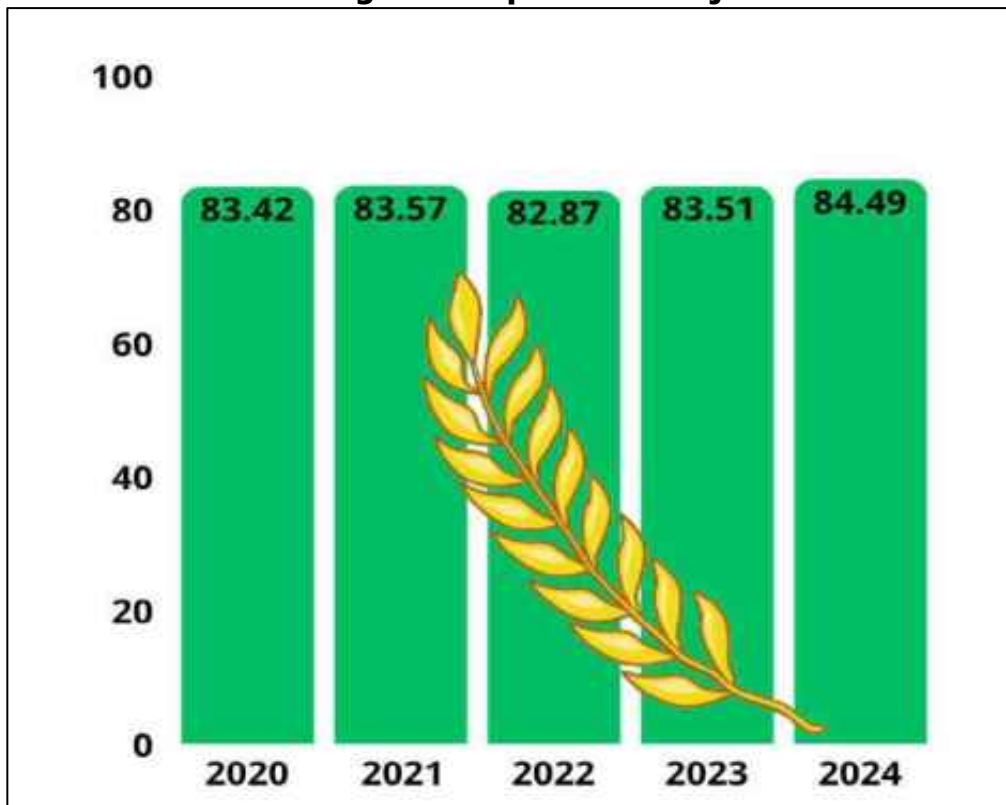
* : metode perhitungan terbaru

Capaian layanan air bersih perpipaan di Kabupaten Sidoarjo terus menunjukkan peningkatan dari realisasi 35,54% di tahun 2020 menjadi 43,23 di tahun 2023. Akan tetapi di tahun 2024 perhitungannya berubah mengikuti metode pengukuran BPS menjadi 31,12. Kondisi ini akan memberikan manfaat bagi masyarakat seperti akses air bersih yang mudah, peningkatan kesehatan, dan efisiensi dalam penggunaan air.

d. Indeks Ketahanan Pangan

Indeks ketahanan pangan Kabupaten Sidoarjo yang dihimpun dari laporan Badan Pangan Nasional adalah sebagai berikut.

Gambar 2.7
Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025

Berdasarkan grafik yang menampilkan Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Sidoarjo selama periode 2020 hingga 2024, dapat disimpulkan bahwa kondisi ketahanan pangan Kabupaten Sidoarjo berada dalam kategori stabil dengan fluktuasi nilai yang relatif kecil. Indeks ini berada pada kisaran angka 82,87 hingga 84,49, menunjukkan bahwa Kabupaten Sidoarjo secara umum memiliki sistem ketahanan pangan yang cukup baik dan berdaya tahan dalam menghadapi perubahan kondisi ekonomi dan lingkungan. Pada tahun 2020, indeks tercatat sebesar 83,42 dan mengalami sedikit peningkatan menjadi 83,57 pada tahun 2021. Setelah mengalami penurunan pada tahun 2022 yang terkait dengan efek lanjutan dari pandemi atau adanya bencana lokal seperti banjir atau kekeringan, selanjutnya mulai tahun 2023 dan 2024 terjadi pemulihan menjadi 83,51 dan 84,49. Kenaikan ini menunjukkan bahwa upaya perbaikan ketahanan pangan kembali menguat. Pemerintah daerah kemungkinan telah mengintensifkan berbagai program intervensi, seperti

peningkatan produksi pangan lokal, penyaluran bantuan pangan bagi kelompok rentan, dan penguatan infrastruktur distribusi pangan.

Guna menunjang upaya meningkatkan ketahanan pangan membutuhkan upaya komprehensif dan berkelanjutan di berbagai sektor. Dibutuhkan kombinasi strategi dengan fokus pada pemanfaatan teknologi, kerjasama multi-stakeholder, dan adaptasi terhadap perubahan iklim, dapat membantu mewujudkan ketahanan pangan yang kuat dan berkelanjutan sebagai berikut:

- a) Upaya komprehensif dalam mempertahankan ketahanan pangan Menetapkan KP2B sesuai dengan perda RTRW No 4 Tahun 2024, dan menyusun serta melaksanakan program-program dalam rangka mempertahankan lahan pertanian yang masuk ke dalam KP2B dan serta pelaksanaan kegiatan budidaya pertanian dan peternakan di Kawasan Pertanian.
- b) Meningkatkan hasil produksi perikanan sebagai produk unggulan daerah, peningkatan pengolahan hasil perikanan dan pemasarannya dengan menerapkan sistem pengembangan dari hulu ke hilir.

e. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

Prevalensi ketidakcukupan pangan merupakan persentase penduduk yang mengalami kekurangan asupan energi makanan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup sehat dan aktif. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat kerawanan pangan dan gizi di suatu wilayah. Prevalensi ketidakcukupan pangan Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dihimpun dari data Badan Pusat Statistik sebagai berikut.

Gambar 2.8
Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Dari gambar di atas dapat diinformasikan bahwa walaupun pernah mengalami lonjakan nilai prevalensi yang cukup besar di tahun 2022 sebesar 6,34 akan tetapi pada satu tahun sesudahnya hingga tahun 2024 kondisi prevalensi ketidacukupan pangan sudah dapat dikendalikan. Tercatat di tahun 2024 prevalensi ketidacukupan pangan Kabupaten Sidoarjo mencapai 3,07 menurun dibandingkan tahun 2023 sebesar 4,03.

f. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman merupakan ukuran yang menggambarkan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang aman, layak, dan memenuhi standar kesehatan lingkungan.

Tabel 2.10
Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020-2024

Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	1,15	1,44	2,59	2,81	3,1

Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo, 2024

Realisasi rumah tangga dengan akses sanitasi aman juga terus menunjukkan peningkatan, namun begitu capaiannya masih terlalu kecil sehingga dalam perencanaan pembangunan jangka menengah 5 tahun ke depan harus menjadi perhatian khusus untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan memastikan pembuangan limbah dilakukan dengan aman, tidak mencemari lingkungan dan sumber air.

2.1.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas

a. Penggunaan Lahan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024, rencana pola wilayah di Kabupaten Sidoarjo meliputi Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya. Kawasan lindung meliputi: 1) Badan Air; 2) Kawasan Lindung Geologi; 3) Kawasan Cagar Budaya; 4) Kawasan Ekosistem Mangrove.

1. Badan Air

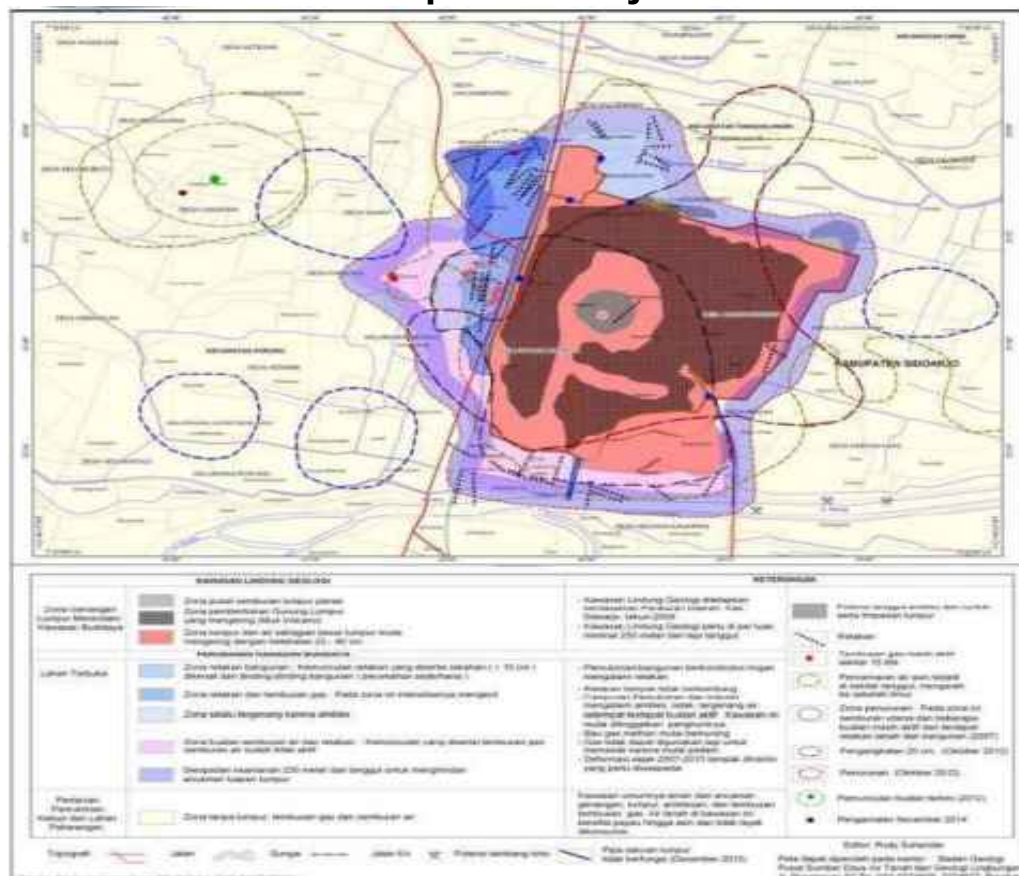
Kawasan Badan Air sesuai dengan Perda RTRW Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 memiliki luas kurang lebih 1.593 Ha yang tersebar di Kecamatan Balongbendo, Buduran, Candi, Gedangan, Jabon, Krembung, Krian, Porong, Prambon, Sedati, Sidoarjo, Sukodono, Taman, Tanggulangin, Tarik, Tulangan, Waru dan Wonoayu.

2. Kawasan Lindung Geologi

Kawasan lindung geologi diartikan sebagai kawasan cagar alam geologi yaitu kawasan keunikan proses geologi seluas kurang lebih 630 Ha yang tersebar pada Kecamatan Jabon, Kecamatan Porong dan Kecamatan Tanggulangin yang terkait dengan bencana genangan Lumpur Lapindo Sidoarjo yang ditetapkan sebagai Kawasan Lindung Geologi. Di samping itu, terdapat pula fenomena geologi Lusi yang penting yang dapat menjadi nilai sejarah geologi di Kawasan Lusi seperti adanya beberapa zona seperti zona amblesan dan pengangkatan (daerah pemukiman, industri dan infrastruktur), zona retakan (terdapat pada tanah dan batuan), zona bualan/ tembusan gas berupa vent (*bubble, gryphons*) dan perubahan

bentuk muka bumi. Oleh karena itu, beberapa objek perlu dilestarikan agar tidak rusak dan punah dan perlunya penataan ruang kembali pasca menurunnya aktivitas Lusi. Penataan kembali dengan cara memperluas Kawasan Lindung Geologi disesuaikan dengan Peta Area Terdampak LUSI, menindaklanjuti pemanfaatan fungsi geowisata yang dapat menjadi potensi sumber daya alam untuk meningkatkan pendapatan daerah. Jejak proses geologi yang terjadi akibat aktivitas LUSI agar segera diamankan /dikonservasi agar tidak hilang atau rusak antara lain seperti bangunan miring, tower SUTET, sisa jembatan (*fly over*) sebagai salah satu jenis sejarah amblesan, sisa-sisa bualan dan vent bualan yang muncul di dalam tanggul.

Gambar 2.9
Perubahan Fungsi Ruang Akibat Kerusakan Lingkungan Geologi
Kabupaten Sidoarjo



Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo, 2025



3. Kawasan Cagar Budaya

Kawasan cagar budaya di Kabupaten Sidoarjo sesuai Perda RTRW meliputi lokasi cagar budaya dan kawasan cagar budaya yang memiliki nilai strategis. Lokasi cagar budaya meliputi Candi, Pendopo Kabupaten Sidoarjo, Makam, Situs dan Prasasti. Selanjutnya untuk kawasan cagar budaya yang memiliki nilai strategis memiliki luas kurang lebih 6 Ha berupa Pabrik Gula Tulangan yang ada di Kecamatan Tulangan.

4. Kawasan Ekosistem *Mangrove*

Kawasan ekosistem *mangrove* yang ada di Kabupaten Sidoarjo tercatat memiliki luas area kurang lebih 345 Ha yang tersebar di Kecamatan Jabon dan Kecamatan Sedati. Kawasan *mangrove* merupakan salah satu potensi sumberdaya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Sidoarjo yang berada di pesisir serta mampu dikembangkan menjadi kawasan wisata. Kawasan tersebut menjadi salah satu perhatian sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang berada di pesisir Sidoarjo. Hal tersebut karena berdasarkan data kawasan *mangrove* yang berada di wilayah Sedati terjadi penurunan yang dapat memberikan efek negatif.

Sedangkan Kawasan Budidaya meliputi 1) Badan Jalan; 2) Kawasan Pertanian; 3) Kawasan Perikanan; 4) Kawasan Peruntukan Industri; 5) Kawasan Pariwisata; 6) Kawasan Permukiman; 7) Kawasan Transportasi dan 8) Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

a. Badan Jalan

Badan jalan sebagaimana yang dimaksud di Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang RTRW memiliki luas kurang lebih 464 Ha yang tersebar di Kecamatan Balongbendo, Buduran, Candi, Gedangan, Jabon, Krian, Porong, Prambon, Sedati, Sidoarjo, Sukodono, Taman, Tanggulangin, Tarik, Tulangan dan Waru.

b. Kawasan Pertanian

Kawasan pertanian tercatat memiliki luas kurang lebih 12.569 Ha yang meliputi:



- a) Kawasan Tanaman Pangan seluas 11.114 Ha yang tersebar di Kecamatan Balongbendo, Candi, Jabon, Krembung, Krian, Porong, Prambon, Sidoarjo, Sukodono, Taman, Tanggulangin, Tarik, Tulangan dan Wonoayu. Kawasan tanaman pangan yang ditetapkan sebagai KP2B seluas kurang lebih 6.750 Ha. Penetapan KP2B seluas 6.750 Ha ini merupakan potensi yang diterapkan oleh pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan bagi masyarakat, khususnya masyarakat Sidoarjo.
- b) Kawasan Hortikultura seluas 1.455 Ha yang tersebar di Kecamatan Balongbendo, Krembung, Krian, Porong, Prambon, Sukodono, Tarik, Tulangan dan Wonoayu.
- c. Kawasan Perikanan

Kawasan perikanan di Kabupaten Sidoarjo berupa Kawasan Perikanan Budidaya yang memiliki luas kurang lebih 14.597 Ha dan tersebar di 7 kecamatan meliputi Kecamatan Buduran, Candi, Jabon, Porong, Sedati, Sidoarjo dan Tanggulangin. Kabupaten Sidoarjo yang terkenal sebagai Kota Delta memiliki unggulan produk perikanan tambak bandeng dan udang. Bandeng yang dibudidayakan di Sidoarjo memiliki ciri khas yaitu berbibir merah dan berpunggung hitam. Bandeng Sidoarjo dikenal memiliki rasa gurih, segar dan tidak bau tanah karena pembudidaya selalu memperhatikan sirkulasi air tambak dengan baik. Banyaknya tambak yang ada di Kabupaten Sidoarjo juga menjadi salah satu potensi yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai alternatif pariwisata.
- d. Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri sebagaimana yang disebutkan pada Perda RTRW Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 memiliki luas kurang lebih 7.173 Ha yang tersebar pada 18 kecamatan yang ada di Sidoarjo.
- e. Kawasan Pariwisata

Kawasan pariwisata yang dimaksud dalam Perda RTRW Kabupaten Sidoarjo berupa lokasi pariwisata yang berada di Wisata Bahari Tlocor di

Kecamatan Jabon, Museum Mpu Tantular di Kecamatan Buduran serta Wisata Alas Prambon di Kecamatan Prambon.

f. Kawasan Permukiman

Kawasan Permukiman sebagaimana tercantum pada Perda RTRW Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 memiliki luas 33.736 Ha yang terbagi atas Kawasan Permukiman Perkotaan seluas 29.817 Ha dan Kawasan Permukiman Perdesaan seluas 3.919 Ha.

g. Kawasan Transportasi

Kawasan transportasi sebagaimana tercantum pada Perda RTRW Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 memiliki luas 220 Ha yang meliputi Terminal tipe A di Bungurasih Kecamatan Waru dan Pangkalan Militer TNI AL di Kecamatan Sedati.

h. Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana tercantum pada Perda RTRW Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 memiliki luas 1.132 Ha yang meliputi 24 tempat Kecamatan Sidoarjo, Buduran, Waru, Wonoayu, Gedangan, Porong dan Sedati.

Berdasarkan kondisi penggunaan lahan Kabupaten Sidoarjo, maka fokus terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan perlu menjadi aspek penting yang diperhatikan karena untuk mengevaluasi apakah penggunaan lahan yang selama ini dilakukan telah memperhatikan kondisi dan kemampuan lingkungan untuk menjaga keseimbangan alam yang dihuni. Sayangnya, beberapa catatan krusial harus diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Kabupaten Sidoarjo menunjukkan adanya tekanan yang signifikan terhadap keberlanjutan ekologi wilayah

b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup berkualitas adalah kondisi lingkungan yang memungkinkan manusia dan makhluk hidup lainnya berkembang secara optimal, seimbang, dan selaras. Lingkungan yang baik menyediakan sumber

daya alam yang cukup, bebas dari pencemaran, dan mendukung kesehatan serta kesejahteraan masyarakat.

Berkaitan dengan lingkungan hidup berkualitas tidak terlepas dari capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup khususnya di Kabupaten Sidoarjo. Berikut adalah capaian IKLH Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020-2024.

Tabel 2.11
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	59,78	59,81	57,54	58,97	53,35

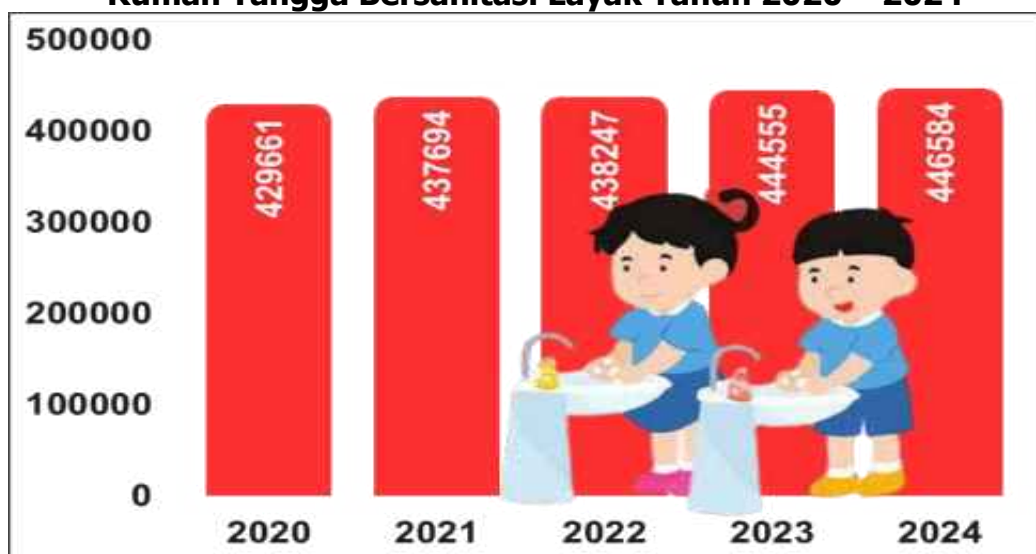
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo, 2025

Capaian IKLH Kabupaten Sidoarjo di tahun 2024 menurun dibandingkan dengan capaian empat tahun sebelumnya. Hal ini tentunya menjadi evaluasi dan prioritas bagi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam upaya perbaikan dan peningkatan sehingga lingkungan hidup menjadi berkualitas. Kabupaten Sidoarjo yang merupakan kota industri tidak terlepas dari aktivitas kendaraan bermotor dan penggunaan bahan bakar. Peningkatan aktivitas kendaraan bermotor dan penggunaan bahan bakar yang tidak sesuai menyebabkan peningkatan pencemaran udara dari emisi kendaraan bermotor, termasuk aktivitas lalu lintas kendaraan truk berbahan bakar diesel/solar di sekitar area titik pantau. Upaya lain adalah melakukan revitalisasi RTH, menggalakkan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam penyediaan RTH minimal 10% dari luas lahan utamanya serta pengujian emisi kendaraan bermotor secara berkala.

Dalam upaya pencegahan banjir Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga cukup intens melakukan upaya revitalisasi sungai. Revitalisasi sungai juga menjadi upaya untuk menjaga tingkat ketersediaan air untuk Jaringan Irigasi di Kabupaten Sidoarjo.

c. Rumah Tangga Bersanitasi Layak

Gambar 2.10
Rumah Tangga Bersanitasi Layak Tahun 2020 – 2024



Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo, 2025

Berdasarkan grafik untuk realisasi RT bersanitasi sehat juga terus meningkat, dimana data menyebutkan sampai dengan tahun 2024 RT bersanitasi sehat Kabupaten Sidoarjo sebanyak 446.584 RT atau 99,26% ketercapaian dari target yang ditetapkan. Adapun upaya yang telah dilakukan untuk peningkatan akses sanitasi layak, yaitu selain pembangunan unit jamban untuk peningkatan akses sanitasi layak, telah dilakukan pendekatan ke masyarakat setempat untuk memberi edukasi dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya sanitasi yang layak untuk unit jamban dan juga pengolahan limbah bagi keberlangsungan hidup seluruh lapisan masyarakat.

d. Persentase Sampah Terkelola

Aspek penting dalam menunjang kualitas lingkungan yang baik adalah proses pengolahan sampah. Persoalan tersebut bisa dikatakan masih menuai perdebatan dan dilematis akibat produksi sampah yang terlalu tinggi namun tidak sebanding dengan volume pengolahan sampah. Makin padatnya penduduk di Kabupaten Sidoarjo berdampak langsung pada kondisi lingkungan sekitar, terutama di wilayah yang padat penduduk. Isu strategis yang masih menjadi persoalan lingkungan bagi pemerintah daerah adalah

pengolahan sampah. Memperhitungkan jumlah penduduk dan industri yang berpotensi menambah setiap tahun, daya dukung dan daya tampung lingkungan terhadap sampah perlu diperhatikan. Berdasarkan data dari Rencana Induk Pengolahan Sampah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024, terdapat 127 tempat pembuangan sampah yang terdiri dari Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS); Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*); dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang tersebar di seluruh kecamatan. Sedangkan untuk Tempat Pengolahan Akhir (TPA) di Kabupaten Sidoarjo hanya ada dua di Kecamatan Jabon (TPA Jabon dan TPA Griyo Mulyo). Data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) menyebutkan sepanjang tahun 2024, total volume sampah yang masuk ke TPA adalah 173.840 ton, sedangkan TPA di Kabupaten Sidoarjo hanya mampu menampung kurang lebih 500 ton sampah.

Proyeksi timbulan sampah yang dihasilkan pada tahun 2025 sebanyak 1.685,3 ton per hari dan akan terus meningkat sampai tahun 2040 dengan proyeksi timbulan sampah sebanyak 1.734,6 ton per hari. Sementara pada tahun 2045, dikarenakan proyeksi jumlah penduduk menurun maka proyeksi timbulan sampah harian yang dihasilkan juga menurun menjadi 1.728,3 ton per hari. Meskipun kondisi ini menurun, namun jika dibandingkan dengan proyeksi tahun 2025, besar timbulan sampah harian yang dihasilkan meningkat sebesar 42,9 ton perharinya. Untuk lebih jelasnya dapat disimak dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.12
Perkembangan Komponen Persentase Sampah Terkelola
Tahun 2020 – 2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase sampah yang terkelola ((Jumlah sampah yang terkelola / Jumlah timbulan sampah) x 100%)	Persen	92%	93%	73%	77%	79%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Sidoarjo, 2025

Data persentase sampah yang terkelola di Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2020 dan 2021, persentase pengelolaan sampah mencapai tingkat optimal, masing-masing sebesar 92% dan 93%, yang menunjukkan sistem pengelolaan sampah saat itu cukup efektif dalam menangani timbulan sampah. Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan tajam hingga 73%, yang dapat mengindikasikan adanya gangguan pada sistem pengangkutan, fasilitas pengolahan yang tidak optimal, atau peningkatan volume timbulan sampah yang tidak diimbangi dengan kapasitas pengelolaan.

Sejak penurunan tersebut, capaian pengelolaan sampah mulai menunjukkan pemulihan bertahap, meningkat menjadi 77% pada 2023 dan 79% pada 2024. Meski demikian, angka tersebut masih belum kembali ke level ideal seperti pada tahun-tahun awal. Hal ini menandakan bahwa meskipun ada upaya perbaikan, seperti penguatan pengelolaan berbasis masyarakat, revitalisasi TPS dan TPA, serta peningkatan peran bank sampah, efektivitasnya belum sepenuhnya mampu mengembalikan capaian seperti semula.

Penurunan pengelolaan sampah karena berbagai faktor antara lain: 1) belum optimalnya pemilahan sampah dari tingkat sumber; 2) belum optimalnya kegiatan pembatasan dan pemanfaatan kembali seperti di fasilitas pendidikan, kesehatan, industri dan fasilitas umum lainnya; 3) belum optimalnya pengolahan sampah di TPS3R; dan 4) terbatasnya sarana prasarana angkutan sampah.

e. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Jumlah timbulan sampah yang berhasil dikelola dan diolah melalui fasilitas pengolahan sampah resmi yang dimiliki atau dikerjasamakan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, seperti Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), atau fasilitas teknologi pengolahan lainnya digambarkan berikut ini.

Tabel 2.13
Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023-2024

Indikator	Satuan	Tahun	
		2023	2024
Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	18,0	19,5

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo, 2025

Mengacu pada tabel di atas untuk indikator timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah merupakan indikator baru yang termasuk dalam IUP RPJPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2045. Capaian di tahun 2023 sebesar 18,0% meningkat di tahun 2024 menjadi 19,5% dan akan terus ditingkatkan dengan optimalisasi program pengelolaan persampahan melalui penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten.

f. Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah

Rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah adalah rumah tangga yang menerima layanan pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan frekuensi tetap dan rutin (minimal 2 (dua) kali dalam seminggu), serta sampah dikumpulkan minimal dalam 3 (tiga) atau lebih yang terpisah.

Tabel 2.14
Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh
Pengumpulan Sampah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023-2024

Indikator	Satuan	Tahun	
		2023	2024
Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	57,50	58,99

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo, 2025

Capaian proporsi rumah tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah tahun 2023 dan 2024 meningkat dari nilai 57,50 menjadi 58,99. Peningkatan capaian menunjukkan bahwa efektivitas sistem pengelolaan sampah menjadi semakin baik dan dapat dijadikan dasar untuk merencanakan peningkatan layanan pengelolaan persampahan pada rencana kerja pemerintah daerah selanjutnya.

Secara umum faktor pendorong dan penghambat masalah persampahan Adalah

Faktor pendorong: regulasi dalam pengelolaan sampah, peran masyarakat dalam pengelolaan sampah, fasilitas pengolahan sampah yang memadai, inovasi pengelolaan sampah, kelembagaan pengelolaan sampah, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, dan dukungan anggaran.

Faktor Penghambat: kompetensi pengelola di unit pengolahan sampah pada level intermediate belum optimal, keterbatasan anggaran, dan kesadaran masyarakat atas pengelolaan sampah masih rendah.

2.1.1.6 Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim adalah kemampuan suatu wilayah, institusi, dan masyarakat untuk menghadapi, menyesuaikan diri, serta pulih secara cepat dan berkelanjutan dari dampak bencana alam maupun perubahan iklim. Konsep ini mencakup kesiapsiagaan terhadap risiko seperti banjir, kekeringan, gempa, hingga krisis pangan dan air akibat perubahan cuaca ekstrem, serta kemampuan adaptasi terhadap kondisi baru pasca-bencana. Isu perubahan iklim menjadi sorotan penting karena berefek besar bagi keberlangsungan hidup manusia. Kabupaten Sidoarjo berkomitmen mendukung pemerintah Indonesia dalam mengurangi kegiatan-kegiatan yang memperparah perubahan iklim.

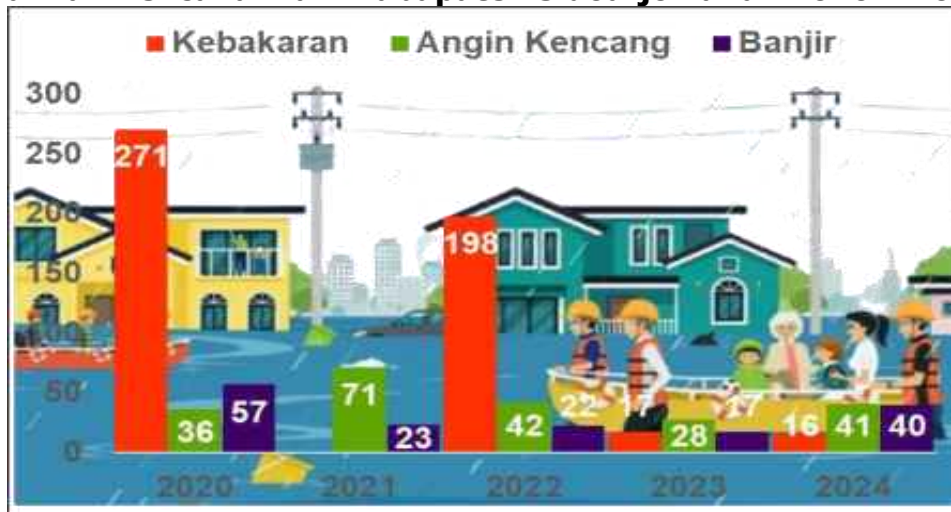
a. Gambaran Bencana Kabupaten Sidoarjo

Bencana di Kabupaten Sidoarjo menurut intensitas kasusnya dibagi atas angin kencang, banjir, dan kebakaran. Pada Tahun 2024 bencana kebakaran menurun dibanding tahun sebelumnya yakni 16 kasus, namun pemerintah tetap berupaya agar kebakaran bisa terus berkurang.

Begitu juga kasus Bencana Angin Kencang yang selama tahun 2024 meningkat menjadi 41 kasus, sedangkan Bencana Banjir juga mengalami peningkatan menjadi 40 kasus di Tahun 2024 dari tahun sebelumnya yang hanya tercatat sebanyak 17 kasus. Proses normalisasi sungai dan perbaikan

sistem drainase terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo guna mengurangi jumlah kasus banjir di Kabupaten Sidoarjo.

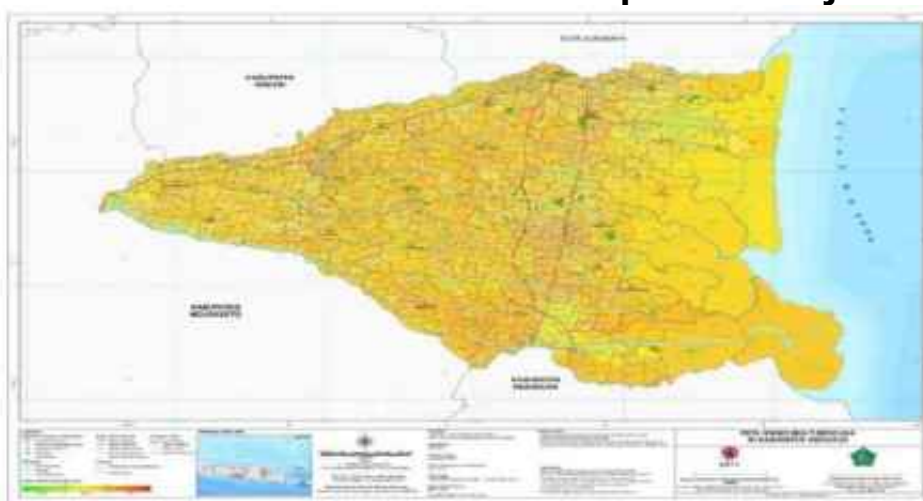
Gambar 2.11
Jumlah Bencana Alam Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 – 2024



Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo, 2025

Seiring laju pembangunan, maka kepadatan penduduk di wilayah perkotaan menjadi semakin tinggi. Pertumbuhan kawasan perkotaan akibat penambahan penduduk menyebabkan aktivitas masyarakat menjadi semakin tinggi yang menyebabkan risiko bencana menjadi lebih besar. Berbagai bahaya kemungkinan dapat muncul seiring dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang mempengaruhi pola tingkah laku masyarakat yang hidup di perkotaan, misalnya kebakaran, banjir/genangan dan lainnya.

Gambar 2.12
Peta Risiko Multibencana Kabupaten Sidoarjo



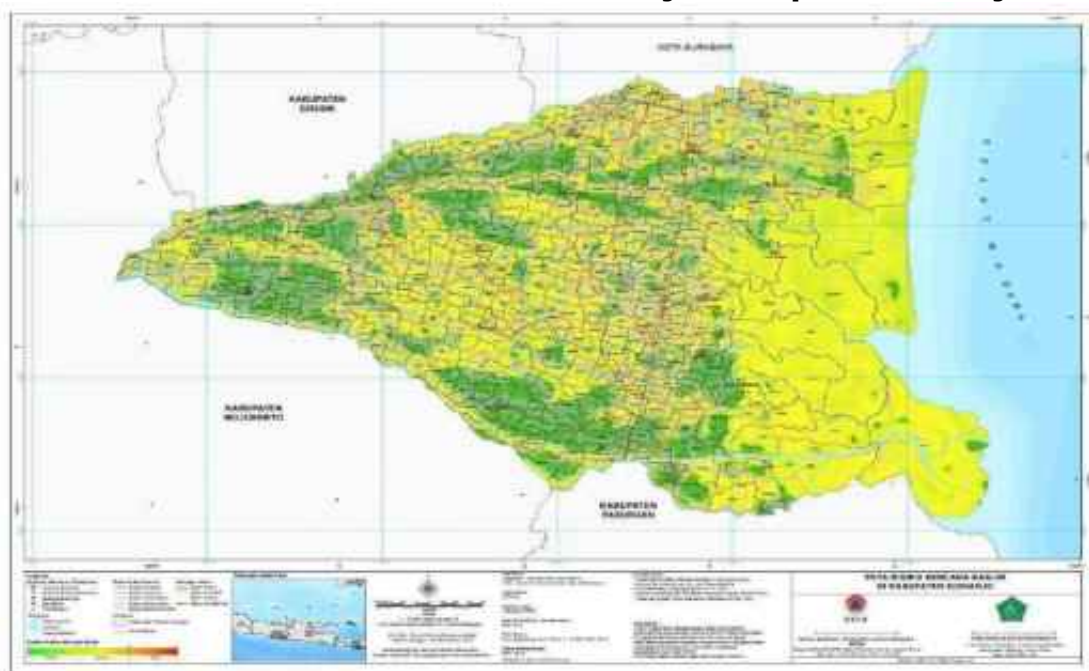
Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo, 2017



Memperhatikan topografi di Kabupaten Sidoarjo yang wilayahnya secara umum dikategorikan sebagai dataran rendah dan merupakan wilayah sungai, maka wilayah Kabupaten Sidoarjo sangat rentan terhadap banjir. Wilayah yang rentan banjir adalah wilayah di kanan-kiri sungai, khususnya pada musim penghujan. Hal ini disebabkan karena sebagian besar fungsi sungai di Kabupaten Sidoarjo sebagai saluran irigasi sekaligus saluran pematusan. Mengacu pada peta risiko multibencana kawasan yang sering mengalami banjir atau genangan terbanyak adalah di wilayah Kota Sidoarjo, Kecamatan Waru dan Kecamatan Tanggulangin, serta daerah pemukiman baru yang memang sarana drainasenya belum memadai.

Di samping itu pada daerah hilir sungai atau sebelah Timur Jalan Raya Surabaya Sidoarjo Porong dan antara Jalan Tol dengan Jalan Raya sering terjadi genangan. Beberapa daerah yang rawan dan sering terkena banjir/genangan antara lain : Kawasan perkotaan Bluru Kidul, Rangka, Gebang, Kemiri, Suko dan daerah lainnya di luar Kota Sidoarjo. Sebaran genangan di Kabupaten Sidoarjo secara menyeluruh dapat dilihat pada peta banjir berikut.

Gambar 2.13
Peta Kawasan Rawan Bencana Banjir Kabupaten Sidoarjo

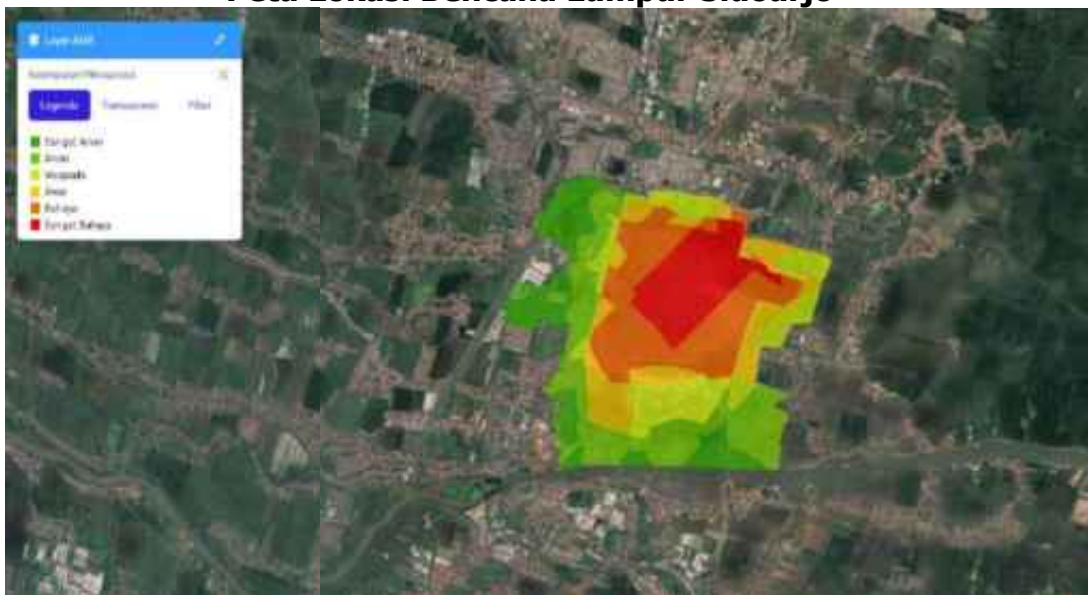


Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo, 2017



Selanjutnya untuk bencana semburan lumpur Sidoarjo yang terjadi sejak 29 Mei 2006 diketahui peta area terdampak, luas wilayah penanganan sosial kemasyarakatan dari bencana semburan lumpur Lapindo mencapai 1.143,3 hektar. Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2007, wilayah yang menjadi tanggung jawab PT. Lapindo seluas 634,5 hektar. Peta lokasi lumpur Sidoarjo sebagaimana disajikan dalam gambar di bawah ini.

Gambar 2.14
Peta Lokasi Bencana Lumpur Sidoarjo



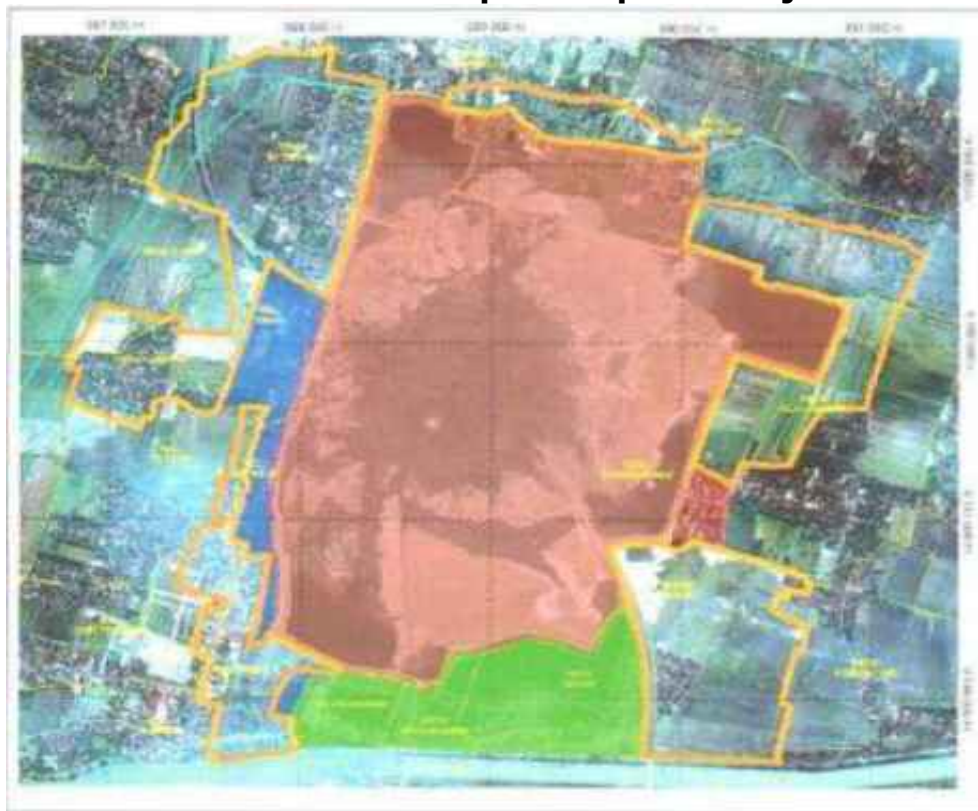
*Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Sumber Daya Air Pusat
Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo, 2024*

Permasalahan yang perlu mendapat perhatian adalah penurunan tanah (*land subsidence*) di sekitar lokasi semburan lumpur. Selain resiko kemungkinan terjadinya tanah amblas, resiko lain adalah terjadinya banjir di beberapa titik. Berdasarkan penelitian BPBD Kabupaten Sidoarjo di daerah Porong menggunakan data InSAR mengemukakan bahwa sebagian kawasan Tanggulangin mengalami penurunan yang signifikan sejak akhir tahun 2019.

Diantara desa yang masuk dalam kawasan tersebut, Desa Kedungbanteng dan Banjarsari merupakan desa yang terdampak cukup parah karena berada pada titik terendah penurunan. Dampak yang paling terlihat dari peristiwa ini yaitu terjadinya genangan yang cukup mengkhawatirkan dan sulit untuk dikendalikan. Hasil studi terdahulu menggunakan pengamatan GPS

dan analisis hidrologi menunjukkan terjadinya perubahan elevasi saluran afvour yang dipengaruhi oleh penurunan tanah sehingga menyebabkan sejumlah volume air yang seharusnya dialirkan ke muara menggenangi kedua desa tersebut. Sedangkan lokasi secara umum area terdampak lumpur Sidoarjo sebagaimana disajikan dalam gambar di bawah ini.

Gambar 2.15
Peta Area Terdampak Lumpur Sidoarjo



Sumber : Sekretariat Kabinet, 2013

Keterangan:

- Area 1 : Area Terdampak tanggal 22 Maret Tahun 2007 berdasarkan Perpres Nomor 14 Tahun 2007
- Area 2 : Wilayah penanganan luapan lumpur di Desa Besuki, Desa Pajarakan, Desa Kedungcangkring, berdasarkan Perpres Nomor 48 Tahun 2008.
- Area 3 : Wilayah penanganan luapan lumpur Desa Siring bagian Barat, Desa Jatirejo, Desa Mindi, berdasarkan Perpres Nomor 68 Tahun 2011.

Area 4 : Wilayah yang berada di sekitar area luapan lumpur adalah daerah tidak aman sebagaimana ditetapkan oleh Perpres Nomor 33 Tahun 2013.

Mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, diketahui bahwa selain area 1, 2 dan 3 yang telah ditetapkan sebagai area terdampak, juga terdapat area 4 yang merupakan wilayah tidak aman yang setiap saat dapat menimbulkan bencana/kerugian bagi masyarakat. Beberapa wilayah sebagaimana disajikan di atas merupakan titik penanggulangan bencana sesuai dengan kewenangan kabupaten Sidoarjo.

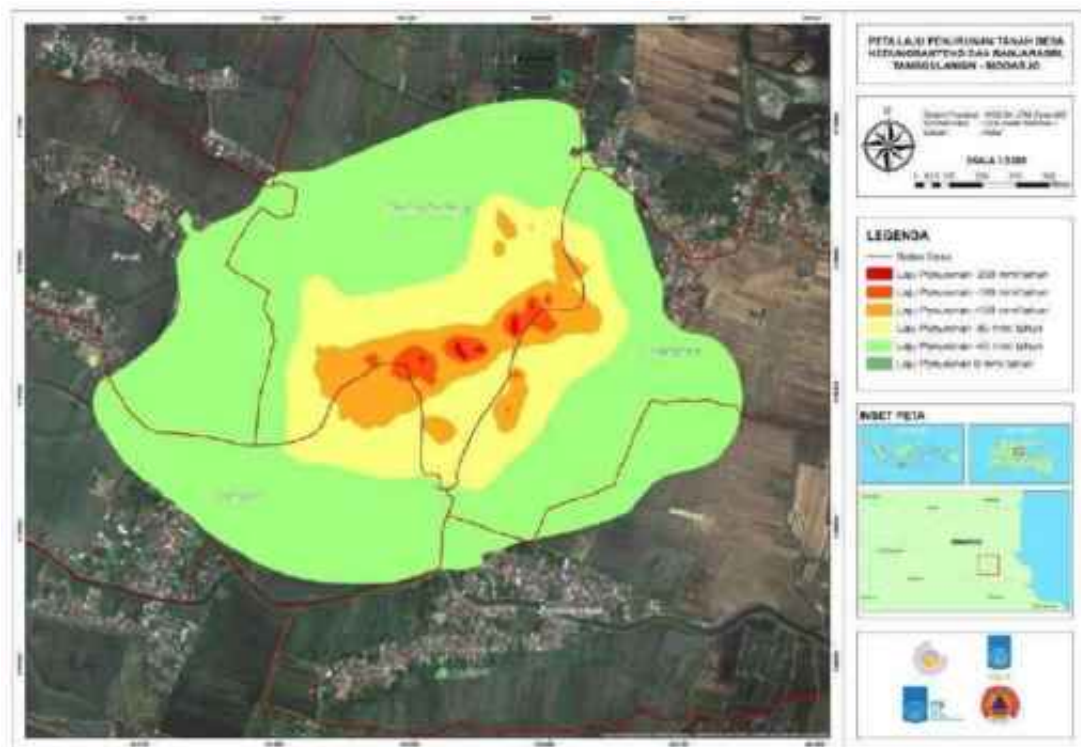
Gambar 2.16
Sebaran Titik Penurunan Tanah



Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo, 2021

Pada peta lokasi di atas, terjadi penurunan tanah hingga mencapai 60-80 cm selama kurun waktu 15 tahun. Hal ini yang menyebabkan banjir genangan di wilayah tersebut selalu terjadi, khususnya disaat musim penghujan. Selain itu genangan yang terjadi dalam waktu yang lama, sehingga sangat meresahkan warga.

Gambar 2.17
Peta Kumulatif Penurunan Tanah (*Cumulative Land Subsidence*)
Wilayah Desa Kedungbanteng dan Banjarsari



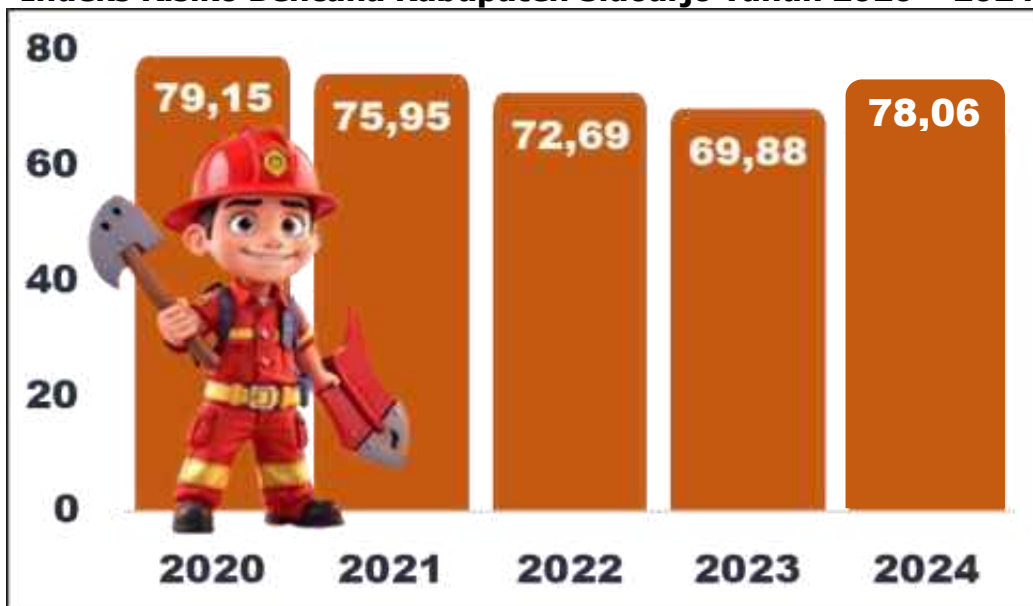
Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo, 2022

Sedangkan berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa penurunan tanah membentuk pola cekungan, dimana laju penurunannya sesuai dengan pola warnanya. Daerah dengan warna hijau memiliki laju penurunan tanah sebesar 40 mm/ tahun, sedangkan gambar di dalamnya dengan warna kuning memiliki laju penurunan tanah sebesar 80 mm/ tahun. Daerah yang memiliki warna coklat adalah daerah yang genangan banjirnya cukup lama, disebabkan daerah ini memiliki laju penurunan tanah sebesar 120 mm/ tahun. Sedangkan titik yang berwarna orange dan merah, masing-masing memiliki laju penurunan tanah sebesar 160 dan 200 mm/ tahun.

b. Indeks Risiko Bencana

Hasil pemetaan potensi bencana yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah membuahkan hasil yang berdampak baik pada Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sidoarjo. Sehingga Indeks Resiko Bencana Kabupaten Sidoarjo dari tahun ke tahun semakin menurun.

Gambar 2.18
Indeks Risiko Bencana Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 – 2024



Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur, 2025

Pada gambar di atas dapat digambarkan Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan tren penurunan yang konsisten selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, nilai indeks tercatat sebesar 79,15 dan secara bertahap menurun menjadi 75,95 pada tahun 2021, 72,69 pada tahun 2022, hingga meningkat mencapai angka 78,06 pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan adanya peningkatan kapasitas dalam mitigasi dan penanggulangan bencana, yang meliputi aspek perencanaan kebencanaan, kesiapsiagaan masyarakat, sistem peringatan dini, serta penguatan kelembagaan. Meskipun demikian, nilai indeks pada tahun 2023 masih berada pada kategori sedang, sehingga upaya strategis dalam pengurangan risiko bencana tetap perlu menjadi perhatian utama dalam perencanaan pembangunan daerah ke depan.

c. Penurunan Emisi GRK Kumulatif

Selain bencana, permasalahan Gas Rumah Kaca (GRK) juga disoroti di Kabupaten Sidoarjo. Untuk mencapai terwujudnya Indonesia Emas 2045 Pemerintah Daerah diwajibkan memiliki kebijakan percepatan target penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Capaian penurunan GRK Kabupaten Sidoarjo tahun 2020-2024 ditampilkan berikut ini.

Tabel 2.15
Capaian Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kabupaten
Sidoarjo Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Capaian Penurunan Emisi GRK Tahunan (TonCo ₂ Eq)	270,00	793,00	2.948,00	1.409,00	2.192,93
Penurunan Emisi GRK Kumulatif (TonCo ₂ Eq)	17.441,00	18.234,00	21.182,00	22.591,00	24.783,93

Sumber: Bappenas dan Low Carbon Development Indonesia, 2025

Data capaian penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) di Kabupaten Sidoarjo selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang signifikan. Capaian penurunan emisi GRK sampai dengan 2024 secara kumulatif mencapai nilai 24.783,93 TonCo₂Eq. Capaian tahun 2020 dan 2021 yang minim mulai menunjukkan perbaikan mulai tahun 2022 mencapai 2.948 TonCO₂Eq (2022), 1.409,00 TonCo₂Eq (2023) dan 2.192,93 TonCo₂Eq (2024) menunjukkan adanya penguatan kembali program mitigasi GRK seperti efisiensi energi, peningkatan ruang hijau, dan pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan. Sebagai upaya untuk mengoptimalkan konsistensi penurunan yang tajam tahun-tahun berikutnya dibutuhkan dukungan program dan kapasitas teknis yang berkelanjutan. Arah kebijakan dalam rangka pencapaian target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), diantaranya adalah :

- Peningkatan peran masyarakat, swasta/pelaku usaha, media dalam pelaksanaan kegiatan aksi penurunan emisi GRK di Kabupaten Sidoarjo
- Peningkatan harmonisasi dan sinergitas program/kegiatan baik yang dibiayai APBD, APBN, maupun APBDes.
- Peningkatan koordinasi antar perangkat daerah yaitu Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Permukiman dan Perumahan Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Kesehatan dalam melaporkan aksi penurunan emisi GRK pada aplikasi AKSARA.

d. Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) juga dipertimbangkan dalam melihat kemampuan Kabupaten Sidoarjo menghadapi bencana. IKD lebih menitikberatkan pada kemampuan daerah dalam membangun resiliensi melalui tata kelola kelembagaan, kebijakan, infrastruktur, serta pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Semakin tinggi nilai IKD suatu daerah, maka kapasitas penanggulangan bencananya semakin baik, yang berimplikasi pada rendahnya risiko bencana yang tercermin dalam nilai IRB. Sebaliknya, rendahnya IKD menunjukkan lemahnya kesiapsiagaan daerah yang dapat menyebabkan tingginya risiko meskipun potensi bencananya tidak besar. Oleh karena itu, IKD juga dapat dijadikan landasan perencanaan pembangunan daerah agar kebijakan yang disusun mampu memitigasi risiko dan memperkuat ketahanan wilayah secara berkelanjutan.

Tabel 2.16
Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024

No	Prioritas	Indeks	Indeks Kapasitas Daerah	Tingkat Kapasitas Daerah	Skor
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0,97	0,79	Sedang	96,70
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	0,97			
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0,89			
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,85			
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,70			
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,72			
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0,85			

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo, 2025

Hasil pengukuran Indeks Ketahanan Daerah Tahun 2024 berada pada skor 96,70 dari target skor 86,98 sehingga tercapai 111,18%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yaitu pada skor 98,12 maka terdapat penurunan angka sebesar 1,42 poin. Dengan realisasi Indeks resiko

bencana sebesar 96,70 ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sidoarjo berada pada tingkat resiko bencana kategori SEDANG. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun belum mencapai kategori kapasitas tinggi, Kabupaten Sidoarjo memiliki kesiapan yang kuat dalam menghadapi dan mengelola risiko bencana.

Secara rinci, prioritas dengan skor indeks tertinggi adalah Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan serta Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu, masing-masing dengan skor 0,97. Ini mencerminkan adanya struktur kelembagaan yang cukup mapan dan kemampuan perencanaan yang terintegrasi. Diikuti oleh Pengembangan Sistem Informasi, Diklat, dan Logistik (0,89), serta Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana dan Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana (keduanya 0,85), yang mengindikasikan perhatian terhadap penguatan sistem pendukung dan keberlanjutan penanganan pascabencana. Namun, dua aspek dengan indeks terendah adalah Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana (0,70) dan Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana (0,72), menunjukkan bahwa upaya pada tahap pencegahan dan kesiapsiagaan masih perlu ditingkatkan. Artinya, meskipun kebijakan dan sistem pendukung sudah kuat, implementasi di lapangan dan respon terhadap kedaruratan masih berpotensi ditingkatkan lebih lanjut

2.1.1.7 Aspek Demografi

Berdasarkan hasil Data Dinas Penduduk dan Pencatatan Sipil tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2024 sebesar 2.027.874 jiwa. Jumlah ini mengalami peningkatan kurang lebih 31.049 jiwa jika dibandingkan dengan satu tahun sebelumnya. Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo dapat ditampilkan sebagaimana gambar berikut.

Gambar 2.19
Jumlah Penduduk Kabupaten Sidoarjo (Ribu) Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sidoarjo, 2025

Peningkatan penduduk dikarenakan faktor pindah domisili yang disebabkan pekerjaan, pendidikan atau faktor keluarga, dan sebagainya atau registrasi penduduk baru. Jumlah penduduk tersebut tersebar di 18 kecamatan selama 5 tahun terakhir sebagaimana disajikan pada tabel di bawah dikemukakan bahwa jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin pria maupun wanita diseluruh kecamatan hampir berjumlah seimbang, tidak ada perbedaan jumlah yang tinggi. Kecamatan yang jumlah laki-laki dan perempuan tertinggi pertama adalah Kecamatan Taman, kedua adalah Kecamatan Sidoarjo dan ketiga adalah Kecamatan Waru.

Tabel 2.17
Jumlah Penduduk Per Kecamatan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020-2024

KECAMATAN	Tahun									
	2020		2021		2022		2023		2024	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
TARIK	34.830	34.359	35.267	34.703	33.392	32.752	34.009	33.449	34.287	33.661
PRAMBON	40.397	39.555	40.836	40.123	38.633	37.813	39.650	38.810	40.264	39.307
KREMBUNG	35.024	34.863	35.508	34.448	33.382	33.476	34.209	34.193	34.613	34.488
PORONG	37.102	36.344	37.544	36.746	34.911	34.36	35.282	34.888	35.479	34.976
JABON	28.274	27.992	28.743	28.44	27.157	26.897	27.701	27.452	28.000	27.737
TANGGULANGIN	45.097	44.707	45.747	45.372	42.814	42.662	43.601	43.560	44.192	44.093
CANDI	76.872	76.551	78.328	78.123	74.533	74.686	76.901	77.021	78.922	78.869
SIDOARJO	100.000	101.115	101.594	102.847	96.330	94.917	98.027	99.729	99.232	100.938
TULANGAN	51.423	50.916	52.437	51.97	49.096	48.864	50.737	50.440	51.581	51.240
WONOAYU	43.169	42.417	44.058	43.220	41.025	40.37	42.245	41.519	43.082	42.256
KRIAN	66.413	64.517	67.914	66.137	64.023	62.695	65.942	64.470	67.041	65.770
BALONGBENDO	38.449	37.601	38.827	38.029	36.754	35.833	37.461	36.472	37.691	36.709
TAMAN	104.753	103.062	105.446	104.064	99.139	98.753	100.366	100.039	101.722	101.412
SUKODONO	61.855	60.004	63.194	61.540	59.791	58.656	61.383	60.571	63.169	62.409
BUDURAN	49.710	49.000	50.404	49.892	48.441	48.139	49.530	49.469	50.631	50.948
GEDANGAN	60.286	59.717	60.961	60.540	58.146	57.888	59.289	59.049	60.118	59.948
SEDATI	48.821	47.815	49.487	48.759	46.724	46.337	47.751	47.526	48.969	48.709
WARU	99.933	100.821	100.373	101.547	95.276	97.337	95.983	98.101	96.869	98.982
Rasio Jenis Kelamin	101,00		101,00		100,42		100,33		100,38	

Sumber: BPS dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sidoarjo, 2025

Keterangan : L : Laki-Laki ; P : Perempuan

Secara umum, seluruh kecamatan mengalami peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun, meskipun laju pertumbuhannya bervariasi antar wilayah. Dalam lima tahun terakhir, rasio jenis kelamin cenderung stabil di kisaran 100 hingga 101, yang berarti jumlah penduduk laki-laki sedikit lebih banyak daripada perempuan, tetapi tidak menunjukkan ketimpangan yang signifikan. Kecamatan-kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak secara konsisten adalah Waru, Taman, Candi, dan Sidoarjo, yang pada tahun 2024 masing-masing mencatatkan jumlah penduduk lebih dari 90 ribu jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah-wilayah tersebut merupakan pusat aktivitas ekonomi dan pemukiman padat di Kabupaten Sidoarjo. Di sisi lain, kecamatan seperti Jabon, Porong, dan Tanggulangin memiliki jumlah penduduk yang jauh lebih sedikit, dengan Jabon menjadi yang paling rendah, yaitu sekitar 27 ribu jiwa pada tahun 2024.

Kecamatan Porong dapat dimaklumi mengapa jumlah penduduknya lebih sedikit, dikarenakan terjadi relokasi akibat bencana lumpur Lapindo. Daerah-daerah di sekitar lokasi bencana perlahan mulai ditinggalkan oleh masyarakat. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga telah memetakan radius di sekitar Lokasi lumpur Lapindo yang sebaiknya dihindari. Sedangkan untuk Kecamatan Jabon memiliki laju pertumbuhan penduduk relatif kecil dikarenakan (1) secara kewilayahan terisolasi oleh sungai Porong dan lebih dekat dengan wilayah Pasuruan, sehingga kurang menarik bagi pendatang dari wilayah lain di Sidoarjo; dan (2) meskipun ada rencana untuk mengembangkan Kawasan Industri Indonesia (KIS) di Jabon, potensi pergeseran penduduk dari wilayah padat ke wilayah tepi masih belum terlihat. Khusus untuk Kecamatan Tanggulangin dominan disebabkan faktor ekonomi karena perekonomian Tanggulangin didominasi oleh industri kerajinan kulit, yang tidak memberikan peluang pekerjaan yang cukup besar bagi semua penduduk dan tipe pekerjaan yang relatif homogen, sehingga beberapa orang mencari pekerjaan di daerah lain.

Secara keseluruhan, data ini mencerminkan pola sebaran penduduk yang tidak merata, dengan konsentrasi tinggi di kawasan barat dan tengah

Kabupaten Sidoarjo, sementara kawasan selatan dan timur menunjukkan pertumbuhan yang lebih lambat. Pola ini penting untuk menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan daerah, khususnya dalam penyediaan infrastruktur, pelayanan publik, serta strategi pemerataan ekonomi dan sosial di masa mendatang.

Tabel 2.18
Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin
Tahun 2024 (%)

No	Tahun	Laki-Laki	Perempuan
1	0-4	2.99	2.79
2	5-9	3.74	3.48
3	10-14	4.02	3.77
4	15-19	3.79	3.54
5	20-24	4.18	3.96
6	25-29	3.95	3.77
7	30-34	3.70	3.58
8	35-39	3.55	3.47
9	40-44	3.96	4.06
10	45-49	3.64	3.88
11	50-54	3.63	3.89
12	55-59	3.18	3.41
13	60-64	2.29	2.51
14	65-69	1.71	1.72
15	70-75	0.99	0.99
16	75+	0.78	1.08

Sumber: BPS dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sidoarjo, 2025

Struktur penduduk Kabupaten Sidoarjo sepanjang tahun 2024 menunjukkan komposisi yang dominan pada kelompok usia produktif, yaitu antara usia 20 hingga 54 tahun. Persentase tertinggi terdapat pada kelompok usia 20–24 tahun dengan proporsi laki-laki 4,18% dan perempuan 3,96%, diikuti oleh kelompok usia 35–39 tahun serta 40–44 tahun yang masing-

masing berada di atas 4% secara agregat (laki-laki dan perempuan). Hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas penduduk berada dalam usia kerja, yang berimplikasi positif terhadap potensi pembangunan ekonomi dan peningkatan produktivitas daerah. Sementara itu, proporsi penduduk anak-anak usia 0–14 tahun berada di kisaran 2,99% hingga 4,02% untuk laki-laki dan 2,79% hingga 3,77% untuk perempuan. Ini menunjukkan bahwa angka kelahiran relatif stabil dan tidak terlalu tinggi, mencerminkan tren transisi demografi yang mengarah ke struktur penduduk menua secara perlahan.

Pada kelompok lansia (usia 60 tahun ke atas), persentasenya mulai menurun secara signifikan. Untuk usia 60–64 tahun, hanya 2,29% laki-laki dan 2,51% perempuan. Proporsi ini semakin kecil pada kelompok usia 70–74 tahun dan 75+, dengan jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki, khususnya pada usia 75 tahun ke atas (1,08% perempuan dibanding 0,78% laki-laki). Fakta ini sejalan dengan kecenderungan umum bahwa perempuan memiliki harapan hidup lebih tinggi dibanding laki-laki. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sidoarjo masih memiliki struktur demografis yang kuat untuk menopang pembangunan ekonomi, dengan mayoritas penduduk berada pada usia produktif, sementara tantangan ke depan akan berkaitan dengan peningkatan kebutuhan layanan bagi kelompok lanjut usia yang terus bertambah secara proporsional. Lebih lanjut, rasio penduduk berdasarkan jenis kelamin per kecamatan dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.19
Rasio Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Per Kecamatan

Kecamatan	Rasio Jenis Kelamin
Tarik	101,86
Prambon	102,43
Krembung	100,36
Porong	101,44
Jabon	100,95
Tanggulangin	100,22
Candi	100,07
Tulangan	100,59

Kecamatan	Rasio Jenis Kelamin
Wonoayu	101,75
Sukodono	98,29
Sidoarjo	101,34
Buduran	100,12
Sedati	100,47
Waru	97,84
Gedangan	100,41
Taman	100,33
Krian	102,28
Balongbendo	102,71

Sumber: BPS dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sidoarjo, 2025

Dari data tahun 2024 dapat dilihat bahwa jumlah laki-laki sedikit lebih banyak dibandingkan jumlah perempuan. Kecamatan dengan rasio tertinggi tercatat di Balongbendo (102,71), Prambon (102,43), dan Krian (102,28). Hal ini menunjukkan dominasi penduduk laki-laki yang mungkin berkaitan dengan karakteristik wilayah tersebut, seperti kegiatan ekonomi berbasis industri atau agraris yang banyak menyerap tenaga kerja laki-laki. Namun, terdapat beberapa kecamatan yang menunjukkan rasio jenis kelamin di bawah 100, yang berarti jumlah penduduk perempuan lebih banyak. Kecamatan Sukodono (98,29) dan Waru (97,84) termasuk dalam kategori ini, menjadikan mereka sebagai pengecualian dari pola umum. Perbedaan ini bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti arus urbanisasi perempuan yang mencari kerja di sektor jasa atau tingginya harapan hidup perempuan dibanding laki-laki di kawasan perkotaan yang lebih maju. Secara umum, rasio jenis kelamin Kabupaten Sidoarjo tergolong seimbang, karena hampir seluruh kecamatan memiliki nilai rasio di kisaran 100 ± 2 . Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada ketimpangan besar dalam distribusi gender penduduk. Data ini penting untuk mempertimbangkan kesetaraan dalam pelayanan publik, perencanaan pendidikan, lapangan kerja, serta program sosial yang memperhatikan kebutuhan laki-laki dan perempuan secara proporsional di

setiap kecamatan. Maka didapatkan rasio penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Sidoarjo mencapai angka 100,38% di tahun 2024.

Tabel 2.20
Penduduk Per Kecamatan Menurut Pendidikan Tahun 2024

Kecamatan	Tidak/ Belum Sekolah	Belum Tamat SD/ Sederajat	Tamat SD/ Sederajat	Tamat SMP/ Sederajat	Tamat SMA/ Sederajat	Tamat DI, II	Tamat Akademi/ DIII	DIV/ SI	S2	S3
Tarik	15.265	4.717	13.564	12.397	18.734	144	535	2.517	72	3
Prambon	14.509	6.748	15.308	13.693	24.529	171	771	3.720	117	5
Krembung	15.170	6.502	11.561	11.461	20.616	164	682	2.841	99	5
Porong	20.586	1.720	12.692	11.636	19.885	111	621	3.055	142	7
Jabon	13.824	1.730	11.768	11.911	14.000	91	458	1.891	59	5
Tanggulangun	22.646	5.306	14.041	13.976	25.637	182	1.049	5.204	233	11
Candi	37.932	13.260	21.622	20.162	46.841	523	2.813	13.830	752	56
Tulangan	22.986	8.887	15.266	15.854	32.527	230	1.214	5.637	218	2
Wonoayu	23.906	4.097	16.867	12.736	22.474	188	804	4.089	167	10
Sukodono	27.503	9.020	16.503	16.544	41.596	503	2.234	11.104	534	37
Sidoarjo	48.942	12.876	22.926	22.154	58.628	847	4.962	27.039	1.703	93
Buduran	22.362	8.335	11.282	13.376	31.812	395	2.066	10.875	697	29
Sedati	22.848	6.591	12.663	12.504	31.328	379	1.925	8.720	685	35
Waru	45.994	14.365	19.869	22.897	59.760	677	4.271	25.842	1.961	125
Gedangan	31.168	7.128	13.820	15.297	37.673	445	2.292	11.555	644	44
Taman	38.223	18.427	25.303	26.517	69.206	1.145	4.240	18.797	1.191	85
Krian	28.518	10.318	21.498	20.815	41.027	377	1.804	8.149	294	11
Balombang	20.122	4.095	13.161	12.557	20.512	172	622	3.065	93	1
Jumlah	458.160	143.856	292.141	284.747	607.084	6.666	32.667	161.717	9.270	517

Sumber: BPS dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sidoarjo, 2025

Data menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Kabupaten Sidoarjo telah menempuh pendidikan dasar hingga menengah. Kelompok terbesar berada pada kategori tamat SMP/ sederajat dan tamat SMA/ sederajat, yang secara konsisten mendominasi hampir seluruh kecamatan, seperti di Kecamatan Waru, Sidoarjo, dan Taman. Ini mencerminkan bahwa akses terhadap pendidikan dasar dan menengah di wilayah ini cukup merata. Di sisi lain, proporsi penduduk yang tidak/ belum sekolah masih tergolong signifikan di beberapa kecamatan seperti Tarik dan Jabon, yang bisa menjadi indikasi keterbatasan akses atau tingkat partisipasi sekolah di wilayah pinggiran.

Sementara itu, jumlah penduduk dengan pendidikan tinggi seperti D1/ D2, D3, S1, dan S2/ S3 masih tergolong rendah dibandingkan dengan jenjang pendidikan lainnya. Walaupun terdapat peningkatan, distribusinya masih terpusat pada wilayah-wilayah urban seperti Kecamatan Waru,

Sidoarjo, dan Taman. Misalnya, Kecamatan Sidoarjo mencatat 27.039 lulusan S1, jauh lebih tinggi dibandingkan kecamatan seperti Jabon atau Porong yang hanya memiliki sekitar 3000 sampai 5000-an lulusan perguruan tinggi. Ini menunjukkan adanya ketimpangan capaian pendidikan tinggi antar kecamatan, yang kemungkinan dipengaruhi oleh faktor ekonomi, ketersediaan sarana pendidikan, dan kebutuhan tenaga kerja lokal.

Secara keseluruhan, struktur pendidikan penduduk Sidoarjo tahun 2024 memperlihatkan kemajuan dalam pendidikan dasar dan menengah, namun masih menyisakan pekerjaan rumah dalam mendorong akses dan kualitas pendidikan tinggi secara merata. Hal ini penting untuk diperhatikan dalam perencanaan pembangunan sumber daya manusia daerah agar tercapai pemerataan kualitas hidup di seluruh kecamatan.

Dengan proporsi penduduk yang telah dijelaskan sebelumnya, maka akan mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk. Sepanjang tahun 2023-2024, Kabupaten Sidoarjo memiliki hasil laju pertumbuhan penduduk yang berbeda antar wilayah. Rentang laju pertumbuhan mulai dari angka di bawah 1% hingga di atas 2%. Oleh karena itu, kecamatan-kecamatan di Kabupaten Sidoarjo tersebar secara merata memiliki laju pertumbuhan kategori lambat, sedang, dan tinggi. Lebih lengkapnya dapat dilihat di tabel berikut.

Tabel 2.21
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024

Kecamatan	Penduduk (Ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk Per 2023-2024 (%)
Tarik	67.948	0,73
Prambon	79.571	1,42
Krembung	69.101	1,02
Porong	70.455	0,41
Jabon	55.737	1,06
Tanggulangun	88.285	1,29
Candi	157.791	2,51
Tulangan	102.821	1,62
Wonoayu	85.338	1,88
Sukodono	125.578	2,97

Kecamatan	Penduduk (Ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk Per 2023-2024 (%)
Sidoarjo	200.170	1,22
Buduran	101.229	2,25
Sedati	97.678	2,52
Waru	195.761	0,86
Gedangan	120.066	1,46
Taman	203.134	1,36
Krian	132.811	1,84
Balongbendo	74.400	0,63

Sumber: BPS dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sidoarjo, 2025

Dilihat dari data tersebut, Kecamatan dengan laju pertumbuhan kategori lambat berada di Kecamatan Tarik, Porong, Waru dan Balongbendo karena berada di bawah angka 1% pertumbuhannya. Wilayah dengan kategori laju pertumbuhan sedang antara lain Kecamatan Prambon, Jabon, Tanggulangin, Tulangan, Wonoayu, Sidoarjo, Gedangan, Taman, dan Krian. Kecamatan tersebut memiliki laju sedang antara rentang 1% hingga 2% pertumbuhan. Sisanya untuk Kecamatan Candi, Sukodono, Buduran, dan Sedati sudah masuk kategori pertumbuhan tinggi karena angka di atas 2% angka pertumbuhannya.

Kecamatan Sukodono mencatatkan laju pertumbuhan tertinggi sebesar 2,97%, diikuti oleh Sedati (2,52%) dan Candi (2,51%). Ini menunjukkan bahwa daerah-daerah tersebut tengah mengalami ekspansi permukiman atau perpindahan penduduk yang tinggi akibat pembangunan perumahan baru atau berkembangnya aksesibilitas infrastruktur. Sebaliknya, kecamatan seperti Porong (0,41%), Balongbendo (0,63%), dan Tarik (0,73%) menunjukkan pertumbuhan yang lebih lambat, yang bisa diindikasikan sebagai wilayah yang lebih stabil atau kurang berkembang secara demografis dalam periode tersebut. Terdapat kecenderungan bahwa wilayah-wilayah dengan akses transportasi lebih baik serta kedekatan dengan pusat ekonomi tumbuh lebih cepat, sedangkan daerah pinggiran atau yang sebelumnya terdampak bencana (seperti Porong) tumbuh lebih lambat.

Tingkat pertumbuhan penduduk yang masih cenderung stabil dan naik tiap tahun, ditambah dengan kondisi Kabupaten Sidoarjo sebagai daerah strategis di Jawa Timur, maka Kabupaten Sidoarjo tidak bisa lepas dari tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Tingkat kepadatan tersebut dapat ditelusuri di tiap-tiap kecamatan yang tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.22
Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024

Kecamatan	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk Per km ²
Tarik	3,35	1.710,24
Prambon	3,92	2.662,13
Krembung	3,41	2.476,74
Porong	3,47	2.294,20
Jabon	2,75	672,18
Tanggulangun	4,35	2.964,57
Candi	7,78	3.681,54
Tulangan	5,07	3.283,97
Wonoayu	4,21	2.817,37
Sukodono	6,19	3.822,77
Sidoarjo	9,87	3.226,99
Buduran	4,99	2.319,11
Sedati	4,82	1.232,84
Waru	9,65	6.399,51
Gedangan	5,92	5.000,67
Taman	10,02	6.477,49
Krian	6,55	5.129,82
Balongsendo	3,67	1.677,94

Sumber: BPS dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sidoarjo, 2025

Data ini menunjukkan bahwa Kecamatan Taman, Sidoarjo, dan Waru merupakan wilayah dengan kontribusi penduduk tertinggi di Kabupaten Sidoarjo. Kecamatan Taman menyumbang 10,02% dari total populasi, disusul Sidoarjo 9,87%, dan Waru 9,65%. Dominasi penduduk di wilayah ini berbanding lurus dengan tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi, terutama di Kecamatan Taman (6.477 jiwa/km²) dan Waru (6.399 jiwa/km²), menjadikannya sebagai wilayah paling padat di kabupaten ini. Hal ini tidak

mengejutkan karena ketiganya merupakan pusat aktivitas perkotaan, bisnis, dan perumahan padat penduduk. Kecamatan Gedangan dan Krian juga memiliki kepadatan tinggi, masing-masing 5.000 dan 5.129 jiwa/km², meskipun kontribusi total terhadap jumlah penduduk tidak sebesar Taman atau Sidoarjo. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah tersebut memiliki luas wilayah yang lebih kecil, namun tetap dihuni oleh banyak orang menandakan kawasan permukiman intensif.

Sebaliknya, Jabon mencatat kepadatan penduduk terendah dengan hanya 672 jiwa/km² dan kontribusi penduduk 2,75%. Ini mengindikasikan bahwa Jabon merupakan kawasan dengan sebaran penduduk yang jarang, kemungkinan besar karena luas wilayah yang besar namun belum banyak dimanfaatkan untuk pemukiman padat, atau memiliki fungsi lahan non-permukiman seperti pertanian atau kawasan industri ringan. Kecamatan Tanggulangin, meskipun memiliki jumlah penduduk yang tidak terlalu tinggi, tercatat memiliki kepadatan penduduk mencapai 2.964 jiwa/km². Hal ini menunjukkan bahwa wilayah tersebut padat secara spasial, walaupun tidak mendominasi secara persentase keseluruhan penduduk kabupaten. Ini juga memperkuat temuan sebelumnya bahwa Tanggulangin mulai menjadi kantong pertumbuhan penduduk baru. Pola sebaran penduduk di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan kontras antara wilayah urban dan semi-rural. Wilayah urban seperti Taman, Waru, dan Sidoarjo menjadi episentrum pertumbuhan penduduk dengan tingkat kepadatan yang tinggi, sedangkan daerah seperti Jabon dan Tarik berfungsi sebagai wilayah dengan intensitas pemukiman yang lebih rendah.

Bumi Sidoarjo memang tidak memiliki masyarakat adat dalam arti komunitas hukum adat yang masih menjalankan sistem adat secara otonom seperti yang ditemukan di wilayah Indonesia Timur atau pedalaman Kalimantan. Namun, dari sisi komposisi etnis atau suku, Sidoarjo memiliki ciri khas sebagai wilayah multietnis dengan dominasi penduduk suku Jawa. Ditambah lagi dengan adanya pendatang, pertemuan antar suku mudah terjadi, misalnya suku Madura, Tionghoa, Bugis, Bali, hingga Sunda juga turut

mendiami Kabupaten Sidoarjo. Meskipun terdapat multietnis yang tinggal, masih terdapat kearifan lokal asli Sidoarjo yang masih dijaga hingga hari ini. Misalnya tradisi Nyadran, Lelang Bandeng, Tari Ujung, Jarang Kepang, hingga makanan khas seperti lontong kupang, bandeng asap, sate kerang, dan kerupuk udang yang masih eksis dan terus dilestarikan.

Memperhatikan tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi sebagai daerah strategis di Jawa Timur selain Kota Surabaya, maka proyeksi jumlah penduduk juga harus diperhatikan sebagai alat perencanaan pembangunan. Berikut adalah proyeksi penduduk Kabupaten Sidoarjo sampai dengan tahun 2030.

Tabel 2.23
Proyeksi Penduduk Menurut Kategori Usia Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2025 – 2030 (dalam Ribu)

Usia	Tahun					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
0 – 4	147,93	147,25	146,64	146,09	145,62	145,22
5 – 9	148,36	147,54	146,98	146,89	147,54	149,41
10 – 14	160,63	159,40	157,94	156,11	153,61	150,02
15 – 19	164,60	164,71	164,63	163,80	162,92	161,86
20 – 24	161,49	162,10	162,88	163,72	164,43	164,89
25 – 29	163,19	162,44	162,07	162,05	162,29	162,71
30 – 34	171,22	171,10	170,19	168,78	167,31	166,12
35 – 39	166,61	167,60	169,20	171,04	172,55	173,33
40 – 44	169,84	169,14	168,19	167,27	166,78	166,98
45 – 49	168,43	168,99	169,49	169,81	169,85	169,55
50 – 54	160,69	162,70	164,24	165,40	166,28	166,97
55 – 59	140,06	144,50	148,35	151,64	154,45	156,88
60 – 64	106,70	112,17	117,92	123,70	129,18	134,10
65 – 69	76,99	81,18	85,37	89,66	94,17	98,98
70 – 74	48,61	52,54	56,28	59,89	63,51	67,21
75+	38,36	41,93	46,09	50,74	55,74	60,99
Total	2.193,69	2.215,29	2.236,26	2.256,57	2.276,23	2.295,21

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2023

Proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2025 sampai dengan 2030 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur diproyeksikan pada kisaran nilai pertumbuhan mencapai 0,83% sampai dengan 0,98%

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga. Untuk menganalisis aspek kesejahteraan masyarakat, selanjutnya akan dipaparkan beberapa capaian data sebagai berikut.

2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidoarjo setelah masa pandemi selesai cenderung mengalami peningkatan. Tercatat sejak tahun 2021 pertumbuhan ekonomi terus meningkat dari capaian 4,21 di tahun 2021 menjadi 5,54 di tahun 2024. Dibandingkan dengan angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur dan nasional, kondisi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo selalu lebih tinggi secara konsisten sejak tahun 2021-2024. Adapun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo sebagaimana gambar sebagai berikut ini.

Gambar 2.20
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2020-2024



Sumber: BPS; BPS Provinsi Jawa Timur; BPS Kabupaten Sidoarjo, 2025

Pada tahun 2020, perekonomian Kabupaten Sidoarjo mengalami kontraksi tajam dengan pertumbuhan sebesar -3,69%, bahkan lebih rendah dibandingkan laju pertumbuhan Jawa Timur (-2,33%) dan nasional (-2,07%), mencerminkan tekanan berat terhadap aktivitas ekonomi lokal. Namun, pada tahun 2021 mulai terlihat perbaikan, di mana Sidoarjo tumbuh sebesar 4,21%, mendekati rata-rata Provinsi Jawa Timur (3,56%) dan nasional (3,70%). Tren positif ini berlanjut pada 2022 dengan pertumbuhan mencapai 7,53%, dan mengalami penurunan menjadi 6,16% pada 2023, namun masih tetap berada di atas pertumbuhan Provinsi (4,95%) dan nasional (5,05%).

Pertumbuhan ekonomi dalam beberapa konteks bisa juga merujuk pada (1) kecepatan perubahan ekonomi secara keseluruhan, termasuk bukan hanya pertumbuhan tetapi juga volatilitas atau fluktuasi dan (2) dalam penggunaan non-teknis, bisa berarti “seberapa cepat ekonomi bergerak” (baik maju atau mundur).

Data capaian pertumbuhan dan laju ekonomi di atas menunjukkan bahwa Sidoarjo berhasil memulihkan dan menstimulasi kembali perekonomiannya pasca-pandemi, serta menandakan resiliensi sektor-sektor ekonomi unggulan yang mulai kembali berkontribusi terhadap PDRB daerah secara optimal. Struktur perekonomian Kabupaten Sidoarjo selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.24
PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 – 2024 (Miliar Rupiah)

No	Kategori	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,431	4,478	4,855	5,16	5,29
B	Pertambangan dan Penggalian	123	137	99	74	70
C	Industri Pengolahan	100,918	109,461	122,667	133,046	144,199
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,666	1,784	1,973	2,696	2,939
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	129	139	142	148	159
F	Konstruksi	17,121	16,07	17,59	18,67	20,19
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	31,599	35,456	40,236	44,281	47,433
H	Transportasi dan Pergudangan	14,604	15,041	27,353	37,086	41,009
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,733	7,469	8,694	9,625	10,697

No	Kategori	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
J	Informasi dan Komunikasi	7,618	7,997	8,418	8,958	9,649
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,451	2,55	2,86	3,06	3,26
L	Real Estate	1,958	1,994	2,125	2,24	2,36
M,N	Jasa Perusahaan	316	327	338	378	419
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,798	3,881	3,837	3,964	4,544
P	Jasa Pendidikan	2,471	2,479	2,525	2,708	2,900
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	679	729	763	800	858
R,S,T,U	Jasa lainnya	614	648	744	804	906
PDRB ADHB		197,24	210,65	245,227	273,698	296,887

Sumber: BPS Kabupaten Sidoarjo, 2025

Tabel 2.25
PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Sidoarjo Tahun
2020 – 2024 (Miliar Rupiah)

No	Kategori	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,628	2,626	2,686	2,731	2,766
B	Pertambangan dan Penggalian	110	101	53	43	40
C	Industri Pengolahan	72,546	76,097	80,337	83,869	88,214
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,018	1,078	1,162	1,553	1,677
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	110	117	118	122	128
F	Konstruksi	12,221	11,386	11,903	12,543	13,332
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	20,734	22,721	24,427	25,886	27,095
H	Transportasi dan Pergudangan	6,469	6,672	9,697	11,844	12,775
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,653	4,922	5,529	5,943	6,395
J	Informasi dan Komunikasi	6,739	7,07	7,385	7,845	8,353
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,604	1,614	1,654	1,729	1,814
L	Real Estate	1,385	1,406	1,486	1,546	1,606
M,N	Jasa Perusahaan	207	211	213	235	253
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,242	2,298	2,222	2,215	2,403
P	Jasa Pendidikan	2,685	1,693	1,699	1,784	1,867
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	497	519	526	536	566
R,S,T,U	Jasa lainnya	449	462	508	526	576
PDRB ADHK		135,305	141,000	151,613	160,950	169,868

Sumber: BPS Kabupaten Sidoarjo, 2025

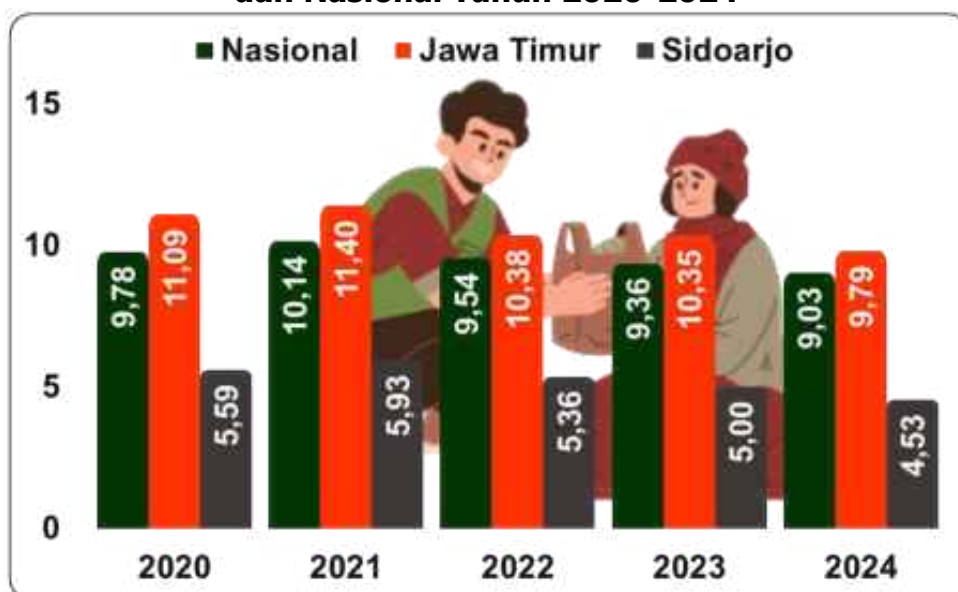
Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan basis data utama untuk menganalisis kondisi perekonomian daerah. Dengan menggunakan komponen PDRB, akan dapat teridentifikasi laju pertumbuhan ekonomi dan inflasi daerah yang merupakan indikator utama perekonomian daerah dan dapat menjadi salah satu tolak ukur dalam menggambarkan

kondisi kesejahteraan penduduk. Pada Tahun 2024, 5 kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Sidoarjo dihasilkan oleh sektor Industri Pengolahan, yaitu mencapai 48,57%, selanjutnya sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda sebesar 15,98%, sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 13,81%. sektor Konstruksi sebesar 6,80% dan sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 3,60%.

b. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan.

Gambar 2.21
Persentase Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020-2024

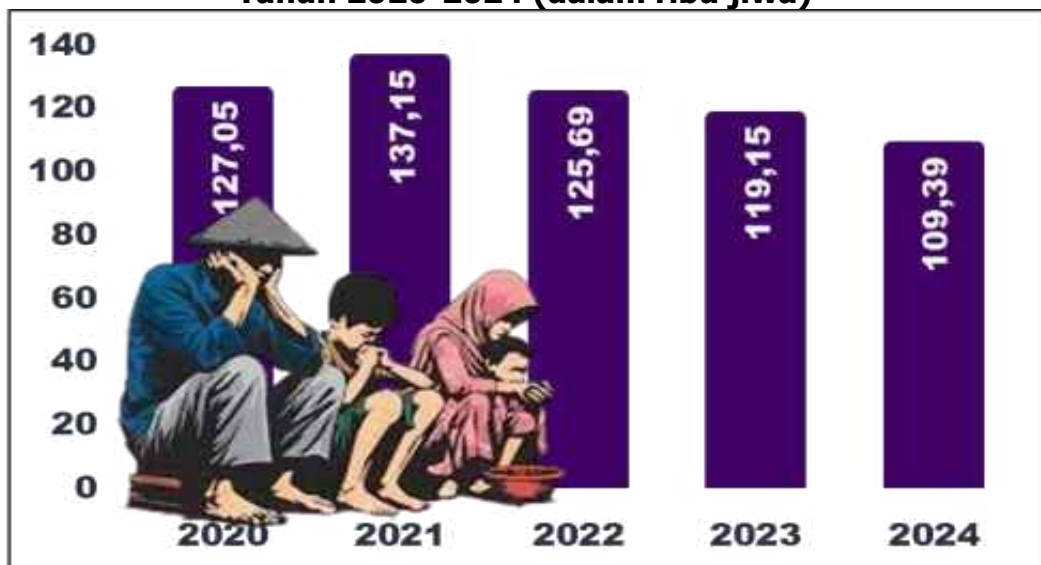


Sumber: BPS; BPS Provinsi Jawa Timur; BPS Kabupaten Sidoarjo, 2025

Capaian dalam 5 tahun terakhir persentase kemiskinan Kabupaten Sidoarjo selalu berada dibawah Jawa Timur dan Nasional. Tahun 2024

persentase kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo menjadi terendah dalam kurun waktu 5 tahun sejak 2020 yakni 4,53 persen. Ini menunjukkan keseriusan kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam penanganan kasus kemiskinan.

Gambar 2.22
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2020-2024 (dalam ribu jiwa)



Sumber: BPS Kabupaten Sidoarjo, 2025

Dari gambar di atas menunjukkan terjadinya peningkatan jumlah kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo yang dimulai dari tahun 2020 sampai 2021. Hal ini terjadi karena aktifitas perekonomian masih belum pulih sebagai dampak pandemi Covid-19. Namun pada tahun 2023 atau memasuki tahun ke-4 setelah Covid-19 dinyatakan sebagai kasus pandemi, jumlah kemiskinan turun sebanyak 11.460 jiwa. Sementara itu pada tahun 2024 jumlah kemiskinan kembali turun menjadi 109,39 ribu jiwa.

Dengan capaian tingkat kemiskinan tersebut, tercatat untuk Indeks Kedalam Kemiskinan Kabupaten Sidoarjo terus menunjukkan penurunan dari nilai 0,26 di tahun 2020 menjadi 0,18 di tahun 2024.

c. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran adalah penduduk angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya, sedang mempersiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan dan tidak mempersiapkan usaha karena putus asa, atau sudah memiliki pekerjaan tapi belum memulainya. Pengangguran

terbuka mereka yang tidak mau bekerja karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik (penganggur sukarela) maupun mereka yang mau bekerja tetapi tidak memperoleh pekerjaan (penganggur terpaksa). Keberhasilan kinerja daerah dalam penanganan pengangguran dengan melihat tinggi rendahnya TPT.

Gambar 2.23
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020–2024



Sumber: BPS; BPS Provinsi Jawa Timur, BPS Kabupaten Sidoarjo, 2025

Mencermati dari gambar di atas terlihat bahwa tingkat pengangguran terbuka menunjukkan dari tahun 2020 hingga tahun 2024 sudah menunjukkan penurunan. Walaupun begitu, capaian TPT Kabupaten Sidoarjo masih lebih tinggi dari capaian nasional dan Jawa Timur. Kondisi ini memerlukan upaya ekstra dari pemerintah daerah sehingga angka TPT terus dapat ditekan di bawah capaian TPT nasional dan provinsi.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam rangka mengatasi tingginya angka TPT ini telah melakukan upaya-upaya, antara lain : 1) Menyelenggarakan Pelatihan Berbasis Kompetensi baik yang bersertifikasi maupun yang berorientasi pada membuka lapangan usaha secara mandiri; 2) Menyelenggarakan Bursa Kerja, baik Bursa Kerja Terbuka maupun Bursa Kerja Khusus; 3) Menjalin hubungan industrial yang kondusif guna mengurangi angka pemutusan hubungan kerja, dengan membuat perjanjian kepada

perusahaan yang mengalami kesulitan dalam membayar gaji karyawannya, untuk kembali memperkerjakan karyawan yang di-PHK apabila kondisi keuangan perusahaan sudah membaik.

d. Rasio Gini

Rasio Gini merupakan salah satu ukuran umum untuk menunjukkan adanya tingkat pemerataan distribusi pendapatan atau kekayaan di antara populasi. Indeks Gini memiliki kisaran 0 sampai 1. Nilai 0 menunjukkan distribusi yang sangat merata yaitu setiap orang memiliki jumlah penghasilan atau kekayaan yang sama persis. Nilai 1 menunjukkan distribusi yang timpang sempurna yaitu satu orang memiliki segalanya dan semua orang lain tidak memiliki apa-apa.

Realisasi rasio gini Kabupaten Sidoarjo tahun 2024 sebesar 0,327 kembali menurun jika dibandingkan tahun 2023 sebesar 0,359. Capaian Indeks Gini tahun 2024 di Kabupaten Sidoarjo telah mencapai dari target yang ditetapkan. Angka ini menunjukkan bahwa ketimpangan pemerataan pendapatan di Kabupaten Sidoarjo adalah sedang. Ketimpangan di Kabupaten Sidoarjo secara statistik berada dibawah Provinsi Jawa Timur dan Nasional, sebagaimana ditampilkan pada grafik di bawah.

Gambar 2.24
Perbandingan Rasio Gini Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020-2024

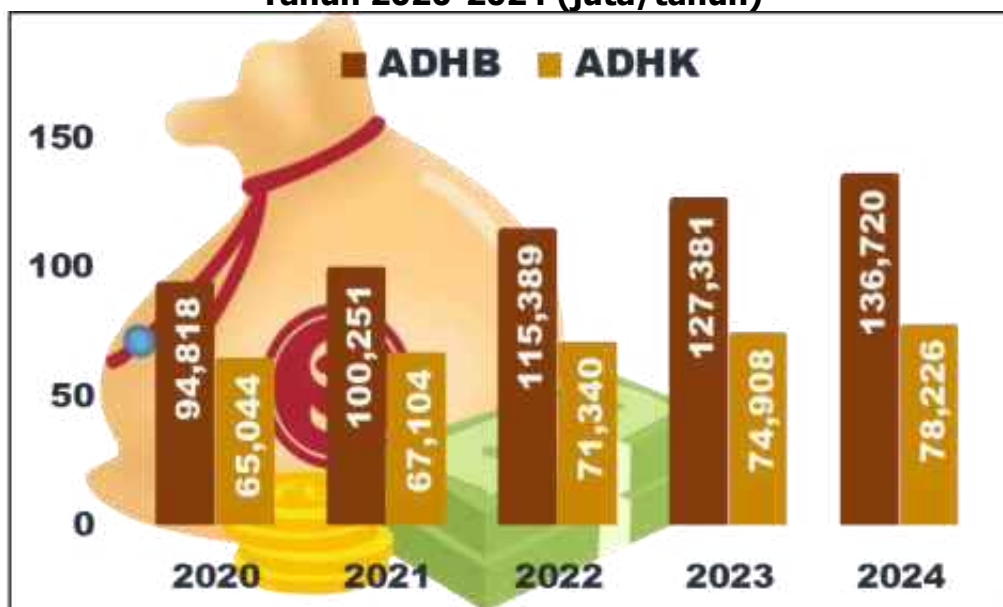


Sumber: BPS; BPS Provinsi Jawa Timur; BPS Kabupaten Sidoarjo, 2025

e. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan indikator yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian suatu daerah. Ukuran kemakmuran masyarakat suatu daerah dapat dilihat dari besarnya peningkatan PDRB per kapita. Pada umumnya, indikator ini disajikan dari angka atas dasar harga berlaku, walaupun sebetulnya masih mengandung perubahan harga barang dan jasa. Pertumbuhan agregat pendapatan perkapita regional tentunya tidak lepas dari besarnya PDRB Kabupaten Sidoarjo secara total. Peningkatan PDRB yang beriringan dengan peningkatan jumlah penduduk akan diikuti oleh peningkatan PDRB per kapita Kabupaten Sidoarjo.

Gambar 2.25
Pendapatan Perkapita Penduduk Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2020-2024 (juta/tahun)



Sumber: BPS Kabupaten Sidoarjo, 2025

Nilai PDRB per-kapita Kabupaten Sidoarjo menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020 PDRB Per-kapita ADHB sebesar 94.818 juta/tahun meningkat menjadi 136.720 juta/tahun pada tahun 2024. Sementara PDRB Per-kapita ADHK pada tahun 2020 sebesar 65.044 juta/tahun meningkat menjadi 78.226 juta/tahun pada tahun 2024.

f. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) merupakan indeks komposit yang meliputi pengukuran usia harapan hidup, angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta pengukuran daya beli atau pengeluaran per kapita.

Gambar 2.26
Perkembangan IPM Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dan Nasional
Tahun 2020 – 2024



Sumber: BPS; BPS Provinsi Jawa Timur; BPS Kabupaten Sidoarjo, 2025

Tercatat dalam 5 tahun terakhir dari 2020 sampai dengan 2024 Indeks Perkembangan Manusia di Kabupaten Sidoarjo terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 IPM Kabupaten Sidoarjo sebesar 80,65. Pada akhir periode 2023 angka Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sidoarjo sebesar 81,88 persen dan naik kembali menjadi 82,67 pada tahun 2024. Angka ini lebih tinggi dari angka Jawa Timur dan Nasional yang hanya berkisar di 75,02 persen dan 75,35 persen untuk angka Nasional.

2.1.2.2 Kesehatan Untuk Semua

Sub aspek berikutnya pada aspek kesejahteraan masyarakat adalah kesehatan untuk semua yang menguraikan perihal usia harapan hidup, angka

kematian ibu, prevalensi stunting, angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis, cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional dan beberapa indikator lain. Sub aspek kesehatan untuk semua diuraikan sebagai berikut.

a. Usia Harapan Hidup

Usia harapan hidup adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir.

Gambar 2.27
UHH Kabupaten Sidoarjo dan Provinsi Jawa Timur
Tahun 2020–2024



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2025

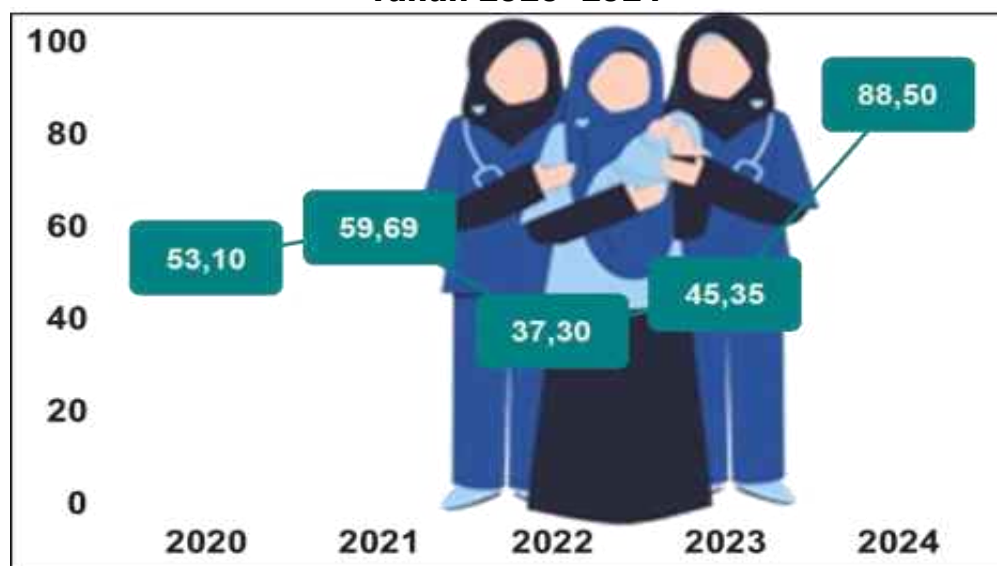
Berdasarkan pada gambar, Usia Harapan Hidup (UHH) penduduk Kabupaten Sidoarjo selama 5 tahun terakhir menunjukkan peningkatan dari 74,78 di tahun 2020 menjadi 75,63 di tahun 2024. Selain itu, nilai realisasi UHH yang dicapai sudah di atas capaian UHH provinsi. Peningkatan UHH mencerminkan perbaikan kualitas hidup dan layanan kesehatan di Kabupaten Sidoarjo, dan didukung oleh infrastruktur kesehatan yang memadai, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup sehat, serta efektivitas program daerah dalam bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial.

b. Angka Kematian Ibu

Angka kematian ibu adalah jumlah kematian ibu akibat kehamilan, persalinan, dan nifas per 100.000 kelahiran hidup. Standart Nasional angka

kematian ibu adalah 210 per 100.000 kelahiran hidup sehingga dapat dikatakan bahwa angka kematian ibu di Kabupaten Sidoarjo berada jauh dibawah standart nasional sebagaimana ditampilkan pada gambar berikut ini.

Gambar 2.28
Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2020–2024



Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Sidoarjo, 2025

Mengacu pada gambar di atas, walaupun nilai Angka Kematian Ibu Kabupaten Sidoarjo di tahun 2024 sebesar 88,50 per 100.000 kelahiran hidup yang jauh berada jauh dibawah standart nasional akan tetapi realisasi tersebut meningkat tajam dibandingkan capaian tahun 2023 sebesar 45,35 per 100.000 kelahiran hidup. Kematian ibu hamil dan bersalin dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu pendidikan dan pengetahuan, sosial budaya, sosial ekonomi, geografi dan lingkungan, aksesabilitas ibu pada fasilitas kesehatan serta kebijakan makro dalam kualitas pelayanan kesehatan. Namun Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus berupaya untuk terus menurunkan angka kematian ibu saat proses kelahiran.

c. Prevalensi Stunting

pengendalian Gizi buruk atau stunting secara kinerja sangat berhasil. Hal ini terlihat dari data balita stunting yang persentasenya mengalami penurunan yang cukup drastis. Angka stunting Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2021 sebesar 14,6 persen berhasil diturunkan menjadi 8,4 persen pada

tahun 2023. Akan tetapi untuk capaian di tahun 2024 kembali meningkat menjadi 10,6 sebagaimana dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.26
Prevalensi Stunting Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 – 2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Balita Stunting	2,98	14,6*	16,1*	8,4*	10,6*
2	Balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Sidoarjo, 2025

* : pengukuran SSGI

Data prevalensi balita stunting di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan dinamika yang cukup signifikan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, prevalensi stunting tercatat sangat rendah, yakni 2,98%, namun melonjak tajam menjadi 14,6% di tahun 2021 dan mencapai puncaknya pada 2022 sebesar 16,1%. Peningkatan tajam ini kemungkinan mencerminkan perbaikan pencatatan atau hasil survei yang lebih representatif, seperti dari SSGI. Di dua tahun terakhir dengan capaian 8,4% di tahun 2023 kemudian meningkat lagi menjadi 10,6% di tahun 2024 yang menunjukkan bahwa tetap terus dibutuhkan berbagai intervensi agar penurunan stunting di Kabupaten Sidoarjo terus terjadi. Sementara itu, indikator balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan tetap stabil di angka 100% selama lima tahun, mencerminkan komitmen pelayanan kesehatan dasar yang sangat kuat dalam merespons kasus gizi buruk secara optimal. Secara keseluruhan, data ini menandakan bahwa Sidoarjo berhasil mengendalikan masalah stunting dengan baik, dan bisa menjadi model praktik baik bagi daerah lain. Sebagai pijakan tahun 2025, pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah menetapkan lokasi prioritas penanganan stunting di 9 (sembilan) Kecamatan dan 15 Desa/Kelurahan.

Tabel 2.27
Lokasi Prioritas Penanganan Stunting Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2024

No.	Desa/Kelurahan	Kecamatan
1	Desa Gampang	Prambon
2	Desa Tambakrejo	Krembung
3	Desa Mojoruntut	Krembung
4	Desa Kedungrejo	Jabon
5	Desa Kedungpandan	Jabon
6	Desa Tambak Kalisogo	Jabon
7	Desa Kedungcangkring	Jabon
8	Desa Wadungasri	Waru
9	Desa Kepuhkiriman	Waru
10	Desa Kendalpecabean	Candi
11	Desa Sudimoro	Tulangan
12	Desa Sedenganmijen	Krian
13	Desa Banjarkemantren	Buduran
14	Desa Kwangsan	Sedati
15	Desa Pepe	Sedati

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Sidoarjo, 2025

Kecamatan yang paling dominan adalah Jabon dengan empat desa prioritas (Kedungrejo, Kedungpandan, Tambak Kalisogo, Kedungcangkring), mengindikasikan adanya konsentrasi kasus stunting atau kerentanan gizi yang lebih tinggi di wilayah pesisir tersebut. Krembung juga menjadi perhatian khusus dengan tiga desa terpilih, disusul oleh Waru dan Sedati masing-masing dua desa. Lokasi-lokasi ini mencerminkan kombinasi antara desa dengan tingkat kerentanan sosial-ekonomi tinggi, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang belum optimal, serta kondisi lingkungan yang mungkin memengaruhi status gizi anak. Penetapan desa-desa tersebut sebagai fokus intervensi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan upaya terintegrasi yang mencakup peningkatan akses layanan kesehatan, edukasi gizi, pemberdayaan keluarga, serta perbaikan sanitasi dan air bersih. Langkah ini sekaligus menjadi bagian penting dari strategi mencapai target nasional penurunan prevalensi stunting di bawah 14% pada tahun 2024 dan mempertahankannya secara berkelanjutan.

d. Kasus Tuberkulosis

Selanjutnya untuk mendukung program nasional dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, indikator utama yang menjadi tolok ukur adalah penanganan tuberkulosis. Jumlah temuan kasus tuberkulosis di Kabupaten Sidoarjo per 100.000 penduduk pada periode tahun 2020 sampai dengan 2024 terus menunjukkan peningkatan. Hal ini sangat layak untuk menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sehingga jumlah dapat terus ditekan setiap tahunnya. Gambaran temuan kasus tuberkulosis di Kabupaten Sidoarjo selama periode tahun 2020 hingga 2024 dapat ditampilkan pada grafik sebagai berikut.

Gambar 2.29
Temuan Kasus Tuberkulosis Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2020 – 2024 (per 100.000 Penduduk)



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, 2025

Tercatat berdasarkan gambar temuan kasus tuberkulosis di tahun 2020 sebanyak 134 dan terus mengalami peningkatan sebanyak 268 kasus di tahun 2023 dan 289 di tahun 2024.

e. Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis

Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis adalah angka persentase pasien TBC yang berhasil menyelesaikan pengobatan dan dinyatakan sembuh atau pengobatan lengkap. Capaian untuk indikator angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis.

Tabel 2.28
Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis
(*treatment success rate*) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase pasien TB yang berhasil menyelesaikan pengobatan dan dinyatakan sembuh atau pengobatan lengkap	%	90.13	88.83	89.11	86.4	88.66

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, 2025

Indikator kinerja pembangunan daerah untuk angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (*treatment success rate*) menunjukkan arah peningkatan secara bertahap dari tahun ke tahun. Kondisi awal pada tahun 2024 tercatat sebesar 88,66%. Target pada tahun-tahun berikutnya ditetapkan meningkat, yaitu 89,1% pada tahun 2025, 89,68% pada tahun 2026, 90,06% pada tahun 2027, 90,63% pada tahun 2028, 91% pada tahun 2029, dan mencapai 91,01% pada tahun 2030. Tren kenaikan ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat upaya pengendalian tuberkulosis serta meningkatkan keberhasilan pengobatan melalui layanan kesehatan yang lebih efektif dan terjangkau.

f. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional didefinisikan sebagai setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia yang telah menjadi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional. Pada tahun 2024 realisasi cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional untuk Kabupaten Sidoarjo sebesar 99,97%.

2.1.2.3 Pendidikan Berkualitas Yang Merata

Sub aspek pendidikan berkualitas yang merata menguraikan indikator rata-rata dan harapan lama sekolah serta indikator lainnya yang terkait dengan bidang pendidikan.

a. Rata-Rata dan Harapan Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh pendidikan formal. Sedangkan harapan lama sekolah merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.

Gambar 2.30
Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo, 2025

Harapan Lama Sekolah (AHLS) Kabupaten Sidoarjo sejak terus mengalami kenaikan dengan nilai di tahun 2020 sebesar 14,93 naik menjadi 15,22 di tahun 2024. Realisasi tersebut berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun di Kabupaten Sidoarjo memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus Diploma II. Begitu pun dengan angka rata-rata lama sekolah, yaitu capaian tiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Realisasi capaian rata-rata lama sekolah pada tahun 2024 sebesar 10,91 yang berarti bahwa masyarakat Kabupaten Sidoarjo rata-rata usia 25 tahun keatas sebagian besar telah menyelesaikan pendidikan kelas X hingga kelas XII.

b. Indeks Kompetensi Minimum Literasi dan Numerasi

Sebagai daerah yang cukup tinggi angka partisipasi sekolahnya, menjadi kabar baik bagi Kabupaten Sidoarjo bahwa kualitas sumber daya manusia yang dimiliki sudah dapat bersaing. Isu krusial tentang literasi dan numerasi bagi siswa sekolah SD-SMP juga menunjukkan hasil realisasi target yang meningkat sebagaimana tercantum pada tabel berikut.

Tabel 2.29
Indeks Kompetensi Minimum Literasi dan Numerasi Siswa SD dan SMP di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022-2024

Tahun	Kategori Siswa SD		Kategori Siswa SMP	
	Literasi	Numerasi	Literasi	Numerasi
2022	67,67		60,33	
2023	3,36	2,76	3,44	2,64
2024	3,68	3,48	3,60	3,48

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, 2025

Data awal di tahun 2022 masih digabung secara agregat antara siswa SD dengan SMP. Mulai tahun 2023, data yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten SidoarjoS telah membedakan asesmen literasi dan numerasi antara siswa SD dengan SMP. Pada tahun 2022, nilai literasi dan numerasi yang tercatat masing-masing sebesar 67,67 dan 60,33 merupakan gabungan dari siswa SD dan SMP. Skor ini kemungkinan besar menggunakan skala 0–100, yang secara umum mencerminkan tingkat kompetensi menengah. Nilai literasi sebesar 67,67 menunjukkan bahwa sebagian besar siswa memiliki kemampuan memahami teks dengan cukup baik, sementara nilai numerasi sebesar 60,33 mengindikasikan masih adanya tantangan dalam penguasaan kemampuan berhitung atau berpikir matematis. Meskipun belum tergolong tinggi, capaian ini dapat dikatakan cukup memadai sebagai titik awal evaluasi mutu pendidikan dasar dan menengah.

Pada tahun 2024, data indeks disajikan secara terpisah berdasarkan jenjang pendidikan, dengan kemungkinan menggunakan skala 1–4 sebagaimana lazim diterapkan dalam beberapa pengukuran nasional seperti Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK). Hasilnya menunjukkan bahwa siswa SD memperoleh skor literasi sebesar 3,68 dan numerasi sebesar 3,48.

Sementara itu, siswa SMP memperoleh skor literasi sebesar 3,60 dan numerasi 3,48. Bila ditafsirkan dalam skala tersebut, nilai literasi baik di jenjang SD maupun SMP berada pada kategori “cukup cakap hingga mendekati mahir”, terutama pada siswa SMP yang menunjukkan capaian tertinggi. Sebaliknya, nilai numerasi berada di kisaran bawah kategori “cukup cakap” dan menjadi indikator bahwa kemampuan berhitung siswa masih perlu ditingkatkan, khususnya di jenjang SMP yang menunjukkan skor lebih rendah dari SD. Jika dibandingkan, terdapat indikasi peningkatan dalam aspek literasi dari tahun 2022 ke 2024, dengan siswa SMP mencatatkan performa paling baik. Namun demikian, kemampuan numerasi justru stagnan atau bahkan sedikit menurun jika dibandingkan dengan skor gabungan tahun sebelumnya. Hal ini mengisyaratkan perlunya perhatian khusus dalam penguatan numerasi di lingkungan sekolah, baik melalui pengembangan kurikulum, pelatihan guru, maupun penyediaan media pembelajaran yang lebih kontekstual.

c. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Kemampuan literasi dan numerasi masyarakat akan mendukung indikator pembangunan literasi di Kabupaten Sidoarjo. Dalam pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM), terdapat berbagai aspek yang diukur selain kemampuan literasi dan numerasi, antara lain pemerataan layanan perpustakaan, ketercukupan koleksi perpustakaan, rasio ketercukupan tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan masyarakat per hari, perpustakaan yang dibina sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP), keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi perpustakaan, dan jumlah anggota perpustakaan. Pada tahun 2023, BPS Kabupaten Sidoarjo mengeluarkan skor IPLM yang mendapatkan skor 54,83 dan naik menjadi 63,7 di tahun 2024. Trend IPLM Kabupaten Sidoarjo menunjukkan trend yang positif karena naik 9 poin dalam waktu satu tahun. Namun jika mengacu pada standar yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri, skor di tahun 2023 masuk dalam kategori rendah, sedangkan di tahun 2024 termasuk kategori sedang yang artinya di tahun 2024 capaian pelayanan dasar sudah mulai

membaik, tapi masih cukup banyak ruang untuk ditingkatkan agar bisa masuk dalam kategori tinggi (minimal nilai 75).

d. Indeks Infrastruktur Pendidikan

Berbagai dukungan sarana dan prasarana di sekolah, serta bantuan-bantuan pemerintah daerah dalam mengurangi kesenjangan pendidikan akibat kendala finansial. Dukungan tersebut bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat agar rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah Kabupaten Sidoarjo dalam kondisi baik karena mencerminkan akses pendidikan yang layak dan terjangkau bagi semua kalangan.

Gambar 2.31
Indeks Infrastruktur Pendidikan Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2020 – 2024



Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo, 2025

Indeks Infrastruktur Pendidikan di Kabupaten Sidoarjo dalam 5 tahun terakhir menunjukkan adanya perbaikan, hal ini dapat kita lihat dari data diatas yang menunjukkan tahun 2020 dengan angka 80,49 persen, naik menjadi 92,80 persen ditahun 2021. Walaupun sempat mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 84,32 persen, Indeks Infrastruktur Pendidikan di Kabupaten Sidoarjo mengalami kenaikan yang signifikan di tahun 2023 dan 2024 menjadi 95,60 persen secara berturut-turut dari target 86,60% (2023) dan 88,64% (2024) yang ditetapkan.

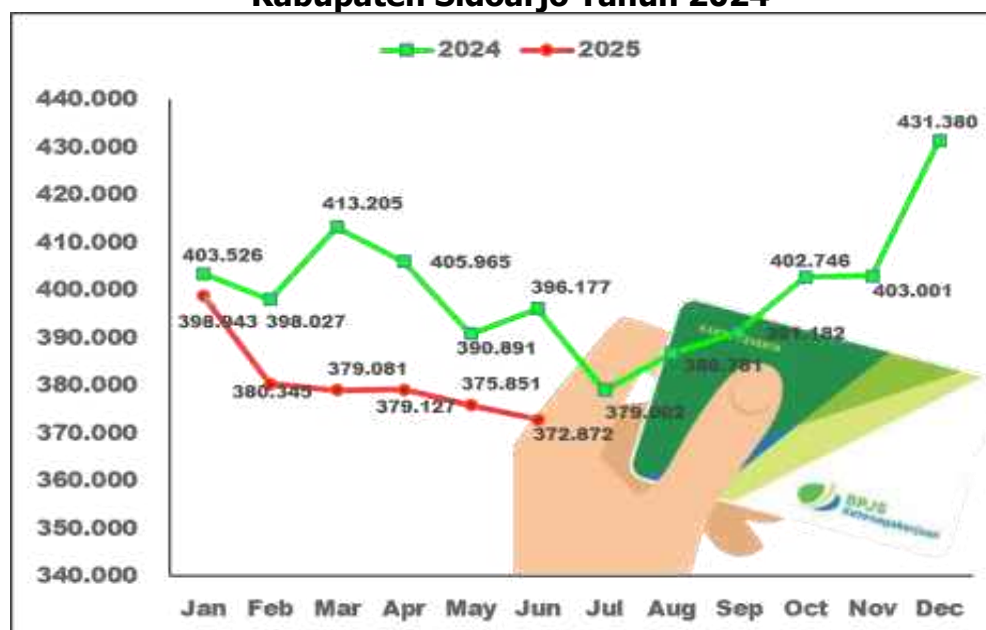
2.1.2.4 Perlindungan Sosial Yang Adaptif

Perlindungan sosial yang adaptif bertujuan untuk percepatan penuntasan kemiskinan dan memperluas perlindungan yang menyeluruh bagi seluruh penduduk sesuai kerentanan yang dijalankan dengan prinsip berkeadilan, adaptif dan inklusif.

a. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Kabupaten Sidoarjo mengalami fluktuatif di tahun 2024 sampai dengan bulan Juni 2025. Semakin tinggi Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja menunjukkan bahwa perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja semakin bagus sehingga diharapkan dapat memberikan ketenangan dalam meningkatkan produktivitas kerjanya. Tercatat di akhir tahun 2024 Cakupan Kepesertaan Jamsostek mencapai 431.380 tenaga kerja atau 39,87%, kemudian untuk cakupan sampai dengan bulan Juni 2025 mencapai 372.872 tenaga kerja atau 34,47%. Pergerakan Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Kabupaten Sidoarjo dapat diperhatikan pada grafil berikut ini.

Gambar 2.32
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024



Sumber: Jaminan Sosial Tenaga Kerja Jawa Timur, 2025

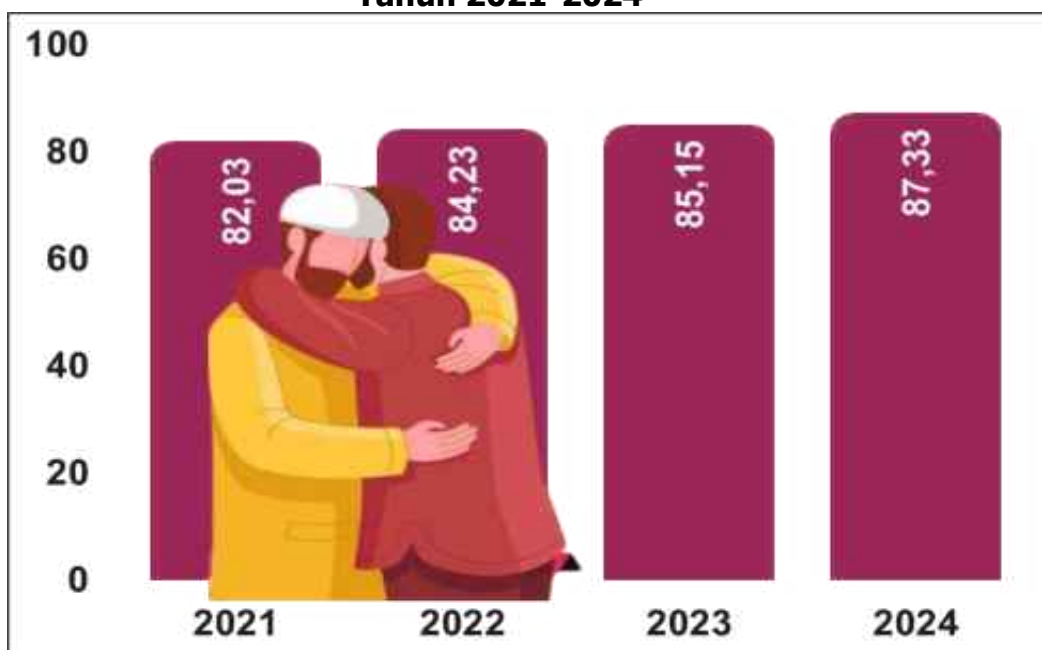
2.1.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Sub bab ini menjelaskan kondisi penguatan peran agama sebagai landasan spiritual, etika, moral, dan modal dasar pembangunan serta pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter serta memperteguh jati diri bangsa.

a. Indeks Kesalehan Sosial

Indeks kesalehan sosial merupakan gabungan indeks kepedulian sosial dan indeks kepedulian lingkungan. Indeks ini merupakan manifestasi akan kesalehan sosial masyarakat berupa kepedulian akan lingkungan sosial dan lingkungan alam. Dimensi kepedulian sosial terbentuk dari 5 sub dimensi, yaitu: sikap percaya, toleransi, kelompok dan jejaring, resiprositas, dan partisipasi dalam aksi bersama. Sedangkan dimensi kepedulian lingkungan terbentuk dari 5 sub dimensi, yaitu: penghematan energi, pengelolaan sampah, penghematan air, pengurangan polusi udara (transportasi pribadi), dan penjagaan lingkungan. Indeks Kesalehan Sosial merupakan Indikator Kinerja Utama baru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Sidoarjo dengan capaian selama 4 tahun terakhir sebagai berikut.

Gambar 2.33
Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2021-2024



Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo, 2025

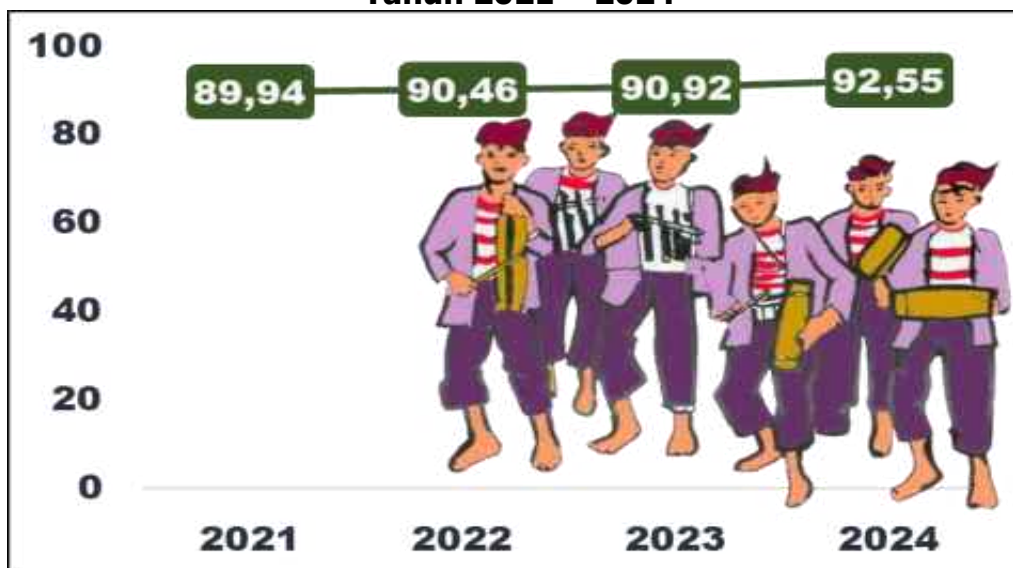
Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Sidoarjo menunjukkan tren yang konsisten meningkat dari tahun 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021, indeks berada pada angka 82,03 dan terus mengalami kenaikan hingga mencapai 87,33 pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan pembangunan sosial yang mendorong nilai-nilai kepedulian, gotong royong, toleransi, dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Kenaikan indeks dari tahun ke tahun menandakan penguatan kohesi sosial yang dapat menjadi fondasi penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan stabilitas daerah. Peningkatan ini tidak terlepas dari peran pemerintah daerah dalam menyelenggarakan program sosial berbasis komunitas, penguatan lembaga keagamaan, serta kebijakan inklusif yang memperkuat rasa saling percaya di antara warga.

b. Indeks Pelestarian Budaya

Pembangunan seni, budaya, dan olahraga merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembinaan dan pembangunan bangsa guna meningkatkan kualitas sumber daya insani, terutama jika diarahkan pada peningkatan kesehatan jasmani dan rohani, serta membangun watak dan kepribadian yang disiplin dan sportivitas. Dari data sampai dengan tahun 2021 terdapat 4 kelompok seni dan budaya yang dilestarikan. Selain itu, pada tahun 2021 Kabupaten Sidoarjo juga mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dari Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, yaitu: 1. Kupang Lontong 2. Tari Banjarkemuning 3. Musik Patrol 4. Udeng Pacul Gowang.

Tercatat pada tahun 2021, indeks berada di angka 89,94, lalu meningkat berturut-turut menjadi 90,46 di tahun 2022, 90,92 di tahun 2023, dan mencapai 92,55 pada tahun 2024 sebagaimana ditampilkan pada gambar berikut ini.

Gambar 2.34
Indeks Pelestarian Budaya Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2021 – 2024



Sumber: Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo, 2025

Kenaikan nilai Indeks Pelestarian Budaya ini menandakan upaya pelestarian budaya di Sidoarjo telah dilakukan secara berkelanjutan dan terstruktur. Peningkatan ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh penguatan program kebudayaan lokal seperti revitalisasi kesenian tradisional (contohnya ludruk, yang tampaknya digambarkan dalam ilustrasi), perlindungan warisan budaya takbenda, peningkatan kapasitas pelaku seni dan budaya, serta integrasi nilai-nilai lokal dalam pendidikan dan kegiatan masyarakat.

Nilai indeks di atas 90 menunjukkan kondisi pelestarian budaya yang sudah sangat baik, dengan indikator seperti frekuensi pertunjukan seni tradisional, jumlah komunitas budaya aktif, pelestarian bahasa dan adat istiadat, serta dokumentasi warisan budaya yang meningkat. Ini juga mencerminkan bahwa identitas lokal tetap kuat di tengah perkembangan modernisasi dan urbanisasi.

Tabel 2.30
Capaian Kinerja Indeks Pelestarian Budaya Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2023-2024

No	Indikator	Tahun			
		2023		2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
A	Indeks Pelestarian Budaya	63,58	90,92	66,76	92,55
B	Cakupan obyek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan	70	73	72,11	81,82
C	Jumlah penutur muda bahasa daerah	10	29	10	10
D	Prosentase guru mengikuti uji kemahiran bahasa indonesia	10	10,04	14,05	14,2
E	Persentase kelompok seni yang dibina	70	78,84	65	65
F	Jumlah kelompok seni yang melestarikan seni dan budaya daerah	6	6	9	9
G	Kelompok seni yang memenuhi Standarisasi	60	60	65	65

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo, 2025

Pada hasil yang tertera di tabel dapat dikemukakan bahwa capaian kinerja Indeks Pelestarian Budaya yang ada di Kabupaten Sidoarjo tahun 2023–2024 telah mencapai target yang ditetapkan. Apabila diperhatikan dari 7 indikator yang diukur 5 indikator yang ketercapaian realisasinya meningkat dibandingkan tahun 2023 dan terdapat 2 indikator yang realisasinya mengalami penurunan, salah satunya adalah persentase kelompok seni yang dibina. Tercatat di tahun 2023 persentase kelompok seni yang dibina sebesar 78,84% menurun menjadi 65%.

2.1.2.6 Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah berperan penting dalam mendorong pembangunan dan penggerak ekonomi nasional. Ekonomi syariah dapat diukur dengan menggunakan 3 indikator salah satunya adalah Indeks Zakat Nasional.

a. Indeks Zakat Nasional (IZN)

Indeks Zakat Nasional adalah alat ukur yang digunakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan zakat di Indonesia. IZN bertujuan untuk memberikan gambaran objektif mengenai pengelolaan zakat, membantu BAZNAS dalam merancang kebijakan, dan

mendorong peningkatan kualitas pengelolaan zakat secara nasional. Capaian Indeks Zakat Nasional di Kabupaten Sidoarjo sebesar 0,33 yang termasuk di dalam kategori berkembang.

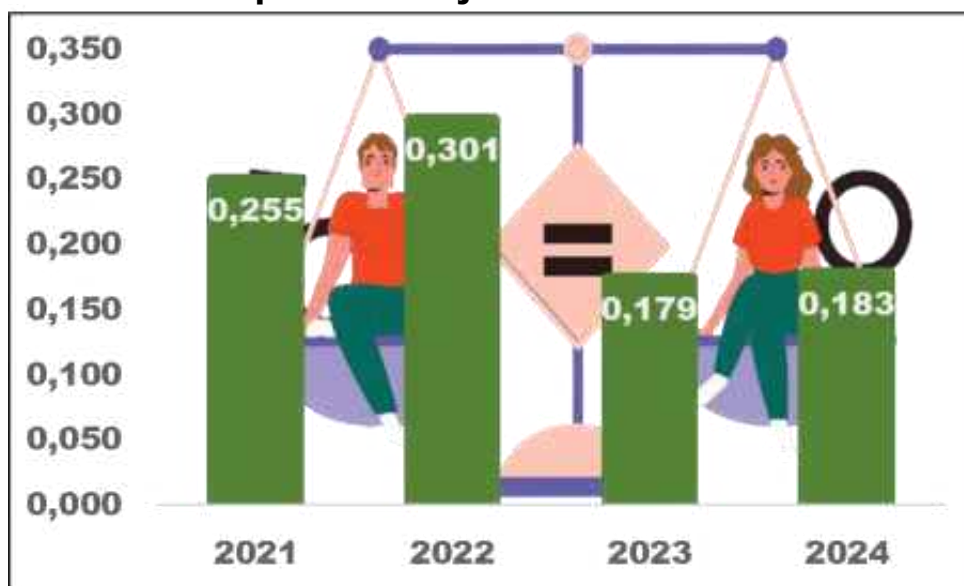
2.1.2.7 Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender dan Masyarakat Inklusif

Ketangguhan keluarga memiliki peran penting untuk memastikan terbentuknya sumber daya manusia berkualitas sebagai motor penggerak pembangunan, termasuk ketimpangan gender dan kondisi pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender.

a. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender juga dapat ditampilkan gambaran Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut.

Gambar 2.35
Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2024



Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo, 2025

Gambar menunjukkan perkembangan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2021 hingga 2023, yang menggambarkan sejauh mana kesenjangan antara laki-laki dan perempuan

dalam berbagai aspek pembangunan. Indeks ini bersifat semakin rendah semakin baik, karena mencerminkan ketimpangan yang lebih kecil. Pada tahun 2021, IKG berada di angka 0,255, kemudian meningkat menjadi 0,301 pada tahun 2022, yang menunjukkan memburuknya ketimpangan gender di tahun tersebut. Kenaikan ini bisa mengindikasikan tantangan dalam kesetaraan akses terhadap pendidikan tinggi, pekerjaan layak, atau keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan. Walaupun sempat menurun pada tahun 2023, capaian IKG di tahun 2024 kembali meningkat menjadi 0,183 yang menandakan bahwa upaya kesetaraan gender harus diperluas secara menyeluruh.

Penurunan ini mencerminkan keberhasilan kebijakan afirmatif dan program pemberdayaan perempuan yang dijalankan pemerintah daerah. Dengan IKG yang terus membaik, Kabupaten Sidoarjo menunjukkan progres nyata dalam membangun masyarakat yang lebih inklusif, di mana perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang semakin setara untuk berkembang dan berkontribusi dalam pembangunan daerah. Tantangan ke depan adalah mempertahankan capaian ini melalui penguatan kebijakan berperspektif gender dan pemantauan yang berkelanjutan.

b. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga

Tabel 2.31
Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2024

Tahun	Komponen			IPKK
	Ketentraman	Kemandirian	Kebahagiaan	
2021	28,99	3,68	52,15	28,28
2022	29,18	3,86	68,63	33,90
2023	29,80	3,89	63,06	32,25
2024	29,80	3,87	62,68	32,12

Sumber: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana, 2024

Data Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 hingga 2024 menunjukkan tren yang cukup dinamis. Secara umum, terdapat peningkatan dari tahun 2021 dengan IPKK sebesar

28,28 menjadi puncaknya pada tahun 2022 di angka 33,90. Peningkatan tajam tersebut sangat dipengaruhi oleh lonjakan skor komponen kebahagiaan, yang naik dari 52,15 menjadi 68,63. Ini mengindikasikan bahwa pada tahun 2022, ada perbaikan signifikan dalam persepsi kepuasan hidup, hubungan keluarga, dan dukungan sosial antaranggota keluarga.

Namun, pada tahun 2023 dan 2024 terjadi sedikit penurunan IPKK menjadi masing-masing 32,25 dan 32,12. Meskipun komponen ketenteraman dan kemandirian cenderung stabil, penurunan nilai kebahagiaan tampaknya menjadi penyebab utama turunnya nilai IPKK di dua tahun terakhir. Hal ini bisa menjadi sinyal bagi pemerintah daerah untuk kembali memperkuat program-program yang berorientasi pada peningkatan kualitas interaksi keluarga, keseimbangan kerja-rumah tangga, serta penguatan lingkungan sosial yang positif. Dengan demikian, meskipun sempat mengalami kemajuan signifikan, tren IPKK Kabupaten Sidoarjo menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan antar komponen. Upaya pembangunan keluarga tidak hanya cukup dengan perbaikan ekonomi dan ketertiban sosial.

c. Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal

Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal adalah persentase penyandang disabilitas usia produktif yang bekerja di sektor formal. Sampai dengan tahun 2024 tercatat sebanyak 286 orang penyandang disabilitas yang berkerja di 30 perusahaan yang ada di Kabupaten Sidoarjo.

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

a. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi

Indikator ini menjelaskan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang memiliki pendidikan strata diploma sampai dengan strata doktoral. Tercatat pada tahun 2024 persentase penduduk Kabupaten Sidoarjo yang berusia 15 tahun ke atas dan berpendidikan tinggi sebesar 18,34%.

2.1.3.2 Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

Bagian ini menjelaskan kondisi Iptek dan inovasi Kabupaten Sidoarjo yang menjadi pendorong dan mempercepat keberlanjutan produktivitas sektor ekonomi dan memperkuat struktur ekonomi dalam jangka panjang.

a. Indeks Inovasi Daerah

Tabel 2.32
Penilaian Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2020 – 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif	Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif

Sumber: Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, 2024

Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Sidoarjo secara konsisten menempati kategori “Sangat Inovatif” pada hampir semua tahun, kecuali pada 2021 yang berada di tingkat “Inovatif”. Pencapaian ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mendorong transformasi pelayanan publik, penggunaan teknologi, serta pengembangan kebijakan kreatif untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan masyarakat secara efisien dan adaptif. Bahkan di tahun 2024 Kabupaten Sidoarjo masuk dalam kategori Kabupaten Terinovatif.

b. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Tabel 2.33
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 – 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
TPAK Perempuan	52,78	50,86	55,76	56,07	54,23

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo, 2025

Angkatan kerja di Kabupaten Sidoarjo pada Agustus 2024 di Sidoarjo mengalami penurunan sebesar 0,33% atau sekitar 3,92 ribu dibandingkan Agustus 2023. Sejalan dengan penurunan angkatan kerja pada Agustus 2024, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Sidoarjo juga menurun. Tercatat

TPAK pada Agustus 2024 sebesar 54,23 persen yang menurun 1,84 persen poin dibanding Agustus 2023.

c. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Sektor perindustrian salah satu sektor yang banyak memberikan kontribusi pada PDRB, yaitu mencapai 51.96% pada tahun 2021. Presentase kontribusi PDRB dari sektor industri dalam 3 tahun terakhir terus mengalami penurunan menjadi sebesar 48,60% di tahun 2024 sebagaimana tercantum pada grafik di bawah. Penjelasan lebih detail terlampir pada gambar di bawah.

Gambar 2.36
Peranan Sektor Industri Pengolahan terhadap Laju PDRB
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 – 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo, 2025

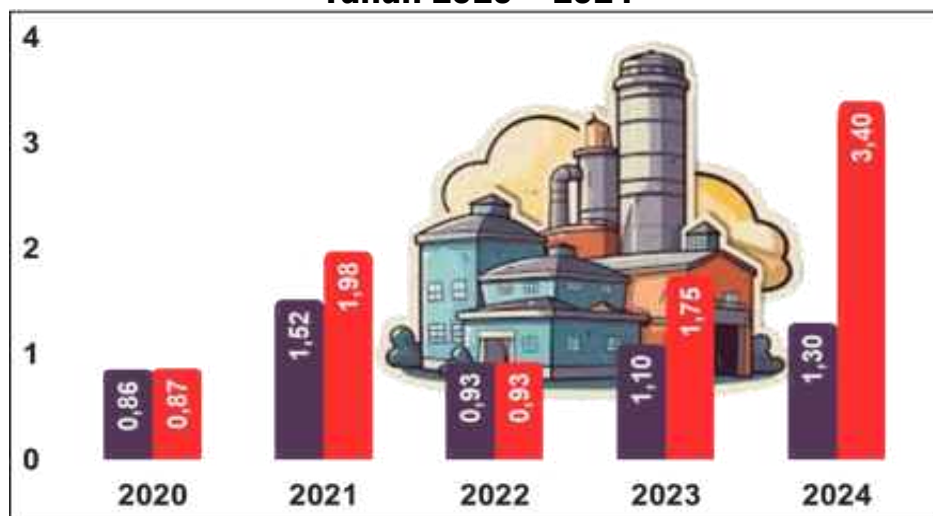
Penurunan ini mengindikasikan bahwa peran sektor industri pengolahan dalam struktur ekonomi daerah secara relatif mulai melemah. Beberapa kemungkinan penyebabnya antara lain:

- Diversifikasi sektor ekonomi, di mana sektor lain seperti perdagangan, jasa, atau pariwisata mulai mengambil porsi lebih besar dalam pertumbuhan ekonomi.
- Relokasi atau penurunan aktivitas industri manufaktur, akibat tekanan ekonomi global, otomasi, atau perpindahan ke wilayah dengan biaya produksi lebih rendah.

- Perubahan kebijakan zonasi atau lingkungan, yang mungkin membatasi ekspansi industri padat modal atau padat lahan.

Berikutnya untuk pertumbuhan usaha industri ditampilkan pada gambar sebagai berikut.

Gambar 2.37
Persentase Pertumbuhan Usaha Industri Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2020 – 2024



Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo, 2025

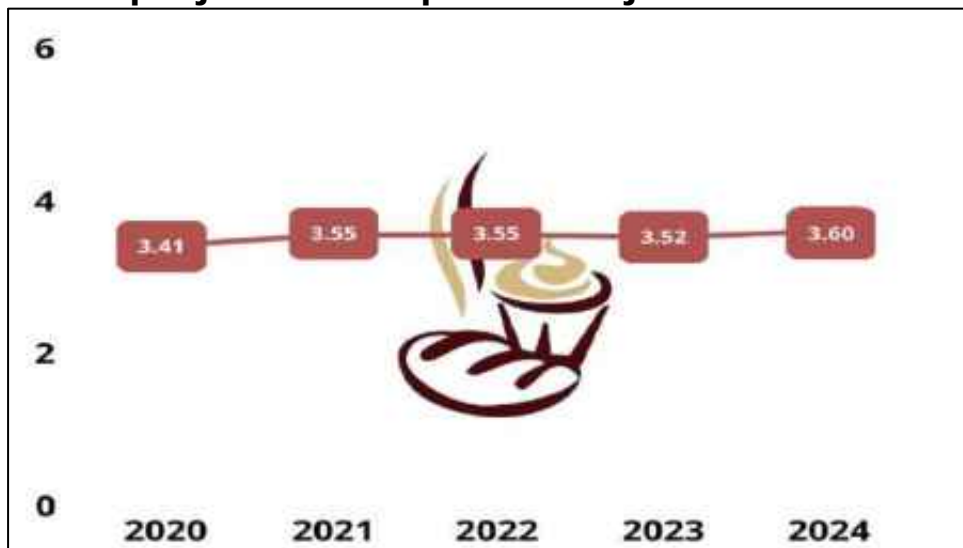
Persentase Pertumbuhan Usaha Industri, pada tahun 2020 angka capaian sebesar 0,87%, begitupun pada tahun 2021 disaat pandemi covid-19 mencapai kenaikan sekitar 1,98%, dan di tahun 2022 menurun menjadi 0,93%. Sementara pada tahun 2023 terjadi peningkatan kembali yang signifikan dengan capaian sebesar 1,75% dan tahun 2024 kembali meningkat menjadi 3,40% dari target 1,30%.

d. Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum

Industri kreatif bisa menjadi salah satu solusi untuk menekan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Sidoarjo yang relatif masih tinggi, selain juga dapat mendukung peningkatan sektor wisata. Gambaran rasio PDRB Industri Kreatif di Kabupaten Sidoarjo digambarkan dengan rasio PDRB sektor akomodasi makanan dan minuman. Rasio PDRB untuk sektor akomodasi makanan dan minuman memiliki kecenderungan yang meningkat di rentang periode tahun 2020 sampai dengan 2024. Realisasi capaian terakhir tahun 2024 tercatat sebesar 3,60 yang menunjukkan bahwa sektor akomodasi

makanan dan minuman memiliki kontribusi lebih baik selama 5 tahun terakhir.

Gambar 2.38
Peranan Sektor Akomodasi Makan dan Minum
terhadap Laju PDRB Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 – 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo, 2025

e. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif

Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif adalah persentase kontribusi subsektor ekonomi kreatif terhadap total PDRB. Pada tahun 2023, sektor ekonomi kreatif menyumbang sekitar 10,13% dari total PDRB Kabupaten Sidoarjo, dengan subsektor kuliner memberikan kontribusi terbesar sebesar 62,79%, diikuti oleh fashion (22,63%) dan kriya (8,17%).

Pertumbuhan ekonomi kreatif di Sidoarjo sangat dipengaruhi oleh perkembangan industri pengolahan, perdagangan, dan penyediaan akomodasi serta makan minum.

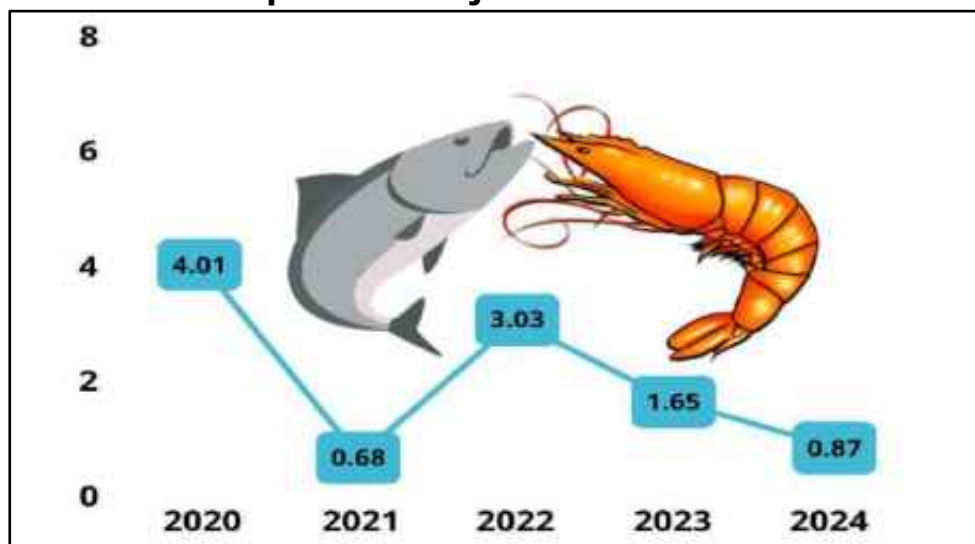
Tingginya kontribusi ekonomi kreatif pada sektor kuliner, fashion, dan kriya menjadikan ketiga sektor tersebut sebagai faktor penggerak pertumbuhan ekonomi kreatif di Sidoarjo. Dengan kontribusi sebesar 93,59%, ketiga sektor tersebut menjadi signifikan dalam mempengaruhi ekonomi kreatif. Kinerja ekonomi kreatif di Sidoarjo akan sangat tergantung pada pertumbuhan industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta penyediaan akomodasi dan makan minum.

Terdapat 8 strategi berdasarkan indikator keberhasilannya, yaitu: penguatan modal dan infrastruktur; peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia; pemanfaatan teknologi digital; peningkatan akses pasar; kolaborasi dan sinergi dengan sektor pariwisata; kebijakan dan regulasi yang mendukung; peningkatan peran komunitas dan kolaborasi; dan penguatan riset dan pengembangan.

f. Pertumbuhan PDRB Subsektor Perikanan

Pertumbuhan PDRB subsektor perikanan adalah peningkatan nilai tambah seluruh kegiatan usaha perikanan (penangkapan, budidaya, pengolahan, dan pemasaran) dalam suatu periode tertentu, yang diukur dengan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto).

Gambar 2.39
Pertumbuhan PDRB SubSektor Perikanan
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 – 2024



Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo, 2025

Mengacu pada grafik terlihat bahwa pertumbuhan PDRB subsektor perikanan menunjukkan fluktuatif dan cenderung menurun. Kabupaten Sidoarjo sebagai kota delta harus mampu berinovasi lebih agar subsektor perikanan terutama Udang dan Bandeng dapat berkontribusi lebih besar dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

g. Pertumbuhan Kunjungan Wisata Domestik dan Mancanegara

Karakteristik Kabupaten Sidoarjo yang identik dengan industri dan perikanan secara bersamaan menghadirkan peluang dan tantangan bagi sektor pariwisata. Sebagaimana terlihat pertumbuhan kunjungan wisata di Kabupaten Sidoarjo di tahun 2024 sebesar -15,00 harus menjadi perhatian serius.

Kondisi yang ada ini menyoroti kebutuhan mendesak untuk membangun fondasi pariwisata yang lebih kuat, dengan destinasi dan pengalaman yang menarik pengunjung secara konsisten sepanjang tahun, bukan hanya saat ada event khusus. Model pariwisata yang ada saat ini belum mampu menciptakan daya tarik intrinsik yang cukup untuk mempertahankan momentum kunjungan tanpa katalis eksternal. Oleh karena itu, strategi ke depan harus bergeser dari reaktif (menunggu event) menjadi proaktif (menciptakan daya tarik dan pengalaman berkelanjutan yang mampu menarik pengunjung secara reguler) dengan mengedepankan potensi-potensi kuat yang dimiliki oleh Kabupaten Sidoarjo, terutama di sektor perikanan.

Tabel 2.34
Pertumbuhan Kunjungan Wisata Domestik dan Mancanegara

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan Kunjungan Wisata Domestik dan Mancanegara	57,76	23,90	2,14	68,28	-15,00

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo, 2025

h. Persentase Ekspor Barang dan Jasa Terhadap PDRB

Gambaran ekspor barang dan jasa terhadap PDRB di Kabupaten Sidoarjo ditampilkan sebagai berikut.

Tabel 2.35
Persentase Ekspor Barang dan Jasa Terhadap PDRB

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Ekspor Barang dan Jasa Terhadap PDRB	2,17	4,32	7,79	9,08	10,14

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, 2025

Kontribusi net ekspor barang dan jasa Kabupaten Sidoarjo meningkat secara signifikan dari 2,17 persen pada tahun 2020 menjadi 10,14 persen pada 2024. Peningkatan ini menandakan perbaikan kinerja ekspor daerah, terutama dari sektor industri pengolahan dan manufaktur ringan yang menjadi unggulan di Kabupaten Sidoarjo. Hal ini juga sejalan dengan strategi pemulihan ekonomi melalui penguatan UMKM berorientasi ekspor, promosi produk lokal, serta optimalisasi kawasan industri.

2.1.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau

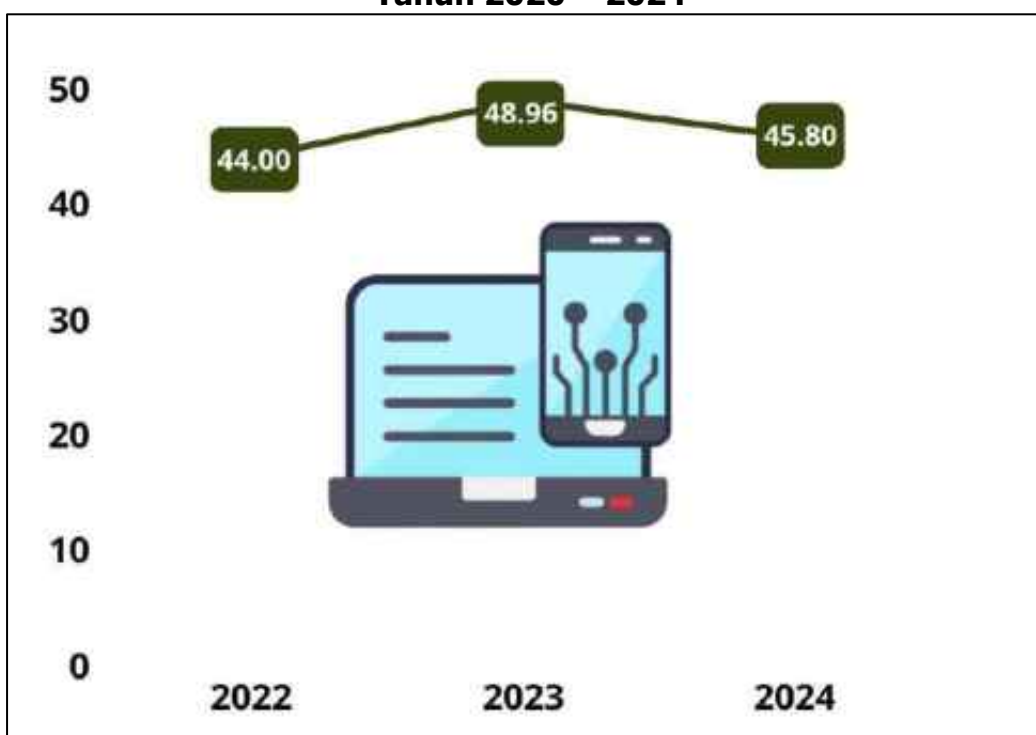
Ekonomi Hijau adalah model pembangunan ekonomi untuk menunjang pembangunan berkelanjutan dengan fokus pada investasi, kapital dan infrastruktur, lapangan kerja dan keterampilan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan. Indeks Ekonomi Hijau ditujukan sebagai alat untuk mengukur progres dan capaian transformasi ekonomi menuju Ekonomi Hijau secara tangible, representatif, dan akurat.

Indeks Ekonomi Hijau Kabupaten Sidoarjo Daerah terdiri dari 7 indikator terpilih yang mewakili 3 (tiga) pilar *Sustainable Development* yaitu ekonomi (1 indikator), sosial (4 indikator), dan lingkungan (2 indikator). Capaian indeks ekonomi hijau Kabupaten Sidoarjo di tahun 2024 hasil perhitungan melalui 7 indikator yang dipergunakan sebagai komposit sebesar 61,34 yang termasuk dalam Baik Tier 1.

2.1.3.4 Transformasi Digital

Gambaran transformasi digital di Kabupaten Sidoarjo dapat digambarkan melalui Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI). IMDI merupakan suatu pengukuran tingkat kompetensi dan ketrampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun untuk kepentingan pekerjaan. Capaian Indeks Masyarakat Digital untuk Kabupaten Sidoarjo ditampilkan sebagai berikut.

Gambar 2.40
Indeks Masyarakat Digital Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2020 – 2024



Sumber: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital, 2025

Indeks Masyarakat Digital Kabupaten Sidoarjo terlihat mengalami fluktuatif dalam 3 tahun terakhir diawali pada tahun 2021 sebagai permulaan perhitungan. Dengan 4 pilar pembentuk IMDI, tercatat penurunan terbesar terdapat pada pilar ketrampilan digital sehingga kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi dan menggunakan perangkat TIK, serta kemampuan dalam mengartikulasi kebutuhan informasi, mencari dan menemukan, menyimpan dan mengorganisasi data, informasi, dan konten digital harus lebih ditingkatkan.

2.1.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

a. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Kondisi ekonomi domestik dan global yang mendorong peningkatan produktivitas perekonomian khususnya di wilayah Kabupaten Sidoarjo dapat digambarkan melalui capaian indikator pembangunan sebagai berikut.

Tabel 2.36
Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pembentukan Modal Tetap Bruto	-4,31	2,05	7,85	7,21	28,98

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo, 2025

Pada tahun 2020, PMTB mengalami kontraksi sebesar -4,31%, yang menandakan penurunan aktivitas investasi dalam pembangunan fisik seperti konstruksi, pembelian mesin, dan alat produksi. Hal ini sangat mungkin disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang menahan ekspansi usaha, memperlambat belanja modal pemerintah, dan menghambat proyek-proyek infrastruktur. Namun pada tahun 2021, PMTB mulai tumbuh kembali sebesar 2,05%, yang menunjukkan tanda-tanda awal pemulihan investasi setelah masa tekanan ekonomi.

Momentum pemulihan terus berlanjut dengan peningkatan signifikan pada tahun 2022 sebesar 7,85%, yang mencerminkan kembalinya kepercayaan pelaku usaha dan percepatan proyek pembangunan fisik. Meskipun pada 2023 terjadi sedikit perlambatan dengan pertumbuhan 7,21%, pada tahun 2024 capaiannya meningkat signifikan menjadi 28,98% yang menunjukkan bahwa aktivitas pembentukan modal tetap berlangsung kuat dan stabil. Tren positif ini menandakan adanya dorongan dari belanja pembangunan, baik dari sektor publik maupun swasta, serta peningkatan aktivitas ekonomi daerah secara umum.

b. Ekspor Barang dan Jasa

Sebagai daerah yang masuk kawasan Gerbangkartasusila yang memiliki banyak industri tumbuh serta aksesibilitas yang memungkinkan pergerakan barang dan jasa dalam skala luas, dalam beberapa tahun Kabupaten Sidoarjo telah berhasil menumbuhkan ekspor barang dan jasa. Data ekspor barang dan jasa dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.37
Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020-2024

Kategori	Tahun (Miliar rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Ekspor	4.287,52	9.109,38	19.101,42	24.905,63	30.094,74

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo, 2025

Nilai ekspor barang dan jasa Kabupaten Sidoarjo mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan selama periode 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020, ekspor tercatat sebesar Rp4.287,52 miliar, lalu melonjak menjadi Rp9.109,38 miliar pada tahun 2021, atau lebih dari dua kali lipat hanya dalam waktu satu tahun. Pertumbuhan tersebut berlanjut dengan peningkatan tajam pada tahun 2022 sebesar Rp19.101,42 miliar, dan mencapai puncaknya di tahun 2024 dengan nilai ekspor sebesar Rp 30.094,74 miliar. Kenaikan tajam ini mencerminkan tingkat pemulihan ekonomi pascapandemi yang sangat kuat, sekaligus menunjukkan daya saing sektor industri dan perdagangan Sidoarjo yang tinggi di pasar luar daerah, baik domestik maupun ekspor luar negeri. Kabupaten Sidoarjo yang dikenal sebagai sentra industri manufaktur, kerajinan, alas kaki, makanan, serta bahan bangunan, jelas mendapat manfaat besar dari pemulihan rantai pasok global dan regional. Tren ini juga mengindikasikan adanya permintaan pasar yang meningkat terhadap produk-produk lokal, serta peran penting pelaku usaha kecil hingga industri besar dalam mendorong ekspor. Jika tren ini dapat dijaga dan didukung melalui perluasan pasar ekspor, peningkatan kualitas produk, efisiensi logistik, serta penguatan branding daerah, maka Sidoarjo berpotensi menjadi motor ekspor utama di Jawa Timur.

2.1.3.6 Perkotaan dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan

Kondisi pengembangan untuk wilayah perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan yang maju dan inklusif dapat digambarkan dengan menggunakan indikator seperti Indeks Infrastruktur dan Persentase Desa Mandiri. Gambaran atas kedua indikator tersebut adalah sebagai berikut.

a. Indeks Infrastruktur

Gambar 2.41
Perkembangan Indeks Infrastruktur
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Sidoarjo 2025

Capaian Indeks Infrastruktur mengacu berdasarkan beberapa variabel, seperti Presentase Jalan Kondisi Mantap, Saluran Irigasi dan Drainase yang Baik, Sarana Dasar Permukiman, Sarana dan Prasarana Perhubungan yang Baik, Fasilitas Pendidikan dan Kesehatan yang dalam kondisi Baik. Tahun 2023 Kabupaten Sidoarjo berhasil merealisasikan 0,843 dari 0,772 yang ditargetkan. Sementara pda tahun 2024 Kabupaten Sidoarjo merealisasikan 0,850 dari 0,780 yang ditargetkan. Satu usaha keras yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam memenuhi target infrastruktur terealisasi dengan sangat baik. Mulai dari pembangunan RSUD

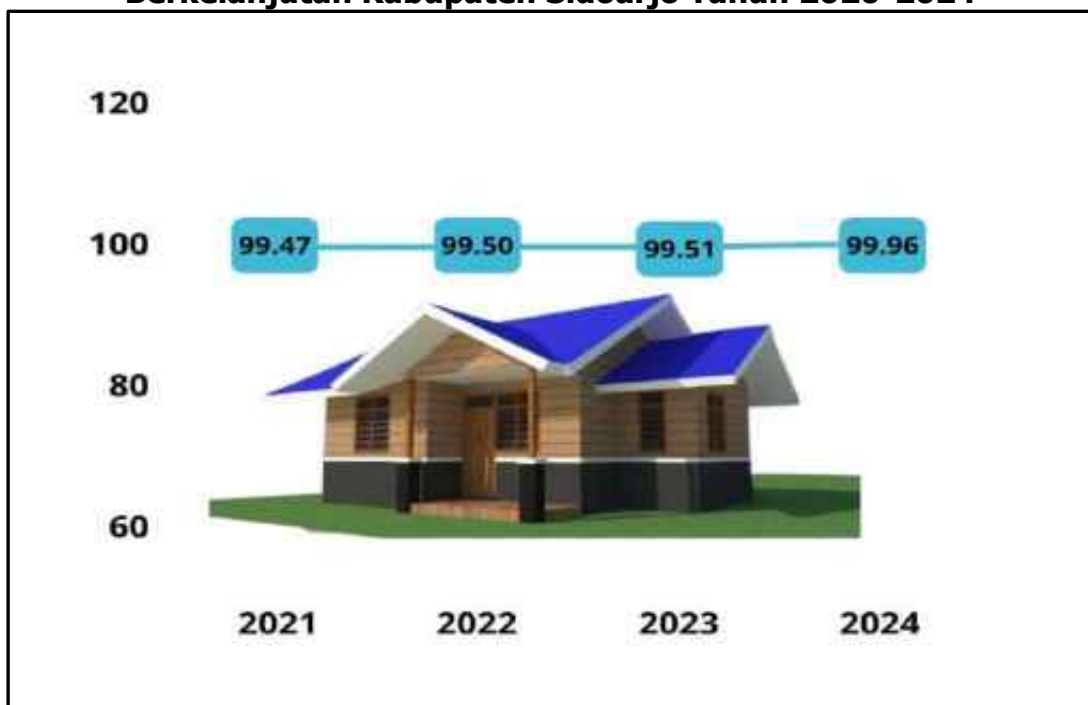
R.T Notopuro, Pembetonan Jalan di Wonoayu dan Tulangan dan lain sebagainya.

b. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan

Indikator Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan berikut menunjukkan persentase rumah tangga yang menempati tempat tinggal (hunian) yang memenuhi tiga aspek utama, yaitu:

1. Layak secara fisik dan teknis (struktur bangunan, sanitasi, pencahayaan, ventilasi, dan akses air bersih);
2. Terjangkau dari segi biaya (tidak melebihi proporsi kemampuan atau penghasilan rumah tangga); dan
3. Berkelanjutan dari sisi lingkungan, sosial, dan legalitas (termasuk kepemilikan tanah atau status legal bangunan).

Gambar 2.42
Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Sidoarjo, 2025

Berdasarkan pada gambar terlihat bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mampu menyediakan hunian yang layak, terjangkau dan

berkelanjutan. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) terus ditingkatkan oleh pemerintah kabupaten sehingga target yang diinginkan untuk mewujudkan 100% hunian yang layak bagi warga Kabupaten Sidoarjo dapat segera direalisasikan.

c. Indeks Desa

Indeks desa adalah ukuran tingkat perkembangan desa berdasarkan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, aksesibilitas, dan karakteristik geografis. Pengukuran indeks desa menggunakan rata-rata skor 6 dimensi utama yaitu layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan tata kelola pemerintahan desa. Indeks Desa merupakan pengganti dari Indeks Desa Membangun (IDM), dimana untuk capaian IDM Kabupaten Sidoarjo di tahun 2024 sebesar 0,7544 yang termasuk dalam status Maju.

d. Indeks Pemerataan Wilayah

Indeks pemerataan wilayah adalah pengukuran pemerataan pembangunan yang menunjukkan ada atau tidaknya ketimpangan wilayah. Perhitungan berdasarkan komposit dari variabel fasilitas sosial ekonomi (pendidikan, kesehatan, peribadatan, perdagangan), kependudukan (jumlah penduduk, kepadatan penduduk), aksesibilitas (konektivitas dan kerapatan jalan), anggaran, tingkat kemiskinan. Analisa dilakukan menggunakan *entropy theil*.

Kategorisasi pada hasil pengukuran indeks pemerataan wilayah terbagi atas 3 kelas dengan nilai terendah 33,3 dan tertinggi 100 yang dijelaskan sebagai berikut.

- a. Indeks pemerataan wilayah rendah nilai 0 – 33,3
- b. Indeks pemerataan wilayah sedang nilai 33,4 – 67,3
- c. Indeks pemerataan wilayah rendah nilai 67,4 – 100

2.1.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro

Kondisi ekonomi makro yang stabil akan searah dengan perwujudan kesinambungan fiskal, moneter dan sektor keuangan dalam mendukung kebijakan pro-stabilitas, pro-pertumbuhan dan pro-pemerataan.

a. ICOR

ICOR digunakan sebagai alat untuk menganalisis efisiensi investasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Penerapan ICOR yang tepat dapat membantu pemerintah daerah dalam merancang kebijakan yang lebih efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Capaian ICOR Kabupaten Sidoarjo diuraikan berikut ini.

Tabel 2.38
ICOR Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
ICOR	0,68	7,69	4,45	5,42	5,96

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo, 2025

Capaian nilai ICOR Kabupaten Sidoarjo tahun 2020 – 2024 cenderung meningkat dari nilai 0,68 di tahun 2020 menjadi 5,96 di tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa efisiensi kegiatan investasi yang ada di Kabupaten Sidoarjo masih belum menunjukkan nilai yang baik dibandingkan periode awal. Atas dasar kondisi tersebut, maka dibutuhkan langkah-langkah solutif sehingga aktifitas investasi yang dilakukan dapat memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat.

b. Realisasi Investasi

Iklim investasi di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan perkembangan yang terus membaik. Posisi Kabupaten Sidoarjo yang strategis dan memiliki akses transportasi dan ketersediaan tenaga kerja yang besar mampu menjadi tujuan investasi yang menarik bagi para investor, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Gambar 2.43
Nilai Realisasi Investasi Daerah Tahun 2020 – 2024 (Juta)



Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo, 2025

Investasi yang ada di Pemerintah Daerah meliputi PMA (Penanaman Modal Asing) dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri). PMA adalah kegiatan menanam modal, yang dilakukan oleh penanam modal asing dan bertujuan agar dapat melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Sedangkan PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Pada tahun 2024 Nilai Investasi Daerah di Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 17.046.441.020.000 dari target Rp. 12.000.000.000.000. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2023 maka terdapat peningkatan nilai realisasi investasi daerah.

c. Rasio Pajak Terhadap PDRB

Pendapatan daerah yang bertumbuh akan memberikan efek pada pendapatan asli daerah. Pada kasus ini pajak tentu menjadi indikator penting karena melihat kemampuan daerah untuk mandiri. Meskipun Kabupaten

Sidoarjo secara aturan masih menerima transfer dana dari pemerintah pusat, kondisi pajak daerah tetap perlu dianalisis peformanya, terutama konstribusinya terhadap PDRB.

Tabel 2.39
Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	0,50%	0,40%	0,50%	0,48%	0,44%

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo, 2025

Data Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Sidoarjo tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren stabil dengan kecenderungan menurun secara perlahan, meskipun nominal penerimaan pajak daerah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, rasio berada di angka 0,50%, mencerminkan kontribusi pajak daerah yang masih cukup proporsional terhadap total aktivitas ekonomi daerah. Namun pada 2021, rasio turun ke 0,40%, kemungkinan akibat perlambatan penerimaan pajak di tengah pandemi COVID-19, sementara PDRB tetap tumbuh secara nominal. Tahun 2022 menjadi titik pemulihan dengan rasio kembali ke 0,50%, menunjukkan bahwa pemungutan pajak daerah kembali pulih seiring pemulihan ekonomi. Meski begitu, pada 2023 dan 2024, rasio kembali sedikit menurun menjadi 0,48% dan 0,44%. Penurunan ini bukan berarti pajak daerah menurun secara absolut, tetapi menandakan bahwa laju pertumbuhan ekonomi (PDRB) lebih cepat dibandingkan laju peningkatan pajak daerah. Hal ini bisa terjadi karena perluasan ekonomi lebih banyak ditopang oleh sektor-sektor yang tidak menghasilkan pajak daerah secara langsung, seperti ekspor, industri besar, atau sektor informal.

Secara keseluruhan, rasio yang berkisar di bawah 1% ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap perekonomian masih rendah. Ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas fiskal mandiri, memperluas basis pajak, dan mendorong reformasi

sistem perpajakan daerah. Rasio ini juga menjadi indikator penting dalam mengukur efektivitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta seberapa besar kemampuan daerah dalam membiayai pembangunannya tanpa bergantung sepenuhnya pada transfer pusat.

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

2.1.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Tatakelola pemerintahan merupakan sistem, proses, dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan, mengelola, dan mengendalikan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan (pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat). Tatakelola pemerintahan yang baik akan menghasilkan layanan publik yang berkualitas, efektif, efisien, transparan, akuntabel serta adaptif. Tatakelola pemerintahan di Kabupaten Sidoarjo digambarkan dengan indikator-indikator sebagai berikut.

a. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan salah satu ukuran untuk mengetahui upaya pemerintah untuk mencapai *good and clean governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut delapan area perubahan, yang meliputi Organisasi, Tata Laksana, Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur, Peraturan Perundang – Undangan, Pengawasan, Akuntabilitas, Pelayanan Publik, dan Budaya Kerja Aparatur. Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Pada Indeks Reformasi Birokrasi di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2023 mendapat rank BB dengan nilai 75,38 yang berarti Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam hal birokrasi sudah cukup bagus dengan capaian

diatas 65 persen. Pengukuran ini berdasarkan pada ketentuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia sebagai upaya agar ASN bekerja secara maksimal.

Tabel 2.40
Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2020 – 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	B	BB	BB	BB	BB
Realisasi	B	B	B	BB	A-

Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2025

Indikator keberhasilan urusan pemerintahan lainnya adalah Indeks Pelayanan Publik dan Kinerja Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD). Nilai IPP dan LPPD Kabupaten Sidoarjo dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dikategorikan baik.

Berdasarkan tabel Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Sidoarjo tahun 2020–2024, terlihat adanya peningkatan capaian dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, baik target maupun realisasi berada pada kategori B. Tahun 2021 dan 2022 target meningkat menjadi BB, namun realisasi masih B. Pada tahun 2023, target tetap BB dan realisasi berhasil naik sesuai target, yaitu BB. Hingga pada tahun 2024 target tetap BB namun realisasi berhasil naik melebihi target menjadi A- (86,98).

b. Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM yang menilai dari aspek Tingkat koordinasi dalam harmonisasi regulasi; kompetensi PNS sebagai perancang peraturan perundang-undangan; kualitas re-regulasi dan deregulasi berdasarkan hasil reuiu; serta penataan database peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Kabupaten Sidoarjo, terjadi peningkatan yang sangat signifikan antara tahun 2023 dan 2024. Pada tahun 2023, Kabupaten Sidoarjo memperoleh skor akhir

sebesar 67,56 dengan kategori B (Cukup Baik). Penilaian ini menunjukkan bahwa meskipun aspek koordinasi harmonisasi regulasi, kompetensi perancang peraturan, kualitas re-regulasi, dan penataan database peraturan telah berjalan, masih terdapat berbagai kekurangan, seperti kurang lengkapnya data dukung harmonisasi regulasi, keterbatasan dalam pengembangan kompetensi ASN perancang, serta belum optimalnya evaluasi terhadap produk hukum daerah dan pengelolaan JDIH. Namun, pada tahun 2024, skor IRH Kabupaten Sidoarjo melonjak menjadi 87,04 dengan kategori A (Sangat Baik). Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan nyata dalam hampir seluruh variabel yang dinilai, termasuk peningkatan pengajuan permohonan harmonisasi regulasi, peningkatan kualitas kompetensi perancang peraturan perundang-undangan, evaluasi produk hukum yang lebih sistematis, serta perbaikan pengelolaan JDIH. Meskipun masih terdapat beberapa catatan kecil untuk penyempurnaan ke depan, capaian tahun 2024 merefleksikan transformasi yang kuat menuju tata kelola hukum yang lebih baik, responsif, dan terintegrasi di Kabupaten Sidoarjo.

c. Indeks Pelayanan Publik

Indikator keberhasilan urusan pemerintahan lainnya adalah Indeks Pelayanan Publik. Nilai IPP Kabupaten Sidoarjo dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dikategorikan baik.

Tabel 2.41
Penilaian Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2020 – 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pelayanan Publik (IPP)	A	A	A	A	4,65 (A)

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, 2025

Indeks pelayanan publik Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan kinerja pemerintahan yang konsisten kuat dan progresif, terutama dalam hal mutu layanan, tata kelola, dan inovasi daerah. Tercatat Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kabupaten Sidoarjo selama lima tahun berturut-turut (2020–2024) selalu berada pada predikat “A”, yang merupakan

kategori tertinggi dalam sistem evaluasi Kementerian PANRB. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas pelayanan publik di Sidoarjo sangat baik dari segi standar operasional, kepatuhan terhadap prinsip pelayanan, serta kepuasan masyarakat. Konsistensi nilai “A” selama lima tahun menunjukkan keberlanjutan mutu layanan lintas periode pemerintahan.

d. Nilai SAKIP

Salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang baik adalah evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah melakukan upaya peningkatan akuntabilitas kinerja meliputi perencanaan, pengukuran kinerja, dan evaluasi kinerja.

Tabel 2.42
Penilaian Evaluasi SAKIP Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2020 – 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Evaluasi SAKIP	BB	-	BB	BB	BB
	78,38	-	78,96	77,50	75,64

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, 2025

Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan akuntabilitas kinerja menuju pemerintahan yang berorientasi hasil, adalah dengan dilakukan suatu evaluasi terhadap implementasi SAKIP, sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Kabupaten Sidoarjo yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dimana evaluasi atas implementasi SAKIP Tahun 2020 masih belum di-*release*, sehingga masih menggunakan angka capaian di tahun 2019 yang memperoleh kategori BB (Sangat Baik). Hasil tersebut masih belum memenuhi target yang ditetapkan pada Renstra Sekretariat Daerah yakni kategori A (Memuaskan).

e. Pengawasan Opini BPK

Selain peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Diklat, diperlukan pula unsur pengawasan internal guna mendisiplinkan aparatur. Sanksi disiplin aparatur mengalami fluktuasi tiap periodenya karena itu, diperlukan optimalisasi pengawasan internal agar aparatur lebih disiplin sehingga mengurangi jumlah sanksi yang harus dijatuhkan. Kebijakan, Pelayanan Publik, dan Koordinasi Perangkat Daerah.

Tabel 2.43
Opini BPK Tahun 2020 – 2024

Indikator	Tahun									
	2020		2021		2022		2023		2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: Inspektorat Kabupaten Sidoarjo, 2025

T : Target; R : Realisasi

Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian maturitas SPIP Kabupaten Sidoarjo mengalami peningkatan dari level berkembang menjadi terdefinisi, ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah memiliki kebijakan dan prosedur pengendalian yang telah dikomunikasikan secara memadai serta telah diimplementasikan pada seluruh kegiatan. Selanjutnya, pada opini BPK atas Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendapatkan penilaian predikat wajar tanpa pengecualian (WTP). Predikat WTP berarti informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern telah dijalankan dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan dalam tataran wajar.

f. Indeks Integritas Nasional

Pelayanan publik harus mendukung dan menerapkan prinsip *good governance* agar risiko terhadap penyelewengan jabatan, korupsi, kolusi, dan nepotisme tidak ada. Korupsi memang menjadi akar masalah yang masih belum sepenuhnya bisa diatasi oleh negara Indonesia, sehingga membutuhkan konsistensi dan komitmen minimal dari tingkat individu. Ketika melaksanakan sebuah program dan segala jenis aktivitas pemerintahan mulai dari perencanaan hingga evaluasi, harus transparan dan akuntabel kepada masyarakat. Untuk melihat kondisi Kabupaten Sidoarjo apakah sudah cukup baik dalam memerangi korupsi, maka dapat menggunakan Indikator Integritas Nasional (IIN). Indeks tersebut digunakan sebagai alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama terkait dengan pencegahan korupsi dan penguatan etika publik. Hasil IIN dipublikasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan mulai berkembang secara cakupan wilayah dan metodologi hingga level kabupaten/kota sejak tahun 2021 yang diikuti Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 2.44
Indeks Integritas Nasional Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2024

Uraian	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Indeks Integritas Nasional	75,9	75,9	75,3	67,91

Sumber: Kanwil Kementerian Hukum dan HAM RI Provinsi Jawa Timur, 2025

Berdasarkan Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kabupaten Sidoarjo mencatat skor yang cukup kompetitif dalam rentang tahun 2021 hingga 2023, namun mengalami penurunan signifikan pada tahun 2024. Pada tahun 2021 dan 2022, Sidoarjo memperoleh skor IIN sebesar 75,9, yang menempatkan daerah ini dalam kategori “Risiko Rendah” menurut klasifikasi resmi KPK. Capaian ini menunjukkan tata kelola pemerintahan daerah yang relatif transparan, memiliki sistem pengawasan internal yang berjalan, serta layanan

publik yang bebas dari pungutan liar secara mayoritas. Skor tersebut masih bertahan pada tahun 2023 dengan angka 75,3, meskipun mulai memperlihatkan tren penurunan yang perlu diwaspadai.

Namun, pada tahun 2024, skor IIN Kabupaten Sidoarjo tercatat sebesar 67,91, yang secara resmi menggeser status integritas daerah ke dalam kategori “Wilayah Rentan Korupsi” (risiko sedang). Penurunan skor ini menjadi indikator dini bahwa terdapat penurunan persepsi dan/atau pengalaman publik maupun pegawai terhadap praktik tata kelola yang berisiko, baik dalam bentuk gratifikasi, penyalahgunaan kewenangan, hingga lemahnya transparansi dalam pelayanan publik.

Kondisi ini menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk secara serius meninjau kembali efektivitas pelaksanaan zona integritas di setiap perangkat daerah, memperkuat sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblower system*), dan meningkatkan kapasitas ASN dalam membangun budaya kerja yang bersih, jujur, dan akuntabel. Selain itu, keterlibatan masyarakat sipil dan pengawasan berbasis teknologi perlu ditingkatkan untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap integritas birokrasi daerah. Sebagai tindak lanjut, rekomendasi dari hasil SPI perlu diadopsi dalam penyusunan strategi reformasi birokrasi dan perencanaan pembangunan jangka menengah, serta dijadikan dasar evaluasi dalam dokumen LKPJ maupun perbaikan Layanan Publik Berbasis HAM.

2.1.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Pembangunan hukum diarahkan pada terwujudnya supremasi hukum yang berkeadilan, berkepastian, bermanfaat dan berlandaskan hak asasi manusia yang mengemban amanat rakyat.

a. Indek Rasa Aman

Ketenteraman masyarakat dapat diukur menggunakan indeks rasa aman. Indeks rasa aman Kabupaten Sidoarjo semakin meningkat dari tahun

ke tahun. Puncaknya indeks rasa aman dirasakan pada tahun 2024 dengan indeks rasa aman sebesar 83,03%.

Gambar 2.44
Perkembangan Indeks Rasa Aman
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 – 2024



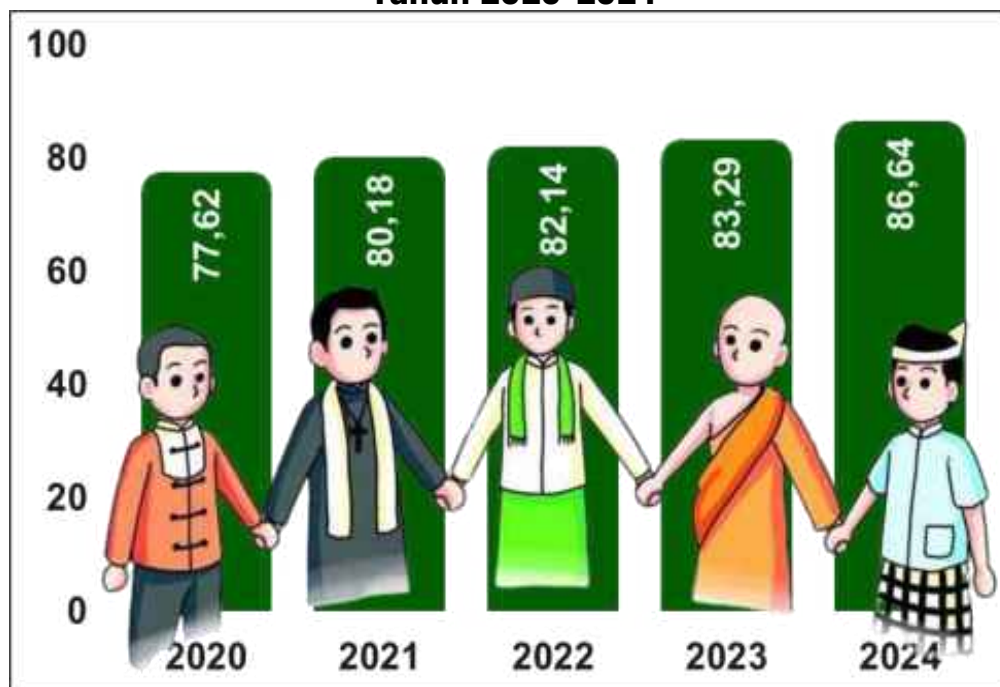
Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo, 2025

Pada gambar diatas perkembangan Indeks Rasa Aman Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2020 – 2024 mengalami peningkatan Rasa Aman, hal ini untuk menciptakan daya saing daerah yang tinggi. Pada tahun 2020 sebesar 76,03 persen, pada tahun 2021 mengalami kenaikan 0,57 persen sehingga menjadi 76,60 persen, tren kenaikan rasa aman terus terjadi pada tahun 2023 sebesar 82.09 persen. Pada tahun 2024 kenaikan Indeks Rasa Aman Kabupaten Sidoarjo meningkat menjadi 83.03 persen. Hal ini adalah upaya pemerintah Kabupaten Sidoarjo agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat Sidoarjo.

b. Indeks Toleransi

Indeks toleransi adalah ukuran tingkat toleransi masyarakat terhadap keberagaman. Capaian indeks toleransi Kabupaten Sidoarjo digambarkan sebagai berikut.

Gambar 2.45
Perkembangan Indeks Toleransi Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo, 2025

Rasa aman dan tentram di lingkungan masyarakat dapat tercipta karena rasa saling memiliki sikap toleransi antar sesama warga. Tanpa terdapat gesekan yang menyinggung SARA. Sebab yang demikian merupakan Hak Asasi Manusia yang paling dasar. Di Kabupaten Sidoarjo, perkembangan indeks toleransi selalu mengalami kenaikan pada setiap tahunnya. Tahun 2020 tercatat indeks toleransi sebesar 77,62 persen, dan terus meningkat pada tahun 2024 menjadi 86,64 persen. Tercatat dalam 5 tahun terakhir indeks toleransi mengalami kenaikan sebesar 9,02 persen. Tentu ini merupakan bentuk dari kesadaran masyarakat Kabupaten Sidoarjo terhadap pentingnya menjaga dan menerima setiap perbedaan, baik dalam agama, suku, ras bahkan terhadap perbedaan pandangan politik.

c. Persentase Capaian Aksi HAM

Pelayanan publik pada hakikatnya juga harus memperhatikan aspek Hak Asasi Manusia (HAM). Sebagai negara yang menjunjung tinggi HAM, Kabupaten Sidoarjo perlu mendukung realisasi nyata bahwa akan melindungi

HAM setiap penduduk Kabupaten Sidoarjo. Indikator untuk menilai kegiatan mendukung HAM dilihat dari persentase capaian aksi HAM. Indikator tersebut digunakan untuk mengukur seberapa jauh pemerintah daerah melaksanakan rencana aksi Hak Asasi Manusia (RANHAM) sesuai dengan target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, khususnya Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham RI).

Tabel 2.45
Persentase Capaian Aksi HAM Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2021-2024

Uraian	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Capaian Aksi HAM	60,98%	100%	100%	98,8%

Sumber: Kanwil Kementerian Hukum dan HAM RI Provinsi Jawa Timur, 2025

Data Persentase Capaian Aksi HAM Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2021 hingga 2024 menunjukkan tren progresif dan sangat positif, mencerminkan peningkatan komitmen dan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan agenda nasional pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM). Pada tahun 2021, capaian masih berada di angka 60,98%, yang kemungkinan disebabkan oleh masa transisi implementasi RANHAM 2020–2024, serta belum optimalnya pelaporan dan realisasi aksi HAM di level perangkat daerah. Namun sejak tahun 2022, Sidoarjo berhasil mencapai capaian 100%, mempertahankannya hingga 2023, dan tetap sangat tinggi di 2024 dengan nilai 98,8%. Angka-angka ini menunjukkan bahwa hampir seluruh aksi HAM yang direncanakan dalam dokumen nasional dan panduan dari Kemenkumham telah dilaksanakan secara tuntas oleh pemerintah daerah.

Capaian ini juga menandakan bahwa Kabupaten Sidoarjo telah melibatkan perangkat daerah lintas sektor dalam pelaksanaan Aksi HAM; berhasil membangun sistem pelaporan dan monitoring yang tertib; serta memperkuat akses masyarakat terhadap layanan berbasis HAM, seperti bantuan hukum, inklusi disabilitas, dokumen kependudukan, dan layanan publik nondiskriminatif. Keberhasilan ini memberi peluang besar bagi

Kabupaten Sidoarjo untuk meraih predikat sebagai Kabupaten Peduli HAM dan juga meningkatkan posisi dalam berbagai evaluasi nasional, termasuk Anugerah RANHAM dan penilaian reformasi hukum. Tantangan ke depan adalah mempertahankan komitmen lintas tahun dan memperluas pelibatan masyarakat sipil untuk menjaga keberlanjutan pemajuan HAM di tingkat lokal.

2.1.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Budaya Gentar Kawasan

Aspek ini menggambarkan ketangguhan suatu daerah memperjuangkan kepentingan daerah di berbagai bidang, mengembangkan dan memelihara hubungan antar daerah yang konstruktif serta meningkatkan kepemimpinan dan pengaruh daerah di wilayah sekitarnya maupun nasional.

a. Indeks Daya Saing Daerah

Gambar 2.46
Perkembangan Indeks Daya Saing Daerah
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 – 2024



Sumber: Badan Riset dan Inovasi Daerah, 2025

Indeks daya saing daerah Kabupaten Sidoarjo di tahun 2024 sebesar 3,86 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan periode tahun 2023. Peningkatan ini ditopang pada komposit kapasitas inovasi yang menggambarkan kemampuan daerah dalam menciptakan inovasi, termasuk

penelitian dan pengembangan, serta kemampuan untuk mengkomersialkan inovasi (Pilar 12) serta komposit adopsi teknologi (Pilar 10).

2.1.4.4 Kinerja Urusan Pemerintah Daerah

a. Urusan Wajib

1. Pendidikan

a) Indeks Capaian SPM Pendidikan

Indeks Capaian SPM Pendidikan merupakan indikator penting dalam menilai kinerja pemerintah daerah dalam menjamin terpenuhinya layanan dasar pendidikan bagi seluruh masyarakat. Indeks ini mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah telah memenuhi standar minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam hal penyelenggaraan pendidikan dasar yang berkualitas. Capaian IPM untuk tahun 2024 tercatat sebesar 84,98, yang masuk dalam kategori "tuntas madya." Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sudah ada pencapaian yang cukup signifikan, masih terdapat ruang perbaikan untuk pelayanan yang optimal dan inklusif.

b) Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi sekolah diartikan sebagai jumlah anak yang terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan formal maupun nonformal. Gambaran angka partisipasi sekolah Kabupaten Sidoarjo ditampilkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.46
Angka Partisipasi Sekolah

Indikator	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan	-	86,01	84,57	83,04
Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	-	99,75	99,67	99,67
Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	-	10,91	15,68	14,91

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo, 2025



Jumlah anak usia 5–6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) merepresentasikan sejauh mana anak-anak usia dini telah terlibat dalam pendidikan formal sebelum masuk jenjang sekolah dasar. Berdasarkan data capaian terakhir tahun 2024, partisipasi anak pada kelompok usia ini telah mencapai angka 83,04% dan ditargetkan naik tetap konsisten hingga tahun 2029. Capaian ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan usia dini telah terbentuk dengan baik.

Indikator kinerja pembangunan daerah untuk angka partisipasi sekolah anak usia 7-15 tahun dalam pendidikan dasar menunjukkan capaian yang sangat tinggi dengan target peningkatan yang minimal namun konsisten. Kondisi awal pada tahun 2024 tercatat sebesar 99,67%. Target pada tahun-tahun berikutnya tetap dipertahankan di 99,67% pada tahun 2025, kemudian meningkat menjadi 99,84% pada tahun 2026, 99,86% pada tahun 2027-2028, dan mencapai 99,87% pada tahun 2029-2030. Capaian yang mendekati universal ini mencerminkan keberhasilan program wajib belajar 9 tahun dan komitmen pemerintah daerah dalam mempertahankan akses pendidikan dasar yang merata bagi seluruh anak usia sekolah.

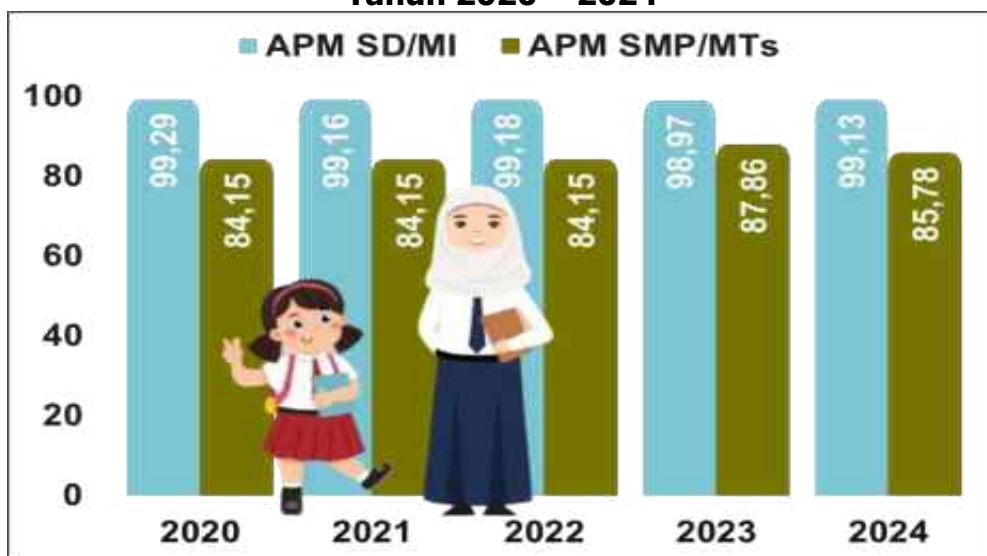
Angka partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam pendidikan kesetaraan menunjukkan peningkatan yang bertahap dari tahun ke tahun. Kondisi awal pada tahun 2024 tercatat sebesar 14,91%. Target pada tahun-tahun berikutnya ditetapkan meningkat secara inkremental, yaitu 14,91% pada tahun 2025, 14,92% pada tahun 2026, 14,93% pada tahun 2027, 14,94% pada tahun 2028, 14,95% pada tahun 2029, dan mencapai 14,96% pada tahun 2030. Tren peningkatan ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan kesempatan kedua bagi warga putus sekolah melalui program pendidikan kesetaraan Paket A.

c) Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. APM merupakan

indikator yang melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar usia siswa di jenjang tersebut. Capaian realisasi nilai perkembangan APM Kabupaten Sidoarjo tahun 2020 - 2024 disajikan pada gambar sebagai berikut.

Gambar 2.47
APM Kabupaten Sidoarjo Menurut Jenjang Pendidikan
Tahun 2020 – 2024



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo, 2025

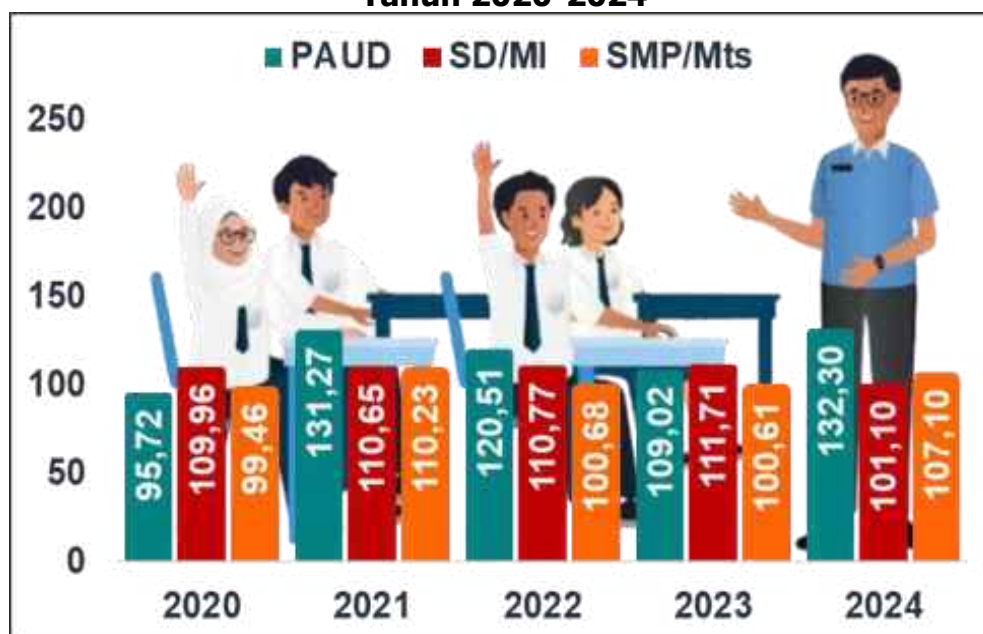
APM tercatat Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2024 untuk tingkat SD/MI sebesar 99,13, jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun 2023. Sedangkan untuk jenjang SMP/MTs tercatat 85,78 pada tahun 2024 yang juga turun sebesar 2,08 jika dibandingkan dengan data tahun 2023.

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang menempuh pendidikan di jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK ini berfungsi untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan sekaligus merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

APK pada tahun 2024 tercatat untuk jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebesar 132,30%. Sementara jenjang Sekolah Dasar (SD

sederajat) sebesar 101,10%, sedangkan untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP sederajat) sebesar 107,10% sebagaimana tercantum pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.48
APK Kabupaten Sidoarjo Menurut Jenjang Pendidikan
Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo, 2025

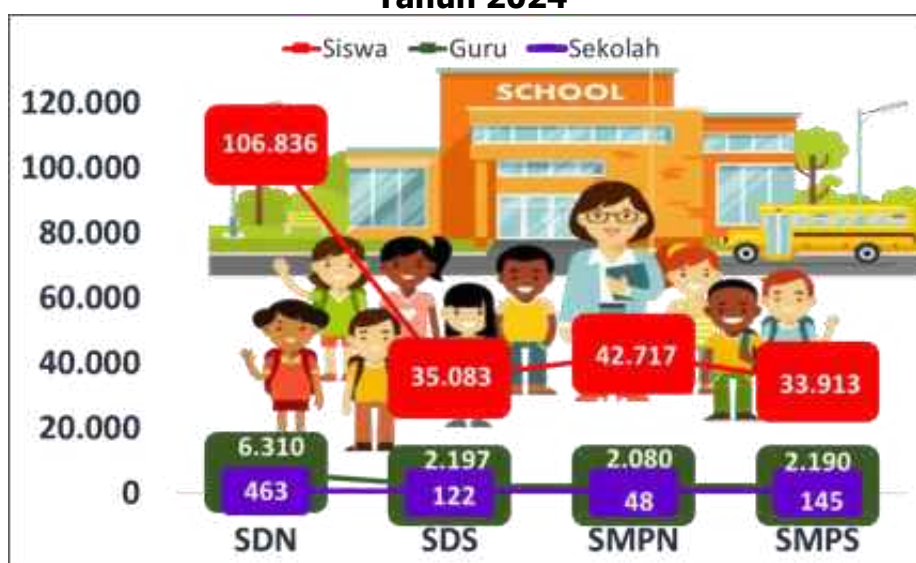
Berdasarkan data Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Sidoarjo menurut jenjang pendidikan dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat bahwa akses pendidikan mengalami peningkatan secara umum, meskipun dengan dinamika yang bervariasi antar jenjang. APK untuk jenjang PAUD mengalami peningkatan signifikan dari 95,72 pada tahun 2020 menjadi 132,30 pada tahun 2024, yang menandakan keberhasilan program perluasan akses pendidikan anak usia dini serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan di usia dini. Untuk jenjang SD/MI, APK tetap berada di atas angka 99 sepanjang periode tersebut, bahkan mencapai puncaknya pada 2023 dengan 111,71. Angka ini menunjukkan bahwa hampir seluruh anak usia SD di Sidoarjo bahkan melampaui angka populasi usia sekolah dasar, yang bisa terjadi karena

adanya peserta didik dari kelompok usia yang lebih tua atau lebih muda. Hal ini mencerminkan cakupan layanan pendidikan dasar yang sangat luas dan merata di wilayah tersebut.

Sementara itu, jenjang SMP/MTs juga menunjukkan capaian positif meskipun dengan fluktuasi. APK sempat berada di atas 110 pada tahun 2021, 2022 dan 2023, namun mengalami penurunan menjadi 107,10 di tahun 2024. Meski angka ini tetap tinggi, penurunan ini dapat menjadi sinyal bagi pemerintah daerah untuk meninjau kembali hambatan partisipasi pendidikan tingkat menengah pertama, seperti faktor ekonomi, jarak, atau motivasi siswa. Secara keseluruhan, tren APK yang tinggi dan relatif stabil menunjukkan bahwa Kabupaten Sidoarjo berhasil menyediakan akses pendidikan yang luas.

Selanjutnya, ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan juga merupakan faktor penting dalam upaya pemerataan dan perluasan pendidikan, baik dari ketersediaan sekolah, kelas ataupun guru. Kekurangan ketersediaan ruang kelas dan guru pengajar membutuhkan perhatian untuk memperlancar proses belajar mengajar pada tingkat pendidikan dasar.

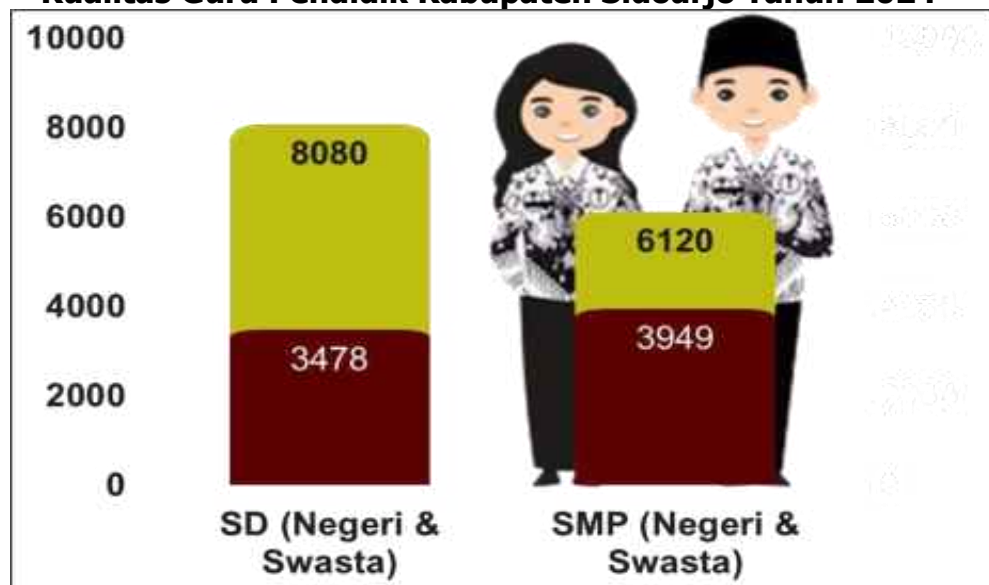
Gambar 2.49
Jumlah Murid, Guru dan Sekolah Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2024



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo, 2025

Berdasarkan data di atas, ada kesenjangan yang cukup lebar antara jumlah siswa SD Negeri dengan SD Swasta yaitu selisih sebesar 71.753 siswa. Hal hal tersebut selaras dimana SD Negeri lebih besar daripada jumlah sekolah SD Swasta. Dan pada jumlah guru, guru SD Swasta lebih kecil daripada guru SD Negeri. Sementara pada jenjang pendidikan SMP, dimana jumlah sekolah dan guru SMP Negeri lebih sedikit jika dibanding dengan Sekolah dan Guru SMP Swasta namun SMP Negeri memiliki jumlah siswa yang lebih banyak dibanding jumlah siswa di SMP Swasta dengan selisih 8.804 siswa.

Gambar 2.50
Kualitas Guru Pendidik Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024



Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo, 2025

Persentase Guru/Pendidik yang telah bersertifikasi merupakan salah satu indikator kinerja untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing. Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan guru/tenaga pendidik yang bersertifikasi profesi mengalami peningkatan yang berdampak pada layanan mutu pendidikan yang berkualitas. Jumlah guru/pendidik Sekolah Dasar (Negeri dan Swasta) yang telah bersertifikasi dan memiliki pendidikan minimal D-IV atau S1 sebanyak 3.478 guru dari total Guru SD 8.080 orang atau sebesar 43,90%.

Sedangkan untuk jenjang SMP Jumlah guru/pendidik Sekolah Menengah Pertama (Negeri dan Swasta) yang telah bersertifikasi dan memiliki pendidikan minimal D-IV atau S1 sebanyak 3.949 guru dari total Guru SMP 6.120 orang atau sebesar 64,52%

Selain tenaga pendidik yang berkualitas, salah satu penentu kualitas pendidikan adalah sarana prasarana yang memadai. Jumlah Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 464 sekolah dengan jumlah ruang kelas sebanyak 4.131 ruang. Dari total jumlah tersebut, ruang kelas dalam kondisi baik sebanyak 2.472 ruang, rusak ringan 1.217 ruang, rusak sedang 260 ruang, dan rusak berat sebanyak 182 ruang. Untuk mengatasi kerusakan yang terjadi pada ruang kelas, Dinas Pendidikan pada tahun 2024 ini telah merencanakan perbaikan ruang kelas rusak berat sebanyak 182 ruangan. Sedangkan jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) sebanyak 47 sekolah dengan ruang kelas total berjumlah 1.264 ruangan. Dari jumlah tersebut, ruang kelas dengan kondisi baik berjumlah 804, rusak ringan 313 ruang, rusak sedang 82 ruang, dan rusak berat sebanyak 65 ruang.

Gambar 2.51
Kondisi Sarana dan Prasarana Pendidikan
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024



Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, 2024

2. Kesehatan

a) Angka Kematian Balita

Angka Kematian Balita (AKBa) merupakan indikator penting dalam mengukur derajat kesehatan masyarakat, khususnya pada kelompok usia anak di bawah lima tahun (0–59 bulan). Indikator ini dihitung berdasarkan jumlah kematian balita pada suatu tahun tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup di tahun yang sama, kemudian dikalikan 1.000 sehingga hasilnya dinyatakan dalam satuan per 1.000 kelahiran hidup.

Gambar 2.52
Angka Kematian Balita (AKBa)
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 – 2024



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, 2025

Dalam klasifikasinya, nilai AKBa dikategorikan menjadi sangat tinggi (>40), tinggi ($21-40$), sedang ($10-20$), dan rendah (<10). Berdasarkan data capaian dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat penurunan yang cukup signifikan: dari 7,5 pada 2020 menjadi 7,3 pada 2021, 7,1 pada 2022, 5,3 pada 2023, hingga mencapai 5,1 pada 2024. Nilai ini menunjukkan bahwa angka kematian balita telah berada dalam kategori rendah, menandakan adanya kemajuan dalam sistem pelayanan kesehatan dasar dan intervensi terhadap faktor-faktor penyebab kematian balita.

b) Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Indikator Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis merupakan proporsi jumlah penerima pemeriksaan gratis pada semua kelompok usia terhadap jumlah penduduk. Pada dokumen perencanaan jangka menengah ini target yang ditetapkan adalah 36% di tahun 2025 dan meningkat menjadi 70 di tahun 2029.

c) Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesehatan

Secara umum, capaian kinerja urusan kesehatan Kabupaten Sidoarjo selengkapnya dapat dilihat pada tabel.

Tabel 2.47
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesehatan

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	100,6	99,2	100,4	101,4	102,3
Persentase Hipertensi Dalam Pengendalian	-	-	-	86	95
Rasio puskesmas terhadap jumlah penduduk	-	1:89.290	1:87.237	1:79.638	1:70.000

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, 2025

Mengacu pada tabel cakupan imunisasi pada bayi lengkap meningkat di setiap tahunnya dengan capaian terakhir sebesar 102,3. Selanjutnya untuk realisasi persentase penyakit hipertensi dalam pengendalian meningkat dari 86% menjadi 95% di tahun 2024. Sementara itu, untuk rasio puskesmas terhadap jumlah penduduk terus membaik karena penduduk yang dilayani oleh 1 puskesmas semakin kecil yang artinya pelayanan puskesmas pada penduduk semakin merata.

Guna memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Sidoarjo memiliki sarana dan prasarana Kesehatan tahun 2024 antara lain Rumah Sakit berjumlah 26, Rumah sakit bersalin berjumlah 5, Poliklinik berjumlah 111, Puskesmas berjumlah 33, Puskesmas Pembantu berjumlah 52.



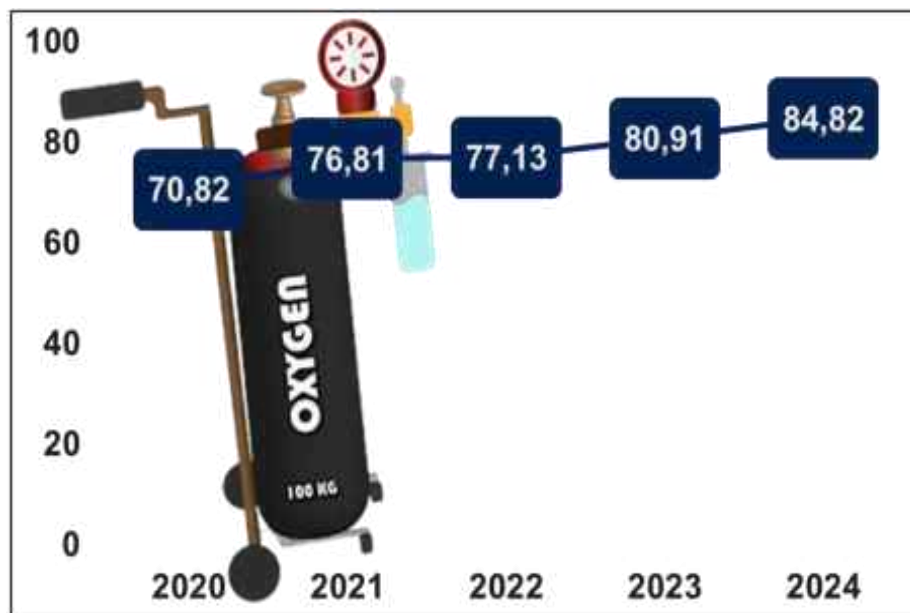
Tabel 2.48
Jumlah Sarana Prasarana Kesehatan Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020-2024

KECAMATAN	Jumlah Desa/Kelurahan yang memiliki Sarana Kesehatan Menurut Kecamatan																						
	Rumah Sakit					Rumah Sakit Bersalin					Poliklinik					Puskesmas			Puskesmas Pembantu				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Tarik	1	1	1	1	1		1				3	5	6	6	4	1	2	2	3	3	2	2	2
Prambon	1	1	1	1	1	1					8	8	8	5	7	1	1	1	3	3	1	1	3
Krembung											2	1	2	3	2	1	1	1	3	3	1	1	3
Porong	1	1	1	1	1						4	5	3	6	5	2	2	2	3	3	2	2	3
Jabon											4	4	1	1	4	1	1	1	5	3	1	1	4
Tanggulangun							1				2	4	3	3	4	1	1	1	2	3	1	1	3
Candi			1	1	1						4	6	10	11	4	1	2	3	5	4	2	2	4
Tulangan	1	1	1	1	1	1	1				8	8	9	9	9	2	2	2	4	4	2	2	3
Wonoayu	-										2	2	2	2	2	1	1	2	4	4	2	2	4
Sukodono	2	2	3	3	2						3	7	7	9	6	1	1	1	3	3	1	1	3
Sidoarjo	4	5	5	5	6	1	1	1	1		12	11	40	44	11	3	3	4	2	3	3	4	1
Buduran								1	1		8	6	13	11	4	1	1	1	4	4	1	1	4
Sedati	2	2	1	1	1	1	1				4	3	13	10	3	1	1	1	2	1	1	1	2
Waru	3	3	4	4	3	2	4	1	1	2	8	9	26	26	10	2	2	3	4	3	3	3	3
Gedangan	1	1			1	1		1	1		9	6	16	16	6	3	3	3	2	2	2	2	2
Taman	3	6	2	2	4	2	1	3	3	1	14	13	19	18	13	3	2	2	4	5	2	2	4
Krian	2	3	3	3	3					1	12	11	13	13	13	2	2	2	3	3	2	2	2
Balong Bendo	1	1	1	1	1	2	1			1	3	4	2	2	4	1		1	3	3	1	1	2
TOTAL	22	27	24	24	26	11	11	7	7	5	110	113	193	195	111	28	28	33	59	57	30	31	52

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo, 2025

d) Indeks Infrastruktur Kesehatan

Gambar 2.53
Indeks Infrastruktur Kesehatan Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2020 – 2024



Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo, 2025

Pada tahun 2020, indeks tercatat sebesar 70,82 dan terus meningkat setiap tahunnya hingga mencapai 84,82 pada tahun 2024. Kenaikan paling signifikan terjadi antara tahun 2022 dan 2023, yaitu dari 77,13 menjadi 80,91, yang mengindikasikan adanya penguatan signifikan dalam penyediaan sarana dan prasarana kesehatan seperti fasilitas rawat inap, ketersediaan alat kesehatan, oksigen medis, dan layanan pendukung lainnya. Tren ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memperbaiki akses dan mutu layanan kesehatan, termasuk kemungkinan respon terhadap pandemi COVID-19 yang mendorong percepatan penguatan infrastruktur. Capaian tahun 2024 sebesar 84,82 menunjukkan bahwa sebagian besar indikator pendukung sudah berada dalam kondisi baik, namun masih menyisakan ruang untuk perbaikan lebih lanjut agar dapat mencapai standar ideal. Indeks ini menjadi pondasi penting dalam mendukung penurunan angka stunting, peningkatan cakupan imunisasi, dan percepatan pelayanan kesehatan ibu dan anak secara menyeluruh.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pada urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang akan dijelaskan Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air dan indikator-indikator kinerja lainnya.

a) Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air.

Indeks infrastruktur pekerjaan umum bina marga dan sumberdaya air merupakan indeks komposit pendukung pengukuran Indeks Infrastruktur Daerah. Indeks infrastruktur pekerjaan umum bina marga dan sumberdaya air terdiri atas komposit Indeks Jaringan Jalan serta Indeks Irigasi dan Indeks Drainase. Indeks infrastruktur pekerjaan umum bina marga dan sumberdaya air digunakan untuk melihat kemajuan daerah dalam peningkatan ketersediaan dan pemenuhan kebutuhan air irigasi, penurunan genangan/banjir dan peningkatan ketersediaan jalan mantap. Capaian infrastruktur pekerjaan umum bina marga dan sumberdaya air 2020 hingga 2024 sebagai berikut.

Tabel 2.49
Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020-2024

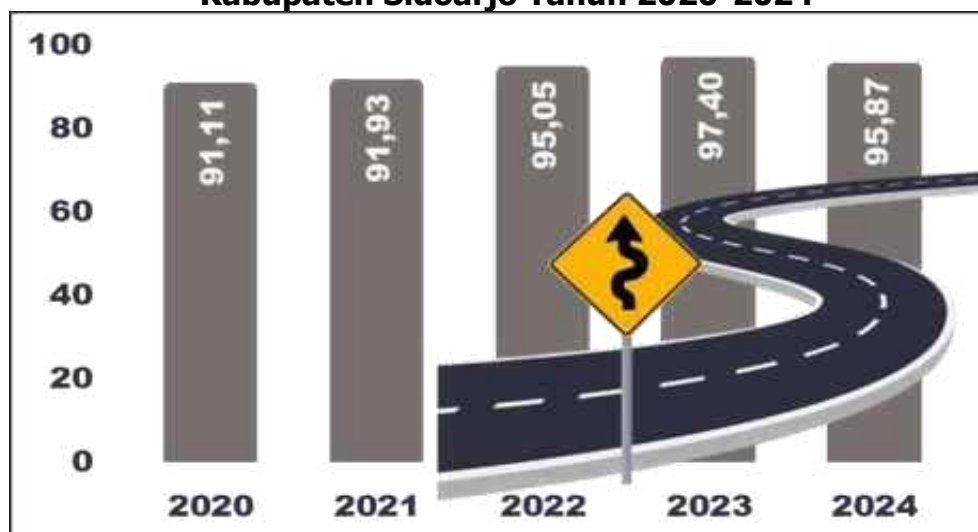
Uraian	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air	Indeks	0,472	0,481	0,499	0,509	0,822

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo, 2025

Capaian indeks infrastruktur pekerjaan umum bina marga dan sumberdaya air tahun 2020 hingga 2024 terus menunjukkan peningkatan yang signifikan mencapai 0,822. Hasil ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus berupaya membangun jalan-jalan mantap yang dapat mendukung kegiatan ekonomi sehingga mampu mengangkat tingkat perekonomian. Selain itu, pemerintah daerah juga terus berupaya melakukan pengerukan sungai untuk menciptakan sistem drainase yang baik dan menghindari terjadinya banjir.

Jalan adalah infrastruktur yang mendasar dalam segala aktivitas pemenuhan kebutuhan manusia. Kabupaten Sidoarjo berupaya maksimal dalam pengembangan jaringan jalan sehingga pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat segera terlaksana. Jalan dianggap dalam kondisi baik jika masih dapat dimanfaatkan secara optimal dan belum membutuhkan perbaikan yang mendasar. Untuk meningkatkan dan mempertahankan infrastruktur jalan dalam kondisi baik sebagai pendukung sarana transportasi dan peningkatan aksesibilitas kawasan perlu dilakukan upaya pembangunan dan pemeliharaan jalan Kabupaten serta mengoptimalkan jalan yang mengalami *bottle-neck* di Kabupaten Sidoarjo yang terintegrasi dengan jaringan jalan regional dan nasional. Salah satu upaya pemerintah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal atas pembangunan fisik penunjang perekonomian adalah melakukan pemeliharaan kondisi jalan dalam kondisi mantap. Perkembangan jalan mantap Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat pada gambar berikut.

2.54 Perkembangan Jalan Mantap (Kondisi Baik dan Sedang) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020-2024

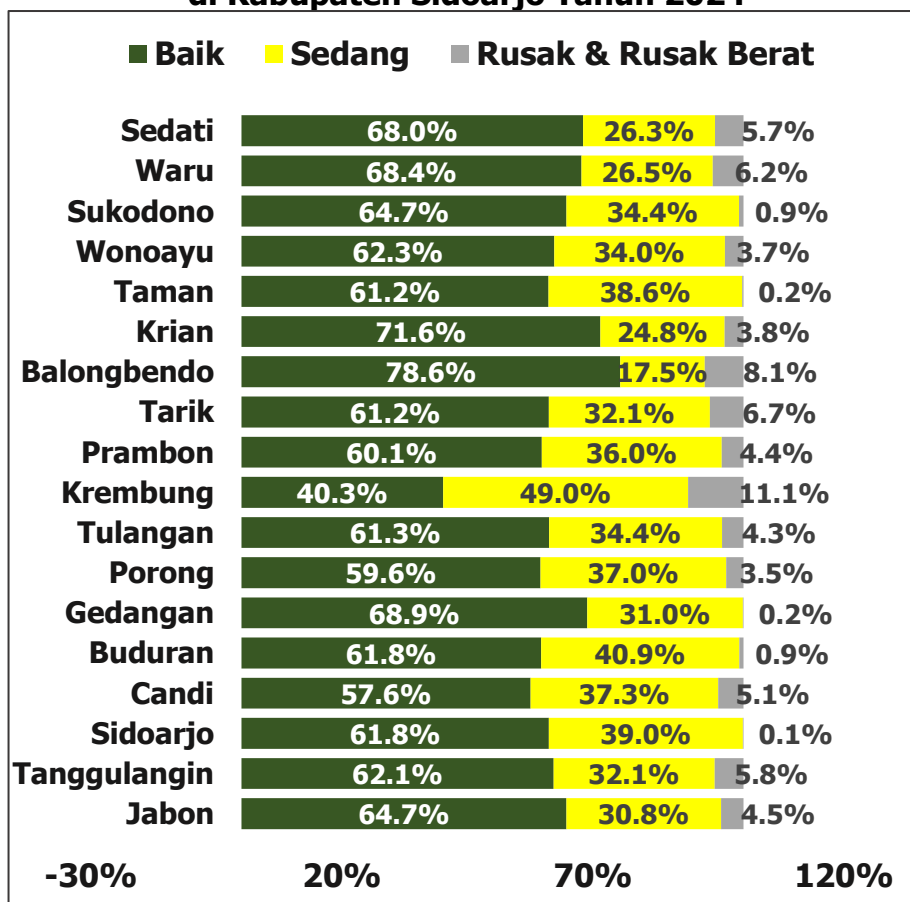


Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo, 2025

Berdasarkan gambar di atas diperoleh persentase bahwa kondisi jalan mantap Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2024 sebesar 95,87 persen.

Capaian tersebut lebih rendah dari realisasi tahun 2023 yang sebesar 97,40 persen. Kenaikan ini merupakan bentuk dari keseriusan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam mengembangkan fasilitas jalan yang ada di Kabupaten Sidoarjo guna menunjang perekonomian yang baik. Gambaran data perbandingan kondisi jalan di setiap kecamatan di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan variasi yang cukup mencolok antara wilayah yang memiliki proporsi jalan dalam kondisi baik dengan wilayah yang masih didominasi oleh jalan rusak atau rusak berat. Kecamatan Balongbendo mencatat persentase tertinggi untuk kondisi jalan baik sebesar 78,6%, menunjukkan kualitas infrastruktur yang sangat baik. Disusul oleh Krian (71,6%), Gedangan (68,9%), dan Sedati (68,0%) yang juga menunjukkan dominasi jalan dengan kondisi baik.

Gambar 2.55
Perbandingan Kondisi Jalan Tiap Kecamatan
di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo, 2025

Gambaran lainnya Krembung menjadi kecamatan dengan kondisi paling memprihatinkan, di mana hanya 40,3% jalan yang dalam kondisi baik, sementara 49,0% masuk kategori sedang dan 11,1% sudah dalam kondisi rusak atau rusak berat — tertinggi dibanding kecamatan lain. Buduran dan Sidoarjo juga memiliki proporsi kondisi jalan sedang dan rusak yang cukup tinggi (masing-masing 40,9% dan 39,0%). Kecamatan seperti Tarik, Prambon, dan Porong juga menunjukkan tingkat kerusakan sedang dan berat yang cukup signifikan, meskipun masih memiliki lebih dari 59% jalan dalam kondisi baik. Temuan ini menandakan adanya ketimpangan antar wilayah dalam hal infrastruktur jalan, yang berpotensi memengaruhi aksesibilitas layanan publik, distribusi logistik, dan kelancaran aktivitas ekonomi.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Indikator kinerja yang ada pada Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang adalah Indeks Infrastruktur Keciptakarya. Indeks infrastruktur keciptakarya merupakan indeks komposit pendukung pengukuran Indeks Infrastruktur Daerah. Indeks infrastruktur keciptakarya merupakan indikator komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat kualitas infrastruktur di bidang cipta karya, yang mencakup berbagai aspek seperti bangunan gedung, jalan lingkungan, drainase, air minum, persampahan, air limbah, proteksi kebakaran, dan ruang terbuka hijau. Capaian indeks infrastruktur keciptakarya tahun 2020 hingga 2024 sebagai berikut.

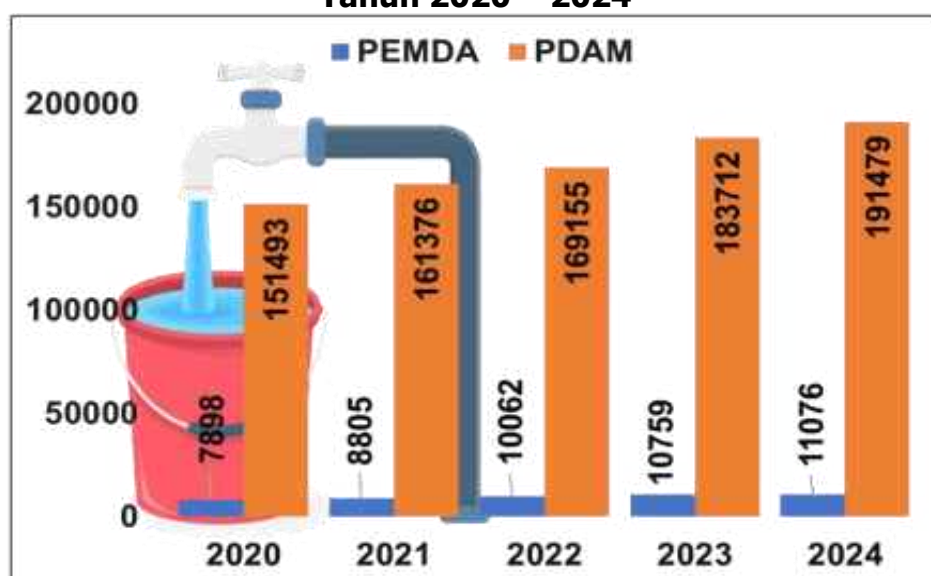
Tabel 2.50
Indeks Infrastruktur Keciptakarya Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2020-2024

Uraian	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Infrastruktur Keciptakarya	Indeks	0,210	0,218	0,221	0,248	0,246

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo, 2025

Capaian indeks infrastruktur keciptakarya tahun 2020 hingga 2024 terus menunjukkan peningkatan yang signifikan mencapai 0,246 di tahun 2024. Hasil ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus berupaya membangun dan memperbaiki jalan lingkungan dan drainase. Selain itu, pemerintah daerah juga terus berupaya mengelola persampahan dan memperbanyak ruang terbuka hijau melalui program unggulan bupati dan wakil bupati.

Gambar 2.56
Perkembangan Kecukupan Kebutuhan Air Bersih
Tahun 2020 – 2024



Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo, 2025

Data ini mengungkapkan bahwa kontribusi utama pemenuhan air bersih berasal dari PDAM, yang secara konsisten mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 2020, PDAM melayani 151.493 sambungan pelanggan, dan jumlah ini terus naik hingga mencapai 191.479 pada tahun 2024. Pertumbuhan ini mencerminkan peningkatan cakupan layanan PDAM serta kemungkinan adanya ekspansi jaringan pipa dan peningkatan kapasitas produksi air bersih. Sementara itu, kontribusi PEMDA relatif kecil, dengan angka paling rendah pada tahun 2020 sebanyak 7.898 sambungan, lalu meningkat secara perlahan dari tahun ke tahun. Meski skalanya jauh lebih kecil dibandingkan PDAM, peran PEMDA tetap penting, terutama untuk

menjangkau wilayah yang belum terlayani oleh sistem PDAM, seperti desa terpencil atau kawasan rawan air bersih.

Penanganan luasan kawasan kumuh Kabupaten Sidoarjo sampai dengan tahun 2024 digambarkan sebagai berikut.

Gambar 2.57
Luasan Kawasan Kumuh Tahun 2020 – 2024



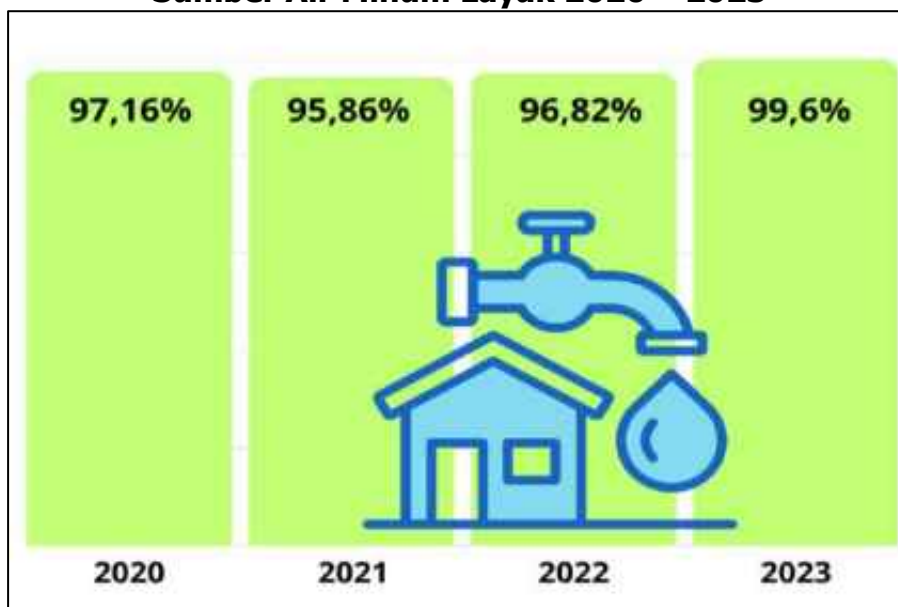
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo, 2025

Sampai dengan tahun 2024 Luasan Kawasan Kumuh Kabupaten Sidoarjo yang telah tertangani yakni 26,65 Ha sehingga menyisakan 126,86 Ha dari capaian tahun sebelumnya sebesar 153,11 Ha. Dengan capaian tersebut maka luas kawasan tidak kumuh dengan baseline 276,62 Ha adalah seluas 45,86%. Aspek infrastruktur memuat penjelasan mengenai ketersediaan infrastruktur yang layak bagi penduduk Kabupaten Sidoarjo. Keberadaan hunian yang layak menjadikan penduduk tidak khawatir tentang kebutuhan primer mereka untuk ditinggali setiap hari. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah berusaha meningkatkan akses hunian yang layak bagi tiap rumah tangga. Baik yang berupa perumahan, rumah pribadi, apartemen, dan jenis tempat tinggal lainnya.

Bagian penting dari akses fasilitas bagi rumah tangga selain hunian yang layak dan tidak kumuh adalah akses terhadap air minum. Berbeda

dengan jenis air lainnya, air minum menjadi bagian penting karena termasuk dalam kebutuhan primer memenuhi gizi tiap individu. Setiap hari pasti manusia akan memerlukan air minum untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Untuk mendapatkan air minum, sumber yang digunakan tentu bermacam-macam, mulai dari mengolah sendiri dengan cara memasak, membeli air galon, dari mata air, dan sumber-sumber air lainnya. Namun pemenuhan air minum tersebut perlu diperhatikan karena untuk meninjau apakah air yang dikonsumsi oleh masyarakat Kabupaten Sidoarjo dapat dikatakan layak atau tidak untuk dikonsumsi.

Gambar 2.58
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap
Sumber Air Minum Layak 2020 – 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2025

Tingkat akses rumah tangga terhadap sumber air minum layak di Kabupaten Sidoarjo selama periode 2020 hingga 2023 menunjukkan tren yang sangat positif. Pada tahun 2020, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak tercatat sebesar 97,16%. Meskipun terjadi sedikit penurunan pada tahun 2021 menjadi 95,86%, kondisi ini dapat dikaitkan dengan dampak pandemi COVID-19 yang mempengaruhi penyediaan infrastruktur dasar. Namun, pada tahun 2022, akses tersebut kembali meningkat menjadi 96,82%, menunjukkan adanya upaya perbaikan

dan pemulihan layanan dasar oleh pemerintah daerah. Puncaknya terjadi pada tahun 2023, di mana persentase akses mencapai 99,6%, mendekati cakupan universal. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan program pembangunan air minum layak, baik melalui pengembangan jaringan perpipaan, optimalisasi pelayanan PDAM, maupun kolaborasi lintas sektor. Meski demikian, keberlanjutan capaian tersebut perlu dijaga dengan memastikan kualitas layanan dan memperhatikan wilayah-wilayah kecil yang masih belum terakses penuh. Strategi berbasis komunitas dan pendekatan pembangunan berkelanjutan menjadi kunci untuk mempertahankan serta meningkatkan akses air minum layak di masa mendatang

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat disebutkan bahwa perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis di mana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. Dalam kaitan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berusaha mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat melalui beberapa kegiatan antara lain indeks ketahanan daerah, penegakan perda, penyelesaian pelanggaran K3, pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta upaya-upaya lainnya terkait pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban serta peningkatan kesadaran dan kepatuhan warga masyarakat.

a) Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPPKU)

Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPPKU) merupakan indeks yang dipergunakan untuk mengukur kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum (Trantibum),

dinyatakan dalam bentuk skor berdasarkan aspek pencegahan, penindakan, dan pemulihan. Target yang ditetapkan untuk indikator IPPKU adalah 80,05 di tahun 2025 sampai dengan 81,15 di tahun 2029.

b) Indeks Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat (IMSPM)

Indeks Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat (IMSPM) merupakan indeks yang dipergunakan untuk mengukur kualitas manajemen Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam perlindungan masyarakat. Target yang ditetapkan untuk indikator IMSPM adalah 80,15 di tahun 2025 sampai dengan 81,50 di tahun 2029.

c) *Response Time* Penanganan Kebakaran

Respon time penanganan kebakaran adalah waktu yang dibutuhkan petugas pemadam kebakaran untuk tiba di lokasi kejadian setelah menerima laporan kebakaran. Capaian *response time* dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 2.59
Kebakaran Yang Ditangani Dalam Waktu Tanggap
(*Response Time*) Tahun 2020 – 2024



Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo, 2025

Response time penanganan kebakaran di Tahun 2022 tercapai 18,12 menit dari target 15 menit sehingga tercapai 82,78%. Apabila

dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu 17,49 menit maka terdapat penurunan angka 0,63. Penurunan tersebut disebabkan oleh meningkatnya jumlah kejadian kebakaran yaitu sebanyak 197 kejadian pada tahun 2022, sedangkan pada tahun 2021 terdapat kejadian kebakaran sebanyak 175 kejadian. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2024 terjadi penurunan rata-rata *response time* penanganan kebakaran menjadi 17,00 menit dari capaian tahun sebelumnya yaitu 18,09 menit.

d) Persentase Kasus Pelanggaran Yang Ditangani

Tabel 2.51
Persentase Kasus Pelanggaran Peraturan Daerah yang
Ditangani Tahun 2020 – 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Kasus Pelanggaran Peraturan Daerah yang ditangani	100	100	100	100	100

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo, 2025

Ruang lingkup penegakan peraturan daerah salah satunya adalah kegiatan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja untuk menyelesaikan setiap terjadinya pelanggaran peraturan daerah dengan langkah penindakan represif yustisial. Data menunjukkan bahwa selama lima tahun berturut-turut, dari 2020 hingga 2024, Kabupaten Sidoarjo berhasil menangani 100% kasus pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) yang terjadi setiap tahunnya. Capaian ini mencerminkan komitmen dan konsistensi aparat penegak Perda, seperti Satpol PP, dalam menegakkan hukum dan menjaga ketertiban umum di wilayah tersebut. Penanganan 100% juga menandakan bahwa tidak ada kasus yang dibiarkan tanpa tindak lanjut, baik melalui pembinaan, sanksi administratif, maupun proses hukum jika diperlukan.

Kinerja ini penting karena menunjukkan tidak hanya kedisiplinan dalam administrasi pemerintahan daerah, tetapi juga efektivitas mekanisme pelaporan dan respon atas pelanggaran. Capaian ini juga

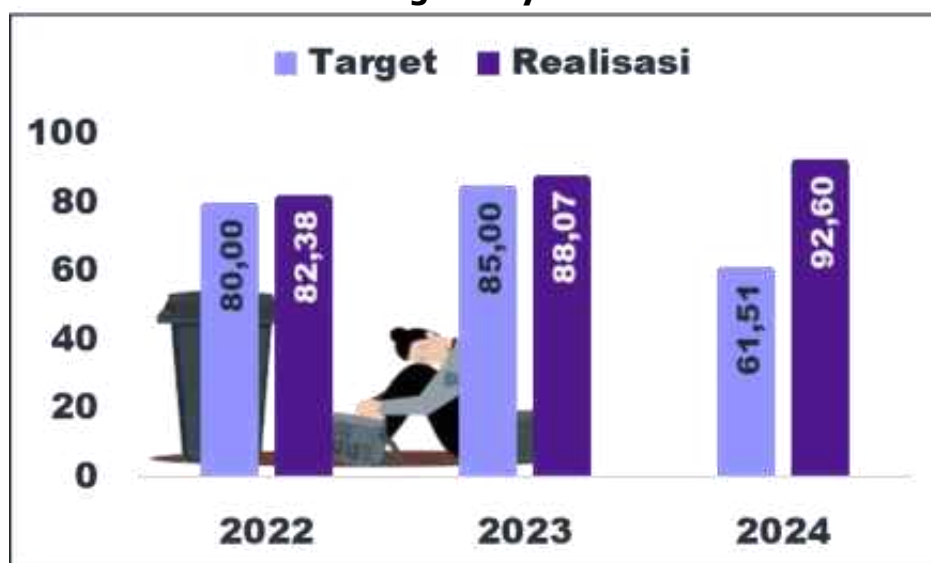
turut mendukung stabilitas sosial dan kelancaran implementasi kebijakan daerah. Untuk mempertahankan capaian ini, pemerintah daerah perlu terus memperkuat kapasitas pengawasan, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, dan kolaborasi lintas sektor, agar penegakan Perda tidak hanya bersifat reaktif tetapi juga preventif.

6. Sosial

Pada urusan sosial pemantauan perkembangan jumlah PPKS dapat digunakan sebagai salah satu indikator sosial ekonomi. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) diartikan sebagai perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.

Indikator kinerja Dinas sosial yang terkait dengan PPKS mulai tahun 2022 dirubah menjadi persentase jumlah PPKS yang terlayani sehingga dapat dilihat capaian kinerja yang lebih nyata. Gambaran PMKS/PPKS yang terlayani selama tahun 2022 dan 2024 terus menunjukkan peningkatan yang mengarah lebih baik sebagaimana ditampilkan pada grafik sebagai berikut.

Gambar 2.60
Persentase PPKS Yang Terlayani Tahun 2022-2024



Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, 2025

Terlihat bahwa pada tahun 2022 dan 2024, realisasi pelayanan melebihi target yang ditetapkan. Pada 2022, targetnya adalah 80%, tetapi realisasinya mencapai 82,38%. Sementara pada 2023, capaian meningkat lebih tinggi lagi hingga 88,07% dari target 85%, menunjukkan efektivitas program intervensi sosial yang dijalankan oleh pemerintah daerah, seperti penjangkauan, asesmen, pemberdayaan, dan rehabilitasi sosial. Namun pada tahun 2024, realisasi meningkat kembali menjadi 92,60. Peningkatan pelayanan PPKS harus tetap dicermati sehingga cakupan dapat lebih terarah dan tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sidoarjo.

Kemudian untuk data rinci jumlah PPKS di Kabupaten Sidoarjo menurut jenisnya di tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dapat ditampilkan di tabel berikut.

Tabel 2.52
Data 26 Jenis PMKS/PPKS Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 – 2023

No	Jenis PMKS	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Keluarga Fakir Miskin	33,342	37,847	39,269	539,955	460,950
2	Anak Jalanan	19	43	45	44	17
3	Tuna Susila	26	91	16	51	0
4	Pengemis	31	86	85	90	221
5	Gelandangan dan Gelandangan Psikotik	26	90	39	51	121
6	Anak Balita Terlantar	7	33	51	44	20
7	Anak Terlantar	86	67	176	1,311	2,430
8	Anak Berhadapan Dengan Hukum	9	25	70	74	35
9	Anak dengan Kedisabilitas					
	a. Tubuh	180	142	201	221	150
	b. Netra	35	16	25	27	18
	c. Cacat Wicara	66	61	146	134	91
	d. Mental	213	132	295	253	171
	e. Cacat Ganda	104	84	112	192	130
10	Anak yang menjadi korban tindak kekerasan/diperlakukan salah	17	11	3	4	0
11	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	14	34	59	81	0



No	Jenis PMKS	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
12	Lanjut Usia Terlantar	329	397	475	30,684	76,162
13	Penyanggah Distabilitas & Penyanggah Penyakit Kronis					
	a. Tubuh	1,783	358	499	1,585	777
	b. Netra	932	114	192	599	294
	c. Cacat Wicara	253	164	235	876	429
	d. Mental	278	606	800	1,876	919
	e. Cacat Ganda	683	116	148	888	435
	f. Penderita Penyakit Kronis	305	355	938	933	457
	g. Pemulung	157	254	381	422	0
14	Kelompok Minoritas	401	61	20	37	0
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Perasyarakatan (BWBLB)	81	143	172	226	0
16	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	1,477	1,699	1,546	1,892	2,042
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	27	42	77	82	45
18	Korban Trafficing		1	1	0	0
19	Korban Tindak Kekerasan/ yang diperlakukan salah	1	4	7	8	0
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	81	2	3	6	0
21	Korban Bencana Alam	23	3	201	1,185	3,339
22	Korban Bencana Sosial	28	22	188	0	0
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	640	997	1,394	1,809	0
24	Keluarga Berumah Tak Layak Huni	228	433	700	882	0
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	26	88	127	141	0
26	Masyarakat Daerah Tertinggal dan Terpencil	32	24	22	44	0
Total		41,940	44,645	48,718	586,707	549,313

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, 2024

Data jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan tren peningkatan yang sangat tajam, khususnya pada tahun 2022 dan 2023. Total PMKS melonjak dari 48.718 jiwa pada 2021 menjadi 586.707 jiwa pada 2022, lalu sedikit menurun menjadi 549.313 jiwa pada 2023. Kenaikan drastis ini terutama dipengaruhi oleh lonjakan data pada kategori Keluarga Fakir Miskin



dan Lanjut Usia Terlantar yang masing-masing mencatat ratusan ribu jiwa, mengindikasikan perluasan cakupan pendataan atau perbaikan metode identifikasi kelompok rentan. Selain itu, kelompok Anak Terlantar, Anak dengan Disabilitas, serta Orang dengan HIV/AIDS juga menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, mencerminkan fokus pemerintah daerah dalam memperluas layanan sosial dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Namun demikian, terdapat pula sejumlah kategori PMKS yang justru tidak tercatat pada tahun 2023 seperti Tuna Susila, Kelompok Minoritas, dan Korban *Trafficking*, yang dapat menjadi catatan untuk evaluasi pencatatan dan pemetaan ulang. Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan tantangan sekaligus peluang besar bagi pemerintah daerah untuk memperkuat sistem layanan sosial yang inklusif, tepat sasaran, dan berbasis data yang akurat.

b. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

a) Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

Tingkat produktivitas tenaga kerja merupakan ukuran produktivitas tenaga kerja berdasarkan PDRB per tenaga kerja yang diukur melalui rasio antara PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) dengan jumlah tenaga kerja. Tercatat realisasi capaian tingkat produktivitas tenaga kerja Kabupaten Sidoarjo di tahun 2024 sebesar Rp. 154.919.042.

Selanjutnya untuk gambaran angkatan kerja di Kabupaten Sidoarjo cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Akan tetapi, berdasarkan data terakhir diketahui pada bulan Agustus tahun 2024 dari total penduduk usia kerja 1,17 juta orang diantaranya merupakan angkatan kerja. Angkatan kerja di Kabupaten Sidoarjo pada Agustus 2024 di Sidoarjo mengalami penurunan sebesar 0,33% atau sekitar 3,92 ribu dibandingkan Agustus 2023. Sejalan dengan penurunan angkatan kerja pada Agustus 2024, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Sidoarjo juga menurun.

Tercatat TPAK pada Agustus 2024 sebesar 68,37 persen yang menurun 1,25 persen poin dibanding Agustus 2023. Kondisi ketenagakerjaan yang ada di Kabupaten Sidoarjo 5 tahun terakhir selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.53
Ketenagakerjaan Tahun 2020 – 2024

Status Ketenagakerjaan	Agustus 2020 (Ribu orang)	Agustus 2021 (Ribu orang)	Agustus 2022 (Ribu orang)	Agustus 2023 (Ribu orang)	Agustus 2024 (Ribu orang)	Perubahan 1 Tahun (Agst 2023 - Agustus 2024)	
						Ribu orang	Persen
Penduduk usia kerja	1783,77	1813,19	1840,00	1690,00	1714,95	25,20	1,49
Angkatan kerja	1198,24	1205,17	1340,00	1176,48	1172,55	-3,92	-0,33
- Bekerja	1066,79	1074,19	1,222,08	1081,72	1096,49	14,77	1,37
- Pengangguran	131,44	130,98	117,92	94,76	76,06	-18,70	-19,73
Bukan angkatan kerja	585,53	608,02	500	513,26	542,40	29,13	5,68
	persen	persen	persen	persen	persen	persen poin	
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	10,97	10,87	8,8	8,05	6,49	-1,56	
- Laki-laki	7,08	7,02	6,92	7,17	6,64	-0,53	
- Perempuan	3,89	3,85	1,87	9,36	6,25	-3,11	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	67,17	66,47	72,87	69,62	68,37	-1,25	
- Laki-laki	81,55	82,06	89,96	83,18	82,54	-0,64	
- Perempuan	52,78	50,86	55,76	56,07	54,23	-1,84	

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo, 2025

b) Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial

Persentase kasus perselisihan Hubungan Industrial yang dilaporkan selama 5 tahun terakhir di Kabupaten Sidoarjo mengalami fluktuasi, dimana di tahun 2021 tercatat persentase kasus perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan tepat waktu melalui Perjanjian Bersama (PB) mencapai 19,6% dari target 10% atau capaian 181%. Sementara di tahun 2024 realisasi kasus perselisihan yang diselesaikan mencapai 25,28% dari target 24% atau memperoleh capaian 105,33%. Penurunan dimaksud disebabkan karena penyelesaian perselisihan hubungan industrial pihak-

pihak lebih memilih diberikan anjuran tertulis oleh Mediator Hubungan Industrial untuk upaya hukum lebih lanjut sebagaimana tercantum pada gambar berikut.

Gambar 2.61
Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industri yang
Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama Tahun 2020 – 2024



Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo, 2025

c) Persentase Tenaga Kerja Ditempatkan

Penduduk yang sudah masuk usia kerja tentu akan mencari pekerjaan demi menunjang kemampuan finansial. Kabupaten Sidoarjo masih menjadi magnet bagi para pencari kerja sehingga total pekerja yang sudah mendapatkan pekerjaan perlu ditampilkan agar terlihat jumlah pekerja dengan data keberhasilan mendapatkan kerja.

Selanjutnya pada tahun 2020, dari target 50%, realisasi penempatan mencapai 51,61%. Peningkatan yang lebih signifikan terlihat di tahun 2021 dan 2022, di mana realisasi mencapai masing-masing 63,48% dan 66,93%, melampaui target tahun tersebut yang hanya 60% dan 64%. Tahun 2023 mencatat pencapaian tertinggi yaitu 67,99% dari target 67%, yang kemudian kembali meningkat menjadi 68,08% pada tahun 2024 meskipun targetnya turun menjadi 60%. Capaian ini menunjukkan

efektivitas berbagai program ketenagakerjaan yang dijalankan oleh pemerintah daerah, seperti pelatihan kerja, job matching, kerja sama dengan industri, dan penyelenggaraan bursa kerja. Tren ini juga mencerminkan bahwa akses informasi kerja, kesiapan tenaga kerja lokal, dan kebutuhan pasar kerja relatif selaras, yang merupakan indikator positif bagi dinamika ekonomi daerah. Untuk mempertahankan tren ini, dapat dilakukan melalui digitalisasi layanan ketenagakerjaan dan penguatan keterampilan vokasional yang sesuai dengan kebutuhan industri tahun 2020 hingga 2024.

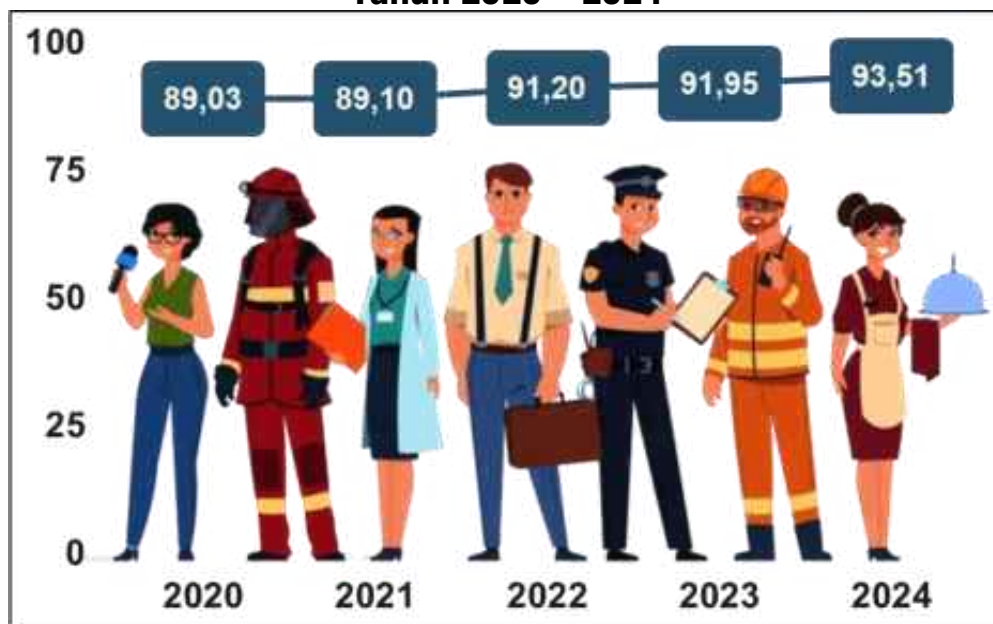
Gambar 2.62
Persentase Pencari Kerja yang Telah Ditempatkan
Tahun 2020 – 2024



Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo, 2025

Berikutnya untuk penduduk Sidoarjo yang terserap pada 9 sektor tenaga kerja pada tahun 2024 terus mengalami kenaikan selama 5 tahun terakhir, sebagaimana tercantum pada gambar berikut ini.

Gambar 2.63
Persentase Tenaga Kerja Terserap di 9 Sektor
Tahun 2020 – 2024



Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo, 2025

Dimulai dari angka 89,03% pada tahun 2020, tingkat penyerapan tenaga kerja mengalami peningkatan yang stabil setiap tahunnya: 89,10% pada 2021, 91,20% pada 2022, 91,95% pada 2023, hingga mencapai 93,51% pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan keberhasilan strategi pembangunan daerah dalam menciptakan lapangan kerja yang relevan dengan kebutuhan industri dan sektor pelayanan publik. Sembilan sektor yang dimaksud kemungkinan mencakup industri pengolahan, perdagangan, jasa, pertanian, konstruksi, kesehatan, pendidikan, keamanan, dan pariwisata atau perhotelan, sebagaimana tergambarkan dalam ilustrasi. Kenaikan ini menunjukkan bahwa sebagian besar angkatan kerja di Sidoarjo dapat terserap oleh pasar kerja lokal, yang menjadi indikator penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif. Keberhasilan ini juga mengisyaratkan bahwa pelatihan vokasi, sinergi pendidikan dengan industri, dan investasi sektor riil berjalan cukup efektif. Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian ini, penting

bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat *link and match* antara dunia pendidikan, pelatihan kerja, dan sektor industri yang berkembang.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan pemberdayaan dan perlindungan anak memuat 2 indikator kinerja yaitu Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Perlindungan Anak.

a) Indeks Pembangunan Gender

Dalam rangka mengoptimalkan implementasi pengarusutamaan gender dan hak anak, diperlukan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui perluasan akses terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan serta pemenuhan hak anak.

Gambar 2.64
Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo, 2025

Angka IPG meningkat secara konsisten dari 94,13 pada tahun 2020 menjadi 95,45 pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan membaiknya kesetaraan pembangunan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Pertumbuhan yang stabil dari tahun ke tahun—dengan lonjakan kecil

namun progresif dari 94,13 (2020) menjadi 94,68 (2022), dan akhirnya 94,72 (2023) menunjukkan bahwa kebijakan afirmatif dan program-program pengarusutamaan gender di Sidoarjo telah berjalan cukup efektif.

Tren ini sekaligus menandakan bahwa pemerintah daerah tidak hanya memprioritaskan peningkatan partisipasi perempuan, tetapi juga memastikan bahwa hasil pembangunan dirasakan secara merata oleh seluruh gender.

b) Indeks Perlindungan Anak

Sebagai generasi masa depan, keberadaan seorang anak perlu dilindungi dan diberikan penghidupan yang layak. Pengukuran kondisi tersebut dapat dilihat di tabel berikut tentang Indeks Perlindungan Anak (IPA), Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA), dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) di tahun 2021-2023.

Tabel 2.54
IPA, IPHA, dan IPKA Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2022 – 2023

Tahun	Indikator		
	IPA	IPHA	IPKA
2021	70,44	-	84,70
2022	72,16	69,54	84,44
2023	72,75	70,41	84,05

Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2022-2023

Berdasarkan data terbaru, Kabupaten Sidoarjo mencatat capaian yang cukup baik dalam tiga indikator utama perlindungan dan pemenuhan hak anak pada tahun 2022 dan 2023. Pada tahun 2022, Indeks Perlindungan Anak (IPA) berada di angka 72,16, dan mengalami peningkatan menjadi 72,75 pada 2023 dan menurun menjadi 66,09 di tahun 2024. Ini menunjukkan kemajuan dalam sistem perlindungan anak secara umum, termasuk aspek kelembagaan, layanan, serta keterlibatan masyarakat. Sementara itu, Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) juga menunjukkan tren peningkatan, dari 69,54 pada 2022 menjadi 70,41 di



tahun 2023. Angka ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Sidoarjo terus memperkuat upaya pemenuhan hak-hak dasar anak seperti pendidikan, kesehatan, partisipasi, dan perlindungan hukum.

Untuk Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA), meskipun angkanya sedikit menurun dari 84,44 pada tahun 2022 menjadi 84,05 pada 2023, capaian ini masih tergolong tinggi. IPKA mencerminkan kemampuan daerah dalam memberikan perlindungan bagi anak-anak yang berada dalam situasi khusus seperti korban kekerasan, anak berhadapan dengan hukum, atau anak penyandang disabilitas. Secara keseluruhan, data ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam memperkuat sistem perlindungan anak dan menjamin terpenuhinya hak anak secara menyeluruh, dengan tren peningkatan yang stabil dari tahun ke tahun.

Pada akhirnya, meskipun capaian IKG, IPG serta IPA menunjukkan hasil yang baik, kewaspadaan pemerintah Kabupaten Sidoarjo terhadap kasus kekerasan dan perdagangan perempuan dan anak perlu ditingkatkan dan tidak boleh dianggap sebagai masalah sepele. Kasus tersebut masih hadir di wilayah Kabupaten Sidoarjo sehingga kegiatan preventif ataupun pasca kasus perlu dikuatkan untuk mencegah kasus-kasus muncul di masa mendatang.

c) Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)

IPBK adalah indikator komposit yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pembangunan suatu daerah telah memperhatikan aspek kependudukan, seperti pertumbuhan, persebaran, kualitas, dan mobilitas penduduk. IPBK mencerminkan integrasi isu kependudukan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Realisasi indeks pembangunan berwawasan kependudukan Kabupaten Sidoarjo tahun 2024 sebesar 61,80.

d) **Persentase Kasus Kekerasan dan *Trafficking* Perempuan dan Anak**

Tabel 2.55
Persentase Kasus Kekerasan dan *Trafficking* Perempuan dan Anak yang Diselesaikan Tahun 2020 – 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Kasus Kekerasan dan Trafficking Perempuan dan Anak yang Diselesaikan	100	100	100	100	100
Jumlah Kasus Terlapor	140	163	180	202	215
Jumlah kasus Terselesaikan	140	163	180	202	215

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo, 2025

Data menunjukkan bahwa Kabupaten Sidoarjo berhasil mempertahankan capaian 100% penyelesaian kasus kekerasan dan trafficking terhadap perempuan dan anak selama lima tahun berturut-turut, dari 2020 hingga 2024. Artinya, seluruh kasus yang dilaporkan setiap tahunnya berhasil ditangani secara tuntas oleh aparat atau lembaga terkait. Jumlah kasus yang terlapor sendiri mengalami fluktuasi, dengan tren meningkat dari 140 kasus pada tahun 2020 menjadi 215 kasus pada tahun 2024. Pada tahun 2024 jumlah pengaduan kasus kekerasan perempuan dan anak sebanyak 215 kasus dari target 160 kasus. Peningkatan ini bisa mengindikasikan dua hal sekaligus: meningkatnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan kasus, serta membaiknya sistem pendataan dan penjangkauan oleh instansi perlindungan perempuan dan anak. Capaian ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam melindungi kelompok rentan, sekaligus efektivitas koordinasi antar instansi seperti Dinas P3AKB, aparat penegak hukum, lembaga perlindungan, dan jejaring layanan korban. Apapun kasus kejahatan yang mungkin bisa terjadi, pemerintah daerah selayaknya mampu memberikan langkah solutif mengatasinya.

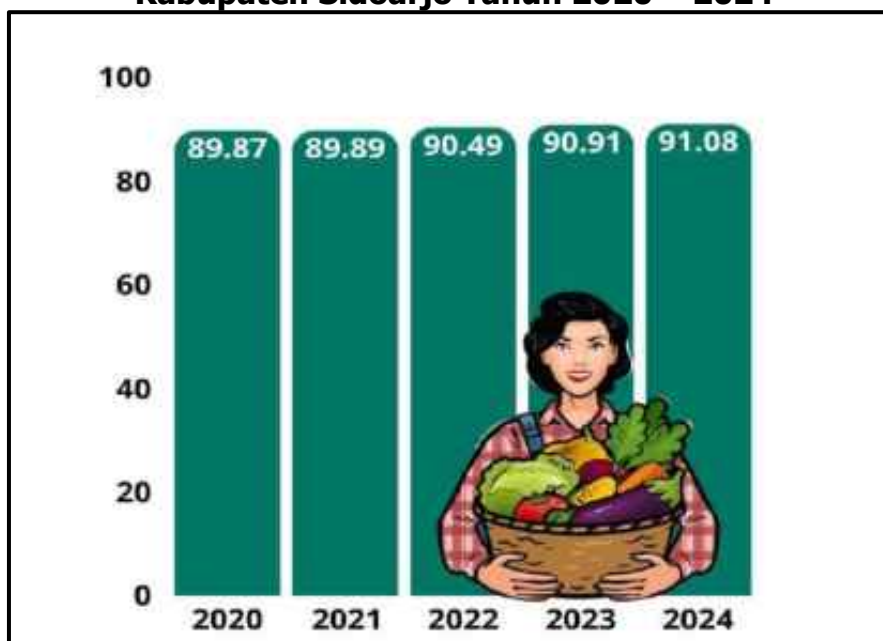
3. Pangan

Ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan dan kemampuan seseorang untuk mendapatkannya. Daerah memiliki ketahanan pangan jika masyarakatnya tidak dalam kondisi kelaparan. Terpenuhinya kebutuhan penyediaan pangan penduduk baik jumlah dan mutunya didasarkan pada jumlah ketersediaan energi dan zat gizi per orang/per hari.

a) Skor Pola Pangan Harapan

Capaian skor pola pangan harapan Kabupaten Sidoarjo digambarkan berikut.

Gambar 2.65
Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 – 2024



Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo, 2025

Skor pola pangan harapan merupakan ukuran kualitas konsumsi pangan masyarakat berdasarkan keragaman dan keseimbangan gizi. Kebutuhan energi harian rata-rata penduduk Indonesia adalah 2.200 kkal, kebutuhan protein sebesar 57 gram, dengan jumlah Skor PPH 100.

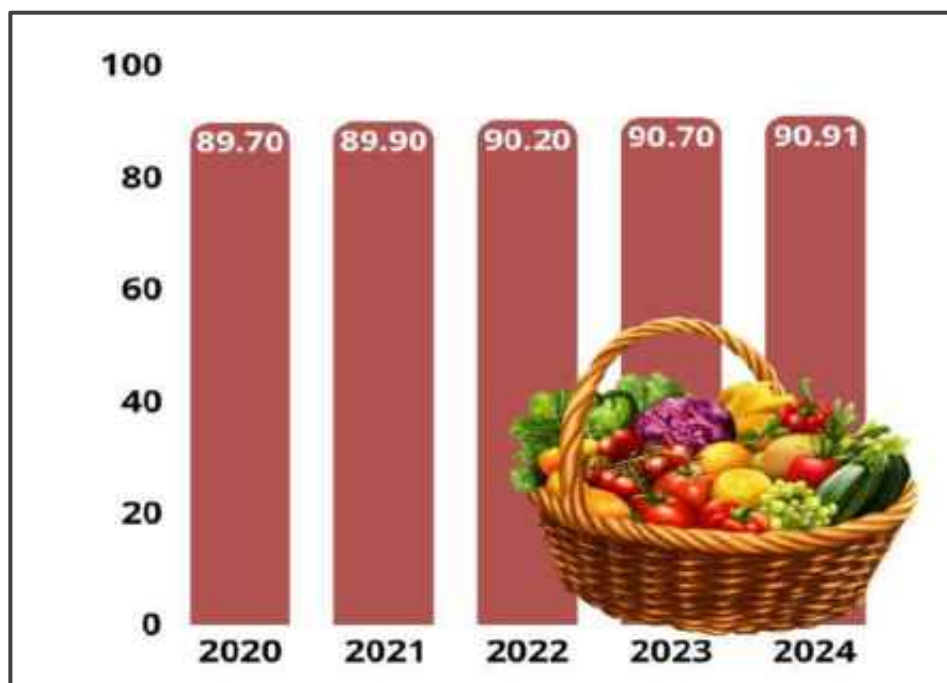
Berdasarkan grafik diketahui skor PPH Ketersediaan pangan Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2024 mencapai 91.08. Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2023, maka terjadi kenaikan sebesar 0,62 poin. Peningkatan PPH tersebut disebabkan oleh skor Angka Kecukupan

Energi (AKE) yang melebihi skor PPH maksimal. Dengan skor PPH Ketersediaan sebesar 91.08 menggambarkan bahwa Kabupaten Sidoarjo mempunyai kelebihan ketersediaan dalam kelompok bahan pangan seperti padi, pangan hewani, minyak dan lemak, buah / biji serta gula.

b) Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi

Skor PPH Konsumsi adalah nilai yang mencerminkan tingkat konsumsi pangan masyarakat dibanding tingkat konsumsi pangan ideal yang memenuhi kaidah pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA).

Gambar 2.66
Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 – 2024



Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo, 2025

Berdasarkan data, Skor PPH Konsumsi Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2024 sebesar 90,91. Adapun jika dibandingkan pada tahun 2023 sebesar 90,70 maka terdapat peningkatan sebesar 0,21 poin.

4. Pertanian

Selama periode tahun 2020 dan 2024 permasalahan pertanian di Kabupaten Sidoarjo yang terfasilitasi sesuai dengan prosedur yang ada

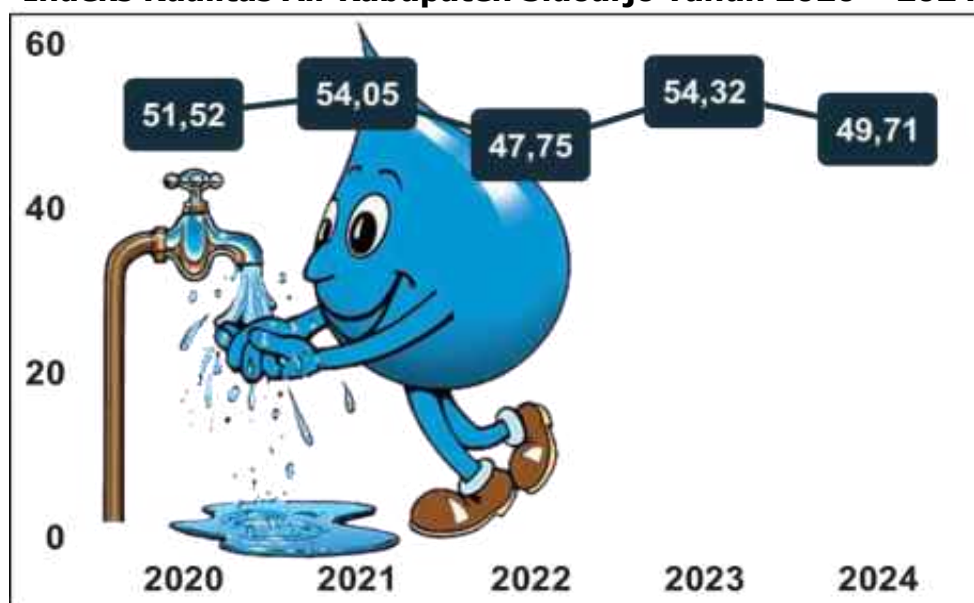
sebesar 100%. Pada tahun 2024 tercatat sebanyak 2 permasalahan yang berhasil untuk ditangani.

5. Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional dan menjadi acuan bersama bagi semua pihak dalam mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penghitungan IKLH terdiri dari tiga komponen yaitu: Indeks Kualitas Air (IKA); Indeks Kualitas Udara (IKU); dan Indeks Kualitas Lahan/Vegetasi (IKL).

a) Indeks Kualitas Air

Gambar 2.67
Indeks Kualitas Air Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 – 2024



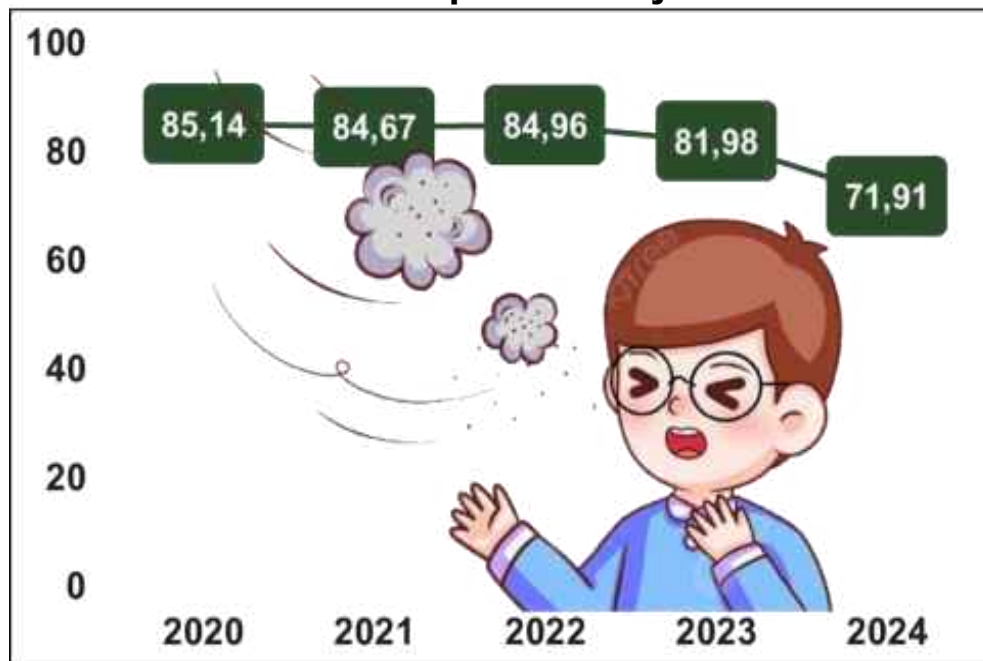
Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kebersihan, 2025

Indeks kualitas air merupakan hasil dari penjumlahan nilai status mutu air. Capaian Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Sidoarjo selama 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Data terakhir di 2 tahun terakhir capaian Indeks Kualitas Air mencapai 54,32 tahun 2023 kemudian menurun menjadi 49,71 di tahun 2024. Hal ini dikarenakan posisi Kabupaten Sidoarjo yang berada di hilir sungai Brantas, sehingga banyak aktifitas sumber pencemaran beragam di sepanjang sungai dan belum bisa dipastikan pencemaran tersebut merupakan limbah dosmetik dari

penduduk setempat. Sementara itu, kondisi ketahanan air di Kabupaten Sidoarjo juga menunjukkan kerentanan yang saling berkaitan dan memerlukan pendekatan terpadu dalam penanganannya. Dari aspek ketahanan air, Sidoarjo menghadapi defisit serius, di mana sebagian besar wilayah—sekitar 63%—masuk dalam kategori rendah hingga sangat rendah dalam kapasitas ekosistem menyediakan air bersih. Ketergantungan terhadap air tanah yang terus menurun membuat suplai air menjadi tidak mencukupi, baik untuk kebutuhan domestik maupun industri.

b) Indeks Kualitas Udara

Gambar 2.68
Indeks Kualitas Udara Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 – 2024



Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kebersihan, 2025

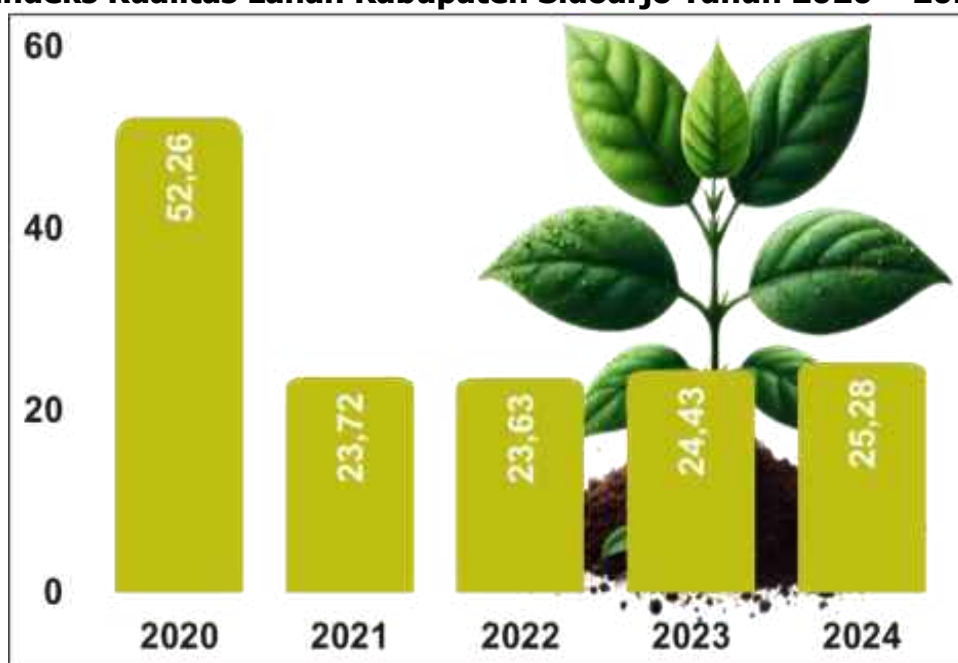
Indeks kualitas udara merupakan rerata IEU SO₂ dan IEU NO₂ yang selanjutnya dikonversi melalui persamaan indeks kualitas udara. Capaian Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Sidoarjo 5 tahun terakhir secara umum mengalami fluktuatif, dimana nilainya pada tahun 2020 sebesar 85,14 poin menurun menjadi 81,98 di tahun 2023 dan menurun kembali menjadi 71,91 di tahun 2024. Penurunan ini dikarenakan adanya

pergeseran lokasi untuk Kawasan Industri yang berpengaruh terhadap meningkatnya nilai parameter SO₂ dan NO₂. Selain itu, peningkatan parameter NO₂ juga terjadi di kawasan transportasi, kawasan industri, dan kawasan pemukiman. Sumber dari pencemar utama NO₂ adalah dari emisi kendaraan bermotor, pembakaran sampah, pembakaran batubara dan industri.

c) Indeks Kualitas Lahan

Gambar 2.69

Indeks Kualitas Lahan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 – 2024



Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kebersihan, 2025

Indeks kualitas lahan/vegetasi merupakan hasil pembagian luas tutupan lahan dan luas wilayahnya yang selanjutnya dikonversi melalui persamaan indeks tutupan lahan/vegetasi. Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Sidoarjo menunjukkan perubahan signifikan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, indeks ini tercatat sangat tinggi, yakni 52,26, yang menunjukkan bahwa tutupan lahan—baik berupa vegetasi alami, ruang terbuka hijau, maupun lahan non-terbangun lainnya—masih dalam kondisi relatif baik dan mendukung fungsi ekologis wilayah. Namun, pada tahun 2021, terjadi penurunan drastis ke angka 23,72, menandakan degradasi tutupan lahan yang cukup serius. Penurunan ini



disebabkan oleh alih fungsi lahan yang masif, perluasan kawasan terbangun, atau melemahnya perlindungan terhadap ruang terbuka hijau akibat tekanan pembangunan. Sejak 2021 hingga 2024, tren indeks menunjukkan perbaikan bertahap namun konsisten—naik menjadi 23,63 (2022), 24,43 (2023), dan 25,28 pada 2024. Meskipun pemulihannya belum signifikan, tren ini mengindikasikan adanya upaya perbaikan tata kelola lahan, seperti rehabilitasi ruang terbuka, penataan kembali kawasan sempadan, atau penguatan regulasi pelestarian lingkungan. Namun demikian, nilai indeks yang masih rendah dibandingkan tahun 2020 menjadi peringatan bahwa laju degradasi belum sepenuhnya terkendali dan perlu strategi yang lebih agresif serta lintas sektor untuk mengembalikan kualitas lahan secara berkelanjutan. Faktor penghambat yang dihadapi pemerintah daerah dalam meningkatkan Indeks Kualitas Lahan adalah semakin banyaknya lahan di Kabupaten Sidoarjo yang rencananya akan dijadikan sebagai lokasi perumahan sehingga pada akhirnya upaya peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) terkendala.

Perkembangan IKLH Kabupaten Sidoarjo tahun 2024 masih berada dibawah capaian Jawa Timur dan Nasional. Berdasarkan data capaian IKLH Kabupaten Sidoarjo terjadi peningkatan dan penurunan pada periode tahun 2019 – 2024, dimana di tahun 2024 capaian yang diperoleh sebesar 53,35 merupakan capaian terendah selama kurun waktu 5 tahun terakhir.

Penyebab utama penurunan kualitas lingkungan adalah pencemaran air oleh limbah domestik dan industri, serta penurunan tutupan lahan dan degradasi kawasan resapan. Indikator lain yang menunjukkan lebih spesifik seperti Indeks Kualitas air (IKA) menurun drastis pada 2022 ke kategori kurang. Kemudian Indeks Kualitas Udara (IKU) masih menunjukkan hasil stabil yang baik di angka 82-84, naik sedikit menjadi 84,96 pada tahun 2022 namun tetap berisiko menurun akibat pertumbuhan transportasi dan industri. Kemudian Indeks Tutupan Lahan mengalami penurunan tajam dari 52,26 di tahun 2020 ke 23,63 pada



tahun 2022 yang mencerminkan hilangnya hutan kota dan ruang terbuka hijau. Penurunan ketiga indeks tersebut menunjukkan bahwa tekanan terhadap lingkungan semakin meningkat, terutama di wilayah pesisir, kawasan industri, dan daerah padat penduduk. Kondisi pencemaran dan degradasi lingkungan menurunkan kualitas hidup masyarakat serta menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Atas kondisi tersebut, maka dibutuhkan upaya-upaya ekstra agar kualitas lingkungan hidup menjadi lebih baik.

Salah satu aspek penting dalam menunjang kualitas lingkungan yang baik adalah proses pengolahan sampah. Persoalan tersebut bisa dikatakan masih menuai perdebatan dan dilematis akibat produksi sampah yang terlalu tinggi namun tidak sebanding dengan volume pengolahan sampah. Makin padatnya penduduk di Kabupaten Sidoarjo berdampak langsung pada kondisi lingkungan sekitar, terutama di wilayah yang padat penduduk. Isu strategis yang masih menjadi persoalan lingkungan bagi pemerintah daerah adalah pengolahan sampah. Memperhitungkan jumlah penduduk dan industri yang berpotensi menambah setiap tahun, daya dukung dan daya tampung lingkungan terhadap sampah perlu diperhatikan. Berdasarkan data dari Rencana Induk Pengolahan Sampah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024, terdapat 127 tempat pembuangan sampah yang terdiri dari Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS); Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*); dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang tersebar di seluruh kecamatan. Sedangkan untuk Tempat Pengolahan Akhir (TPA) di Kabupaten Sidoarjo hanya ada dua di Kecamatan Jabon (TPA Jabon dan TPA Griyo Mulyo). Data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) menyebutkan sepanjang tahun 2024, total volume sampah yang masuk ke TPA adalah 173.840 ton, sedangkan TPA di Kabupaten Sidoarjo hanya mampu menampung kurang lebih 500 ton sampah.

Proyeksi timbunan sampah yang dihasilkan pada tahun 2025 sebanyak 1.685,3 ton per hari dan akan terus meningkat sampai tahun 2040 dengan proyeksi timbunan sampah sebanyak 1.734,6 ton per hari. Sementara pada tahun 2045, dikarenakan proyeksi jumlah penduduk menurun maka proyeksi timbunan sampah harian yang dihasilkan juga menurun menjadi 1.728,3 ton per hari. Meskipun kondisi ini menurun, namun jika dibandingkan dengan proyeksi tahun 2025, besar timbunan sampah harian yang dihasilkan meningkat sebesar 42,9 ton per harinya. Untuk lebih jelasnya dapat disimak dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.56
Perkembangan Komponen Persentase Sampah Terkelola
Tahun 2020 – 2024

URAIAN	SATUAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase sampah yang terkelola ((Jumlah sampah yang terkelola / Jumlah timbunan sampah) x 100%)	Persen	92%	93%	73%	77%	79%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Sidoarjo, 2025

Data persentase sampah yang terkelola di Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2020 dan 2021, persentase pengelolaan sampah mencapai tingkat optimal, masing-masing sebesar 92% dan 93%, yang menunjukkan sistem pengelolaan sampah saat itu cukup efektif dalam menangani timbunan sampah. Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan tajam hingga 73%, yang dapat mengindikasikan adanya gangguan pada sistem pengangkutan, fasilitas pengolahan yang tidak optimal, atau peningkatan volume timbunan sampah yang tidak diimbangi dengan kapasitas pengelolaan.

Sejak penurunan tersebut, capaian pengelolaan sampah mulai menunjukkan pemulihan bertahap, meningkat menjadi 77% pada 2023 dan 79% pada 2024. Meski demikian, angka tersebut masih belum kembali ke level ideal seperti pada tahun-tahun awal. Hal ini menandakan

bahwa meskipun ada upaya perbaikan, seperti penguatan pengelolaan berbasis masyarakat, revitalisasi TPS dan TPA, serta peningkatan peran bank sampah, efektivitasnya belum sepenuhnya mampu mengembalikan capaian seperti semula.

Penurunan pengelolaan sampah karena berbagai faktor antara lain: 1) belum optimalnya pemilahan sampah dari tingkat sumber; 2) belum optimalnya kegiatan pembatasan dan pemanfaatan kembali seperti di fasilitas pendidikan, kesehatan, industri dan fasilitas umum lainnya; 3) belum optimalnya pengolahan sampah di TPS3R; dan 4) terbatasnya sarana prasarana angkutan sampah.

6. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Indikator yang mencerminkan Kabupaten Sidoarjo dari segi urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil antara lain Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan dan ukuran kinerja lainnya antara lain persentase penduduk yang memiliki administrasi kependudukan.

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan adalah ukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan yang diukur dengan menggunakan rata-rata skor survei kepuasan layanan adminduk.

Tabel 2.57
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan

URAIAN	SATUAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Administrasi Kependudukan	Indeks	83,00	89,03	90,5	95,13	96,40

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, 2025

Capaian indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan selama 5 tahun terakhir terus menunjukkan peningkatan hingga di tahun terakhir 2024 memiliki skor indeks 96,40. Atas kondisi ini



dapat dikemukakan bahwa layanan kependudukan telah mampu dipergunakan oleh masyarakat Kabupaten Sidoarjo dengan efisien, efektif dan merata.

Realisasi kinerja untuk urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil secara ringkas dapat ditampilkan pada tabel di bawah ini.



Tabel 2.58
Persentase Penduduk Ber-KTP Elektronik dan Ber-KK Kabupaten Sidoarjo 2020-2024

INDIKATOR KINERJA	Satuan	TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
SASARAN		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase penduduk yang ber-KTP Elektronik	%	100	97.8	100	97.08	97	99.62	98	99.89	99.6	99.67
Persentase penduduk yang ber- Kartu Keluarga (KK)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase penduduk usia 0 s.d. 18 tahun yang ber-akta kelahiran	%	100	93.8	100	95.19	97	98	96	98.2	98.5	97.69

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidoarjo, 2024



Persentase Penduduk ber-KTP Elektronik Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2023 sebesar 99,89% dari target 98%. Artinya hampir seluruh penduduk Kabupaten Sidoarjo sudah ber-KTP Elektronik. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yaitu 99.62% maka terdapat peningkatan sebesar 0,27%. Untuk registrasi penduduk yang baru lahir maka perlu diterbitkan Akta Kelahiran bagi seluruh penduduk di Kabupaten Sidoarjo. Persentase penduduk usia 0 s.d 18 tahun yang telah memiliki Akta Kelahiran pada tahun 2023 sebesar 98,2% dari target 96%, sebagaimana tercantum pada tabel berikut.

Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan program yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) sesuai dengan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. KIA berfungsi sama dengan KTP yang diperuntukkan untuk anak berusia 0-17 tahun kurang satu hari. Perbedaannya, KIA untuk bayi dan balita usia 0-5 tahun tidak menampilkan foto, sedangkan KIA untuk 5-17 tahun kurang satu hari dapat menampilkan foto.

Tujuan adanya KIA adalah untuk melindungi hak konstitusional anak sebagai warga negara Indonesia. Meskipun secara fungsional sama dengan KTP-el, tetapi KIA tidak memiliki chip seperti KTP-el. Sesuai Permendagri Nomor 2 Tahun 2016, KIA memiliki beberapa manfaat di antara lain, (1) melindungi pemenuhan hak anak, (2) menjamin akses sarana umum, (3) menjadi bukti identifikasi diri ketika anak mengalami peristiwa buruk, (4) mencegah terjadinya perdagangan anak, dan (5) memudahkan anak mendapatkan akses pada pelayanan publik seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, perbankan, transportasi, dan imigrasi.

Penerapan Program KIA di Kabupaten Sidoarjo dimulai sejak tahun 2021 dengan target awal sebesar 30%. Pada tiap tahunnya target pencapaian KIA pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil naik sebesar 10% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 target pencapaian KIA di Dukcapil Kabupaten Sidoarjo yakni sebesar 50%, dengan rumus perhitungan Jumlah

Penduduk usia 0-17 tahun Tahun ber KIA dibandingkan dengan Jumlah Penduduk usia 0-17 tahun di Sidoarjo. Capaian Persentase penduduk usia 0 sampai dengan <17 tahun yang ber-KIA 2023 adalah sebesar 51,72% atau tercapai realisasi kinerja sebesar 103,44%. Sementara itu, untuk capaian KIA tahun 2024 tercatat sebesar 52,16% dari target sebesar 60% yang berarti ketercapaian kinerjanya sebesar 86,93%, dimana capaian kinerjanya menurun dibandingkan capaian di tahun 2023. Dalam rangka pemenuhan target pencapaian KIA, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo berkomitmen untuk menyediakan pelayanan Adminduk terintegrasi, khususnya layanan integrasi Akta Kelahiran yang dimana output dari layanan terintegrasi tersebut yakni Akta Kelahiran, KIA dan Kartu Keluarga. Adapun beberapa upaya yang telah dilakukan yakni melaksanakan kegiatan Jemput Bola Terpadu Sidoarjo yang Gemilang (Jebete Sayang) dan Sosialisasi ke desa/kecamatan dengan paket Akta Kelahiran, KK dan KIA, serta melakukan kerjasama layanan terintegrasi dengan 72 Rumah Sakit, seluruh Puskesmas di Sidoarjo maupun *stake holder* lainnya. Dan untuk rencana keberlanjutan kami dalam mencapai target pencapaian KIA yakni kami akan melakukan Jemput Bola ke seluruh Sekolah Dasar di Sidoarjo dengan memberikan layanan Adminduk terintegrasi khususnya pelayanan Kartu Identitas Anak.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu program pemerintah desa dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada agar dapat berkembang serta dapat membantu proses kemajuan desa. Setiap tahun desa mendapatkan alokasi anggaran dari Pemerintah Pusat yaitu Dana Desa (DD) dan alokasi anggaran dari pemerintah kabupaten berupa Anggaran Dana Desa (ADD). Pembangunan desa tiap tahun diukur melalui status desa yang diformulasikan dalam Indeks Desa Membangun (IDM). Sasaran program pemberdayaan masyarakat ini mencakup bidang pemerintahan, kelembagaan, kesehatan, ekonomi masyarakat, teknologi, dan pendidikan.

a) Persentase Desa Mandiri

Desa Mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik. Desa Mandiri adalah desa yang memiliki nilai Indeks Pembangunan Desa (IPD) lebih dari 75.

Tabel 2.59
Persentase Desa Mandiri Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2020 – 2024

Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023		2024	
	J	%	J	%	J	%	J	%	J	%
Desa Mandiri Kabupaten Sidoarjo	2	0.62	33	10.25	73	22.67	152	47.8	216	67.92

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sidoarjo, 2025

Data perkembangan jumlah Desa Mandiri di Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat dan progresif. Pada tahun 2020, hanya terdapat 2 desa mandiri (0,62%), namun jumlah ini melonjak signifikan menjadi 33 desa (10,25%) pada 2021. Peningkatan terus berlanjut secara eksponensial—73 desa (22,67%) di tahun 2022, 152 desa (47,8%) di tahun 2023, dan mencapai 216 desa (67,92%) pada 2024. Pertumbuhan ini mencerminkan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam mempercepat proses penguatan kapasitas desa, baik dari sisi tata kelola pemerintahan, kemandirian ekonomi, pembangunan infrastruktur dasar, hingga pelayanan publik.

b) Persentase Desa Maju

Desa Maju (Desa Pra-Sembada) adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. Desa Maju

adalah desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dari atau sama dengan 0,8155 dan lebih besar dari 0,7072.

Tabel 2.60
Persentase Desa Maju Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 – 2024

Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023		2024	
	T	%	T	%	T	%	T	%	T	%
Desa Maju Kabupaten Sidoarjo	137	42.55	157	48.76	171	53.11	136	42.77	98	30.82

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sidoarjo, 2024

Capaian persentase desa maju memiliki kecenderungan menurun hingga tahun 2024 nilainya sebesar 30,82%. Kondisi ini menunjukkan bahwa telah banyak desa yang berubah statusnya menjadi desa mandiri. Tantangan ke depan pemerintah daerah harus dapat mengupayakan desa yang masih belum maju untuk dapat berubah status menjadi desa maju dan selanjutnya menjadi desa mandiri.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pengendalian penduduk dan keluarga berencana ditunjukkan melalui indikator rasio akseptor Keluarga Berencana (KB). Untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, salah satu caranya adalah melalui program KB. Gambaran capaian urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana sebagai berikut.

a) Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

Indeks Pembangunan keluarga (iBangga) adalah ukuran kualitas keluarga berdasarkan dimensi ketahanan keluarga yang diketahui melalui pengukuran rata-rata skor ekonomi, sosial budaya, kesehatan, pendidikan, dan spiritual.

Tabel 2.61
Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2024

Indikator	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	54,64	60,09	66,48	67,5

Sumber: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana Nasional, 2025

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan ukuran program pembangunan keluarga yang ditunjukkan melalui dimensi ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan untuk menggambarkan peran dan fungsi keluarga di sebuah wilayah. Ibangga juga salah satu indikator penting yang digunakan dalam mengukur keberhasilan upaya membangun kualitas keluarga yang dapat diklasifikasikan wilayah dengan status pembangunan keluarga tangguh, berkembang dan rentan.

Berdasarkan tabel Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021–2024, terlihat adanya tren peningkatan yang stabil setiap tahunnya. Pada tahun 2021, indeks berada pada angka 54,64, kemudian naik menjadi 60,09 di tahun 2022. Peningkatan berlanjut di tahun 2023 dengan capaian 66,48, dan mencapai 67,55 pada 2024. Kenaikan ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas hidup keluarga di Sidoarjo, yang dapat mencakup aspek ketahanan keluarga, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan. Pertumbuhan yang relatif konsisten ini mengindikasikan keberhasilan berbagai program pemerintah daerah dalam memperkuat kesejahteraan keluarga, baik melalui intervensi langsung maupun dukungan kebijakan lintas sektor.

b) Persentase Peserta KB Pasangan Usia Subur

Jumlah Peserta KB Pasangan Usia Subur yang ada di Kabupaten Sidoarjo sampai dengan tahun 2024 persentasenya mencapai 71,17% meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 70,56%. Peningkatan capaian kinerja di tahun 2024 menunjukkan pemerintah daerah mampu untuk mengalokasikan upaya-upaya pertumbuhan penduduk dengan mengoptimalkan pemakaian alat kontrasepsi khususnya untuk pasangan usia subur (PUS).

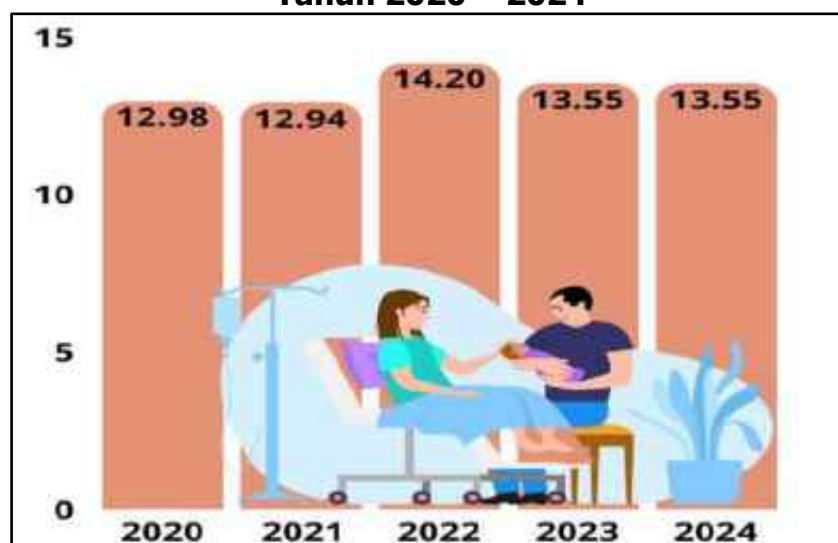
Gambar 2.70
Persentase Peserta KB pada Pasangan Usia Subur
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 – 2024



Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo, 2025

c) **Crude Birth Rate (CBR)**

Gambar 2.71
Persentase *Crude Birth Rate* (CBR) Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2020 – 2024



Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo, 2025

Capaian lainnya *Crude Birth Rate* (CBR) adalah Angka Kelahiran Kasar, yaitu banyaknya bayi yang lahir hidup setiap 1.000 penduduk



selama 1 tahun. Tujuan dari pengukuran *Crude Birth Rate* adalah untuk mengetahui tingkat kelahiran di suatu daerah tertentu pada waktu tertentu. Pada tahun 2022 Angka Kelahiran Kasar di Kabupaten Sidoarjo adalah 14,20 dari target 14,20 sehingga tercapai 100%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu 12,94 maka terdapat peningkatan angka 1,26 persen. Namun pada tahun 2023 dan 2024 terjadi penurunan menjadi 13,55 jika dibanding tahun sebelumnya yang selengkapnya dapat dilihat pada grafik di atas.

Pengendalian penduduk dan keluarga berencana dilaksanakan bukan tanpa tujuan karena ingin memberikan hasil baik bagi masyarakat agar memiliki keluarga yang berkualitas. Membangun keluarga yang berkualitas diawali dengan proses perencanaan yang matang antara suami dan istri dalam membina rumah tangga. Dalam perjalanannya, segala kebutuhan keluarga, setidaknya kebutuhan dasar, harus dipenuhi. Untuk itu, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sejak tahun 2020 membentuk Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK) untuk mengukur kualitas keluarga yang ditunjukkan berdasarkan komponen ketenteraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga di semua wilayah Indonesia.

9. Perhubungan

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berupaya dalam menyediakan/mendukung sarana dan prasarana perhubungan yang layak sebagai bentuk upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sarana merupakan segala sesuatu yang diperlukan sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan yang dalam hal ini adalah angkutan umum yang dimaksudkan dapat memperlancar arus angkutan. Sedangkan prasarana merupakan segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses baik usaha, pembangunan maupun proyek. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Perhubungan mendata jumlah

moda angkutan darat dan sungai yang beroperasi secara reguler, yang terdiri dari Mode angkutan sungai danau dan penyeberangan (ASDP), Mode angkutan barang, Mode angkutan umum dan Mode angkutan kereta api. Selain menunjang moda transportasi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga melaksanakan program realisasi keselamatan angkutan darat yang rawan terjadi kecelakaan.

a) Indeks Infrastruktur Perhubungan

Indeks infrastruktur perhubungan merupakan ukuran komposit yang menggambarkan tingkat ketersediaan, kondisi serta fungsi prasarana transportasi darat di wilayah yang mencakup jalan, jembatan, terminal, halte, rambu lalu lintas dan fasilitas keselamatan lainnya. Indeks ini digunakan untuk menilai capaian pembangunan infrastruktur sektor perhubungan dalam mendukung konektivitas, keselamatan dan kelancaran mobilitas masyarakat serta distribusi barang.

Capaian indeks infrastruktur perhubungan tahun 2020 hingga 2024 sebagai berikut.

Tabel 2.62
Indeks Infrastruktur Perhubungan Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2020-2024

Uraian	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Infrastruktur Perhubungan	Indeks	0.0600	0.0604	0.0641	0.0660	0.0670

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Sidoarjo, 2025

Capaian indeks infrastruktur perhubungan tahun 2020 hingga 2024 terus menunjukkan peningkatan yang signifikan mencapai 0,0670 di tahun 2024. Hasil ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus berupaya membangun dan memperbaiki sarana dan prasarana perhubungan sehingga keselamatan dan kelancaran mobilitas masyarakat serta barang dapat lebih optimal untuk mendukung perekonomian daerah.



b) Rasio Konektivitas

Rasio konektivitas merupakan indikator baru ukuran keterhubungan antar wilayah, kawasan strategis, pusat pelayanan dan permukiman di Kabupaten Sidoarjo yang telah dilayani atau terjangkau oleh jaringan transportasi darat yang layak, baik melalui jalan, terminal, halte, jaringan angkutan umum, maupun simpul transportasi lainnya

c) Kinerja Lalu Lintas Jalan

Kinerja lalu lintas digunakan untuk mengukur tingkat kelancaran, keamanan, ketertiban dan efisiensi pergerakan lalu lintas di wilayah kabupaten, yang mencakup volume kendaraan, kapasitas jalan, kecepatan tempuh, waktu perjalanan serta tingkat kecelakaan lalu lintas. Capaian kinerja lalu lintas jalan Kabupaten Sidoarjo di tahun 2023 sebesar 0,702 dan di tahun 2024 menurun sedikit menjadi 0,700. Hal ini harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo sehingga tingkat kecelakaan dapat lebih diminimalkan serta volume kendaraan dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya.

Selain menyediakan sarana prasarana yang berhubungan dengan perhubungan, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga telah memastikan kecukupan jumlah alat kelengkapan jalan apakah dapat berfungsi dengan baik dan dalam jumlah yang cukup. Hal ini dimaksudkan agar dapat mengurangi titik-titik kemacetan di wilayah perkotaan maupun kecamatan di Kabupaten Sidoarjo. Alat kelengkapan jalan yang dimaksud adalah yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan yang meliputi: a) Alat pemberi isyarat; b) Rambu lalu lintas; c) Marka jalan; d) Alat penerangan jalan; e) Alat pengendali pemakai jalan yang terdiri alat pembatas kecepatan dan alat pembatas tinggi-lebar kendaran; f) CCTV pemantau lalu lintas dan revitalisasi CC Room.



Tabel 2.63
Jumlah Alat Kelengkapan Jalan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 (Per Kecamatan)

No	Kecamatan	Rambu Lalu Lintas	Warning Light	Traffic Light	RPPJ	Marka	Cermin Tikung	Early Warning	E-TLE
1	BALANGBENDO	16	3	1	6	11	4	1	0
2	KRIAN	31	13	4	18	9	13	0	0
3	JABON	3	1	0	4	4	20	0	0
4	PRAMBON	39	1	1	8	5	3	2	0
5	SIDOARJO	146	19	7	49	80	11	0	3
6	TAMAN	20	12	7	1	8	0	1	0
7	SUKODONO	41	19	9	17	18	0	0	0
8	TULANGAN	23	5	2	4	9	3	2	0
9	WARU	59	17	3	12	25	0	0	0
10	PORONG	20	3	2	12	7	4	0	0
11	GEDANGAN	94	13	7	3	8	3	0	0
12	SEDATI	35	3	1	9	4	0	0	0
13	TANGGULANGIN	21	1	0	11	3	8	0	0
14	TARIK	57	3	0	10	7	6	1	0
15	WONOAYU	6	3	1	12	6	0	0	0
16	BUDURAN	87	8	14	14	33	2	0	0
17	CANDI	106	16	10	17	26	5	0	0
18	KREMBUNG	11	0	0	9	5	0	0	0
TOTAL		815	140	69	216	268	82	7	3

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo, 2025



Data kelengkapan alat keselamatan jalan di 18 kecamatan di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan distribusi yang sangat bervariasi, mencerminkan perbedaan kebutuhan, kondisi lalu lintas, dan fokus pembangunan infrastruktur transportasi antar wilayah. Kecamatan Sidoarjo sebagai pusat kota memiliki kelengkapan paling dominan, termasuk 146 rambu lalu lintas, 49 RPPJ (Rambu Penyeberangan Pejalan Kaki), 80 marka jalan, serta satu-satunya wilayah yang telah menerapkan sistem E-TLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*). Ketersediaan ini sejalan dengan tingginya volume kendaraan dan aktivitas lalu lintas di wilayah tersebut.

Kecamatan Krian dan Candi juga menonjol dalam hal jumlah rambu dan lampu lalu lintas, menunjukkan bahwa keduanya merupakan kawasan dengan intensitas lalu lintas yang cukup tinggi. Sebaliknya, beberapa kecamatan seperti Jabon, Wonoayu, dan Krembung menunjukkan minimnya kelengkapan infrastruktur keselamatan jalan, dengan jumlah rambu, *traffic light*, maupun marka yang sangat terbatas. Bahkan, Jabon menonjol dengan jumlah cermin tikungan terbanyak (20 unit), yang menunjukkan potensi bahaya tikungan di kawasan tersebut meskipun peralatan lain masih terbatas. Keberadaan hanya 3 unit E-TLE di seluruh kabupaten, yang seluruhnya terkonsentrasi di Sidoarjo, menunjukkan bahwa implementasi penegakan hukum berbasis teknologi masih sangat terbatas. Selain itu, jumlah *Early Warning System* juga masih minim (7 unit di seluruh kabupaten), sehingga menjadi catatan penting bagi peningkatan keselamatan lalu lintas di wilayah rawan kecelakaan.

Pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab membangun Jalur Perlintasan Langsung (JPL) atau perlintasan sebidang sebagai pengaman jalur perkeretaapian. Data historis yang ada di Kabupaten Sidoarjo telah dibangun sebanyak 21 JPL sampai dengan pertengahan tahun 2024 pada beberapa wilayah antara lain di Kecamatan Candi, Taman, Buduran, Prambon, Krian, Balongbendo, Tulangan, Tarik. Berikut ini ditampilkan data JPL yang telah dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 2.64
Daftar Pembangunan Perlintasan Kereta Api Tahun 2024

NO	LOKASI JPL	KETERANGAN
1	JPL 49 KM 20 + 310 MASPION II BANJAR KEMANTREN, KEC. BUDURAN, KABUPATEN SIDOARJO	pembangunan pos + palang pintu tahun 2004
2	JPL 57 KM 23+911 DESA PAGERWOJO, KECAMATAN BUDURAN, KABUPATEN SIDOARJO	pembangunan pos + palang pintu tahun 2000
3	JPL 67 KM 27+810 DESA CANDI, KECAMATAN CANDI, KABUPATEN SIDOARJO	pembangunan pos + palang pintu tahun 2018
4	JPL 68 KM 28 + 245 DESA GELAM, KECAMATAN CANDI, KABUPATEN SIDOARJO	pembangunan pos + palang pintu tahun 2018
5	JPL 71 KM 29 + 769 DESA SUMORAME, KECAMATAN CANDI, KABUPATEN SIDOARJO	pembangunan pos + palang pintu tahun 2018
6	JPL 01 KM 26 + 324 DESA SIDOKARE, KEC. SIDOKARE, KAB. SIDOARJO	pembangunan pos + palang pintu tahun 2015
7	JPL 05 KM 28 + 877 NYAMPLUNG, DESA SUMOKALI, KEC. CANDI, KAB. SIDOARJO	pembangunan pos + palang pintu tahun 2018
8	JPL 09 KM 31+328 DURUNG BEDUG, KEC. CANDI, KAB. SIDOARJO	pembangunan pos + palang pintu tahun 2018
9	JPL 17 KM 35 + 965 KEPUNTEN, KEC. TULANGAN, KAB. SIDOARJO	pembangunan pos + palang pintu tahun 2015
10	JPL 27 KM 42 + 434 KEC. PRAMBON, KAB. SIDOARJO ds. Kedungwonokerto	pembangunan pos + palang pintu tahun 2015
11	JPL 30 KM 26+121, Desa Tawang Sari Kec. Taman	Pembangunan pos jaga + palang pintu baru oleh BTP Kemenhub th 2023
12	JPL 32 KM 27+154 SAWUNG GALING, KEC. TAMAN, KAB. SIDOARJO	pembangunan pos + palang pintu tahun 2015
13	JPL 53 KM 35 + 775 KANIGORO, KEC. KRIAN, KAB. SIDOARJO	pembangunan pos + palang pintu tahun 2015
14	JPL 59 KM 37 + 154 DUSUN SEMAJI, DESA KEMASAN, KEC. KRIAN, KAB. SIDOARJO	pembangunan pos + palang pintu tahun 2018
15	JPL 72 KM 41 + 212 SEKETI, KEC. BALONGBENDO, KAB. SIDOARJO	pembangunan pos + palang pintu tahun 2018
16	JPL 39 KM 30 + 007 BRINGINBENDO, KEC. TAMAN, KAB. SIDOARJO	pembangunan pos + palang pintu tahun 2021
17	JPL 42 KM 31+919, Desa Kramatjegu (Jalur utama)	Pembangunan pos jaga + palang pintu baru oleh BTP Kemenhub th 2023
18	JPL 25 KM24+571, Desa Wonocolo arah Polsek (jalur utama)	Pembangunan pos jaga + palang pintu baru oleh BTP Kemenhub th 2023

NO	LOKASI JPL	KETERANGAN
19	JPL 56 KM 36+308, Desa Terungkulon (jalur utama)	Pembangunan pos jaga + palang pintu baru oleh BTP Kemenhub th 2023
20	JPL 56 KM 23+155 Dusun Mambang, Kelurahan Pucang, Kec. Sidoarjo.	Pembangunan pos jaga + palang pintu baru oleh Dishub Provinsi / Program Provinsi th 2023
21	JPL 15 KM 35+155 Desa Kejaksan Kec. Tulangan (Makam Mbah Jaelani)	Pembangunan pos jaga + palang pintu baru oleh Dishub Provinsi / Program Provinsi th 2023

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo, 2025

Kelengkapan yang mendukung pembangunan JPL juga sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Data terkait mencatat bahwa sampai dengan tahun 2024 rambu-rambu perlintasan kereta api (rambu berhenti, dan rambu penunjuk kereta api) yang telah dipasang pada 18 titik sebagaimana ditampilkan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.65
Daftar Rambu Perlintasan Kereta Api Tahun 2024

No	Lokasi	Rambu	Jumlah	Rambu	Jumlah	Total
1	Tenggulunan		1		1	2
2	Seruni (Depan Pangkalan Utama TNI)		2		2	4
3	Buduran PT Sumber Pangan		2		1	3
4	Pondok Sidokare Indah		2		2	4
5	Sumokali		2		2	4
6	Durungbedug Candi (Depan MTS)		1		1	2
7	Durungbedug		2		2	4
8	Kepunten				2	2
9	Dusun Glonggong Kedung Kembar				2	2

No	Lokasi	Rambu	Jumlah	Rambu	Jumlah	Total
10	Kedung Kembar 2				2	2
11	Kendalsewu Tarik				1	1
12	Margobener				2	2
13	Kedung Klintar Tarik				2	2
14	Guyangan Seketi				2	2
15	Kedunganten Utara		2		2	4
16	Ngaban Tanggulangin		2		2	4
17	Gelam Gg. Kelurahan		2		1	3
18	Gelam Langgar (Garuda)		2		1	3

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo, 2025

Urusan perhubungan yang berada di bawah pemangku Dinas Perhubungan juga membawahi pengelolaan Terminal Tipe C. Permasalahan yang terjadi pada kondisi ini adalah adanya alih fungsi dari dibangunnya Terminal Tipe C tersebut. Oleh sebab itu, permasalahan yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah adalah mengembalikan lagi fungsi pengelolaan Terminal Tipe C yang ada di Sidoarjo sebagai tempat parkir untuk angkutan umum, bukan menjadi pasar seperti Terminal Krian.

10. Komunikasi dan Informatika

Capaian kinerja urusan komunikasi dan informatika Kabupaten Sidoarjo digambarkan melalui indikator tingkat kematangan aspek pemerintahan digital. Tingkat kematangan aspek pemerintahan digital adalah

nilai yang diperoleh dari rata-rata 9 aspek dalam pengukuran Indeks Pemerintahan Digital (PEMDI).

11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi merupakan salah satu usaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat, penurunan kemiskinan, dan perluasan lapangan pekerjaan. Di Sidoarjo koperasi yang statusnya aktif pada tahun 2020 sebesar 82.01 persen atau berjumlah 1.205 dari 1.462 total jumlah koperasi yang terdaftar. Namun pada tahun 2021 meningkat 8 dan 2021 mengalami pemulihan koperasi sekitar 52 koperasi aktif. Pengembangan dan pemberdayaan koperasi memiliki potensi yang besar dan strategis dalam meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat.

Tabel 2.66
Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2020 – 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Koperasi Aktif	1205	1213	1257	1257	1236
Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	-	0,66	3,63	0,00	-1,67
Persentase Koperasi Aktif	82,01	82,5	85,5	85,5	84,1

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, 2025

Sebuah koperasi dinilai aktif jika koperasi tersebut telah memiliki legalitas yang lengkap dan jelas dari pemerintah seperti memiliki Nomor Induk Koperasi (NIK), Surat Keputusan Anggaran Dasar oleh Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia oleh Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dan dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota. Koperasi aktif mendukung parameter koperasi berkualitas dari sisi aspek badan usaha aktif. Pada tahun 2024 jumlah koperasi aktif di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 1.236 koperasi dari total

keseluruhan 1.470 koperasi atau 84,10%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022, maka jumlah ini terbilang stagnan.

Tabel 2.67
Pertumbuhan Koperasi Berkualitas dan Pertumbuhan
Usaha Mikro Mandiri Tahun 2020 - 2024

Indikator	Tahun									
	2020		2021		2022		2023		2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Persentase koperasi yang berkualitas	20,5	20,7	21,9	21,9	23,2	23,33	24,69	24,69	26,39	26,73
Persentase usaha mikro yang mandiri	1,75	1,83	1,87	1,87	1,93	1,93	1,98	2,06	2,04	2,21

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, 2025

Pada tabel di atas, menggambarkan capaian pertumbuhan koperasi yang berkualitas dan usaha mikro mandiri sejak tahun 2021 hingga tahun 2024 selalu mencapai target yang ditentukan. Dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih maka capaian ini harus terus ditingkatkan, mengingat adanya program prioritas UMKM Naik Kelas serta Bantuan Permodalan pada UMKM perempuan.

Tabel 2.68
Perkembangan Koperasi Sehat Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2020 – 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Koperasi Sehat	485	505	563	649	649
Presentase Koperasi Sehat	32.9	34.3	44.79	51.39	56.80

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, 2025

Koperasi sehat adalah suatu kondisi koperasi yang usahanya memenuhi tujuh aspek penilaian kesehatan yaitu Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen Efisiensi, Likuiditas, Kemandirian dan Pertumbuhan, Jatidiri Koperasi. Berdasarkan Peraturan Deputy Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tentang



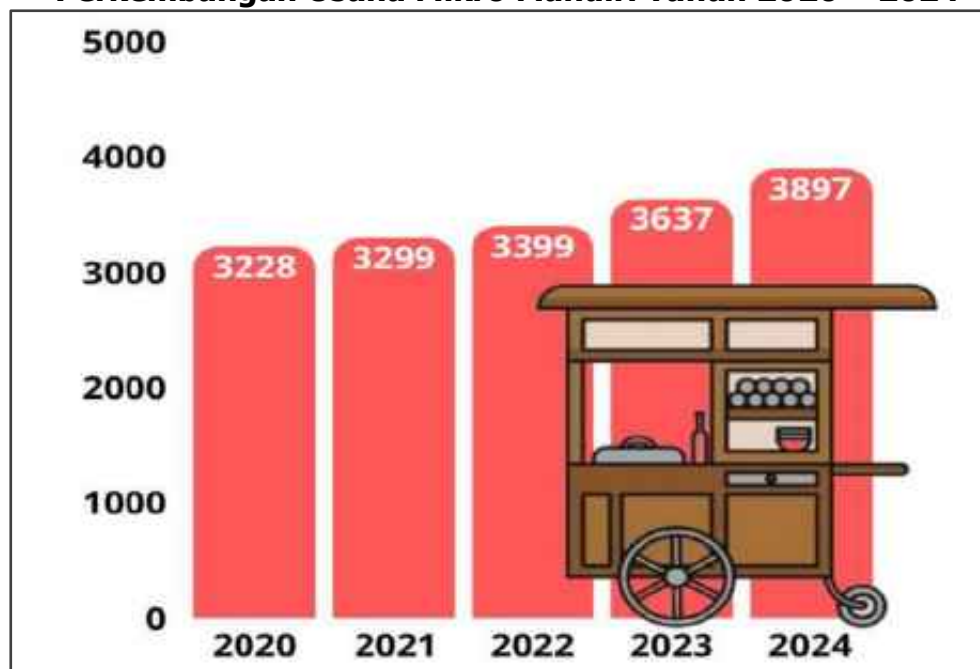
Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi maka koperasi wajib dinilai kesehatannya setiap tahunnya. Adapun penilaian kesehatan koperasi dilakukan terhadap aspek sebagai berikut: 1. Permodalan 2. Kualitas Aktiva Produktif 3. Manajemen 4. Efisiensi 5. Likuiditas 6. Kemandirian dan Pertumbuhan 7. Jatidiri Koperasi. Jumlah Koperasi Sehat mendukung parameter koperasi berkualitas dari sisi aspek usaha koperasi, aspek keuangan koperasi, aspek manfaat koperasi terhadap anggota, aspek manfaat koperasi terhadap masyarakat. Pada tahun 2024 Capaian Persentase Koperasi Sehat sebesar 56,80% dari target 45,82%. Jumlah ini menjadi persentase terbesar dalam periode 5 tahun terakhir.

Kabupaten Sidoarjo juga mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam pembentukan Koperasi Merah Putih. Pembentukan serta penguatan Koperasi Merah Putih sebagai bagian dari strategi penguatan pembangunan ekonomi karena koperasi berbasis kebersamaan dan gotong royong, yang selaras dengan semangat nasionalisme dan kemandirian ekonomi.

Dukungan terhadap koperasi merah putih telah diwujudkan melalui program pemberdayaan dan perlindungan koperasi serta ditunjang juga dengan program pendidikan dan pelatihan perkoperasian.

Berikutnya untuk jumlah usaha mikro mandiri periode tahun 2020–2024 mengalami peningkatan jumlah usaha mikro mandiri dari 3.228 usaha tahun 2020 menjadi 3.897 usaha pada tahun 2024. Hal ini dilakukan dalam rangka mengukur adanya aktivitas riil yang memiliki dampak positif bagi masyarakat baik secara ekonomi maupun sosial. Dengan peningkatan jumlah usaha mikro mandiri sebanyak 3.897, tercatat Persentase Usaha Mikro Mandiri di Kabupaten Sidoarjo adalah sebesar 2,21 sehingga sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 1,98.

Gambar 2.72
Perkembangan Usaha Mikro Mandiri Tahun 2020 – 2024



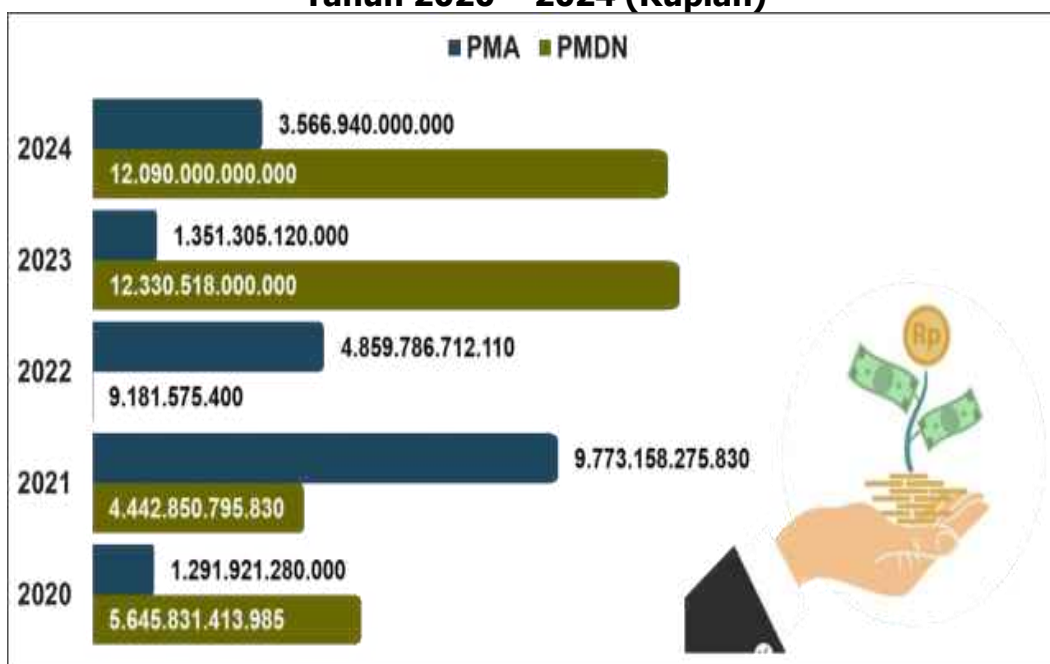
Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, 2025

12. Penanaman Modal

Iklim investasi di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan perkembangan yang terus membaik. Posisi Kabupaten Sidoarjo yang strategis dan memiliki akses transportasi dan ketersediaan tenaga kerja yang besar mampu menjadi tujuan investasi yang menarik bagi para investor, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Capaian nilai investasi PMDN Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2023 merupakan yang tertinggi sebanyak Rp 12.330.518.000.000,00 sedangkan yang terendah pada tahun 2022 sebanyak Rp 9.181.575.400,00. Sementara realisasi nilai investasi PMA tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebanyak Rp 9.773.158.275.830,00 dan terendah pada tahun 2020 sebanyak Rp 1.291.921.280.000,00. Pada tahun 2024 nilai investasi PMA meningkat jika dibandingkan tahun 2023, namun pada nilai investasi PMDN menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebagaimana ditampilkan pada grafik berikut.

Gambar 2.73
Realisasi Investasi PMDN dan PMA Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2020 – 2024 (Rupiah)



Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2025

Untuk mempertahankan tren investasi positif dan mengatasi fluktuasi, Sidoarjo perlu strategi investasi detail dan terukur, termasuk rencana insentif daerah yang menarik dalam RPJMD untuk dukungan DPR dan alokasi APBD. Dalam upaya untuk meningkatkan investasi PMDN di Kabupaten Sidoarjo selama 5 tahun ke depan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui salah satu Program Unggulannya yaitu “Perizinan Mudah” yang mengutamakan pengasawan pada perizinan guna mendukung kepastian berusaha. Program unggulan ini juga akan ditopang oleh program-program unggulan lainnya misalnya “Sidoarjo Membangun” guna memperlancar akses transportasi salah satunya untuk kepentingan sektor industri.

13. Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan pemuda sebagai salah satu unsur sumberdaya manusia dan tulang punggung bangsa serta penerus cita-cita bangsa, disiapkan dan dikembangkan kualitas kehidupannya, mulai dari tingkat pendidikan, kesejahteraan hidup dan tingkat kesehatannya. Pemuda merupakan penerus perjuangan generasi terdahulu untuk mewujudkan cita-

cita bangsa. Pemuda menjadi harapan dalam setiap kemajuan di dalam suatu bangsa, pemuda lah yang dapat merubah pandangan orang terhadap suatu bangsa dan menjadi tumpuan para generasi terdahulu untuk mengembangkan suatu bangsa dengan ide-ide ataupun gagasan yang berilmu, wawasan yang luas, serta berdasarkan kepada nilai-nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Seirama dengan perkembangan prestasi pemuda, prestasi di bidang olahraga juga terjadi peningkatan di tingkat nasional dan internasional. Jumlah prestasi olahraga sampai dengan tahun 2024 sebesar 479 prestasi, dimana hal ini melebihi target yang ditentukan yang sebesar 90 prestasi.

Gambar 2.74
Jumlah Prestasi Olahraga Tahun 2020 – 2024



Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo, 2025

Saat ini ada 16 sarana prasarana yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata yang tersebar di seluruh Sidoarjo. Ke depan jumlah sarpras olahraga ini akan terus ditambah dan diperbaiki melalui PSU Perumahan yang telah diserahkan kepada pemerintah. Berikut adalah daftar sarpras olahraga yang saat ini dikelola oleh Disporapar.

Tabel 2.69
Daftar Sarana dan Prasarana Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah
1	Stadion Gelora Delta	1
2	Gedung Serba Guna (Basket, Futsal, Volly Indoor, Hand Ball)	1
3	Kolam Renang	3
	GOR, Perum Mutiara Regency, Perum. Safira Blue Resort, Kedungturi, Taman	
4	Lapangan Tenis Outdoor dan Indoor	10
	Magersari, Perum Mutiara Regency, Perum Pondok Mutiara Desa Banjarbendo, Perum Sepanjang Town House Kalijaten Taman, Perum Graha Mutiara Kebonagung Sukodono, Perum Juanda Harapan Permai Wedi Gedangan, Perum Pondok Jati Tahap III Jati, Perum Taman Permata Indah Kalijaten	
5	Aula Tenis	1
6	Lapangan Voli Pantai	1
7	Stadion Jenggolo (Sepakbola & Panahan)	1
8	Lapangan Sepak Bola Pucang	1
9	Lap. Voli, Lap. Sepak Takraw, Lap. Petanque (Jl. Sultan Agung)	1
10	Lap. Basket (Perum Pondok Mutiara Desa Banjarbendo, Perum Permata Sidoarjo, Kludan Tanggulangin)	2
11	Sirkuit Sepatu Roda GOR	1
12	Lap. Bulutangkis (Town House Taman, Kalijaten)	2

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo, 2025

Selanjutnya tercatat ada peningkatan prestasi pemuda Sidoarjo di tingkat nasional maupun di internasional dalam waktu 5 tahun. Jika dilihat pada tahun 2020 prestasi pemuda sidoarjo hanya berjumlah 19 orang, menjadi 135 orang pada tahun 2021. Pada tahun berikutnya prestasi mengalami penurunan menjadi 101 orang dan turun kembali menjadi 86 orang pada tahun 2024, sebagaimana tercantum di gambar berikut.

Tabel 2.70
Peningkatan Prestasi di Bidang Kepemudaan

Indikator	Satuan	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
Persentase peningkatan prestasi di bidang kepemudaan	%	13,73	13,79	13,64	14,67

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo, 2025

Percepatan prestasi kepemudaan menampilkan visi pengembangan potensi generasi muda yang ambisius. Kondisi awal 14,67% pada tahun 2024 akan ditargetkan meningkat secara bertahap menjadi 16,28% pada tahun 2025, selanjutnya 17% pada tahun 2026, kemudian 17,95% pada tahun

2027, berlanjut 18,84% pada tahun 2028, diikuti 18,9% pada tahun 2029, dan puncak 19,49% pada tahun 2030. Target peningkatan ini menunjukkan prioritas pengembangan pemuda melalui pencarian bakat, peningkatan keterampilan, dan dukungan kompetisi multi-bidang untuk mengoptimalkan potensi kepemudaan daerah.

Indikator lainnya untuk urusan olahraga adalah Indeks Pembangunan Olahraga yang merupakan ukuran pembangunan olahraga berdasarkan ruang, SDM, program, dan prestasi. Pada tahun 2024 capaian Indeks Pembangunan Olahraga Kabupaten Sidoarjo sebesar 0,263.

14. Statistik

Sampai saat ini data masih merupakan tantangan tersendiri dalam mendukung pembangunan daerah, pemanfaatan data merujuk pada proses menggunakan data untuk menghasilkan wawasan, pemahaman, dan nilai tambah. Ini melibatkan analisis, interpretasi, dan pengambilan keputusan berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber. Pemanfaatan data bertujuan untuk mengoptimalkan operasi, membuat keputusan yang lebih baik, memahami tren, dan mengidentifikasi peluang atau masalah.

Indeks Pembangunan statistik adalah ukuran yang menggambarkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral bagi instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Capaian Indeks Pembangunan Statistik Kabupaten Sidoarjo tahun 2024 sebesar 2,51.

15. Persandian

Secara umum, urusan persandian meliputi kegiatan pengamanan atau melindungi informasi. Dalam melakukan penilaian dalam urusan persandian ini Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menggunakan indikator Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI). Indeks KAMI adalah alat evaluasi untuk menganalisa tingkat kesiapan pengamanan informasi di suatu organisasi. Alat evaluasi ini tidak ditujukan untuk menganalisa kelayakan atau efektifitas bentuk pengamanan yang ada, melainkan sebagai perangkat untuk memberikan gambaran kondisi kesiapan (kelengkapan dan kematangan)

kerangka kerja keamanan informasi kepada pimpinan Instansi/Perusahaan. Evaluasi dilakukan terhadap berbagai area yang menjadi target penerapan keamanan informasi dengan ruang lingkup pembahasan yang juga memenuhi semua aspek keamanan yang didefinisikan oleh standar ISO/IEC 27001:2013.

Indeks KAMI merupakan bentuk tanggungjawab penggunaan dana publik sekaligus menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran mengenai kebutuhan keamanan informasi. Pertukaran informasi dan diskusi dengan Instansi Pemerintah lainnya sebagai bagian dari penggunaan alat evaluasi Indeks KAMI ini juga menciptakan alur komunikasi antar pengelola keamanan informasi di sektor pemerintah sehingga semua pihak dapat mengambil manfaat dari *lesson learned* yang sudah dilalui.

Gambar 2.75
Indeks Keamanan Informasi Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2020 – 2024



Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo, 2025

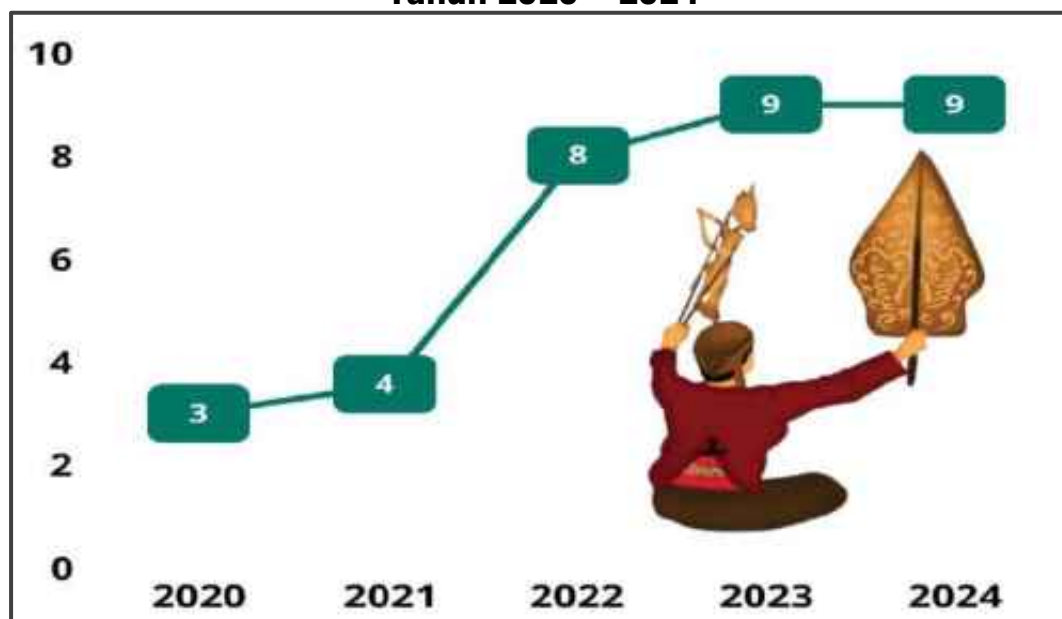
Pada tahun 2020 capaian indeks keamanan informasi (Indeks KAMI) Kabupaten Sidoarjo sebesar 494 poin dengan kategori cukup. Sementara pada tahun 2021 capaian ini meningkat menjadi 528 poin dengan kategori cukup baik, capaian indeks keamanan informasi pada tahun 2024 meningkat kembali menjadi 551.

16. Kebudayaan

Secara umum, budaya atau kebudayaan merupakan cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh bersama serta diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Maka pembangunan seni, budaya, dan olahraga merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembinaan dan pembangunan bangsa guna meningkatkan kualitas sumber daya insani, terutama jika diarahkan pada peningkatan kesehatan jasmani dan rohani, serta membangun watak dan kepribadian yang disiplin dan sportivitas. Pembangunan seni, budaya dan olahraga memperlihatkan eksistensi bangsa melalui pembinaan prestasi.

Nilai dimensi warisan budaya merupakan merupakan warisan nyata atau tidak berwujud dari sebuah kota atau komunitas yang telah di wariskan untuk dilestarikan dan di transmisikan ke generasi berikutnya. Nilai warisan budaya ini di hitung berdasarkan persentase benda, bangunan, struktur dan situs cagar budaya yang akan ditetapkan serta yang sudah ditetapkan terhadap yang ada serta penduduk yang menggunakan bahasa daerah baik di rumah maupun dalam pergaulan sehari – hari.

Gambar 2.76
Jumlah Kelompok Seni yang Melestarikan Seni dan Budaya Daerah Tahun 2020 – 2024



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo, 2025



Menurut gambar di atas sampai dengan tahun 2023 dan 2024 ada 9 kelompok yang melestarikan seni dan budaya daerah yang berarti dibandingkan tahun 2020 sudah meningkat 6 kelompok (200%) yang aktif dalam pelestarian tersebut. Pada tahun 2021 Kabupaten Sidoarjo mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dari Dirjen Kekayaan intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, yaitu: 1. Kupang Lontong 2. Tari Banjarkemuning 3. Musik Patrol 4. Udeng Pacul Gowang.

17. Perpustakaan

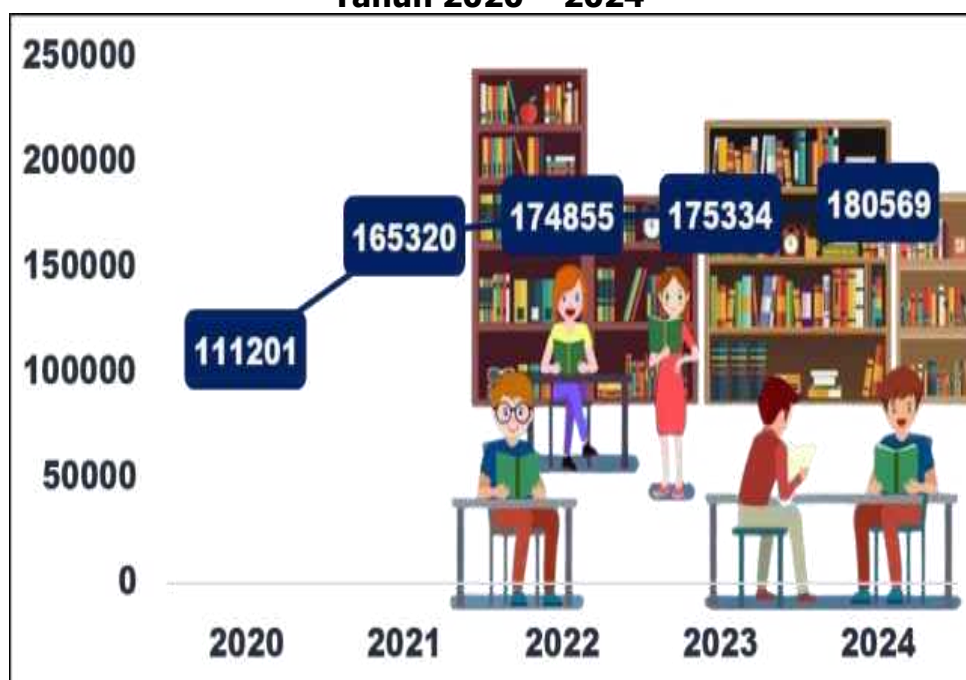
Perpustakaan adalah upaya untuk membangun dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses belajar dan mengajar. Perpustakaan juga tempat yang terorganisasi secara baik dan sistematis secara langsung ataupun tidak langsung dapat memudahkan proses belajar mengajar di sekolah itu berada. Terkait dengan kemajuan dalam bidang pendidikan dan dengan adanya perbaikan belajar mengajar saat ini yang dirasa tidak bisa terpisahkan dari penyediaan fasilitas dan sarana pendidikan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan. Perpustakaan untuk meningkatkan kecerdasan kehidupan masyarakat khususnya di Kabupaten Sidoarjo, maka perlu dikembangkan budaya gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan sebagai wahana pembelajaran sepanjang hayat. Perpustakaan merupakan institusi pengoleksi dan pengelola sumber informasi seperti karya tulis, karya cetak dan karya rekam. Perpustakaan yang terorganisasi secara baik dan sistematis dapat memberikan dampak kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan serta tidak hanya menjadi tempat imajinasi yang mencerdaskan namun juga memberdayakan masyarakat sehingga manfaat dan dampak dapat dirasakan dalam meningkatkan kualitas taraf hidup.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus melakukan upaya mengembangkan perpustakaan yang dapat mendukung dalam pertumbuhan minat dan budaya membaca masyarakat dengan cara:

- Menyediakan layanan perpustakaan di Kecamatan, Desa, Kelurahan, Sekolah, Rumah Sakit, Puskesmas, Yang tersebar di beberapa wilayah Kecamatan dan Desa Kabupaten Sidoarjo
- Melaksanakan Sosialisasi Budaya Literasi
- Menyelenggarakan perpustakaan keliling dengan menggunakan sarana angkutan yang melayani di sekolah dan desa
- Melaksanakan promosi budaya gemar membaca dengan mengadakan penyebaran informasi melalui brosur/pamflet, spanduk, banner, media cetak dan media sosial
- Melaksanakan kerjasama dan jaringan antar perpustakaan
- Melaksanakan bimbingan teknis kepada tenaga pengelola perpustakaan
- Membangun dan memelihara Sarana Perpustakaan di tempat – tempat umum yang menjadi kewenangan daerah.

Gambar 2.77
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2020 – 2024



Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo, 2025

Pada tahun 2021 jumlah pengunjung perpustakaan mulai meningkat kembali setelah COVID-19 mereda yakni sekitar 165.320 orang. Pengunjung perpustakaan sangat beragam mulai dari pelajar, mahasiswa, guru, pegawai negeri, pegawai swasta, TNI/POLRI. Sementara pada tahun 2023 jumlah pengunjung perpustakaan Kabupaten Sidoarjo sebanyak 175.334 orang, kemudian kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 180.569 orang pengunjung.

Gambar 2.78
Indeks Minat Baca Masyarakat Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2020 – 2024



Sumber: Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo, 2025

Indeks minat membaca masyarakat di Kabupaten Sidoarjo tahun 2020–2024 fluktuatif. Pada tahun 2020 mencapai 71.79 dari target 70 poin. Walaupun sempat mengalami penurunan dalam hal capaian di tahun 2022, akan tetapi mulai tahun 2023 tercatat kembali kenaikan 67.28 poin di tahun 2023 dan sebesar 73 poin di tahun 2024. Ada 3 genre bacaan yang disukai oleh masyarakat baik bacaan online yaitu Agama, Hiburan, dan Kesehatan.

Tabel 2.71
Tingkat Kegemaran Membaca Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2021 - 2024

Indikator	Satuan	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
Tingkat Kegemaran Membaca	Nilai	60,06	63,10	67,28	83,97

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo, 2025

Tingkat kegemaran membaca adalah indeks atau skor yang menggambarkan minat dan frekuensi membaca masyarakat di daerah, yang diukur melalui indikator akses terhadap bahan bacaan, frekuensi membaca, dan dukungan fasilitas untuk melakukan aktivitas membaca. Realisasi Tingkat kegemaran membaca terus menunjukkan peningkatan sampai dengan 83,97 di tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa pengetahuan literasi membaca yang ada di Kabupaten Sidoarjo terus membaik.

18. Kearsipan

Menurut Undang–undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, penyelenggara kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelola arsip dalam satu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh prasarana dan sarana, serta sumber daya manusia, dan pendampingan serta monitoring penerapan penggunaan sistem baru yang dikembangkan dengan sistem aplikasi kearsipan yang berbasis IT.

Indikator kinerja untuk urusan kearsipan yaitu Indeks Budaya Tertib Arsip Pemerintahan yang didefinisikan sebagai nilai yang menunjukkan tingkat kepatuhan dan pembudayaan tertib arsip di lingkungan perangkat daerah, berdasarkan penerapan sistem kearsipan aktif, inaktif, dan vital sesuai regulasi ANRI.

c. Layanan Urusan Pilihan

1. Pariwisata

Jumlah kunjungan wisata merupakan total kunjungan wisatawan ke Kabupaten Sidoarjo, baik domestik maupun mancanegara, dalam satu tahun.

Tabel 2.72
Jumlah Wisatawan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 - 2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Wisatawan	Orang	844.072	1.045.825	1.068.205	1.797.523	1.148.592

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo, 2025

Berdasarkan tabel diketahui bahwa jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Sidoarjo menurun di tahun 2024 dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Terobosan-terobosan baru harus lebih dipertajam guna meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan sehingga dapat mendongkrak capaian pendapatan asli daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah.

2. Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Sidoarjo yang merupakan daerah delta memiliki sektor unggulan di bidang kelautan dan perikanan. Komoditi Udang dan Bandeng merupakan unggulan yang dikembangkan di daerah ini.

Indikator kinerja untuk urusan perikanan adalah volume produksi perikanan yang merupakan jumlah total hasil produksi dari subsektor perikanan (tangkap, budidaya) dalam ton per tahun. Berikut adalah capaian indikator volume produksi perikanan di Kabupaten Sidoarjo tahun 2020-2024.

Tabel 2.73
Volume Produksi Perikanan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 - 2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Volume Produksi Perikanan	ton	117.618,08	119.038,80	123.205,52	124.625,20	126.010,53

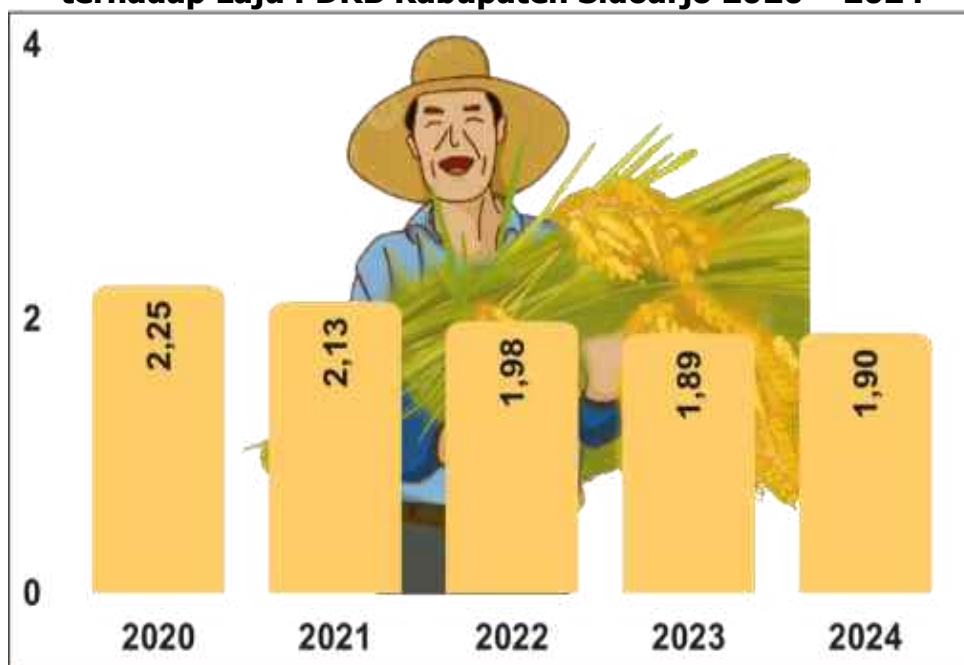
Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo, 2025

Total volume produksi perikanan Kabupaten Sidoarjo meningkat di setiap tahunnya. Realisasi akhir tahun 2024 sebanyak 126.010,53 ton lebih tinggi dari capaian tahun 2023 sebesar 124.625,20. Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo akan terus mengupayakan agar sektor perikanan terus berkembang pesat dengan menyalurkan bantuan benih kepada pembudidaya perikanan dengan tujuan peningkatan produksi, selain itu juga diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih baik khususnya masyarakat pembudidaya perikanan.

3. Pertanian

Pertanian merupakan satu – satunya sektor primer yang tidak berdampak oleh pandemi covid-19. Disaat yang lain tumbuh minus, pertanian di Sidoarjo justru sebaliknya, yaitu tumbuh di kisaran 2% walaupun kontribusi ini masih dikategorikan kecil dibandingkan dengan sektor yang lain.

Gambar 2.79
Peranan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap Laju PDRB Kabupaten Sidoarjo 2020 – 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo, 2025

Pada tahun 2020 kontribusi PDRB Sektor Pertanian di Kabupaten Sidoarjo sebesar 2,25% dan terus mengalami penurunan hingga 1,90% di tahun 2024. Selain kontribusi terhadap PDRB, indikator kinerja lain urusan



pertanian adalah Nilai Tukar Petani yang merupakan rasio atau perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang akan menunjukkan tingkat kondisi (untung/rugi) pada petani. Secara lengkap produksi pertanian Kabupaten Sidoarjo 2020 – 2024 ditampilkan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.74
Produksi Pertanian Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 – 2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Produksi :					
Padi	1.944.938 Kw	2.004.826 Kw	1.976.553,64 Kw	1.883.137 Kw	1.978.710 Kw*
Jagung	25.848 Kw	19.151 Kw	11.805,18 Kw	13.411 Kw	15. Kw
Kacang Hijau	14.341 Kw	18.868 Kw	15.801,58 Kw	20.829 Kw	Kw
Kedelai	1.713 Kw	1.929 Kw	2.062,71 Kw	5.593 Kw	Kw
Sawi	62.334 Kw	56.461 Kw	52.093,21 Kw	72.577 Kw	80.074 Kw*
Bayam	43.792 Kw	43.540 Kw	43.377,34 Kw	48.620 Kw	34.596 Kw*
Kangkung	50.392 Kw	56.952 Kw	42.632,26Kw	61.169 Kw	62.695 Kw*
Produksi Tebu	3.563.845 kw	3.431.367,99 Kw	2.969.732,94 Kw	3.561.967,78 Kw	3.508.248,00 Kw*
Produksi Peternakan :					
Daging	35.351.442 Kg	39.414.426 Kg	40.177.439 Kg	38.295.804 Kg	38.812.797 Kg
Susu	2.729.155 Kg	2.749.932 Liter	4.907.548 Kg	1.686.038 Kg	1.702.730 Kg
Telur	11.325.983 Kg	11.842.957 Kg	2.750.063 Kg	2.723.552 Kg	2.754.056 Kg
Produktivitas					
Padi	68,9	68,12	68,91	68,929	71,13
Jagung	64	64,05	64,12	64,21	71,31
Kacang Hijau	18,96	19,07	19,07	19,12	23,02
Kedelai	16,47	20	16,60	16,643	22,84
Sawi	105,11	106,7	105,13	105,35	106,45
Bayam	91,23	95,56	91,25	91,258	102,30
Kangkung	61,3	62,15	62,32	61,33	62,03
Tebu	749	749,42	750,52	751,29	833,93

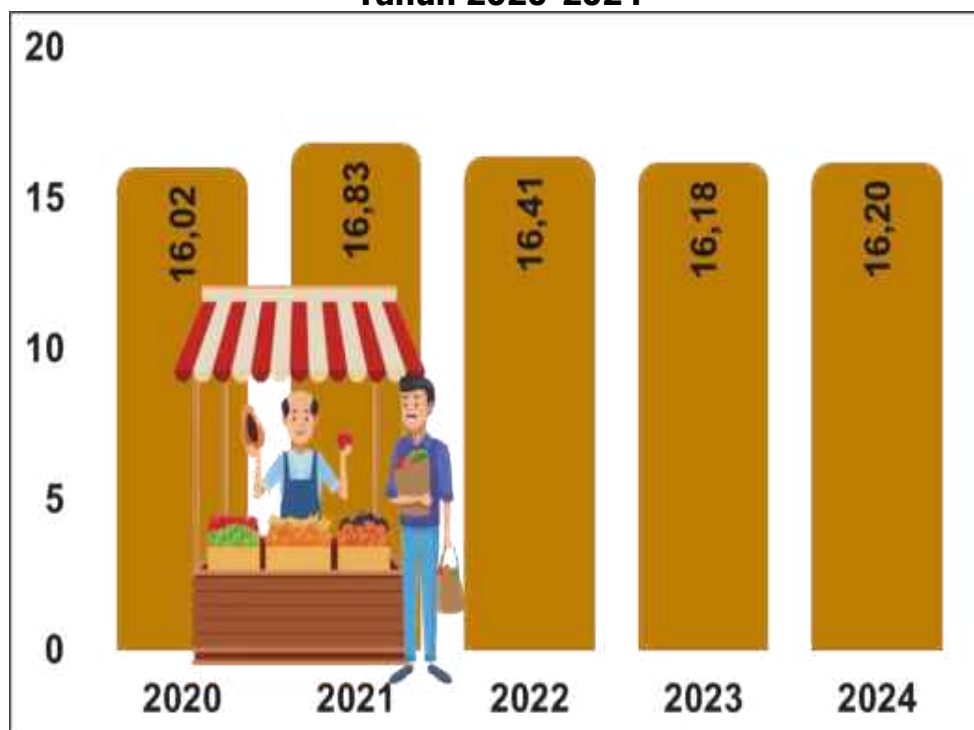
Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo, 2025

*Angka Sementara

4. Perdagangan

Perdagangan Kabupaten Sidoarjo ditunjukkan oleh nilai ekspor dan impor ke 9 (sembilan) negara. Perdagangan merupakan sektor terbesar kedua penyumbang PDRB Kabupaten Sidoarjo. Kontribusi perdagangan terhadap PDRB selalu cenderung bergerak naik pada setiap tahunnya. Hal tersebut tergambarkan dalam data gambar dibawah ini.

Gambar 2.80
Pertumbuhan Persentase PDRB Sektor Perdagangan
Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo, 2025

Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan pada tahun tahun 2020 sebesar 16.02%, dan meningkat pada tahun 2021 menjadi 16,83% yang menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dibanding tahun – tahun sebelumnya yaitu menjadi 16.83%. Kenaikan ini terjadi dikarenakan aktifitas ekonomi mulai kembali normal karena kebijakan terkait PSBB Jawa – Bali, namun mulai tahun 2022 sampai dengan 2024 capaiannya terus mengalami penurunan menjadi 16,18 di tahun 2023 dan 16,20 di tahun 2024.

Gambar 2.81
Perkembangan Nilai Ekspor Non Migas
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 – 2024



Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo, 2025

Capaian Perkembangan Nilai Ekspor Non Migas Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 sebesar US \$1.279.666.753 jika dibandingkan dengan target tahun 2021, maka capaian kinerja tahun 2021 mencapai 107% dari target yang telah ditetapkan sebesar US \$1.200.000.000. Pada tahun 2023 perkembangan nilai ekspor non migas mencapai US \$1.303,69 ribu, dan meningkat kembali di tahun 2024 menjadi US \$1.835,42 ribu.

5. Perindustrian

Urusan sektor perindustrian merupakan sektor sentral yang turut memajukan perekonomian di Kabupaten Sidoarjo. Jumlah industri yang banyak di Kabupaten Sidoarjo turut memberikan kontribusi tertinggi dalam capaian PDRB. Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan adalah ukuran yang menggambarkan persentase perubahan nilai tambah atau produksi dari sektor industri pengolahan dalam suatu wilayah selama periode waktu tertentu. Capaian untuk persentase pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan sebagai berikut.

Tabel 2.75
Persentase Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 - 2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan	%	0,98	4,90	5,57	4,40	5,18

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo, 2025

Sebagai penyumbang kontribusi tertinggi dalam PDRB Kabupaten Sidoarjo, pertumbuhan PDRB industri pengolahan memiliki trend meningkat dari tahun ke tahun. Strategi yang tepat sasaran harus terus dikembangkan dan dievaluasi untuk meningkatkan sektor industri ini. Kemudahan perizinan usaha yang lebih inovatif diharapkan dapat membantu merealisasikan melalui program unggulan yang dicanangkan oleh Kepala Daerah terpilih.

6. Transmigrasi

Indikator yang dipergunakan untuk urusan transmigrasi adalah Persentase transmigran yang diberangkatkan. Indikator ini merupakan Persentase transmigran yang diberangkatkan adalah rasio jumlah calon transmigran yang berhasil diberangkatkan ke lokasi transmigrasi dibanding total calon transmigran terdaftar dalam satu tahun dengan target yang ditetapkan untuk tahun 2025 – 2029 mencapai 100%.

d. Urusan Penunjang Pemerintahan

1. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan yang baik didukung dengan penerapan manajemen strategis melalui penjabaran rencana operasional yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Sebagai perangkat daerah pengampu urusan perencanaan, maka indikator kinerja Bappeda Kabupaten Sidoarjo adalah persentase kesesuaian dokumen RKPD terhadap RPJMD, persentase konsistensi antara dokumen perencanaan terhadap dokumen penganggaran daerah, persentase kesesuaian dokumen Renja terhadap dokumen Renstra

PD bidang Perekonomian dan SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan serta Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang disatukan menjadi Nilai SAKIP komponen perencanaan dan pengukuran.

Nilai SAKIP Kabupaten komponen perencanaan dan pengukuran adalah skor yang mengukur kualitas penyusunan dokumen perencanaan kinerja dan pengukuran capaian (RPJMD, Renstra, Renja, IKU, dan indikator kinerja), sebagai bagian dari evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Tabel 2.76
Capaian Kinerja Urusan Pembangunan Daerah
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2024

Indikator Kinerja	2021		2022		2023		2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R
Persentase Kesesuaian Dokumen RKPD dengan RPJMD	100	67	100	100	100	100	100	100
Persentase Konsistensi antara dokumen perencanaan terhadap penganggaran daerah	100	99	100	99	100	100	100	100
Persentase Kesesuaian Dokumen Renja terhadap dokumen Renstra, PD bidang Perekonomian dan SDA	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Kesesuaian Dokumen Renja terhadap dokumen Renstra, PD bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Kesesuaian Dokumen Renja terhadap dokumen Renstra, PD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo, 2025

2. Keuangan

Urusan keuangan sebagai penunjang pemerintahan dapat dinilai dengan indikator-indikator yang terkait dengan APDB. Indikator kinerja yang dipergunakan untuk urusan keuangan yaitu Persentase PD yang Menyampaikan Laporan Realisasi APBD Tepat Waktu serta Indeks Pengelolaan Aset (IPA).

Persentase PD yang menyampaikan Laporan Realisasi APBD tepat waktu adalah rasio jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang melaporkan

realisasi APBD sesuai tenggat dan target waktu yang telah ditetapkan terhadap total PD dengan capaian realisasi dari tahun 2020 hingga 2024 mencapai 100%.

Sementara itu, Indeks Pengelolaan Aset (IPA) adalah indeks gabungan yang menilai efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan tata kelola aset daerah dengan capaian di tahun 2024 sebesar 2.

Indikator lainnya untuk urusan keuangan adalah Persentase Peningkatan Pajak Daerah yang merupakan pertumbuhan pajak daerah dalam kurun waktu satu tahun. Realisasi Persentase Peningkatan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2024 adalah 8%.

3. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Unsur penunjang kepegawaian di Kabupaten Sidoarjo menjadi tugas dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sidoarjo. Indikator Kinerja di urusan kepegawaian adalah presentase penempatan ASN yang sesuai dengan kompetensinya dengan sebagai berikut:

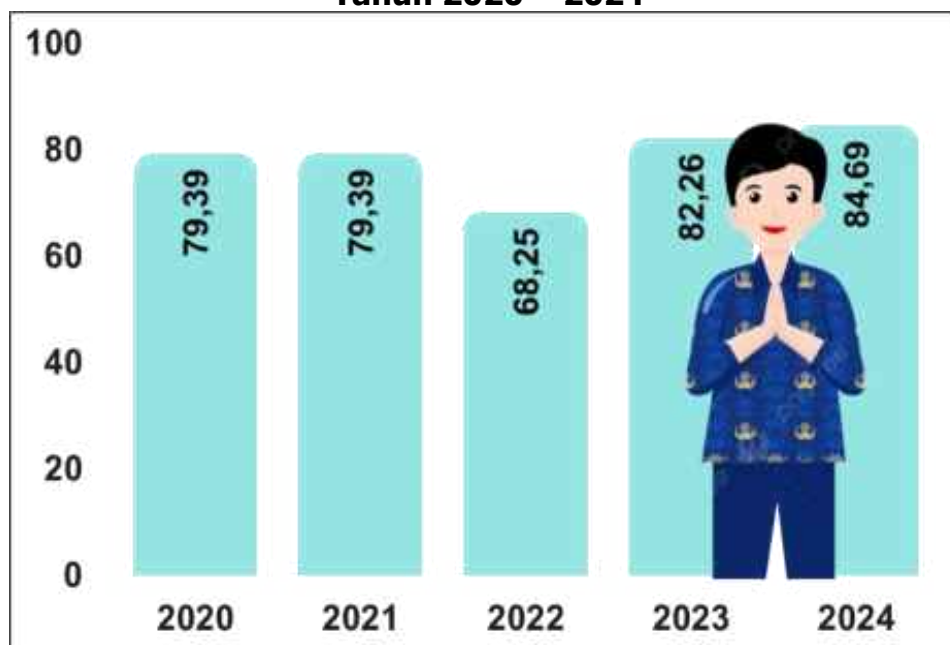
Gambar 2.82
Persentase Penempatan ASN Sesuai Dengan
Kompetensinya Tahun 2020 – 2024



Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo, 2025

Berdasarkan gambar diatas pada tahun 2024 BKD Kabupaten Sidoarjo menetapkan target sasaran penempatan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang sesuai dengan kompetensinya sebesar 92,51 persen. Capaian ini meningkat jika dibandingkan dengan capaian 2 tahun ke belakang yaitu 2022 dan 2023 senilai 81 persen. Penempatan ASN sesuai kompetensinya didukung melalui pengembangan-pengembangan kompetensi ASN baik yang didukung APBD maupun fasilitasi pengembangan kompetensi yang dilakukan mandiri melalui penertiban rekomendasi Izin Belajar, Pencantuman Gelar, Keterangan Pendidikan serta mulai mengembangkan metode peningkatan kompetensi berbasis "*Smart Community For Competency Development*" SCCD yang secara ilegal dan terintegrasi dalam satu sistem di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Gambar 2.83
Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2020 – 2024



Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo, 2025

Capaian Indeks Profesionalitas ASN di Kabupaten Sidoarjo memiliki kecenderungan meningkat dari nilai 79,39 di tahun 2020 menjadi 84,69 di akhir tahun 2024. Meskipun sempat menurun, indeks ini kemudian menunjukkan pemulihan signifikan yaitu naik menjadi 82,26 pada tahun 2023

dan meningkat lagi menjadi 84,69 di tahun 2024. Kenaikan ini mengindikasikan adanya perbaikan serius dalam tata kelola ASN, termasuk penguatan sistem penilaian kinerja, peningkatan kompetensi melalui pelatihan berkelanjutan, dan reformasi birokrasi berbasis digital. Selain itu, hal ini juga menunjukkan bahwa ASN Sidoarjo semakin siap menghadapi tantangan pemerintahan modern yang adaptif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tren ini menjadi sinyal positif bahwa Sidoarjo mampu mendorong transformasi birokrasi yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik. Untuk menjaga momentum, strategi ke depan perlu difokuskan pada penguatan integritas, peningkatan digitalisasi administrasi, serta pemberdayaan SDM berbasis hasil dan inovasi layanan publik.

Tabel 2.77
Nilai Dimensi Kompetensi

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Dimensi Kompetensi (dalam Indeks Profesionalitas ASN)	Nilai	37,32	37,32	26,67	31,65	29,6

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo, 2025

Nilai Dimensi Kompetensi (dalam Indeks Profesionalitas ASN) mengukur skor penilaian terhadap tingkat kompetensi ASN, yang terdiri dari pendidikan formal, pelatihan teknis, pelatihan manajerial, serta masa kerja. Nilai dimensi kompetensi menjadi bagian dari Indeks Profesionalitas ASN yang bertujuan menilai kapasitas dan kemampuan pegawai negeri sipil dalam menjalankan tugas pemerintahan. Formula yang digunakan adalah jumlah skor komponen dibagi dengan skor maksimal, dikalikan 100. Berdasarkan data, nilai kompetensi ASN pada awal tahun 2024 tercatat sebesar 29,6, dengan target peningkatan bertahap yaitu 29,6 (2025), 29,7 (2026), 30 (2027–2028), dan 32 pada 2030. Peningkatan ini menunjukkan upaya berkelanjutan dalam memperkuat kualitas dan kapasitas SDM aparatur

melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, yang sangat penting dalam menghadapi dinamika birokrasi dan tantangan pembangunan ke depan.

Tabel 2.78
Nilai Sistem Merit

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Sistem Merit	Nilai	-	297,5	314,5	320,5	337,5

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo, 2025

Nilai sistem merit adalah nilai yang mencerminkan tingkat penerapan sistem merit dalam manajemen ASN di daerah, meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, kinerja, dan perlindungan ASN. Capaian untuk nilai sistem merit meningkat tiap tahunnya hingga memiliki nilai 337,5 di tahun 2024.

4. Penelitian dan Pengembangan

Salah satu unsur penting dalam pembangunan daerah adalah kejelian Pemerintah Daerah dalam memetakan permasalahan dan isu strategis terkait pembangunan daerah. Kebijakan yang baik pada Pemerintahan Daerah adalah kebijakan yang didasari oleh fakta riil atau hasil dari kajian komprehensif. Hal ini dimaksudkan agar kebijakan yang diputuskan mampu mengatasi permasalahan yang sedang terjadi. Salah satu indikator kinerja di bidang urusan penelitian dan pengembangan adalah persentase dokumen penelitian/kajian yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan.

Tabel 2.79
Persentase Penelitian yang Ditindaklanjuti sebagai Kebijakan Tahun 2019 – 2021

No	Tahun	Jumlah Penelitian	Jumlah Penelitian yang Ditindaklanjuti		Persentase Penelitian yang Ditindaklanjuti sebagai Kebijakan
			Non Kebijakan	Kebijakan	
1	2019	53	14	39	73,58
2	2020	35	8	27	77
3	2021	20	4	16	80

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo, 2024

Capaian persentase penelitian yang ditindaklanjuti sebagai kebijakan pada tahun 2021 sebesar 80 persen. Kenaikan ini disebabkan oleh jumlah penelitian yang jumlahnya tidak sebanyak pada tahun 2020. Selain itu kajian atau penelitian yang dilakukan pada tahun 2021 merupakan penelitian dengan rata-rata tema tentang strategi kebijakan dalam penanganan dan mengatasi dampak pandemic Covid-19. Sementara untuk data pada tahun 2022 dan 2023 terjadi perubahan dalam indikator kinerja untuk penelitian dan pengembangan yang ditampilkan sebagai berikut.

Tabel 2.80
Capaian Kinerja Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 - 2024

No	Indikator Kinerja	2022		2023		2024	
		T	R	T	R	T	R
1	Persentase PD yang memiliki kegiatan mendukung Indeks Inovasi Daerah (IID)	70	79	72	87.67	74	83.67
2	Persentase Penelitian/Kajian yang Ditindaklanjuti sebagai <i>Policy Brief</i>	90	100	92	92.50	94	94.44

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo, 2024

T : Target; R : Realisasi

Sesuai dengan tabel di atas diketahui bahwa urusan penelitian dan pengembangan di tahun 2022 dan 2023 mencapai kinerja yang maksimal melampaui target yang ditetapkan. Persentase Perangkat Daerah (PD) yang memiliki kegiatan mendukung Indeks Inovasi Daerah meningkat dari 79% di tahun 2022 menjadi 87,67% di tahun 2023. Dari capaian ini dapat dilihat bahwa semakin banyak Perangkat Daerah (PD) yang melakukan inovasi demi mewujudkan pelayanan optimal kepada masyarakat. Sementara itu, untuk persentase penelitian yang ditindaklanjuti sebagai *policy brief* juga telah mampu melampaui target yang ada walaupun secara capaian mengalami penurunan yang dikarenakan terdapat 40 kajian yang difasilitasi pembahasannya, 3 kajian diantaranya tidak membuat *policy brief*. Selanjutnya di tahun 2024 tercatat partisipasi PD dalam pelaporan inovasi sebesar 95,92%.

Indikator lainnya untuk menilai urusan penelitian dan pengembangan yaitu Tingkat Penyajian Kajian Berbasis Bukti yang diartikan sebagai persentase atau skor jumlah dokumen kebijakan, perencanaan, atau keputusan yang disusun dengan dukungan kajian ilmiah dan data valid (*evidence-based policy*), dibandingkan total kebijakan strategis yang dihasilkan dalam satu tahun.

5. Kesatuan Bangsa dan Politik

Indikator kinerja yang terkait dengan kesatuan bangsa dan politik adalah Indeks Harmoni Indonesia. Indeks Harmoni adalah indeks gabungan yang mengukur tingkat keharmonisan kehidupan sosial masyarakat di daerah, berdasarkan tiga indikator utama: toleransi, solidaritas sosial, dan kerukunan antar umat beragama dengan capaian di tahun 2024 sebesar 6,99.

6. Pengawasan

Selain peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Diklat, diperlukan pula unsur pengawasan internal guna mendisiplinkan aparatur. Sanksi disiplin aparatur mengalami fluktuasi tiap periodenya, karena itu diperlukan optimalisasi pengawasan internal agar aparatur lebih disiplin sehingga mengurangi jumlah sanksi yang harus dijatuhkan.

Tabel 2.81
Kinerja Pengawasan Tahun 2020 – 2024

Indikator	Tahun									
	2020		2021		2022		2023		2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Maturitas SPIP	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi

Sumber: Inspektorat Kabupaten Sidoarjo, 2025

T : Target; R : Realisasi

Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian maturitas SPIP Kabupaten Sidoarjo mengalami peningkatan dari level berkembang menjadi terdefinisi, ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah

memiliki kebijakan dan prosedur pengendalian yang telah dikomunikasikan secara memadai serta telah diimplementasikan pada seluruh kegiatan.

7. Sekretariat Dewan

Terkait dengan urusan Sekretariat Dewan, indikator yang digunakan untuk pengukuran kinerja adalah tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan sekretariat DPRD dengan nilai series sebesar 82,44 (2020); 86,19 (2021); 96,42 (2022); 95,80 (2023) dan 95,48 (2024).

8. Sekretariat Daerah

Terkait urusan sekretariat daerah indikator yang dipergunakan dalam penilaian kinerja adalah Indeks Kualitas Kebijakan yang diuraikan sebagai indeks komposit yang mengukur kualitas perencanaan, formulasi, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan daerah berbasis bukti, partisipasi publik, dan efektivitas hasil dalam kerangka reformasi birokrasi. Capaian untuk indeks kualitas kebijakan sebesar 45,15 (2021); 75,02 (2022); 80,98 (2023) dan 84,63 (2024).

Indikator lainnya yang dipergunakan menilai kinerja Sekretariat Daerah yaitu Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD). Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) adalah indeks gabungan yang menunjukkan kemudahan akses masyarakat dan pelaku usaha terhadap layanan keuangan formal di daerah dengan mengukur kondisi literasi keuangan, inklusi keuangan, jumlah agen LKD, dan produk keuangan lokal. Capaian IKAD di tahun 2024 untuk Kabupaten Sidoarjo sebesar 4,47.

2.1.4.5 Standar Pelayanan Minimum

Dengan berbagai aspek pembangunan Kabupaten Sidoarjo yang telah berhasil meningkatkan dampak positif dari pembangunan yang dilaksanakan, pada tahun 2024 telah dirilis hasil dari Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai bentuk pertanggung jawaban Bupati Kabupaten Sidoarjo di enam bidang, yaitu bidang pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum; perumahan rakyat; ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan

masyarakat; dan urusan sosial. Masing-masing hasil realisasi capaian SPM enam bidang tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.82
Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Kabupaten
Sidoarjo Tahun 2024

BIDANG	NO	KATEGORI PENCAPAIAN SPM	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Pendidikan	1	Persentase (%) Jumlah Warga Kabupaten Usia 5-6 Tahun Yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Persen	60.307	60.307	100%
	2	Persentase (%) Warga Kabupaten Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi,SMP/MTs)	Persen	308.401	308.401	100%
	3	Persentase (%) Warga Kabupaten Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	3.778	3.778	100%
Kesehatan	1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Orang	31.425	31.425	100%
	2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Orang	31.447	31.447	100%
	3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Orang	31.387	31.387	100%
	4	Pelayanan kesehatan balita	Orang	31.387	31.387	100%
	5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Orang	298.302	298.302	100%
	6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Orang	1.451.816	1.451.816	100%
	7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Orang	253.704	253.704	100%



BIDANG	NO	KATEGORI PENCAPAIAN SPM	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Orang	547.109	547.109	100%
	9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Orang	77.905	77.905	100%
	10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa	Orang	5.224	5.224	100%
	11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Orang	32.699	32.699	100%
	12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus)	Orang	38.606	38.606	100%
Pekerjaan Umum	1	Jumlah warga kabupaten yang memperoleh layanan pemenuhan kebutuhan pokok-pokok air minum sehari-hari	Orang	20.469	20.469	100%
	2	Jumlah warga kabupaten yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Orang	22.308	22.308	100%
Perumahan Rakyat	1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	Orang	163	163	100%
	2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten	Rumah	0	0	100%
Tratibumlinmas	1	Pelayanan Ketentraman	Orang	1.996.825	1.996.825	100%
	2	Pelayanan informasi rawan bencana	Orang	124.121	124.121	100%



BIDANG	NO	KATEGORI PENCAPAIAN SPM	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	124.121	124.121	100%
	4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	4.279	4.279	100%
	5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Orang	230	230	100%
Sosial	1	Persentase (%) warga Kabupaten penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Persen	3.865	3.865	100%
	2	Persentase (%) anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Persen	1.185	1.185	100%
	3	Persentase (%) warga Kabupaten lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Persen	84.492	84.492	100%
	4	Persentase (%) warga Kabupaten gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	Persen	80	80	100%
	5	Persentase (%) korban bencana skala kabupaten yang menerima perlindungan dan jaminan sosial selama masa tanggap darurat dan pasca bencana	Persen	33.630	33.630	100%

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, 2025

Sebagai layanan terendah di masyarakat, Posyandu harus dapat mengambil langkah yang tepat sasaran. Pemerintah daerah harus mampu menetapkan Posyandu sebagai simpul layanan dasar masyarakat di enam bidang SPM, dengan dukungan seluruh perangkat daerah terkait. Penguatan regulasi daerah untuk memastikan keberlanjutan “*new*” Posyandu dalam RPJMD dan Renstra PD serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan Posyandu.

Untuk menunjang aspek daya saing daerah, pemerintah daerah dapat berpedoman pada Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah (RIPJPID). RIPJPID memuat program riset dan inovasi yang linear dengan isu strategis dan sasaran utama RPJPD dan RPJMD di Kabupaten Sidoarjo. Harapannya RIPJPID mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis ilmu pengetahuan dan pembuktian (*science and evidence*), termasuk dalam meningkatkan daya saing daerah. Meskipun demikian, Kabupaten Sidoarjo masih dihadapkan pada beberapa tantangan terkait dengan ekosistem riset dan inovasi daerah sebagaimana ditampilkan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.83
Analisis Kesenjangan Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah

No	Indikator	Kondisi Yang Diharapkan (Standar)	Kondisi Saat Ini
Elemen 1 : Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah			
1	Reformasi Kebijakan Riset dan Inovasi di Daerah	Tersedia regulasi (Perda, Perkada, regulasi lainnya) yang berkaitan dengan pemajuan IPTEK, riset, dan inovasi daerah	- Perbup Nomor 21 Tahun 2014 tentang Mekanisme Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo - Perbup Nomor 31 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah
		Tersedia rencana induk dan peta jalan pemajuan IPTEK, riset, dan inovasi daerah	Belum tersedia
2	Penataan Basis Data Riset dan Inovasi	Tersedia basis data riset dan inovasi yang terbuka dan mudah diakses	Aplikasi SETIA (Sistem Riset dan Inovasi Daerah) sebagai



No	Indikator	Kondisi Yang Diharapkan (Standar)	Kondisi Saat Ini
			database riset dan inovasi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
3	Pengembangan Infrastruktur Dasar Riset dan Inovasi	Tersedia infrastruktur dasar riset meliputi laboratorium, studio riset, dan fasilitas lainnya	• UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah (LabKesDa) Kabupaten Sidoarjo • UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Keswan Kesmavet) Dinas Pangan Pertanian Kabupaten Sidoarjo • UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo • Belum tersedia studio riset
4	Penyediaan Anggaran Riset dan Inovasi	Tersedia anggaran riset dan inovasi daerah	• Tahun 2023 tersedia anggaran (Rp. 366.188.420) • Tahun 2024 tersedia anggaran (Rp. 768.221.858)
5	Peningkatan Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual	Tersedia laboratorium dan/atau inkubator	Belum tersedia
Elemen 2 : Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi Daerah			
1	Penguatan kolaborasi riset dan inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Terwujudnya kolaborasi tata kelola riset dan inovasi daerah antara Bappeda dengan pemangku kepentingan	Terwujud • Pendampingan pelaksanaan riset oleh perangkat daerah melalui pembahasan usulan judul dan KAK riset • Pendampingan pelaporan inovasi mulai penyusunan proposal/profil inovasi hingga pemenuhan bukti dukung • Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Sidoarjo (KISI)
2	Penyediaan sarana pendukung riset dan inovasi daerah yang d disesuaikan dengan kemampuan daerah	Tersedia sarana pendukung riset dan inovasi di daerah antara lain perpustakaan, ruang baca, pusat studi, jaringan internet, dan teknologi informasi	Tersedia, perlu adanya peningkatan sarana pendukung utamanya pusat studi
Elemen 3 : Kemitraan Riset dan Inovasi Daerah			
1	Penguatan kemitraan antar kelembagaan	Terselenggara kerjasama antara lembaga riset daerah, PD terkait, dan lembaga riset profesional lainnya	Terselenggara, dengan perlu peningkatan intensitas terutama dengan perangkat daerah terkait pelaksanaan dan implementasi hasil riset dan inovasi



No	Indikator	Kondisi Yang Diharapkan (Standar)	Kondisi Saat Ini
2	Peningkatan difusi inovasi	Terwujud perkembangan dan penyebaran isu dan atensi terhadap pengembangan inovasi di daerah	Terwujud, namun masih belum merata karena masih terdapat beberapa PD yang belum melaporkan inovasi
3	Peningkatan praktik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi	Terpublikasi hasil riset dan inovasi kepada OPD terkait dan masyarakat umum	Terpublikasi, melalui aplikasi SETIA sebagai database riset dan inovasi
		Terimplementasi kebijakan publik berbasis hasil riset dan inovasi	Terimplementasi, penyediaan <i>policy brief</i> untuk riset yang dilaksanakan perangkat daerah
Elemen 4 : Budaya Riset dan Inovasi Daerah			
1	Promosi dan kampanye inovasi	Terselenggara promosi dan kampanye inovasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan masyarakat Kabupaten Sidoarjo	Terselenggara, melalui kegiatan Sosialisasi <i>Innovative Governance Award</i> (IGA) dan <i>Launching</i> Kompetisi Inovasi Sidoarjo (KISI)
2	Apresiasi prestasi inovasi	Terselenggara kegiatan kompetisi dan apresiasi hasil inovasi Perangkat Daerah dan masyarakat Kabupaten Sidoarjo	Terselenggara, melalui kegiatan Penganugerahan Kompetisi Inovasi Sidoarjo (KISI)
3	Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Terlaksana upaya inisiasi dan peran serta Pemerintah Daerah untuk mendorong pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Belum terlaksana
4	Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Terinventarisasi data karya pengetahuan dan teknologi masyarakat.	Terinventarisasi, melalui Kompetisi Inovasi Sidoarjo (KISI)
		Terdapat kegiatan untuk mendorong pengembangan pengetahuan dan teknologi masyarakat	Tersedia, melalui pelaksanaan Kompetisi Inovasi Sidoarjo (KISI)
		Terdapat kegiatan untuk melindungi hasil pengetahuan dan teknologi masyarakat	Belum terealisasi
Elemen 5 : Keterpaduan Riset dan Inovasi			
1	Prakarsa pengembangan riset dan inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan di daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Terlaksana kegiatan pengembangan riset dan inovasi di daerah	Terlaksana, melalui pelaksanaan mekanisme riset dan kegiatan KISI
		Terdapat konsepsi untuk menyelaraskan kegiatan pengembangan riset dan inovasi dengan kebutuhan dan/atau permasalahan di daerah	Tersedia, melalui dokumen Roadmap SIDA dan Rencana Induk Kelitbangan
2	Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi	Terdapat peta produk unggulan, potensi, dan investasi di Kabupaten Sidoarjo	Belum terealisasi

No	Indikator	Kondisi Yang Diharapkan (Standar)	Kondisi Saat Ini
	berbasis produk unggulan daerah	Terselenggara kegiatan riset dan inovasi berbasis produk unggulan daerah	Terealisasi, melalui riset dengan tema produk unggulan perikanan
3	Kesesuaian kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Terdapat kesesuaian dan keselarasan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Terealisasi, melalui pelaksanaan koordinasi secara berjenjang
Elemen 6 : Penyelarasan dengan Perkembangan Global			
1	Peningkatan kepedulian terhadap isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah	Adaptasi dan penyelarasan isu internasional terhadap kegiatan riset dan inovasi di daerah	Belum terealisasi
2	Penguatan kerjasama internasional	Terdapat kerjasama internasional dalam kegiatan riset dan inovasi di daerah	Belum terealisasi

Sumber: Bappeda Kabupaten Sidoarjo, 2025

Berdasarkan pada tabel di atas, strategi riset dan inovasi daerah di Kabupaten Sidoarjo dirancang berdasarkan kondisi ekosistem riset dan inovasi yang ada. Oleh karena itu, strategi ini selaras dengan analisis kesenjangan ekosistem riset dan inovasi yang telah dibahas sebelumnya. Selain itu, strategi ini menghubungkan kesenjangan tersebut dengan tantangan serta peluang yang ada di daerah. Tujuan utama dari strategi ini adalah memperkuat, membangun, dan mengembangkan aspek-aspek yang masih kurang dalam ekosistem riset dan inovasi daerah.

2.2. Gambaran Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mendefinisikan keuangan daerah sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam hal ini dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah terkait dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Penyusunan gambaran pengelolaan keuangan daerah dilakukan untuk menganalisis capaian dan memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat, akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya, belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek *multiplier* yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang lebih merata.

Peraturan yang mendasari pengelolaan keuangan daerah bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggung jawab, adil, patut, dan bermanfaat. Kerangka pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo secara garis besar terdiri dari penyusunan anggaran daerah, penatausahaan dan pertanggungjawaban. Kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo perlu kembali dianalisis kondisi kinerja keuangannya, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya.

2.2.1. Evaluasi Kinerja Keuangan

Evaluasi Kinerja keuangan adalah kondisi keuangan daerah selama periode lima tahun terakhir, yaitu kondisi keuangan daerah pada tahun 2020 hingga tahun 2024. Kondisi keuangan daerah tersebut merupakan pijakan dalam penyusunan perencanaan keuangan selama lima tahun ke depan. Kinerja keuangan daerah dalam hal ini meliputi dua aspek utama, yaitu: (i) Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan (ii) Neraca Daerah.



APBD sebagai bentuk penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah serta tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. APBD disusun dalam suatu struktur yang menggambarkan besarnya pendanaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas pokok dan fungsi sesuai kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil di masyarakat untuk suatu tahun tertentu. Pelaksanaan APBD menggambarkan bagaimana pendapatan daerah digunakan untuk belanja daerah. Terdapat situasi di mana belanja daerah melebihi pendapatannya. Pada kondisi tersebut daerah harus mencari sumber pembiayaan tambahan seperti Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), pinjaman, atau sumber lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Analisis dan pembahasan pelaksanaan APBD juga mencakup pembiayaan daerah. Selain itu, kinerja keuangan masa lalu juga dianalisis melalui kinerja neraca daerah. Adapun Neraca Daerah menggambarkan bagaimana pemerintah daerah mengelola aset dan kekayaan daerah.

2.2.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan APBD dapat dilihat dari tiga aspek utama, yaitu: pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah merupakan semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sementara Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara umum perkembangan realisasi APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 – 2024 sebagaimana ditampilkan pada tabel 2.84 menunjukkan peran APBD sebagai stimulus kinerja pembangunan daerah telah berkontribusi dalam mendukung

pencapaian target-target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Sidoarjo sesuai yang ditargetkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020-2024.

Kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sidoarjo tahun anggaran 2020-2024 menjadi bahan evaluasi untuk penyusunan APBD tahun anggaran berikutnya. Evaluasi atas kinerja pelaksanaan APBD mencakup aspek efektivitas alokasi anggaran, pencapaian target pembangunan, dan kesesuaian perencanaan dengan hasil pelaksanaan pembangunan. Dengan memetakan keberhasilan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan APBD tahun-tahun sebelumnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo dapat memperoleh wawasan yang mendalam untuk merancang kebijakan yang lebih efisien dan responsif di masa mendatang.

Tabel 2.84
Realisasi APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020-2024 (dalam Juta)

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PENDAPATAN					
	A. Pendapatan Asli Daerah	1.798.515,53	1.921.244,25	1.801.982,66	2.050.788,68	2.353.387,16
	B. Pendapatan Transfer	2.436.766,01	2.562.511,33	2.699.903,72	2.965.839,49	2.979.896,63
	C. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	176.333,67	185.880,11	2.963,21	3.567,28	99,68
	JUMLAH PENDAPATAN	4.411.615,22	4.669.635,70	4.504.849,60	5.020.195,45	5.333.383,47
2	BELANJA					
	A. Belanja Operasional	3.193.867,96	3.295.655,54	3.311.478,45	3.507.497,76	3.935.999,99
	B. Belanja Modal	519.252,87	919.012,88	845.926,89	715.194,64	668.078,00
	C. Belanja Tak Terduga	131.517,64	56.549,49	12.596,66	9.610,23	26.568,95
	D. Belanja Transfer	586.023,48	664.881,97	679.909,75	769.475,37	620.696,05
	JUMLAH BELANJA	4.430.661,95	4.936.099,89	4.849.911,75	5.001.778,00	5.251.342,99
	SURPLUS/DEFISIT	(19.046,73)	(266.464,19)	(345.062,15)	18.417,45	82.040,48
3	PEMBIAYAAN					
	A. Penerimaan Pembiayaan	1.131.026,65	1.109.326,72	842.259,15	495.539,92	563.408,11
	B. Pengeluaran Pembiayaan	5.895	1.866	2.319	2.055	2.672,93

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	PEMBIAYAAN NETTO	1.125.131,65	1.107.460,72	839.940,15	493.484,92	560.735,18
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	1.106.084,91	840.996,53	494.878,00	511.902,37	642.775,66

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo, 2025 diolah

Secara umum, realisasi APBD Kabupaten Sidoarjo dicatat setelah melalui audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Adapun perbandingan antara target dan realisasi APBD Kabupaten Sidoarjo dapat ditampilkan pada tabel sebagai berikut



Tabel 2.85
Perbandingan Anggaran dan Realisasi APBD kabupaten Sidoarjo Tahun 2020-2024 (dalam Juta)

No	Uraian	2020 (Audited)			2021 (Audited)			2022 (Audited)			2023 (Audited)			2024 (Audited)		
		ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	PENDAPATAN															
	A. Pendapatan Asli Daerah	1.531.360,83	1.798.515,53	117,45%	1.714.484,42	1.921.244,25	112,06%	1.744.754,80	1.801.982,66	103,28%	1.913.135,63	2.050.788,68	107,20%	2.118.076,05	2.353.387,16	111,11%
	B. Pendapatan Transfer	2.347.269,84	2.436.766,01	103,81%	2.368.637,10	2.562.511,33	108,19%	2.703.414,20	2.699.903,72	99,87%	2.957.289,95	2.965.839,49	100,29%	2.966.872,18	2.979.896,63	100,44%
	C. Lain-Lain Pendapatan yang Sah	179.468,42	176.333,67	98,25%	187.659,70	185.880,11	99,05%	4.030,21	2.963,21	73,52%	4.300,00	3.567,28	82,96%	1.074,00	99,68	9,28%
	JUMLAH PENDAPATAN	4.058.099,09	4.411.615,21	108,71%	4.270.781,23	4.669.635,70	109,34%	4.452.199,21	4.504.849,59	101,18%	4.874.725,58	5.020.195,45	102,98%	5.086.022,23	5.333.383,47	104,86%
2	BELANJA															
	A. Belanja Operasi	3.577.373,16	3.193.867,95	89,28%	3.560.645,96	3.295.655,54	92,56%	3.590.672,23	3.311.478,45	92,22%	3.725.646,63	3.507.497,76	94,14%	4.213.238,16	3.935.999,99	93,42%
	B. Belanja Modal	771.356,41	519.252,87	67,32%	1.073.360,37	919.012,88	85,62%	993.021,18	845.926,89	85,19%	846.634,47	715.194,64	84,48%	785.236,98	668.078,00	85,08%
	C. Belanja Tak Terduga	240.307,08	131.517,64	54,73%	75.110,00	56.549,49	75,29%	25.432,52	12.596,66	49,53%	15.970,20	9.610,23	60,18%	28.621,89	26.568,95	92,83%
	D. Belanja Transfer	593.037,81	586.023,48	98,82%	667.047,23	664.881,97	99,68%	682.497,01	679.909,75	99,62%	779.252,29	769.475,37	98,75%	621.827,57	620.696,05	99,82%
	JUMLAH BELANJA	5.182.074,46	4.430.661,95	85,50%	5.376.163,56	4.936.099,89	91,81%	5.291.622,95	4.849.911,75	91,65%	5.367.503,58	5.001.778,00	93,19%	5.648.924,60	5.251.342,99	92,96%
3	PEMBIAYAAN															
	A. Penerimaan Pembiayaan	1.136.075,37	1.131.026,64	99,56%	1.108.082,33	1.109.326,72	100,11%	841.823,74	842.259,15	100,05%	494.878,00	495.539,92	100,13%	571.902,37	563.408,11	98,51%
	B. Pengeluaran Pembiayaan	12.100,00	5.895	48,72%	2.700,00	1.866	69,11%	2.400,00	2.319,00	96,63%	2.100,00	2.055,00	97,86%	9.000,00	2.672,93	29,70%
	PEMBIAYAAN NETTO	1.123.975,37	1.125.131,64	100,10%	1.105.382,33	1.107.460,72	100,19%	839.423,74	839.940,15	100,06%	492.778,00	493.484,92	100,14%	562.902,37	560.735,18	99,61%
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-	1,11	-		0,84	-	-	0,49	-	-	0,51	-	-	0,64	-

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo, 2025 diolah

1. Kinerja Realisasi Penerimaan Daerah

Penerimaan Daerah dalam APBD terdiri atas pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah. Dalam sistematika APBD, penerimaan pembiayaan termasuk dalam Pembiayaan Daerah, bersama dengan pengeluaran pembiayaan. Dalam sub bab ini akan dianalisis kinerja realisasi penerimaan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Analisis ini dimaksudkan untuk mendapat informasi tentang kinerja pemerintah dalam mengelola penerimaan sehingga dalam proses membaca potensi penerimaan daerah ke depan juga akan komprehensif.

Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran. Pendapatan daerah terdiri atas: a) Pendapatan Asli Daerah (PAD); b) Pendapatan Transfer; dan c) Lain-lain Pendapatan yang Sah. Di dalam PAD terdapat komponen Pajak daerah, Retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang merupakan sumber pendapatan utama yang digali dan diperoleh dari daerah itu sendiri. Selanjutnya untuk Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan dan lainnya) dan Transfer Pemerintah Provinsi (Dana Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan). Selain sumber pendapatan yang diperoleh dari daerah tersebut dan pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi, pemerintah daerah juga memperoleh pendapatan hibah dan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang ada di dalam pos Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Berikut merupakan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sidoarjo selama 5 (lima) tahun pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 secara rinci dapat disajikan dalam bentuk tabel berikut.



Tabel 2.86
Perkembangan APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020-2024

URAIAN		2020	2021	2022	2023	2024
PENDAPATAN DAERAH		4.411.615.214.581,65	4.669.635.698.473,41	4.504.849.594.847,19	5.020.195.449.420,07	5.333.383.466.334,81
<i>Pendapatan Asli Daerah</i>		<i>1.798.515.529.274,65</i>	<i>1.921.244.253.335,69</i>	<i>1.801.982.663.587,19</i>	<i>2.050.788.676.962,07</i>	<i>2.353.387.157.089,76</i>
Hasil Pajak Daerah		929.261.529.986,45	1.027.822.704.720,00	1.215.303.165.454,49	1.302.626.605.440,26	1.407.663.067.473,40
	<i>Pajak Hotel</i>	11.104.965.643,00	14.080.874.501,00	19.993.670.874,00	21.795.275.752,00	89.991.391,00
	<i>Pajak Restoran</i>	64.616.576.015,00	63.518.290.481,00	89.635.837.875,00	112.818.170.066,10	984.299.894,00
	<i>Pajak Hiburan</i>	2.814.119.899,00	1.201.039.009,00	6.346.772.075,00	7.738.499.404,00	4.879.500,00
	<i>Pajak Reklame</i>	14.690.375.957,00	14.593.286.453,00	15.903.462.071,00	18.203.375.196,00	22.723.683.536,00
	<i>Pajak Penerangan Jalan</i>	305.298.678.427,45	313.967.752.550,00	332.411.739.624,49	342.977.025.636,16	-11.282.695,00
	<i>Pajak Parkir</i>	15.821.168.400,00	11.788.834.175,00	17.980.663.027,00	22.545.794.307,00	11.199.000,00
	<i>Pajak Air Tanah</i>	2.575.219.356,00	3.167.681.195,00	3.301.094.440,00	4.051.420.068,00	7.426.394.234,00
	<i>Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan</i>	229.810.879.995,00	254.650.339.833,00	289.171.697.663,00	305.517.707.518,00	303.732.853.947,00
	<i>Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan</i>	282.529.546.294,00	350.854.606.523,00	440.558.227.805,00	466.979.337.493,00	509.090.107.338,40
	<i>Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)</i>	-	-	-	-	563.610.941.328,00
Hasil Retribusi Daerah		58.931.135.490,00	65.341.926.569,00	60.667.034.848,94	52.105.726.006,00	861.595.661.847,07
	<i>Retribusi Jasa Umum</i>	28.668.170.054,00	35.630.980.382,00	38.493.195.084,94	26.133.133.577,00	825.516.010.764,07
	<i>Retribusi Jasa Usaha</i>	3.975.864.077,00	5.587.920.734,00	5.728.216.803,00	6.916.141.058,00	9.929.768.721,00
	<i>Retribusi Perizinan Tertentu</i>	26.287.101.359,00	24.123.025.453,00	16.445.622.961,00	19.056.451.371,00	26.149.882.362,00



URAIAN		2020	2021	2022	2023	2024
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		37.626.054.550,00	31.133.395.762,50	32.410.312.618,50	39.759.992.614,50	38.107.714.620,50
	<i>Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD</i>	37.626.054.550,00	31.133.395.762,50	32.410.312.618,50	39.759.992.614,50	38.107.714.620,50
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		772.696.809.248,20	796.946.226.284,19	493.602.150.665,26	656.296.352.901,31	46.020.713.148,79
	<i>Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan</i>	1.538.252.711,00	1.944.696.219,00	563.781.200,00	1.166.625.720,00	1.743.144.135,00
	<i>Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan</i>	6.542.073.743,00	3.567.742.928,00	4.644.366.624,00	13.328.363.323,00	11.511.479.825,00
	<i>Hasil Kerja Sama Daerah</i>	758.797.604,00			6.669.052.744,00	-
	<i>Jasa Giro</i>	5.446.816.919,78	5.484.020.201,10	5.331.558.410,38	3.393.088.008,02	3.358.624.443,29
	<i>Pendapatan Bunga</i>	49.998.533.959,19	18.644.513.626,16	5.721.572.492,41	15.452.547.987,60	14.288.010.231,18
	<i>Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah</i>	14.730.260,00	141.718.400,00	55.103.000,00	1.538.357.178,90	3.521.655.581,80
	<i>Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain</i>	90.604.127,44	1.667.648.229,45	15.099.695.645,28	14.691.546,57	73.846.832,18
	<i>Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan</i>	1.071.215.269,60	1.791.919.877,39	1.199.122.593,67	571.413.039,17	483.851.538,86
	<i>Pendapatan Denda Pajak Daerah</i>	1.545.535.986,00	2.561.423.056,00	3.746.107.028,00	6.316.510.285,00	8.440.614.675,00
	<i>Pendapatan Denda Retribusi Daerah</i>	325.741.443,00	94.653.722,00	105.256.801,00	49.799.658,00	3.969.727,00



URAIAN		2020	2021	2022	2023	2024
	Pendapatan Hasil eksekusi Atas Jaminan	-	961.482.834,00	-	-	116.003.153,00
	Pendapatan Dari Pengembalian	8.516.791.911,87	247.736.588,00	1.107.053.675,00	1.371.023.568,00	956.102.673,06
	Pendapatan BLUD	696.212.647.070,32	757.229.531.438,09	455.942.203.067,52	606.119.046.833,05	1.518.290.333,42
	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	-	57.200.000,00	-	-	-
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	151.447.243,00	34.265.665,00	8.370.000,00	9.300.000,00	3.720.000,00
	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Peraturan Daerah	483.621.000,00	2.517.673.500,00	77.960.128,00	296.533.010,00	1.400.000,00
Pendapatan Transfer		2.436.766.013.307,00	2.562.511.334.042,00	2.699.903.720.332,00	2.965.839.490.458,00	2.979.896.625.006,00
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan		1.711.271.242.511,00	1.716.490.317.781,00	1.920.299.063.398,00	2.022.735.722.637,00	2.137.653.594.959,00
	Dana Bagi Hasil	173.396.948.566,00	256.389.202.388,00	246.598.265.171,00	212.898.864.161,00	209.922.496.000,00
	Dana Alokasi Umum	1.149.801.473.000,00	1.132.080.961.000,00	1.115.949.547.728,00	1.199.409.478.419,00	1.272.254.530.355,00
	Dana Alokasi Khusus	388.072.820.945,00	328.020.154.393,00	557.751.250.499,00	610.427.380.057,00	655.476.568.604,00
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		386.155.714.800,00	315.483.708.200,00	313.804.958.000,00	343.536.377.000,00	328.647.743.000,00
	Dana Insentif Daerah	95.055.600.000,00	18.188.371.000,00	-	21.357.443.000,00	-
	Dana Desa	291.100.114.800,00	297.295.337.200,00	313.804.958.000,00	322.178.934.000,00	328.647.743.000,00
Transfer Antar Daerah		339.339.055.996,00	530.537.308.061,00	465.799.698.934,00	599.567.390.821,00	513.595.287.047,00



URAIAN		2020	2021	2022	2023	2024
	<i>Pendapatan Bagi Hasil Pajak</i>	339.339.055.996,00	492.999.792.561,00	453.553.632.934,00	583.727.968.900,00	502.620.091.047,00
	<i>Bantuan Keuangan</i>	0,00	37.537.515.500,00	12.246.066.000,00	15.839.421.921,00	10.975.196.000,00
	<i>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</i>	176.333.672.000,00	185.880.111.095,72	2.963.210.928,00	3.567.282.000,00	99.684.239,05
	<i>Hibah</i>	163.329.156.500,00	1.866.000.000,00	2.763.000.000,00	2.727.000.000,00	99.015.000,00
	<i>Lain - lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan</i>	13.004.515.500,00	184.014.111.095,72	200.210.928,00	840.282.000,00	669.239,05

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo, 2025



Memperhatikan data tabel di atas, terlihat bahwa capaian Pendapatan Daerah Kabupaten Sidoarjo masih fluktuatif dengan kecenderungan meningkat dalam dua tahun terakhir. Pendapatan Daerah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2022 sempat mengalami penurunan dari Rp 4.669.635.698.473,41 pada tahun 2021 menjadi Rp 4.504.849.594.847,19 dan kembali menunjukkan peningkatan pendapatan di tahun 2024 sebesar Rp 5.333.383.466.334,81. Lebih detail komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercatat mengalami pertumbuhan dalam lima tahun terakhir dari nilai Rp 1.798.515.529.274,65 di tahun 2020 menjadi 2.353.387.157.089,76 di tahun 2024. Komponen Pendapatan Transfer juga mengalami rata-rata pertumbuhan pada periode yang sama dari 2.436.766.013.307 menjadi 2.979.896.625.006. Pertumbuhan tertinggi dalam lima tahun terakhir terdapat pada komponen Hasil Retribusi Daerah dari 58.931.135.490 di tahun 2020 menjadi 861.595.661.847,07 di tahun 2024 dengan nilai pertumbuhan 385,79%. Peningkatan ini disebabkan perubahan nomenklatur BLUD, yang semula berasal dari Lain-Lain PAD yang Sah menjadi Hasil Retribusi Daerah. Pada sisi lain, perubahan tersebut menjadikan komponen Lain-lain PAD yang Sah mengalami rata-rata pertumbuhan menurun sebesar -23,74% dalam periode yang sama. Adapun dua komponen PAD yang lain yaitu Hasil Pajak Daerah dan komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan juga tercatat mengalami rata-rata dalam lima tahun terakhir.

Selanjutnya perlu dilihat bagaimana kontribusi masing-masing komponen pendapatan terhadap total Pendapatan Daerah. Gambaran kontribusi masing-masing komponen sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.87
Komposisi Pendapatan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020-2024

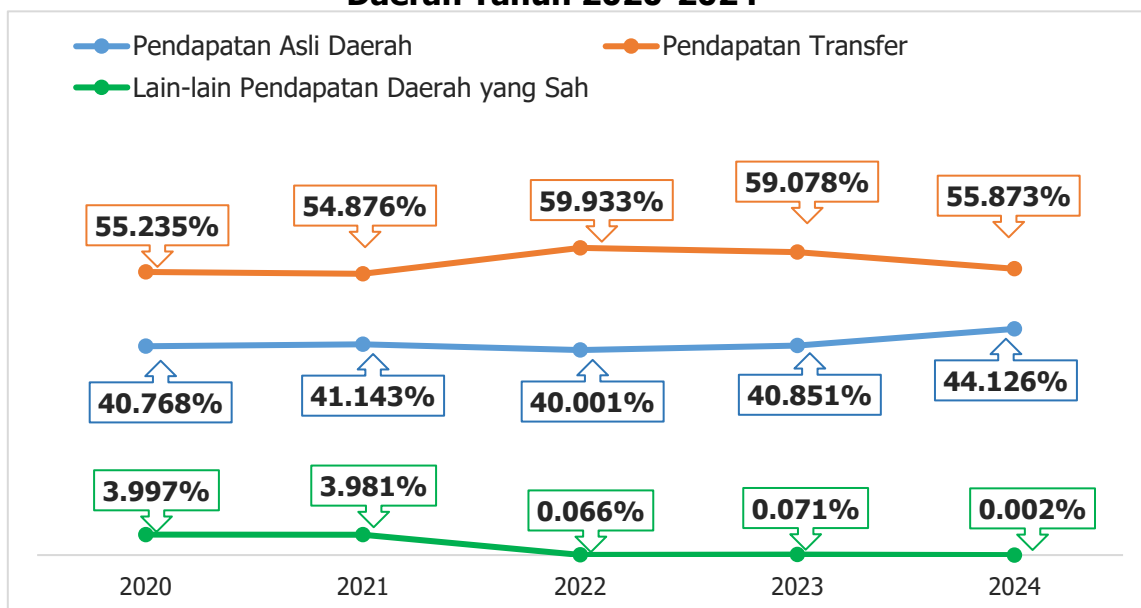
KOMPONEN PENDAPATAN	TAHUN					Rata-rata Kontribusi
	2020	2021	2022	2023	2024	
PENDAPATAN	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pendapatan Asli Daerah	40,77%	41,14%	40,00%	40,85%	44,13%	41,38%
Dana Transfer	55,24%	54,88%	59,93%	59,08%	55,87%	57,00%
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	4,00%	3,98%	0,07%	0,07%	0,002%	1,62%

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo, 2025

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa komponen Dana Transfer memberikan rata-rata kontribusi terbesar. Dalam periode tahun 2020-2024, komponen Dana Transfer rata-rata berkontribusi sebesar 57,00% terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Sidoarjo. Kondisi ini secara tidak langsung mengindikasikan bahwa kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sidoarjo masih bergantung kepada dana eksternal berupa Dana Transfer. Komponen PAD sendiri memberikan rata-rata kontribusi sebesar 41,38% dalam periode yang sama. Adapun komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tercatat memiliki rata-rata kontribusi paling kecil yaitu sebesar 1,62%.

Setelah mengetahui rata-rata kontribusi masing-masing komponen Pendapatan Daerah, maka selanjutnya perlu diuraikan juga perkembangan kontribusi masing-masing komponen dalam lima tahun terakhir. Hal ini menjadi penting guna mengetahui perkembangan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sidoarjo. Perkembangan komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Sidoarjo periode tahun 2020-2024 sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini.

Gambar 2.84
Perkembangan Komposisi Sumbangan PAD, Pendapatan Transfer,
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan
Daerah Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo, 2025

Memperhatikan gambar di atas, terlihat bahwa kinerja rata-rata kontribusi komponen PAD dalam dua tahun terakhir menunjukkan tren yang positif (meningkat). Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan komponen Dana Transfer yang menunjukkan tren negatif (menurun). Demikian pula dengan komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yang menunjukkan tren penurunan. Hal ini disebabkan beberapa hibah dari pemerintah pusat dalam penyalurannya tidak lagi melalui pemerintah daerah. Salah satunya sebagaimana Lampiran V Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian APBN Tahun 2024, di mana terdapat hibah sanitasi untuk Kabupaten Sidoarjo.

Semakin meningkatnya rata-rata kontribusi PAD dalam dua tahun terakhir, secara tidak langsung mengindikasikan bahwa tingkat kemandirian keuangan dari Kabupaten Sidoarjo semakin meningkat dalam mendanai belanja daerah. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat lebih leluasa dalam melakukan investasi dalam pembangunan ekonomi lokal. Pada sisi lain, kondisi ini juga

menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan PAD telah *on the track*.

2. Kinerja Realisasi Pengeluaran Daerah

Pengeluaran daerah terbagi menjadi belanja daerah ditambah pengeluaran pembiayaan. Meskipun demikian, dalam sistematika APBD, pengeluaran pembiayaan masuk dalam pembiayaan daerah, bersama penerimaan pembiayaan. Secara garis besar, sistematika APBD tersusun dari pendapatan dikurangi belanja menghasilkan surplus dan defisit. Surplus dan defisit tersebut kemudian dimanfaatkan atau ditutup dengan pembiayaan sehingga menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan (SiLPA). SiLPA akan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) yang masuk dalam penerimaan pembiayaan tahun berikutnya.

Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan Kewajiban Daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah dan Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah.



Belanja daerah terdiri atas: 1) Belanja Operasi; 2) Belanja Modal; 3) Belanja Tak Terduga; 4) Belanja Transfer. Di dalam Belanja Operasi terdapat komponen belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Selanjutnya untuk Belanja Modal terdiri atas belanja tanah, peralatan, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, serta belanja aset lainnya. Pada Belanja Transfer terdapat bagi hasil pajak dan retribusi serta belanja bantuan keuangan. Sementara pada Belanja Tak Terduga terdiri atas belanja tak terduga itu sendiri. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 secara rinci dapat disajikan dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 2.88
Rincian Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
BELANJA DAERAH	4.430.661.948.164,65	4.936.099.885.354,76	4.849.911.746.143,62	5.001.777.999.928,70	5.251.342.990.301,47
Belanja Operasi	3.193.867.954.696,85	3.295.655.542.604,69	3.311.478.446.121,82	3.507.497.764.107,70	3.935.999.993.833,47
Belanja Pegawai	1.561.467.836.809,25	1.620.047.237.731,00	1.490.285.235.545,00	1.576.630.115.712,52	1.778.430.605.560,10
Belanja Barang dan Jasa	1.287.762.203.915,60	1.413.427.447.072,79	1.437.472.944.026,82	1.509.894.458.724,18	1.690.376.003.896,45
Belanja Bunga	-	-	-	-	345.719.188,92
Belanja Subsidi	-	4.563.492.001,00	2.429.079.999,00	1.256.673.332,00	1.767.853.335,00
Belanja Hibah	258.306.138.972,00	147.342.921.799,90	281.646.372.888,00	313.954.511.110,00	362.111.796.853,00
Belanja Bantuan Sosial	86.331.775.000,00	110.274.444.000,00	99.644.813.663,00	105.762.005.229,00	102.968.015.000,00
Belanja Modal	519.252.871.399,47	919.012.883.755,00	845.926.887.543,80	715.194.635.441,00	668.077.999.318,00
Belanja Tanah	21.840.061.455,00	34.014.902.017,00	62.038.724.940,00	79.430.373.480,00	822.965.280,00
Belanja Peralatan dan Mesin	253.616.544.255,47	308.234.423.280,00	199.487.326.568,00	183.169.370.829,00	191.438.182.917,00
Belanja Gedung dan Bangunan	105.322.853.162,00	301.625.990.175,00	130.122.924.155,00	159.102.588.430,00	193.594.456.481,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	135.395.341.859,00	272.453.365.570,00	448.013.072.185,80	291.642.063.091,00	281.538.154.853,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	749.086.218,00	546.754.325,00	612.189.111,00	637.069.070,00	128.568.760,00
Belanja Aset Lainnya	2.328.984.450,00	2.137.448.388,00	5.652.650.584,00	1.213.170.541,00	555.671.027,00
Belanja Tak Terduga	131.517.638.793,73	56.549.487.585,07	12.596.661.169,00	9.610.233.290,00	26.568.948.044,00
Belanja Tak Terduga	131.517.638.793,73	56.549.487.585,07	12.596.661.169,00	9.610.233.290,00	26.568.948.044,00
Belanja Transfer	586.023.483.274,60	664.881.971.410,00	679.909.751.309,00	769.475.367.090,00	620.696.049.106,00
Bagi Hasil Pajak	84.722.265.404,00	96.043.136.056,00	106.557.674.241,00	136.420.712.243,00	132.387.660.544,00
Bagi Hasil Retribusi	7.808.972.934,00	7.157.435.547,00	6.416.824.026,00	4.833.152.147,00	4.293.418.012,00
Belanja Bantuan Keuangan	493.492.244.936,6	561.681.399.807,00	566.935.253.042,00	628.221.502.700,00	484.014.970.550,00

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo, 2025

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo memiliki pola yang sama dengan Pendapatan Daerah yaitu mengalami pertumbuhan walaupun sempat mengalami penurunan di tahun 2022. Jika pada tahun 2020 Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo tercatat sebesar Rp 4.430.661.948.164,65 maka pada tahun 2024 meningkat menjadi Rp 5.251.342.990.301,47 dengan rata-rata pertumbuhan selama lima tahun sebesar 4,45%. Dilihat berdasarkan komponen pembentuknya, secara berurutan terlihat bahwa dalam periode tahun 2020-2024 komponen Belanja Modal tercatat mengalami pertumbuhan paling tinggi yaitu sebesar Rp 519.252.871.399,47 di tahun 2020 menjadi 668.077.999.318,00 di tahun 2024. Selanjutnya disusul oleh komponen Belanja Operasi, Belanja Tak Terduga dan rata-rata pertumbuhan terkecil Belanja Transfer.

Pada komponen Belanja Modal, jika dilihat lebih detail lagi maka terdapat dua komponen yang memiliki rata-rata pertumbuhan tertinggi yaitu (i) komponen Belanja Gedung dan Bangunan sebesar 43,37%; dan (ii) komponen Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar 31,82% pada periode yang sama. Adapun komponen Belanja Aset Tetap Lainnya serta komponen Belanja Peralatan dan Mesin tercatat memiliki rata-rata pertumbuhan negatif dalam lima tahun terakhir (-22,70% dan -4,35%).

Pada komponen Belanja Operasi, dalam lima tahun terakhir komponen Belanja Hibah tercatat memiliki rata-rata pertumbuhan paling tinggi yaitu sebesar 18,75%. Sebaliknya, rata-rata pertumbuhan komponen Belanja Subsidi terlihat menurun sebesar (-18,12%). Pada sisi lain, komponen Belanja Bunga adalah jenis belanja yang baru ada di tahun 2024 berupa bunga atas pinjaman Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) kepada perbankan.

Sedangkan pada komponen Belanja Transfer, terlihat komponen Bagi Hasil Pajak memiliki rata-rata pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 12,34%. Pada periode yang sama komponen Bagi Hasil Retribusi menunjukkan rata-rata pertumbuhan yang negatif sebesar (-13,63%). Selanjutnya gambaran realisasi belanja daerah terhadap total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut.

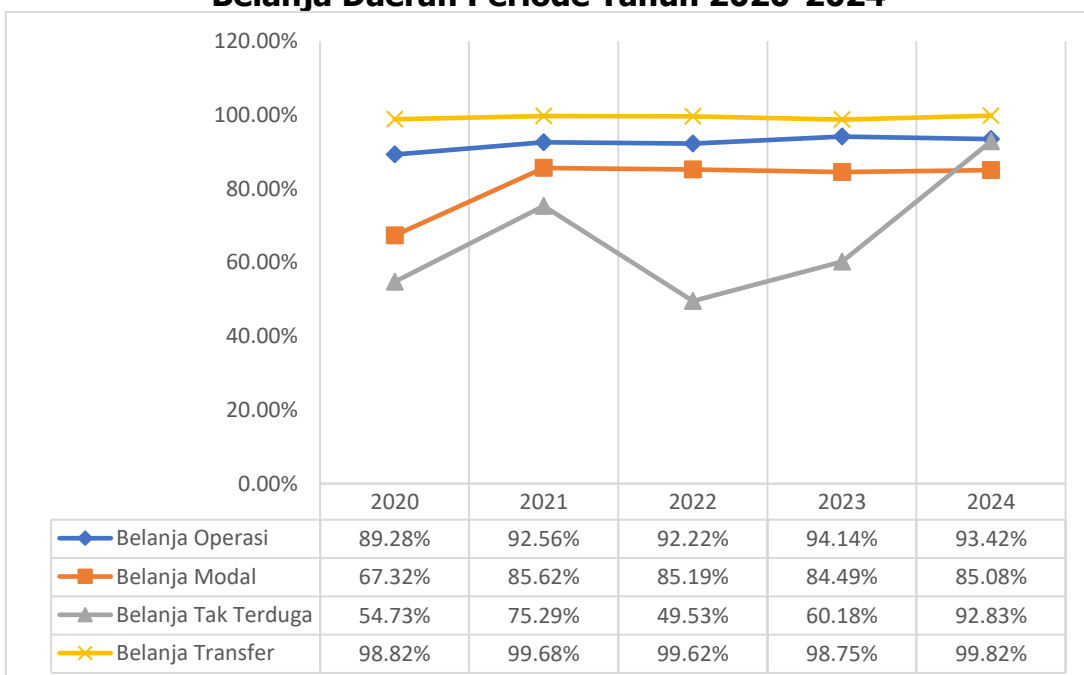
Tabel 2.89
Kinerja Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Periode Tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
BELANJA DAERAH	85,50%	91,81%	91,65%	93,19%	92,96%
Belanja Operasi	89,28%	92,56%	92,22%	94,14%	93,42%
Belanja Pegawai	92,04%	95,81%	94,52%	95,42%	95,18%
Belanja Barang dan Jasa	85,97%	88,65%	88,98%	92,10%	90,49%
Belanja Bunga	-	-	-	-	57,62%
Belanja Subsidi	-	77,61%	96,39%	49,87%	70,15%
Belanja Hibah	89,00%	95,00%	96,52%	97,18%	99,00%
Belanja Bantuan Sosial	93,45%	96,28%	95,56%	97,64%	95,46%
Belanja Modal	67,32%	85,62%	85,19%	84,49%	85,08%
Belanja Tanah	25,35%	41,90%	75,07%	59,42%	2,73%
Belanja Peralatan dan Mesin	85,14%	87,76%	77,48%	84,75%	87,83%
Belanja Gedung dan Bangunan	64,83%	92,07%	91,76%	88,30%	85,30%
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	61,26%	87,78%	88,95%	92,75%	90,99%
Belanja Aset Tetap Lainnya	59,32%	88,09%	37,57%	94,99%	82,41%
Belanja Aset Lainnya	89,21%	91,91%	97,82%	80,17%	97,37%
Belanja Tak Terduga	54,73%	75,29%	49,53%	60,18%	92,83%
Belanja Tak Terduga	54,73%	75,29%	49,53%	60,18%	92,83%
Belanja Transfer	98,82%	99,68%	99,62%	98,75%	99,82%
Bagi Hasil Pajak	99,74%	99,74%	99,77%	100,00%	100,00%
Bagi Hasil Retribusi	99,78%	99,69%	99,69%	100,00%	100,00%
Belanja Bantuan Keuangan	98,65%	99,66%	99,59%	98,47%	99,77%

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo, 2025

Berdasarkan Tabel 2.89 dan Gambar 2.85, kinerja realisasi belanja daerah Kabupaten Sidoarjo periode tahun 2020–2024 menunjukkan capaian yang baik dan relatif stabil, dengan rata-rata realisasi keseluruhan belanja daerah 91,02%. Belanja Operasi dan Belanja Transfer merupakan belanja dengan tingkat realisasi tertinggi dengan capaian masing-masing di atas 90% dan 98%, hal ini mencerminkan efisiensi pelaksanaan kegiatan rutin serta ketepatan penyaluran dana bagi hasil dan bantuan keuangan. Sementara itu, belanja modal menunjukkan tren positif dengan peningkatan signifikan sejak tahun 2020. Adapun Belanja Tak Terduga menunjukkan tren fluktuatif sejalan dengan kebutuhan darurat yang bervariasi setiap tahun, namun pada tahun 2024 menunjukkan peningkatan signifikan hingga mencapai lebih dari 90%. Secara keseluruhan, realisasi belanja daerah selama lima tahun terakhir mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, akuntabel, dan mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah.

Gambar 2.85
Kinerja Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Periode Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo, 2025 diolah

Gambaran kontribusi masing-masing komponen belanja sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.90
Kontribusi Komponen Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten
Sidoarjo Periode Tahun 2020-2024 (dalam %)

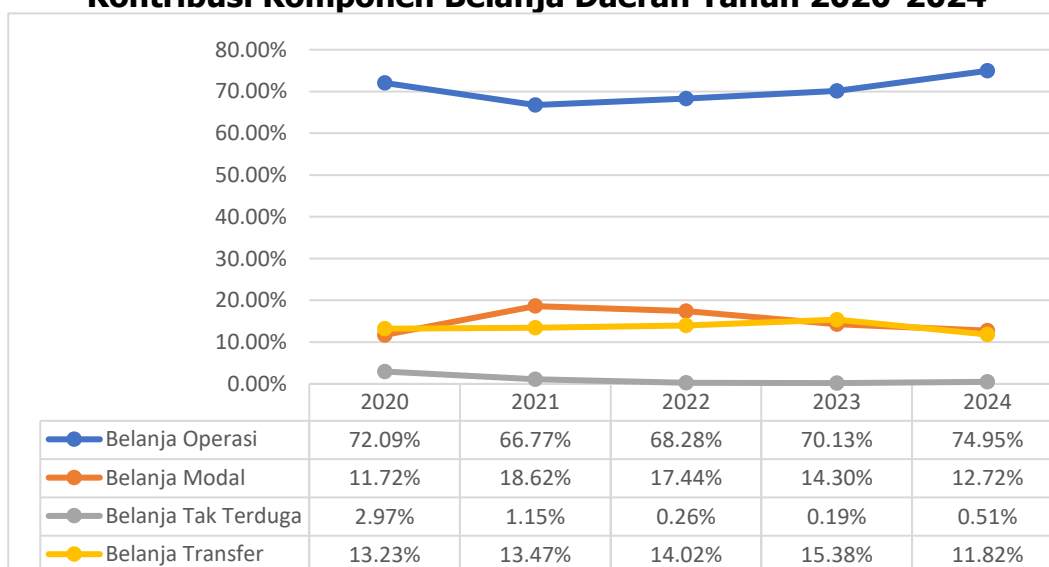
NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Kontribusi
	BELANJA DAERAH	100	100	100	100	100	100
1	Belanja Operasi	72,086	66,766	68,279	70,125	74,952	70,44
	Belanja Pegawai	48,890	49,157	45,004	44,950	45,184	46,64
	Belanja Barang dan Jasa	40,320	42,888	43,409	43,048	42,947	42,52
	Belanja Bunga	-	-	-	-	0,009	0,01
	Belanja Subsidi	-	0,138	0,073	0,036	0,045	0,07
	Belanja Hibah	8,088	4,471	8,505	8,951	9,200	7,84
	Belanja Bantuan Sosial	2,703	3,346	3,009	3,015	2,616	2,94
2	Belanja Modal	11,720	18,618	17,442	14,299	12,722	14,96
	Belanja Tanah	4,206	3,701	7,334	11,106	0,123	5,29
	Belanja Peralatan dan Mesin	48,843	33,540	23,582	25,611	28,655	32,05
	Belanja Gedung dan Bangunan	20,284	32,821	15,382	22,246	28,978	23,94
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	26,075	29,646	52,961	40,778	42,142	38,32
	Belanja Aset Tetap Lainnya	0,144	0,059	0,072	0,089	0,019	0,08
	Belanja Aset Lainnya	0,449	0,233	0,668	0,170	0,083	0,32
3	Belanja Tak Terduga	2,968	1,146	0,260	0,192	0,506	1,01
	Belanja Tak Terduga	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Belanja Transfer	13,227	13,470	14,019	15,384	11,820	13,58
	Bagi Hasil Pajak	14,457	14,445	15,672	17,729	21,329	16,73
	Bagi Hasil Retribusi	1,333	1,076	0,944	0,628	0,692	0,93
	Belanja Bantuan Keuangan	84,210	84,478	83,384	81,643	77,979	82,34

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo, 2025

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa komponen Belanja Operasi memiliki rata-rata kontribusi terbesar. Dalam periode tahun 2020-2024, komponen Belanja Operasi rata-rata memberikan kontribusi sebesar 70,44% terhadap Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo. Komponen Belanja Modal tercatat memberikan rata-rata kontribusi sebesar 14,96% pada periode yang sama. Selanjutnya pada komponen Belanja Transfer dan komponen Belanja Tak Terduga berturut-turut pada periode yang sama rata-rata memberikan kontribusi sebesar 13,58% dan 1,01%

Perkembangan komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Sidoarjo periode tahun 2020-2024 sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.86
Kontribusi Komponen Belanja Daerah Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo, 2025

Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa dalam periode tahun 2020-2024 komponen Belanja Operasi menunjukkan tren positif pada rata-rata kontribusi terhadap Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo. Dalam tiga tahun terakhir rata-rata kontribusi yang diberikan komponen Belanja

Operasi terus meningkat dari 68,28% pada tahun 2022, menjadi 70,13% pada tahun 2023, hingga sebesar 74,95% pada tahun 2024. Kondisi berkebalikan terjadi pada komponen Belanja Modal, di mana dalam tiga tahun terakhir menunjukkan tren yang terus menurun. Dengan demikian pengeluaran Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang memberikan manfaat jangka panjang terus menurun. Adapun dua komponen yang lain yaitu Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer sama-sama menunjukkan trend yang fluktuatif dalam periode yang sama.

3. Kinerja Realisasi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari dua komponen yaitu Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, penerimaan dana bergulir, dan penerimaan pembiayaan lainnya. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan data yang ada, komponen Penerimaan Pembiayaan menunjukkan tren yang terus menurun sejak tahun 2021 hingga tahun 2023. Hanya pada tahun 2024 komponen Penerimaan Pembiayaan meningkat dari Rp495.539.916.057,68 di tahun 2023 menjadi Rp563.408.107.589,27. Meskipun demikian, komponen Penerimaan Pembiayaan mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar (-13,37%) dalam periode tahun 2020-2024. Adapun komponen Pengeluaran Pembiayaan menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi dalam lima tahun terakhir. Pada periode tersebut komponen Pengeluaran



Pembiayaan juga mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar (-6,35%). Penurunan yang terjadi pada kedua komponen tersebut menjadikan Pembiayaan Neto memiliki rata-rata pertumbuhan (-13,34%) dalam lima tahun terakhir. Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 secara rinci dapat disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:



Tabel 2.91
Pembiayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	PEMBIAYAAN						
A	Penerimaan Pembiayaan	1.131.026.644.892,32	1.109.326.717.093,10	842.259.150.481,06	495.539.916.057,68	563.408.107.589,27	-13,37%
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	1.128.386.371.743,57	1.106.084.911.309,32	840.996.530.211,75	494.877.999.185,63	511.902.365.548,05	-15,91%
	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir	2.640.273.148,75	3.241.805.783,78	1.262.620.269,31	661.916.872,05	260.697.900,22	-36,61%
	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	51.245.044.141,00	-
B	Pengeluaran Pembiayaan	5.895.000.000	1.866.000.000	2.319.000.000,00	2.055.000.000,00	2.672.928.104,41	-6,35%
	Penyertaan Modal	5.895.000.000,00	1.866.000.000,00	2.319.000.000,00	2.055.000.000,00	0,00	-38,86%



No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	(investasi) Pemerintah Daerah						
	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	2.672.928.104,41	-
	Pembiayaan Neto	1.125.131.644.892,32	1.107.460.717.093,10	839.940.150.481,06	493.484.916.057,68	560.735.179.484,86	-13,34%

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo, 2025

Berdasarkan data pada tabel di atas, Komponen Penerimaan Pembiayaan didominasi oleh SiLPA tahun anggaran sebelumnya. Nilai SiLPA tertinggi selama lima tahun terakhir tercatat pada tahun 2021 dan 2022 hingga menyentuh 1 Triliyun rupiah, hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan sebagian kegiatan tidak terlaksana. Selain SiLPA, penerimaan pembiayaan berasal dari pengembalian dagulir dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pada tahun 2024, yang merupakan pencairan pinjaman pada BLUD dari perbankan.

Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan, yang meliputi Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah, bergerak fluktuatif selama 5 (lima) tahun terakhir. Fluktuasi penyertaan modal tersebut terdapat pada PDAM yang digunakan untuk menambah sambungan rumah (SR). Dalam hal ini besaran nilainya menyesuaikan dengan hasil verifikasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di tahun 2021 dan digunakan untuk program hibah air minum perkotaan (AMK) pada tahun 2022.

Berikutnya akan disajikan perbandingan perkembangan komponen Penerimaan Pembiayaan dan komponen Pengeluaran Pembiayaan. Berdasarkan data yang ada, terlihat pola perkembangan kedua komponen Pembiayaan Daerah Kabupaten Sidoarjo berbeda di tahun 2022. Terlihat bahwa pada tahun tersebut, komponen Pengeluaran Pembiayaan mengalami peningkatan, sedangkan komponen Penerimaan Pengeluaran terlihat turun. Dalam hal mengantisipasi kecenderungan terjadinya defisit anggaran, maka Pemerintah Kabupaten Sidoarjo harus menyiapkan beragam formulasi kebijakan yang akan berdampak pada jenis-jenis penerimaan pembiayaan daerah. Gambar di bawah ini akan memperlihatkan perbandingan perkembangan komponen Penerimaan Pembiayaan dan komponen Pengeluaran Pembiayaan dalam lima tahun terakhir.

Gambar 2.87
Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Kabupaten Sidoarjo tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo, 2025

2.2.1.2. Kinerja Neraca Daerah

Neraca daerah mencerminkan situasi keuangan pemerintah daerah, termasuk aset, kewajiban, dan ekuitas pada saat tertentu. Laporan neraca daerah memberikan informasi penting bagi manajemen pemerintah daerah, lembaga legislatif daerah, kreditur, dan masyarakat umum tentang kekayaan atau aset daerah, kewajiban, serta ekuitas pada tanggal tertentu. Analisa terhadap Neraca Daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas dan solvabilitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah.

Elemen neraca daerah terdiri atas: a) Aset; b) Kewajiban; dan c) Ekuitas Dana. Aset adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan yang mempunyai nilai ekonomis. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sementara Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Setiap elemen



utama dalam neraca daerah diuraikan lebih rinci melalui sub-sub rekening. Neraca Keuangan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020-2024 dapat dicermati pada tabel berikut ini.



Tabel 2.92
Neraca Keuangan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	ASET					
	A. Aset Lancar	1.518.344.311.363,68	1.257.805.013.617,12	879.976.583.530,80	890.541.550.281,81	1.054.825.042.986,58
	B. Investasi Jangka Panjang	553.266.692.773,61	537.401.506.466,30	608.029.707.204,75	631.637.813.076,00	643.507.483.845,75
	C. Aset Tetap	18.740.252.557.669,80	19.542.966.240.612,00	20.624.900.170.513,40	20.864.158.739.604,00	20.972.246.200.489,90
	D. Aset Lainnya	452.336.907.621,00	470.002.485.409,96	473.118.173.143,03	577.380.978.119,14	451.701.572.348,69
	JUMLAH ASET	21.264.200.469.428,10	21.808.175.246.105,40	22.586.024.634.392,00	22.963.719.081.080,90	23.213.233.721.800,60
2	KEWAJIBAN					
	A. Kewajiban Jangka Pendek	104.662.963.145,48	100.362.872.767,60	105.310.401.401,68	158.682.355.459,33	204.378.954.952,78
	B. Kewajiban Jangka Panjang					
	JUMLAH KEWAJIBAN	104.662.963.145,48	100.362.872.767,60	105.310.401.401,68	158.682.355.459,33	204.378.954.952,78
3	EKUITAS					
	Ekuitas	21.159.537.506.282,60	21.707.812.373.337,80	22.480.714.232.990,30	22.805.036.725.621,60	23.008.854.766.847,80
	JUMLAH EKUITAS	21.159.537.506.282,60	21.707.812.373.337,80	22.480.714.232.990,30	22.805.036.725.621,60	23.008.854.766.847,80
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	21.264.200.469.428,10	21.808.175.246.105,40	22.586.024.634.392,00	22.963.719.081.080,90	23.213.233.721.800,60

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo, 2025



Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui jumlah aset Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengalami perkembangan, dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 2,22%. Aset tersebut terdiri atas aset lancar (kas, piutang dan persediaan, dan beban dibayar di muka), investasi jangka panjang (investasi non permanen dan investasi permanen), aset tetap (tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan), dana cadangan, aset lainnya (tuntutan ganti kerugian daerah, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tak berwujud, aset lain-lain, dan dana *treasury deposit facility*), semuanya dipergunakan untuk menunjang kelancaran tugas pemerintahan.

Kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Jumlah kewajiban cenderung mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 20,07% setiap tahunnya. Selanjutnya ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal laporan. Adapun jumlah ekuitas cenderung mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,12% per tahun.

Sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa analisis terhadap kinerja Neraca Daerah yang diperlukan dalam merumuskan perencanaan keuangan daerah adalah analisis rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Rasio likuiditas digunakan untuk menganalisis kemampuan kas Pemerintah Daerah dalam memenuhi operasional pemerintahan dan hutang jangka pendeknya. Analisis solvabilitas dilakukan untuk mengetahui kemampuan aset dan ekuitas daerah dalam memenuhi kewajiban Pemerintah Daerah di masa mendatang.

Rasio likuiditas dianalisis menggunakan analisis rasio lancar (*current ratio*) dan rasio cepat (*quick ratio*). Rasio lancar digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayar hutang jangka pendeknya, sementara rasio cepat menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayar hutang jangka pendek tanpa memperhitungkan nilai persediaan.

Rasio solvabilitas dianalisis dengan menghitung *Debt to Asset Ratio* (DAR) dan *Debt to Equity Ratio* (DER). DAR bertujuan untuk melihat dan menganalisis kemampuan aset dalam memenuhi kewajiban entitas di masa mendatang. Sedangkan DER bertujuan untuk melihat dan menganalisis komposisi sumber pendanaan entitas dan kemampuan ekuitas dalam memenuhi kewajiban entitas di masa mendatang.

Analisis rasio keuangan daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2020-2024 ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.93
Analisis Rasio Keuangan Daerah Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2020-2024

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata
Rasio Lancar (<i>Current Ratio</i>)	14.51	12.53	8.36	5.61	5.14	9.23
Rasio Cepat (<i>Quick ratio</i>)	13.79	11.57	7.66	5.14	4.74	8.58
Rasio Kas	10.57	8.38	4.70	3.23	3.15	6.00
<i>Debt to Asset Ratio</i>	0.49%	0.46%	0.47%	0.69%	0.88%	0,60%
<i>Debt to Equity Ratio</i>	0.49%	0.46%	0.47%	0.70%	0.89%	0,60%

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo, 2025

Memperhatikan tabel di atas, rasio keuangan yang dianalisis terdiri atas rasio likuiditas dan solvabilitas. Rasio Likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio Likuiditas yang digunakan dalam analisa adalah Rasio Lancar dan Rasio Cepat. Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa rata-rata Rasio Lancar dalam lima tahun terakhir sebesar 9,23. Rasio Lancar sendiri

merupakan kemampuan untuk membayar hutang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar. Capaian sebesar 9,23 ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mempunyai kemampuan untuk membayar hutang sebesar 9 kali lebih. Adapun Rasio Cepat adalah kemampuan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid. Tercatat dalam periode yang sama, rata-rata Rasio Cepat sebesar 8,58. Dengan demikian kemampuan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk membayar kewajiban jangka pendeknya sangat baik, yaitu hingga 8 kali lebih.

Adapun Rasio Solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Rasio Solvabilitas terdiri atas Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset dan Rasio Hutang Terhadap Modal. Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset sendiri menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, di mana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan. Dengan kata lain hal ini juga menandakan semakin besar risiko yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Masih merujuk data yang sama pada tabel 2.58 di atas, terlihat bahwa rata-rata Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset dalam lima tahun terakhir tercatat sebesar 0,60%. Dengan demikian risiko hutang Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terhadap aktiva cukup kecil, yaitu kurang dari 1%. Selanjutnya, Rasio Hutang Terhadap Modal menunjukkan seberapa perlu hutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki, dimana semakin kecil nilainya berarti semakin mandiri, tidak tergantung pembiayaan dari pihak lain. Rasio Hutang Terhadap Modal dalam lima tahun terakhir menunjukkan rata-rata sebesar 0,60%. Dengan demikian nilai total hutang Pemerintah Kabupaten Sidoarjo masih berada di bawah nilai modal yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Dengan kata lain, semakin mandiri dan tidak bergantung pada hutang.

2.2.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dijelaskan bahwa kebijakan masa lalu terkait dengan pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo merupakan analisis lebih lanjut atas hasil kinerja pelaksanaan APBD selama 5 tahun terakhir dan perkembangan Neraca Daerah. Kebijakan anggaran dan keuangan yang telah dilaksanakan selama 5 tahun terakhir kemudian dapat menggambarkan kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu terkait proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

2.2.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Dalam sub bab ini dibahas mengenai proporsi belanja rutin pegawai terhadap total belanja dalam satu tahun anggaran. Hal ini dilakukan dalam rangka mengetahui seberapa besar kebutuhan anggaran untuk operasional rutin aparatur dan kebijakan apa yang sekiranya perlu dilakukan dalam melakukan efisiensi dan efektivitas kerja aparatur. Seperti data yang tercermin dalam Tabel 2.89 tentang proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran daerah, di mana nilai proporsinya cenderung stabil dengan rata-rata sebesar 32,81% dalam 5 (lima) tahun terakhir. Meskipun terjadi penurunan pada Tahun 2021 dan 2022 hingga mencapai nilai terendah sebesar 30,71%, namun pada Tahun 2023 dan 2024 kembali naik hingga mencapai 33,85%. Nilai tersebut masih lebih rendah dari tahun 2020 sebesar 35,20% yang merupakan nilai proporsi terbesar selama lima tahun terakhir.

Tabel 2.94
Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Terhadap Total
Pengeluaran Daerah Kabupaten Sidoarjo selama Tahun 2020-2024

No	Uraian	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Persentase
1	2020	1.561.467.836.809,25	4.436.556.948.165,65	35,20
2	2021	1.620.047.237.731,00	4.937.965.885.354,76	32,81
3	2022	1.490.285.235.545,00	4.852.230.746.143,62	30,71
4	2023	1.576.630.115.712,52	5.003.832.999.928,70	31,51
5	2024	1.778.430.605.560,10	5.254.015.918.405,88	33,85

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo, 2025

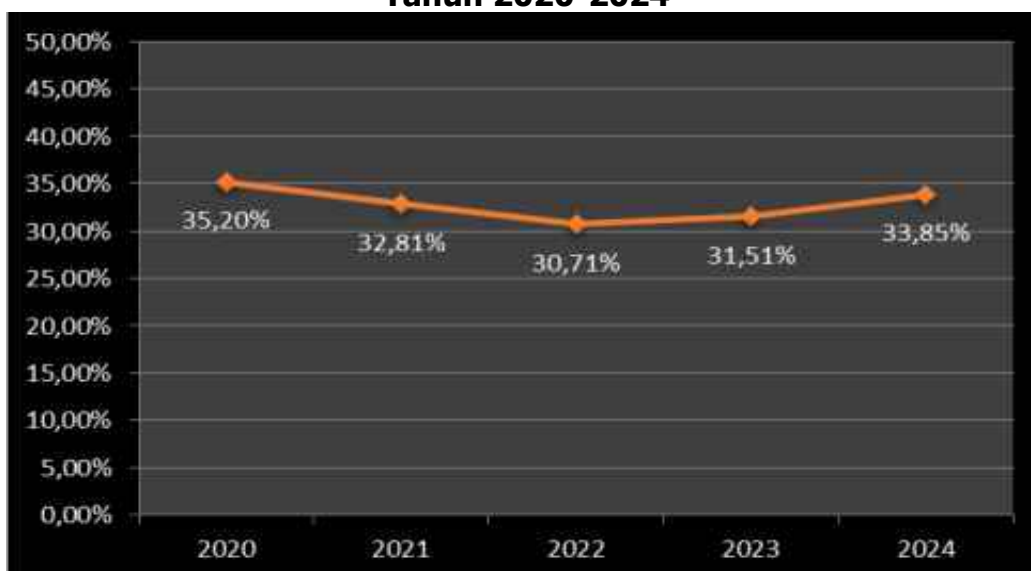
Nilai persentase realisasi total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dibandingkan dengan realisasi total pengeluaran cenderung stabil dengan rata-rata sebesar 32,81% dalam 5 (lima) tahun terakhir. Meskipun terjadi penurunan pada Tahun 2021 dan 2022 hingga mencapai nilai terendah sebesar 30,71%, namun pada Tahun 2023 dan 2024 kembali naik hingga mencapai 33,85%. Nilai tersebut masih lebih rendah dari tahun 2020 sebesar 35,20% yang merupakan nilai proporsi terbesar selama lima tahun terakhir.

Sebagaimana diketahui bersama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (HKPD) mengamanatkan pembatasan proporsi belanja pegawai maksimal 30% dari total belanja APBD. Kebijakan pengaturan proporsi belanja pegawai ini merupakan untuk memberikan porsi yang lebih besar kepada kepada Pemerintah Daerah untuk mencapai kualitas layanan publik dan pemerataan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejak kebijakan tersebut diberlakukan, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam penyusunan APBD selalu mengalokasikan proporsi belanja pegawai kurang dari 30%.

Sekilas data pada tabel di atas, menunjukkan jika proporsi belanja pegawai di atas 30%. Kondisi ini secara tidak langsung mengindikasikan bahwa realisasi pengeluaran Pemerintah Kabupaten Sidoarjo belum optimal.

Hal ini merujuk pada penggunaan data realisasi sebagai penyebut dalam perhitungan proporsi pada tabel 2.89 di atas. Mengingat sejak pemberlakuan UU Nomor 1 Tahun 2022, proporsi belanja pegawai terhadap total belanja APBD di bawah 30%. Dengan demikian perkembangan proporsi belanja pegawai sebagai terlihat pada Grafik 3.4 di bawah ini, bukan mengindikasikan peningkatan proporsi belanja pegawai. Perkembangan proporsi belanja pegawai tersebut secara tidak langsung menunjukkan kinerja belanja pengeluaran yang belum optimal.

Gambar 2.88
Proporsi Penggunaan Anggaran Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo, 2025

2.2.2.2 Analisis Pembiayaan

Analisis Pembiayaan Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Dengan diberlakukannya anggaran berbasis kinerja, dalam penyusunan APBD maka sangat dimungkinkan adanya defisit. Guna menutup defisit tersebut, maka

diperlukan pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Sumber pembiayaan dapat berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SiLPA) yang secara konsep APBD setiap tahun bernilai Rp.0,00 dan SiLPA Riil yang merupakan dampak dari pelaksanaan APBD. Dengan demikian pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah ketika terjadi defisit anggaran.

Perkembangan analisis Pembiayaan Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam lima tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Apabila dalam kurun waktu tahun 2020-2022 APBD Kabupaten Sidoarjo dalam kondisi defisit yang terus meningkat hingga mencapai Rp. 347.381.151.296,43 di tahun 2022. Berkat upaya yang gigih dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, maka dalam dua tahun terakhir (tahun 2023-2024) APBD Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengalami surplus dari Rp. 16.362.449.491,37 di tahun 2023 menjadi Rp. 79.367.547.928,93 pada tahun 2024. Gambaran kondisi defisit riil APBD Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam lima tahun terakhir, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.95
Analisis Realisasi Surplus/Defisit Riil Anggaran
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
Realisasi Pendapatan Daerah	4.411.615.214.581,65	4.669.635.698.473,41	4.504.849.594.847,19	5.020.195.449.420,07	5.333.383.466.334,81
Dikurangi:					
Realisasi Belanja Daerah	4.430.661.948.164,65	4.936.099.885.354,76	4.849.911.746.143,62	5.001.777.999.928,70	5.251.342.990,47
Pengeluaran Pembiayaan	5.895.000.000,00	1.866.000.000,00	2.319.000.000,00	2.055.000.000,00	2.672.928.104,41
Surplus (Defisit) Riil	(24.941.733.583,00)	(268.330.186.881,35)	(347.381.151.296,43)	16.362.449.491,37	79.367.547.928,93

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo, 2025

Sementara untuk menutup defisit APBD yang terjadi pada kurun waktu tahun 2020-2022, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menggunakan dua pos besar yaitu Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah. Dalam periode tersebut, defisit APBD sebagian besar ditutup dari SiLPA. Bahkan untuk defisit APBD yang terjadi pada tahun 2022, hampir seluruhnya (99,64%) ditutup dari SiLPA. Adapun defisit APBD yang lain ditutup dari Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Dana, yaitu melalui Dana Bergulir (Dagulir). Kontribusi komponen ini dalam menutup defisit APBD dalam periode yang sama terus menurun. Kontribusi terbesar komponen ini tercatat pada tahun 2010, di mana tercatat 10,59% defisit APBD ditutup dari Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Dana. Perkembangan komposisi penutup defisit riil APBD Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.96
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020-2024

No	Uraian	Proporsi dari total defisit riil				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	89,41%	98,79%	99,64%	-	-
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	10,59%	1,21%	0,36%	-	-
6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan	-	-	-	-	-

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo, 2025

Setelah menguraikan komposisi penutup defisit riil APBD Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, di mana sebagian besar berasal dari SiLPA. Guna



memberikan gambaran lebih komprehensif, maka selanjutnya akan diuraikan perkembangan realisasi SiLPA dalam lima tahun terakhir. Berdasarkan data pada tabel 2.81, penerimaan pembiayaan daerah dari SiLPA dalam periode tersebut didominasi oleh komponen Sisa Penghematan Belanja Atau Akibat Lainnya. Lebih dari 50% SiLPA berasal dari komponen tersebut, bahkan pada tahun 2020 komponen ini memberikan kontribusi sebesar 95,95%. Tahun 2022 tercatat komponen ini memberikan kontribusi paling kecil (51,88%), namun masih tercatat paling tinggi dibanding komponen lain pada tahun yang sama.

Perkembangan menarik terlihat pada komponen Pelampauan Penerimaan PAD, di mana sempat tercatat (-1,61%) pada tahun 2020. Meskipun demikian, pada tahun-tahun selanjutnya Pelampauan Penerimaan PAD menunjukkan perkembangan yang menggembirakan meski masih berfluktuasi. Pandemi Covid-19 berkontribusi signifikan terhadap kinerja komponen ini, mengingat banyak kebijakan yang diambil kontra produktif terhadap penerimaan PAD. Tabel 2.82 di bawah ini akan memperlihatkan detail realisasi SiLPA Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam periode tahun 2010-2024.



Tabel 2.97
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020		2021		2022		2023		2024	
		Rp	% Dari SiLPA	Rp	% Dari SiLPA	Rp	% Dari SiLPA	Rp	% Dari SiLPA	Rp	% Dari SiLPA
	Jumlah SiLPA	1.128.032.962.258,30	100%	1.106.084.911.309,32	100%	840.996.530.211,75	100%	494.877.999.184,63	100%	511.857.365.548,05	100%
1	Pelampauan penerimaan PAD	-18.189.851.140,51	-1,61%	268.338.425.643,40	24,26%	215.685.751.949,79	25,65%	79.180.942.444,19	16,00%	137.653.048.992,70	26,89%
2	Pelampauan penerimaan dana transfer	-28.526.658.674,00	-2,53%	16.526.601.863,00	1,49%	189.039.207.359,72	22,48%	-4.277.357.796,00	-0,86%	7.816.820.379,00	1,53%
3	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	96.436.377.543,20	8,55%	69.502.105.060,00	6,28%		0,00%		0,00%		0,00%
4	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	1.078.313.094.529,61	95,59%	751.717.778.742,92	67,96%	436.271.570.902,24	51,88%	419.974.414.536,44	84,86%	366.387.496.176,35	71,57%
5	Sisa Belanja Lainnya									45.000.000	0,01%

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo, 2025

2.2.3. Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja periodik wajib dan mengikat, serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan, serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya. Kapasitas keuangan daerah adalah total pendapatan daerah setelah dikurangi dengan kewajiban kepada pihak ketiga yang sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan kegiatan lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya.

2.2.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Berdasarkan realisasi APBD tahun 2020-2024, dilakukan proyeksi untuk memperoleh gambaran pendapatan dan belanja tahun 2025-2029. Penentuan proyeksi pendapatan dan belanja dilakukan dengan mempertimbangkan informasi-informasi kebijakan Pemerintah. Penyesuaian terhadap target Pajak dan Retribusi Daerah juga telah dilakukan serta penurunan dan relaksasi terhadap penerimaan dari pendapatan transfer juga perlu dipertimbangkan. Penurunan bagi hasil pajak/bukan pajak dari Pemerintah serta bagi hasil pajak provinsi juga harus diperhitungkan.

Tabel 2.98
Proyeksi Kerangka Pendanaan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2026-2030

NO	URAIAN	BASELINE 2024	2026	2027	2028	2029	2030
	1	2	3	4	5	6	7
I	PENDAPATAN DAERAH	5.333.383.466.334,81	4.888.848.385.810,00	5.103.957.714.785,00	5.348.807.533.262,00	5.618.010.633.840,00	5.895.160.791.341,00
	Pendapatan Asli Daerah	2.353.387.157.089,76	2.750.171.547.810,00	2.879.733.803.265,00	3.035.614.665.282,00	3.212.290.051.141,00	3.393.211.385.335,00
	Pendapatan Transfer	2.979.896.625.006,00	2.138.676.838.000,00	2.224.223.911.520,00	2.313.192.867.980,00	2.405.720.582.699,00	2.501.949.406.006,00
	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	99.684.239,05	-	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	5.333.383.466.334,81	4.888.848.385.810,00	5.103.957.714.785,00	5.348.807.533.262,00	5.618.010.633.840,00	5.895.160.791.341,00
II	BELANJA DAERAH	5.588.617.739.711,00	5.164.561.385.810,00	5.373.957.714.785,00	5.593.807.533.262,00	5.838.010.633.840,00	6.090.160.791.341,00
	Belanja Operasi	4.175.021.000.784,00	3.441.733.524.211,20	3.785.326.065.888,20	3.937.088.699.588,80	4.096.913.236.778,40	4.266.961.001.507,31
	Belanja Modal	811.104.760.064,00	930.326.756.418,00	945.631.742.907,00	999.078.909.784,00	1.063.085.454.378,00	1.142.117.537.283,00
	Belanja Tidak Terduga	29.627.869.993,00	35.000.000.000,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00
	Belanja Transfer	572.864.108.870,00	757.501.105.180,80	612.999.905.989,80	627.639.923.889,20	643.011.942.683,60	651.082.252.550,69
	JUMLAH BELANJA DAERAH	5.588.617.739.711,00	5.164.561.385.810,00	5.373.957.714.785,00	5.593.807.533.262,00	5.838.010.633.840,00	6.090.160.791.341,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(519.000.000.000,00)	(275.713.000.000,00)	(270.000.000.000,00)	(245.000.000.000,00)	(220.000.000.000,00)	(195.000.000.000,00)
III	PEMBIAYAAN DAERAH	560.735.179.484,86	275.713.000.000,00	270.000.000.000,00	245.000.000.000,00	220.000.000.000,00	195.000.000.000,00
	Penerimaan Pembiayaan	563.408.107.589,27	300.000.000.000,00	275.000.000.000,00	250.000.000.000,00	225.000.000.000,00	200.000.000.000,00
	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	2.672.928.104,41	24.287.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETO	560.735.179.484,86	275.713.000.000,00	270.000.000.000,00	245.000.000.000,00	220.000.000.000,00	195.000.000.000,00

1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan pemerintah daerah untuk mengelola sumber keuangannya secara mandiri guna melaksanakan kebijakan pembangunan daerah. Kabupaten Sidoarjo memiliki banyak potensi untuk memaksimalkan pengelolaan keuangan, terutama dari segi optimalisasi pendapatan. Optimalisasi pendapatan bisa dilakukan dengan cara penggalian potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Proyeksi dan Perencanaan Pengelolaan Pendapatan Transfer Pusat juga harus ditingkatkan, sehingga Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mampu memberikan gambaran pendapatan daerah secara presisi. Secara umum struktur pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

- A. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pos Pajak Daerah, Retribusi, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah;
- B. Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah;
- C. Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Optimalisasi pendapatan daerah salah satunya bisa dilakukan dengan cara-cara berikut ini:

1. Intensifikasi pendapatan daerah dilakukan dengan upaya optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang ada menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
2. Ekstensifikasi pendapatan daerah yaitu menggali sumber-sumber pendapatan dengan melihat kemungkinan-kemungkinan terhadap pemungutan akan sumber-sumber pendapatan daerah yang belum ada selama ini, atau dengan kata lain menggali sumber-sumber pendapatan baru. Kebijakan tersebut berfokus pada peningkatan dan optimalisasi PAD khususnya pada penerimaan pajak dan retribusi daerah tanpa harus menambah beban masyarakat. PAD sebagai



sumber penerimaan daerah merupakan indikator kekuatan dan kemandirian pembiayaan pembangunan daerah sesuai misi Kabupaten Sidoarjo.

3. Percepatan dan perluasan digitalisasi pemerintah daerah, terutama elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Kebijakan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah bertujuan untuk mempermudah masyarakat pembayaran khususnya pajak daerah dan retribusi daerah, serta mencegah terjadinya kebocoran dalam penerimaan daerah.

Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp5.428.354.730.802,00. Dalam lima tahun diproyeksikan meningkat menjadi Rp5.618.010.633.840,00 pada tahun 2029. Pada sisi lain, PAD pada tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp2.673.813.507.802,00 meningkat menjadi Rp3.212.290.051.141,00 pada tahun 2029. Diproyeksikan pula bahwa komponen Pajak Daerah dan komponen Retribusi Daerah akan memberikan kontribusi terbesar dalam PAD Kabupaten Sidoarjo. Pajak Daerah diproyeksikan meningkat dari Rp1.696.451.167.743,00 di tahun 2025, menjadi sebesar Rp2.037.781.018.593,00 pada tahun 2029. Adapun Retribusi Daerah diproyeksikan dari Rp910.860.898.805,00 di tahun 2025, meningkat pada tahun 2029 menjadi sebesar Rp. 1.074.090.864.509,00. Gambaran proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Sidoarjo dapat diformulasikan secara rinci sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Arah kebijakan pendapatan daerah ke depan, menjadikan Pendapatan Asli daerah (PAD) sebagai komponen pendapatan terbesar di Kabupaten Sidoarjo. Terdapat beberapa hal yang cukup penting terkait dengan prospek keuangan daerah ke depan, antara lain adalah:

- A. Peranan sektor Pajak Daerah dan Retribusi dalam memberikan sumbangan ke PAD akan semakin penting. Untuk itu, upaya untuk terus melakukan ekstensifikasi melalui perluasan basis tanpa harus



menambah beban kepada masyarakat maupun intensifikasi melalui upaya yang terus menerus dalam melakukan perbaikan internal melalui digitalisasi pelayanan dan senantiasa meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi dalam memenuhi kewajibannya adalah hal yang mutlak untuk tetap dilanjutkan secara konsisten termasuk dalam upaya untuk terus meningkatkan efisiensi, di tubuh penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Sidoarjo;

- B. Upaya ekstensifikasi pajak sebagaimana yang telah disampaikan, tampaknya tidak cukup hanya mengandalkan kondisi sarana prasarana daerah yang ada seperti saat ini. Untuk itu kedepan, prioritas pembangunan daerah harus benar-benar fokus pada sektor-sektor yang mampu menarik investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dalam upaya meningkatkan daya beli masyarakat yang dalam hal ini tentunya harus dilakukan dengan tanpa mengesampingkan konsistensi dalam menekan ketimpangan pendapatan masyarakat sebagai bentuk upaya untuk menekan angka kemiskinan, serta tetap memperhatikan keseimbangan dalam segala aspek kehidupan masyarakat yang ada di Kabupaten Sidoarjo.

Proyeksi peningkatan pendapatan daerah pada setiap tahun diupayakan untuk tetap menjaga penciptaan iklim yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha, sehingga keberadaannya diharapkan dapat mewujudkan stabilitas fiskal daerah khususnya dalam memberikan ketersediaan sumber pembiayaan dalam menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui perluasan basis pajak tanpa harus menambah beban kepada masyarakat maupun intensifikasi melalui upaya yang terus menerus dalam melakukan perbaikan ke dalam dan senantiasa meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi dalam memenuhi kewajibannya adalah hal yang mutlak untuk tetap dilanjutkan secara



konsisten termasuk dalam upaya untuk terus meningkatkan efisiensi, ditubuh penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Sidoarjo.

Upaya pengelolaan pendapatan daerah harus mampu membawa yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan daerah, maka dari itu diperlukan adanya strategi pemetaan potensi penerimaan daerah baik yang bersumber dari pajak, retribusi maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah. Teknik pengukuran potensi pendapatan daerah harus lebih realistis dan tidak hanya didasarkan pada keinginan untuk senantiasa menaikkan pajak dan retribusi, akan tetapi juga perlu melihat aspek lain yang mempengaruhi kebijakan tersebut.

2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi khususnya dalam pemberian layanan umum. Pada prinsipnya APBD memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan kewenangannya untuk penyelenggaraan pelayanan umum dalam satu tahun anggaran guna mendukung pencapaian visi dan misi dan tujuan pembangunan daerah melalui program dan kegiatan. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah.

Otonomi daerah menuntut daerah untuk bisa mengelola secara efisien dan efektif belanja daerah untuk kesejahteraan masyarakat secara umum. Saat ini pemerintah mulai menerapkan program anggaran berbasis kinerja, sebagai upaya efektivitas kinerja pemerintah dan mengalokasikan belanja secara efisien serta merencanakan anggaran secara transparan dan akuntabilitas. Penyusunan APBD berdasarkan pendekatan kinerja, yang terdiri dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan indikator yang ingin dicapai yang dijabarkan dalam belanja daerah. Anggaran berbasis kinerja merupakan suatu pendekatan



dalam sistem penganggaran yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan kinerja yang diharapkan serta memperhatikan efisiensi dalam pencapaian kinerja. Setiap anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah harus berdasarkan pada output atau hasil yang terukur.

Secara konsep, kebijakan anggaran belanja daerah harus mendukung target capaian pembangunan nasional sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintahan Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, dan unsur pemerintahan umum serta memprioritaskan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Untuk belanja yang bersifat strategis dengan nilai yang besar dapat dimungkinkan dengan menetapkan belanja dengan model pelaksanaan *multi-years* dan atau model pembayaran dengan *turn-keys*, yang pengalokasian dananya disepakati oleh DPRD dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Keterbatasan ruang fiskal menyebabkan ketergantungan terhadap pendapatan yang berasal dari dana transfer pemerintah pusat sehingga masih perlu dilakukan langkah-langkah terobosan terkait optimalisasi pendapatan daerah dan efisiensi belanja daerah untuk tetap menjaga kesinambungan fiskal serta memberikan ruang gerak yang lebih leluasa agar pemerintah dapat melakukan intervensi dalam menghadapi tantangan pembangunan.

Kebijakan Belanja Daerah disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja. Tentunya dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang. Kebijakan Belanja Daerah juga dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan, dan berkeadilan.



Kebutuhan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2025-2029 diproyeksikan meningkat dibandingkan periode 5 tahun sebelumnya. Hal ini digunakan untuk mendorong percepatan pencapaian target pembangunan, terutama pada indikator yang belum tercapai sesuai hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan hingga tahun 2024, dengan mempertimbangkan komitmen internasional dan dinamika kebijakan nasional.

Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp5.947.354.730.802,00 dan meningkat menjadi Rp5.838.010.633.840,00 pada tahun 2029. Komponen Belanja Operasi masih mendominasi dalam postur Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo lima tahun ke depan. Pada tahun 2025 Belanja Operasi diproyeksikan sebesar Rp4.385.703.405.212,00 sedangkan pada tahun 2029 menjadi Rp4.096.913.236.778,40. Komponen Belanja Modal juga diproyeksikan meningkat dari Rp790.303.571.535,00 di tahun 2025 menjadi Rp1.068.085.454.378,00 pada tahun 2029.

Amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait kebijakan Belanja Pemerintah Daerah adalah peningkatan kualitas pengalokasian belanja daerah agar lebih produktif dan fokus pada peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat dan *mandatory spending* agar terjadi akselerasi pemerataan kualitas layanan publik dan kesejahteraan di daerah. Peningkatan kualitas pengalokasi belanja daerah seperti dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

- A. Fokus belanja daerah pada layanan dasar guna memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM);
- B. Komitmen terhadap amanat undang-undang dalam hal alokasi belanja urusan Pendidikan dan Kesehatan;
- C. Melakukan efisiensi pada belanja pegawai. Amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 adalah besaran belanja pegawai maksimal



sebesar 30% dari total belanja tidak termasuk tunjangan guru yang berasal dari Tunjangan Kinerja Daerah (TKD);

- D. Alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% dari total belanja.

Dalam hal Pemerintah Daerah melebihi batas ketentuan alokasi belanja, maka Pemerintah Daerah diwajibkan melakukan penyesuaian dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 berlaku. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan mulai melakukan penyesuaian dan efisiensi belanja pegawai seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Arah kebijakan pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

A. Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan diarahkan kepada mengoptimalkan sumber Pendapatan Asli Daerah, mengutamakan belanja wajib dan prioritas, menganggarkan belanja bersifat konsumtif secara efisien dan efektif serta melaksanakan kegiatan dengan tepat waktu. Sesuai dengan Tabel 2.85, proyeksi penerimaan pembiayaan berasal dari SiLPA Tahun sebelumnya. Nilai proyeksi SiLPA tahun sebelumnya selama 5 tahun ke depan terus menurun. Rendahnya SiLPA yang diproyeksikan merupakan upaya dalam optimalisasi penyerapan anggaran setiap tahunnya. SiLPA yang ditimbulkan oleh adanya kegagalan penyerapan anggaran akan ditekan seminimal mungkin untuk memastikan APBD di tahun berkenaan dapat terserap dengan baik sesuai target yang telah ditentukan. Sedangkan SiLPA yang diperoleh atas keberhasilan efisiensi

anggaran yang tidak berdampak pada pengurangan target pembangunan dapat terus dilakukan.

B. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan dapat digunakan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan Dana Cadangan, Pemberian Pinjaman Daerah, dan/atau pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan Tabel 2.98, proyeksi pengeluaran pembiayaan terdapat pada tahun 2025 dan tahun 2026 yang merupakan pembayaran pinjaman melalui BLUD.

Pada tahun 2025 Pembiayaan Daerah Kabupaten Sidoarjo diproyeksikan sebesar Rp519.000.000.000,00 dan meningkat pada tahun 2029 menjadi sebesar Rp220.000.000.000,00. Dari sisi Penerimaan Pembiayaan, diproyeksikan sebesar Rp545.000.000.000,00 di tahun 2025 dan meningkat menjadi Rp225.000.000.000,00 pada tahun 2029. Adapun untuk komponen Pengeluaran Pembiayaan tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp26.000.000.000,00 dan menurun menjadi Rp5.000.000.000,00 pada tahun 2029.

4. Alternatif Pendanaan Non APBD

Untuk menunjang kinerja pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memiliki alternatif pendanaan pembangunan daerah melalui beberapa kebijakan sebagai berikut:

A. Pinjaman Daerah

Konsep dasar pinjaman daerah dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional pada prinsipnya diturunkan dari Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-Undang tersebut mengatur mengenai lingkup hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah termasuk pemberian kewenangan untuk melakukan pembiayaan daerah, salah satunya adalah Pinjaman Daerah. Pinjaman Daerah adalah pembiayaan



utang daerah yang diikat dalam suatu perjanjian pinjaman dan bukan dalam bentuk surat berharga, yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Pinjaman Daerah dapat bersumber dari : (i) Pemerintah Pusat; (ii) Pemerintah Daerah lain; (iii) Lembaga Keuangan Bank; dan (iv) Lembaga Keuangan Bukan Bank.

B. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

KPBU merupakan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur dengan tujuan untuk kepentingan umum yang sebagian atau seluruh modalnya menggunakan sumber dari badan usaha dengan sebuah pembagian risiko antar para pihak. Keterlibatan swasta bukan hanya akan mempercepat pembangunan infrastruktur, tapi juga meningkatkan efisiensi operasional serta menghasilkan kualitas pelayanan yang lebih tinggi bagi pengguna akhir.

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Pada saat ini telah diregulasi melalui Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 tentang pelaksanaan KPBU, yang disempurnakan dalam Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, melalui alternatif skema pembiayaan ini, diharapkan terjadi percepatan dalam pembangunan di Kabupaten Sidoarjo khususnya bidang infrastruktur publik.

C. Obligasi Pemerintah Daerah

Obligasi daerah adalah salah satu sumber pinjaman daerah jangka menengah dan/atau jangka panjang yang bersumber dari masyarakat, penerbitan obligasi daerah hanya dapat dilakukan di pasar modal

domestik dan dalam mata uang rupiah, namun efek yang diterbitkan tidak dijamin oleh Pemerintah. *Revenue Bond* adalah salah satu jenis obligasi pendapatan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dan digunakan hanya untuk membiayai kegiatan investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang menjadi urusan Pemerintah Daerah. Hal tersebut sesuai dengan amanat PMK Nomor 147/PMK.07/2006 tentang Tatacara Penerbitan, Pertanggungjawaban, Dan Publikasi Informasi Obligasi Daerah.

D. *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Kinerja pembangunan yang telah dicapai tidak terlepas dari dukungan semua pihak, termasuk Dunia Usaha melalui pelaksanaan Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) atau *Corporate Social Responsibility* (CSR). Pelaksanaan kegiatan TJSLP/CSR merupakan salah satu bentuk komitmen dan kontribusi dunia usaha dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan, sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Peran Pemerintah daerah dalam kegiatan TJSLP/CSR adalah memberikan informasi dan berbagai data guna penyusunan program TJSLP/CSR dan berkoordinasi dengan perusahaan dalam rangka sinergi dan harmonisasi program pembangunan daerah melalui penyediaan data base, sinergi dan sinkronisasi program, join monitoring, dan pembinaan teknis. Oleh karena itu, peran tim fasilitasi dan forum pelaksana TJSLP/CSR perlu lebih ditingkatkan, pada level Kabupaten maupun provinsi sehingga terlaksana program pembangunan Kabupaten Sidoarjo yang lebih luas dan berdampak positif bagi masyarakat.

E. Kemitraan dengan Lembaga Internasional/NGO

Pada pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah, maka diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang tata cara kerjasama daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dan kerjasama daerah dengan

lembaga di luar negeri. Kerjasama daerah ini merupakan sebagian urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan, yang menjadi kewenangan daerah, terdiri atas pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pertukaran budaya, peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan, dan promosi potensi daerah, serta kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

Lembaga Internasional disebut juga dengan *Non Governmental Organization* merupakan organisasi/lembaga internasional yang kegiatannya bertujuan memberikan bantuan atau pelayanan pada masyarakat secara sukarela. Keterlibatan Lembaga Internasional dalam proses pembangunan sebagai alternatif untuk menyelesaikan masalah keterbatasan sumberdaya yang dimiliki pemerintah, yaitu ketersediaan anggaran dalam menyediakan layanan publik serta bentuk partisipasi mitra pembangunan sebagai kontribusi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan manfaat dari mitra kerjasama ini diantaranya membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjangkau daerah yang sulit dan belum terjangkau oleh program pemerintah daerah, *Transfer of knowledge*, inovasi pemberdayaan masyarakat, dan hasil baik dapat direplikasikan ke daerah lain.

F. Pembiayaan Investasi Non Anggaran (PINA)

Pemerintah mengembangkan skema investasi yang murni tidak melibatkan dana dari Pemerintah melalui Pembiayaan Investasi Non Anggaran (PINA). PINA adalah mekanisme pembiayaan proyek investasi prioritas yang dananya bersumber selain dari Anggaran Pemerintah yang didorong dan difasilitasi oleh Kementerian PPN/Bappenas. Sumber pembiayaan PINA yaitu: 1) Penanaman modal; 2) Dana kelolaan; 3) Perbankan; 4) Pasar Modal; 5) Asuransi; 6) Lembaga pembiayaan; 7) Lembaga jasa keuangan lain; dan 8) Pembiayaan lain yang sah.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Pada bagian ini akan disampaikan Permasalahan Pembangunan Daerah dan Isu Strategis Tahun 2025-2029. Rumusan permasalahan



pembangunan daerah dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk menyesuaikan dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yang selanjutnya dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Isu strategis Pembangunan Kabupaten Sidoarjo merupakan kristalisasi dari permasalahan pembangunan daerah, yang bersumber dari analisis data *existing condition*, dan telaah terhadap isu strategis global, nasional dan regional. Analisis isu-isu strategis juga merupakan salah satu bagian terpenting dari dokumen RPJMD karena menjadi pijakan dalam perumusan program prioritas. Permasalahan pembangunan daerah dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori. *Pertama*, merupakan permasalahan pembangunan jangka menengah tingkat daerah (Makro). Permasalahan ini mencakup permasalahan lintas sektoral yang sangat penting untuk diselesaikan selama periode RPJMD tahun 2025-2029. *Kedua*, adalah permasalahan pembangunan berdasarkan penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan daerah.

2.3.1 Permasalahan Pembangunan Makro Daerah

Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi empiris yang menggambarkan kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya terjadi. Perumusan permasalahan jangka menengah Kabupaten Sidoarjo didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 dan rekomendasi dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Sidoarjo, Berbagai permasalahan yang telah diidentifikasi dan relevan dengan dokumen perencanaan jangka menengah adalah sebagai berikut.

1. Tantangan Pemantapan Kualitas SDM Diimbangi dengan *Lifeskills* bagi Seluruh Kalangan Termasuk Kelompok Disabilitas dan Rentan.

Sumber daya manusia merupakan modal dasar pembangunan. Kualitas sumber daya manusia diukur dengan IPM (indeks pembangunan manusia), dimana IPM mengukur pencapaian hasil pembangunan dari suatu daerah/wilayah dalam tiga dimensi dasar pembangunan yaitu: usia harapan hidup (dimensi kesehatan), pengetahuan/tingkat pendidikan



(harapan lama sekolah/dimensi pendidikan), serta standar hidup layak (dimensi ekonomi). Kondisi IPM di Kabupaten Sidoarjo pada lima tahun terakhir (2019 sampai dengan 2023) mengalami peningkatan pada setiap tahunnya dengan rata-rata capaian berada di atas IPM Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Namun demikian Kabupaten Sidoarjo masih memiliki permasalahan terkait pembangunan sumber daya manusia berupa kompetensi *lifeskills* utamanya pada kelompok disabilitas dan rentan.

2. Permasalahan Perluasan Layanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dalam Jangka Panjang.

Jumlah PPKS di Kabupaten Sidoarjo semakin meningkat. Meskipun demikian, muncul beberapa permasalahan yang eksis berkaitan dengan PPKS (terutama fakir miskin), diantaranya: belum adanya program terpadu antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat terkait penanganan PPKS, kemiskinan yang tersebar di pelosok desa, tata kelola program perlindungan, jaminan sosial masih lemah, serta program penanganan kemiskinan (PPKS) yang masih berjalan parsial. Pada sisi lain kelompok disabilitas dan rentan masih perlu mendapat perhatian.

3. Permasalahan Pertumbuhan Ekonomi yang Masih Bersifat Eksklusif.

Kabupaten Sidoarjo cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut menyisakan beberapa permasalahan seperti ketimpangan pendapatan dan juga pengangguran. Secara teoritis, pertumbuhan ekonomi yang inklusif menunjukkan bahwa setiap terjadi pertumbuhan ekonomi, maka akan diikuti dengan penurunan pengangguran, penurunan kesenjangan pendapatan dan penurunan kemiskinan. Hal tersebut sering terjadi di wilayah yang maju. Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu kabupaten yang tergolong maju di Indonesia. Sehingga permasalahan yang dihadapi adalah eksklusifitas pertumbuhan ekonomi yang harus segera ditanggulangi. Hal ini terbukti dengan tingkat kepadatan penduduk yang tidak merata di seluruh kecamatan imbas dari faktor sosial dan ekonomi

seperti pembangunan industri yang terfokus di beberapa wilayah saja. Oleh karena itu diperlukan pembangunan di setiap kecamatan yang dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat.

4. Belum Optimalnya Pemanfaatan Potensi Sektor Pertanian, khususnya Perikanan.

Meskipun kontribusi sektor pertanian di Kabupaten Sidoarjo relatif kecil jika dibandingkan dengan sektor lain, namun terdapat sub sektor perikanan yang memiliki potensi memadai dan sekaligus merupakan ikon keunggulan yaitu bandeng dan udang. Mengacu pada karakteristik Kabupaten Sidoarjo, maka perlu dikembangkan potensi pertanian berbasis teknologi yang sesuai dengan keterampilan masyarakat (*Smart farming*). Melalui integrasi dengan sektor potensial lainnya, diharapkan sektor pertanian khususnya perikanan dapat tumbuh bersama.

5. Belum Optimalnya Hasil Pemanfaatan Ipteks, Inovasi untuk Mengembangkan Kebijakan Ekonomi Hijau (*Green Economy*) dan Rintisan EBT.

Mengacu pada isu strategis global dan nasional, maka *Green Economy* yang di dalamnya mencakup Energi Baru Terbarukan (EBT) menjadi hal yang strategis untuk dikembangkan pada masa yang akan datang. Melalui upaya yang terencana, diharapkan selama lima tahun ke depan telah diperoleh berbagai aktivitas yang mendukung tercapainya ekonomi hijau serta rintisan Energi Baru Terbarukan (EBT) sesuai dengan kapasitas dan kewenangan daerah. Menimbang daerah harus berkontribusi pada pemenuhan EBT, pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat mulai untuk mempersiapkan segala komponen yang dibutuhkan dalam menciptakan Kabupaten Sidoarjo yang ramah energi baru dan terbarukan. Aspek ini akan mendukung Indeks Ekonomi Hijau yang menjadi indikator baru penilaian sekaligus sudah masuk dalam target RPJPN 2025-2045.

6. Belum Optimalnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan yang Bersih dan Pelayanan Publik yang Berkualitas serta Merata.

Perkembangan masyarakat yang semakin kompleks membutuhkan peran



kebijakan, tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berkualitas yang dikembangkan secara inovatif melalui pemanfaatan *information and communication Technology* (ICT) dalam kerangka transformasi digital dan elektronifikasi layanan. Oleh karenanya Kabupaten Sidoarjo harus terus berupaya mengoptimalkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien dalam mewujudkan pelayanan publik berkualitas dan merata. Selain teknologi, aspek SDM perlu diperhatikan karena dari Indeks Integritas Nasional, tata Kelola Kabupaten Sidoarjo masih rawan kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme.

7. Titik Pertumbuhan Ekonomi (*Growth Pole*) yang Masih Terkonsentrasi di Pusat Perkotaan dan Tuntutan Pemenuhan Infrastruktur Dasar Secara Merata, Pendorong Stabilitas Ekonomi Makro.

Titik pertumbuhan yang belum merata berdampak pada kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat baik berdasarkan kewilayahan (*Spatial*) maupun berdasarkan kelas pendapatan. Dalam jangka panjang, permasalahan ini berpotensi untuk penurunan daya beli agregate dan yang secara kumulatif akan menimbulkan dampak beruntun (Efek domino) pada kondisi perekonomian. Pusat pertumbuhan masih terkonsentrasi di pusat pemerintahan daerah dan perlu perluasan ke arah Barat dan Selatan.

8. Kualitas Lingkungan Hidup Perlu Ditingkatkan dan Perlu Mendapatkan Perhatian Khusus.

Kualitas lingkungan hidup yang diukur dengan indikator IKLH, dimana selama 5 tahun terakhir IKLH Kabupaten Sidoarjo menunjukkan kecenderungan penurunan terutama terkait dengan kualitas udara dan lahan. Capaian IKLH Sidoarjo masih di bawah Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Kabupaten Sidoarjo sebagai daerah industri memiliki resiko tinggi terhadap pencemaran lingkungan. Oleh karenanya kualitas lingkungan hidup menjadi permasalahan yang harus diangkat pada jangka waktu lima tahun ke depan.



9. Adanya Ancaman Bencana dan Rendahnya Tingkat Resiliensi Masyarakat Terhadap Berbagai Berbagai Jenis Bencana yang Relatif Rendah.

Berdasarkan karakteristik daerah, maka eskalasi bencana yang paling tinggi di Kabupaten Sidoarjo adalah bencana kebakaran. Dampak luapan Lumpur Lapindo Sidoarjo juga berdampak pada perluasan area terdampak yang dapat mengancam keselamatan warga. Selain terkait dengan bencana geologi Lumpur Sidoarjo, juga terdapat potensi bencana hidrometeorologi yang perlu diwaspadai. Kabupaten Sidoarjo masuk dalam salah satu Sesar dari 31 Sesar Aktif di Jawa Timur. Berdasarkan data BMKG Karangploso menyatakan bahwa Jawa Timur merupakan kawasan yang dikelilingi sejumlah potensi penyebab gempa bumi.

10. Adanya Berbagai Permasalahan Mengenai Kesenjangan Gender, Ancaman Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak serta Ancaman Narkoba Pada Pemuda.

Kabupaten Sidoarjo masih dihadapkan dengan berbagai permasalahan mengenai kesenjangan antara lain gender, ancaman kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta ancaman narkoba pada pemuda. Hal tersebut perlu mendapatkan perhatian yang besar berupa kebijakan antisipatif yang tepat. Apabila dikaitkan dengan perkembangan teknologi dan informasi yang cepat, maka potensi permasalahan sebagaimana disajikan di atas, cenderung semakin besar di kemudian hari. Sehingga perlu dikembangkan kebijakan yang tepat dan terintegrasi lintas perangkat daerah.

11. Ancaman Terhadap Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Degradasi Moral.

Posisi geografis Kabupaten Sidoarjo yang berada dalam kawasan Gerbangkertosusila, tentu memiliki dampak sosial berupa derasnya arus urbanisasi dari desa ke kota Sidoarjo dalam rangka untuk mencari mata pencaharian. Adanya arus pendatang yang semakin deras ini tentu menimbulkan potensi gangguan terhadap ketenteraman dan ketertiban



umum. Pada sisi lain, akulturasi budaya yang terjadi akibat urbanisasi tersebut berdampak pada degradasi moral dan nilai-nilai luhur budaya daerah.

2.3.2 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil analisis pada Bab II, langkah selanjutnya dilakukan identifikasi permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan urusan penyelenggaraan pemerintahan. Identifikasi permasalahan per urusan diperlukan untuk perumusan kebijakan yang tepat dan efektif. Dimana daerah berkewajiban untuk meningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakat. Berdasarkan identifikasi data-data pada gambaran umum daerah serta gambaran keuangan daerah, maka pemetaan permasalahan per urusan di Kabupaten Sidoarjo dijelaskan sebagai berikut:

a) Urusan Pendidikan

Aspek pembangunan pendidikan menjadi penting untuk memastikan bahwa upaya investasi dalam sektor pendidikan mampu memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kualitas SDM dan perkembangan masyarakat di Kabupaten Sidoarjo. Adapun permasalahan urusan pendidikan mengarah pada kualitas pembelajaran. Pada sisi lain perlu dilakukan penerapan manajemen *reward* dan *punishment* yang terkait ASN atau masyarakat yang memiliki prestasi tingkat provinsi maupun tingkat nasional yang berhasil membawa nama baik daerah.

Beberapa hal yang masih menjadi permasalahan antara lain: a) capaian indeks SPM pada rapor pendidikan tahun 2024 pada peringkat tuntas madya dengan nilai skor 84,98 perlu di tingkatkan kembali menjadi tuntas utama (nilai skor 90 - 99); b) capaian kemampuan literasi dan numerasi perlu untuk ditingkatkan; c) skor pada rapor pendidikan tahun 2024 masih kurang untuk proporsi guru penggerak yang diangkat menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah; d) masih adanya sekolah dalam kondisi rusak berat, sedang dan ringan.



b) Urusan Kesehatan

Permasalahan pertama bidang kesehatan adalah Angka Kematian Ibu (AKI). Tingkat nasional telah menjadikan Angka Kematian Ibu (AKI) sebagai prioritas pembangunan bidang kesehatan. AKI di Kabupaten Sidoarjo masih kecenderungan naik. Tahun 2020 hingga 2021 AKI terus naik dari 53,10 menjadi 59,69. Di Tahun 2022 AKI sempat menurun hingga 37,30. Namun di tahun 2024 AKI kembali naik menjadi 88,50. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan eksisnya AKI. Beberapa di antaranya komplikasi kehamilan, komplikasi persalinan dan pasca persalinan, pencegahan dengan upaya skrining terhadap penyakit menular utamanya HIV AIDS yang belum tercapai secara maksimal, serta pencegahan dengan upaya skrining terhadap penyakit tidak menular seperti diabetes melitus dan hipertensi yang belum tercapai secara maksimal. Peningkatan HIV AIDS di Kabupaten Sidoarjo sebagian besar disebabkan karena seks antar laki-laki yang juga merupakan dampak dari kenakalan remaja/generasi muda.

Permasalahan kedua yaitu Angka Kematian Bayi (AKB). AKB di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2020 hingga 2023 terus menurun dari 3,80 menjadi 2,82 kematian per 1000 kelahiran, namun pada tahun 2024 terjadi peningkatan kembali menjadi 4,90 per 1000 kelahiran. Hal tersebut menandai perlunya evaluasi untuk meminimalisir kematian bayi. Kabupaten Sidoarjo terus berupaya untuk menekan AKB agar tidak meningkat. Oleh karenanya beberapa hal yang harus ditangani untuk menekan AKB, antara lain: terkait kesehatan ibu (seperti komplikasi saat persalinan seperti perdarahan dan infeksi), masalah bayi baru lahir (seperti kelahiran prematur dan berat badan lahir rendah), serta masalah gizi dan pengasuhan (seperti kesadaran untuk melakukan IMD dan memberikan ASI eksklusif).

Permasalahan selanjutnya terkait dengan stunting, prevalensi stunting menjadi salah satu permasalahan yang diangkat pada level nasional dan ditargetkan untuk diturunkan menjadi 2,92% pada Tahun 2045. Meskipun prevalensi stunting di Kabupaten Sidoarjo terus menurun dari tahun ke tahun, namun masih perlu penanganan lebih lanjut agar dapat berperan aktif dalam



menurunkan stunting dan berperan dalam menyumbang penurunan stunting di tingkat nasional. Diketahui bahwa balita stunting di tahun 2021 sebanyak 14,6% berhasil diturunkan menjadi 8,4% di tahun 2023. Beberapa hal yang menjadi penyebab masih eksisnya kasus stunting antara lain: a) gizi buruk, seperti kurangnya asupan gizi disebabkan oleh kemiskinan, ketahanan pangan rendah, pola makan yang buruk; b) infeksi berulang, seperti infeksi saluran pernapasan juga dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan; c) pola asuh dan praktik pemberian makan, seperti tidak memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama; d) sanitasi dan lingkungan buruk, seperti sumber air minum yang tidak bersih dan sanitasi lingkungan yang buruk. Meskipun dari data 5 tahun terakhir, capaian stunting terhadap target stunting mengalami kemajuan, namun masih menjadi tantangan yang perlu diatasi secara berkelanjutan dengan upaya yang komprehensif dan lintas sektor.

Permasalahan keempat terkait dengan ODF. ODF atau *Open Defecation Free* adalah kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan. Pembuangan tinja yang tidak memenuhi syarat sangat berpengaruh pada penyebaran penyakit berbasis lingkungan, sehingga untuk memutuskan rantai penularan tersebut harus dilakukan rekayasa pada akses ini. Permasalahan terkait ODF, diantaranya disebabkan oleh : rendahnya capaian KK dengan akses sanitasi yang aman (jamban sehat), kurangnya pengetahuan tentang pentingnya sanitasi, permasalahan kebiasaan pada masyarakat, serta kemiskinan.

Permasalahan kelima yaitu presentase keluarga dengan survei KS yang belum optimal. Adapun beberapa hal yang menyebabkan belum optimalnya survei KS adalah: a) keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran untuk melaksanakan survei KS secara rutin dan mencakup wilayah yang luas; b) adanya resistensi atau keengganan sebagian keluarga untuk berbagi informasi yang dianggap pribadi atau sensitif; serta c) aplikasi KS yang sulit untuk diakses.

Permasalahan keenam yaitu akreditasi terhadap FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) belum maksimal. Kendala dalam akreditasi



secara menyeluruh terhadap FKTP salah satunya adalah jumlah FKTP yang besar (219 fasilitas) menjadi tantangan tersendiri dalam upaya mengakreditasi seluruh fasilitas kesehatan tersebut. Disamping itu keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia, dana, maupun fasilitas pendukung, menyebabkan Dinas Kesehatan hanya dapat menargetkan akreditasi pada puskesmas saja, bukan seluruh FKTP. Kondisi tersebut mengakibatkan adanya potensi kurangnya pengawasan dan evaluasi terhadap mutu pelayanan kesehatan di klinik-klinik yang belum terakreditasi, sehingga sulit untuk memastikan standar minimal pelayanan. Sehingga ke depan perlu adanya peningkatan serta optimalisasi pengawasan dan evaluasi mutu pelayanan kesehatan di seluruh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), baik puskesmas maupun klinik.

Permasalahan ketujuh yaitu tidak semua penyehat tradisional yang memiliki STPT (Surat Terdaftar Penyehat Tradisional). Sehingga dampak atau konsekuensi dari masih adanya penyehat tradisional yang belum memiliki STPT belum bisa diawasi atau dievaluasi secara maksimal oleh pemerintah daerah.

Permasalahan kedelapan yaitu prevalensi hipertensi yang tinggi. Prevalensi hipertensi yang tinggi menjadi beban bagi sistem pelayanan kesehatan. Adanya risiko komplikasi serius dari hipertensi menyebabkan hipertensi yang tidak terkontrol dapat memicu komplikasi serius seperti stroke. Oleh karenanya hingga saat ini masih diperlukan peningkatan kualitas layanan dan kepatuhan pengobatan pasien hipertensi.

Permasalahan kesembilan terkait dengan Kejadian Luar Biasa (KLB), dimana informasi terkait efektivitas penanganan atau dampak KLB terhadap masyarakat belum optimal. Kesiapsiagaan dan koordinasi lintas sektor dalam penanganan KLB juga masih kurang. Disamping itu adanya keterbatasan sumber daya dan logistik juga berpengaruh terhadap penanganan KLB.

Permasalahan kesepuluh yaitu terkait pemenuhan kebutuhan sediaan kefarmasian serta sarana kefarmasian yang berijin. Perubahan tren penyakit atau lonjakan permintaan yang tidak terduga dapat menyebabkan



kekurangan sediaan kefarmasian tertentu. Di samping itu adanya kendala dalam proses pengadaan, distribusi, atau logistik dapat menghambat pemenuhan kebutuhan sediaan kefarmasian tepat waktu. Selanjutnya terkait sarana, adanya pertumbuhan jumlah sarana kefarmasian yang pesat, menyebabkan tingkat pengawasan melemah karena terbatasnya sumber daya manusia (SDM) dan anggaran untuk melakukan pengawasan dan pembinaan sarana kefarmasian secara rutin

Permasalahan kesebelas yaitu terkait dengan kecukupan Puskesmas. Kendala dalam proses pengadaan, distribusi, atau logistik dapat menghambat pemenuhan kebutuhan sediaan kefarmasian tepat waktu. Menurut WHO, perbandingan ideal Puskesmas terhadap Jumlah Penduduk adalah 1:30.000. Namun pada kenyataannya, jumlah Puskesmas di Kabupaten Sidoarjo sampai dengan saat ini hanya terdapat 31 unit Puskesmas yang tersebar di 18 kecamatan. 1 unit Puskesmas harus melayani 96.450 penduduk. Kondisi yang demikian merupakan kondisi yang jauh dari jumlah ideal rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk. Kondisi keterbatasan jumlah Puskesmas ini secara tidak langsung berpengaruh terhadap aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Kabupaten Sidoarjo. Di samping itu juga terdapat kendala lahan atau lokasi untuk pembangunan puskesmas baru.

Permasalahan keduabelas yakni masih tingginya angka GDR dan NDR. Penyebab tingginya angka GDR dan NDR adalah kondisi dimana RSUD sebagai RS kelas A sekaligus RS rujukan regional sehingga sebagian besar pasien yang datang ke RSUD dalam keadaan kritis. Peningkatan jumlah kunjungan pasien yang ada di RSUD Sidoarjo Barat tidak diimbangi dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia mengakibatkan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien kurang maksimal.

Terakhir, yaitu terkait dengan TB dan malaria. Dimana tahun 2030 diwajibkan eliminasi terhadap TB dan Malaria. Amanat tersebut mengharuskan Kabupaten Sidoarjo semakin giat untuk mencegah serta deteksi dini terhadap TB dan malaria.



c) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang antara lain:

1. Adanya perbedaan kewenangan yang saling beririsan antara pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan BBWS wilayah Sungai Brantas terkait infrastruktur pekerjaan umum yang membangun saluran-saluran. Akibatnya, ada beberapa proyek infrastruktur yang berpotensi diampu oleh pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo, namun belum bisa dilaksanakan sehingga saat ini masih menggunakan cara berkoordinasi dengan BBWS wilayah Sungai Brantas agar pembangunan infrastruktur saluran dapat didukung oleh dua instansi
2. Kerusakan jalan yang membutuhkan pemeliharaan atau penanganan segera agar tidak terjadi kecelakaan. Hal tersebut juga didasarkan pada banyaknya aduan masyarakat terkait dengan kerusakan jalan. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tentu selalu sigap dalam menerima aduan dan segera menangani masalah jalan yang rusak. Terkadang proses perbaikan memerlukan manajemen risiko yang cepat dan tepat agar tidak menimbulkan risiko jalan malah lebih rusak, dan secara administrasi keuangan bermasalah. Oleh karena itu, sistem aduan dan penanganan berusaha terus diperbaiki
3. Adanya bangunan warga yang masuk (rumija) ruang milik jalan sehingga melebihi batas tanah kepemilikan. Fenomena tersebut perlu ditertibkan dan masih menjadi pekerjaan rumah rutin bagi pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan terus berusaha ditertibkan sesuai aturan dan prosedur yang berlaku
4. Banyaknya utilitas yang tidak memenuhi rekomendasi teknis, sehingga berdampak terhadap proses pembangunan/ pemeliharaan jalan. Sebagai contoh: jaringan di bawah tanah yg ditanam minimal 150 cm, kondisi di lapangan masih banyak yang kurang dari 150 cm. Untuk pemasangan tiang yang seharusnya dipasang di lahan paling luar, namun masih banyak yang dipasang dekat jalan. Selepas penemuan fenomena tersebut, pemerintah Kabupaten Sidoarjo harus melakukan cek kondisi berkali-kali



dan memakan banyak waktu, tenaga, dan biaya. Untuk itu, sebelum pemasangan atau pemakaian utilitas apapun, menjadi mandatori merupakan hal penting bagi setiap PNS di lingkungan Kabupaten Sidoarjo untuk memastikan segala utilitas dipasang sesuai dengan SOP yang berlaku

5. Belum optimalnya pengurangan genangan banjir di kawasan perkotaan dan genangan yang terjadi di wilayah perumahan permukiman pada beberapa wilayah Sidoarjo dengan tinggi genangan sekitar $\pm$ 10 cm s/d 30 cm dengan lama genangan 1 hari (lebih dari 6 jam s/d 24 jam). Alasan karena alam yang bercurah hujan tinggi tidak bisa dijadikan alasan pembenaran atas terjadinya banjir. Sesuai dengan permasalahan yang sering terjadi akibat saluran air yang mampet, timbunan sampah, dan kesadaran warga yang masih rendah, masalah ini perlu menjadi aspek kerja sama antar banyak pihak
6. Munculnya sampah di saluran hilir. Permasalahan ini sering menjadi aduan masyarakat dan seharusnya ada peraturan tegas terkait pembuangan sampah yang sembarangan dengan membentuk aturan dan pengawasan ketat, serta perbaikan tempat pembuangan sampah agar sampah bisa dikelola dengan baik karena selama ini volume sampah lebih banyak daripada kemampuan TPA pengolahnya
7. Banyak bangunan di sempadan sungai, sehingga mengganggu pemeliharaan sungai yang dapat berdampak pada terjadinya banjir. Bangunan tersebut terindikasi bangunan liar dan ada yang menggunakan ijin resmi namun salah pada penempatan pembangunan yang tidak sesuai RTRW
8. Pintu Air atau DAM yang ada di kabupaten Sidoarjo memerlukan perbaikan dan pemeliharaan agar dapat berfungsi secara optimal sehingga dapat membantu mengendalikan banjir dikala curah hujan yang tinggi
9. Masih ditemukannya beberapa sawah yang mengalami kekurangan air, dan beberapa permasalahan saluran pengairan (mampet). Pengairan tersebut dapat dilakukan dengan pembangunan irigasi buatan maupun



alami. Untuk irigasi buatan yang dibantu pompa air tengah menjadi agenda khusus untuk diterapkan lebih masif di beberapa sawah yang kekeringan tanpa mengganggu kualitas tanaman

10. Lemahnya kapasitas dan peran GHIPPA dalam menyelesaikan masalah pembagian air
11. Capaian air minum aman dan sanitasi aman yang juga menjadi target SDG's belum terlaksana secara optimal berdasarkan capaian indikator yang telah dipaparkan
12. Kapasitas IPLT yang perlu ditingkatkan sesuai kebutuhan permasalahan limbah yang ditangani
13. Implementasi pengendalian dan pemanfaatan ruang di Kabupaten Sidoarjo masih perlu di perkuat. Sebagai daerah di area pusat pertumbuhan (growth pole) Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo memiliki tantangan yang besar dalam penegakkan tata ruang.

d) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan pada urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman antara lain:

- a. Masih adanya kawasan kumuh yang belum mendapatkan prioritas penanganan sehingga cenderung menambah luasan kawasan kumuh baru. Akibatnya, pemda memerlukan infrastuktur rusun yang harus dibangun sebagai bentuk pertanggungjawaban
- b. Rendahnya kualitas Rusunawa yang terjangkau untuk masyarakat terutama MBR sebagai upaya mengurangi adanya kawasan kumuh dan rumah yang tidak sehat. Regulasi tata ruang dan SOP minimal perlu dibentuk agar permasalahan tersebut tidak terjadi kembali
- c. Kualitas sarana dan prasarana perumahan (jalan lingkungan/jalan perumahan, drainage dan sarana prasarana perumahan/permukiman lainnya) masih perlu ditingkatkan
- d. Masih terbatasnya data mengenai jaringan sarpras permukiman akibat belum menyeluruhnya pendataan yang dilakukan oleh pemda Kabupaten Sidoarjo sehingga perlu dilaksanakan dengan segera

e) Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Angka kejahatan di Kabupaten Sidoarjo dalam 5 tahun terakhir dilaporkan terbilang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2021 jumlah kejahatan meningkat cukup drastis dari 735 kasus menjadi 1.222 kasus. Pada tahun 2022 menurun sedikit (29 kasus) menjadi 1.193 kasus. Sementara pada tahun 2023 terjadi lonjakan kasus yang dilaporkan di Kabupaten Sidoarjo menjadi 1.867 kasus kejahatan yang teraporkan. Permasalahan lainnya terkait dengan ketenteraman dan ketertiban umum adalah:

- a. ancaman dan dampak bahaya *Land Subsidence* dan banjir lumpur Sidoarjo
- b. belum adanya Sistem Peringatan Dini/*Early Warning System* (EWS) Kabupaten Sidoarjo
- c. sarana prasarana mitigasi maupun penanganan bencana di wilayah desa atau kecamatan masing sangat minim
- d. belum terpenuhinya jumlah pos dan mobil damkar sesuai kebutuhan ideal
- e. adanya potensi konflik sosial dan kriminalitas

f) Urusan Sosial

Permasalahan pada urusan sosial yang menjadi masalah pokok antara lain:

1. Jumlah PPKS yang terus mengalami peningkatan (karena adanya perubahan konsep PPKS di tahun 2022, dimana definisi konsepnya PPKS adalah keseluruhan penduduk miskin yang tercatat dalam DTKS ditambah penduduk miskin yang belum terdaftar dalam DTKS sehingga terjadi pelonjakan data PPKS yang mendapatkan pelayanan di tahun 2022). Peningkatan PPKS disebabkan oleh beberapa permasalahan yaitu: a) Kurang optimalnya pelayanan sosial yang diberikan kepada PPKS karena kurangnya tenaga SDM dalam pelayanan PPKS; b) Belum ada program terpadu antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat terkait penanganan PPKS karena belum ada sinergitas yang baik antara pemerintah dengan



- stakeholder sebagai Sumber Potensi Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam hal penanganan PPKS
2. Masih banyaknya fakir miskin yang belum mendapatkan program perlindungan dan jaminan sosial. Hal tersebut terjadi karena distribusi kemiskinan tersebar baik di pelosok desa maupun di wilayah perkotaan, ditambah lagi dengan kondisi tata kelola program perlindungan dan jaminan sosial yang masih lemah akibat pendataan belum dilakukan secara menyeluruh dan distribusi bantuan yang masih terkendala akses. Oleh karena itu, masalah ini berkesinambungan dengan masalah pembangunan infrastruktur agar lebih peduli terhadap wilayah 3T.
 3. Masih terdapat kesalahan data pada DTKS Kabupaten Sidoarjo. Hal tersebut dikarenakan lemahnya validitas dan keterpaduan data kemiskinan secara dinamis *by name by address* lintas Perangkat Daerah (PD). Kasus ini menjadi titik mula para instansi di Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo harus saling berkoordinasi dan satu pintu pendataan yang lebih diperluas dalam banyak jenis pelayanan
 4. Program penanganan kemiskinan (PPKS) masih berjalan parsial. Sinergi antar perangkat daerah dalam hal penanganan kemiskinan (PPKS) masih lemah membuat kegiatan bantuan dan jaminan sosial bagi PPKS masih tumpang tindih satu sama lain.
 5. Belum optimalnya penanganan dampak sosial bencana. Permasalahan ini disebabkan oleh keterbatasan kegiatan peningkatan kapasitas SDM sehingga kapasitas SDM penanganan dampak sosial bencana masih lemah. Ketika terjadi bencana dalam skala yang serius, Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo akan memerlukan bantuan penanganan dari dinas terkait, dinas level provinsi, dan/atau instansi level nasional dalam perkembangannya.

g) Urusan Tenaga Kerja

Jumlah penduduk usia kerja semakin menurun, dimana hal tersebut seiring dengan penurunan jumlah Angkatan kerja di Kabupaten Sidoarjo. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga cenderung menurun pada lima

tahun terakhir. Kenaikan TPT hanya terjadi pada tahun 2020. Adanya guncangan yang terjadi di awal tahun 2020 telah menyebabkan TPT meningkat. Pada tahun 2021-2023 TPT kembali menurun. Namun hingga wabah Covid-19 telah mereda, TPT masih belum bisa kembali seperti kondisi tahun 2019. Kondisi TPT pada tahun 2019 adalah 4,72 sedangkan pada tahun 2023 adalah 8,05. Artinya Kabupaten Sidoarjo masih pada masa pemulihan dan membutuhkan waktu lama untuk menangani permasalahan tersebut, dimana efektivitas dan efisiensi penanganan khususnya berkaitan dengan ketenagakerjaan perlu untuk dievaluasi.

h) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berdasarkan data kinerja urusan pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Sidoarjo, masih terdapat permasalahan antara lain:

1. Belum optimalnya pertumbuhan IPG dan IDG yang mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan IPM. Dimana IDG Kabupaten Sidoarjo masih tergolong rendah. Permasalahan ini juga dipengaruhi oleh kegiatan fasilitasi/pemberdayaan terhadap lembaga yang peduli terhadap perkembangan gender yang belum optimal
2. Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) masih terus terjadi walau bersifat fluktuatif. Dalam beberapa kasus, pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga. Isu ini menjadi fokus Pemda Kabupaten Sidoarjo agar melalui KUA dapat lebih serius untuk mengadakan tes psikologi atau pendidikan pra-nikah agar kasus-kasus yang merugikan dan membahayakan nyawa di pernikahan dapat diminimalisir. Meskipun terjadi kasus, Pemda Kabupaten Sidoarjo seharusnya bisa lebih berpihak kepada korban terlebih dahulu dan mendampingi serta melindungi sampai kondisi benar-benar aman dan kondusif bagi korban
3. Kesetaraan gender belum sepenuhnya menjadi prioritas pembangunan pada semua tingkatan pemerintahan. Keterlibatan perempuan memang



tidak lagi dibatasi di dalam lingkup pengambilan keputusan di Kabupaten Sidoarjo, namun ketimpangan gender masih terjadi sehingga perlu ada tindakan lanjut dalam menunjang kesetaraan gender dalam tiap level pemerintahan

4. Tidak dijumpai pendidikan khusus formal maupun tidak formal tentang kesetaraan gender. Hal ini disebabkan oleh belum adanya kurikulum tentang gender pada lembaga pendidikan formal maupun tidak formal
5. Definisi dan kondisi riil wilayah layak anak belum dipahami oleh masyarakat maupun pihak lain terkait. Menjadi pekerjaan penting untuk bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam mensosialisasikan agar pemenuhan hak anak terpenuhi dengan baik

i) Urusan Pangan

Permasalahan pada urusan pangan, antara lain:

1. Masih terdapat makanan yang terindikasi residu berbahaya
2. Lemahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap penganekaragaman pangan dan keamanan pangan, sehingga masih jarang masyarakat yang menanam tanaman untuk konsumsi maupun melindungi wilayah sekitarnya yang menjadi sumber pangan mereka
3. Masih perlunya dukungan distribusi jenis kebutuhan pangan utama untuk mendukung ketahanan pangan di wilayah rentan

j) Urusan Pertanahan

Perangkat daerah yang mengampu urusan pertanahan di Kabupaten Sidoarjo adalah Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang. Kewenangan kabupaten pada urusan pertanahan tergolong sangat kecil, yaitu permasalahan sengketa tanah yang dalam proses penyelesaiannya juga harus melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

k) Urusan Lingkungan Hidup

Beberapa permasalahan terkait lingkungan hidup Kabupaten Sidoarjo antara lain:

1. Kurang optimalnya pengelolaan air limbah domestik



2. Kurang optimalnya pengawasan pengelolaan lingkungan bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan
3. Banyaknya pembuangan sampah di Air Badan Air (ABA)
4. Banyaknya aktivitas pembuangan sampah di Air Badan Air (ABA)
5. Banyaknya aktivitas pembakaran sampah di masyarakat
6. Pertumbuhan volume kendaraan bermotor pribadi dengan bahan bakar fosil yang beraktivitas di jalan raya
7. Terbatasnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Sidoarjo
8. Alih fungsi lahan yang tidak diimbangi dengan penyediaan Ruang Terbuka Hijau yang mencukupi
9. Banyaknya pembuangan sampah liar
10. Keterbatasan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur di wilayah terhadap regulasi pengelolaan persampahan
11. Kurangnya pemahaman SDM Aparatur di wilayah terhadap regulasi pengelolaan persampahan
12. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pengelolaan sampah dari sumber utama
13. Keterbatasan SDM dan Armada Layanan Pengangkutan Sampah
14. Kurang optimalnya pengelolaan sampah di TPS3R

I) Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan pada urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Sidoarjo antara lain:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memperbarui status dokumen kependudukan. Adanya opini masyarakat bahwa perubahan elemen data tidak terlalu penting, hanya melakukan perubahan elemen data ketika ada kepentingan.
2. Rendahnya keinginan untuk mengurus surat keterangan pindah
3. Tidak bisa memaksa hak masyarakat untuk memiliki surat keterangan pindah domisili (hanya melakukan pendataan penduduk non permanen) akibat tingginya arus urbanisasi di Kabupaten Sidoarjo



4. Masyarakat, RT/RW dan Desa/Kelurahan belum melaporkan kematian penduduk secara *real time* sehingga terkadang terjadi ketidakcocokan data yang ter-*update*

m) Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Beberapa permasalahan pada urusan pemberdayaan masyarakat desa adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya pemerataan kapasitas dan kapabilitas SDM perangkat desa
2. Masih terbatasnya akses terhadap teknologi dan informasi di desa
3. Kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan kelembagaan ekonomi masyarakat desa
4. Keterbatasan infrastruktur publik di desa yang belum dibangun dengan optimal
5. Penggunaan dana desa yang masih perlu dimanajemen dengan baik dalam mendukung kesejahteraan masyarakat desa

n) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, antara lain:

1. Sebagian masyarakat pada wilayah tertentu yang belum menganggap KB adalah sarana membentuk Keluarga Sejahtera. Jumlah penyuluh KB juga masih terbatas sehingga beberapa wilayah/masyarakat terbatas dalam mengakses pengetahuan terkait KB
2. Penduduk sebagai subyek maupun obyek tujuan pembangunan masih belum dilaksanakan secara optimal dalam pembangunan berwawasan kependudukan

o) Urusan Perhubungan

Beberapa permasalahan terkait dengan urusan perhubungan yaitu:

1. Banyaknya jumlah kendaraan yang tidak sebanding dengan kapasitas jalan menjadikan jalan tidak dapat menampung kendaraan yang melintas, sehingga menyebabkan kemacetan di banyak titik
2. Kondisi eksisting APILL di bawah kebutuhan dan kualitasnya perlu untuk ditingkatkan (digital)



3. Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan
4. Intensitas kejadian kecelakaan lalu lintas cukup sering
5. Minimnya daya dukung pelayanan transportasi masal antar lokasi strategis (darat dan air)
6. Permasalahan terkait Kereta Api, diantaranya: kurangnya sarana dan prasarana perlintasan sebidang Kereta Api, kurangnya SDM petugas perlintasan sebidang Kereta Api, belum tertibnya masyarakat saat melewati perlintasan sebidang Kereta Api

p) Urusan Komunikasi dan Informatika

Tuntutan masyarakat yang semakin tinggi di dalam informatika dan komunikasi sehingga menuntut pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan daerah terkait teknologi komunikasi dan informatika dan berupaya untuk menurunkan kesenjangan pemanfaatan TIK di masyarakat. Pemerintah daerah juga harus siap menghadapi ancaman yang ditimbulkan dari perkembangan teknologi komunikasi dan informatika. Permasalahan pada urusan komunikasi dan informatika antara lain:

1. Adanya tuntutan masyarakat akan kecepatan, transparansi dan keamanan informasi dalam pelayanan publik, namun belum optimalnya implementasi respon cepat dari pengaduan masyarakat
2. Relatif minimnya layanan digital di pedesaan
3. Kualitas sarana prasarana kominfo relatif rendah dibandingkan dengan tingkat layanan yang harus diberikan dan jangkauan yang masih terbatas
4. Masih terdapat PD yang membangun jaringan dan aplikasi sendiri sehingga menyebabkan polusi digital
5. Belum adanya beberapa dokumen rencana induk pendukung kominfo (*smart city*, SPBE)

q) Urusan Koperasi dan Usaha Mikro

Permasalahan urusan koperasi dan usaha mikro antara lain:

1. Masih lemahnya kompetensi SDM pengelola koperasi dan tingkat kepatuhan koperasi terhadap regulasi



2. Relatif lemahnya peran dan daya tarik koperasi bagi masyarakat
3. Belum optimalnya kerjasama antar koperasi dan/atau dengan lembaga lainnya
4. Belum adanya apresiasi untuk koperasi
5. Rendahnya cakupan koperasi yang telah difasilitasi untuk mendapatkan izin usaha
6. Rendahnya fasilitas pembiayaan koperasi
7. Sebagian besar koperasi menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam yang memiliki risiko kemacetan cukup tinggi
8. Koperasi belum menjadi daya tarik yang kuat bagi masyarakat dalam mengatasi persoalan ekonomi dan memenuhi kebutuhan sehari-hari
9. Masih rentannya kelangsungan bisnis Usaha Mikro disebabkan karena lemahnya kompetensi pelaku Usaha Mikro
10. Minimnya dukungan permodalan Usaha Mikro dari pemerintah maupun swasta dengan prosedur yang sederhana
11. Masih lemahnya aspek produksi dan pemasaran pelaku Usaha Mikro
12. Terbatasnya daya dukung monitoring dan evaluasi koperasi dan Usaha Mikro
13. Lambatnya perkembangan pelaku usaha mikro untuk maju dan berkembang
14. Belum tersedia infrastruktur pendukung pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro
15. Belum ada apresiasi atau bantuan suntikan dana terhadap pelaku usaha mikro
16. Belum terkelolanya penataan kawasan usaha pelaku Usaha mikro
17. Masih diperlukan perluasan fasilitasi perizinan untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro

r) Urusan Penanaman Modal

Permasalahan urusan penanaman modal antara lain:

1. Pelaku usaha UMK masih banyak yang belum tahu tata cara pelaporan LKPM online (s.d. 5 Milyar)

2. Periode pelaporan yang dibatasi dari tanggal 1-10 oleh Kementerian Investasi BKPM melalui sistem OSS RBA yang dirasa masih kurang karena banyak dari pelaku usaha terutama perusahaan besar pelaporannya menunggu laporan keuangan perusahaan sehingga jangka waktu tanggal yang telah ditetapkan kurang
3. LKPM yang telah dilaporkan oleh Perusahaan/Pelaku Usaha yang sudah diverval oleh Kabupaten/Kota, masih banyak yang dikembalikan oleh Kementerian Investasi/BKPM karena butuh perbaikan/revisi. Sedangkan waktu pengembaliannya mepet dengan batas waktu pelaporan, sehingga perusahaan tidak dapat melakukan perbaikan
4. Perbaikan yang telah dilakukan oleh perusahaan sebetulnya dapat dilakukan di periode pelaporan berikutnya, namun untuk periode pelaporan yang telah lewat berisiko tidak tercapai targetnya di periode tersebut
5. Kebijakan RTRW dan LSD yang belum sinkron berpengaruh terhadap investasi baru semakin menurun
6. Perusahaan yang sudah eksis/eksisting tidak melakukan pengembangan investasi sehingga pelaporan rutinnya 0 (nol)
7. Perubahan regulasi yang belum disertai NSPK menghambat layanan perizinan di daerah

s) Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Pada urusan kepemudaan dan olahraga Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga harus mendorong prestasi para atlet untuk terus meningkatkan bakat dalam bidang olahraga. Permasalahan yang terjadi adalah masih terbatasnya sumberdaya atau daya dukung dalam mengintervensi kegiatan kepemudaan dan olahraga guna peningkatan prestasi olahraga.

t) Urusan Statistik

Pada urusan statistik terdapat permasalahan terkait dengan sumber daya manusia, dimana kompetensi SDM pendukung pelaksanaan tata kelola informatika dan statistik masih sangat kurang.



u) Urusan Persandian

Pada urusan persandian, permasalahan yang dihadapi adalah *security system* yang belum memadai dalam mendukung keamanan data dan informasi daerah.

v) Urusan Kebudayaan

Permasalahan urusan kebudayaan yang terkait dengan Kabupaten Sidoarjo adalah rendahnya minat pemuda dalam pengembangan kebudayaan dan tradisi daerah, adanya pergeseran budaya, kurangnya perhatian dan motivasi terhadap fasilitas sarana dan prasarana serta pemberian penghargaan terhadap pelaku seni.

w) Urusan Perpustakaan

Permasalahan yang sering dihadapi urusan perpustakaan diberbagai daerah termasuk Sidoarjo adalah terkait dengan kegemaran membaca. Kegemaran membaca masyarakat yang rendah dan cenderung pada membaca singkat menyebabkan disinformasi. Meningkatnya perkembangan teknologi mengakibatkan masyarakat terlebih dahulu mendapatkan informasi melalui sumber lainnya, melalui website-website internet atau secara online yang belum tentu benar tentang keakuratannya. Sedangkan di wilayah desa, adanya pola pikir masyarakat maupun pemerintah desa yang tidak berminat pada pengembangan perpustakaan desa karena berorientasi pada keuntungan materiil dan belum memahami manfaat perpustakaan desa.

x) Urusan Kearsipan

Kabupaten Sidoarjo masih memiliki permasalahan pada urusan kearsipan yaitu belum maksimalnya penyediaan informasi kearsipan serta belum adanya penyimpanan khusus arsip dengan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai mengakibatkan kurang percayanya instansi pemerintahan, swasta maupun masyarakat Kabupaten Sidoarjo dalam menyimpan kearsipan.

y) Urusan Kelautan dan Perikanan

Permasalahan urusan kelautan dan perikanan antara lain:

1. Banyak nelayan yang sudah menerapkan hasil dari pelatihan/pembinaan yang telah diikuti, namun penerapan pelatihan tidak secara langsung bisa



- meningkatkan kesejahteraan nelayan. Pelatihan hanya merupakan salah satu faktor menuju peningkatan kesejahteraan nelayan. Dengan mengikuti pelatihan, nelayan bisa membuat dan memelihara jaring sendiri dan membutuhkan modal untuk membeli bahan jaring
2. Masih terdapat nelayan-nelayan dari kabupaten lain yang menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan sehingga menyebabkan kerusakan sumber daya ikan di perairan. Selain itu beberapa sarana dan prasarana penangkapan ikan yang rusak sehingga kurang maksimal dalam mendukung usaha penangkapan ikan
 3. Pendangkalan pada bantaran sungai Kepetingan, menurunnya kualitas air yang akan digunakan untuk kegiatan budidaya
 4. Harga pakan tinggi, kebutuhan sarana dan prasarana tambak yang meliputi jalan produksi, jembatan produksi dan tanggul (Bronjong) untuk mencegah abrasi semakin rusak dan banyak yang belum teratasi, lokasi pembenihan masih diluar kota
 5. Para pembudidaya masih menggunakan sistem budidaya konvensional seperti sistem budidaya tradisional. Pada budidaya air payau dan pada budidaya air tawar masih menggunakan teknologi sederhana dan belum mengembangkan teknologi pada saat ini
 6. Belum adanya Balai Benih Ikan yang memenuhi standart CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik)
 7. Fasilitas sistem logistik dan distribusi hasil perikanan masih cenderung mahal karena transportasi sistem logistik belum banyak yang menggunakan alat pendingin untuk menjaga mutu produk hasil perikanan
 8. Masih terdapat pengolah yang belum memiliki sertifikat mutu seperti PIRT, Halal, SKP, BPOM/MD dan SNI. Yang mengakibatkan hasil olahan masih kalah saing dengan produk yang telah memiliki sertifikat mutu
 9. Kurangnya pemenuhan gizi penduduk dari produk perikanan, padahal Kabupaten Sidoarjo memiliki potensi SDA dari sektor perikanan yang cukup tinggi, sehingga perlunya edukasi gemar makan ikan kepada masyarakat.



z) Urusan Pariwisata

Permasalahan pada urusan pariwisata antara lain: a) belum adanya destinasi yang memiliki daya tarik level regional, nasional dan internasional; b) lemahnya promosi pariwisata; c) lemahnya integrasi pengembangan pariwisata dengan sektor lainnya; d) minimnya dukungan pengembangan pada Pelaku Ekonomi Kreatif.

aa) Urusan Pertanian

Kontribusi paling besar di Kabupaten Sidoarjo adalah sektor pertanian, tetapi mengalami penurunan pada lima tahun terakhir. Oleh karenanya Sidoarjo menghadapi tuntutan perkembangan produktivitas yang menurun ini disebabkan oleh rendahnya penerapan teknologi budidaya, masih diterapkannya budidaya konvensional dan kurangnya inovasi. Rata-rata pertumbuhan sektor pertanian secara umum belum optimal dan masih belum stabil, hal ini disebabkan belum optimalnya pengembangan potensi pertanian di semua sub sektor tingkat nasional maupun dunia, maka harus ada perubahan yang inovatif terhadap sektor pertanian dengan meningkatkan nilai tambah sektor pertanian melalui hilirisasi pertanian. Di samping itu nilai NTP yang naik sangat lambat mengindikasikan tingkat peningkatan kesejahteraan petani juga sangat lambat. Secara detail, berikut rincian permasalahan yang masih dihadapi urusan pertanian:

1. Adanya ancaman penyakit terhadap populasi ternak
2. Belum optimalnya dukungan budidaya peternakan
3. Limbah budidaya peternakan yang belum terkelola sesuai standar mengganggu masyarakat sekitarnya
4. Minimnya daya dukung untuk membantu sertifikat halal, penandaan ternak, dan jaminan ASUH
5. Lemahnya daya dukung pengawasan dan belum adanya regulasi yang mengatur tentang penertiban Tempat Pemotongan Hewan Liar
6. Lemahnya pengendalian KP2B
7. Permasalahan produktivitas pertanian, dimana terdapat ketidaksesuaian antara biaya produksi dengan harga penjualan



8. Semakin sedikitnya tenaga kerja di bidang pertanian

bb) Urusan Perdagangan

Beberapa permasalahan terkait dengan urusan perdagangan antara lain:

1. Jumlah UKM yang melakukan ekspor masih rendah
2. Tidak semua pelaku usaha/perusahaan yang sudah ekspor secara mandiri melaporkan kegiatannya kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo
3. Keterbatasan pengetahuan dan pengalaman pelaku usaha dalam melaksanakan ekspor
4. Keterbatasan pelaku usaha untuk menemukan buyer di luar negeri
5. Tanpa pendampingan pemerintah daerah, pelaku usaha belum dapat melakukan proses Kontrak Ekspor
6. Pelaku usaha yang mengalami kesulitan tidak melaporkan hasil proses ekspornya kepada pemerintah daerah
7. Harga komoditas bahan pokok yang cenderung naik
8. Perluasan pangsa pasar produk unggulan Sidoarjo masih diperlukan
9. Kapasitas pelaku usaha dalam meningkatkan penjualan melalui *e-commerce* masih perlu ditingkatkan
10. Berkurangnya kesadaran masyarakat untuk kegiatan tera/tera ulang khususnya di pasar tradisional
11. Tidak adanya SDM pengawas metrologi yang mempunyai kewenangan (PPNS)

cc) Urusan Perindustrian

Permasalahan pada urusan perindustrian antara lain:

1. Tidak ada SDM pendataan ke lapangan dan tidak adanya sistem pendataan industri dari desa ke kecamatan ke dinas
2. Kesulitan mengetahui jumlah IKM sudah dan yang membutuhkan pembinaan terkait pengembangan usaha termasuk legalitas karena untuk Disperindag tidak ada kewenangan dalam penerbitan legalitas usaha (hanya rekomendasi)

3. Adanya hambatan untuk mengkoordinasikan adanya bantuan/pembinaan/pendampingan berbasis sentra dari pusat, karena belum adanya SK Bupati tentang Penetapan Sentra Industri
4. Arah kebijakan pengembangan industri Kabupaten Sidoarjo belum optimal karena belum memiliki dokumen yang memuat *roadmap* pengembangan industri karena selama ini masih menggunakan mekanisme kerja sama dengan pihak swasta
5. Masih banyak IKM yang belum terstandarisasi baik produk maupun prosesnya
6. Permasalahan terkait pasar, yaitu: kondisi sarana dan prasarana pasar yang kurang representative, kurangnya pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana pasar, kurangnya kesadaran pedagang dan pengunjung pasar untuk mendukung kebersihan dan menjaga sarpras pasar, kondisi pasar yang mengalami penurunan pembeli karena persaingan dengan pasar *online*

dd) Urusan Perencanaan Pembangunan

Permasalahan pada urusan perencanaan pembangunan yaitu terkait dengan konsistensi antar dokumen perencanaan. Konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran biasanya diukur dengan melihat sejauh mana program dan kegiatan yang tercantum dalam dokumen perencanaan (seperti RPJMD dan RKPD) terealisasi dalam dokumen penganggaran (seperti APBD). Dengan target minimal dari Kementerian Dalam Negeri dengan Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran minimal 90%. Demikian juga dengan konsistensi RKPD terhadap RPJMD mengacu pada sejauh mana program dan kegiatan dalam RKPD tahunan sejalan dengan arah kebijakan dan target yang ditetapkan dalam RPJMD lima tahunan. Namun dalam prosesnya terdapat beberapa faktor yang dapat menjadi kendala diantaranya: adanya perubahan kondisi sosial ekonomi daerah, perubahan kebijakan/regulasi pemerintah pusat, kejadian tidak terduga (bencana alam, pandemi), perubahan prioritas pembangunan.



ee) Urusan Penelitian dan Pengembangan

Permasalahan pada urusan penelitian dan pengembangan antara lain:

1. Skor Indeks Inovasi Daerah (IID) Kabupaten Sidoarjo belum optimal. Hal ini terlihat dari capaian IID yang masih belum jauh dari ambang bawah kategori Sangat Inovatif (60,01-100), di mana skor IID Kabupaten Sidoarjo sebesar 60,25 (2022) dan 62,08 (2023)
2. Nilai skor kematangan inovasi yang dilaporkan belum maksimal. Hal ini terlihat dari jumlah inovasi yang dilaporkan tidak semuanya dapat dikirim karena skor kematangannya masih rendah. Pada tahun 2022 dari 106 inovasi yang dilaporkan, hanya 64 inovasi yang dikirim karena memiliki skor cukup. Pada tahun 2023, inovasi yang dikirim sebanyak 76 inovasi dari 102 inovasi yang dilaporkan
3. Partisipasi Perangkat Daerah dalam pelaporan inovasi untuk mendukung IID Kabupaten Sidoarjo belum optimal. Meskipun persentase PD yang melaporkan inovasi terus meningkat setiap tahunnya, namun belum semua PD berpartisipasi. Dari 48 PD yang ada pada tahun 2021, tercatat 12 PD tidak melaporkan inovasi. Pada tahun 2022, dari 49 PD tercatat 7 PD tidak melaporkan inovasi dan pada tahun 2023 tercatat 6 PD tidak melaporkan inovasi

ff) Urusan Pemerintah Penunjang Urusan

Permasalahan pada urusan penunjang terdapat beberapa bagian yaitu: terkait dengan keuangan, tata kelola pemerintah, dan pengawasan. Permasalahan terkait dengan keuangan diantaranya : tingkat pemahaman penganggaran dan penatausahaan keuangan daerah di masing-masing Perangkat Daerah belum optimal; kurang memadainya kompetensi SDM pengelola keuangan dan BMD; belum terintegrasinya sistem penganggaran, perbendaharaan, akuntansi dengan manajemen aset, masih banyak aset tanah milik pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang belum bersertifikat dikarenakan penerbitan sertifikat aset tanah bergantung pada lembaga lain yaitu BPN; kurangnya gedung pemerintahan yang



representatif dan inklusif; belum optimalnya inovasi dalam pelayanan publik; kurangnya pengetahuan dan kompetensi tenaga ASN/Non ASN dan terbatasnya kualitas fungsional auditor.

2.4. Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang atau tantangan suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Dalam pembangunan daerah, isu strategis dapat berasal dari permasalahan-permasalahan (isu) internal pembangunan daerah maupun isu eksternal. Isu internal permasalahan pembangunan yang telah teridentifikasi sebelumnya merupakan isu dari hasil evaluasi kinerja atau Gambaran Umum Kondisi Kabupaten Sidoarjo pada periode sebelumnya (2018-2023). Dengan demikian, isu strategis dalam kategori ini dirumuskan dari permasalahan (umum) kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah, geografi dan kewilayahan, sumberdaya penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.

Sementara itu, kelompok isu strategis kedua adalah isu yang berasal dari luar atau eksternal Kabupaten Sidoarjo, baik yang berupa isu internasional, nasional, maupun berupa kebijakan pemerintah pusat. Isu eksternal yang berpengaruh langsung terhadap keberhasilan/kegagalan pembangunan Kabupaten Sidoarjo di masa mendatang, baik positif (dikenal sebagai peluang) maupun negatif (dikenal sebagai tantangan), dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Peluang bisa menjadi isu strategis karena kondisi tersebut dapat dimanfaatkan dan berdampak besar bagi pembangunan Kabupaten Sidoarjo. Sementara itu, tantangan pun bisa menjadi isu strategis yang menjadi penghambat keberhasilan pembangunan jika tidak diselesaikan dan/atau diantisipasi. Isu strategis Kabupaten Sidoarjo juga dibangun dengan arahan dari dokumen perencanaan acuan – seperti

RPJPD Provinsi Timur Tahun 2025-2045 sebagai pengganti RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 yang belum tersedia, RPJPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2045, dan laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang masih berlaku maupun agenda/isu-isu global/internasional. Telaah terhadap isi-isu internasional (global) menghasilkan isu-isu tingkat global yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan kebijakan Pembangunan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029, yaitu:

2.4.1 Isu Strategis Global / Internasional

2.4.1.1 Isu *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Perubahan iklim yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan hidup secara global telah berdampak pada perubahan iklim, yang mengakibatkan berbagai bencana yang mengancam kelangsungan hidup manusia di masa depan. Para pimpinan negara di seluruh dunia yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) telah berkomitmen melaksanakan pembangunan berkelanjutan untuk mencapai 8 *Millenium Development Goals* (hingga Tahun 2015) dan dilanjutkan 17 *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Tahun 2030. Hingga setidaknya di Tahun 2030, isu ini masih akan menjadi perhatian global. Seluruh komponen negara, termasuk pemerintah daerah di Indonesia harus berkontribusi dalam pencapaian SDGs di wilayah masing-masing.

Terkait isu ini, pembangunan di Indonesia, baik di pusat maupun di daerah, harus mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan dalam tujuan pembangunannya, baik jangka panjang, menengah maupun pendek. Secara berkala, capaian tujuan pembangunan berkelanjutan dievaluasi untuk selanjutnya menjadi rekomendasi rencana pembangunan selanjutnya. Dalam penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029 upaya-upaya pencapaian 17 tujuan pembangunan berkelanjutan, terutama yang berada dalam kewenangan kabupaten, menjadi isu strategis yang harus dijawab melalui berbagai program pembangunan di masa depan.



2.4.1.2 Megatrend Dunia

Megatrend dunia adalah tren besar yang mempengaruhi dunia secara global. Agenda megatrend dunia dirumuskan untuk membantu memahami tren-tren besar yang mempengaruhi dunia dan mempersiapkan diri untuk menghadapi perubahan yang akan terjadi. Megatrend dapat membantu dalam merencanakan strategi jangka panjang dan mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan di masa depan. Beberapa tren besar yang mempengaruhi dunia secara global dan penting untuk diperhatikan yaitu: demografi global, urbanisasi global, urbanisasi dunia, perdagangan dunia, kelas menengah, sumber daya alam, dan revolusi industri.

1. Perkembangan Demografi Global

Demografi global ditandai dengan semakin tingginya migrasi antar negara dan peningkatan proporsi penduduk usia lanjut. Dalam 30 tahun ke depan, pertumbuhan penduduk dunia diperkirakan melambat namun dengan jumlah penduduk yang terus bertambah. Berdasarkan data *World Population Prospects* (2022), populasi penduduk dunia saat ini telah lebih dari 7 miliar jiwa dan diperkirakan akan terus meningkat hingga 9,7 miliar jiwa pada tahun 2050. Kecenderungan penduduk dunia akan terkonsentrasi di kawasan Asia Afrika yang disertai dengan munculnya kelompok negara yang memainkan perekonomian global.

2. Dinamika Geopolitik dan Geoekonomi Global

Geopolitik dapat memberikan dampak yang luas terhadap berbagai sektor kehidupan dan tatanan global. Salah satu tantangan geopolitik yang perlu diantisipasi oleh Indonesia adalah eskalasi yang meluas dan memunculkan kekuatan baru. Kemunculan kekuatan baru telah mempengaruhi pergolakan di kawasan, maupun tatanan global serta sikap Indonesia pada dunia internasional.

Perang antara Rusia dan Ukraina meningkatkan kewaspadaan global terhadap potensi konflik geopolitik ke depan di kawasan lainnya. Perang menyebabkan kerugian bagi negara-negara lain seperti adanya tekanan inflasi global yang tinggi serta adanya krisis energi dan pangan. Persaingan



geopolitik terutama di kawasan Indo-Pasifik yang dekat dengan Indonesia semakin meningkat dan meluas.

Sedangkan pada faktor geoekonomi, nilai output pada negara berkembang semakin dominan yang ditunjukkan dengan fenomena dimana negara-negara berkembang memiliki peran yang semakin besar dalam perekonomian global, baik dalam hal produksi (output) maupun dalam pengaruh politik dan ekonomi global. Pada Tahun 2015, negara berkembang menyumbang 55 persen dari nilai output dunia dan diperkirakan meningkat menjadi 71 persen dari total nilai output dunia di Tahun 2050. Peranan negara Asia sangat besar yaitu diperkirakan mencapai 54 persen dari total output global. Sebaliknya peranan negara maju akan mengecil menjadi 20 persen. Melalui kebijakan yang tepat, negara berkembang mempunyai peluang mengejar ketertinggalan teknologi dan ekonomi dari negara maju. Disamping itu, pada tahun 2050 perekonomian global pada Tahun 2050 akan meningkat sebanyak 3 kali lipat dibanding Tahun 2015.

3. Perkembangan Teknologi

Perkembangan perubahan teknologi digital telah menimbulkan disrupsi teknologi di berbagai kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi memerlukan kesiapan yang adaptif dari masyarakat. Teknologi yang berkembang di masa depan akan mempengaruhi sektor manufaktur. Pada fase *Industry 4.0*, *internet of things* atau otomatisasi dan penerapan teknologi yang bertumpu pada internet dan pertukaran data (*big data*) akan menjadi tren manufaktur yang memungkinkan adanya proses yang lebih efisien dalam proses manufaktur (*smart factory*) dan pengelolaan *value chain*. Perkembangan teknologi juga akan mempengaruhi sektor pendidikan, pergantian jenis pekerjaan, serta cara kerja pemerintah. Teknologi ke depan dapat dimanfaatkan untuk melakukan pembenahan proses perumusan kebijakan, termasuk dalam penyusunan regulasi.



4. Peningkatan Urbanisasi Dunia

Urbanisasi akan berdampak pada peningkatan jumlah penduduk perkotaan dan ukuran kota. Pada 2050, PBB memperkirakan sekitar 65 persen penduduk dunia akan tinggal di perkotaan dengan 95 persen pertumbuhannya terjadi di *emerging economies*.

5. Perubahan Konstelasi Perdagangan Global

Pergeseran peningkatan peranan negara berkembang dalam ekonomi global mendorong perdagangan internasional berpusat di kawasan Asia Afrika. Kawasan Asia Pasifik diyakini tetap mampu menjadi poros perdagangan dan investasi dunia karena kontribusinya yang signifikan dalam hal perdagangan dan investasi dunia. Poros ekonomi di kawasan Asia Pasifik dalam hal perdagangan juga berkontribusi hingga 47 persen dari volume perdagangan dunia secara global.

6. Pergeseran Tata Kelola Keuangan Global

Pendapatan negara ke depan akan sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan produktivitas penduduk. Hal tersebut berpotensi meningkatkan pendapatan negara secara signifikan. Tren penggunaan *Central Bank Digital Currency (CBDC)* yang merupakan bentuk digital dari mata uang fiat suatu negara. CBDC merupakan terobosan untuk mengatasi resiko stabilitas asset risiko baru yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi makro, moneter, dan sistem keuangan di masa depan.

Perkembangan teknologi informasi telah menimbulkan disrupti dalam industri jasa keuangan. Perkembangan teknologi yang sangat pesat seperti *Internet of Things (IoT)*, *Cloud Computing*, *Artificial Intelligence*, dan *Machine Learning* telah merubah industri jasa keuangan dengan sangat signifikan. Ke depan puluhan juta pekerjaan pada jasa keuangan akan menghilang. Namun akan tergantikan dengan pekerjaan baru. Sementara itu, munculnya perusahaan teknologi finansial (*financial technology*) seperti bank digital, dan keuangan terdesentralisasi telah meningkatkan efisiensi dan perluasan akses ke layanan keuangan, sekaligus sebagai pesaing industri keuangan.



7. Pertumbuhan Kelas Menengah (*Middle Class*)

Jumlah kelompok kelas menengah dunia pada Tahun 2045 diperkirakan akan mencapai 8,8 miliar atau lebih dari 90 persen dari populasi dunia. Setiap tahunnya 140 juta orang masuk ke dalam status kelas menengah dan akan lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. Komposisi kelas menengah akan mengalami pergeseran dari sebelumnya yang sebelumnya didominasi oleh kawasan Eropa dan Amerika Serikat, bergeser ke kawasan Asia terutama Tiongkok dan India. Pertumbuhan kelas menengah yang pesat akan menciptakan peluang ekonomi namun sekaligus memberikan tantangan pada aspek sosial dan politik. Proporsi kelas menengah yang semakin meningkat mendorong penciptaan jenis dan lapangan pekerjaan baru dan kebutuhan konsumsi yang lebih beragam termasuk kebutuhan gaya hidup baru.

8. Peningkatan Persaingan Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Persaingan memperebutkan sumber daya alam ke depan akan tetap tinggi seiring dengan bertambahnya penduduk dunia, meningkatnya kegiatan ekonomi, serta perubahan gaya hidup. Bertambahnya populasi penduduk dan aktivitas ekonomi yang menyebabkan peningkatan kebutuhan SDA di antaranya air, pangan, dan energi, mendorong terjadinya kompetisi dan persaingan geopolitik di berbagai wilayah. Tingkat persaingan SDA ke depan akan bergantung pada ketatnya faktor permintaan dan penawaran, diantaranya efektivitas pengelolaan dan upaya konservasi sumber daya alam, pengembangan teknologi baru, serta perubahan pola konsumsi dan pola produksi.

9. Perubahan Iklim

Perubahan iklim mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, seperti kesehatan, lingkungan, dan ekonomi. Organisasi-organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan *World Health Organization* (WHO) telah berkomitmen untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya. Perubahan iklim, kerusakan lingkungan dan polusi, serta kehilangan keanekaragaman hayati secara global diperkirakan akan



berlangsung terus dan tidak dapat dihindari. Keseluruhan fenomena akibat tiga krisis global diperkirakan akan berdampak pada berbagai aspek kehidupan seperti lingkungan, kesehatan, penghidupan masyarakat, dan laju pembangunan secara keseluruhan. Namun paradigma pembangunan dengan implementasi kebijakan yang mengarah pada keberlanjutan akan berimplikasi pada perubahan aktivitas ekonomi yang lebih rendah emisi Gas Rumah Kaca di berbagai sektor, seperti sektor energi, industri, lahan, kelautan dan pesisir, pangan dan pertanian, serta limbah dan penerapan ekonomi sirkuler. Selanjutnya tren pertumbuhan ekonomi hijau dan rendah karbon menjadi kebijakan dan strategi global. Seperti Norwegia dengan target *net zero emission* pada tahun 2030, Spanyol dan Selandia Baru pada tahun 2050, serta Tiongkok dan Indonesia mendeklarasikan *net zero emission* pada tahun 2060.

10. Pemanfaatan Luar Angkasa

Tren eksplorasi antariksa semakin meningkat selama satu dekade terakhir. Antariksa dipandang sebagai warisan bersama umat manusia (*common heritage of humankind*), yaitu suatu strategis yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Perekonomian Antariksa secara global akan tumbuh secara signifikan untuk jangka waktu yang panjang. Ekonomi Antariksa diperkirakan mencapai US\$469,0 miliar pada tahun 2021 dan diprediksi akan terus meningkat mencapai US\$1,0 triliun hingga tahun 2040. Oleh karena itu negara-negara diharapkan dapat meningkatkan kapasitas khusus dalam hal pengembangan teknologi mutakhir dan kompetensi SDM.

2.4.2 Isu Strategis Nasional

Kondisi eksternal lain yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan Kabupaten Sidoarjo di masa mendatang adalah amanah kebijakan-kebijakan nasional yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Kebijakan nasional tersebut harus ditelaah untuk selanjutnya menjadi pertimbangan/diperhatikan saat menyusun isu strategis, tujuan, sasaran hingga program/kegiatan pembangunan ke depan.



2.4.2.1 Telaah terhadap Arahan RPJPN Tahun 2025-2045 pada Tahap Pertama (2025-2029)

Saat Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Sidoarjo ini disusun, RPJMN untuk periode yang sama belum tersedia. Karenanya, telaahan dilakukan terhadap dokumen terkait yang tersedia, yaitu Rancangan Akhir RPJPN tahun 2025-2045.

Visi pembangunan jangka panjang Indonesia Tahun 2025 – 2045 adalah “Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan”. Untuk mencapainya, ditetapkan 8 misi dan 17 arah (tujuan) pembangunan, yaitu:

1. Transformasi Sosial dengan arah (i) Kesehatan untuk semua; (ii) Pendidikan berkualitas yang merata; dan (iii) Perlindungan sosial yang adaptif
2. Transformasi Ekonomi dengan arah (iv) Iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi; (v) Penerapan ekonomi hijau; (vi) Transformasi digital; integrasi ekonomi domestik dan global; (vii) Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi
3. Transformasi Tatakelola dengan arah (viii) Regulasi dan tata kelola yang berintegrasi dan adaptif
4. Supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia dengan arah (ix) Hukum berkeadilan, keamanan nasional tangguh, dan demokrasi sustansial; (x) Stabilitas ekonomi makro; (xi) Ketangguhan diploma dan pertahanan berdaya gentar kawasan
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi dengan arah (xi) Beragama mashlahat dan berkebudayaan maju; (xii) Keluarga berkualitas, kesadaran gender, dan masyarakat inklusif; (xiii) Lingkungan hidup berkualitas; berketahanan energy, air, dan kemandirian pangan; (xiv) Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim
6. Pembangunan Kewilayah yang merata dan berkeadilan dengan arah (xv) Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan



7. Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan dengan arah (xvi) Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
8. Kestinambungan pembangunan dengan arah (xvii) Mewujudkan kestinambungan pembangunan

Pencapaian arah pembangunan atau tujuan pembangunan jangka panjang dibutuhkan fokus pembangunan pada tahapan pertama (2025-2029) adalah pada penguatan fondasi transformasi. Pada tahap ini pertumbuhan ekonomi diperkirakan berada pada kisaran 5,6-6,1 persen per tahun. **Transformasi sosial** dititikberatkan par penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif. **Transformasi ekonomi** difokuskan pada upaya lanjutan proses hilirisasi sumber daya alam unggulan, peningkatan kapasitas riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja, penerapan ekonomi hijau, pemenuhan akses digital di seluruh wilayah Indonesia, pembangunan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan utamanya di luar pulau Jawa. Transisi energi difokuskan pada penerapan CCS/CCUS dan pembatasan pembangunan PLTU batu bara pemanfaatan *Energy Storage System* (ESS): pengembangan PLT EBT (PLTA, PLTS, PLTP, PLTB, dan PLT Biomassa) penyiapan regulasi dan kelembagaan PLTN, hidrogen dan amonia rendah karbon, implementasi carbon credit secara luas; pengalihan subsidi fosil ke subsidi EBT secara bertahap, peningkatan penggunaan sektor industri, peningkatan penggunaan kendaraan listrik dan peralatan listrik rumah tangga dan infrastruktur pendukungnya, dan pengembangan sistem jaringan kelistrikan melalui interkoneksi dan smart grid. **Transformasi tata kelola** difokuskan pada perbaikan kelembagaan yang tepat, fungsi penyempurnaan fondasi penataan regulasi, pembentukan dan penguatan lembaga tunggal pengelola regulasi, peningkatan kualitas ASN berbasis merit, kebijakan pembangunan berbasis bukti penerapan, manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan, peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, serta penguatan kapasitas masyarakat sipil.



Supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia difokuskan pada supremasi hukum serta penguatan stabilitas politik dan keamanan nasional yang mencakup pembaharuan substansi hukum, pengembangan budaya hukum dan transformasi kelembagaan hukum yang mengedepankan keseimbangan antara kepastian, keadilan, kemanfaatan, dan perdamaian berlandaskan Pancasila, transformasi tata kelola keamanan dalam negeri keamanan laut, keamanan dan ketertiban masyarakat keamanan insani dan keamanan siber sebagai pilar-pilar keamanan nasional, lembaga demokrasi yang kuat akuntabel berbasis digital, parlemen modern, parpol yang berbasis nilai, sedangkan stabilitas ekonomi ditekankan untuk menjaga stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat dan kepercayaan investor, serta menjaga keberlanjutan fiskal yang adaptif untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan menjaga stabilitas sektor keuangan. Selanjutnya, pengembangan diplomasi yang tangguh dan pertahanan berdaya gentar kawasan difokuskan pada penguatan infrastruktur diplomasi dan kelembagaan, mengonsolidasikan kebijakan dan langkah-langkah untuk memperkuat sinergi diplomasi pembangunan kekuatan pertahanan berorientasi kepulauan dan maritim yang didukung industri pertahanan yang sehat, kuat dan mandiri.

Ketahanan sosial budaya dan ekologi difokuskan pada optimalisasi nilai agama dan budaya serta peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia dan menggerakkan modal sosial dalam masyarakat peningkatan ketangguhan manusia dan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana penguatan riset inovasi, dan teknologi dalam meningkatkan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, termasuk untuk energi baru terbarukan, penguatan standardisasi dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, akselerasi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan penurunan emisi GRK.



Pembangunan wilayah pada tahap ini difokuskan untuk peningkatan pembangunan wilayah potensi ekonomi tinggi utamanya melalui optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang ada termasuk pemanfaatan potensi ketersediaan energi terutama dengan teknologi rendah karbon sesuai karakteristik wilayah (*smart grid*). Sementara itu, dalam kerangka transisi energi, secara bertahap pembangunan *island grid* (dimulai di Sumatera) dan *national grid* (dimulai antara Sumatera Jawa) untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya Energi Baru dan Terbarukan. Selanjutnya, dilakukan percepatan pembangunan konektivitas laut sebagai *backbone* logistik domestik yang dilengkapi dengan konektivitas udara darat dan digital. Melanjutkan pengembangan wilayah metropolitan dan kota besar serta melanjutkan pembangunan dan penyiapan 6 (enam) klaster Ibu Kota Nusantara (IKN). Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar termasuk listrik dengan *micro grid* terutama pada wilayah dengan prioritas tinggi untuk mengurangi ketimpangan antar kelompok.

Sementara itu, **Pembiayaan pembangunan** dioptimalkan melalui reformasi tata kelola fiskal, serta mobilisasi dan optimalisasi pembiayaan pembangunan non pemerintah. Selan itu, RPJPN tahun 2025-2045 juga telah menetapkan 45 indikator kinerja yang menjadi ukuran keberhasilan/ketidakberhasilan berbagai upaya tersebut di atas.

2.4.2.2 Telaah terhadap arahan RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 pada Tahap Pertama (Tahun 2025-2029)

Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, pemerintahan daerah Provinsi Jawa Timur menjalankan agenda pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pembangunan nasional Indonesia selama dua puluh tahun mendatang akan menjalankan 3 kelompok agenda, yaitu transformasi Indonesia, Landasan Transformasi dan Kerangka Implementasi Transformasi. Jika dirinci, maka terdapat 6 agenda atau misi pembangunan nasional. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerjemahkannya ke dalam 6 agenda atau misi pembangunan Jawa Timur.



Dengan demikian, selama empat periode pembangunan 5 tahunan, keenam agenda atau misi pembangunan ini akan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. Walaupun demikian, terdapat perbedaan fokus penyelenggaraan misi di setiap tahap/periode pembangunan lima tahunan. Fokus penyelenggaraan misi setiap tahap ini akan menjadi arahan bagi pembangunan jangka menengah (lima tahunan).

Pada tahapan pertama pembangunan 5 tahun, yaitu periode tahun 2025-2029, fokus penyelenggaraan agenda atau misi adalah pada penguatan fondasi transformasi. Pada tahap ini, Transformasi Sosial dititik beratkan pada penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif. Transformasi Ekonomi difokuskan pada upaya lanjutan proses hilirisasi sumber daya alam unggulan, peningkatan produktivitas tenaga kerja, penerapan ekonomi hijau, pemenuhan akses digital di seluruh wilayah Jawa Timur serta pembangunan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan. Transformasi Tata Kelola difokuskan pada perbaikan kelembagaan yang tepat fungsi, pembentukan dan penguatan lembaga peningkatan kualitas ASN Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok berbasis merit, kebijakan pembangunan berbasis bukti, penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan, peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, serta penguatan kapasitas masyarakat sipil. Stabilitas, Demokrasi dan Trantibumlinmas Daerah, difokuskan pada upaya memperkuat Supremasi Hukum dan Stabilitas, serta menjaga ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat sebagai landasan transformasi dan pembangunan. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, difokuskan pada optimalisasi nilai agama dan budaya serta peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia dan menggerakkan modal sosial dalam masyarakat; peningkatan ketangguhan manusia dan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana; penguatan riset, inovasi, dan teknologi dalam meningkatkan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup; pengembangan kapasitas kelembagaan dan



instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, termasuk untuk energi baru terbarukan; penguatan standardisasi dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; akselerasi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan penurunan emisi GRK. Sementara itu, pembangunan wilayah, pada tahap ini difokuskan untuk peningkatan pembangunan wilayah potensi ekonomi tinggi utamanya melalui optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang ada, termasuk pemanfaatan potensi ketersediaan energi terutama dengan teknologi rendah karbon sesuai karakteristik wilayah.

Sebagai bagian wilayah dari Provinsi Jawa Timur, maka arahan atau fokus pembangunan tahun 2025-2029 Provinsi Jawa Timur ini harus diperhatikan dan diacu oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menjalankan pembangunan daerahnya. Dengan demikian akan terjadi keselarasan rencana pembangunan Kabupaten Sidoarjo dengan Provinsi Jawa Timur dan saling menguatkan.

2.4.2.3 Telaah terhadap arahan RPJPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2045

Visi jangka panjang Kabupaten Sidoarjo yaitu “Menjadi Metropolitan Inklusif, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berkelanjutan” dengan misi: 1) Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Bersih dan Gesit serta Pelayanan Publik Inovatif Berbasis Digital; 2) Memantapkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif bagi Seluruh Pelaku Ekonomi secara Merata; 3) Menciptakan Sumberdaya Manusia (SDM) Berdayasaing, Berakhlak, dan Mewujudkan Jaminan Kesejahteraan Sosial yang Merata; 4) Memantapkan Infrastruktur yang Berkualitas dalam Mendukung Pembangunan Sektor Potensial dan Sektor Strategis Berkelanjutan; 5) Mewujudkan Masyarakat yang Religius, Setara, Tentram dan Nyaman. Masing-masing misi memiliki arah kebijakan 5 tahunan. Arah kebijakan pada lima tahun pertama RPJPD Kabupaten Sidoarjo diturunkan pada RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029.

2.4.3 Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029

Berdasarkan isu-isu strategis dari kondisi internal (permasalahan pembangunan daerah) maupun eksternal (isu strategis internasional, nasional, regional/Provinsi Jawa Timur) serta telaah dokumen perencanaan jangka panjang, maka dapat dirumuskan Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1 Pengembangan infrastruktur Berkelanjutan Pendorong Multisektor, Kewilayahan dan Sistem Transportasi Terpadu.

Dukungan infrastruktur merupakan faktor kunci dalam mendorong integrasi multisektor dalam mendukung pembangunan wilayah berbasis potensi dan keunggulan lokal. Semakin tinggi tingkat aksesibilitas dan mobilitas barang dan jasa yang dihasilkan dari penyediaan layanan infrastruktur, maka semakin tinggi pula penyebaran ekonomi secara *Trickle Down Effect* ke berbagai wilayah yang direncanakan. Sisi lain, perkembangan Sidoarjo sebagai Metropolis Inklusif juga mensyaratkan adanya transportasi massal modern dan terjangkau bagi masyarakat.

2 Inovasi melalui Pemanfaatan IPTEKS, Perintisan EBT dan Rintisan Ekonomi Hijau.

Peranan inovasi, pengembangan IPTEKS dan penyelenggaraan rintisan Energi Baru Terbarukan (EBT) sesuai kewenangan daerah ke depan akan mendapatkan momentum yang baik. Perkembangan teknologi merupakan kunci yang mendukung percepatan pengembangan ekonomi hijau sebagai prioritas pembangunan tahun 2025-2029.

3 Percepatan Pemerataan Ekonomi, Perluasan Lapangan Kerja, Revitalisasi Sektor Primer (pertanian dan perikanan) dan Ekonomi Kreatif.

Isu ini merupakan hal penting untuk menjadi prioritas pembangunan di tahun 2025-2029. Mengingat sektor primer merupakan sektor yang berpotensi besar dalam mendukung ketahanan pangan dan pendukung



komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan. Sektor pertanian termasuk sub sektor perikanan berkontribusi kurang dari 2 persen dalam PDRB Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023. Namun pada sisi lain, sektor ini pendukung penyerapan tenaga kerja yang relatif besar.

4 Pemantapan dan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berdaya Saing dan Berkarakter.

Meskipun pada tahun 2023 secara statistik nilai IPM Kabupaten Sidoarjo sebesar 81,88 dan berada di atas Nasional dan Provinsi Jawa Timur, namun perlu dilakukan percepatan peningkatan ketrampilan/*skills*, dan penguatan karakter yang dapat mendukung daya saing SDM daerah.

5 Penanganan Kemiskinan dan berbagai permasalahan kesejahteraan sosial.

Pemantauan perkembangan jumlah PPKS dapat digunakan sebagai salah satu indikator mengenai komitmen terhadap kebutuhan dasar masyarakat. PPKS Tahun 2023 sebesar 2,38% yang perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. Untuk menilai perlindungan dan penanganan permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat maka Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bertanggung jawab untuk mengurangi jumlah PPKS secara cepat dan terintegrasi.

6 Pemantapan Kualitas Tata Kelola Pemerintah, Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik.

Tatakelola pemerintahan yang bersih dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang gesit sebagai ujung tombak pelaksanaan pembangunan daerah merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan pencapaian target Visi dan Misi pembangunan lima tahunan. Pemerintahan yang menerapkan tatakelola yang bersih dan profesional dapat mewujudkan pelayanan pembangunan inovatif dan dirasakan secara nyata.

Bab III

Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Pada bagian ini menyajikan tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029. Rumusan Visi dan Misi pada dokumen RPJMD ini berdasarkan pada Visi dan Misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yaitu **H. SUBANDI, S.H., M.Kn.**, sebagai Bupati dan **Hj. MIMIK IDAYANA** sebagai Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo, oleh Presiden Republik Indonesia **H. PRABOWO SUBIANTO** pada tanggal 20 Februari 2025 di Istana Kepresidenan Jakarta sesuai Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030. Mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Visi, Misi dan Program Strategis yang merupakan komitmen yang harus diimplementasikan dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD) agar dapat diwujudkan secara konsisten selama 5 (lima) tahun.

Selanjutnya, Visi dan Misi tersebut dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran dengan memperhatikan Permasalahan Pembangunan Daerah serta Isu-isu Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo. Proses elaborasi

antara gagasan Bupati dan Wakil Bupati terpilih dengan kondisi empiris permasalahan pembangunan dan Isu Strategis Daerah tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029 ini merupakan kunci untuk mewujudkan kesejahteraan di Kabupaten Sidoarjo.

3.1.1. Visi

Sebagai upaya untuk menjamin keberlanjutan pembangunan daerah, maka terlebih dahulu dilakukan telaah terhadap visi RPJPD yang diemban Kabupaten Sidoarjo dalam jangka waktu 20 tahun yakni ***Sidoarjo Menjadi Metropolitan Inklusif, Berdaya Saing, Sejahtera, dan Berkelanjutan***. Visi jangka panjang dalam RPJPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024-2045 tersebut, tentunya tidak dapat dilepaskan dari konteks lokal Sidoarjo, yang sangat dinamis, dan mengalami pergeseran-pergeseran pada beberapa sektor, oleh karena itu, penyusunan Visi Jangka Menengah, selain didasarkan pada Visi Jangka Panjang, juga tidak terlepas, atau memiliki irisan dengan konteks masa kini, atau merupakan cerminan dari kondisi masyarakat saat ini.

Berdasarkan pada permasalahan pembangunan, serta isu strategis, dengan berpegang pada Visi RPJPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2045, maka disusun sebuah cita-cita pembangunan masyarakat Sidoarjo dimasa depan. Cita-cita tersebut merupakan gambaran terwujudnya masyarakat masa depan yang sejahtera, maju, adil, makmur, dalam sebuah tatanan masyarakat yang demokratis, agamis, dan memiliki tingkat estetika yang tinggi serta berkelanjutan. Visi dan misi yang dirumuskan dalam dokumen ini merupakan dasar dari penetapan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Berdasarkan pada uraian di atas, maka cita-cita pembangunan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yaitu **H. Subandi, S.H., M.Kn., dan Hj. Mimik Idayana**, sebagai Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo yang selanjutnya menjadi rumusan Visi RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029 adalah:

**"Menata Desa Membangun Kota Menuju Sidoarjo menjadi
Metropolitan Inklusif, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berkelanjutan"**

Agar rumusan Visi di atas dapat diimplementasikan lebih operasional, maka perlu dijabarkan pada pokok-pokok visi berikut penjelasannya sebagaimana dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pokok-Pokok Visi Kabupaten Sidoarjo

VISI	POKOK VISI	PENJELASAN
Menata Desa Membangun Kota Menuju Sidoarjo menjadi Metropolitan Inklusif, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berkelanjutan	Menata Desa Membangun Kota	Menata Desa Membangun Kota merupakan prinsip pembangunan yang menekankan pada keseimbangan antara pembangunan di wilayah pedesaan dan perkotaan mempunyai makna pembangunan fokus dimulai dari penataan desa dengan pendekatan <i>people centered development</i> , membangun kelompok-kelompok masyarakat, pembangunan langsung masuk ke desa. Pemerintah desa diberikan keleluasaan menentukan arah pembangunan desanya sesuai dengan SDGs Desa dan kearifan lokal yang ada, dilengkapi dengan pembangunan perkotaan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan seperti kemacetan, polusi dan kesenjangan sosial.
	Metropolitan Inklusif	Metropolitan Inklusif memiliki makna Sidoarjo menjadi pusat ekonomi yang signifikan bagi daerah sekitarnya, memberikan jaminan kesetaraan, keadilan, keamanan, dan kenyamanan bagi seluruh golongan masyarakat. Sidoarjo memfasilitasi dan mendukung kehidupan seluruh warganya dengan menciptakan ruang-ruang ramah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup.
	Berdayasaing	Berdayasaing memiliki makna dinamis yang secara substansi adalah memiliki kelebihan dibandingkan daerah lain. Keunggulan dayasaing sebagaimana dimaksud masih dalam koridor sesuai dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki. Dalam arti lain, keunggulan tersebut mencerminkan tingkat pengelolaan sumberdaya secara optimal.
	Sejahtera	Sejahtera artinya suatu keadaan yang aman, sentosa, dan makmur. Seseorang akan merasa hidupnya sejahtera apabila merasa bahagia, merasa tercukupi terhadap apa yang mungkin sudah dicapai dalam hidupnya. Sidoarjo Sejahtera menggambarkan kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan secara ekonomi, sosial, politik dan keamanan serta segala aspek kehidupan lainnya yang menjadi hak seluruh masyarakat Kabupaten Sidoarjo tanpa terkecuali.
	Berkelanjutan	Berkelanjutan memiliki makna prinsip pembangunan Sidoarjo harus mempertimbangkan resiko dan kelestarian kehidupan untuk generasi yang akan datang, sebagaimana tertuang dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (<i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs)).

Kelima pokok visi di atas, selanjutnya akan dijabarkan ke dalam Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029. Misi pembangunan akan memperjelas dan mempertegas kemana pembangunan akan diprioritaskan dan diarahkan selama lima tahun mendatang.

3.1.2. Misi

Berdasarkan pada penjabaran Visi ke dalam pokok-pokok Visi di atas, berikut akan disajikan bagaimana keterkaitan antara Visi dengan 5 Misi Pembangunan Kabupaten Sidoarjo selama lima tahun ke depan. Misi tersebut merupakan upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029 sesuai dengan pendekatan teknokratik dan janji politik Kepala Daerah.

Adapun keterkaitan tersebut sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 3.2 Keterkaitan Visi dengan Misi Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2025-2029**

VISI	POKOK VISI	MISI
<i>Menata Desa Membangun Kota Menuju Sidoarjo menjadi Metropolitan Inklusif, Berdaya Saing, Sejahtera, dan Berkelanjutan</i>	Menata Desa Membangun Kota	Misi 2: Memantapkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Merata bagi Pelaku Ekonomi Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Pelayanan Prima dengan Mengandalkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
	Metropolitan Inklusif	Misi 2: Memantapkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Merata bagi Pelaku Ekonomi
	Berdayasaing	Misi 1: Menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) Berintegritas, Berakhlak, dan Mewujudkan Jaminan Kesejahteraan Sosial yang Merata bagi Masyarakat Sidoarjo
	Sejahtera	Misi 5: Mewujudkan Masyarakat yang Religius, Setara, Tenram dan Nyaman
	Berkelanjutan	Misi 4: Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas Merata dan Mendukung Pembangunan Sektor Potensial dan Sektor Strategis Berkelanjutan

Pemetaan sebagaimana dilakukan pada tabel di atas, hanya pendekatan logis untuk memastikan keterkaitan antara Visi dengan Misi. Namun secara substansial keterkaitan tersebut meliputi dimensi yang sangat luas, dimana sebuah misi dapat mendukung ke banyak pokok visi, dan antara pokok visi satu dengan pokok visi lain masih memiliki hierarki tertentu dimana tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat Sidoarjo. Merujuk pada hasil pemetaan Misi berdasarkan pokok-pokok Visi di atas, maka dihasilkan 5 misi Pembangunan Kabupaten Sidoarjo untuk Tahun 2025-2029 yang disebut sebagai **PANCA KARYA DELTA**. Penjelasan atas 5 Misi **PANCA KARYA DELTA** diuraikan sebagai berikut.

Misi 1 Menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) Berintegritas, Berakhlak dan Mewujudkan Jaminan Kesejahteraan Sosial yang Merata bagi Masyarakat Sidoarjo.

Pembangunan dengan pendekatan *people centered development*, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan sumber daya manusia (SDM) sehingga dapat berdayasaing. SDM yang berintegritas adalah SDM yang memiliki integritas dan kompetensi dalam bekerja, sedangkan SDM yang berakhlak adalah SDM yang memiliki pranata sosial yang santun, toleran, terbuka, ramah dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan agama. Sedangkan Kesejahteraan Sosial merupakan suatu kondisi yang harus diwujudkan bagi seluruh masyarakat di dalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Misi 2 Memantapkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Merata bagi Pelaku Ekonomi

Pembangunan ekonomi Inklusif merupakan pertumbuhan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah. Misi ini merupakan pendukung unsur visi metropolis inklusif,

mengingat pesatnya perkembangan sektor Industri, Perdagangan dan Jasa di satu sisi merupakan penopang utama perekonomian daerah.

Misi 3 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Pelayanan Prima dengan Mengandalkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, integratif, dinamis, transparan, inovatif, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima. Salah satu upaya mewujudkan pelayanan publik yang prima melalui reformasi administrasi publik dengan digitalisasi dan terpadu.

Misi 4 Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas Merata dan Mendukung Pembangunan Sektor Potensial dan Sektor Strategis Berkelanjutan

Percepatan pembangunan salah satunya didukung dengan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dan merata. Pembangunan di Kabupaten Sidoarjo harus dapat mendukung Kebijakan Strategis Nasional dan Provinsi dalam upaya percepatan pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, peningkatan konektivitas antar wilayah, dan pengembangan sektor strategis berupa pengembangan transportasi aglomerasi perkotaan termasuk sistem angkutan umum massal perkotaan. Sektor potensial Kabupaten Sidoarjo meliputi 2 sektor pendukung utama PDRB yaitu sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan. Sedangkan sektor strategis meliputi usaha mikro, industri kecil, ekonomi kreatif dan sektor jasa lainnya. Pembangunan sektor potensial berkelanjutan dengan mengembangkan sektor-sektor ekonomi yang menjadi potensi daerah dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi jangka panjang.

Misi 5 Mewujudkan Masyarakat yang Religius, Setara, Tentram dan Nyaman

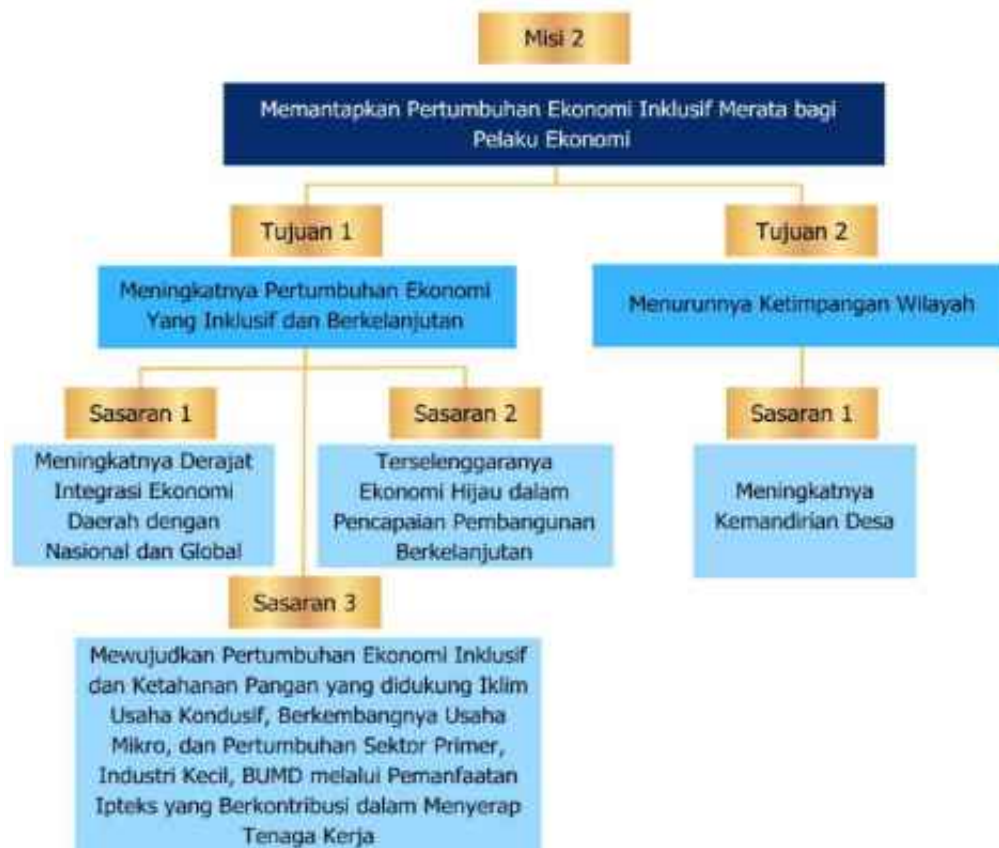
Mewujudkan pembangunan dengan menciptakan masyarakat yang religius, setara, tentram dan nyaman. Upaya membangun masyarakat yang religius dengan merevitalisasikan dan mengaktualisasikan nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari, dan membangun harmoni sosial dengan menciptakan keserasian di tengah perbedaan yang ada. Harmoni sosial mengandung nilai-nilai luhur bangsa yang hidup melalui berbagai bentuk kearifan lokal yang multikultur, dalam rangka menciptakan suasana pembangunan yang kondusif ke depan.

3.1.3. Tujuan dan Sasaran

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka rumusan Misi Kepala Daerah di atas, kemudian dijabarkan ke dalam Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah. Secara rinci rumusan Tujuan dan Sasaran berdasarkan misi sebagaimana disajikan di bawah ini.



Pada Misi satu, dijabarkan ke dalam dua tujuan dan tiga sasaran. Fokus pada misi ini adalah meningkatkan kualitas dan kemampuan sumber daya manusia (SDM) sehingga dapat berdayasaing untuk mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo.



Pada Misi dua, difokuskan pada percepatan pertumbuhan ekonomi yang merata, dengan menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat serta mengembangkan sektor industri, perdagangan, dan jasa. Misi dua dijabarkan dalam dua tujuan dan empat sasaran.



Pada Misi tiga, difokuskan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang prima dengan digitalisasi dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Sidoarjo. Misi tiga dijabarkan dalam satu tujuan dan satu sasaran.



Pada Misi keempat, dijabarkan dalam dua tujuan dan tiga sasaran. Misi ini fokus pada peningkatan kualitas infrastruktur yang merata dan lingkungan hidup, serta bencana di Kabupaten Sidoarjo dengan mengembangkan sektor-sektor ekonomi yang menjadi potensi daerah dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi jangka panjang.



Pada Misi kelima ini difokuskan pada penguatan karakteristik masyarakat Sidoarjo memiliki watak dasar yang lugas, terus terang, pantang menyerah, namun demikian tetap ramah dan toleran. Ikhtiar ini dilakukan melalui internalisasi nilai-nilai budaya dan agama serta mendorong tumbuh berkembangnya nilai toleransi dalam Masyarakat sehingga kerukunan, keamanan, ketentraman dan kenyamanan akan dapat diwujudkan secara berkelanjutan. Misi ini dijabarkan dalam satu tujuan dan dua sasaran.

Setelah dirumuskan Tujuan dan Sasaran berdasarkan Misi sebagaimana disajikan di atas, maka tahap selanjutnya adalah mengidentifikasi Indikator Tujuan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sidoarjo. Indikator Tujuan berfungsi sebagai gambaran untuk mengetahui capaian Tujuan Pembangunan selama periode perencanaan RPJMD, yaitu Tahun 2030. Sehingga target capaian indikator tujuan merupakan patokan bagi penyusunan target indikator sasaran di akhir periode perencanaan. Indikator Tujuan juga merupakan pijakan untuk merumuskan program RPJMD beserta target capaian selama lima tahun yang akan datang. Guna menjamin rumusan tujuan dan sasaran memiliki keterkaitan yang logis sebagaimana penjabarannya dalam tabel 3.3.

Tabel 3.3 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
VISI: MENATA DESA MEMBANGUN KOTA MENUJU SIDOARJO MENJADI METROPOLITAN INKLUSIF, BERDAYA SAING, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN												
PANCA KARYA DELTA I Menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) Berintegritas, Berakhlak, dan Mewujudkan Jaminan Kesejahteraan Sosial yang Merata bagi Masyarakat Sidoarjo	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Berkarakter		I	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	82,67	83,51	83,52	83,70	83,89	84,08	84,37
		Mewujudkan Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing melalui Layanan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata	1	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75,63	75,69	75,95	76,21	76,47	76,73	76,99
		Mewujudkan Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing melalui Layanan Pendidikan yang Berkualitas dan Merata	2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,22	15,23	15,25	15,32	15,41	15,47	15,51
	Menurunnya Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo		II	Tingkat Kemiskinan	%	4,53	4,52	4,30	4,18	4,02	3,75	3,49
		Mewujudkan Jaminan Sosial Masyarakat yang Adaptif dan Merata	3	Indeks Kedalaman Kemiskinan (<i>Poverty Gap Index</i>)	Indeks	0,64	0,63	0,62	0,61	0,60	0,59	0,58
PANCA KARYA DELTA II Memantapkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan		III	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,54	6,00	6,07	6,11	6,16	6,22	6,27
			IV	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,49	6,48	6,47	6,46	6,45	6,44	6,43



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Merata bagi Pelaku Ekonomi		Meningkatnya Derajat Integrasi Ekonomi Daerah Dengan Nasional dan Global	4	Ekspor Barang dan Jasa	%	10,14	10,97	11,84	12,70	13,57	14,43	14,45
		Terselenggaranya Ekonomi Hijau dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan	5	Indeks Ekonomi Hijau	Indeks	65,26	68,79	69,52	70,25	70,97	71,70	72,43
	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Ketahanan Pangan yang didukung Iklim Usaha Kondusif, Berkembangnya Usaha Mikro dan pertumbuhan sektor primer, Industri Kecil, BUMD melalui Pemanfaatan Ipteks yang berkontribusi dalam Menyerap Tenaga Kerja	6	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	48,57	48,02	48,60	48,61	48,62	48,64	48,65	
		7	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	%	3,07	3,06	3,05	3,04	3,03	3,02	3,01	
		8	Pertumbuhan PDRB Subsektor Perikanan	%	0,87	0,89	0,91	0,93	0,95	0,97	1,00	
		9	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%	-	11,51	11,90	12,30	12,69	13,09	13,10	
		10	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	54,23	54,67	55,12	55,57	56,01	56,46	56,91	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Menurunnya Ketimpangan Wilayah		V Rasio Gini	Indeks	0,327	0,326	0,325	0,324	0,323	0,321	0,310
		Meningkatnya Kemandirian Desa	11 Indeks Pemerataan Wilayah	Indeks	-	42,81	44,82	46,83	48,85	50,86	50,87
			12 Indeks Desa	Indeks	34,91*	0,8270	0,8272	0,8274	0,8276	0,8278	0,8280
PANCA KARYA DELTA III	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Digitalisasi		VI Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	86,98	87,00	87,14	87,28	87,42	87,56	87,70
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Pelayanan Prima dengan Mengandalkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Bersih dan Gesit serta Pelayanan Publik Inovatif Berbasis Digital	13 Indeks Pemerintahan Digital	Indeks	3,96*	4,10*	1,70	1,80	1,90	2,00	2,10
			14 Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,65	4,66	4,67	4,68	4,69	4,70	4,71
PANCA KARYA DELTA IV	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah yang Merata		VII Indeks Infrastruktur Daerah	Indeks	0,850	0,858	0,865	0,873	0,881	0,888	0,896
Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas Merata dan Mendukung Pembangunan Sektor Potensial dan Sektor Strategis Berkelanjutan		Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Makro dan Daya Saing Daerah melalui Kualitas Infrastruktur yang Merata	15 ICOR	Angka	5,96	5,32	5,42	5,42	5,41	5,41	5,40
			16 Realisasi Investasi	Trilyun Rupiah	17,046	15,68	15,70	15,72	15,74	15,76	15,78
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Resiliensi Bencana		VIII Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	53,35	65,08	65,16	65,24	65,32	65,39	65,47
		Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan	17 Penurunan Emisi GRK Kumulatif	TonCO2Eq	24.783,93	25.279,61	25.785,20	26.300,90	26.826,92	27.363,46	27.910,73



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Melalui Kualitas Lingkungan Hidup yang Lebih Baik										
		Mewujudkan Resiliensi Masyarakat Terhadap Bencana	18	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	78	76,76	74,88	73,1	71,4	69,78	68,23
PANCA KARYA DELTA V	Meningkatnya Masyarakat yang Inklusif, Aman, dan Religius serta Berkebudayaan		IX	Indeks Kesalehan Sosial	Indeks	87,33	87,35	87,37	87,39	87,41	87,44	87,46
Mewujudkan Masyarakat yang Religius, Setara, Tentram dan Nyaman		Meningkatnya Ketentraman, Rasa Aman dan Toleransi dalam Kehidupan Masyarakat	19	Indeks Rasa Aman	Indeks	83,03	83,06	83,09	83,12	83,15	83,18	83,21
			20	Indeks Toleransi	Indeks	86,64	86,65	86,66	86,67	86,68	86,69	86,70
		Mewujudkan Masyarakat yang Setara	21	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,183	0,176	0,166	0,161	0,157	0,152	0,147

3.2. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Bagian ini menjelaskan tentang Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2026 sampai dengan tahun 2030. Perumusan strategi menjelaskan cara dan/atau tahapan implementasi, bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan memperhatikan dinamika kondisi internal dan eksternal daerah yang dijabarkan ke dalam arah kebijakan dan pendekatan yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan dalam periode lima tahun. Arah kebijakan menjelaskan waktu pelaksanaan (*timeline*) dan kebijakan utama yang akan dilakukan berdasarkan strategi yang telah ditentukan dalam kurun waktu lima tahun periode RPJMD.

Penentuan arah kebijakan yang tepat diharapkan dapat menjadi pijakan dalam merumuskan '*Tahapan Pembangunan*' Kabupaten Sidoarjo. Tahapan pembangunan tersebut dimulai tahun 2026 dan berakhir tahun 2030, yang mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 dimana dinyatakan bahwa pada saat penyusunan RPJMD, perencanaan dan penganggaran tahun 2025 telah ditetapkan dan perumusan pentahapan pembangunan tahun 2030 tetap dilakukan acuan bagi kepala daerah selanjutnya. Tahapan Pembangunan RPJMD sebagaimana dimaksud selanjutnya menjadi pijakan dalam menentukan Tema Pembangunan Tahunan dalam RKPD selama periode RPJMD.

Program prioritas pembangunan daerah dihasilkan dari cascading kinerja (bukan cascading indikator) yang dimulai dari visi sampai *outcome* serta dilengkapi dengan indikator sesuai dengan tingkatannya. Oleh karena itu, tahapan teknokratik yang diturunkan dari visi hingga arah kebijakan dan program pembangunan yang tepat dapat menjelaskan keterkaitan logis kontribusi setiap urusan/program setiap perangkat daerah terhadap pencapaian Visi dan Misi RPJMD. Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 selanjutnya akan disajikan strategi, arah kebijakan, tahapan pembangunan dan

program prioritas pembangunan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029.

3.2.1. Strategi Pembangunan

Strategi Pembangunan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029 dirumuskan berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi ini fokus pada bagaimana setiap tujuan dan sasaran pembangunan dapat dicapai dengan langkah-langkah yang konkret. Fungsi dari strategi berdasarkan tujuan dan sasaran adalah sebagai acuan pelaksanaan program Perangkat Daerah (PD) dalam mendukung pencapaian tujuan Pembangunan RPJMD. Dengan demikian maka setiap PD perlu untuk menyelaraskan strategi RPJMD dengan strategis Rencana Strategis berdasarkan urusan yang diampu. Adapun rumusan strategi sebagaimana dimaksud disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.4 Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Misi 1: Menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) Berintegritas, Berakhlak, dan Mewujudkan Jaminan Kesejahteraan Sosial yang Merata bagi Masyarakat Sidoarjo		
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Berkarakter	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing melalui Layanan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat secara bertahap di seluruh wilayah kecamatan.
	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing melalui Layanan Pendidikan yang Berkualitas dan Merata	Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan secara bertahap di seluruh wilayah kecamatan prioritas.
Menurunnya Kemiskian di Kabupaten Sidoarjo	Mewujudkan Jaminan Sosial Masyarakat yang Adaptif dan Merata	Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Kantong Kemiskinan secara bertahap di seluruh wilayah kecamatan prioritas.
		Penataan Sistem Jaminan Sosial melalui Sinergi Lintas Sektoral di lingkup instansi terkait.
Misi 2: Memantapkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Merata bagi Pelaku Ekonomi		
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan	Meningkatnya Derajat Integrasi Ekonomi Daerah Dengan Nasional dan Global	Penguatan kebijakan dan daya dukung perekonomian dengan perluasan akses ekonomi-spasial yang difokuskan untuk pemerataan dalam mendukung metropolitan yang inklusif.
	Terselenggaranya Ekonomi Hijau dalam Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan	Penataan regulasi dan kebijakan pendukung implementasi ekonomi hijau (Green Economy) dan pengembangan Energi aru Terbarukan (EBT)
	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Ketahanan Pangan yang didukung Iklim	Meningkatkan Perekonomian Sektor Unggulan
		Penguatan Kebijakan Ekonomi yang Mendukung Perindustrian, Perdagangan, Pariwisata Perkotaan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
	Usaha Kondusif, Berkembangnya Usaha Mikro dan Pertumbuhan Sektor Primer, Industri Kecil, BUMD melalui Pemanfaatan Ipteks yang Berkontribusi dalam Menumbuhkan Peluang Ekonomi Baru Menyerap Tenaga Kerja	(<i>Urban Tourism</i>) dan Berpihak Kepada Industri Kecil, Koperasi, Usaha Mikro serta Ekonomi Kreatif Meningkatkan Daya Serap Tenaga Kerja Pengembangan inovasi dan transformasi digital yang mendukung Pelaku Ekonomi
Menurunnya Ketimpangan Wilayah	Meningkatnya Kemandirian Desa	Pembentukan Titik Pertumbuhan Ekonomi Baru (<i>Growth Pole</i>) yang Mendorong Pemerataan Pengembangan Kewilayahan ditandai Kemandirian Perdesaan di seluruh wilayah kecamatan.
Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Pelayanan Prima dengan Mengandalkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Digital	Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Bersih dan Gesit serta Pelayanan Publik Inovatif Berbasis Digital	Penguatan Kapasitas ASN melalui Budaya Birokrasi yang Gesit (<i>Agile</i>) dalam Menghadapi <i>Volatility</i> (Tidak Stabil), <i>Uncertainty</i> (Ketidakpastian), <i>Complexity</i> (Kompleksitas), dan <i>Ambiguity</i> (Ambiguitas) VUCA.
Misi 4: Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas Merata dan Mendukung Pembangunan Sektor Potensial dan Sektor Strategis Berkelanjutan		
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah yang Merata	Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Makro dan Daya Saing Daerah melalui Kualitas Infrastruktur yang Merata	Pengembangan Infrastruktur Inklusif sebagai Daya Dukung Penting dalam Mengungkit Stabilitas Makro Ekonomi
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Resiliensi Bencana	Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Melalui Kualitas Lingkungan Hidup yang Lebih Baik	Penguatan Kebijakan Pelestarian Lingkungan Hidup sebagai Komitmen Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Membangun kawasan perkotaan yang modern yang terintegrasi dengan konsep ketahanan energi
	Mewujudkan Resiliensi Masyarakat Terhadap Bencana	Meningkatkan Ketahanan Terhadap Kebencanaan di kecamatan rawan bencana.
Misi 5: Mewujudkan Masyarakat yang Religius, Setara, Tentram dan Nyaman		
Meningkatnya Masyarakat yang Inklusif, Aman, dan Religius serta Berkebudayaan	Meningkatnya Ketentraman, Rasa Aman dan Toleransi dalam Kehidupan Masyarakat	Penguatan Konsolidasi Kelembagaan Seluruh Elemen Masyarakat Untuk Mendorong Internalisasi Hukum dan Demokrasi Pembentukan Karakter Religius, Toleran, dan Inklusif yang Menjamin Kesetaraan Bagi Seluruh Kelompok Masyarakat
	Mewujudkan Masyarakat yang Setara	Penguatan Regulasi dan Komitmen yang Menjamin Implementasi Nilai-Nilai Pengarusutamaan Gender

Berdasarkan pada strategi yang telah dihasilkan pada tabel di atas, maka selanjutnya akan dirumuskan arah kebijakan yang merupakan penjabaran detil dari pelaksanaan strategi pembangunan. Arah kebijakan yang jelas dan terarah sangat membantu Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara efektif dan efisien.

3.2.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2026-2030 terdiri atas tiga bagian penting antara lain; **(1) Arah Kebijakan Pembangunan berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPJMD;** Merupakan arah kebijakan spesifik yang difokuskan pada pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD selama periode RPJMD. Arah kebijakan ini menjadi acuan dalam pelaksanaan program perangkat daerah terkait. **(2) Pentahapan Pembangunan Kabupaten Sidoarjo;** Merupakan *milestone* pembangunan daerah sebagai acuan penting perumusan fokus tahunan karena memiliki keterkaitan dengan Tema Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) selama periode RPJMD, yaitu tahun 2026-2030. **(3) Arah Kebijakan Tematik RPJMD;** Merupakan arah kebijakan yang bersifat lintas urusan dan lintas perangkat daerah (*Cross Cutting Policy*) yang bersifat penting (mandatori) bagi percepatan pencapaian tujuan dan target RPJMD Kabupaten Sidoarjo. Secara detil sebagaimana diuraikan di bawah ini.

3.2.2.1. Arah Kebijakan Pembangunan Berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPJMD

Arah kebijakan pembangunan RPJMD sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah, menggambarkan tindakan yang akan dilakukan dan rencana waktu pelaksanaannya (tahunan) sebagai pijakan pelaksanaan program yang sekaligus mencerminkan tema pembangunan tahunan. Namun demikian mengingat bahwa dinamika isu pembangunan dan perencanaan tahunan pemerintah pusat dan provinsi relatif cepat, maka selanjutnya masih membutuhkan penyesuaian.

Tabel 3.5 Arah Kebijakan berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPJMD

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TAHUN PELAKSANAAN				
				2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Berkarakter	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing melalui Layanan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat secara bertahap di seluruh wilayah kecamatan	Percepatan peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat melalui pemenuhan faktor pendukung (<i>Supporting System</i>) secara bertahap	◆	◆	◆	◆	◆
	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing melalui Layanan Pendidikan yang Berkualitas dan Merata	Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan secara bertahap di seluruh wilayah kecamatan prioritas	Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan yang difokuskan pada titik prioritas sesuai kebutuhan	◆	◆	◆	◆	◆
Menurunnya Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo	Mewujudkan Jaminan Sosial Masyarakat yang Adaptif dan Merata	Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Kantong Kemiskinan secara bertahap di seluruh wilayah kecamatan prioritas	Percepatan Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PKS) dan Kantong Kemiskinan secara tepat sasaran	◆	◆	◆		
		Penataan Sistem Jaminan Sosial melalui Sinergi Lintas Sektoral di lingkup instansi terkait	Implementasi Sistem Jaminan Sosial melalui sinergi lintas sektoral	◆	◆	◆	◆	
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan	Meningkatnya Derajat Integrasi Ekonomi Daerah Dengan Nasional dan Global	Penguatan kebijakan dan daya dukung perekonomian dengan perluasan akses ekonomi-spasial yang difokuskan untuk pemerataan dalam mendukung metropolitan yang inklusif	Implementasi kebijakan dan daya dukung perekonomian dengan perluasan akses ekonomi spasial		◆	◆	◆	



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TAHUN PELAKSANAAN				
				2026	2027	2028	2029	2030
	Terselenggaranya Ekonomi Hijau dalam Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan	Penataan regulasi dan kebijakan pendukung implementasi ekonomi hijau (<i>green Economy</i>) dan pengembangan Energi baru Terbarukan (EBT)	Penataan regulasi dan implementasi kebijakan pendukung implementasi ekonomi hijau (<i>green economy</i>)	◆	◆			
	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Ketahanan Pangan yang didukung Iklim Usaha Kondusif, Berkembangnya Usaha Mikro dan pertumbuhan sektor primer, Industri Kecil, BUMD melalui Pemanfaatan Ipteks yang berkontribusi dalam Menyerap Tenaga Kerja	Meningkatkan Perekonomian Sektor Unggulan	Meningkatkan Perekonomian Sektor Unggulan			◆	◆	
		Penguatan Kebijakan Ekonomi yang mendukung perindustrian, perdagangan, pariwisata perkotaan (<i>urban tourism</i>) dan berpihak kepada Industri Kecil, Koperasi, Usaha Mikro serta Ekonomi Kreatif	Penguatan kebijakan ekonomi yang mendukung perindustrian, perdagangan, pariwisata perkotaan (<i>urban tourism</i>) dan berpihak kepada industri kecil, koperasi, usaha mikro dan ekonomi kreatif		◆	◆	◆	
		Meningkatkan Daya Serap Tenaga Kerja	Implementasi pola hubungan industrial yang efektif untuk menciptakan lapangan kerja yang diprioritaskan pada angkatan kerja Kabupaten Sidoarjo			◆	◆	
		Pengembangan inovasi dan transformasi digital yang mendukung Pelaku Ekonomi	Membangun iklim inovasi dan transformasi digital yang efektif dalam mendukung daya saing pelaku ekonomi.		◆	◆	◆	
Menurunnya Ketimpangan Wilayah	Meningkatnya Kemandirian Desa	Pembentukan titik pertumbuhan ekonomi baru (<i>growth Pole</i>) yang mendorong pemerataan pengembangan kewilayahan ditandai kemandirian perdesaan di seluruh wilayah kecamatan	Percepatan pembentukan titik pertumbuhan ekonomi baru (<i>growth pole</i>) yang mendorong pemerataan pengembangan kewilayahan ditandai kemandirian perdesaan secara bertahap	◆	◆	◆		



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TAHUN PELAKSANAAN				
				2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Digital	Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Bersih dan Gesit serta Pelayanan Publik Inovatif Berbasis Digital	Penguatan kapasitas ASN melalui budaya birokrasi yang gesit (<i>Agile</i>) dalam menghadapi <i>Volatility</i> (Tidak Stabil), <i>Uncertainty</i> (Ketidakpastian), <i>Complexity</i> (Kompleksitas), dan <i>Ambiguity</i> (ambiguitas) VUCA	Penguatan kapasitas ASN melalui budaya birokrasi yang gesit (<i>agile</i>) melalui implementasi sistem merit	◆				
			Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan publik secara merata dan inklusif	◆	◆	◆	◆	◆
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah yang Merata	Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Makro dan Daya Saing Daerah melalui Kualitas Infrastruktur yang Merata	Pengembangan infrastruktur inklusif sebagai daya dukung penting dalam mengungkit stabilitas makro ekonomi	Pengembangan infrastruktur inklusif sebagai stimulus penting percepatan pengembagn potensi lokal daerah berbasis spasial		◆	◆	◆	
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Resiliensi Bencana	Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Melalui Kualitas Lingkungan Hidup yang Lebih Baik	Penguatan kebijakan pelestarian Lingkungan Hidup sebagai komitmen pembangunan berkelanjutan (SDGs)	Pembangunan sarana dan prasarana pendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup serta pelibatan peran aktif masyarakat agar memiliki dampak yang lebih luas		◆	◆	◆	
		Membangun kawasan perkotaan yang modern yang terintegrasi dengan konsep ketahanan energi	Akselerasi infrastruktur yang bertahan dari berbagai kondisi, serta meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan (<i>green building</i>)	◆	◆		◆	



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TAHUN PELAKSANAAN				
				2026	2027	2028	2029	2030
	Mewujudkan Resiliensi Masyarakat Terhadap Bencana	Meningkatkan ketahanan terhadap kebencanaan di kecamatan rawan bencana	Percepatan pemenuhan infrastruktur kebencanaan dan peningkatan peran serta aktif masyarakat dalam mitigasi kebencanaan				◆	◆
Meningkatnya Masyarakat yang Inklusif, Aman, dan Religius serta Berkebudayaan	Meningkatnya Ketentraman, Rasa Aman dan Toleransi dalam Kehidupan Masyarakat	Penguatan konsolidasi kelembagaan seluruh elemen masyarakat untuk mendorong Internalisasi hukum dan demokrasi	Pelibatan aktif seluruh elemen masyarakat untuk penegakkan hukum dan demokrasi secara nyata				◆	◆
		Pembentukan karakter religius, toleran, dan inklusif yang menjamin kesetaraan bagi seluruh kelompok masyarakat	Implementasi nilai-nilai religious, toleran, dan inklusif yang menjamin kesetaraan bagi seluruh kelompok masyarakat	◆	◆	◆	◆	◆
	Terwujudnya Masyarakat yang Setara	Penguatan regulasi dan komitmen yang menjamin implementasi nilai-nilai Pengarusutamaan Gender	Implementasi regulasi dan komitmen yang menjamin penerapan nilai-nilai pengarusutamaan gender di seluruh aspek kehidupan	◆			◆	◆

Keterangan : ◆ Tahun yang diprioritaskan dalam pelaksanaan arah kebijakan. Tahun yang tidak diberikan tanda ◆ tetap dilaksanakan, namun dengan intensitas yang normal.

3.2.2.2. Pentahapan Pembangunan Kabupaten Sidoarjo

Pentahapan pembangunan Kabupaten Sidoarjo tahun 2026-2030 merupakan *milestone* pembangunan daerah yang menggambarkan capaian *impact* atau *outcome* pembangunan yang diharapkan. Pentahapan pembangunan dirumuskan berdasarkan Arah Kebijakan sebagaimana ditetapkan dalam tabel di atas. Dengan demikian pentahapan pembangunan merupakan acuan penting perumusan fokus pembangunan tahunan karena akan dijadikan pedoman dalam perumusan Tema Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) selama periode RPJMD, yaitu tahun 2026-2030. Pentahapan pembangunan lima tahun RPJMD sebagaimana disajikan dalam gambar berikut ini.

Gambar 3.1 Pentahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2026-2030



Berdasarkan pentahapan pembangunan sebagaimana disajikan dalam gambar di atas, selanjutnya akan dioptimalkan seluruh sumberdaya pembangunan guna mewujudkan *impact* atau *outcome* tersebut secara bertahap

dalam upaya mencapai Visi dan Misi Pembangunan. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025, ditetapkan perodesasi RPJMD tahun 2025-2029, namun perumusan tahapan pembangunan lima tahun dirumuskan tahun 2026-2030. Mengingat perencanaan dan penganggaran tahun 2025 telah ditetapkan pada saat penyusunan dokumen RPJMD, dan ditambahkan tahun 2030 sebagai komitmen melanjutkan tujuan pembangunan yang berkesinambungan satu sama lain, meskipun tahun 2030 merupakan priode kepala daerah selanjutnya. Gambaran mengenai tahapan pembangunan RPJMD Kabupaten Sidoarjo sebagaimana diilustrasikan dalam tabel di bawah ini.

Tahapan Pembangunan 2026

Penguatan Pondasi Transformasi Pembangunan melalui Perbaikan Kualitas Layanan Dasar, Peningkatan Tata Kelola, Pemerintahan yang Adaptif dan Mendorong Daya Saing Daerah.

- Tahapan ini ditandai dengan peningkatan kualitas sarana-prasarana pendidikan, kesehatan, kepemudaan, pengendalian banjir dan pelestarian lingkungan hidup serta tahap penyiapan peningkatan prasarana pengurai kemacetan.
- Stimulus kebijakan pendukung perekonomian lokal (koperasi, usaha mikro dan industri kreatif) terus dikembangkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif.
- Perluasan jangkauan perlindungan sosial diimbangi dengan validitas data untuk menjamin kebijakan sosial yang tepat sasaran dan berkesinambungan.
- Secara simultan juga dilakukan penguatan terhadap tatakelola pemerintahan yang baik yang ditandai dengan kualitas pelayanan publik yang meningkat dan merata.

Tahapan Pembangunan 2027

Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Dalam Penguatan Transformasi Ekonomi dan Infrastruktur Inklusif Berbasis Kewilayahan.

- Tahapan ini ditandai dengan peningkatan kualitas sarana-prasarana pendidikan, kesehatan, gedung pemerintahan, pelestarian lingkungan hidup dan infrastruktur pengurai kemacetan (*Overpass*).
- Melanjutkan stimulus kebijakan perekonomian lokal tahun sebelumnya yang diorientasikan untuk mendorong surplus perdagangan antar daerah (*Regional Trade Surplus*) dan peningkatan skala ekspor (*Net Export*).
- Implementasi perlindungan sosial yang tepat sasaran dan didukung integrasi lintas sektoral (*Cross Cutting Program*).
- Tatakelola pemerintahan yang baik dan kualitas pelayanan publik terutama dalam penataan gedung pelayanan publik inklusif yang berdampak pada penguatan kontribusi investasi daerah dalam mendukung penyerapan tenaga kerja.
- Penguatan nilai-nilai toleransi dan kerukunan yang berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang aman dan nyaman.

Tahapan Pembangunan 2028

Transformasi Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Unggulan dan Sektor Strategis Dengan Pengembangan Inovasi dan IPTEK Menuju Metropolitan Inklusif.

- Tahapan ini ditandai dengan peningkatan nilai tambah (*Value Added*) sektor primer dan andalan daerah melalui pembangunan ***Depo Ikan***. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong hilirisasi yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan nelayan / petani dalam mewujudkan Visi Sidoarjo ***Menata Desa Membangun Kota Menuju Sidoarjo menjadi Metropolitan Inklusif, Berdaya Saing, Sejahtera, dan Berkelanjutan***.
- Peningkatan kualitas pelayanan publik yang berdampak pada penguatan kontribusi investasi daerah melalui peningkatan layanan ***Mall Pelayanan Publik (MPP)*** Kabupaten Sidoarjo.
- Pemantapan kualitas sarana-prasarana pendidikan, kesehatan dan gedung strategis daerah untuk kebutuhan strategis olahraga, pertemuan dan lainnya.

- Pembangunan infrastruktur pelestarian lingkungan hidup dan infrastruktur pengurai kemacetan (*overpass*) di titik krusial.
- Melanjutkan stimulus kebijakan perekonomian lokal tahun sebelumnya yang diorientasikan untuk mengembangkan 17 sektor ekonomi kreatif (*creative economy*).
- Pemantapan perlindungan sosial yang tepat sasaran dan didukung integrasi lintas sektoral serta Penguatan nilai-nilai toleransi dan kerukunan yang berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang aman dan nyaman.

Tahapan Pembangunan 2029

Peningkatan Daya Saing Daerah Sebagai Perwujudan Metropolitan Inklusif dengan Menjamin Kualitas Hidup Masyarakat Yang berkelanjutan.

- Tahapan ini merupakan periode akhir perencanaan RPJMD yang diharapkan berbagai daya dukung infrastruktur telah terpenuhi sesuai target dalam mendorong berkembangnya berbagai sektor strategis.
- Pemantapan perlindungan sosial yang tepat sasaran dan didukung integrasi lintas sektoral.
- Pemantapan kualitas sarana-prasarana pendidikan, kesehatan dan utilitas lainnya.
- Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemenuhan kebutuhan gedung pemerintahan.
- Peningkatan kualitas tatakelola melalui pembangunan ***Depo Arsip***. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong dukungan terhadap tatalaksana kearsipan yang efektif.
- Pembangunan infrastruktur pelestarian lingkungan hidup berbasis masyarakat.
- Penguatan nilai-nilai toleransi dan kerukunan yang berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang aman dan nyaman.

Tahapan Pembangunan 2030

Konsolidasi Program Pembangunan Yang Berdaya Saing Global dan Berkelanjutan.

- Tahapan ini memastikan bahwa kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai indikator utama pembangunan dan manifestasi dari Arah Kebijakan Tematik ***People Centered Development*** (Pembangunan berpusat pada manusia) telah dilaksanakan dengan baik serta akan menjadi prioritas ke depan;
- Kabupaten Sidoarjo telah menjadi ***Metropolitan Inklusif*** yang ditandai dengan kemajuan ekonomi yang stabil dan tingkat kemiskinan yang rendah serta pengangguran yang terkendali.

3.2.2.3. Arah Kebijakan Tematik RPJMD

Sebagai langkah strategis dalam mendukung pentahapan pembangunan sebagaimana diuraikan di atas, maka diperlukan perumusan berbagai kebijakan lintas sektoral (***Cross Cutting Policy***) yang terintegrasi. Kebijakan ini mencakup program sektoral dan program kewilayahan (*spatial*) yang dirancang untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Dalam konteks RPJMD Kabupaten Sidoarjo, arah kebijakan harus diarahkan untuk mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan serangkaian **Arah Kebijakan Tematik** yang akan diimplementasikan guna memastikan efektivitas pembangunan, memperkuat daya saing daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Kelima **Arah Kebijakan Tematik** pembangunan Kabupaten Sidoarjo di bawah menjadi ***Quick Wins*** dalam pelaksanaan program Perangkat Daerah selama lima tahun ke depan. Adapun penjelasan secara detail sebagai berikut. Berbagai kebijakan tersebut sebagaimana disajikan dalam bagan di bawah ini.

Gambar 3.2 Arah Kebijakan Tematik RPJMD Kabupaten Sidoarjo



Arah Kebijakan tematik merupakan mandatori penting yang dalam pelaksanaannya membutuhkan keterlibatan berbagai sektor atau bidang pemerintahan agar tujuannya dapat tercapai secara optimal. Sementara itu, program kewilayahan merupakan bentuk kolaborasi lintas sektor yang difokuskan pada kawasan atau lokasi tertentu, dimana berbagai perangkat daerah bekerja sama untuk mewujudkan pengembangan kawasan tersebut sesuai dengan peruntukannya. Dalam perencanaan pembangunan, program kewilayahan mengacu pada pendekatan **Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS)**. Pendekatan ini menekankan bahwa setiap kawasan pengembangan harus memiliki tema utama yang disepakati (**Tematik**), perencanaan yang menyeluruh dengan mencakup berbagai kebutuhan (**Holistik**), pelaksanaan yang terintegrasi oleh berbagai perangkat daerah terkait (**Integratif**), serta fokus pada lokasi atau kawasan tertentu yang ditargetkan untuk tumbuh secara optimal (**Spasial**).

1. Arah Pembangunan yang Berpusat pada Pembangunan Manusia (*People Centered Development*)

Pemahaman tentang paradigma pembangunan yang berpusatkan pada manusia/rakyat (*People Centered Development*) menegaskan komitmen bahwa proses pembangunan harus memiliki dampak pada peningkatan derajat, harkat dan martabat manusia. Pada jangka pendek dapat menstimulus masyarakat untuk dapat secara mandiri menyelesaikan permasalahannya, sedangkan dalam jangka panjang, sumberdaya manusia merupakan unsur utama pendukung kemajuan daerah. Pembangunan manusia harus selaras dengan Nilai-nilai Agama, Budaya, Hukum dan Demokrasi sebagai Dasar Pembentukan Karakter yang Mendukung Pembangunan. Karakter Masyarakat dibentuk dari nilai-nilai yang mendasarinya. Nilai luhur kebudayaan lokal, nilai agama, budaya, hukum dan demokrasi dalam sendi kehidupan masyarakat sebagai dasar pembentukan kebijakan bagi pengembangan dan kemajuan daerah.

2. Pembangunan Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (*Innovation and Information-Communication Technology ICT*)

Peran Inovasi melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan langkah strategis dalam mendorong Produktivitas Ekonomi menuju Integrasi Ekonomi Domestik dan Nasional. Kabupaten Sidoarjo sebagai bagian dari kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan ekonomi yang membentuk kawasan metropolitan memerlukan strategi yang tepat. Pengembangan Iptek dan Inovasi dapat menjadi daya ungkit produktivitas ekonomi dalam peningkatan ekonomi masyarakat. Terkait dengan hal tersebut, maka kebijakan tematik ini sangat penting untuk dilakukan secara berkesinambungan.

3. Pembangunan Infrastruktur (*Infrastructure*)

Arah kebijakan pemenuhan Infrastruktur Tangguh dan Ramah Lingkungan yang Mendukung Sektor Potensial dan Sektor Strategis Kabupaten Sidoarjo sebagai pusat pertumbuhan ekonomi (*center of*

growth) dalam Kawasan metropolitan Jawa Timur memerlukan dukungan infrastruktur yang tangguh dan ramah lingkungan, yaitu infrastruktur yang bertahan dari berbagai kondisi, serta meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan mendukung keberlanjutan. Tumbuhnya sektor potensial dan sektor strategis membutuhkan persiapan sarana prasarana yang baik dan dapat ikut mengembangkan wilayah-wilayah yang saling berkaitan dengan kawasan strategis nasional. Terkait hal tersebut maka strategi ini berperan penting dalam kebijakan pembangunan.

4. Pembangunan Kewilayahan (*Spatial Planning*)

Pembangunan kewilayahan Kabupaten Sidoarjo harus terintegrasi dengan kebijakan kewilayahan nasional dan regional. Highlight intervensi sebagaimana RPJMN Tahun 2025-2029 Lampiran IV yang telah diadopsi pada Dokumen RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029, bahwa terdapat *highlight* intervensi dengan lokus di Kabupaten Sidoarjo, antara lain:

A. Wilayah Metropolitan (WM) Surabaya (Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bangkalan, dan Kabupaten Mojokerto) dan Kawasan Pengembangan Industri Gresik-Surabaya Sidoarjo-Mojokerto-Pasuruan

1. Peningkatan kualitas dan penataan WM Surabaya, antara lain melalui:
 - a. Pembentukan kelembagaan pengelolaan WM Surabaya
 - b. Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu
 - c. Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan RTH



- d. Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan
- e. Penataan Permukiman kumuh terpadu perkotaan
- f. Penyusunan metropolitan statistical area
- g. Pengembangan dan pemantapan fasilitas pengelolaan limbah industri dan fasilitas pelayanan kesehatan
- h. Pengembangan taman keanekaragaman hayati
2. Pengembangan dalam urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
 - a. Pengembangan TPST Regional Gerbangkertosusila
 - b. Peningkatan ketangguhan terhadap banjir di WM Surabaya (pengendalian banjir Kali Buntung dan Kali Lamong)
3. Pengembangan dalam urusan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman
 - a. Fasilitasi pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial WM Surabaya (PHTC)
4. Pengembangan dalam urusan perhubungan
 - a. Pembangunan Jalur Ganda KA Segmen Sepanjang-Wonokromo
 - b. Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan WM Surabaya
 - c. Perluasan *coverage* jaringan transportasi publik perkotaan pada jaringan utama dan jaringan pengumpan (*feeder*) yang terintegrasi dan peningkatan konektivitas ke simpul transportasi lainnya (stasiun kereta api, pelabuhan, bandara), serta penguatan tata kelola kelembagaan transportasi publik terintegrasi
5. Pengembangan dalam urusan perindustrian
 - a. Pengembangan koridor industri Gresik - Surabaya - Sidoarjo - Mojokerto - Pasuruan (sektor industri prioritas:

industri kimia, industri kosmetik dan farmasi, hilirisasi tembaga, industri logam, besi, dan baja, industri mesin dan perlengkapan, dan industri makanan dan minuman)

**B. Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Brantas
(Kabupaten Sidoarjo)**

1. Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui: kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian; optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk/ pestisida/ pakan organik
2. Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat khususnya Daerah Irigasi Delta Brantas
3. Pengelolaan dan pengembangan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah
4. Peningkatan daya guna lahan (intensifikasi)
5. Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan)
6. Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura
7. Peningkatan operasi dan pemeliharaan bendungan-bendungan pada DAS Brantas
8. Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan antara lain melalui: kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian; optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik
9. Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern) benih dan bibit berkualitas/ pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan

- infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani;
peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan
prasarana pascapanen
10. Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama
 11. Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas peta, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian
 12. Penguatan pertanian pangan konservatif (KP2B, LP2B, LSD) melalui fasilitasi prasarana-sarana hulu dan hilir

C. Kawasan Komoditas Unggulan Tebu Lingkar Kelud-Kawi-Arjuna-Welirang

1. Peningkatan produktivitas perkebunan dan kualitas produksi (tebu)
2. Pengembangan dan perlindungan kawasan pertanian prioritas industri (tebu)
3. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian (tebu)
4. Pengendalian OTP dan DPI pada komoditas produksi industri (tebu)
5. Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian (tebu)

5. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Government*)

Arah Kebijakan Tematik Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Adaptif merupakan kondisi perlu (*Necessary Need*) bagi pelaksanaan pembangunan daerah yang efektif dan efisien. Kebijakan ini mencakup upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang inovatif dan transparansi serta merata pada seluruh masyarakat.

3.2.3. Program Pembangunan Daerah

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan jangka menengah, serta memperhatikan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan, maka disusun program-program pembangunan yang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke depan, berdasarkan janji politik Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo periode Tahun 2025-2029.

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka disusun **14 (empat belas) Program Unggulan Daerah**, yang merupakan komitmen Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo Tahun 2025-2029. Selanjutnya 14 Agenda Pokok tersebut diturunkan dalam program Perangkat Daerah. Seluruh agenda pokok tersebut diilustrasikan dalam gambar sebagai berikut :

Gambar 3.3 Program Unggulan Daerah Kabupaten Sidoarjo



Keterkaitan antara 14 Program Unggulan Daerah dengan program sesuai nomenklatur Urusan dan Perangkat Daerah sangat penting untuk keberlangsungan target pembangunan. Hal ini bertujuan agar seluruh janji politik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dapat diwujudkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Oleh sebab itu, keterkaitan antara 14 Program Unggulan dengan program pembangunan dan penanganan urusan pembangunan disesuaikan dengan misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dijelaskan sebagai berikut. sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

1. PROGRAM UNGGULAN 1: 100.000 LAPANGAN KERJA BARU

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melanjutkan program strategis RPJMD Tahun 2021-2026 yaitu 100.000 Lapangan Kerja Baru sebagai solusi dari pengurangan tingkat pengangguran terbuka, dimana angka pengangguran terbuka menunjukkan penurunan. Lapangan kerja baru diciptakan melalui pelatihan, bimbingan teknis, pendampingan, dan ketersediaan lapangan kerja baru hasil kerja sama pemerintah dengan swasta serta entitas bisnis lainnya.

2. PROGRAM UNGGULAN 2: BEROBAT GRATIS UNTUK SELURUH WARGA SIDOARJO

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo fokus memberikan jaminan kesehatan bagi penduduk Kabupaten Sidoarjo, dengan melanjutkan program strategis BPJS Kesehatan Gratis seluruh Warga Sidoarjo pada RPJMD Tahun 2021-2026. Program ini menyediakan dukungan pemberian jaminan kesehatan gratis karena kualitas sumber daya manusia diawali dari tubuh yang sehat sehingga warga Kabupaten Sidoarjo dapat beraktivitas dan merasa aman.

3. PROGRAM UNGGULAN 3: MAKAN BERGIZI GRATIS UNTUK WARGA MISKIN DAN LANSIA

Program pemberian makan bergizi gratis sudah dirasakan warga miskin pada periode RPJMD sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melaksanakan program ini untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi warga

Kabupaten Sidoarjo yang terdata sebagai masyarakat miskin dan lansia berdaya yang merupakan kelompok rentan. Diharapkan masyarakat miskin dan lansia dapat memenuhi kebutuhan gizinya.

4. PROGRAM UNGGULAN 4: 20.000 BEASISWA KULIAH, SD, SMP, (SD-SMA NEGERI) UNTUK ANAK YATIM

Program ini adalah program strategis RPJMD sebelumnya dengan sasaran yang diperluas untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing. Yang sebelumnya sasaran hanya untuk beasiswa kuliah, dan lima tahun ke depan sasaran diperluas dengan pemberian bantuan biaya pendidikan yang diutamakan bagi siswa (SD s/d SMA)/Sederajat Negeri dan/atau Swasta juga mahasiswa miskin/berprestasi/anak yatim di Kabupaten Sidoarjo yang memenuhi kriteria sesuai ketentuan.

5. PROGRAM UNGGULAN 5: 2000 PUPUK DAN BENIH GRATIS UNTUK PETANI DAN NELAYAN

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mendukung program Asta Cita dalam memperkuat sistem ketahanan pangan, dengan cara membantu petani dan nelayan dalam mendukung produktivitas pangan di sektor pertanian dan perikanan. Bantuan pupuk dan benih gratis dapat membantu petani dan nelayan dalam menekan biaya produksi.

6. PROGRAM UNGGULAN 6: 50 JUTA MODAL USAHA MIKRO/UMKM

Program ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memberikan bantuan berupa permodalan pada pengelola usaha mikro di Kabupaten Sidoarjo. Program ini adalah program strategis pada RPJMD sebelumnya yang diperluas cakupan sasarannya sehingga pertumbuhan ekonomi daerah lebih inklusif.

7. PROGRAM UNGGULAN 7: 500 JUTA UNTUK DESA (BKK PER DESA/KELURAHAN + INSENTIF, BPD, LPMD, LPMK & PURNA KADES)

Pembangunan dengan pendekatan kewilayahan menjadi fokus utama program, dimana sasaran kabupaten dimulai dari menata desa/kelurahan. Program ini memastikan kebutuhan prioritas di desa/kelurahan terpenuhi sesuai dengan arah pembangunan kabupaten sehingga mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Didukung dengan pemberian insentif yang dapat menjadi pondasi sumber daya manusia di desa/kelurahan untuk pelaksanaan pembangunan dengan optimal.

8. PROGRAM UNGGULAN 8: 20.000 UMKM NAIK KELAS

Program ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan dan daya saing 20.000 pelaku UMKM agar dapat berkembang lebih besar, lebih profesional, dan lebih kompetitif di pasar lokal maupun nasional. Fokus program adalah pada peningkatan kapasitas usaha, digitalisasi bisnis, akses permodalan, serta perluasan pasar bagi UMKM yang merupakan kelanjutan dari program strategis RPJMD periode sebelumnya.

9. PROGRAM UNGGULAN 9: SIDOARJO MEMBANGUN : PENATAAN KOTA, AKSES JALAN & TRANSPORTASI; PDAM MUDAH DAN MURAH UNTUK WARGA SIDOARJO; SERTA BUS SEKOLAH GRATIS UNTUK PELAJAR SIDOARJO

Program yang merupakan keberlanjutan dari program strategis RPJMD sebelumnya yaitu penataan kota dan transportasi terpadu urai kemacetan berkembang pada pemenuhan aksesibilitas dalam sektor jalan, transportasi dan air minum juga kemudahan mobilitas pelajar. Akses air minum diperluas dengan PDAM mudah dan murah untuk warga Sidoarjo. Kemudahan mobilitas pelajar diwujudkan dengan penyediaan bus gratis bagi pelajar.

10. PROGRAM UNGGULAN 10: TUNJANGAN NAIK 100% : UNTUK TENAGA KESEHATAN, KADER POSYANDU; DAN GTT, GURU SWASTA & HONORER, INSENTIF GURU NGAJI & GURU AGAMA NAIK

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo selalu berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pelaksana pemenuhan layanan dasar yang telah

dilaksanakan pada program strategis RPJMD sebelumnya. Pada periode RPJMD Tahun 2025-2029 ini terdapat tambahan insentif yaitu kepada tenaga kesehatan, kader posyandu, guru tidak tetap, guru swasta dan tenaga honorer, guru ngaji dan guru agama sesuai dengan ketentuan.

11. PROGRAM UNGGULAN 11: MEMBANGUN PUSAT KREATIVITAS ANAK MUDA SIDOARJO

Program RPJMD sebelumnya yaitu membangun *youth center* dan pusat kreativitas anak muda dirasa sangat penting dalam pengembangan potensi pemuda di Kabupaten Sidoarjo dalam bidang pendidikan, seni, budaya, agama, ekonomi kreatif, olahraga, dan bidang lain yang produktif sehingga perlu adanya skema keberlanjutan. Oleh sebab itu, membangun pusat kreativitas anak muda sidoarjo kembali menjadi program unggulan.

12. PROGRAM UNGGULAN 12: 2.000 RENOVASI WARUNG RAKYAT

Program yang merupakan keberlanjutan dari program strategis RPJMD periode sebelumnya ini, mengutamakan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Keberadaan warung - warung juga memiliki peran sebagai motor penggerak roda ekonomi sehingga program ini hadir untuk meningkatkan daya saing dengan memperbaiki fasilitasnya. Program ini tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik, tetapi juga pada pemberdayaan dan pendampingan bagi pelaku usaha. Proses pelaksanaan renovasi melibatkan partisipasi masyarakat desa melalui sistem swakelola, serta melibatkan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

13. PROGRAM UNGGULAN 13: PERIZINAN MUDAH UNTUK BISNIS KONDUSIF MELALUI PROGRAM SMART CITY SIDOARJO

Program ini selaras dengan program strategis pada RPJMD periode sebelumnya yaitu Reformasi Perijinan Untuk Bisnis Yang Kondusif, dimana sangat berdampak pada peningkatan nilai investasi daerah, melalui pelayanan perizinan jemput bola di seluruh Kecamatan. Perizinan berusaha akan didesain terintegrasi secara elektronik agar lebih mudah akses dan pencarian informasinya. Penyelenggaraan fasilitasi pengawasan, dan

pengendalian terhadap perizinan diterbitkan melalui Smart City untuk mendukung kepastian berusaha.

14. PROGRAM UNGGULAN 14: REVITALISASI TAMAN KOTA DAN PERUMAHAN

Komitmen Kabupateb Sidoarjo dalam menurunkan efek gas rumah kaca dan mengurangi polusi diwujudkan dengan memenuhi kebutuhan Ruang Terbuka Hijau. Terlebih lagi melihat kondisi Kabupaten Sidoarjo yang padat penduduk, mobilitas kendaraan yang sangat aktif dan banyaknya bangunan-bangunan baik perdagangan jasa maupun industri, sehingga keberadaan Ruang Terbuka Hijau diperlukan untuk menjaga kualitas udara dan memberikan kondisi yang nyaman bagi masyarakat. Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau dipastikan berada pada pusat aktivitas masyarakat dan pada permukiman.

Berbagai program Perangkat Daerah telah disesuaikan dengan 14 Program Unggulan Daerah sesuai Janji Politik Kepala Daerah Terpilih sebagaimana disampaikan di atas dalam mendukung Visi dan Misi RPJMD. Selanjutnya, dalam mewujudkan jalannya 14 Program Unggulan Daerah juga telah disusun skema target pelaksanaan tiap tahunnya dengan penyesuaian dan keselarasan yang sesuai dengan Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Penyelarasan Program Prioritas Perangkat Daerah dan skema pelaksanaan Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah dapat dilihat dalam tabel 3.6 sebagai berikut.



Tabel 3.6 Penyelarasan Program Unggulan Daerah dan Program Prioritas Perangkat Daerah

PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH	SATUAN	TAHUN					PROGRAM PRIORITAS PERANGKAT DAERAH
			2025	2026	2027	2028	2029	
100.000 Lapangan Kerja Baru	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja	Peserta Pelatihan	1800	2330	2330	2330	2330	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Kerja
	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan dan Pertanian							Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
								Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
								Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
								Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan dan Kebudayaan							Program Pengelolaan Pendidikan
	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perikanan							Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
								Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
								Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan,							Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
Program Pemasaran Pariwisata								



PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH	SATUAN	TAHUN					PROGRAM PRIORITAS PERANGKAT DAERAH
			2025	2026	2027	2028	2029	
	Olahraga, dan Pariwisata							Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja	Job Fair, Job Matching dan PKWT	15.000	16.000	17.000	18.000	20.000	Program Perencanaan Tenaga Kerja
								Program Penempatan Tenaga Kerja
								Program Hubungan Industrial
	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	WUB	0	720	720	720	720	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal	Trilyun Rupiah (Realisasi Investasi)	15,68	15,7	15,72	15,74	15,76	Program Pengembagan Iklim Penanaman Modal
	Jumlah Total		16.800	19.050	20.050	21.050	23.050	
Berobat Gratis Untuk Seluruh Warga Sidoarjo	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan	UHC	100%	100%	100%	100%	100%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Makan Bergizi Gratis untuk Warga Miskin dan Lansia	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial	Penerima	800	800	850	900	950	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
								Program Rehabilitasi Sosial



PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH	SATUAN	TAHUN					PROGRAM PRIORITAS PERANGKAT DAERAH
			2025	2026	2027	2028	2029	
20.000 Beasiswa Kuliah, SD, SMP, (SD-SMA Negeri) untuk Anak Yatim	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Olahraga, dan Pariwisata	Penerima	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial							Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan dan Kebudayaan							Program Pengelolaan Pendidikan
	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesekretariatan Daerah							Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
	Jumlah Total		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
2.000 Pupuk dan Benih Gratis untuk Petani dan Nelayan	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perikanan	Pembudidaya	50	200	200	200	200	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan dan Pertanian	Petani	1.950	1.800	1.800	1.800	1.800	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
	Jumlah Total		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
50 Juta Modal Usaha Mikro/UMKM	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan dan Asset	UMKM	5.040.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	Program Pengelolaan Keuangan Daerah



PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH	SATUAN	TAHUN					PROGRAM PRIORITAS PERANGKAT DAERAH
			2025	2026	2027	2028	2029	
500 Juta untuk Desa (BKK per Desa/Kelurahan + Insentif, BPD, LPMD, LPMK & Purna Kades)	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Orang	5.134	5.134	5.134	5.134	5.134	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
								Program Administrasi Pemerintahan Desa
	Dinas/Badan yang menangani Kecamatan	Kelurahan	-	28	28	28	28	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan dan Asset	Desa	-	318	318	318	318	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
20.000 UMKM Naik Kelas	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	UMKM	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
								Program Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian dan Perdagangan	IKM	150	150	150	150	150	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
								Program Pengembangan Ekspor
	Jumlah Total		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	



PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH	SATUAN	TAHUN					PROGRAM PRIORITAS PERANGKAT DAERAH
			2025	2026	2027	2028	2029	
Sidoarjo Membangun: Penataan Kota, Akses Jalan & Transportasi; PDAM Mudah dan Murah untuk Warga Sidoarjo; serta Bus Sekolah Gratis untuk Pelajar Sidoarjo	Dinas/Badan yang menangani Bidang PU Bina Marga SDA	Km	8,5	12	12	12	12	Program Penyelenggaraan Jalan
		Luas genangan	471	389	317	247	178	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Rumah Tangga	1226	1000	1000	1000	493	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
		Titik lokasi	49	5	5	5	3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
		Km	64,8	5	5	5	2,5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
		Rumah (RTLH)	200	400	400	500	500	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
		SR Perkotaan	3500	3500	3500	3500	3500	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum
	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan	Unit	-	5	5	5	5	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Tunjangan Naik 100%: untuk Tenaga Kesehatan, Kader Posyandu; dan	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan	Tenaga Kesehatan	-	-	225	225	225	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
		Kader Posyandu	12.794	13.000	13.200	13.400	13.600	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan



PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH	SATUAN	TAHUN					PROGRAM PRIORITAS PERANGKAT DAERAH
			2025	2026	2027	2028	2029	
GTT, Guru Swasta & Honorer, Insentif Guru Ngaji & Guru Agama Naik	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	Guru Ngaji dan Guru Agama	-	-	-	8.500	8.500	Program Pengelolaan Pendidikan
		Guru swasta	-	-	-	12.608	12.608	Program Pengelolaan Pendidikan
		GTT dan honorer	-	-	-	521	521	Program Pengelolaan Pendidikan
Membangun Pusat Kreativitas Anak Muda Sidoarjo	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata	Duta Wisata	346	-	346	-	346	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
		Lokasi	1	2	2	3	3	Program Pemasaran Pariwisata
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata							
	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata	Event	8	7	8	8	9	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
								Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
	2.000 Renovasi Warung Rakyat	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	Kegiatan Sosialisasi	4	4	4	4	4



PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH	SATUAN	TAHUN					PROGRAM PRIORITAS PERANGKAT DAERAH
			2025	2026	2027	2028	2029	
	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan dan Asset	Warung	400	400	400	400	400	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
	Dinas/Badan yang menangani Kecamatan							Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Perizinan Mudah untuk Bisnis Kondusif Melalui Program Smart City Sidoarjo	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal	Perusahaan	52	55	57	59	60	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
		Persentase perizinan yang diproses sesuai dengan ketentuan	100	100	100	100	100	Pogram Pelayanan Penanaman Modal
	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi dan Informatika	Pelatihan	-	2	2	2	2	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
Revitalisasi Taman Kota dan Perumahan	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Kecamatan	4	5	5	5	5	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
	Dinas/Badan yang menangani Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Lokasi (PSU RTH yang diserahkan)	-	5	5	5	5	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)



Tabel 3.7 Program Pembangunan Daerah Diselaraskan dengan Program Prioritas

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
VISI : MENATA DESA MEMBANGUN KOTA MENUJU SIDOARJO MENJADI METROPOLITAN INKLUSIF, BERDAYA SAING, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN						
PANCA KARYA DELTA I	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia			I Indeks Pembangunan Manusia		
Menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) Berintegritas, Berakhlak, dan Mewujudkan Jaminan Kesejahteraan Sosial yang Merata bagi Masyarakat Sidoarjo	yang Berdaya Saing dan Berkarakter	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing melalui Layanan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata		1 <i>Usia Harapan Hidup (UHH)</i>		
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Berobat Gratis Untuk Seluruh Warga Sidoarjo
			Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Tunjangan Naik 100%: untuk Tenaga Kesehatan, Kader Posyandu; dan GTT, Guru Swasta & Honorer, Insentif Guru Ngaji & Guru Agama Naik
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Lomba Rukun Tetangga (RT)
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Lomba Rukun Tetangga (RT)
					PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Membangun Pusat Kreativitas Anak Muda Sidoarjo
		Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing melalui Layanan Pendidikan yang Berkualitas dan Merata		2 <i>Harapan Lama Sekolah</i>		
					PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	20.000 Beasiswa Kuliah, SD, SMP, (SD-SMA Negeri) untuk Anak Yatim
			Meningkatnya skor literasi numerasi		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. 100.000 Lapangan Kerja Baru 2. 20.000 Beasiswa Kuliah, SD,



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
	Menurunnya Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo	Mewujudkan Jaminan Sosial Masyarakat yang Adaptif dan Merata		II 3	Tingkat Kemiskinan <i>Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index)</i>	3. SMP, (SD-SMA Negeri) untuk Anak Yatim Tunjangan Naik 100%: untuk Tenaga Kesehatan, Kader Posyandu; dan GTT, Guru Swasta & Honorar, Insentif Guru Ngaji & Guru Agama Naik
						1. 20.000 Beasiswa Kuliah, SD, SMP, (SD-SMA Negeri) untuk Anak Yatim 2. Membangun Pusat Kreativitas Anak Muda Sidoarjo
						PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA GESIT (GERAKAN LITERASI TERPADU)
PANCA KARYA DELTA II Memantapkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Merata bagi Pelaku Ekonomi	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan	Meningkatnya Derajat Integrasi Ekonomi Daerah Dengan Nasional dan Global		III IV 4	Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Pengangguran Terbuka <i>Ekspor Barang dan Jasa</i>	



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
			Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	e-TeraJANA (elektronik Tera Jamin Alat Normal dan Adil)
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Penyelenggaraan Pasar Murah dan Sembako Murah dalam rangka stabilisasi harga
			Meningkatkan pelaku usaha yang berorientasi ekspor		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	20.000 UMKM Naik Kelas
	Terselenggaranya Ekonomi Hijau dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan			5 <i>Indeks Ekonomi Hijau Kabupaten Sidoarjo</i>		
					PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	POJOK PITU (Posyandu Jiwa Konstruktif, kreatif, produktif, Inovatif Terpadu)
					PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Revitalisasi Taman Kota dan Perumahan
					PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Aplikasi TUKUOYUK
					PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	100.000 Lapangan Kerja Baru
	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Ketahanan Pangan yang didukung Iklim Usaha Kondusif, Berkembangnya Usaha Mikro dan pertumbuhan sektor primer, Industri Kecil, BUMD melalui Pemanfaatan Ipteks yang berkontribusi dalam Menyerap Tenaga Kerja			6 <i>Rasio PDRB Industri Pengolahan</i>		
			Meningkatnya realisasi pembangunan industri		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	20.000 UMKM Naik Kelas
			Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	DITAKOPUM (Digital Data Koperasi Usaha Mikro)
			Meningkatnya produktivitas koperasi		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	DITAKOPUM (Digital Data Koperasi Usaha Mikro)
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1. 100.000 Lapangan Kerja Baru 2. 20.000 UMKM Naik Kelas



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1. 20.000 UMKM Naik Kelas 2. 2.000 Renovasi Warung Rakyat
				7 <i>Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)</i>		
			Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Penyediaan Bahan Pangan dan Sembako yang terjangkau
			Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	100.000 Lapangan Kerja Baru
			Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Si Jebol (Vaksinasi PMK Jemput Bola)
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1. 100.000 Lapangan Kerja Baru 2. 2.000 Pupuk dan Benih Gratis untuk Petani dan Nelayan
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	100.000 Lapangan Kerja Baru
			Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	100.000 Lapangan Kerja Baru
			Meningkatnya pengendalian dan apenganggukan bencana pertanian		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pemetaan wilayah rawan bencana (banjir, kekeringan, serangan hama) dan penyediaan sarana dan Prasarana Darurat
				8 <i>Kontribusi ekonomi subsektor perikanan terhadap PDRB</i>		
			Meningkatnya produksi perikanan tangkap		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	100.000 Lapangan Kerja Baru



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
Menurunnya Ketimpangan Wilayah	Meningkatnya Kemandirian Desa		Meningkatnya produksi perikanan budidaya	9	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1. 100.000 Lapangan Kerja Baru 2. 2.000 Pupuk dan Benih Gratis Untuk Petani dan Nelayan
			Meningkatnya Konsumsi ikan oleh masyarakat		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	100.000 Lapangan Kerja Baru
				10	<i>Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif</i>	
			Meningkatnya daya tarik destinasi Wisata		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1. 100.000 Lapangan Kerja Baru 2. Membangun Pusat Kreativitas Anak Muda Sidoarjo
			Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1. 100.000 Lapangan Kerja Baru 2. Membangun Pusat Kreativitas Anak Muda Sidoarjo
			Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif		ROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	100.000 Lapangan Kerja Baru
					PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Membangun Pusat Kreativitas Anak Muda Sidoarjo
				11	<i>Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan</i>	
			Terkelolanya informasi tenaga kerja		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	100.000 Lapangan Kerja Baru
			Meningkatnya produktivitas tenaga kerja		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	100.000 Lapangan Kerja Baru
			Meningkatnya penempatan tenaga kerja		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	100.000 Lapangan Kerja Baru
			Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	100.000 Lapangan Kerja Baru
					V Rasio Gini	
				11	<i>Indeks Pemerataan Wilayah</i>	
			Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pelaksanaan Normalisasi sungai dan saluran drainase serta irigasi pertanian



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Sidoarjo Membangun: Penataan Kota, Akses Jalan & Transportasi; PDAM Mudah dan Murah untuk Warga Sidoarjo; serta Bus Sekolah Gratis untuk Pelajar Sidoarjo
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Sidoarjo Membangun: Penataan Kota, Akses Jalan & Transportasi; PDAM Mudah dan Murah untuk Warga Sidoarjo; serta Bus Sekolah Gratis untuk Pelajar Sidoarjo
			Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Sidoarjo Membangun: Penataan Kota, Akses Jalan & Transportasi; PDAM Mudah dan Murah untuk Warga Sidoarjo; serta Bus Sekolah Gratis untuk Pelajar Sidoarjo
			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	LESTARI (LAYANAN E-SEDOT TINJA PERIODIK)
			Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman kumuh		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Sidoarjo Membangun: Penataan Kota, Akses Jalan & Transportasi; PDAM Mudah dan Murah untuk Warga Sidoarjo; serta Bus Sekolah Gratis untuk Pelajar Sidoarjo
			Meningkatnya penyediaan PSU permukiman		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Revitalisasi Taman Kota dan Perumahan
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. 500 Juta untuk Desa (BKK per Desa/Kelurahan + Insentif, BPD, LPMD, LPMK & Purna Kades) 2. 2.000 Renovasi Warung Rakyat
				12 <i>Indeks Desa</i>		
			Digitalisasi dan Backup Arsip, Penataan dan Penyimpanan Arsip (Penataan arsip		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Pelaksanaan Pelatihan manajemen kerja sama desa dan Workshop penyusunan



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
			berdasarkan klasifikasi dan kode indeks), Pelatihan dan Sosialisasi (Pelatihan teknis pengelolaan arsip dan pedoman pengelolaan Arsip sesuai Standar ANRI)			MoU dan perjanjian antar desa, Pengembangan sistem informasi kerja sama desa.
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	500 Juta untuk Desa (BKK per Desa/Kelurahan + Insentif, BPD, LPMD, LPMK & Purna Kades)
			Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	500 Juta untuk Desa (BKK per Desa/Kelurahan + Insentif, BPD, LPMD, LPMK & Purna Kades)
					PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1. 50 Juta Modal Usaha Mikro/UMKM 2. 500 Juta untuk Desa (BKK per Desa/Kelurahan + Insentif, BPD, LPMD, LPMK & Purna Kades) 3. 2.000 Renovasi Warung Rakyat
PANCA KARYA DELTA III	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Digitalisasi		VI	Indeks Reformasi Birokrasi		
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Pelayanan Prima dengan Mengandalkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Bersih dan Gesit serta Pelayanan Publik Inovatif Berbasis Digital	13	<i>Indeks Pemerintahan Digital</i>		
			Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Penyebaran Informasi Prioritas, Update harian terkait program pemerintah, bantuan, dan kondisi darurat. Infografis dan video pendek edukatif di media sosial. dan Pelatihan jurnalistik warga dan etika komunikasi publik.
			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Perizinan Mudah untuk Bisnis Kondusif Melalui Program Smart City Sidoarjo



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
			Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Update Portal Satu Data Sidoarjo, Dukungan Indeks Pembangunan Statistik (IPS) dan Pembinaan Statistik Sektoral
			Meningkanya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Penyediaan Sistem dan Perangkat Persandian yaitu Penggunaan aplikasi enkripsi dokumen dan komunikasi (email, pesan instan), Instalasi perangkat lunak keamanan data (firewall, antivirus, VPN, Pengadaan token, sertifikat digital, dan sistem autentikasi ganda.
			14 <i>Indeks Pelayanan Publik</i>			
			Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	PELAYANAN VIA ONLINE DUKCAPIL (PLAVON DUKCAPIL) V2.0 (UPDATE)
			Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	PELAYANAN VIA ONLINE DUKCAPIL (PLAVON DUKCAPIL) V2.0 (UPDATE)
			Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	PELAYANAN VIA ONLINE DUKCAPIL (PLAVON DUKCAPIL) V2.0 (UPDATE)
			Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Digitalisasi dan Backup Arsip, Penataan dan Penyimpanan arsip berdasarkan klasifikasi dan kode indeks serta Pelatihan dan sosialisasi kearsiapan
			VII Indeks Infrastruktur Daerah			
			15 <i>ICOR</i>			
			Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Sidoarjo Membangun: Penataan Kota, Akses Jalan & Transportasi; PDAM Mudah dan Murah untuk Warga
PANCA KARYA DELTA IV Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas Merata dan Mendukung Pembangunan Sektor	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah yang Merata	Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Makro dan Daya Saing Daerah melalui Kualitas				



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
Potensial dan Sektor Strategis Berkelanjutan		Infrastruktur yang Merata				Sidoarjo; serta Bus Sekolah Gratis untuk Pelajar Sidoarjo
			Meningkatnya kualitas bangunan gedung		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penataan Gedung Pelayanan Publik Inklusif
			Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Penataan Bangunan dan Fasilitas Umum dan Penguatan Regulasi dan Pengawasan atas Bangunan Gedung
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Sidoarjo Membangun: Penataan Kota, Akses Jalan & Transportasi; PDAM Mudah dan Murah untuk Warga Sidoarjo; serta Bus Sekolah Gratis untuk Pelajar Sidoarjo
			Meningkatnya pengelolaan perlintasan kereta api		PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Respons cepat terhadap gangguan sinyal, kerusakan rel, atau kecelakaan dan lintasan sebidang kereta api, dan Kampanye keselamatan di stasiun dan jalur perlintasan sebidang.
				16	<i>Realisasi Investasi</i>	
			Meningkatkan kemudahan berinvestasi		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	SIPPADU NEXT GENERATION
			Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Perizinan Mudah untuk Bisnis Kondusif Melalui Program Smart City Sidoarjo
			Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Perizinan Mudah untuk Bisnis Kondusif Melalui Program Smart City Sidoarjo
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	SIPPADU NEXT GENERATION
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Resiliensi Bencana		Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Melalui		VIII	<i>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</i>	
				17	<i>Penurunan Emisi GRK Kumulatif</i>	



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
		Kualitas Lingkungan Hidup yang Lebih Baik	Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pemulihan Lingkungan (Penanaman kembali vegetasi di lahan rusak), Pembersihan sungai, saluran air, dan area terdampak tumpahan limbah. Penindakan terhadap pelanggaran izin lingkungan dan Pengukuran kualitas air, udara, dan tanah secara berkala.
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Penyelamatan dan Pemulihan Habitat, Respon Cepat terhadap Ancaman KEHATI dan Penanganan pencemaran air/tanah yang berdampak pada ekosistem dan Penegakan hukum terhadap perusakan habitat.
			Meningkatnya tata kelola persampahan		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	GERABAH (Gerakan Bebas Sampah)
	Mewujudkan Resiliensi Masyarakat Terhadap Bencana			18	<i>Indeks Risiko Bencana (IRB)</i>	
		Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	SIGAP (Sidoarjo Tanggap) 300s 2.0
		Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	SIGAP (Sidoarjo Tanggap) 300s 2.0
	PANCA KARYA DELTA V Mewujudkan Masyarakat yang Religius, Setara, Tentram dan Nyaman	Meningkatnya Masyarakat yang Inklusif, Aman, dan Religius serta Berkebudayaan		IX	<i>Indeks Kesalehan Sosial</i>	
		Meningkatnya Ketentraman, Rasa		19	<i>Indeks Rasa Aman</i>	



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
		Aman dan Toleransi dalam Kehidupan Masyarakat	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penegakan Perda dan Perkada, Penertiban PKL liar, bangunan tanpa izin, dan aktivitas mengganggu ketertiban. Penanganan kerumunan tak terkendali dan pelanggaran protokol sosial. Pengamanan acara publik dan kegiatan keagamaan.
				20	<i>Indeks Toleransi</i>	
			Meningkatnya wawasan kebangsaan dan ideologi		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA	DigiPol (Digitalisasi Pendidikan Politik)
			Meningkatnya penyelesaian konflik yang terjadi di masyarakat		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	DigiPol (Digitalisasi Pendidikan Politik)
		Mewujudkan Masyarakat yang Setara		21	<i>Indeks Ketimpangan Gender (IKG)</i>	
			Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Penyelenggaraan pelayanan PUG yang tepat sasaran
			Menurunnya kekerasan terhadap perempuan		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Sistem Pengaduan Kekerasan pada Perempuan dan Anak (SIGAP KEPAK)
			Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Sistem Pengaduan Kekerasan pada Perempuan dan Anak (SIGAP KEPAK)

3.2.4. Dukungan Program Daerah terhadap Program Prioritas Nasional dan Pelaksanaan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) pada RPJMN Tahun 2025-2029

RPJMD Kabupaten Sidoarjo Dukungan juga mendukung sejumlah Program Prioritas Nasional dan Pelaksanaan Kegiatan Prioritas Utama yang didasarkan pada RPJMN Tahun 2025- 2029. Berikut adalah program daerah di Kabupaten Sidoarjo yang mendukung Program Prioritas Nasional dan Pelaksanaan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) pada RPJMN Tahun 2025 – 2029.

Tabel 3.8 Dukungan Program Daerah Kabupaten Sidoarjo Terhadap Program Prioritas Nasional

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM PADA RPJMD 2025-2029
1	Prioritas Nasional 1	Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S)	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
2	Prioritas Nasional 2	Pengembangan Pangan Akuatik (<i>Blue Food</i>)	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
3	Prioritas Nasional 2	Pengembangan Pangan Hewani	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
4	Prioritas Nasional 2	Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program Penyuluhan Pertanian
5	Prioritas Nasional 2	Konservasi Sumber Daya Air	Program Pengelolaan Sumber Daya air



NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM PADA RPJMD 2025-2029
6	Prioritas Nasional 2	Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
7	Prioritas Nasional 2	Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS	Program Pengelolaan Persampahan Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
8	Prioritas Nasional 2	Penguatan Faktor Pendukung Ekonomi Digital	Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
9	Prioritas Nasional 2	Penguatan Ekonomi dan Industri Digital serta Sektor Strategis lainnya	Program Perencanaan dan Pengembangan Industri Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
10	Prioritas Nasional 2	Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
11	Prioritas Nasional 2	Peningkatan pengelolaan kualitas air sungai dan danau	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
12	Prioritas Nasional 2	Perubahan Perilaku dan Penguatan Tata Kelola Persampahan	Program Pengelolaan Persampahan Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
13	Prioritas Nasional 2	Peningkatan Pengumpulan dan Pengolahan Sampah serta Pemrosesan Residu di TPA/LUR	Program Pengelolaan Persampahan
14	Prioritas Nasional 2	Pengembangan Industri Garam dan Produk Olahan Hasil Laut	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Program Pengembangan Ekspor
15	Prioritas Nasional 3	Pengembangan dan Peningkatan Ekosistem Digital	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
16	Prioritas Nasional 3	Pengembangan Koperasi Sektor Produksi	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
17	Prioritas Nasional 4	Perluasan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini	Program Pengelolaan Pendidikan
18	Prioritas Nasional 4	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Program Pengelolaan Pendidikan Program Pengelolaan Keuangan Daerah



NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM PADA RPJMD 2025-2029
19	Prioritas Nasional 4	Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan
20	Prioritas Nasional 4	Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru meliputi formasi, rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, mobilitas, pembinaan karier profesional (e.g. pelatihan, in-service training), perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja	Program Pengelolaan Pendidikan Program Kepegawaian Daerah
21	Prioritas Nasional 4	Peningkatan Relevansi dan Perluasaan Akses Pendidikan Tinggi	Program Pengelolaan Pendidikan
22	Prioritas Nasional 4	Peningkatan Fungsi Intermediasi dan Layanan Pemanfaatan Iptek dan Inovasi	Program Riset dan Inovasi Daerah
23	Prioritas Nasional 4	Penurunan Kematian Ibu dan Anak	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
24	Prioritas Nasional 4	Pencegahan dan Penurunan Stunting	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pembinaan Keluarga Berencana Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Program Pengawasan Keamanan Pangan
25	Prioritas Nasional 4	Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
26	Prioritas Nasional 4	Penuntasan TBC	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
27	Prioritas Nasional 4	Eliminasi Penyakit Kusta & Schistosomiasis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
28	Prioritas Nasional 4	Investasi Pelayanan Kesehatan Primer	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
29	Prioritas Nasional 4	Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Bergerak dan Daerah Sulit Akses	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat



NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM PADA RPJMD 2025-2029
30	Prioritas Nasional 4	Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan
31	Prioritas Nasional 4	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Seni Budaya	Program Pengembangan Kesenian Tradisional
32	Prioritas Nasional 4	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Riset dan Inovasi	Program Riset dan Inovasi Daerah
33	Prioritas Nasional 4	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
34	Prioritas Nasional 5	Pengembangan Hilirisasi Rumput Laut	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
35	Prioritas Nasional 5	Pengembangan Industri Tekstil dan Produk Tekstil	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
36	Prioritas Nasional 5	Penguatan Industri Logam Dasar, Besi dan Baja	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
37	Prioritas Nasional 6	Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
38	Prioritas Nasional 7	Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	Program Perumusan, Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
39	Prioritas Nasional 7	Peningkatan Kesejahteraan ASN melalui Penerapan Konsep Total Reward Berbasis Kinerja ASN	Program Kepegawaian Daerah
40	Prioritas Nasional 7	Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
41	Prioritas Nasional 7	Ekstensifikasi dan Intensifikasi Penerimaan Perpajakan	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
42	Prioritas Nasional 8	Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Bab IV

Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Daerah

4.1 Program Perangkat Daerah

Pada bagian ini disajikan rumusan program Perangkat Daerah dan kerangka pendanaan selama 5 (lima) tahun periode RPJMD. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan jangka menengah, serta memperhatikan arah kebijakan pembangunan, maka disusun program-program pembangunan perangkat daerah yang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke depan, berdasarkan janji politik Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo.

Melalui penyajian Program dan Anggaran indikatif yang disusun berdasarkan aspek-aspek pembangunan dan urusan diharapkan dapat menjelaskan program apa saja yang direncanakan dalam RPJMD guna untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah berdasarkan tiap urusan yang diampu. Alokasi anggaran pada program Perangkat Daerah juga memperhatikan dinamika pembangunan yang harus ditindaklanjuti, salah satunya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah Sidoarjo. Selain itu penyusunan program pembangunan juga memperhatikan kemampuan dan kapasitas fiskal.

Penyajian secara detail program-program RPJMD yang selaras dengan Program Perangkat Daerah sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.1 di bawah ini.

**TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					975.358.920.370,000		907.366.098.777,000		1.029.239.420.752,000		1.179.378.328.494,000		1.176.018.642.950,000	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA					629.940.306.072,000		642.539.112.193,000		655.389.894.437,000		668.497.692.326,000		681.867.646.172,000	
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	92,53	92,54	92,55	629.940.306.072,000	92,56	642.539.112.193,000	92,57	655.389.894.437,000	92,58	668.497.692.326,000	92,59	681.867.646.172,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Nilai Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah (Nilai)	4,125	4,13	4,135		4,14		4,145		4,15		4,155		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	79,88	80,05	80,10		80,15		80,20		80,25		80,30		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase Rata-Rata Capaian Program Perangkat Daerah (%)	95	95,02	95,04		95,06		95,08		95,10		95,12		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah (%)	95,62	95,64	95,66		95,68		95,70		95,72		97,74		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					343.244.092.298,000		263.159.814.971,000		371.496.022.521,000		507.664.477.176,000		491.040.156.281,000	
Meningkatnya skor literasi numerasi	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (%)	87,88	87,89	87,90	343.244.092.298,000	87,91	263.159.814.971,000	87,92	371.496.022.521,000	87,93	507.664.477.176,000	87,94	491.040.156.281,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Iklim Inklusivitas SD (Nilai)	60,02	64,07	64,10		64,11		64,12		64,15		64,16		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Iklim Inklusivitas SMP (Nilai)	60,60	63,46	63,50		63,51		63,52		63,55		63,56		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Iklim Keamanan SD (Nilai)	76,79	79,43	79,45		79,46		79,47		79,48		79,49		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Iklim Keamanan SMP (Nilai)	73,10	74,78	74,80		74,80		74,81		74,82		74,83		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Iklim Kebhinekaan SD (Nilai)	75,98	76	76,01		76,02		76,03		76,04		76,05		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Iklim Kebinekaan SMP (Nilai)	74,40	74,42	74,43		74,44		74,45		74,46		74,47		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B (%)	88,26	89,58	89,58		89,99		90,40		90,81		91,23		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV (%)	0	87,32	87,35		87,40		88,45		89,47		88,50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional (Nilai)	91,15	91,21	91,21		91,22		91,27		91,28		91,30		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional (Nilai)	87,01	89,88	89,88		89,89		89,90		89,91		89,92		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	90,15	93,71	93,71		93,72		93,73		93,74		93,75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	86,62	90,43	90,43		90,44		90,46		90,47		90,48		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					1.021.455.000,000		783.133.387,000		1.105.529.499,000		1.510.751.183,000		1.461.279.113,000	
Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	0	0	100	1.021.455.000,000	100	783.133.387,000	100	1.105.529.499,000	100	1.510.751.183,000	100	1.461.279.113,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA					1.153.067.000,000		884.038.226,000		1.247.974.295,000		1.705.407.809,000		1.649.561.384,000	
Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra (Persentase)	0	0	70	1.153.067.000,000	75	884.038.226,000	80	1.247.974.295,000	85	1.705.407.809,000	90	1.649.561.384,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1.535.390.251.096,000		1.556.503.056.118,000		1.625.624.017.239,000		1.660.049.997.584,000		1.766.973.097.537,000	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA					1.254.138.104.437,000		1.279.220.866.525,000		1.304.805.283.856,000		1.330.901.389.533,000		1.357.519.417.324,000	
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	84,06	84,07	84,08	1.254.138.104.437,000	84,09	1.279.220.866.525,000	84,10	1.304.805.283.856,000	84,11	1.330.901.389.533,000	84,12	1.357.519.417.324,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah (%)	96,08	96,08	96,08		96,08		96,08		96,08		96,08		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Rata-Rata Capaian Program Perangkat Daerah (%)	95,64	95,65	95,66		95,67		95,68		95,69		95,70		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	96,59	96,6	96,61		96,62		96,63		96,64		96,65		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Nilai Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah (Nilai)	4,56	4,57	4,58		4,59		4,6		4,61		4,62		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					262.507.627.675,000		256.717.780.229,000		299.412.135.833,000		306.992.378.550,000		386.660.226.121,000	
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	79	80	81	262.507.627.675,000	82	256.717.780.229,000	83	299.412.135.833,000	84	306.992.378.550,000	85	386.660.226.121,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)	46	65	70		75		80		85		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Jumlah kematian ibu (Orang)	26	25	25		24		23		22		21		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Desa/ Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	70,23	71	75		80		85		90		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	0	0,7	0,7		0,7		0,7		0,7		0,7		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	26,10	23,4	23,4		23,4		23,4		23,4		23,4		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Proporsi fasilitas kesehatan sesuai standar (%)	60	60	62		62		63		63		64		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Proporsi Fasyankes Terakreditasi Paripurna (%)	0	40	42		44		46		48		50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	91,5	91	92		92		93		93,5		93,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					530.800.030,000		531.416.031,000		582.044.351,000		582.685.238,000		583.338.943,000	
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Rasio Nakes dan Named terhadap populasi (penduduk) (Per 1000 Penduduk)	3,18	3,18	3,18	530.800.030,000	3,18	531.416.031,000	3,18	582.044.351,000	3,18	582.685.238,000	3,18	583.338.943,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					130.405.754,000		133.013.869,000		135.674.146,000		138.387.629,000		141.155.382,000	
Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase fasyankes dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100	130.405.754,000	100	133.013.869,000	100	135.674.146,000	100	138.387.629,000	100	141.155.382,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					18.083.313.200,000		19.899.979.464,000		20.688.879.053,000		21.435.156.634,000		22.068.959.767,000	
Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Puskesmas yang mengembangkan UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat) sesuai standar (%)	0	86	88	18.083.313.200,000	90	19.899.979.464,000	92	20.688.879.053,000	94	21.435.156.634,000	96	22.068.959.767,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					525.153.579.188,000		620.715.329.894,000		448.876.242.892,000		458.139.694.811,000		521.339.866.941,000	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					21.027.596.348,000		21.448.148.274,000		21.877.111.240,000		22.314.653.465,000		22.760.946.534,000	
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	90	90	90	21.027.596.348,000	90	21.448.148.274,000	90	21.877.111.240,000	90	22.314.653.465,000	90	22.760.946.534,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Nilai Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah (Nilai)	4	4	4		4		4		4		4		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	80,05	80,05	80,05		80,05		80,05		80,05		80,05		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Persentase Rata-Rata Capaian Program Perangkat Daerah (%)	90	90	90		90		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah (%)	85	85	85		85		85		85		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					12.385.601.190,000		17.733.313.213,000		18.087.979.478,000		18.449.739.067,000		18.818.733.848,000	
Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase saluran irigasi dalam kondisi baik (%)	90	91	91,5	12.385.601.190,000	92	17.733.313.213,000	92,5	18.087.979.478,000	93	18.449.739.067,000	93,5	18.818.733.848,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					35.162.182.350,000		35.865.425.997,000		39.582.734.516,000		42.314.389.207,000		43.560.676.991,000	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota (Persentase)	45,02	46,5	46,78	35.162.182.350,000	50,33	35.865.425.997,000	53,87	39.582.734.516,000	57,42	42.314.389.207,000	57,43	43.560.676.991,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					9.334.048.950,000		9.696.729.929,000		20.962.504.527,000		10.558.775.418,000		10.756.882.766,000	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) (Persentase)	99,11	29,72	30,26	9.334.048.950,000	30,81	9.696.729.929,000	31,36	20.962.504.527,000	31,9	10.558.775.418,000	32,45	10.756.882.766,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					70.463.395.586,000		51.039.341.364,000		115.280.535.876,000		130.015.052.855,000		133.485.800.307,000	
Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase saluran drainase dalam kondisi baik (%)	29	29	29,5	70.463.395.586,000	30	51.039.341.364,000	30,5	115.280.535.876,000	31	130.015.052.855,000	31,5	133.485.800.307,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	93	100	27,78		55,56		83,33		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					9.441.076.400,000		309.629.897.928,000		29.822.495.887,000		30.018.945.804,000		70.219.324.720,000	
Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (Persentase)	0,44	0,56	0,68	9.441.076.400,000	0,79	309.629.897.928,000	0,91	29.822.495.887,000	1,03	30.018.945.804,000	1,15	70.219.324.720,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					310.916.900,000		817.135.238,000		3.323.477.942,000		329.947.501,000		5.336.546.451,000	
Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (Persentase)	70	100	100	310.916.900,000	100	817.135.238,000	100	3.323.477.942,000	100	329.947.501,000	100	5.336.546.451,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					364.615.266.500,000		172.023.573.088,000		197.428.403.266,000		200.576.971.331,000		213.788.510.758,000	
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Persentase jalan kabupaten Sidoarjo dalam kondisi mantap (%)	91,4	92	92,4	364.615.266.500,000	93	172.023.573.088,000	93,4	197.428.403.266,000	94	200.576.971.331,000	94	213.788.510.758,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					164.703.200,000		167.997.264,000		171.357.209,000		174.784.353,000		178.280.040,000	
Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (Persentase)	0	20	40	164.703.200,000	60	167.997.264,000	80	171.357.209,000	100	174.784.353,000	100	178.280.040,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					2.248.791.764,000		2.293.767.599,000		2.339.642.951,000		3.386.435.810,000		2.434.164.526,000	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah (%)	71,28	66,75	66,75	2.248.791.764,000	67,75	2.293.767.599,000	68,75	2.339.642.951,000	69,75	3.386.435.810,000	70,75	2.434.164.526,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					35.818.557.955,000		41.533.929.113,000		50.363.607.695,000		51.107.879.849,000		56.867.037.445,000	
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					16.762.367.074,000		17.097.614.415,000		17.439.566.703,000		17.788.358.037,000		18.144.125.198,000	
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	80,1	80,15	80,2	16.762.367.074,000	80,25	17.097.614.415,000	80,3	17.439.566.703,000	80,35	17.788.358.037,000	80,4	18.144.125.198,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah (%)	88,64	89	89,1		89,2		89,3		89,4		89,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Persentase Rata-Rata Capaian Program Perangkat Daerah (%)	87,3	88	89		90		91		91		91		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Nilai Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah (Nilai)	3,5	3,6	3,7		3,8		3,9		4		4,1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	96	97	97,5		98		98		98		98		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					2.017.690.181,000		2.058.043.984,000		2.099.204.864,000		2.141.188.961,000		2.184.012.740,000	
Terperuhnya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase Rumah korban pasca bencana dan Rumah susun yang tersedia (%)	90	90	90	2.017.690.181,000	90	2.058.043.984,000	90	2.099.204.864,000	90	2.141.188.961,000	90	2.184.012.740,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					50.350.000,000		50.357.000,000		50.364.140,000		50.371.423,000		50.378.851,000	
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentasi Luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani (%)	99,96	99,93	100	50.350.000,000	100	50.357.000,000	100	50.364.140,000	100	50.371.423,000	100	50.378.851,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					12.578.500.000,000		12.830.070.000,000		16.186.671.400,000		16.448.404.828,000		16.715.372.924,000	
Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Persentase kawasan yang dilakukan Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha (%)	99,96	99,93	100	12.578.500.000,000	100	12.830.070.000,000	100	16.186.671.400,000	100	16.448.404.828,000	100	16.715.372.924,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					4.409.650.700,000		9.497.843.714,000		14.587.800.588,000		14.679.556.600,000		19.773.147.732,000	
Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (Persentase)	22,24	24,11	25,98	4.409.650.700,000	27,85	9.497.843.714,000	29,72	14.587.800.588,000	31,59	14.679.556.600,000	33,46	19.773.147.732,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					55.771.540.682,000		57.686.971.495,000		60.724.710.925,000		61.885.205.143,000		63.368.909.246,000	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					48.876.091.571,000		49.853.613.402,000		50.850.685.670,000		51.867.699.384,000		52.905.053.372,000	
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	98,13	98,14	98,15	26.736.616.906	98,15	27.271.349.244	98,16	27.816.776.229	98,17	28.373.111.754	98,18	28.940.573.989	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketertertaman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (Satpol PP)



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Nilai Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah (Nilai)	3,076	3,51	3,65	22.139.474.665	3,8	22.582.264.158	3,9	23.033.909.441	3,95	23.494.587.630	4,01	23.964.479.385	Dinas/Badan yang menangan Bidang Ketenteraman Dan Keteriban Umum Serta <u>Perindungan Masyarakat (Satpol PP)</u>	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	78,11	79	80,2		80,65		80,9		81,3		81,5		Dinas/Badan yang menangan Bidang Ketenteraman Dan Keteriban Umum Serta <u>Perindungan Masyarakat (Satpol PP)</u>	
	Persentase Rata-Rata Capaian Program Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangan Bidang Ketenteraman Dan Keteriban Umum Serta <u>Perindungan Masyarakat (Satpol PP)</u>	
	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah (%)	96,48	96,49	96,5		96,51		96,52		96,53		96,54		Dinas/Badan yang menangan Bidang Ketenteraman Dan Keteriban Umum Serta <u>Perindungan Masyarakat (Satpol PP)</u>	
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	97,08	97,10	97,10		97,10		97,10		97,10		97,10		97,10	Dinas/Badan yang menangan Bidang Ketenteraman Dan Keteriban Umum Serta <u>Perindungan Masyarakat (Satpol PP)</u>
	Nilai Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah (Nilai)	3.587	3,8	4		4,2		4,3		4,4		4,5		Dinas/Badan yang menangan Bidang Ketenteraman Dan Keteriban Umum Serta <u>Perindungan Masyarakat (Satpol PP)</u>	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	81,68	83	83,5		84		84,5		85		85,5		Dinas/Badan yang menangan Bidang Ketenteraman Dan Keteriban Umum Serta <u>Perindungan Masyarakat (Satpol PP)</u>	
	Persentase Rata-Rata Capaian Program Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangan Bidang Ketenteraman Dan Keteriban Umum Serta <u>Perindungan Masyarakat (Satpol PP)</u>	
	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah (%)	90	90	90		90		90		90		90		Dinas/Badan yang menangan Bidang Ketenteraman Dan Keteriban Umum Serta <u>Perindungan Masyarakat (Satpol PP)</u>	
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					3.219.539.306,000		3.283.930.092,000		3.349.608.694,000		3.416.600.868,000		3.484.932.885,000	Dinas/Badan yang menangan Bidang Ketenteraman Dan Keteriban Umum Serta <u>Perindungan Masyarakat (Satpol PP)</u>	
Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	100	100	100	3.219.539.306,000	100	3.283.930.092,000	100	3.349.608.694,000	100	3.416.600.868,000	100	3.484.932.885,000	Dinas/Badan yang menangan Bidang Ketenteraman Dan Keteriban Umum Serta <u>Perindungan Masyarakat (Satpol PP)</u>	
	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase)	0	85	85,6		86		86,4		87,2		87,9		Dinas/Badan yang menangan Bidang Ketenteraman Dan Keteriban Umum Serta <u>Perindungan Masyarakat (Satpol PP)</u>	
	Persentase Penyelenggaraan Tibumtramas (Persentase)	0	80	80,5		81		81,3		81,9		82,3		Dinas/Badan yang menangan Bidang Ketenteraman Dan Keteriban Umum Serta <u>Perindungan Masyarakat (Satpol PP)</u>	
	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	85	85,5	86		86,5		87		87,5		88		Dinas/Badan yang menangan Bidang Ketenteraman Dan Keteriban Umum Serta <u>Perindungan Masyarakat (Satpol PP)</u>	
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					2.482.873.085,000		2.532.530.547,000		2.583.181.158,000		2.634.844.780,000		2.687.541.676,000	Dinas/Badan yang menangan Bidang Ketenteraman Dan Keteriban Umum Serta <u>Perindungan Masyarakat (Satpol PP)</u>	
Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase bantuan pasca bencana yang terealisasi berdasarkan laporan Jitupasna (%)	100	100	100	2.482.873.085,000	100	2.532.530.547,000	100	2.583.181.158,000	100	2.634.844.780,000	100	2.687.541.676,000	Dinas/Badan yang menangan Bidang Ketenteraman Dan Keteriban Umum Serta <u>Perindungan Masyarakat (Satpol PP)</u>	
	Persentase korban bencana yang terehabilitasi (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangan Bidang Ketenteraman Dan Keteriban Umum Serta <u>Perindungan Masyarakat (Satpol PP)</u>	
	Persentase logistik kebencanaan yang tersalurkan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangan Bidang Ketenteraman Dan Keteriban Umum Serta <u>Perindungan Masyarakat (Satpol PP)</u>	
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					1.193.036.720,000		2.016.897.454,000		3.941.235.403,000		3.966.060.111,000		4.291.381.313,000	Dinas/Badan yang menangan Bidang Ketenteraman Dan Keteriban Umum Serta <u>Perindungan Masyarakat (Satpol PP)</u>	
Meningkatnya kapasitas pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Persentase satuan petugas PMK yang memiliki sertifikasi sesuai standar kualifikasi (%)	80	85	85	1.193.036.720,000	90	2.016.897.454,000	95	3.941.235.403,000	100	3.966.060.111,000	100	4.291.381.313,000	Dinas/Badan yang menangan Bidang Ketenteraman Dan Keteriban Umum Serta <u>Perindungan Masyarakat (Satpol PP)</u>	
	Persentase mobil PMK dengan kondisi layak fungsi (%)	32	85	85		90		95		100		100		Dinas/Badan yang menangan Bidang Ketenteraman Dan Keteriban Umum Serta <u>Perindungan Masyarakat (Satpol PP)</u>	
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					44.669.495.459,000		37.175.185.367,000		41.855.239.075,000		43.399.943.855,000		44.362.092.733,000	Dinas/Badan yang menangan Bidang Ketenteraman Dan Keteriban Umum Serta <u>Perindungan Masyarakat (Satpol PP)</u>	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA					11.691.778.610,000		11.925.614.182,000		12.164.126.466,000		12.407.408.995,000		12.655.557.175,000	Dinas/Badan yang menangan Bidang Ketenteraman Dan Keteriban Umum Serta <u>Perindungan Masyarakat (Satpol PP)</u>	
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	97,15	97,17	97,20	11.691.778.610,000	97,25	11.925.614.182,000	97,30	12.164.126.466,000	97,35	12.407.408.995,000	97,40	12.655.557.175,000	Dinas/Badan yang menangan Bidang Sosial	
	Nilai Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah (Nilai)	4,54	4,55	4,56		4,57		4,58		4,59		4,6		Dinas/Badan yang menangan Bidang Sosial	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	80,09	80,11	80,13		80,15		80,17		80,19		81,01		Dinas/Badan yang menangan Bidang Sosial	
	Persentase Rata-Rata Capaian Program Perangkat Daerah (%)	100	90	90,05		91		92,05		93		93,05		Dinas/Badan yang menangan Bidang Sosial	
	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah (%)	95,79	95,80	95,81		95,82		95,83		95,84		95,85		Dinas/Badan yang menangan Bidang Sosial	
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					732.039.353,000		746.680.140,000		761.613.743,000		776.846.017,000		792.382.938,000	Dinas/Badan yang menangan Bidang Sosial	
Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase PSKS yang berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial (%)	60	60	60	732.039.353,000	60	746.680.140,000	60	761.613.743,000	60	776.846.017,000	60	792.382.938,000	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial	
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					17.292.334.572,000		9.250.481.263,000		11.722.040.888,000		12.697.081.706,000		13.078.173.340,000	Dinas/Badan yang menangan Bidang Sosial	
Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase PPKS yang Terlayani (%)	61	62,51	63	17.292.334.572,000	64	9.250.481.263,000	65	11.722.040.888,000	66	12.697.081.706,000	67	13.078.173.340,000	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial	
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					14.892.892.924,000		15.190.750.782,000		17.144.565.798,000		17.454.457.114,000		17.770.546.256,000	Dinas/Badan yang menangan Bidang Sosial	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial (%)	98	98,5	98,55	14.892.892.924,000	98,6	15.190.750.782,000	98,65	17.144.565.798,000	98,7	17.454.457.114,000	98,75	17.770.546.256,000	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					60.450.000,000		61.659.000,000		62.892.180,000		64.150.023,000		65.433.024,000	
Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang tertangani (%)	100	100	100	60.450.000,000	100	61.659.000,000	100	62.892.180,000	100	64.150.023,000	100	65.433.024,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					26.415.714.474,000		27.094.028.764,000		27.682.909.338,000		28.282.567.524,000		28.843.218.874,000	
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9.224.026.027,000		9.408.506.548,000		9.596.676.678,000		9.788.610.212,000		9.984.382.416,000	
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah	Nlai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	83,71	83,71	83,72	9.224.026.027,000	83,73	9.408.506.548,000	83,74	9.596.676.678,000	83,75	9.788.610.212,000	83,76	9.984.382.416,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah (%)	93,04	93,04	93,05		93,06		93,07		93,08		93,08		Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	94,27	94,3	94,35		94,37		94,38		94,39		94,39		Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
	Nilai Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah (Nilai)	4,77	4,77	4,77		4,77		4,77		4,77		4,77		Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
	Persentase Rata-Rata Capaian Program Perangkat Daerah (%)	85,69	85,70	85,71		85,72		85,73		85,74		85,74		Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					96.275.000,000		98.200.500,000		100.164.510,000		102.167.800,000		104.211.156,000	
Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang tersusun (%)	55	57	59	96.275.000,000	61	98.200.500,000	63	100.164.510,000	65	102.167.800,000	67	104.211.156,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					12.190.800.000,000		12.534.616.000,000		12.783.308.320,000		13.036.974.486,000		13.295.713.976,000	
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Instruktur Bersertifikat Kompetensi (%)	61,36	61,36	62	12.190.800.000,000	62,5	12.534.616.000,000	63	12.783.308.320,000	63,5	13.036.974.486,000	64	13.295.713.976,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
	Persentase LPK yang mendapatkan pendampingan izin (%)	43,12	45,87	47,71		52,29		56,88		61,47		66,06		Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
	Persentase peserta pelatihan yang lulus uji kompetensi (%)	94,7	94,72	94,75		94,8		94,85		94,9		94,95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					1.137.725.225,000		1.210.479.730,000		1.283.689.324,000		1.357.363.110,000		1.381.510.372,000	
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase pencari kerja yang difasilitasi penempatannya (%)	60	61	62	1.137.725.225,000	64	1.210.479.730,000	66	1.283.689.324,000	68	1.357.363.110,000	70	1.381.510.372,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					3.766.888.222,000		3.842.225.986,000		3.919.070.506,000		3.997.451.916,000		4.077.400.954,000	
Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindung	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial (%)	100	100	100	3.766.888.222,000	100	3.842.225.986,000	100	3.919.070.506,000	100	3.997.451.916,000	100	4.077.400.954,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
	Persentase perusahaan yang memiliki LKS Bipartit (%)	26	26,10	26,24		26,47		26,70		26,93		27,16		Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					9.026.658.344,000		9.207.191.511,000		9.391.335.341,000		9.579.162.045,000		9.770.745.288,000	
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					2.830.561.100,000		2.887.172.322,000		2.944.915.768,000		3.003.814.083,000		3.063.890.365,000	
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Partisipasi perempuan dalam politik,ekonomi,sosial (Indeks)	67,30	67,35	67,4	2.830.561.100,000	67,5	2.887.172.322,000	67,6	2.944.915.768,000	67,7	3.003.814.083,000	67,8	3.063.890.365,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					233.876.694,000		238.554.228,000		243.325.312,000		248.191.818,000		253.155.655,000	
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Jumlah lembaga perlindungan perempuan dan anak yang di advokasi dan dibina (Lembaga)	295	300	305	233.876.694,000	310	238.554.228,000	315	243.325.312,000	320	248.191.818,000	325	253.155.655,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Jumlah rekomendasi tindak lanjut peningkatan perlindungan perempuan dan anak (Rekomendasi)	0	28	28		28		28		28		28		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) (%)	0	54	54		54		54		54		54		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					517.094.000,000		527.435.880,000		537.984.598,000		548.744.289,000		559.719.175,000	
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Jumlah kecamatan, desa/kelurahan menuju layak anak yang di advokasi dan dibina (Lembaga)	371	371	371	517.094.000,000	371	527.435.880,000	371	537.984.598,000	371	548.744.289,000	371	559.719.175,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah lembaga pemenuhan hak anak yang di advokasi dan dibina (Lembaga)	190	191	192		193		193		194		195		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					5.445.126.550,000		5.554.029.081,000		5.665.109.663,000		5.778.411.855,000		5.893.980.093,000	
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Terlaksananya layanan AMPK yang terintegrasi dan komprehensif (%)	100	100	100	5.445.126.550,000	100	5.554.029.081,000	100	5.665.109.663,000	100	5.778.411.855,000	100	5.893.980.093,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					32.277.506.767,000		32.772.056.902,000		34.129.498.040,000		34.800.088.000,000		35.484.089.760,000	
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					29.146.058.167,000		29.783.979.330,000		30.583.658.917,000		31.195.332.095,000		31.819.238.737,000	
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	84,37	84,38	84,39	29.146.058.167,000	84,40	29.783.979.330,000	84,41	30.583.658.917,000	84,42	31.195.332.095,000	84,43	31.819.238.737,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
	Persentase Rata-Rata Capaian Program Perangkat Daerah (%)	93,21	93	93,05		93,1		93,15		93,20		93,25		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah (%)	95,44	95,45	95,46		95,47		95,48		95,49		95,50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
	Nilai Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah (Nilai)	4,23	4,24	4,25		4,26		4,27		4,28		4,29		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	95,57	95	95,2		95,4		95,6		95,8		96		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					54.725.000,000		54.819.500,000		554.915.890,000		555.014.208,000		555.114.492,000	
Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan (Persentase)	0	0	10	54.725.000,000	10	54.819.500,000	50	554.915.890,000	50	555.014.208,000	50	555.114.492,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					2.670.673.600,000		2.520.087.072,000		2.570.488.813,000		2.621.898.590,000		2.674.336.561,000	
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Tingkat Konsumsi Beras perkapita perhari (Gram/Kapita/Hari)	236	236	235	2.670.673.600,000	235	2.520.087.072,000	235	2.570.488.813,000	235	2.621.898.590,000	235	2.674.336.561,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					55.950.000,000		56.069.000,000		56.190.380,000		56.314.187,000		56.440.471,000	
Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Prosentase desa rawan pangan yang ditangani (%)	10	10	15	55.950.000,000	20	56.069.000,000	20	56.190.380,000	20	56.314.187,000	20	56.440.471,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					350.100.000,000		357.102.000,000		364.244.040,000		371.528.920,000		378.959.499,000	
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Prosentase pangan segar yang aman dikonsumsi (%)	84,6	84,6	85	350.100.000,000	85	357.102.000,000	85,1	364.244.040,000	85,1	371.528.920,000	85,2	378.959.499,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					100.586.000,000		10.100.597.720,000		10.100.609.674,000		10.100.621.868,000		100.634.306,000	
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					50.293.000,000		50.298.860,000		50.304.837,000		50.310.934,000		50.317.153,000	
Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Terfasilitasinya permasalahan pertanahan sesuai prosedur (%)	100	100	100	50.293.000,000	100	50.298.860,000	100	50.304.837,000	100	50.310.934,000	100	50.317.153,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMERANGKULAN					50.293.000,000		10.050.298.860,000		10.050.304.837,000		10.050.310.934,000		50.317.153,000	
Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Terfasilitasinya pengadaan tanah pemerintah non Perangkat Daerah sesuai prosedur (%)	100	100	100	50.293.000,000	100	10.050.298.860,000	100	10.050.304.837,000	100	10.050.310.934,000	100	50.317.153,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					141.976.015.473,000		145.073.535.783,000		151.874.006.498,000		154.328.486.627,000		157.888.056.360,000	
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					69.005.836.719,000		70.385.953.453,000		71.793.672.522,000		73.229.545.973,000		74.694.136.892,000	
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	85,3	85,35	85,4	69.005.836.719,000	85,45	70.385.953.453,000	85,5	71.793.672.522,000	85,55	73.229.545.973,000	85,6	74.694.136.892,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah (%)	83	83,5	84		84,5		85		85,5		86		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Persentase Rata-Rata Capaian Program Perangkat Daerah (%)	90	90	90		90		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Nilai Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah (Nilai)	4,305	4,4	4,45		4,5		4,55		4,6		4,65		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	95,27	96	96		96		97		97		97		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					52.625.000,000		52.677.500,000		52.731.050,000		552.785.671,000		52.841.384,000	
Meningkatnya efektifitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti (Persentase)	0	0	70	52.625.000,000	70	52.677.500,000	70	52.731.050,000	70	552.785.671,000	70	52.841.384,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					1.423.298.876,000		1.651.764.854,000		4.280.800.151,000		4.510.416.153,000		3.040.624.477,000	
Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (Indeks)	49,71	65,79	65,89	1.423.298.876,000	65,99	1.651.764.854,000	66,09	4.280.800.151,000	66,19	4.510.416.153,000	66,29	3.040.624.477,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Indeks Kualitas Udara (Indeks)	71,91	77,63	77,73		77,83		77,93		78,03		78,13		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					23.968.099.235,000		24.667.461.220,000		26.625.810.444,000		26.093.326.653,000		29.320.193.186,000	
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH (Persentase)	2,5	2,53	2,6	23.968.099.235,000	2,62	24.667.461.220,000	2,63	26.625.810.444,000	2,64	26.093.326.653,000	2,65	29.320.193.186,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					100.000.000,000		102.000.000,000		104.040.000,000		106.120.800,000		108.243.216,000	
Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	0	100	100	100.000.000,000	100	102.000.000,000	100	104.040.000,000	100	106.120.800,000	100	108.243.216,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					95.000.000,000		96.900.000,000		98.838.000,000		100.814.760,000		102.831.055,000	
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan pemerintah daerah Kab/Kota (%)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)	84	85	85	95.000.000,000	86	96.900.000,000	87	98.838.000,000	88	100.814.760,000	89	102.831.055,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					117.347.500,000		119.694.450,000		122.088.339,000		124.530.106,000		127.020.708,000	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	100	100	100	117.347.500,000	100	119.694.450,000	100	122.088.339,000	100	124.530.106,000	100	127.020.708,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					52.625.000,000		52.677.500,000		52.731.050,000		52.785.671,000		52.841.384,000	
Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)	15,44	17	18,5	52.625.000,000	20	52.677.500,000	21,5	52.731.050,000	23	52.785.671,000	24,5	52.841.384,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					424.714.962,000		433.209.261,000		441.873.446,000		450.710.915,000		459.725.134,000	
Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase)	100	100	100	424.714.962,000	100	433.209.261,000	100	441.873.446,000	100	450.710.915,000	100	459.725.134,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					46.736.468.181,000		47.511.197.545,000		48.301.421.496,000		49.107.449.925,000		49.929.598.924,000	
Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	46	46,5	47	46.736.468.181,000	47,5	47.511.197.545,000	48	48.301.421.496,000	48,5	49.107.449.925,000	49	49.929.598.924,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah ((%))	58,99	59,19	59,39		59,59		59,79		59,99		60,19		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah ((%))	19,5	26,1	27,1		28,1		29,1		30,1		31,1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					16.319.982.717,000		20.684.464.771,000		19.058.154.067,000		21.439.317.147,000		19.828.103.489,000	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					14.745.054.608,000		19.078.038.100,000		17.419.598.862,000		19.767.990.839,000		18.123.350.656,000	
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah	Nilai Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah (Nilai)	4,66	4,5	4,51	14.745.054.608,000	4,52	19.078.038.100,000	4,53	17.419.598.862,000	4,54	19.767.990.839,000	4,55	18.123.350.656,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	85	85,5	86		86,50		87		87,50		88		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Rata-Rata Capaian Program Perangkat Daerah (%)	98,93	98,94	98,95		98,96		98,97		98,99		99		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah (%)	93,88	93,89	93,90		93,91		93,92		93,93		93,94		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					379.108.005,000		386.690.165,000		394.423.968,000		402.312.448,000		410.358.696,000	
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterbitkan (%)	100	100	100	379.108.005,000	100	386.690.165,000	100	394.423.968,000	100	402.312.448,000	100	410.358.696,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase layanan kepemilikan KK yang sesuai ketentuan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase pelaporan penduduk rentan yang dapat diselesaikan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase pelayanan pindah datang / keluar yang dapat diselesaikan tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					317.031.871,000		323.372.508,000		329.839.959,000		336.436.757,000		343.165.493,000	
Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100	100	317.031.871,000	100	323.372.508,000	100	329.839.959,000	100	336.436.757,000	100	343.165.493,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					824.788.233,000		841.283.998,000		858.109.678,000		875.271.871,000		892.777.308,000	
Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Prosentase pelayanan kebutuhan data kependudukan yang tepat waktu (%)	100	100	100	824.788.233,000	100	841.283.998,000	100	858.109.678,000	100	875.271.871,000	100	892.777.308,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Prosentase Sarpras SIAK yang layak fungsi (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					54.000.000,000		55.080.000,000		56.181.600,000		57.305.232,000		58.451.336,000	
Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Jumlah data profil kependudukan yang disusun (Dokumen)	1	1	1	54.000.000,000	1	55.080.000,000	1	56.181.600,000	1	57.305.232,000	1	58.451.336,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					84.622.876.887,000		86.314.334.425,000		88.089.621.114,000		89.849.413.535,000		91.644.401.806,000	
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.079.998.282,000		7.221.598.248,000		7.366.030.213,000		7.513.350.817,000		7.663.617.833,000	
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	94	94,5	95	7.079.998.282,000	95,5	7.221.598.248,000	96	7.366.030.213,000	96,5	7.513.350.817,000	97	7.663.617.833,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Nilai Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah (Nilai)	4,052	4,1	4,15		4,2		4,25		4,3		4,35		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	82,58	83	83,5		84		84,5		85		85,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Persentase Rata-Rata Capaian Program Perangkat Daerah (%)	97	97,2	97,4		97,6		97,8		98		98,2		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah (%)	90	90	90		90		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA					53.856.362,000		53.933.489,000		54.012.159,000		54.092.402,000		54.174.250,000	
Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitas Penataan Desa (Persentase)	0	0,31	0,63	53.856.362,000	0,94	53.933.489,000	1,26	54.012.159,000	1,57	54.092.402,000	1,89	54.174.250,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					31.000.000,000		31.620.000,000		82.252.400,000		82.897.448,000		83.555.397,000	
Meningkatnya efektifitas kerjasama desa	Persentase Fasilitas Kerjasama Desa (Persentase)	22,96	22,96	23,27	31.000.000,000	23,58	31.620.000,000	23,90	82.252.400,000	24,21	82.897.448,000	24,53	83.555.397,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					11.397.033.983,000		11.624.974.663,000		11.857.474.156,000		12.094.623.639,000		12.336.516.112,000	
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	23,90	35,85	47,80	11.397.033.983,000	59,75	11.624.974.663,000	71,70	11.857.474.156,000	83,65	12.094.623.639,000	95,60	12.336.516.112,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					66.060.988.260,000		67.382.208.025,000		68.729.852.186,000		70.104.449.229,000		71.506.538.214,000	
Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	0	4,09	8,18	66.060.988.260,000	12,26	67.382.208.025,000	16,35	68.729.852.186,000	20,44	70.104.449.229,000	24,53	71.506.538.214,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					22.534.968.569,000		22.985.667.940,000		23.445.381.299,000		23.914.288.924,000		24.392.574.703,000	
2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					10.702.443.369,000		10.916.492.236,000		11.134.822.081,000		11.357.518.522,000		11.584.668.893,000	
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	93,14	93,24	93,34	10.702.443.369,000	93,44	10.916.492.236,000	93,54	11.134.822.081,000	93,64	11.357.518.522,000	93,74	11.584.668.893,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Nilai Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah (Nilai)	4,056	4,06	4,07		4,08		4,09		4,1		4,11		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	81,42	81,52	81,62		81,72		81,82		81,92		82,02		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Rata-Rata Capaian Program Perangkat Daerah (%)	96,51	96,52	96,53		96,54		96,55		96,56		96,66		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah (%)	97,41	97,42	97,43		97,43		97,44		97,45		97,46		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					756.365.000,000		771.492.300,000		786.922.146,000		802.660.589,000		818.713.800,000	
Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Angka)	39,30	30,50	30,50	756.365.000,000	30,50	771.492.300,000	30,50	786.922.146,000	30,50	802.660.589,000	30,50	818.713.800,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase hasil kajian yang ditindaklanjuti sebagai kebijakan (%)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana		
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					8.958.718.200,000		9.137.892.564,000		9.320.650.415,000		9.507.063.423,000		9.697.204.692,000	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi modern (modern Contracepsi Prevalance Rate/mCPR (Angka)	70,17	70,17	70,23	8.958.718.200,000	70,25	9.137.892.564,000	70,28	9.320.650.415,000	70,3	9.507.063.423,000	70,33	9.697.204.692,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri (Persentase)	34,21	34,21	44,21		49,21		54,21		59,21		64,21		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) (Persentase)	17,5	17,5	17,35		17,25		17,15		17,10		17,05		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase tingkat putus pakai pemakaian kontrasepsi(Droup out/ DO (%)	19,07	19,07	18,85		18,75		18,65		18,55		18,45		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi (UNMETNEED) (%)	7,11	7,11	6,95		6,85		6,75		6,65		6,55		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					2.117.442.000,000		2.159.790.840,000		2.202.986.657,000		2.247.046.390,000		2.291.987.318,000	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahterah (KS)	Persentase Pendewasaan Usia Perkawinan (%)	0,66	0,66	0,76	2.117.442.000,000	0,76	2.159.790.840,000	0,76	2.202.986.657,000	0,76	2.247.046.390,000	0,76	2.291.987.318,000	2.08.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					113.782.387.378,000		119.458.035.126,000		136.229.195.827,000		127.396.779.743,000		146.511.715.337,000	
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA					40.906.153.799,000		41.418.276.875,000		42.246.642.412,000		43.091.575.260,000		43.953.406.765,000	
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	92	92,10	92,15	40.906.153.799,000	92,20	41.418.276.875,000	92,25	42.246.642.412,000	92,30	43.091.575.260,000	92,35	43.953.406.765,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
	Nilai Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah (Nilai)	4,07	4,1	4,1		4,15		4,2		4,25		4,3		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	78	79	80,1		80,3		80,5		80,7		80,9		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
	Persentase Rata-Rata Capaian Program Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah (%)	89,11	89,25	89,25		89,5		89,5		89,5		89,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					71.596.318.201,000		76.904.244.565,000		90.641.329.456,000		80.958.156.045,000		96.205.319.166,000	
Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Persentase pembinaan LLAJ (%)	0	16,67	33,33	71.596.318.201,000	50	76.904.244.565,000	66,67	90.641.329.456,000	83,33	80.958.156.045,000	100	96.205.319.166,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
	Persentase peningkatan pelayanan transportasi (%)	0	0	16,67		41,67		66,67		75		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
	Persentase titik parkir yang dikelola (%)	0	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
	Prosentase kendaraan wajib uji yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan (%)	75	93	94		95		96		97		98		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
	Prosentase Pelayanan / pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C (%)	73,5	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
	Persentase perlengkapan jalan yang tersedia dan berfungsi dengan baik (%)	27,22	35,22	42,61		52,57		62,73		72,79		82,85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					47.683.189,000		48.636.853,000		99.609.590,000		100.601.782,000		101.613.817,000	
Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut	Persentase titik penyeberangan sungai yang terfasilitasi (%)	14,01	15,79	35,09	47.683.189,000	52,63	48.636.853,000	70,18	99.609.590,000	87,72	100.601.782,000	100	101.613.817,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN					1.232.232.189,000		1.086.876.833,000		3.241.614.369,000		3.246.446.656,000		6.251.375.589,000	
Meningkatnya pengelolaan perlintasan kereta api	Persentase titik perlintasan kereta api wewenang kabupaten yang telah dibangun fasilitas pengamanan (%)	51,22	57,69	65,38	1.232.232.189,000	73,08	1.086.876.833,000	80,77	3.241.614.369,000	88,46	3.246.446.656,000	100	6.251.375.589,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					34.298.215.811,000		37.984.180.127,000		40.183.863.729,000		42.397.541.003,000		47.125.491.824,000	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					15.826.977.921,000		16.143.517.479,000		16.466.387.829,000		16.795.715.585,000		17.131.629.897,000	
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	96,52	96,53	96,54	15.826.977.921,000	96,55	16.143.517.479,000	96,56	16.466.387.829,000	96,57	16.795.715.585,000	96,58	17.131.629.897,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Nilai Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah (Nilai)	4,106	4,106	4,108		4,109		4,110		4,111		4,112		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	80,05	80,5	80,52		80,53		80,54		80,55		80,56		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Persentase Rata-Rata Capaian Program Perangkat Daerah (%)	98	98	98		98		98		98		98		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah (%)	96,7	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					2.690.473.500,000		2.744.282.970,000		2.799.168.629,000		2.855.152.002,000		2.912.255.042,000	
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase OPD dilingkup Kabupaten Sidoarjo yang Telah Mengimplementasikan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (%)	0	89	90	2.690.473.500,000	92	2.744.282.970,000	95	2.799.168.629,000	97	2.855.152.002,000	100	2.912.255.042,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					15.780.764.390,000		19.096.379.678,000		20.918.307.271,000		22.746.673.416,000		27.081.606.885,000	
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase pemenuhan indikator Pemerintah Digital (%)	0	100	100	15.780.764.390,000	100	19.096.379.678,000	100	20.918.307.271,000	100	22.746.673.416,000	100	27.081.606.885,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					20.361.909.233,000		20.817.147.418,000		21.330.490.365,000		21.802.100.173,000		22.232.142.174,000	
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					10.008.897.507,000		10.209.075.457,000		10.413.256.966,000		10.621.522.106,000		10.833.952.548,000	
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	96,61	96,62	96,62	10.008.897.507,000	96,64	10.209.075.457,000	96,66	10.413.256.966,000	96,67	10.621.522.106,000	96,68	10.833.952.548,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
	Nilai Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah (Nilai)	4,01	4,24	4,24		4,25		4,26		4,27		4,28		Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	84,5	84,6	84,61		84,62		84,63		84,64		84,65		Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
	Persentase Rata-Rata Capaian Program Perangkat Daerah (%)	100	95	95		95,05		95,07		95,08		95,09		Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah (%)	95,42	95,42	95,42		95,44		95,46		95,47		95,48		Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM					57.912.500,000		58.070.750,000		58.232.165,000		58.396.808,000		58.564.744,000	
Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Prosentase Koperasi yang mendapat Fasilitas Pendampingan Ijin Usaha Simpan Pinjam (%)	0,99	1,02	3,27	57.912.500,000	3,44	58.070.750,000	3,60	58.232.165,000	3,76	58.396.808,000	3,93	58.564.744,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN Pemeriksaan KOPERASI					57.912.500,000		58.070.750,000		58.232.165,000		58.396.808,000		58.564.744,000	
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	0	0	25,08	57.912.500,000	26,12	58.070.750,000	27,17	58.232.165,000	28,21	58.396.808,000	29,26	58.564.744,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSPI/USP KOPERASI					11.045.415,000		11.266.323,000		61.491.650,000		61.721.483,000		61.955.912,000	
Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	20	20,9	51,04	11.045.415,000	51,09	11.266.323,000	51,15	61.491.650,000	51,2	61.721.483,000	51,25	61.955.912,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					1.534.625.000,000		1.565.317.500,000		1.596.623.850,000		1.628.556.327,000		1.661.127.453,000	
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan (Persentase)	0	0	5,33	1.534.625.000,000	5,87	1.565.317.500,000	6,40	1.596.623.850,000	6,93	1.628.556.327,000	7,47	1.661.127.453,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					226.747.685,000		231.282.639,000		235.908.291,000		240.626.457,000		245.438.986,000	
Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Koperasi yang Mendapatkan fasilitas Pendampingan (%)	0	0	10,45	226.747.685,000	11,49	231.282.639,000	12,54	235.908.291,000	13,58	240.626.457,000	14,63	245.438.986,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					3.709.124.778,000		3.833.307.274,000		3.908.973.419,000		4.011.152.887,000		4.089.875.945,000	
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)	0	0	6,14	3.709.124.778,000	6,16	3.833.307.274,000	6,18	3.908.973.419,000	6,2	4.011.152.887,000	6,22	4.089.875.945,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					4.755.643.848,000		4.850.756.725,000		4.997.771.859,000		5.121.727.297,000		5.222.661.842,000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (%)	0	0	6,14	4.755.643.848,000	6,8	4.850.756.725,000	7,4	4.997.771.859,000	8,2	5.121.727.297,000	9,0	5.222.661.842,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					14.337.785.375,000		14.644.541.082,000		25.007.031.904,000		15.325.372.541,000		25.629.679.992,000	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA					13.011.460.323,000		13.271.689.529,000		23.537.123.320,000		13.807.865.786,000		24.084.023.102,000	
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	94,08	95	95,2	13.011.460.323,000	95,4	13.271.689.529,000	95,6	23.537.123.320,000	95,8	13.807.865.786,000	96	24.084.023.102,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
	Nilai Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah (Nilai)	4,29	4,34	4,37		4,40		4,43		4,47		4,51		Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	83,83	83,9	84		84,2		84,4		84,6		84,9		Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
	Persentase Rata-Rata Capaian Program Perangkat Daerah (%)	99,31	99,32	99,33		99,34		99,35		99,36		99,37		Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah (%)	93,17	93,18	93,19		93,20		93,21		93,22		93,23		Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					100.000.000,000		102.000.000,000		104.040.000,000		106.120.800,000		108.243.216,000	
Meningkatkan kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	142,05	100	100	100.000.000,000	100	102.000.000,000	100	104.040.000,000	100	106.120.800,000	100	108.243.216,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					172.000.000,000		175.440.000,000		178.948.800,000		182.527.776,000		186.178.331,000	
Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Terpenuhiya Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal (%)	0	100	100	172.000.000,000	100	175.440.000,000	100	178.948.800,000	100	182.527.776,000	100	186.178.331,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					879.189.167,000		896.772.950,000		914.708.409,000		933.002.577,000		951.662.629,000	
Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Perizinan yang diproses sesuai dengan ketentuan (%)	98,20	100	100	879.189.167,000	100	896.772.950,000	100	914.708.409,000	100	933.002.577,000	100	951.662.629,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					132.250.000,000		154.895.000,000		177.592.900,000		200.344.758,000		203.151.653,000	
Terkendalnya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	100	0	100	132.250.000,000	100	154.895.000,000	100	177.592.900,000	100	200.344.758,000	100	203.151.653,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					42.885.885,000		43.743.603,000		94.618.475,000		95.510.844,000		96.421.061,000	
Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	0	100	100	42.885.885,000	100	43.743.603,000	100	94.618.475,000	100	95.510.844,000	100	96.421.061,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA					41.786.871.566,000		43.372.608.997,000		43.525.061.177,000		44.944.562.401,000		45.831.453.649,000	
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA					13.720.613.473,000		13.995.025.742,000		14.274.926.257,000		14.560.424.782,000		14.851.633.278,000	
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah (%)	90	90	90	13.720.613.473,000	90	13.995.025.742,000	90	14.274.926.257,000	90	14.560.424.782,000	90	14.851.633.278,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
	Nilai Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah (Nilai)	3,521	3,525	3,540		3,545		3,550		3,555		3,560		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	94,82	95	95,20		95,25		95,30		95,40		95,50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	79,91	80	80,10		80,20		80,30		80,40		80,50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
	Persentase Rata-Rata Capaian Program Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					7.890.647.000,000		8.548.459.940,000		8.209.429.139,000		8.873.617.722,000		9.041.090.076,000	
Meningkatnya daya saing kepemudaan	Persentase pemuda yang berwirausaha (%)	0	0	3,25	7.890.647.000,000	4,00	8.548.459.940,000	4,75	8.209.429.139,000	5,50	8.873.617.722,000	6,25	9.041.090.076,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					18.675.611.093,000		19.299.123.315,000		19.480.105.781,000		19.918.707.897,000		20.315.082.055,000	
Meningkatnya daya saing kepemudaan	Jumlah Prestasi yang diraih tingkat Regional, Nasional dan Internasional ()	479	1.142	1.180	18.675.611.093,000	1.220	19.299.123.315,000	1.265	19.480.105.781,000	1.315	19.918.707.897,000	1.370	20.315.082.055,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					1.500.000.000,000		1.530.000.000,000		1.560.800.000,000		1.591.812.000,000		1.623.648.240,000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kepramukaan (%)	7,21	7,93	8,72	1.500.000.000,000	9,59	1.530.000.000,000	10,54	1.560.800.000,000	11,59	1.591.812.000,000	12,75	1.623.648.240,000	2.19.3.26.0.00.01.0000 - Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					308.187.700,000		314.351.454,000		320.638.483,000		327.051.253,000		333.592.278,000	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					308.187.700,000		314.351.454,000		320.638.483,000		327.051.253,000		333.592.278,000	
Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Persentase tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral yang terdefinisi (%)	39,47	42,1	42,1	308.187.700,000	44,73	314.351.454,000	47,36	320.638.483,000	50	327.051.253,000	52,63	333.592.278,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Statistik
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					283.150.000,000		288.813.000,000		294.589.260,000		300.481.045,000		306.490.666,000	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					283.150.000,000		288.813.000,000		294.589.260,000		300.481.045,000		306.490.666,000	
Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah	Tingkat Kematangan Keamanan Siber (Nilai)	0	3,54	3,57	283.150.000,000	3,6	288.813.000,000	3,63	294.589.260,000	3,66	300.481.045,000	3,69	306.490.666,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Persandian
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					1.150.000.000,000		1.473.000.000,000		1.496.460.000,000		1.520.389.200,000		1.544.796.984,000	
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					600.000.000,000		912.000.000,000		924.240.000,000		936.724.800,000		949.459.296,000	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilestarikan (%)	73,88	74	74,05	600.000.000,000	74,05	912.000.000,000	74,10	924.240.000,000	74,10	936.724.800,000	74,15	949.459.296,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					400.000.000,000		408.000.000,000		416.160.000,000		424.483.200,000		432.972.864,000	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam Pengembangan kesenian tradisional	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (Persentase)	0	70	72	400.000.000,000	74	408.000.000,000	76	416.160.000,000	78	424.483.200,000	80	432.972.864,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					150.000.000,000		153.000.000,000		156.060.000,000		159.181.200,000		162.364.824,000	
Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase)	0	0	65	150.000.000,000	72	153.000.000,000	81	156.060.000,000	90	159.181.200,000	100	162.364.824,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					11.087.388.197,000		12.108.135.961,000		12.349.298.680,000		22.595.284.653,000		12.846.190.346,000	
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					10.187.444.056,000		10.391.192.937,000		10.599.016.796,000		20.810.997.131,000		11.027.217.074,000	
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	95,45	90,09	92,09	10.187.444.056,000	93,09	10.391.192.937,000	94,09	10.599.016.796,000	95,09	20.810.997.131,000	96,09	11.027.217.074,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
	Nilai Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah (Nilai)	4,039	4,06	4,10		4,15		4,20		4,26		4,29		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	80,47	80,51	80,55		80,58		80,60		80,70		80,80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
	Persentase Rata-Rata Capaian Program Perangkat Daerah (%)	93	95	95,55		95,6		95,65		95,7		95,75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah (%)	95,21	95,23	95,30		95,50		95,65		95,75		95,80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					844.319.141,000		1.661.205.524,000		1.694.429.634,000		1.728.318.227,000		1.762.884.592,000	
Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Jumlah pengunjung perpustakaan (Orang)	180,000	180,000	186.000	844.319.141,000	187.000	1.661.205.524,000	188.000	1.694.429.634,000	189.000	1.728.318.227,000	190.000	1.762.884.592,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
	Jumlah perpustakaan yang dilakukan pembinaan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan (Perpustakaan)	60	60	70		70		70		70		70		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					55.625.000,000		55.737.500,000		55.852.250,000		55.969.295,000		56.088.680,000	
Meningkatnya pelestarian Koleksi nasional dan naskah kuno	Jumlah naskah kuno yang didata	1	1	1	55.625.000,000	1	55.737.500,000	1	55.852.250,000	1	55.969.295,000	1	56.088.680,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					913.263.877,000		1.187.029.155,000		1.206.769.738,000		1.226.905.132,000		1.247.443.235,000	
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					802.616.307,000		1.076.168.633,000		1.095.692.006,000		1.115.605.846,000		1.135.917.963,000	
Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis (Berkas)	Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana temu balik (Berkas)	0	2.000	2.250	802.616.307,000	2.350	1.076.168.633,000	2.450	1.095.692.006,000	2.550	1.115.605.846,000	2.650	1.135.917.963,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
	Jumlah lembaga yang telah mengelola arsip dengan baik (Perangkat Daerah)	9	11	13		14		15		15		16		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
	Jumlah pengguna layanan arsip (Orang)	0	80	84		85		87		90		92		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					55.323.785,000		55.430.261,000		55.538.866,000		55.649.643,000		55.762.636,000	
Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Jumlah arsip yang terselamatkan (Laporan)	1	1	1	55.323.785,000	1	55.430.261,000	1	55.538.866,000	1	55.649.643,000	1	55.762.636,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
2.24.04 - PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP					55.323.785,000		55.430.261,000		55.538.866,000		55.649.643,000		55.762.636,000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Jumlah (SKKAD) Sistem Klasifikasi Keamanan akses Arsip Dinamis yang diterbitkan (Laporan)	1	1	1	55.323.785,000	1	55.430.261,000	1	55.538.866,000	1	55.649.643,000	1	55.762.636,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					28.499.605.662,000		31.269.597.775,000		93.650.989.731,000		34.244.009.522,000		30.848.889.713,000	
3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA					8.985.387.522,000		9.165.095.272,000		9.348.397.178,000		9.535.365.121,000		9.726.072.423,000	
Meningkatnya akurabilitas penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	98,30	98,31	98,32	8.985.387.522,000	98,33	9.165.095.272,000	98,34	9.348.397.178,000	98,35	9.535.365.121,000	98,36	9.726.072.423,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
	Nilai Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah (Nilai)	4,168	4,169	4,170		4,171		4,172		4,173		4,174		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	81,81	81,82	81,83		81,84		81,85		81,86		81,87		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
	Persentase Rata-Rata Capaian Program Perangkat Daerah (%)	87,47	87,48	87,49		87,50		87,51		87,52		87,53		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah (%)	94,00	94,01	94,02		94,03		94,04		94,05		94,06		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					495.225.000,000		505.129.500,000		515.232.090,000		525.536.731,000		536.047.466,000	
Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap laut (Ton)	16.042,1	16.042	15.890	495.225.000,000	16.048	505.129.500,000	16.051	515.232.090,000	16.054	525.536.731,000	16.057	536.047.466,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
	Jumlah produksi perikanan tangkap perairan umum daratan (PUD) (Ton)	563,3	564	565		566		567		568		569		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					16.649.417.395,000		17.182.405.743,000		21.322.053.858,000		21.668.494.934,000		18.021.864.833,000	
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya air payau (Kg)	82.209.600	82.209.610	82.209.620	16.649.417.395,000	82.209.630	17.182.405.743,000	82.209.640	21.322.053.858,000	82.209.650	21.668.494.934,000	82.209.660	18.021.864.833,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
	Jumlah produksi perikanan budidaya air tawar (Kg)	25.905.100	25.905.110	25.905.120		25.905.130		25.905.140		25.905.150		25.905.160		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					192.207.500,000		196.051.650,000		199.972.683,000		203.972.136,000		208.051.579,000	
Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati	Jumlah Movev yang dilaksanakan di Wilayah Sungai (Laporan)	4	4	4	192.207.500,000	4	196.051.650,000	4	199.972.683,000	4	203.972.136,000	4	208.051.579,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
	Jumlah Pokmaswas yang Dibina atau Dilatih (Orang)	4	4	4		4		4		4		4		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
	Jumlah Sungai yang Diawasi ()	4	4	4		4		4		4		4		4
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					2.177.368.245,000		4.220.915.610,000		62.265.333.922,000		2.310.640.600,000		2.356.853.412,000	
Meningkatnya Konsumsi ikan oleh masyarakat	Jumlah produksi olahan hasil perikanan (Kg)	8.635.600	8.640.000	8.650.000	2.177.368.245,000	8.665.600	4.220.915.610,000	8.680.600	62.265.333.922,000	8.695.600	2.310.640.600,000	8.710.600	2.356.853.412,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					14.479.178.869,000		9.968.762.446,000		28.882.137.695,000		13.079.380.450,000		10.280.568.058,000	
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					5.874.450.000,000		1.191.939.000,000		13.909.777.780,000		3.927.973.336,000		946.532.802,000	
Meningkatnya daya tarik destinasi Wisata	Jumlah kunjungan wisata Kabupaten Sidoarjo (Orang)	1.148.592	1.187.584	1.229.433	5.874.450.000,000	1.288.287	1.191.939.000,000	1.357.232	13.909.777.780,000	1.445.435	3.927.973.336,000	1.445.435	946.532.802,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					4.959.478.869,000		5.058.668.446,000		11.179.841.815,000		5.283.038.652,000		5.388.299.425,000	
Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Aktivitas Media Pemasaran Pariwisata (%)	0	20	30	4.959.478.869,000	35	5.058.668.446,000	40	11.179.841.815,000	45	5.283.038.652,000	45	5.388.299.425,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					86.750.000,000		88.485.000,000		90.254.700,000		92.059.794,000		93.900.990,000	
Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mendapatkan pendampingan pendaftaran haki ()	0	25	30	86.750.000,000	35	88.485.000,000	40	90.254.700,000	45	92.059.794,000	45	93.900.990,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					3.558.500.000,000		3.629.670.000,000		3.702.263.400,000		3.776.308.668,000		3.851.834.841,000	
Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase peningkatan pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang mendapatkan peningkatan kapasitas, keterampilan, dan kompetensi SDM (%)	90	150	250	3.558.500.000,000	250	3.629.670.000,000	250	3.702.263.400,000	250	3.776.308.668,000	250	3.851.834.841,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					3.658.044.909,000		3.929.205.808,000		3.851.789.923,000		3.975.825.722,000		4.051.342.235,000	
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					1.843.262.500,000		1.930.127.750,000		2.017.730.305,000		2.106.084.911,000		2.145.206.609,000	
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura : padi (Kw/ha)	68,96	68,97	68,98	1.843.262.500,000	68,99	1.930.127.750,000	69	2.017.730.305,000	69,02	2.106.084.911,000	69,04	2.145.206.609,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura : Jagung (Kw/ha)	64,27	64,29	64,35		64,42		64,48		64,55		64,61		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura : Kacang Hijau (Kw/ha)	19,159	19,18	19,20		19,24		19,28		19,31		19,35		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura : Kedelai (Kw/ha)	16.707	16,74	16,74		16,81		16,86		16,91		16,94		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura : Sawi (Kw/ha)	105,364	105,16	105,17		105,59		105,91		106,23		106,44		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura : Bayam (Kw/ha)	91,271	91,28	91,29		91,30		91,31		91,32		91,33		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura : Kangkung (Kw/ha)	61,335	61,33	61,34		61,34		61,35		61,35		61,36		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Produktivitas Tanaman Tebu (Kw/ha)	752,011	752,75	752,83		753,58		754,33		755,09		755,84		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Produksi Peternakan : Daging (Kg)	14.698.352	37.339.000	14.845.335		14.933.788		15.143.725		15.295.162		15.448.113		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Produksi Peternakan: Telur (Kg)	4.215.899	11.963.000	4.258.057		4.300.637		4.343.643		4.387.079		4.430.949		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Produksi Peternakan : susu (Liter)	1.686.039	2.883.000	1.702.899		1.719.927		1.737.126		1.754.497		1.772.041		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Prosentase peningkatan populasi ternak (%)	1,25	1,5	1,5		1,6		1,7		1,8		1,9		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Prosentase Penyaluran pupuk bersubsidi (%)	94	94,5	94,6		94,6		94,6		94,6		94,6		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					173.795.859,000		326.271.776,000		128.797.212,000		131.373.156,000		134.000.619,000	
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Prosentase Luas Lahan Pertanian KP2B yang dimanfaatkan pertanian	80	81	86	173.795.859,000	86	326.271.776,000	86	128.797.212,000	86	131.373.156,000	86	134.000.619,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					1.113.724.435,000		1.135.998.924,000		1.158.718.902,000		1.181.893.280,000		1.205.531.146,000	
Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (%)	30	35	40	1.113.724.435,000	40,4	1.135.998.924,000	40,8	1.158.718.902,000	41,2	1.181.893.280,000	41,6	1.205.531.146,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (Persentase)	10	12,5	15		15,15		15,30		15,45		15,60		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Laboratorium Keswan dan Kesmavet (Angka)	86,95	87	88		88,4		88,5		88,6		88,7		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					267.274.975,000		272.620.475,000		278.072.884,000		283.634.342,000		289.307.028,000	
Meningkatnya pengendalian dan apenganggukan bencana pertanian	Prosentase lahan yang dikendalikan dan ditanggulangi dari serangan OPT pada tanaman pangan dan hortikultura (%)	13	14	14	267.274.975,000	14,5	272.620.475,000	15	278.072.884,000	15,5	283.634.342,000	16	289.307.028,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Prosentase lahan yang dikendalikan dan ditanggulangi dari serangan OPT pada tanaman perkebunan (%)	10	11	11		11,5		12		12,5		13		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					50.262.500,000		50.267.750,000		50.273.105,000		50.278.567,000		50.284.138,000	
Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase Permohonan Izin Usaha Peternakan (%)	100	100	100	50.262.500,000	100	50.267.750,000	100	50.273.105,000	100	50.278.567,000	100	50.284.138,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					209.724.640,000		213.919.133,000		218.197.515,000		222.561.466,000		227.012.695,000	
Meningkatnya Kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya (%)	2,65	2,6	2,7	209.724.640,000	2,7	213.919.133,000	2,7	218.197.515,000	2,7	222.561.466,000	2,7	227.012.695,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					39.837.675.989,000		40.634.429.509,000		46.497.118.098,000		42.326.060.459,000		63.171.581.667,000	
3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					31.521.674.583,000		32.152.108.075,000		32.795.150.236,000		33.451.053.240,000		34.120.074.305,000	
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	98,31	98,32	98,33	31.521.674.583,000	98,34	32.152.108.075,000	98,35	32.795.150.236,000	98,36	33.451.053.240,000	98,37	34.120.074.305,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
	Nilai Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah (Nilai)	4,207	4,23	4,207		4,208		4,209		4,210		4,211		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	82,37	82,38	82,39		82,40		82,41		82,42		82,43		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
	Persentase Rata-Rata Capaian Program Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah (%)	93,93	93,94	93,95		93,96		93,97		93,98		93,99		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					14.131.265,000		14.413.890,000		64.702.168,000		64.996.211,000		65.296.135,000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran usaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase)	0	0	80	14.131.265,000	80	14.413.890,000	80	64.702.168,000	80	64.996.211,000	80	65.296.135,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					2.955.768.056,000		3.014.883.417,000		8.075.181.085,000		3.136.684.707,000		23.199.418.401,000	
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi	Persentase Pasar yang memenuhi 50% kriteria SNI (%)	21,05	21,05	21,05	2.955.768.056,000	26,31	3.014.883.417,000	26,31	8.075.181.085,000	26,31	3.136.684.707,000	31,57	23.199.418.401,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					97.650.000,000		99.603.000,000		101.595.060,000		103.626.961,000		105.699.500,000	
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	7	7	7	97.650.000,000	7	99.603.000,000	7	101.595.060,000	7	103.626.961,000	7	105.699.500,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					4.717.125.000,000		4.811.467.500,000		4.907.696.850,000		5.005.850.787,000		5.105.967.802,000	
Meningkatkan pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai ekspor non migas (USD)	1.835.419.112	1.450.000.000	1.184.500.000	4.717.125.000,000	1.220.035.000	4.811.467.500,000	1.256.637.000	4.907.696.850,000	1.294.336.000	5.005.850.787,000	1.333.165.000	5.105.967.802,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					131.327.085,000		133.953.627,000		136.632.699,000		139.365.353,000		142.152.660,000	
Meningkatnya tertib niaga dan Mutu Produk	Persentase Peningkatan UTPP yang di Tera/Tera Ulang (%)	5	1,50	1,80	131.327.085,000	1,85	133.953.627,000	1,86	136.632.699,000	1,87	139.365.353,000	1,88	142.152.660,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					400.000.000,000		408.000.000,000		416.160.000,000		424.483.200,000		432.972.864,000	
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/Dilaksanakan (%)	0	0	100	400.000.000,000	100	408.000.000,000	100	416.160.000,000	100	424.483.200,000	100	432.972.864,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					10.661.777.466,000		10.874.013.015,000		11.090.493.276,000		11.311.303.140,000		11.536.529.203,000	
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					10.541.802.466,000		10.752.638.515,000		10.967.691.286,000		11.187.045.111,000		11.410.786.013,000	
Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase ikm yg mendapatkan pengembangan daya'saing (%)	0	0	12,50	10.541.802.466,000	13,63	10.752.638.515,000	14,75	10.967.691.286,000	15,88	11.187.045.111,000	17	11.410.786.013,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					65.775.000,000		67.090.500,000		68.432.310,000		69.800.956,000		71.196.975,000	
Meningkatnya kualitas pembangunan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (Persentase)	0,73	100	100	65.775.000,000	100	67.090.500,000	100	68.432.310,000	100	69.800.956,000	100	71.196.975,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					54.200.000,000		54.284.000,000		54.369.680,000		54.457.073,000		54.546.215,000	
Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Persentase Pertumbuhan Usaha Industri yang terdaftar di SiNas (%)	3,4	3,5	3,6	54.200.000,000	3,7	54.284.000,000	3,8	54.369.680,000	3,9	54.457.073,000	4,0	54.546.215,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					125.000.000,000		126.500.000,000		128.030.000,000		129.590.600,000		131.182.411,000	
3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					66.500.000,000		67.830.000,000		69.186.600,000		70.570.332,000		71.981.738,000	
Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi	Persentase transmigran yang diberangkatkan (%)	0	100	100	66.500.000,000	100	67.830.000,000	100	69.186.600,000	100	70.570.332,000	100	71.981.738,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Transmigrasi
3.32.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI					58.500.000,000		58.670.000,000		58.843.400,000		59.020.268,000		59.200.673,000	
Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan (Persentase)	0	100	100	58.500.000,000	100	58.670.000,000	100	58.843.400,000	100	59.020.268,000	100	59.200.673,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Transmigrasi
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					76.771.716.893,000		120.307.151.231,000		94.873.294.255,000		81.470.760.139,000		103.100.175.342,000	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					62.010.245.488,000		105.250.450.398,000		79.515.459.405,000		65.805.768.593,000		87.121.883.965,000	
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah	Persentase Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik lokus PEKPPP dengan Kategori minimal Sangat Baik (A-) (%)	68,18	67,57	70,27	62.010.245.488,000	73,87	105.250.450.398,000	78,38	79.515.459.405,000	80,18	65.805.768.593,000	84,68	87.121.883.965,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Nilai Predikat Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	80,43	80,44	80,45		80,46		80,47		80,48		80,49		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase PD dengan kategori SAKIP minimal A di bidang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	67,35	69,39	71,43		73,47		75,51		77,55		79,59		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang urusan pemerintahan daerah. (Indeks)	84,63	84,64	84,84		85,04		85,24		85,44		85,64		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Nilai)	97,47	97,48	97,49		97,50		97,51		97,52		97,53		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Nilai Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah (Nilai)	4,29	4,30	4,31		4,32		4,33		4,34		4,35		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Nilai Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) di bidang Urusan Pemerintahan Daerah (Nilai)	92,05	93	93,01		93,02		93,03		93,04		93,05		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	87,51	87,52	87,53		87,54		87,55		87,56		87,57		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik lokus PEKPPP dengan Kategori minimal Sangat Baik (A-) di bidang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	68,18	67,57	70,27		73,87		78,38		80,18		84,68		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase PD dengan kategori SAKIP minimal A (%)	67,35	69,39	71,43		73,47		75,51		77,55		79,59		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Perangkat Daerah di bidang Urusan Pemerintahan Daerah yang tindaklanjuti rekomendasi hasil asistensi dalam mencapai Indikator Kinerja Utama Daerah (%)	0	0	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase Rata-Rata Capaian Program Perangkat Daerah (%)	98,05	98,05	98,06		98,07		98,08		98,09		98,10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah (%)	91,30	91,50	91,70		92		92,40		92,60		93		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					13.385.711.500,000		13.653.425.730,000		13.926.494.245,000		14.205.024.129,000		14.489.124.612,000	
Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang Pemerintahan dan Kesra (Indeks)	84,63	84,64	84,84	13.385.711.500,000	85,04	13.653.425.730,000	85,24	13.926.494.245,000	85,44	14.205.024.129,000	85,64	14.489.124.612,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Indeks Zakat Nasional (Indeks)	0,33	0,37	0,41		0,45		0,49		0,53		0,57		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Nilai Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Nilai)	92,05	93	93,01		93,02		93,03		93,04		93,05		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik lokus PEKPPP dengan Kategori minimal Sangat Baik (A-) di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (%)	68,18	67,57	70,27		73,87		78,38		80,18		84,68		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase Perangkat Daerah dengan kategori SAKIP minimal A di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (%)	67,35	69,39	71,43		73,47		75,51		77,55		79,59		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase Perangkat Daerah di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang tindaklanjuti rekomendasi hasil asistensi dalam mencapai Indikator Kinerja Utama Daerah (%)	0	0	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					1.375.759.905,000		1.403.275.103,000		1.431.340.605,000		1.459.967.417,000		1.489.166.765,000	
Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Indeks Akses Keuangan Daerah (Indeks)	4,47	4,51	4,54	1.375.759.905,000	4,56	1.403.275.103,000	4,58	1.431.340.605,000	4,60	1.459.967.417,000	4,61	1.489.166.765,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang perekonomian dan pembangunan (Indeks)	84,63	84,64	84,84		85,04		85,24		85,44		85,64		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Indeks Tata Kelola Pengadaan (Indeks)	82,45	82,45	87,85		89,43		90,94		92,24		93,75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Nilai Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) di bidang Perekonomian dan Pembangunan (Nilai)	92,05	93	93,01		93,02		93,03		93,04		93,05		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik lokus PEKPPP dengan Kategori minimal Sangat Baik (A-) di bidang Perekonomian dan Pembangunan (%)	68,18	67,57	70,27		73,87		78,38		80,18		84,68		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase PD dengan kategori SAKIP minimal A di bidang Perekonomian dan Pembangunan (%)	67,35	69,39	71,43		73,47		75,51		77,55		79,59		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase Perangkat Daerah di bidang Perekonomian dan Pembangunan yang tindaklanjuti rekomendasi hasil asistensi dalam mencapai Indikator Kinerja Utama Daerah (%)	0	0	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					86.255.651.020,000		87.980.764.040,000		89.740.379.321,000		91.535.186.907,000		93.365.890.644,000	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					58.670.685.553,000		59.844.099.264,000		61.040.981.249,000		62.261.800.874,000		63.507.036.891,000	
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	80,10	80,15	80,20	58.670.685.553,000	80,25	59.844.099.264,000	80,30	61.040.981.249,000	80,35	62.261.800.874,000	80,40	63.507.036.891,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah (%)	78,29	78,30	78,40		78,50		78,60		78,70		78,80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
	Persentase Rata-Rata Capaian Program Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
	Nilai Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah (Nilai)	3,56	3,57	3,58		3,59		3,60		3,61		3,62		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					27.584.965.467,000		28.136.664.776,000		28.699.398.072,000		29.273.386.033,000		29.858.853.753,000	
Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	89	89,5	90	27.584.965.467,000	90,5	28.136.664.776,000	91	28.699.398.072,000	91,5	29.273.386.033,000	92	29.858.853.753,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
	Ketepatan waktu Penetapan Perda APBD Tahun berjalan (Tahun N) (%)	89	89,5	90		90,5		91		91,5		92		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
	Persentase Penetapan Raperda Tahun berjalan (Tahun N) (%)	89	89,5	90		90,5		91		91,5		92		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
5.01 - PERENCANAAN					17.986.602.920,000		18.346.334.983,000		18.713.261.690,000		21.587.526.947,000		25.279.337.481,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					13.563.695.000,000		13.834.968.900,000		14.111.668.278,000		14.393.901.643,000		14.681.779.676,000	
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	97,1	97,11	97,12	13.563.695.000,000	97,13	13.834.968.900,000	97,14	14.111.668.278,000	97,15	14.393.901.643,000	97,16	14.681.779.676,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Nilai Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah (Nilai)	4,122	4,123	4,124		4,125		4,126		4,127		4,128		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	86,72	86,73	86,74		86,75		86,76		86,77		86,78		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase Rata-Rata Capaian Program Perangkat Daerah (%)	99,76	99,77	99,78		99,79		99,80		99,81		99,82		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah (%)	96	96,01	96,02		96,03		96,04		96,05		96,06		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					1.073.300.169,000		1.094.766.177,000		1.116.661.508,000		1.638.994.762,000		2.171.834.652,000	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)	98,40	100	100	1.073.300.169,000	100	1.094.766.177,000	100	1.116.661.508,000	100	1.638.994.762,000	100	2.171.834.652,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	98,40	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					3.349.607.751,000		3.416.599.906,000		3.484.931.904,000		5.554.630.542,000		8.425.723.153,000	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang perekonomian dan SDA serta bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	100	100	100	3.349.607.751,000	100	3.416.599.906,000	100	3.484.931.904,000	100	5.554.630.542,000	100	8.425.723.153,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.02 - KEUANGAN					849.792.262.821,000		918.828.108.078,000		989.950.078.287,000		1.052.440.843.644,000		1.050.081.789.486,000	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					55.780.498.689,000		59.896.108.663,000		82.775.438.884,000		59.194.711.453,000		63.378.734.651,000	
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	97	97	97,1	55.780.498.689,000	97,2	59.896.108.663,000	97,3	82.775.438.884,000	97,4	59.194.711.453,000	97,7	63.378.734.651,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)
	Nilai Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah (Nilai)	4,24	4,24	4,26		4,27		4,28		4,29		4,30		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	84,86	85	85,1		85,25		85,35		85,50		85,86		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)
	Persentase Rata-Rata Capaian Program Perangkat Daerah (%)	75	75	76		77		78		79		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)
	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah (%)	80	80	85		85		90		91		92		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	94,82	94,83	94,90	38.479.001.233	95	40.248.581.258	95,10	40.033.552.883	95,20	40.834.223.940	95,30	44.651.037.388	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan (Badan Pelayanan Pajak Daerah)
	Nilai Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah (Nilai)	4,044	4,045	4,050		4,060		4,070		4,080		4,090		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan (Badan Pelayanan Pajak Daerah)
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	84,36	84,36	84,37		84,38		84,39		84,40		84,41		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan (Badan Pelayanan Pajak Daerah)
	Persentase Rata-Rata Capaian Program Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan (Badan Pelayanan Pajak Daerah)
	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah (%)	77,91	90	90		90		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan (Badan Pelayanan Pajak Daerah)
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					788.763.496.421,000		848.578.766.349,000		896.714.341.676,000		982.676.628.510,000		976.022.161.080,000	
Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase Belanja Pegawai diluar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD (%)	20	20	21	788.763.496.421,000	22	848.578.766.349,000	23	896.714.341.676,000	24	982.676.628.510,000	25	976.022.161.080,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)
	Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)
	Persentase Realisasi APBD (%)	90	90	90		92		93		94		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					3.700.561.428,000		3.774.572.657,000		3.850.064.110,000		3.927.065.392,000		4.005.606.700,000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase OPD yang tertib dalam melaksanakan Tata Kelola BMD (%)	100	100	100	3.700.561.428,000	100	3.774.572.657,000	100	3.850.064.110,000	100	3.927.065.392,000	100	4.005.606.700,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					1.547.706.283,000		6.578.660.409,000		6.610.233.617,000		6.642.438.289,000		6.675.287.055,000	
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	Prosentase penerimaan BPHTB (%)	122,67	100	100	1.547.706.283,000	100	6.578.660.409,000	100	6.610.233.617,000	100	6.642.438.289,000	100	6.675.287.055,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan (Badan Pelayanan Pajak Daerah)
	Prosentase penerimaan PBB-P2 (%)	107,71	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan (Badan Pelayanan Pajak Daerah)
	Prosentase Penerimaan PDL (pajak restoran, hotel, hiburan, parkir, reklame, Penerangan Jalan dan Air Tanah) (%)	0	0	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan (Badan Pelayanan Pajak Daerah)
5.03 - KEPEGAWAIAN					16.747.896.371,000		19.622.854.298,000		20.109.511.385,000		20.573.001.612,000		21.013.461.644,000	
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA					15.239.006.754,000		15.843.786.889,000		16.204.662.627,000		16.671.755.879,000		16.995.190.997,000	
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah	Nilai Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah (Nilai)	4,223	4,22	4,3	15.239.006.754,000	4,35	15.843.786.889,000	4,35	16.204.662.627,000	4,4	16.671.755.879,000	4,4	16.995.190.997,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	86,13	86,13	86,2		86,25		86,3		86,3		86,4		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (Nilai)	92,04	92,04	92,1		92,2		92,3		92,4		92,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
	Persentase Rata-Rata Capaian Program Perangkat Daerah (%)	90	90	90		90		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah (%)	92,07	93	93		93		93		93		93		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					1.508.889.617,000		3.779.067.409,000		3.904.848.758,000		3.901.245.733,000		4.018.270.647,000	
Meningkatnya Kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase ASN yang berkinerja baik (%)	92,04	92,04	92,1	1.508.889.617,000	92,2	3.779.067.409,000	92,3	3.904.848.758,000	92,4	3.901.245.733,000	92,5	4.018.270.647,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
	Prosentase pegawai yang terfasilitasi mutasi dan promosi (%)	0	0	2		2		3		3		3		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
	Prosentase pemenuhan kebutuhan pegawai (%)	49,5	49,5	50		50		51		51		52		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					710.423.778,000		2.392.632.254,000		1.779.124.899,000		1.771.907.397,000		2.008.985.545,000	
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					710.423.778,000		2.392.632.254,000		1.779.124.899,000		1.771.907.397,000		2.008.985.545,000	
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial, dan fungsional	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi (%)	60	60	80	710.423.778,000	81	2.392.632.254,000	82	1.779.124.899,000	83	1.771.907.397,000	84	2.008.985.545,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					577.999.365,000		589.559.352,000		1.101.350.539,000		1.113.377.550,000		1.125.645.101,000	
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					577.999.365,000		589.559.352,000		1.101.350.539,000		1.113.377.550,000		1.125.645.101,000	
Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase inovasi yang memenuhi tingkat kematangan IID (%)	0	90	90,25	577.999.365,000	90,50	589.559.352,000	90,75	1.101.350.539,000	91	1.113.377.550,000	91,25	1.125.645.101,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (Persentase)	0	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					24.222.823.119,000		24.707.279.581,000		25.201.425.173,000		25.705.453.674,000		26.219.562.749,000	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA					21.931.015.274,000		22.369.635.579,000		22.817.028.291,000		23.273.368.856,000		23.738.836.234,000	
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	88,22	88,24	88,35	21.931.015.274,000	88,50	22.369.635.579,000	88,75	22.817.028.291,000	89,00	23.273.368.856,000	89,00	23.738.836.234,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
	Nilai Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah (Nilai)	4,083	4,09	4,10		4,11		4,12		4,13		4,13		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (Nilai)	97,04	97,10	97,20		97,30		97,40		97,50		97,50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah (%)	95,82	95,83	95,84		95,85		95,86		95,87		95,88		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
	Persentase Rata-Rata Capaian Program Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					1.628.071.195,000		1.658.592.619,000		1.691.764.471,000		1.725.599.760,000		1.760.111.755,000	
Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Persentase kasus/pengaduan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	1.628.071.195,000	100	1.658.592.619,000	100	1.691.764.471,000	100	1.725.599.760,000	100	1.760.111.755,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
	Persentase PD yang dilakukan evaluasi SAKIP tepat waktu (%)	0	0	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Tindaklanjut Rekomendasi APIP (%)	97,38	97,39	97,4		97,41		97,42		97,43		97,44		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
	Persentase Tindaklanjut Rekomendasi BPK (%)	88,39	89	89,1		89,2		89,3		89,4		89,4		
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					665.736.650,000		679.051.383,000		692.632.411,000		706.485.058,000		720.614.760,000	
Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Indeks Integritas (Nilai)	67,91	68	69	665.736.650,000	70	679.051.383,000	75	692.632.411,000	76	706.485.058,000	76	720.614.760,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
	Persentase PD yang melakukan penilaian risiko sesuai dengan ketentuan (%)	100	100	100		100		100		100		100		
7.01 - KECAMATAN					192.365.900.178,000		199.008.218.183,000		207.177.382.546,000		213.974.930.195,000		218.042.368.807,000	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA					147.211.519.919,000		150.155.750.317,000		153.158.865.324,000		156.222.042.630,000		159.336.423.491,000	
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	79,07	80,01	80,02	30.369.708.994	80,03	30.977.103.153	80,04	31.596.645.227	80,05	32.228.558.131	80,06	32.873.149.705	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Sidoarjo)
	Persentase Rata-Rata Capaian Program Perangkat Daerah (%)	85	86	87		88		89		90		91		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Sidoarjo)
	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah (%)	90	91	91,25		91,50		91,75		92		92,25		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Sidoarjo)
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	78,88	78,98	79	5.189.999.847	79,25	5.293.799.844	79,50	5.399.675.841	79,75	5.507.669.358	80	5.617.822.745	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Candi)
	Persentase Rata-Rata Capaian Program Perangkat Daerah (%)	98	98,15	98,30		98,45		98,60		98,75		98,80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Candi)
	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah (%)	95,59	95,60	95,61		95,62		95,63		95,64		95,65		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Candi)
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	80,22	80,24	80,26	5.464.838.718	80,28	5.574.135.492	80,30	5.685.618.202	80,32	5.799.330.566	80,34	5.915.317.178	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Buduran)
	Persentase Rata-Rata Capaian Program Perangkat Daerah (%)	85,71	85,73	85,75		85,77		85,79		85,81		85,83		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Buduran)
	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah (%)	95,81	95,83	95,85		95,87		95,89		95,91		95,93		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Buduran)
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	78,17	80,05	80,06	5.431.799.085	80,07	5.540.435.067	80,08	5.651.243.768	80,09	5.764.268.643	80,10	5.879.554.016	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Wonoayu)
	Persentase Rata-Rata Capaian Program Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Wonoayu)
	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah (%)	99	99	99		99		99		99		99		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Wonoayu)
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	79,07	79,1	79,15	10.510.508.079	79,2	10.720.718.241	79,25	10.935.132.605	79,3	11.153.835.257	79,3	11.376.911.963	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Krian)
	Persentase Rata-Rata Capaian Program Perangkat Daerah (%)	85,05	85,7	85,8		85,85		85,9		85,95		85,95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Krian)
	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah (%)	97,1	97,12	97,15		97,2		97,25		97,3		97,3		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Krian)
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	80,40	80,41	80,42	9.728.373.929	80,43	9.922.941.408	80,44	10.121.400.236	80,45	10.323.828.240	80,46	10.530.304.805	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Porong)
	Persentase Rata-Rata Capaian Program Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Porong)
	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah (%)	95,20	95,22	95,24		95,26		95,28		95,3		95,32		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Porong)
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	78,50	79,50	80	4.951.492.563	80,5	5.050.522.414	80,5	5.151.532.863	80,5	5.254.563.520	80,5	5.359.654.790	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Krembung)
	Persentase Rata-Rata Capaian Program Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Krembung)
	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah (%)	93,56	93,56	93,56		93,56		93,56		93,56		93,56		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Krembung)
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	80,89	80,90	80,91	4.575.148.248	80,92	4.666.651.213	80,93	4.759.984.237	80,94	4.855.183.922	80,95	4.952.287.606	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Jabon)
	Persentase Rata-Rata Capaian Program Perangkat Daerah (%)	85	85,5	86		86,5		90		90,30		90,50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Jabon)
	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah (%)	94,29	94,30	94,31		94,32		94,33		94,34		94,35		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Jabon)
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	78,3	78,4	78,5	5.235.688.779	79	5.340.402.555	79,5	5.447.210.606	80	5.556.154.818	80,5	5.667.277.914	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Balongbendo)
	Persentase Rata-Rata Capaian Program Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Balongbendo)
	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah (%)	95,34	95,35	95,36		95,37		95,38		95,39		95,4		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Balongbendo)
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	79,29	79,4	79,43	4.540.441.155	79,46	4.631.249.978	79,49	4.723.874.978	79,52	4.818.352.477	79,55	4.914.719.527	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Tarik)
	Persentase Rata-Rata Capaian Program Perangkat Daerah (%)	85,71	85,74	85,77		85,8		85,83		85,86		85,89		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Tarik)

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah (%)	94,94	95	95,3		95,6		95,9		96,2		96,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Tarik)
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	83,61	83,61	83,65	20.089.853.329	83,70	20.491.650.414	83,75	20.901.483.412	83,80	21.319.533.082	83,85	21.735.843.349	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Taman)
	Persentase Rata-Rata Capaian Program Perangkat Daerah (%)	85	85,15	85,25		85,35		85,45		85,55		85,55		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Taman)
	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah (%)	92	92,5	92,75		93		93,25		93,50		93,75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Taman)
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	79,70	79,72	79,74	6.043.848.529	79,76	6.164.725.500	79,78	6.288.020.010	79,80	6.413.780.410	79,82	6.542.056.016	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Waru)
	Persentase Rata-Rata Capaian Program Perangkat Daerah (%)	85	85,10	85,20		85,30		85,40		85,50		85,60		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Waru)
	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah (%)	96,68	96,69	96,70		96,71		96,72		96,73		96,74		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Waru)
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	81,94	81,96	81,98	5.873.706.128	82	5.991.180.251	82,02	6.111.003.856	82,04	6.233.223.933	82,04	6.357.888.411	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Gedangan)
	Persentase Rata-Rata Capaian Program Perangkat Daerah (%)	85	85,15	85,25		85,35		85,45		85,55		85,55		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Gedangan)
	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah (%)	96,11	96,12	96,13		96,14		96,15		96,16		96,16		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Gedangan)
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	80,29	80,30	80,31	5.639.211.043	80,32	5.751.995.264	80,33	5.867.035.169	80,34	5.984.375.873	80,35	6.104.063.396	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Sedati)
	Persentase Rata-Rata Capaian Program Perangkat Daerah (%)	85	86	87		88		89		90		91		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Sedati)
	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah (%)	93,19	93,14	93,20		93,30		93,40		93,50		93,60		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Sedati)
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	80,03	80,20	80,23	6.177.280.902	80,25	6.300.826.520	80,27	6.426.843.050	80,28	6.555.379.911	80,30	6.686.487.516	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Tanggulangin)
	Persentase Rata-Rata Capaian Program Perangkat Daerah (%)	85,29	85,50	86		87		88		89		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Tanggulangin)
	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah (%)	93,98	94	94,20		94,40		94,60		94,80		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Tanggulangin)
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	76,56	76,57	76,58	5.154.131.611	76,59	5.257.214.243	76,60	5.362.358.528	76,61	5.469.605.699	76,62	5.578.997.813	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Tulangan)
	Persentase Rata-Rata Capaian Program Perangkat Daerah (%)	80,76	80,76	80,77		80,78		80,79		80,80		80,81		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Tulangan)
	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah (%)	96,44	96,45	9,46		96,47		96,48		96,49		96,50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Tulangan)
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	8,06	8,07	8,08	5.969.835.787	8,09	6.089.232.503	8,10	6.211.017.153	8,11	6.335.237.496	8,12	6.461.942.245	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Prambon)
	Persentase Rata-Rata Capaian Program Perangkat Daerah (%)	85,01	85,02	85,03		85,04		85,05		85,06		85,07		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Prambon)
	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah (%)	96,92	96,93	96,94		96,95		96,96		96,97		96,99		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Prambon)
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	81,50	81,80	81,82	6.265.653.193	81,84	6.390.966.257	81,86	6.518.785.582	81,88	6.649.161.294	81,90	6.782.144.520	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Sukodono)
	Persentase Rata-Rata Capaian Program Perangkat Daerah (%)	90	90,50	90,75		91		91,25		91,50		92		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Sukodono)
	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah (%)	96,83	96,84	96,85		96,86		96,87		96,88		96,89		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Sukodono)
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					26.661.648.481,000		27.194.881.451,000		27.738.779.080,000		28.293.554.661,000		28.859.425.754,000	
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	89,5	90	90,5	1.994.861.939	91	2.034.759.178	91,5	2.075.454.361	92	2.116.963.449	92,5	2.159.302.718	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Sidoarjo)
	Persentase desa yang mendapat pembinaan tentang lingkungan hidup, usaha ekonomi masyarakat, dan PKL (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Sidoarjo)
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	98,85	98,85	98,86	1.992.857.000	98,86	2.032.714.140	98,87	2.073.368.423	98,87	2.114.835.791	98,88	2.157.132.507	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Candi)
	Persentase desa yang mendapat pembinaan tentang lingkungan hidup, usaha ekonomi masyarakat, dan PKL (%)	0	0	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Candi)
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	95,40	95,42	95,44	1.927.441.714	95,46	1.965.990.548	95,48	2.005.310.359	95,50	2.045.416.566	95,52	2.086.324.898	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Buduran)
	Persentase desa yang mendapat pembinaan tentang lingkungan hidup, usaha ekonomi masyarakat, dan PKL (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Buduran)
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	96	97	97	964.527.920	98	983.818.478	98	1.003.494.848	99	1.023.564.745	99	1.044.036.040	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Wonorejo)



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase desa yang mendapat pembinaan tentang lingkungan hidup, usaha ekonomi masyarakat, dan PKL (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Wonoreyu)
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	98,77	98,78	98,79	2.382.773.472	98,8	2.430.428.941	98,81	2.479.037.520	98,82	2.528.618.271	98,83	2.579.190.636	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Krian)
	Persentase desa yang mendapat pembinaan tentang lingkungan hidup, usaha ekonomi masyarakat, dan PKL (%)	98	98	98		98		98		98		98		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Krian)
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	98,87	98,88	98,89	1.075.287.751	98,9	1.096.793.506	98,91	1.118.729.376	98,92	1.141.103.964	98,93	1.163.926.043	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Porong)
	Persentase desa yang mendapat pembinaan tentang lingkungan hidup, usaha ekonomi masyarakat, dan PKL (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Porong)
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	97,46	97,46	97,47	1.048.780.200	97,50	1.069.755.804	97,51	1.091.150.920	97,52	1.112.973.938	97,53	1.135.233.417	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Krembung)
	Persentase desa yang mendapat pembinaan tentang lingkungan hidup, usaha ekonomi masyarakat, dan PKL (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Krembung)
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	98,59	98,60	98,60	1.091.376.561	98,61	1.113.204.092	98,61	1.135.468.174	98,62	1.158.177.538	98,62	1.181.341.088	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Jabon)
	Persentase desa yang mendapat pembinaan tentang lingkungan hidup, usaha ekonomi masyarakat, dan PKL (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Jabon)
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	98,37	98,38	98,39	1.076.488.086	98,40	1.098.017.848	98,41	1.119.978.205	98,42	1.142.377.769	98,43	1.165.225.324	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Balongbendo)
	Persentase desa yang mendapat pembinaan tentang lingkungan hidup, usaha ekonomi masyarakat, dan PKL (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Balongbendo)
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	95,8	95,83	95,86	991.163.527	95,89	1.010.986.798	95,92	1.031.206.533	95,95	1.051.830.664	95,98	1.072.867.277	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Tarik)
	Persentase desa yang mendapat pembinaan tentang lingkungan hidup, usaha ekonomi masyarakat, dan PKL (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Tarik)
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	91	92	92,50	1.813.197.594	93	1.849.461.545	93,50	1.886.450.776	94	1.924.179.791	94,50	1.962.663.388	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Taman)
	Persentase desa yang mendapat pembinaan tentang lingkungan hidup, usaha ekonomi masyarakat, dan PKL (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Taman)
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	98,85	98,86	98,87	1.834.350.213	98,88	1.871.037.217	98,89	1.908.457.962	98,90	1.946.627.121	98,91	1.985.559.663	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Waru)
	Persentase desa yang mendapat pembinaan tentang lingkungan hidup, usaha ekonomi masyarakat, dan PKL (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Waru)
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	98,44	98,54	98,64	1.966.438.030	98,74	2.005.766.791	98,84	2.045.882.126	98,94	2.086.799.769	98,94	2.128.535.764	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Gedangan)
	Persentase desa yang mendapat pembinaan tentang lingkungan hidup, usaha ekonomi masyarakat, dan PKL (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Gedangan)
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	86	86,50	87	1.895.965.169	87,50	1.933.884.472	88	1.972.562.162	88,50	2.012.013.405	89	2.052.253.673	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Sedati)
	Persentase desa yang mendapat pembinaan tentang lingkungan hidup, usaha ekonomi masyarakat, dan PKL (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Sedati)
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	95,33	95,34	95,35	1.026.668.422	95,40	1.047.201.790	95,45	1.068.145.826	95,50	1.089.508.743	95,60	1.111.298.918	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Tanggulangin)
	Persentase desa yang mendapat pembinaan tentang lingkungan hidup, usaha ekonomi masyarakat, dan PKL (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Tanggulangin)
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	100	100	100	1.036.334.120	100	1.057.060.802	100	1.078.202.018	100	1.099.766.059	100	1.121.761.380	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Tulangan)
	Persentase desa yang mendapat pembinaan tentang lingkungan hidup, usaha ekonomi masyarakat, dan PKL (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Tulangan)
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	97,64	97,65	97,66	1.097.360.977	97,67	1.119.308.197	97,68	1.141.694.360	97,69	1.164.528.248	97,70	1.187.818.812	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Prambon)
	Persentase desa yang mendapat pembinaan tentang lingkungan hidup, usaha ekonomi masyarakat, dan PKL (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Prambon)
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	98,77	98,78	98,79	1.445.775.786	98,80	1.474.691.302	98,81	1.504.185.128	98,82	1.534.268.830	98,83	1.564.954.208	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Sukodono)
	Persentase desa yang mendapat pembinaan tentang lingkungan hidup, usaha ekonomi masyarakat, dan PKL (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Sukodono)
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					14.843.931.079,000		17.936.809.701,000		21.135.545.895,000		24.240.256.812,000		24.551.061.949,000	
Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan secara berkelanjutan	Persentase penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	7.635.417.150	100	9.188.125.493	100	10.743.888.003	100	12.302.765.763	100	12.464.821.078	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Sidoarjo)

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang ditindaklanjuti (%)	0	0	100	61.482.355	100	62.712.002	100	63.966.242	100	65.245.567	100	66.550.478	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Candi)
	Persentase penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang ditindaklanjuti (%)	0	0	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Buduran)
	Persentase penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang ditindaklanjuti (%)	0	0	100	51.575.000	100	51.606.500	100	51.638.630	100	51.671.402	100	51.704.831	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Wonoyayu)
	Persentase penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	904.248.800	100	1.222.333.776	100	1.540.780.452	100	1.859.596.061	100	1.878.787.982	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Krian)
	Persentase penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	1.341.894.700	100	1.668.732.594	100	1.996.107.246	100	2.324.029.391	100	2.352.509.979	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Porong)
	Persentase penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang ditindaklanjuti (%)	0	0	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Krembung)
	Persentase penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang ditindaklanjuti (%)	0	0	100	50.224.775	100	50.229.271	100	50.233.856	100	50.238.533	100	50.243.304	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Jabon)
	Persentase penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang ditindaklanjuti (%)	0	0	100	80.107.500	100	81.709.650	100	83.343.843	100	85.010.720	100	86.710.934	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Balongbendo)
	Persentase penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang ditindaklanjuti (%)	0	0	100	65.837.500	100	67.154.250	100	68.497.335	100	69.867.282	100	71.264.627	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Tarik)
	Persentase penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	4.196.012.111	100	5.079.932.353	100	5.965.531.000	100	6.852.841.620	100	6.941.898.453	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Taman)
	Persentase penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang ditindaklanjuti (%)	0	0	100	86.675.000	100	88.408.500	100	90.176.670	100	91.980.203	100	93.819.807	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Waru)
	Persentase penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang ditindaklanjuti (%)	0	0	100	15.750.000	100	16.065.000	100	66.386.300	100	66.714.026	100	67.048.307	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Gedangan)
	Persentase penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang ditindaklanjuti (%)	0	0	100	50.050.000	100	51.051.000	100	52.072.020	100	53.113.460	100	54.175.736	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Sedati)
	Persentase penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang ditindaklanjuti (%)	0	0	100	50.913.688	100	51.931.962	100	52.970.601	100	54.030.013	100	55.110.613	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Tanggulangin)
	Persentase penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang ditindaklanjuti (%)	0	0	100	50.475.000	100	51.484.500	100	52.514.190	100	53.564.474	100	54.635.763	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Tulangan)
	Persentase penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang ditindaklanjuti (%)	0	0	100	53.300.000	100	54.366.000	100	55.453.320	100	56.562.386	100	57.693.634	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Prambon)
	Persentase penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang ditindaklanjuti (%)	0	0	100	49.967.500	100	50.966.850	100	101.986.187	100	103.025.911	100	104.086.429	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Sukodono)
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					1.174.817.025,000		1.198.313.366,000		1.722.279.633,000		1.746.725.225,000		1.771.659.729,000	
Meningkatnya fungsi koordinasi pelaksanaan urusan trantibum diwilayah kecamatan	Persentase koordinasi pelaksanaan urusan trantibum diwilayah kecamatan yang difasilitasi (%)	100	100	100	33.300.000	100	33.966.000	100	84.645.320	100	85.338.226	100	86.044.991	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Sidoarjo)
	Persentase koordinasi pelaksanaan urusan trantibum diwilayah kecamatan yang difasilitasi (%)	100	100	100	25.650.000	100	26.163.000	100	76.686.260	100	77.219.985	100	77.764.385	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Candi)
	Persentase koordinasi pelaksanaan urusan trantibum diwilayah kecamatan yang difasilitasi (%)	100	100	100	68.248.544	100	69.613.515	100	71.005.785	100	72.425.901	100	73.874.419	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Buduran)
	Persentase koordinasi pelaksanaan urusan trantibum diwilayah kecamatan yang difasilitasi (%)	100	100	100	117.517.500	100	119.867.850	100	122.265.207	100	124.710.511	100	127.204.721	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Wonoyayu)
	Persentase koordinasi pelaksanaan urusan trantibum diwilayah kecamatan yang difasilitasi (%)	100	100	100	123.380.100	100	125.847.702	100	128.364.656	100	130.931.949	100	133.550.588	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Krian)
	Persentase koordinasi pelaksanaan urusan trantibum diwilayah kecamatan yang difasilitasi (%)	100	100	100	51.577.500	100	52.609.050	100	53.661.231	100	54.734.456	100	55.829.145	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Porong)
	Persentase koordinasi pelaksanaan urusan trantibum diwilayah kecamatan yang difasilitasi (%)	100	100	100	141.829.100	100	144.665.682	100	147.558.996	100	150.510.176	100	153.520.379	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Krembung)
	Persentase koordinasi pelaksanaan urusan trantibum diwilayah kecamatan yang difasilitasi (%)	100	100	100	34.952.500	100	35.651.550	100	86.364.581	100	87.091.872	100	87.833.710	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Jabon)
	Persentase koordinasi pelaksanaan urusan trantibum diwilayah kecamatan yang difasilitasi (%)	100	100	100	15.900.000	100	16.218.000	100	66.542.360	100	66.873.207	100	67.210.671	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Balongbendo)



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase koordinasi pelaksanaan urusan trantibum diwilayah kecamatan yang difasilitasi (%)	100	100	100	144.069.095	100	146.950.477	100	149.889.486	100	152.887.276	100	155.945.022	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Tarik)
	Persentase koordinasi pelaksanaan urusan trantibum diwilayah kecamatan yang dfasilitasi (%)	100	100	100	35.500.000	100	36.210.000	100	86.934.200	100	87.672.884	100	88.426.342	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Taman)
	Persentase koordinasi pelaksanaan urusan trantibum diwilayah kecamatan yang difasilitasi (%)	100	100	100	46.030.436	100	46.951.045	100	97.890.066	100	98.847.867	100	99.824.824	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Waru)
	Persentase koordinasi pelaksanaan urusan trantibum diwilayah kecamatan yang dfasilitasi (%)	100	100	100	112.045.000	100	114.285.900	100	116.571.618	100	118.903.050	100	121.281.111	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Gedangan)
	Persentase koordinasi pelaksanaan urusan trantibum diwilayah kecamatan yang difasilitasi (%)	100	100	100	81.128.000	100	82.750.560	100	84.405.571	100	86.093.683	100	87.815.556	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Sedati)
	Persentase koordinsi pelaksanaan urusan trantibum diwilayah kecamatan yang dfasilitasi (%)	100	100	100	37.714.250	100	38.468.535	100	89.237.906	100	90.022.864	100	90.823.117	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Tanggulangin)
	Persentase koordinasi pelaksanaan urusan trantibum diwilayah kecamatan yang dfasilitasi (%)	100	100	100	43.500.000	100	44.370.000	100	95.257.400	100	96.162.548	100	97.085.799	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Tulangan)
	Persentase koordinasi pelaksanaan urusan trantibum diwilayah kecamatan yang dfasilitasi (%)	100	100	100	39.775.000	100	40.570.500	100	91.381.910	100	92.209.548	100	93.053.739	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Prambon)
	Persentase koordinasi pelaksanaan urusan trantibum diwilayah kecamatan yang dfasilitasi (%)	100	100	100	22.700.000	100	23.154.000	100	73.617.080	100	74.089.422	100	74.571.210	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Sukodono)
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					1.985.649.030,000		2.025.362.011,000		2.165.869.250,000		2.207.186.635,000		2.249.330.368,000	
Meningkatnya Efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan umum di kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dilaksanakan dengan baik (%)	100	100	100	180.050.000	100	183.651.000	100	187.324.020	100	191.070.500	100	194.891.910	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Sidoarjo)
	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dilaksanakan dengan baik (%)	100	100	100	101.282.600	100	103.308.252	100	105.374.417	100	107.481.905	100	109.631.543	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Candi)
	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dilaksanakan dengan baik (%)	100	100	100	27.455.000	100	28.004.100	100	78.564.182	100	79.135.466	100	79.718.175	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Buduran)
	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dilaksanakan dengan baik (%)	100	100	100	140.571.800	100	143.383.236	100	146.250.901	100	149.175.919	100	152.159.437	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Wonoayu)
	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dilaksanakan dengan baik (%)	98	98	98	100.834.700	98	102.851.394	98	104.908.422	98	107.006.590	98	109.146.722	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Krian)
	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dilaksanakan dengan baik (%)	100	100	100	53.953.260	100	55.032.325	100	56.132.972	100	57.255.631	100	58.400.744	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Porong)
	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dilaksanakan dengan baik (%)	100	100	100	147.402.170	88	150.350.213	88	153.357.218	88	156.424.362	88	159.552.849	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Krembung)
	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dilaksanakan dengan baik (%)	100	100	100	120.312.500	100	122.718.750	100	125.173.125	100	127.676.588	100	130.230.119	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Jabon)
	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dilaksanakan dengan baik (%)	100	100	100	150.749.000	100	153.763.980	100	156.839.260	100	159.976.045	100	163.175.566	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Balongbendo)
	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dilaksanakan dengan baik (%)	100	100	100	131.795.367	100	134.431.274	100	137.119.900	100	139.862.298	100	142.659.544	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Tarik)
	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dilaksanakan dengan baik (%)	100	100	100	177.667.725	100	181.221.080	100	184.845.501	100	188.542.411	100	192.313.259	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Taman)
	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dilaksanakan dengan baik (%)	100	100	100	142.748.263	100	145.603.228	100	148.515.293	100	151.485.599	100	154.515.311	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Waru)
	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dilaksanakan dengan baik (%)	100	100	100	32.550.000	100	33.201.000	100	83.865.016	100	84.542.319	100	85.233.167	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Gedangan)
	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dilaksanakan dengan baik (%)	100	100	100	150.088.530	100	153.090.301	100	156.152.107	100	159.275.149	100	162.460.652	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Sedati)
	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dilaksanakan dengan baik (%)	100	100	100	93.828.845	100	95.705.422	100	97.619.530	100	99.571.921	100	101.563.359	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Tanggulangin)
	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dilaksanakan dengan baik (%)	100	100	100	52.169.770	100	53.213.165	100	54.277.429	100	55.362.977	100	56.470.237	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Tulangan)
	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dilaksanakan dengan baik (%)	100	100	100	70.041.000	100	71.441.820	100	72.870.656	100	74.328.070	100	75.814.631	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Prambon)
	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dilaksanakan dengan baik (%)	100	100	100	112.148.500	100	114.391.470	100	116.679.299	100	119.012.885	100	121.393.143	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Sukodono)
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					488.334.644,000		497.101.337,000		1.256.043.364,000		1.265.164.232,000		1.274.467.516,000	
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah desa melalui pembinaan dan pengawasan berkelanjutan	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu (%)	100	100	100	68.375.000	100	69.742.500	100	71.137.350	100	72.560.097	100	74.011.299	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Sidoarjo)
	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu (%)	100	100	100	15.180.000	100	15.483.600	100	65.793.272	100	66.109.137	100	66.431.320	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Candi)



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu. (%)	100	100	100	23.700.000	100	24.174.000	100	74.657.480	100	75.150.630	100	75.653.642	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Buduran)
	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu. (%)	100	100	100	13.500.000	100	13.770.000	100	64.045.400	100	64.326.308	100	64.612.834	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Wonoyayu)
	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu. (%)	98	98	98	36.495.000	98	37.224.900	98	37.969.398	98	38.728.786	98	39.503.362	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Krian)
	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu. (%)	100	100	100	19.173.210	100	19.556.674	100	69.947.808	100	70.346.764	100	70.753.699	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Porong)
	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu. (%)	100	100	100	24.187.500	100	24.671.250	100	75.164.675	100	75.667.969	100	76.181.328	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Krembung)
	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu. (%)	100	100	100	22.201.434	100	22.645.463	100	73.098.372	100	73.560.339	100	74.031.546	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Jabon)
	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu. (%)	100	100	100	35.025.000	100	35.725.500	100	86.440.010	100	87.168.810	100	87.912.186	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Balongbendo)
	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu. (%)	100	100	100	33.225.000	100	33.889.500	100	84.567.290	100	85.258.636	100	85.963.809	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Tarik)
	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu. (%)	100	100	100	19.350.000	100	19.737.000	100	70.131.740	100	70.534.375	100	70.945.062	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Taman)
	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu. (%)	100	100	100	20.977.500	100	21.397.050	100	71.824.991	100	72.261.491	100	72.706.721	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Waru)
	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu. (%)	100	100	100	38.700.000	100	39.474.000	100	90.263.480	100	91.068.750	100	91.890.125	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Gedangan)
	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu. (%)	100	100	100	17.475.000	100	17.824.500	100	68.180.990	100	68.544.610	100	68.915.502	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Sedati)
	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu. (%)	100	100	100	58.520.000	100	58.690.400	100	58.864.208	100	59.041.492	100	59.222.322	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Tanggulangin)
	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu. (%)	100	100	100	10.987.500	100	11.207.250	100	61.431.395	100	61.660.023	100	61.893.223	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Tulangan)
	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu. (%)	100	100	100	11.987.500	100	12.227.250	100	62.471.795	100	62.721.231	100	62.975.656	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Prambon)
	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu. (%)	100	100	100	19.275.000	100	19.660.500	100	70.053.710	100	70.454.784	100	70.863.880	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Kecamatan Sukodono)
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					58.123.013.332.000		58.512.013.332.000		58.663.013.332.000		118.680.013.332.000		129.413.013.332.000	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.701.153.332.000		6.701.153.332.000		6.701.153.332.000		6.701.153.332.000		6.701.153.332.000	
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah	Nilai Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah (Nilai)	3.256	3.332	3.451	6.701.153.332.000	3.652	6.701.153.332.000	3.792	6.701.153.332.000	3.891	6.701.153.332.000	4.012	6.701.153.332.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	75,59	76,79	77,89		78,29		79,89		80,01		80,29		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (Nilai)	96,48	95,01	95,9		96,05		96,51		96,79		97,01		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Persentase Rata-Rata Capaian Program Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah (%)	98,90	90	90		90		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					3.300.000.000.000		3.409.000.000.000		3.455.000.000.000		3.417.000.000.000		3.575.000.000.000	
Meningkatnya wawasan kebangsaan dan ideologi	Tingkat pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap wawasan kebangsaan dan ideologi pancasila (%)	100	100	100	3.300.000.000.000	100	3.409.000.000.000	100	3.455.000.000.000	100	3.417.000.000.000	100	3.575.000.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					12.361.860.000.000		12.446.860.000.000		12.456.860.000.000		12.466.860.000.000		12.936.860.000.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak politiknya	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam PEMILU (Pilkada, Pilg dan Pilpres) (%)	81,16	0	0	12.361.860.000.000	0	12.446.860.000.000	0	12.456.860.000.000	82	12.466.860.000.000	82	12.936.860.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					31.800.000.000.000		31.885.000.000.000		31.895.000.000.000		91.905.000.000.000		101.925.000.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya peran Organisasi Kemasyarakat dalam pembangunan	Persentase ormas yang tercatat aktif (%)	80	80	80	31.800.000.000,000	81	31.885.000.000,000	82	31.895.000.000,000	83	91.905.000.000,000	84	101.925.000.000,000	Dinas/Badan yang menagangi Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					1.500.000.000,000		1.510.000.000,000		1.570.000.000,000		1.580.000.000,000		1.600.000.000,000	
Menurunnya konflik IPOLEKSOSBUD yang menimbulkan ancaman, tantangan, gangguan dan hambatan	Persentase konflik IPOLEKSOSBUD yang terselesaikan (%)	100	100	100	1.500.000.000,000	100	1.510.000.000,000	100	1.570.000.000,000	100	1.580.000.000,000	100	1.600.000.000,000	Dinas/Badan yang menagangi Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					2.460.000.000,000		2.560.000.000,000		2.585.000.000,000		2.610.000.000,000		2.675.000.000,000	
Meningkatnya penyelesaian konflik yang terjadi di masyarakat	Persentase Konflik yang terselesaikan (%)	100	100	100	2.460.000.000,000	100	2.560.000.000,000	100	2.585.000.000,000	100	2.610.000.000,000	100	2.675.000.000,000	Dinas/Badan yang menagangi Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
TOTAL KESELURUHAN					5.164.561.385.810,000		5.373.957.714.785,000		5.593.807.533.262,000		5.838.010.633.840,000		6.090.160.791.341,000	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dilaksanakan melalui penetapan indikator kinerja daerah, yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi-misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimanifestasikan dalam dokumen RPJMD. Berdasarkan hirarki lembaga yang dipisahkan dengan tugas pokok dan fungsi, maka indikator di bab ini dibagi menjadi dua, yaitu **Indikator Kinerja Utama (IKU)** dan **Indikator Kinerja Daerah (IKD)**. IKU adalah indikator makro yang menggambarkan tanggungjawab dan komitmen kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sedangkan Indikator Kinerja Daerah (IKD) menggambarkan ukuran keberhasilan terhadap program perangkat daerah. IKU dan IKD berlaku dari Tahun 2025 hingga Tahun 2030. Tahun 2030 merupakan tahun transisi yang pada pelaksanaannya akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode berikutnya.

Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut:

**Tabel 4.2 Penetapan Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Sidoarjo**

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun						Kondisi Akhir RPJMD
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	82,67	83,51	83,52	83,70	83,89	84,08	84,37	84,37
2	Tingkat Kemiskinan	%	4,53	4,52	4,30	4,18	4,02	3,75	3,49	3,49
3	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,54	6,00	6,07	6,11	6,16	6,22	6,27	6,27
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,49	6,48	6,47	6,46	6,45	6,44	6,43	6,43
5	Rasio Gini	Indeks	0,327	0,326	0,325	0,324	0,323	0,321	0,310	0,310
6	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	86,98	87,00	87,14	87,28	87,42	87,56	87,70	87,70
7	Indeks Infrastruktur Daerah	Indeks	0,850	0,858	0,865	0,873	0,881	0,888	0,896	0,896
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	53,35	65,08	65,16	65,24	65,32	65,39	65,47	65,47
9	Indeks Kesalehan Sosial	Indeks	87,33	87,35	87,37	87,39	87,41	87,44	87,46	87,46



Sedangkan Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program yang telah ditetapkan (*outcome*) atau kompositnya (*benefit*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan ditetapkan. Selanjutnya, indikator kinerja daerah dibagi menjadi 4 (empat) aspek, yaitu:

1. **Aspek Geografi dan Demografi**, menjelaskan letak geografis dan batas wilayah serta fungsi atau kontribusi daerah terhadap wilayah sekitar atau wilayah yang lebih luas. Kontribusi tersebut dapat berupa kontribusi ekonomi, infrastruktur, lingkungan hidup, dan lainnya sesuai dengan karakteristik daerah.
2. **Aspek Kesejahteraan Masyarakat**, merupakan suatu kondisi yang menggambarkan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya, dan olah raga; yang diukur melalui indikator makro sebagai indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan bidang ekonomi sosial.
3. **Aspek Daya Saing Daerah**, merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.
4. **Aspek Pelayanan Umum**, merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, sesuai dengan kewenangan urusan, baik wajib maupun pilihan, sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Indikator kinerja daerah (IKD) mencakup indikator makro pembangunan dan indikator kinerja kunci (IKK).

Secara detil indikator kinerja daerah (IKD) yang ditetapkan sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.3 di bawah ini.

**Tabel 4.3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan
Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo**

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	Target						KONDISI AKHIR RPJMD
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI									
	Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan									
1	Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)	kWh	6652,78	2.271,00	2.369,38	2.467,75	2.566,13	2.664,50	2.762,88	2.762,88
2	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (Akses Rumah Tangga terhadap Air Bersih Perpipaan)	%	31,12	32,99	36,63	40,28	43,92	47,56	50	50
3	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)	%	3,07	3,06	3,05	3,04	3,03	3,02	3,01	3,01
4	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	3,1	29,72	30,26	30,81	31,36	31,90	32,45	32,45
	Lingkungan Hidup Berkualitas									
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	53,35	65,08	65,16	65,24	65,32	65,39	65,47	65,47
6	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	19,5	26,1	27,1	28,1	29,1	30,1	31,1	31,1
7	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	58,99	59,19	59,39	59,59	59,79	59,99	60,19	60,19
	Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim									
8	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	78,06	76,76	74,88	73,1	71,4	69,78	68,23	68,23
9	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	TonCO2Eq	24.783,93	25.279,61	25.785,20	26.300,90	26.826,92	27.363,46	27.910,73	27.910,73
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
	Kesejahteraan Ekonomi									
10	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,54	6,00	6,07	6,11	6,16	6,22	6,27	6,27
11	Tingkat Kemiskinan	%	4,53	4,52	4,30	4,18	4,02	3,75	3,49	3,49
12	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,49	6,48	6,47	6,46	6,45	6,44	6,43	6,43
13	Rasio Gini	Indeks	0,327	0,326	0,325	0,324	0,323	0,321	0,310	0,310



NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	Target						KONDISI AKHIR RPJMD
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
14	PDRB Perkapita	Juta/Tahun	136,72	136,99	137,17	137,96	138,80	139,84	140,83	140,83
15	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	82,67	83,51	83,52	83,70	83,89	84,08	84,37	84,37
16	Indeks Zakat Nasional	Indeks	0,33	0,37	0,41	0,45	0,49	0,53	0,57	0,57
	Kesehatan untuk Semua									
17	Usia Harapan Hidup	Tahun	75,63	75,69	75,95	76,21	76,47	76,73	76,99	76,99
18	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 kelahiran hidup	88,5	88,40	88,30	88,20	88,10	88,00	87,90	87,90
19	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	%	10,60	10,36	9,99	9,61	9,24	7,97	7,64	7,64
20	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (<i>Treatment Success Rate</i>)	%	88,66	89,10	89,58	90,05	90,53	91,00	91,01	91,01
21	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	%	99,97	100	100	100	100	100	100	100
	Pendidikan Berkualitas yang Merata									
22	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia Di Atas 15 Tahun	Tahun	10,91	11,27	11,35	11,45	11,59	11,67	11,70	11,70
23	Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,22	15,23	15,25	15,32	15,41	15,47	15,51	15,51
	Perlindungan Sosial yang Adaptif									
24	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten	%	39,87	39,44	41,34	44,46	46,36	49,48	51,71	51,71
	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju									
25	Indeks Kesalehan Sosial	Indeks	87,33	87,35	87,37	87,39	87,41	87,44	87,46	87,46
26	Indeks Pelestarian Budaya	Indeks	92,55	92,56	92,57	92,58	92,59	92,60	92,61	92,61
	Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif									
27	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,183	0,176	0,166	0,161	0,157	0,152	0,147	0,147
28	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	%	-	2,18	2,20	2,22	2,25	2,27	2,29	2,29



NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	Target						KONDISI AKHIR RPJMD
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH									
	Daya Saing Sumber Daya Manusia									
29	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	18,34	18,35	18,36	18,37	18,38	18,39	18,40	18,40
	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi									
30	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	75,96	76,01	76,06	76,11	76,16	76,21	76,26	76,26
31	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	54,23	54,67	55,12	55,57	56,01	56,46	56,91	56,91
32	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	3,60	3,62	3,64	3,66	3,68	4,00	4,20	4,20
33	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%	-	11,51	11,90	12,30	12,69	13,09	13,10	13,10
34	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	48,57	48,02	48,60	48,61	48,62	48,64	48,65	48,65
35	Pertumbuhan PDRB Subsektor Perikanan	%	0,87	0,89	0,91	0,93	0,95	0,97	1,00	1,00
36	Pertumbuhan Kunjungan Wisata Domestik dan Mancanegara	%	-15,00	3,28	3,52	4,50	5,20	6,25	6,50	6,50
	Penerapan Ekonomi Hijau									
37	Indeks Ekonomi Hijau Kabupaten Sidoarjo	Indeks	65,26	68,79	69,52	70,25	70,97	71,70	72,43	72,43
38	Implementasi EBT	%	-	5,00	10,94	16,88	22,81	28,75	34,69	34,69
	Transformasi Digital									
39	Indeks Masyarakat Digital Indonesia	Indeks	45,80	45,82	46,22	46,62	47,01	47,41	47,42	47,42
40	Indeks Pemerintahan Digital (PEMDI)	Indeks	3,96*	4,10*	1,70	1,80	1,90	2,00	2,10	2,10
	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global									
41	Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	28,98	28,99	29,00	29,01	29,02	29,03	29,04	29,04
42	Ekspor Barang dan Jasa	%	10,14	10,97	11,84	12,70	13,57	14,43	14,45	14,45
	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi									
43	Indeks Infrastruktur Daerah	Indeks	0,850	0,858	0,865	0,873	0,881	0,888	0,896	0,896



NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	Target						KONDISI AKHIR RPJMD
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
44	Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	99,96	99,97	99,98	99,99	100,00	100,00	100,00	100,00
45	Indeks Desa	Indeks	34,91*	0,8270	0,8272	0,8274	0,8276	0,8278	0,8280	0,8280
46	Indeks Pemerataan Wilayah	Indeks	-	42,81	44,82	46,83	48,85	50,86	50,87	50,87
	Stabilitas Ekonomi Makro									
47	ICOR	Angka	5,96	5,32	5,42	5,42	5,41	5,41	5,40	5,40
48	Realisasi Investasi	Triliun Rupiah	17,046	15,68	15,70	15,72	15,74	15,76	15,78	15,78
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif									
49	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	86,98	87,00	87,14	87,28	87,42	87,56	87,70	87,70
50	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	87,04	87,05	87,25	87,45	87,65	87,85	88,05	88,05
51	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,65	4,66	4,67	4,68	4,69	4,70	4,71	4,71
52	Nilai SAKIP Daerah	Nilai	75,64	76,85	79,20	80,10	81,20	82,10	83,50	83,50
53	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Kriteria	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial									
54	Indeks Rasa Aman	Indeks	83,03	83,06	83,09	83,12	83,15	83,18	83,21	83,21
55	Indeks Toleransi	Indeks	86,64	86,65	86,66	86,67	86,68	86,69	86,70	86,70
3	Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah/ Indikator Kinerja Kunci									
3.1	Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Dasar									
3.1.1	Pendidikan									
56	Indeks Capaian SPM Pendidikan	Indeks	84,98 (Tuntas Madya)	86,54 (Tuntas madya)	87 (Tuntas madya)	87,5 (Tuntas madya)	88 (Tuntas madya)	88,5 (Tuntas madya)	90 (Tuntas Utama)	90 (Tuntas Utama)
57	Angka Partisipasi Sekolah PAUD (5-6 Tahun) (IS)	%	83	83,04	83,05	83,06	83,07	83,08	83,09	83,09



NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	Target						KONDISI AKHIR RPJMD
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
58	Angka Partisipasi Sekolah Dasmen (7-15 Tahun)	%	99,67	99,67	99,84	99,86	99,86	99,87	99,87	99,87
59	Angka Partisipasi Sekolah Kesetaraan (7-18 Tahun)	%	14,65	14,91	14,92	14,93	14,94	14,95	14,96	14,96
3.1.2	Kesehatan									
60	Angka Kematian Balita	per 1.000 Kelahiran Hidup	5,1	7,00	6.5	6,00	5.5	5,00	5,00	5,00
61	Persentase Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis	%	-	36	46	55	61	70	70	70
62	Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	%	102,3	95	95	95	95	95	95	95
63	Persentase Hipertensi dalam Pengendalian	%	95	80	80	80	80	80	80	80
64	Rasio Puskesmas terhadap Jumlah Penduduk	penduduk	1:70.000	1:70.000	1:69.000	1:68.000	1:67.000	1:66.000	1:65.000	1:65.000
3.1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
65	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air	Indeks	0,822*	0,826	0,830	0,836	0,840	0,846	0,850	0,850
3.1.4	Perumahan dan Kawasan Permukiman									
66	Indeks Infrastruktur Keciaptakaryaan	Indeks	0,246*	0,168	0,171	0,174	0,178	0,181	0,184	0,184
3.1.5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat									
67	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPPKU)	Indeks	-	80,05	80,15	80,25	80,45	80,75	81,15	81,15
68	Indeks Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat (IMSPM)	Indeks	-	80,15	80,3	80,45	80,75	81,1	81,5	81,5
69	Waktu Tanggap (<i>Response Time</i>) Penanganan Kebakaran	menit	18,34	18	18	17	17	16	16	16
3.1.6	Sosial									
70	Indeks Kesejahteraan Sosial	%	-	59,81	59,86	59,91	59,96	60,01	60,06	60,06
3.2	Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Non Dasar									
3.2.1	Tenaga Kerja									



NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	Target						KONDISI AKHIR RPJMD
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
71	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp/ Tk	154.919.042	162.592.379	170.163.061	177.633.134	185.004.591	192.279.370	199.459.363	199.459.363
3.2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
72	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	94,9	95,06	95,22	95,38	95,54	95,70	95,86	95,86
73	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	66,09	66,09	66,12	66,15	66,18	66,20	66,22	66,22
3.2.3	Pangan									
74	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	91,08	91,35	91,63	91,90	92,18	92,45	92,73	92,73
3.2.4	Pertanahan									
75	Persentase Lahan Sengketa dan Kebutuhan untuk Kepentingan Umum yang Diselesaikan	%	-	95	96	97	98	99	100	100
3.2.5	Lingkungan Hidup									
76	Indeks Kualitas Air	Indeks	49,71	65,79	65,89	65,99	66,09	66,19	66,29	66,29
77	Indeks Kualitas Udara	Indeks	71,91	77,63	77,73	77,83	77,93	78,03	78,13	78,13
78	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	25,28	40,66	40,66	40,66	40,66	40,66	40,66	40,66
3.2.6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
79	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Indeks	96,40	96,41	96,42	96,43	96,44	96,45	96,46	96,46
3.2.7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
80	Persentase Desa Mandiri	%	67,92	79,87	81,45	83,02	84,59	86,16	87,74	87,74
3.2.8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
81	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	67,55	67,60	67,70	68,00	68,50	69,00	69,50	69,50
82	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Indeks	61,8	63,3	65,1	66,6	68,2	69,6	69,8	69,8
3.2.9	Perhubungan									
83	Indeks Infrastruktur Perhubungan	indeks	0,067	0,52	0,60	0,69	0,78	0,86	0,95	0,95
84	Rasio Konektivitas	Nilai	-	0,61	0,67	0,72	0,77	0,82	0,86	0,86
85	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten	Nilai	-	0,80	0,78	0,76	0,74	0,72	0,70	0,70
3.2.10	Komunikasi dan Informatika									



NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	Target						KONDISI AKHIR RPJMD
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
86	Tingkat Kematangan Aspek Pemerintahan Digital	Nilai	3,62*	3,65*	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	1,9
3.2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah									
87	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	-	0,45	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	0,9
88	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Mandiri	%	-	7,2	7,25	7,30	7,35	7,40	7,45	7,45
3.2.12	Penanaman Modal									
89	Nilai Realisasi Investasi PMDN	Triliun Rupiah	12,09	11,19	11,24	11,30	11,36	11,40	11,45	11,45
3.2.13	Kepemudaan dan Olahraga									
90	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	Indeks	0,263	0,275	0,290	0,310	0,325	0,340	0,350	0,350
91	Persentase Peningkatan Prestasi di Bidang Kepemudaan	%	14,67	16,28	17	17,95	18,84	18,90	19,49	19,49
3.2.14	Statistik									
92	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	2,51	2,60	2,60	2,70	2,75	2,80	2,85	2,85
3.2.15	Persandian									
93	Indeks KAMI (Indeks Keamanan Informasi)	Indeks	551*	615	647	659	670	681	690	690
3.2.16	Kebudayaan									
94	Nilai Dimensi Warisan Budaya	Nilai	-	62,5	64	66	68	70	71	71
3.2.17	Perpustakaan									
95	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	83,97	84	84,5	85	85,5	86	86,5	86,5
3.2.18	Kearsipan									
96	Indeks Budaya Tertib Arsip Pemerintahan	Indeks	-	-	78,4	78,6	78,8	79,0	79,2	79,2
3.3	Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan									
3.3.1	Pariwisata									
97	Jumlah Kunjungan Wisatawan Kabupaten Sidoarjo	Orang	1.148.592	1.187.584	1.229.433	1.288.287	1.357.232	1.445.435	1.445.435	1.445.435
3.3.2	Kelautan dan Perikanan									



NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	Target						KONDISI AKHIR RPJMD
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
98	Volume Produksi Perikanan	ton	126.010,50	131.316,50	131.787,80	131.788,60	131.789,30	131.790,10	131.790,90	131.790,90
3.3.3	Pertanian									
99	Nilai Tukar Petani (NTP)	Indeks	121,786	121,786	121,787	121,788	121,790	121,792	121,794	121,794
3.3.4	Perdagangan									
100	Rasio PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	15,98	15,99	16,00	16,01	16,02	16,03	16,04	16,04
3.3.5	Perindustrian									
101	Peningkatan Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan	Milyar Rupiah	11.152,87	11.164,02	11.175,19	11.186,36	11.197,55	11.208,75	11.219,95	11.219,95
3.3.6	Transmigrasi									
102	Persentase Transmigran yang Diberangkatkan	%	0	100	100	100	100	100	100	100
3.4	Fokus Layanan Urusan Pemerintah Penunjang Urusan									
3.4.1	Perencanaan Pembangunan									
103	Nilai SAKIP Kabupaten Komponen Perencanaan dan Pengukuran	Nilai	47,75	47,80	47,85	47,90	47,95	48,00	48,05	48,05
3.4.2	Keuangan									
104	Persentase OPD yang Menyampaikan Laporan Realisasi APBD Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100
105	Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	Indeks	2,00	2,00	2,10	2,15	2,25	2,35	2,50	2,50
106	Persentase Peningkatan Pajak Daerah	%	8,06	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
3.4.3	Kepegawaian									
107	Nilai Sistem Merit	Nilai	337,5	337,5	338,0	338,0	338,5	338,5	339,0	339,0
3.4.4	Pendidikan dan Pelatihan									
108	Nilai Dimensi Kompetensi (dalam Indeks Profesionalitas ASN)	Nilai	29,6	29,6	29,7	30,0	30,5	31,0	32,0	32,0
3.4.5	Penelitian dan Pengembangan									
109	Tingkat Penyajian Kajian Berbasis Bukti	%	-	90	90,25	90,50	90,75	91,0	91,25	91,25
3.4.6	Kesatuan Bangsa dan Politik									



NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	Target						KONDISI AKHIR RPJMD
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
110	Indeks Harmoni Indonesia	Indeks	-	6,99	7,01	7,05	7,10	7,15	7,20	7,20
3.4.7	Pengawasan									
111	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi
3.4.8	Sekretariat Dewan									
112	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Sekretariat DPRD	Indeks	95,48	95,49	95,50	95,51	95,52	95,53	95,54	95,54
3.4.9	Sekretariat Daerah									
113	Indeks Kualitas Kebijakan	Indeks	84,63	84,64	84,84	85,04	85,24	85,44	85,64	85,64
114	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Indeks	4,47	4,51	4,54	4,56	4,58	4,60	4,61	4,61

Keterangan :

- Indikator baru, belum dilakukan pada tahun tersebut
- * Adanya perbedaan formulasi perhitungan

Bab V

Penutup

5.1 Pedoman Transisi

Sebagai upaya menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD ini berakhir, maka ditetapkan pedoman transisi sebagai berikut:

1. Permasalahan pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD ini, maka permasalahan pembangunan tersebut juga menjadi bagian dari RPJMD periode selanjutnya, agar dapat ditanggulangi dengan program-program pada periode selanjutnya.
2. Penyusunan RKPD masa transisi yang merupakan tahun pertama RPJMD periode selanjutnya berfungsi untuk menjembatani agar arah kebijakan pembangunan berjalan berkelanjutan.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan merupakan pedoman dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029. Tujuan dibuatnya kaidah pelaksanaan adalah menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Bupati Sidoarjo;
2. Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Bupati Sidoarjo dibantu oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan;

3. Seluruh Perangkat Daerah (PD) atau unit kerja yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya;
4. Setiap PD berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang menjabarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD dengan berpedoman pada RPJMD ini;
5. Penjabaran lebih lanjut RPJMD Tahun 2025-2029 untuk setiap tahunnya, disusun melalui RKPD Kabupaten Sidoarjo yang dalam penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan;
6. RKPD Kabupaten Sidoarjo harus menjadi acuan bagi setiap Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Renja PD yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja;
7. Berkaitan dengan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, RKPD Kabupaten Sidoarjo merupakan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dengan tetap mengacu pada target dan arah kebijakan tahunan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD;
8. Indikator kinerja utama dan indikator kinerja daerah akan menjadi acuan bagi Perangkat Daerah yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, dalam menjabarkannya menjadi indikator kinerja eselon dan jabatan fungsional secara berjenjang;
9. Perlu memperkuat peran pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029, dan melakukan sosialisasi baik kepada aparat Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan masyarakat sipil;
10. Berkaitan dengan program prioritas pemerintah daerah yang mempunyai hubungan dengan prioritas nasional dimana dimungkinkan pemerintah daerah tidak mampu membiayai, dapat dilaksanakan melalui skema kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (*Public Private Partnership*),

melalui pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* dari pelaku usaha daerah yang tersebar diberbagai daerah di Kabupaten Sidoarjo, dan kerjasama kemitraan dengan Lembaga Non Pemerintah Lainnya baik Lembaga Dalam Negeri maupun Lembaga Internasional dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

11. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan berkewajiban untuk melakukan pemantauan, fasilitasi, dan mediasi terhadap penjabaran RPJMD Tahun 2025-2029, ke dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD), di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
12. Jika dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) terjadi perubahan asumsi atau faktor eksternal yang menyebabkan target IKU/IKD/kinerja program RKPD lebih tinggi atau lebih rendah dari target RPJMD, maka dapat dilakukan penyesuaian dengan tetap mempertahankan target agregat pada akhir periode RPJMD.

Demikian Aturan Peralihan dan Kaidah Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029 sebagai acuan pelaksanaan. Hal-hal yang belum diatur dalam dokumen ini akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BUPATI SIDOARJO,
ttd

SUBANDI

